



**GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION
OF JAKARTA**

**REGIONAL REGULATION OF THE SPECIAL REGION
OF JAKARTA**

NUMBER 8 YEAR 2024

ABOUT

**REGIONAL LONG-TERM DEVELOPMENT PLAN
YEAR 2025-2045**

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (1) huruf c dan Pasal 263 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 600.2.1/3674/SJ Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemutakhiran Sasaran Provinsi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, seluruh Pemerintah Daerah diminta untuk segera menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 - c. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Jakarta memiliki peran dan fungsi yang strategis sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global namun masih menunggu diterbitkannya Keputusan Presiden mengenai Pemindahan Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, materi muatan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 perlu berpedoman pada materi muatan berdasarkan Surat Edaran Bersama dimaksud dan mengakomodir materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 103, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1010);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah badan perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024-2044 yang selanjutnya disebut RTRW adalah rencana tata ruang wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2044.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi Daerah yang diinginkan pada tahun 2045 sebagai hasil pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun yang selaras dengan Visi RPJPN Tahun 2025-2045.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Daerah untuk mewujudkan visi RPJPD Tahun 2025-2045 dengan memerhatikan Misi (Agenda) Pembangunan Nasional dalam RPJPN Tahun 2025-2045.
14. Arah Kebijakan adalah kerangka kerja dua puluh tahunan yang dijabarkan menjadi per lima tahunan guna mencapai target sasaran pokok dalam rangka mewujudkan Visi RPJPD Tahun 2025-2045.
15. Sasaran Pokok adalah gambaran rangkaian kinerja Daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025-2045 pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif.
16. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup RPJPD meliputi:
 - a. gambaran umum kondisi Daerah;
 - b. permasalahan dan isu strategis;

- c. Visi Daerah;
 - d. Misi Daerah; dan
 - e. arah kebijakan dan sasaran pokok.
- (2) Arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
- a. Arah Kebijakan Periode 2025-2029;
 - b. Arah Kebijakan Periode 2030-2034;
 - c. Arah Kebijakan Periode 2035-2039; dan
 - d. Arah Kebijakan Periode 2040-2045.
- (3) Arah kebijakan pada RPJPD periode berkenaan dijadikan sebagai dasar penyelarasan tujuan RPJMD.
- (4) Isi dan uraian RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJPD berfungsi sebagai:

- a. pedoman dalam penyusunan RPJMD dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pedoman penyusunan Visi, Misi dan program calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur untuk periode berkenaan; dan
- c. pedoman penyusunan kebijakan rencana aksi daerah dalam penyelesaian isu strategis.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pengendalian terhadap pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk melaksanakan Visi dan mewujudkan Misi pembangunan jangka panjang daerah.

Pasal 5

- (1) Evaluasi terhadap RPJPD mencakup realisasi sasaran pokok untuk melaksanakan Misi dan mewujudkan Visi pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) Evaluasi dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB IV

PERUBAHAN RPJPD

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Tata cara perubahan RPJPD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Gubernur yang belum memiliki RPJMD, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD serta kebijakan perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dalam hal terdapat ketentuan dalam Peraturan Daerah ini yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta berserta perubahannya, ketentuan tersebut berlaku setelah diterbitkannya Keputusan Presiden mengenai Pemindahan Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

TEGUH SETYABUDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2024

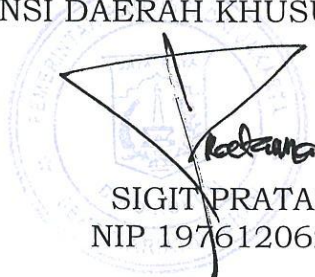
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2024 NOMOR 104

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SIGIT PRATAMA YUDHA
NIP 197612062002121009

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA : (8-317/2024)

TAHUN
2025
2045

RPJPD

**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH**



JAKARTA
COMPETITIVE

**GLOBAL
CITY**

PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Dasar Hukum	3
1.4. Hubungan Antardokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya	5
1.5. Sistematika Penulisan	7
BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	9
2.1. Sejarah Jakarta	9
2.2. Aspek Geografi dan Demografi	11
2.2.1 Geografi	11
2.2.2 Demografi	23
2.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	28
2.3.1 Kesejahteraan Ekonomi	28
2.3.2 Kesejahteraan Sosial Budaya	39
2.4. Aspek Daya Saing	50
2.4.1 Daya Saing Ekonomi Daerah	50
2.4.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia	57
2.4.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah	66
2.4.4 Daya Saing Iklim Investasi	94
2.5. Aspek Pelayanan Umum	101
2.5.1 Indeks Reformasi Birokrasi	101
2.5.2 Kepuasan Masyarakat	102
2.5.3 Pelayanan Publik	102
2.5.4 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	103
2.5.5 Inovasi Daerah	104
2.6. Hasil Evaluasi RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2005 – 2025	105
2.6.1 Capaian Indikator Makro Pembangunan	105

2.6.2	Rekomendasi Kebijakan Pembangunan.....	109
2.7.	Tren Demografi dan Kebutuhan Prasarana dan Sarana Pelayanan Publik	110
2.7.1	Tren Demografi.....	110
2.7.2	Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana.....	117
2.8.	Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah.....	127
2.8.1	Kebijakan Pengembangan Kewilayahan dalam Perspektif Provinsi	127
2.8.2	Kebijakan Pengembangan Kewilayahan dalam Perspektif Nasional.....	141
BAB 3	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	143
3.1.	Permasalahan Jakarta	143
3.2.	Tantangan Jakarta pasca Pemindahan Ibu Kota Negara.....	166
3.2.1	Permasalahan Kemacetan, Polusi, dan Banjir	166
3.2.2	Penurunan Belanja dan Pendapatan Daerah.....	167
3.2.3	Alih Fungsi dan Pemanfaatan Barang Milik Negara	168
3.2.4	Potensi Penurunan Daya Tarik	168
3.3.	Tantangan Global, Nasional dan Regional.....	169
3.3.1	Tantangan Global	169
3.3.2	Tantangan Nasional.....	172
3.3.3	Tantangan Regional Jabodetabekpunjur	175
3.4.	Tantangan Jakarta Menuju Kota Global yang Kompetitif	179
3.5.	Isu Strategis Jakarta	186
BAB 4	VISI DAN MISI	199
4.1	Visi	199
4.2	Sasaran Visi	201
4.3	Misi	203
4.4	Relevansi Misi dengan Isu Strategis	210
BAB 5	ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK	211
5.1	Arah Kebijakan	211
5.2	Sasaran Pokok.....	220
5.2.1	Arah Pembangunan Daerah.....	220
5.2.2	Arah Kebijakan Transformasi Daerah.....	221
5.2.3	Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan Daerah.....	239
5.2.4	<i>Game Changers</i>	260
5.4	Arah Pengembangan Kewilayahan.....	289
5.5	Kerangka Pendanaan Pembangunan.....	293
BAB 6	PENUTUP	305
6.1	Kaidah Pelaksanaan	305

6.1.1	Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan.....	306
6.1.2	Kerangka Pengendalian dan Evaluasi.....	306
6.1.3	Sistem Insentif.....	307
6.1.4	Mekanisme Perubahan	307
6.1.5	Komunikasi Publik.....	308
6.1.6	Pedoman Transisi	309
6.2	Pendanaan Pembangunan.....	309

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pembagian Wilayah Jakarta	12
Tabel 2.2 Panjang, Luas Sungai dan Peruntukan Sungai di Jakarta	15
Tabel 2.3 Suhu Udara Menurut Bulan di Jakarta 2018-2021	17
Tabel 2.4 Arus Komuter Antarwilayah di Jabodetabek Tahun 2023	27
Tabel 2.5 Indeks Ekonomi Hijau Jakarta 2017 – 2021	53
Tabel 2.6 Perbedaan Kriteria Rumah Layak Huni	81
Tabel 2.7 Jumlah Rumah Tangga berdasarkan Luas Lantai Per Kapita Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023	82
Tabel 2.8 Indikator Infrastruktur Energi Jakarta 2018 - 2022	89
Tabel 2.9 Jumlah Fasilitas Penunjang Pendidikan Tahun 2018 - 2023	91
Tabel 2.10 Jumlah Bank Berdasarkan Jenis Tahun 2018 - 2022	93
Tabel 2.11 Penanaman Modal di Jakarta 2018 - 2023	95
Tabel 2.12 Keamanan dan Ketertiban Tahun 2018 - 2022	97
Tabel 2.13 Lama Proses Perizinan Jakarta Tahun 2023	98
Tabel 2.14 Indeks Daya Saing Daerah Jakarta berdasarkan Tiga Pilar Daya Saing Tahun 2021 – 2023	99
Tabel 2.15 Hasil Evaluasi RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2005-2025	106
Tabel 2.16 Faktor yang Memengaruhi Perubahan Jumlah Penduduk Jakarta	115
Tabel 2.17 Daya Dukung dan Daya Tampung Air Jakarta	120
Tabel 2.18 Kebutuhan Energi Listrik Jakarta 2020 – 2050	122
Tabel 2.19 Data Titik SPBU, SPKLU, SPBKL, dan Depo BBM utama di Jakarta	124
Tabel 2.20 Proyeksi Kebutuhan Tempat Tidur Jakarta Tahun 2020 - 2045	125
Tabel 2.21 Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan Jakarta Tahun 2020 - 2045	126
Tabel 2.22 Sistem Pusat Pelayanan Jakarta	129
Tabel 2.23 Tujuan dan Arah Pengembangan Kawasan Strategis Jakarta dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi	133
Tabel 2.24 Tujuan dan Arah Pengembangan Kawasan Strategis Jakarta dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya	137
Tabel 2.25 Tujuan dan Arah Pengembangan Kawasan Strategis Jakarta dari Sudut Kepentingan Lingkungan Hidup	140
Tabel 2.26 Kebijakan dan Strategis Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur ..	142
Tabel 3.1 Data Pendukung Permasalahan Jakarta	158
Tabel 3.2 Karakteristik Kota Global yang Berdaya Saing	180
Tabel 3.3 Peringkat Jakarta dalam Indeks Kota Global	181

Tabel 3.4 Gap Kondisi Jakarta dan Kota Global	181
Tabel 3.5 Rumusan Isu Strategis Pembangunan Daerah Tahun 2025 - 2045.....	191
Tabel 4.1 Keselarasan Misi RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2025 – 2045 dengan Misi RPJPN 2025 – 2045	203
Tabel 5.1 Arah Kebijakan RPJPD Jakarta Tahun 2025 - 2045.....	211
Tabel 5.2 Arah Pembangunan Daerah 2025 – 2045	220
Tabel 5.3 Arah Kebijakan Transformasi Sosial.....	221
Tabel 5.4 Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi	224
Tabel 5.5 Arah Kebijakan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	233
Tabel 5.6 Arah Kebijakan Implementasi Transformasi.....	238
Tabel 5.7 Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan Daerah.....	249
Tabel 5.8 Sandingan Gamecahnger RPJPN 2025 – 2045 dengan RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2025 – 2045	280
Tabel 5.9 Besaran PDRB Masing-masing Wilayah Administrasi dan Kontribusinya terhadap PDRB Provinsi Tahun 2019 - 2023.....	290

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2025 – 2045 dengan Dokumen Lainnya	7
Gambar 2.1 Pelabuhan Sunda Kelapa	9
Gambar 2.2 Peta Administrasi Jakarta	12
Gambar 2.3 Peta Topografi Jakarta	13
Gambar 2.4 Peta Geologi Jakarta.....	14
Gambar 2.5 Peta Tematik Sungai di Jakarta	15
Gambar 2.6 Peta Curah Hujan Jakarta.....	16
Gambar 2.7 Perubahan Guna Lahan di Wilayah Jakarta Tahun 2008 (kiri) dan 2021 (kanan).....	18
Gambar 2.8 Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Daerah Jakarta 2016 – 2022.....	19
Gambar 2.9 Nilai Indeks Risiko Bencana Jakarta Tahun 2015 - 2023	20
Gambar 2.10 Peta Tingkat Kerawanan Banjir di Jakarta	21
Gambar 2.11 Peta Tingkat Kerawanan Kebakaran di Jakarta.....	22
Gambar 2.12 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Jakarta Tahun 2017-2023.....	23
Gambar 2.13 Piramida Penduduk Jakarta Tahun 2023	24
Gambar 2.14 Angka Kelahiran Total/ <i>Total Fertility Rate</i> (TFR) Jakarta Tahun 1971-2020	24
Gambar 2.15 Distribusi Penduduk Jakarta Tahun 2023	25
Gambar 2.16 Jumlah Mobilisasi Permanen dan Mobilisasi Nonpermanen	26
Gambar 2.17 Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Jakarta Tahun 2018 – 2023... ..	29
Gambar 2.18 Struktur dan Sumber Pertumbuhan Ekonomi	30
Gambar 2.19 Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita (ADHK) Jakarta Tahun 2018 – 2023	31
Gambar 2.20 Laju Inflasi Jakarta Tahun 2018 – 2023.....	31
Gambar 2.21 Perbandingan Capaian Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Jakarta dan Provinsi Lain di Pulau Jawa pada Tahun 2019 - 2023.....	33
Gambar 2.22 Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Jakarta Periode 2018 – 2023	34
Gambar 2.23 Rasio Gini Jakarta 2018 - 2023	34
Gambar 2.24 Tingkat Pengangguran Terbuka Jakarta 2018 – 2022.....	35
Gambar 2.25 Indeks Pembangunan Manusia Jakarta 2018 - 2023.....	37
Gambar 2.26 Usia Harapan Hidup (UHH) 2018 – 2023 (tahun).....	37
Gambar 2.27 Pengeluaran Per Kapita 2018 – 2023 (Rp ribu)	38

Gambar 2.28 Perbandingan Indeks Kualitas Keluarga (Metadata Baru) Jakarta dan Nasional pada Tahun 2021 dan 2022	39
Gambar 2.29 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Jakarta Tahun 2020 - 2023 ..	40
Gambar 2.30 Perbandingan Indeks Perlindungan Anak (IPA) Jakarta, Nasional, dan Provinsi Lain di Pulau Jawa pada Tahun 2019 – 2022.....	41
Gambar 2.31 Perbandingan Klaster dalam Indeks Perlindungan Anak (IPA) Jakarta dan Nasional pada Tahun 2021 dan 2022	42
Gambar 2.32 Perbandingan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Jakarta, Nasional, dan Provinsi Lain di Pulau Jawa pada Tahun 2016 – 2023.....	43
Gambar 2.33 Perbandingan Komponen dalam Indeks Pembangunan Gender (IPG) Jakarta dan Nasional pada Tahun 2020 dan 2023	44
Gambar 2.34 Perbandingan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Jakarta, Nasional, dan Provinsi Lain di Pulau Jawa pada Tahun 2018 - 2022.....	46
Gambar 2.35 Perbandingan Domain Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Jakarta dan Nasional pada Tahun 2019 dan 2020	47
Gambar 2.36 Perbandingan Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Jakarta, Nasional, dan Provinsi Lain di Pulau Jawa pada Tahun 2018 - 2022	48
Gambar 2.37 Perbandingan Capaian Dimensi Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Jakarta dan Nasional pada Tahun 2021 dan 2022	49
Gambar 2.38 PDRB 38 Provinsi Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2023 (Juta Rupiah)	50
Gambar 2.39 PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Jakarta Tahun 2019 – 2023	51
Gambar 2.40 Share Nilai Ekspor Impor Jakarta terhadap Nasional	52
Gambar 2.41 Perkembangan Ekspor Impor Jakarta Tahun 2018 – 2023	53
Gambar 2.42 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Jakarta 2017 – 2021	56
Gambar 2.43 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Jakarta berdasarkan Tiga Pilar 2017 – 2021	56
Gambar 2.44 Indeks Pendidikan, Rata-rata Lama Sekolah, dan Harapan Lama Sekolah Jakarta 2014 - 2022.....	57
Gambar 2.45 Perbandingan APK PAUD Jakarta dan Nasional pada tahun 2018/2019 hingga 2023/2024	58
Gambar 2.46 Perbandingan Perkembangan APK dan APM SD, SMP, dan SM Jakarta dan Nasional pada tahun 2016/2017 hingga 2023/2024	60
Gambar 2.47 Rasio Ketergantungan Jakarta 2018 - 2023.....	61
Gambar 2.48 Perbandingan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Jakarta, Nasional, dan Provinsi Lain di Pulau Jawa pada Tahun 2020 – 2023 (dalam Skala 0-100)*	62
Gambar 2.49 Perbandingan Unsur Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Jakarta dan Nasional pada Tahun 2022 dan 2023	63
Gambar 2.50 Indeks Literasi Digital Jakarta 2020 - 2022.....	64

Gambar 2.51 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Jakarta 2017-2022.....	65
Gambar 2.52 Sistem Jaringan Transportasi Jakarta	66
Gambar 2.53 Panjang (m), Luas (m ²), dan Kualitas Jalan dan di Jakarta Tahun 2023 .	67
Gambar 2.54 Jumlah Kendaraan Bermotor di Jakarta Tahun 2016 - 2023.....	68
Gambar 2.55 Pembangunan Jalur Sepeda di Jakarta.....	69
Gambar 2.56 Kinerja Jalan di Jakarta yang Dinyatakan dalam Waktu Tempuh dan Kecepatan Berkendara selama Seminggu pada Tahun 2023	70
Gambar 2.57 Kondisi Transportasi Publik di Jakarta.....	72
Gambar 2.58 Persebaran Pelabuhan di Jakarta.....	74
Gambar 2.59 Peta Rute Tol Laut Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2024	75
Gambar 2.60 Jumlah Muat dan Bongkar (atas) dan Jumlah Penumpang pada Pelayanan Nusantara dan Samudera melalui Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2017 – 2023	76
Gambar 2.61 Lokasi Bandara di dan sekitar Jakarta	77
Gambar 2.62 Rute dan Jumlah Penumpang yang Berangkat dan Tiba di Pelabuhan Udara Halim Perdanakusuma Tahun 2017 – 2023.....	78
Gambar 2.63 Jumlah Muat Bongkar Kargo Pelabuhan Udara Halim Perdanakusuma Tahun 2017 - 2023.....	79
Gambar 2.64 Peta Permukiman DKI Jakarta	80
Gambar 2.65 Rasio Jumlah Rumah Layak Huni terhadap Jumlah Rumah Tangga Provinsi DKI Jakarta 2018 – 2023.....	81
Gambar 2.66 Peta Lokasi Rumah Susun DKJ.....	83
Gambar 2.67 Pembagian Zona Pelayanan Air Minum Jakarta	84
Gambar 2.68 Wilayah Cakupan Pelayanan PDAM DKI Jakarta Wilayah Barat dan Timur	85
Gambar 2.69 Pelayanan Air Bersih dan Air Minum Provinsi DKI Jakarta 2019 – 2023.	85
Gambar 2.70 Peta Penyediaan Air Limbah	86
Gambar 2.71 Pengembangan Jakarta Sewerage System	87
Gambar 2.72 Persebaran TPS, TPS3R, dan TPST di Wilayah Jakarta	88
Gambar 2.73 Timbulan Sampah per Kota Administrasi.....	89
Gambar 2.74 Cakupan Layanan Jaringan Internet 4G dan 5G di Jakarta.....	90
Gambar 2.75 Jumlah Sekolah Negeri dan Swasta berdasarkan Tingkat Pendidikan di Jakarta 2017 dan 2023	91
Gambar 2.76 Jumlah Fasilitas Kesehatan Tahun 2023	92
Gambar 2.77 Jumlah Fasilitas Perdagangan dan Jasa Tahun 2023	93
Gambar 2.78 Jumlah Fasilitas Budaya Tahun 2023.....	94
Gambar 2.79 Jumlah Fasilitas Pariwisata Tahun 2023	94
Gambar 2.80 5 Besar Lokasi Realisasi (PMA & PMDN) Semester I 2023 di Indonesia.	96
Gambar 2.81 Indeks Daya Saing Daerah Jakarta 2021 – 2023.....	98
Gambar 2.82 Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2018 - 2023.....	101

Gambar 2.83 Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2018 - 2023.....	102
Gambar 2.84 Indeks Pelayanan Publik Tahun 2023.....	103
Gambar 2.85 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2019 - 2023 ..	103
Gambar 2.86 Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021 - 2023	104
Gambar 2.87 Proyeksi Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Jakarta Tahun 2020 - 2045.....	111
Gambar 2.88 Proyeksi Kepadatan Penduduk Jakarta Tahun 2020 - 2045.....	111
Gambar 2.89 Proyeksi Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin Jakarta Tahun 2020 - 2045.....	112
Gambar 2.90 Proyeksi Penduduk berdasarkan Kelompok Umur Jakarta Tahun 2020 - 2045.....	112
Gambar 2.91 Proyeksi Struktur Penduduk Jakarta Tahun 2025 – 2045	114
Gambar 2.92 Rasio Ketergantungan Jakarta Tahun 2020 - 2045.....	116
Gambar 2.93 Proyeksi Kebutuhan Hunian Jakarta Tahun 2020 - 2045.....	118
Gambar 2.94 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Jakarta Tahun 2020 – 2045.....	119
Gambar 2.95 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.....	121
Gambar 2.96 Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan Jakarta Tahun 2020 - 2045	122
Gambar 2.97 Jumlah Rumah Sakit di Jakarta berdasarkan Tipe.....	124
Gambar 2.98 Proyeksi Kebutuhan Puskesmas dan Posyandu Jakarta Tahun 2020 - 2045.....	125
Gambar 2.99 Penetapan Struktur Ruang dan Sistem Pelayanan Pusat	128
Gambar 2.100 Penetapan Kawasan Strategis Provinsi DKI Jakarta.....	132
Gambar 3.1 Estimasi Belanja Jakarta Akibat Pemindahan IKN	168
Gambar 3.2 Tantangan Pembangunan Global.....	169
Gambar 3.3 Konsideran Perumusan Isu Strategis Jakarta 2025 – 2045	187
Gambar 4.1 Sasaran Visi Jakarta Kota Global yang Maju, Berkeadilan, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan.....	201
Gambar 4.2 Delapan Misi (Agenda) Pembangunan Nasional 2045.....	203
Gambar 4.3 Relevansi Misi terhadap Isu Strategis.....	210
Gambar 5.1 Tahapan Implementasi Rencana Jangka Panjang Jakarta 2025 -2045 ..	219
Gambar 5.2 <i>Interconnection Map</i> antar Sektor.....	260
Gambar 5.3 Proyeksi Target Indikator Makro Pembangunan sebagai Pertimbangan Arah Kebijakan Prioritas.....	262
Gambar 5.4 Arah Kebijakan Transformasi Prioritas <i>Game Changer</i> 1	263
Gambar 5.5 Arah Kebijakan Transformasi Prioritas <i>Game Changer</i> 2	267
Gambar 5.6 Arah Kebijakan Tranformasi Prioritas <i>Game Changer</i> 3	270
Gambar 5.7 Arah Kebijakan Transformasi Prioritas <i>Game Changer</i> 4	271
Gambar 5.8 Arah Kebijakan Transformasi Prioritas <i>Game Changer</i> 5	273
Gambar 5.9 Arah Kebijakan Transformasi Prioritas <i>Game Changer</i> 6	276
Gambar 5.10 Arah Kebijakan Transformasi Prioritas <i>Game Changer</i> 7	278

Gambar 5.11 Arah Pengembangan Wilayah berdasarkan Potensi Ruang Eksisting ...	289
Gambar 5.12 Kontribusi Wilayah terhadap Perekonomian Jakarta Tahun 2023 dan 2045	290
Gambar 5.13 Kebutuhan Pembiayaan Infrastruktur Jakarta Menuju Kota Global	295





BAB 01

Pendahuluan

Jakarta sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global, berfungsi sebagai pusat perdagangan, pusat kegiatan layanan jasa dan layanan jasa keuangan, serta kegiatan bisnis dan global.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada tahun 2027 Jakarta akan menginjak usia 500 tahun. Dalam perkembangannya selama lima dekade, Jakarta telah bertransformasi dan menjadi pusat kegiatan ekonomi terbesar di Indonesia. Berdasarkan data dari BPS Provinsi tahun 2022, perekonomian Jakarta yang dihitung berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai 3.442,87 triliun rupiah. Dengan nilai tersebut, Jakarta menyumbang proporsi pada Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sekitar 16,6 persen, tertinggi dibanding daerah lainnya. Dalam konteks kependudukan, Jakarta yang merupakan tempat tinggal bagi 10,6 juta orang dengan bonus demografi sebesar 71,28 persen di antaranya berada di usia produktif. Dengan kondisi tersebut, Jakarta berpotensi menjadi sebuah wilayah yang tidak hanya kompetitif secara ekonomi namun juga nyaman untuk dihuni.

Saat ini Jakarta sedang menghadapi tantangan baru dan perubahan fungsi seiring perpindahan status ibu kota negara ke Kalimantan Timur sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Setelah pemindahan ibu kota ini, Presiden RI telah memberikan arahan kepada Jakarta untuk bertransisi menjadi pusat perekonomian nasional dan kota bisnis berskala global, dengan tetap mempertahankan momentum pertumbuhannya. Arahan tersebut tentu menjadi acuan visi pembangunan Jakarta untuk mendukung kesuksesan pembangunan Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan Jakarta kota bisnis berskala global, Jakarta perlu menjadi bagian dari kota global itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma pembangunan dari lingkup lokal/nasional menjadi global. Perencanaan pembangunan Jakarta tidak hanya melihat ketercapaian pembangunan dengan berkaca dari provinsi atau kota-kota lain di Indonesia, namun juga melihat perkembangan kota-kota dunia lainnya. Walaupun dalam konteks daya saing global Jakarta sudah memiliki predikat kota global, nyatanya Jakarta belum cukup kompetitif bersaing dengan kota-kota global lainnya. Dalam skala regional, Jakarta dapat dikatakan masih tertinggal dari kota-kota lain di Asia Tenggara, seperti Singapura, Bangkok, dan Kuala Lumpur. Hal ini berarti Jakarta perlu melakukan akselerasi pembangunan untuk dapat mengejar ketertinggalan dan meningkatkan daya saing global.

Dalam melakukan akselerasi pembangunan untuk meningkatkan daya saingnya sebagai kota global, Jakarta masih memiliki permasalahan fundamental yang dihadapi dan perlu diatasi, seperti kepadatan dan mobilitas penduduk, daya saing tenaga kerja, permukiman

kumuh, kemacetan, polusi udara, perubahan iklim, banjir, rob, dan penurunan permukaan tanah, persampahan, hingga akses air bersih. Selain itu tantangan dan peluang *megatrend global*, seperti perkembangan dinamika geopolitik, perubahan konstelasi perdagangan global, perkembangan teknologi, pemanfaatan sumber daya alam, hingga perubahan iklim juga perlu diperhatikan dalam menyusun arah kebijakan Jakarta ke depan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024, Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 600.1/176/SJ Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang diperbarui dengan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 600.2/3674/SJ Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemutakhiran Sasaran Pembangunan Provinsi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045, Jakarta perlu menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025 – 2045 sebagai keberlanjutan dari pembangunan jangka panjang Provinsi DKI Jakarta periode 2005-2025. RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2025 – 2045 menjadi refleksi lima abad berdirinya Jakarta dan momentum untuk menguatkan kembali visi, misi, dan arah pembangunan Jakarta guna mewujudkan cita-cita besar menjadi kota berdaya saing internasional. Diharapkan selama 20 tahun ke depan Jakarta dapat menyejahterakan penduduknya, berkontribusi nyata untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta memiliki daya saing dan berdiri setara dengan kota-kota global lainnya.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 – 2045 antara lain:

1. Memberikan landasan operasional, pedoman penyelenggaraan dan arah pembangunan Jakarta dalam kurun 20 tahun ke depan;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi DKI Jakarta selama empat periode ke depan;
3. Menjadi pedoman penyusunan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta; dan
4. Memberikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam pelaksanaan pembangunan Jakarta.

Adapun tujuan dari tersusunnya RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 – 2045 adalah:

1. Menjamin terwujudnya konsistensi antara perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;

2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah dalam konteks antar ruang, antar waktu, antar urusan, dan antar fungsi pemerintahan;
3. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan antar dokumen pembangunan;
4. Menjabarkan visi, misi, arah kebijakan, sasaran pokok, serta target pembangunan untuk 20 tahun ke depan, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, mewujudkan pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan daya saing global;
5. Mewujudkan arah pembangunan Jakarta selama 20 tahun ke depan dalam rangka mendukung visi Indonesia Emas 2045.

1.3. Dasar Hukum

Dalam penyusunannya, RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2025 – 2045 dilandasi oleh beberapa peraturan perundangan yang terkait. Adapun peraturan perundangan tersebut, setidaknya mencakup:

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- d. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- f. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- g. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- n. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- o. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 600.1/176/SJ Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
- p. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 600.2/3674/SJ Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemutakhiran Sasaran Pembangunan Provinsi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045

- q. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1) sebagaimana mana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 202);
- r. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 27);
- s. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 103, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1010).

1.4. Hubungan Antardokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya

Dokumen RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2025 – 2045 disusun dengan mengacu dan memperhatikan dokumen pembangunan lainnya. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 hubungan dokumen RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2025 – 2045 adalah sebagai berikut:

- a. **Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 – 2045**
Penyusunan RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2025 – 2045 selaras dan berpedoman kepada RPJPN 2025 – 2045, terutama terkait arah kebijakan kewilayahan, arah pembangunan, dan kinerja/indikator yang sesuai dengan kewenangan, karakteristik, inovasi dan pengembangan Jakarta.
- b. **Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTRW Pulau Jawa**
RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2025-2045 juga mempertimbangkan substansi KLHS RTRW Pulau Jawa meliputi (i) kebencanaan; (ii) kualitas dan kuantitas sumber daya air; (iii) persampahan dan limbah padat (iv) ketimpangan pembangunan; (v) alih fungsi lahan; dan (vi) kawasan kumuh.
- c. **Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta 2025 – 2045**
Penyusunan RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2025 – 2045 berpedoman, serta dilakukan secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 – 2044. Adapun muatan RTRW yang dipedomani dan perlu diperhatikan di antaranya adalah arah pengembangan kewilayahan.

d. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta 2022 – 2052

Selain dokumen RPJPN dan RTRW, RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2025 – 2045 juga memperhatikan RPPLH Provinsi DKI Jakarta 2022 – 2052, dengan substansi yang menjadi perhatian melingkupi kebijakan pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam, rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan fungsi lingkungan hidup, rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam, serta kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

e. Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2025 – 2045

Dokumen lingkungan lain yang menjadi perhatian pada penyusunan RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2025 – 2045 lainnya adalah KLHS RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2025 – 2045, yang merupakan dokumen pelengkap bagi dokumen RPJPD provinsi sesuai dengan pedoman Permendagri No. 7 Tahun 2018. Muatan KLHS yang menjadi perhatian pada penyusunan dokumen ini meliputi tujuan pembangunan berkelanjutan, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta isu-isu strategis hasil penapisan.

f. Hasil Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi DKI Jakarta 2025 – 2045

Dalam rangka menerapkan asas kontinuitas dan konsistensi penyusunan, RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2025 – 2045 memperhatikan Hasil Evaluasi RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2005 – 2025. Substansi Hasil Evaluasi RPJPD periode sebelumnya yang perlu diperhatikan, yaitu hasil capaian pembangunan dan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi.

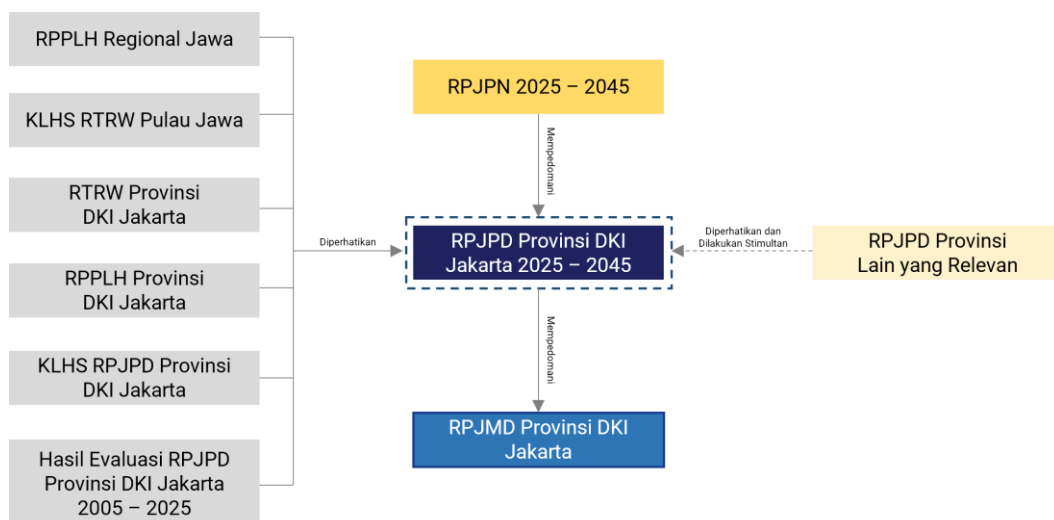
g. Dokumen Perencanaan Pembangunan Sektorial Lainnya

Penyusunan RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2025 – 2045 memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan sektoral lainnya yang relevan dan dapat diadopsi ke dalam perencanaan pembangunan Jangka Panjang.

h. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi DKI Jakarta

Dokumen RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2025 – 2045 akan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMD dalam empat periode ke depan. Adapun substansi yang diacu, terutama, tema pembangunan dan arah kebijakan pada masing-masing periode RPJPD 2025 – 2045, serta sasaran pokok dan indikator sasaran pokok. Adapun dokumen RPJMD akan menjabarkan program pembangunan berdasarkan visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pada RPJPD kepada dokumen-dokumen lainnya, seperti Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), hingga dokumen-dokumen pembangunan tematik lainnya.

RPJPD JAKARTA 2025-2045



Gambar 1.1 Hubungan RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2025 – 2045 dengan Dokumen Lainnya

Sumber: Inmendagri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025 – 2045, diolah oleh Tim Penyusun

1.5. Sistematika Penulisan

Muatan dokumen RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2025 – 2045 dituangkan dalam bab per bab dengan dijabarkan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini memuat penjelasan latar belakang penyusunan; maksud dan tujuan penyusunan; dasar hukum penyusunan; hubungan antardokumen; dan sistematika penulisan RPJPD 2025 – 2045.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bagian ini memuat penjelasan secara logis dasar-dasar analisis gambaran umum kondisi daerah yang meliputi: aspek geografi dan demografi; aspek kesejahteraan masyarakat; aspek daya saing; aspek pelayanan umum; evaluasi hasil RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005 - 2025; tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik, pengembangan pusat pertumbuhan wilayah dan Jakarta dalam konteks kota global.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bagian ini menjelaskan tentang permasalahan dan isu strategis pembangunan untuk periode 20 tahun mendatang, baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kondisi daerah secara signifikan di masa depan. Permasalahan tersebut didapat dari analisis kondisi eksisting dengan kondisi ideal yang diharapkan.

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

Bagian ini menjelaskan tentang visi, sasaran visi utama dan misi pembangunan daerah yang ingin diwujudkan hingga tahun 2045.

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Bagian ini menjelaskan tentang arah kebijakan pada masing-masing misi, sasaran pokok dan 4 (empat) tahapan pembangunan jangka menengah.

BAB VI PENUTUP

Bagian ini menyampaikan dengan singkat harapan pencapaian RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2025 – 2045 yang telah ditetapkan





BAB 02

Gambaran Umum Kondisi Daerah

Jakarta memiliki potensi dan peluang yang besar untuk menjadi pusat perekonomian nasional dan kota global yang berdaya saing, serta memiliki peran dan karakter kuat untuk dikenal dunia

BAB 2

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Sejarah Jakarta

Jakarta memiliki sejarah panjang dan kaya yang mencerminkan transformasi dari sebuah pelabuhan kecil hingga menjadi salah satu kota metropolitan terbesar di dunia. Terletak di pesisir barat laut Pulau Jawa, Jakarta telah menjadi pusat perdagangan, politik, dan budaya selama berabad-abad. Sejarah Jakarta bermula dari Sunda Kelapa, sebuah pelabuhan yang penting pada abad ke-4 dan ke-5 Masehi. Sunda Kelapa adalah bagian dari Kerajaan Tarumanegara, yang dikenal sebagai salah satu kerajaan tertua di Nusantara. Pelabuhan ini menjadi pusat perdagangan yang ramai, menarik pedagang dari berbagai penjuru, termasuk India, Tiongkok, dan Timur Tengah. Barang-barang seperti rempah-rempah, emas, dan tekstil diperdagangkan di sini, menjadikan Sunda Kelapa sebagai pintu gerbang ekonomi yang signifikan di Asia Tenggara. Pada abad ke-16, Sunda Kelapa berada di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda. Tahun 1527 menjadi momen penting ketika Fatahillah, seorang panglima dari Kesultanan Demak, merebut pelabuhan ini dari tangan Portugis yang telah mendirikan benteng di sana. Fatahillah mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, yang berarti "Kemenangan yang Gemilang." Penaklukan ini menandai awal dari era Islam di Jakarta dan perkembangan kota sebagai pusat politik dan militer.



Gambar 2.1 Pelabuhan Sunda Kelapa

Sumber: *PT Pembangunan JAYA, 2021*

Pada tahun 1619, VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) atau Perusahaan Hindia Timur Belanda, di bawah komando Jan Pieterszoon Coen, berhasil menaklukkan Jayakarta dan menghancurkannya. Di atas reruntuhan Jayakarta, Belanda membangun kota baru yang dinamai Batavia. Batavia kemudian berkembang menjadi pusat pemerintahan kolonial Belanda di Nusantara. Kota ini dirancang dengan kanal-kanal seperti di Amsterdam dan menjadi pusat perdagangan rempah-rempah yang penting. Selama masa kolonial, Batavia juga dikenal dengan infrastruktur modern seperti jalan raya, gedung-gedung pemerintahan, dan pelabuhan yang diperbesar. Setelah berabad-abad berada di bawah kekuasaan Belanda, Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942 selama Perang Dunia II. Pendudukan Jepang hanya berlangsung selama tiga tahun, tetapi memberikan momentum bagi gerakan kemerdekaan Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang, Jakarta adalah satu-satunya pemerintahan kota khusus (*Tokubetsu Shi*) di Indonesia selama pemerintahan militer Jepang. Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1950 setelah kemerdekaan, kedudukan kota Djakarta ditetapkan sebagai daerah Swatantra yang disebut “Kotapradja Djakarta Raya” dengan Walikotanya adalah Soewiryo (1945-1951), Syamsuridjal (1951-1953), dan Soediro (1953-1960).

Kota Djakarta ditingkatkan menjadi Daerah Tingkat I dengan Kepala Daerah yang berpangkat Gubernur pada tanggal 15 Januari 1960. Pada periode Gubernur Soemarno (1960-1964) terbit UU Nomor 2 Tahun 1961 tentang pembentukan “Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Djakarta Raya”. Sejak itu disebut Pemerintah DCI Djakarta Raya. Pada periode Gubernur Henk Ngantung (1964-1966) terbit UU Nomor 10 Tahun 1964 tentang Djakarta sebagai Ibukota Republik Indonesia dengan nama “Djakarta”. Sejak itu Pemerintah DCI Djakarta Raya berubah menjadi Pemerintah DCI Djakarta. Pemerintah DCI Djakarta berubah menjadi Pemerintah Daerah DKI Djakarta pada periode Gubernur Ali Sadikin (1966-1977). Adapun gubernur selanjutnya berturut-turut yaitu Tjokropranolo (1977-1982), R. Soeprapto (1982- 1987), Wiyogo Atmodarminto (1987-1992), Soerjadi Soedirdja (1992-1997), Sutiyoso (1997-2007), Fauzi Bowo (2007-2012), Joko Widodo (2012-2014), Basuki Tjahaja Purnama (2014-2017), Djarot Saiful Hidayat (2017), Anies Rasyid Baswedan (2017-2022), dan Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono (2022-sekarang).

Pada periode Gubernur Wiyogo Atmodarminto terbit Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta. Sejak saat itu sebutan Pemerintah Daerah DKI Jakarta berubah menjadi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sampai dengan periode Gubernur Surjadi Soedirdja (1992 – 1997). Pada periode Gubernur Sutiyoso (1997-2007) terbit Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta. Pada akhir masa jabatan Gubernur Sutiyoso terbit Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak saat itu sebutan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta berubah menjadi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pada periode Gubernur Fauzi Bowo (2007-2012), implementasi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan pembentukan Deputi selaku pejabat yang membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang ini tetap berlaku pada periode Gubernur Joko Widodo (2012-2014), Basuki Tjahaja Purnama (2014-2017), dan Djarot Saiful Hidayat (2017).

Selanjutnya pada akhir masa jabatan Gubernur Anies Rasyid Baswedan (2017-2022) terbit Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, dimana kedudukan, fungsi dan peran Ibu Kota Negara akan dipindahkan dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara di Penajam Paser Utara. Menindaklanjuti hal tersebut, pada periode Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono (2022-2024), ditetapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Dengan UU baru tersebut, secara resmi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Mendekati umur Jakarta yang akan mencapai 500 tahun pada tanggal 22 Juni 2027 mendatang, Jakarta tidak lagi mengemban fungsi menjadi Ibukota Negara, namun lebih luas lagi sebagai Daerah Khusus yang berkedudukan sebagai Kota Global dan Pusat Perekonomian Nasional.

2.2. Aspek Geografi dan Demografi

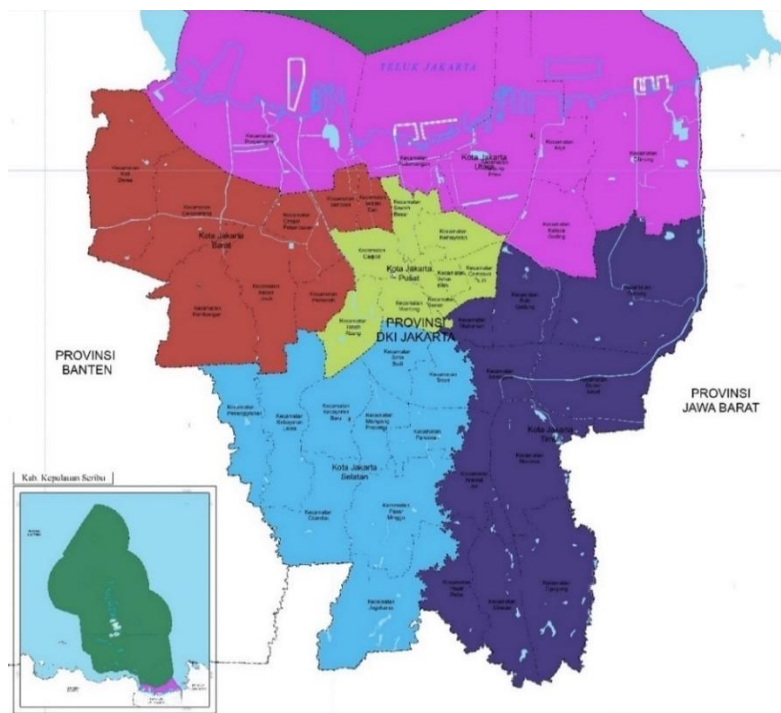
2.2.1 Geografi

A. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta 2024-2044, total luas administrasi Jakarta adalah 649.423 hektare yang di dalamnya terdiri dari 66.098 hektare luas wilayah daratan dan 583.325 hektare luas wilayah lautan.

Batas-batas wilayah administrasi Jakarta secara rinci dapat dilihat pada Gambar 2.1 yaitu pada batas wilayah sebelah utara Jakarta adalah Laut Jawa Kemudian, batas wilayah sebelah barat Jakarta adalah Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang (Provinsi Banten), di sebelah selatan berbatasan dengan Kota Depok (Provinsi Jawa Barat) dan di sebelah timur berbatasan dengan Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi (Provinsi Jawa Barat). Berikut wilayah administrasi Jakarta berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta 2024-2044.



Gambar 2.2 Peta Administrasi Jakarta

Sumber: Rancangan Peraturan Daerah RTRW Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024-2044

Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis wilayah Jakarta terletak antara 106° 19' 30" BT hingga 106° 58' 18" BT dan 5° 19' 12" – 6° 23' 54" LS. Jakarta dibagi menjadi 5 (lima) kota administrasi yaitu Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur serta 1 (satu) kabupaten administrasi yakni Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Wilayah Jakarta terbagi menjadi 44 kecamatan dan 267 kelurahan, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.1 Pembagian Wilayah Jakarta

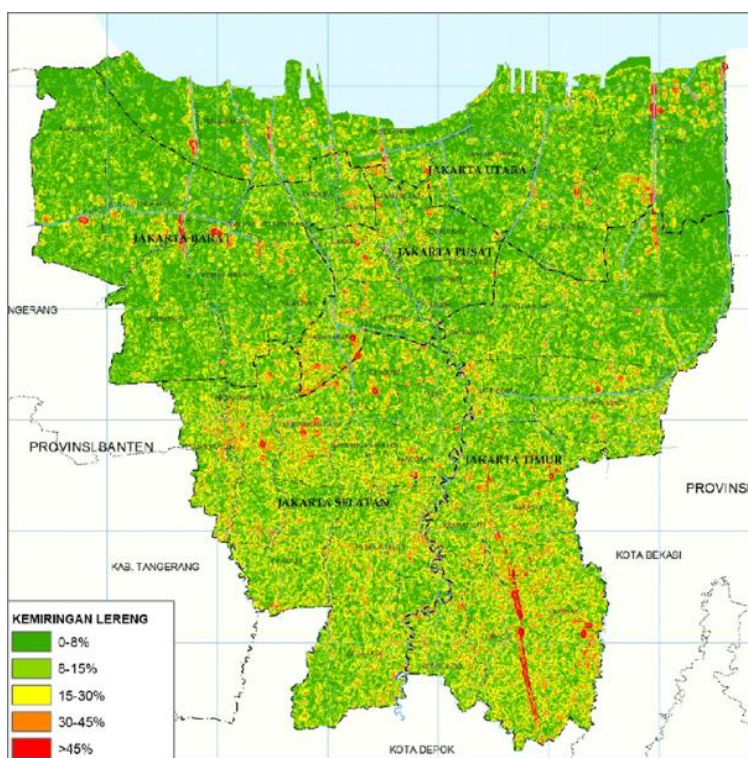
No.	Kota/Kabupaten Administrasi	Jumlah			
		Kecamatan	Kelurahan	RW	RT
1	Jakarta Pusat	8	44	394	4.668
2	Jakarta Utara	6	31	431	5.072
3	Jakarta Barat	8	56	580	6.409
4	Jakarta Selatan	10	65	576	6.128
5	Jakarta Timur	10	65	700	7.886
6	Kepulauan Seribu	2	6	24	116
Jumlah		44	267	2.705	30.470

Sumber: BPS, 2023

Wilayah administrasi terluas adalah Kota Administrasi Jakarta Timur dengan luas 18.803,5 hektare (27,64 persen luas total Jakarta), sedangkan wilayah terkecil adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan luas 869,61 hektare (1,28 persen luas total Jakarta).

Topografi dan Kemiringan Lahan

Berdasarkan aspek ketinggian lahan, topologi Jakarta terletak pada dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 8 meter di atas permukaan laut. Sekitar 40 persen wilayah Jakarta berupa dataran dengan permukaan tanah yang berada 1-1,5 meter di bawah muka laut pasang. Daerah hulu di mana sungai-sungai yang bermuara di Jakarta memiliki ketinggian yang cukup tinggi yaitu sekitar 8-15 persen meliputi wilayah Bogor dan Cibinong.



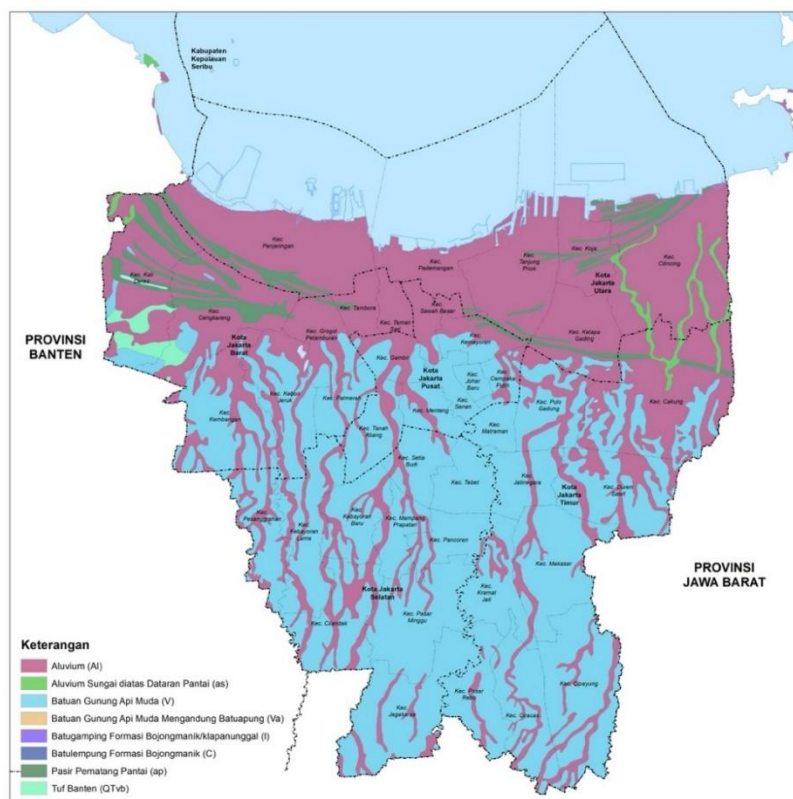
Gambar 2.3 Peta Topografi Jakarta

Sumber: Bappeda Provinsi DKI Jakarta, 2023

Jakarta berada pada tingkat kemiringan lereng 0-3 persen atau relatif landai. Kondisi ini mengakibatkan kecenderungan aliran air yang lebih lambat dan keterbatasan dalam proses penyerapan. Hal ini tentu berimplikasi terhadap daya serap dan daya alir air hujan yang rendah sehingga memperbesar kemungkinan terjadinya banjir. Belum lagi kelandaian tanah dapat membatasi efektivitas kinerja drainase yang turut meningkatkan risiko genangan dan banjir.

Geologi

Berdasarkan data Pusat Pengelolaan Ekoregion Jawa, wilayah Jakarta merupakan kawasan dataran rendah dan proses geomorfologi yang dominan berkembang adalah sedimentasi. Formasi geologi Jakarta berumur holosen, dicirikan dengan batu endapan permukaan. Secara regional, struktur geologi yang berkembang memperlihatkan adanya tiga arah dominan, yaitu arah Barat Laut–Tenggara Timur Laut–Barat Daya, dan Barat-Timur. Batuan yang terdapat di wilayah Jakarta adalah batuan sedimen, batuan endapan permukaan, batuan gunung api, dan batuan intrusi. Gambaran terkait distribusi berbagai jenis batuan, struktur geologi, dan formasi geologi di Jakarta dapat dilihat pada peta geologi teknik Kawasan Jabodetabekpunjur berikut.

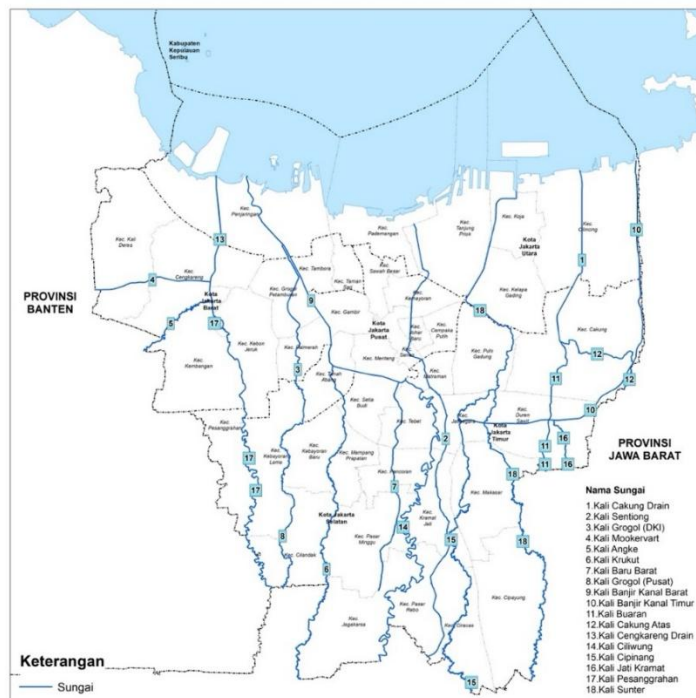


Gambar 2.4 Peta Geologi Jakarta

Sumber: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2019, diolah

Hidrologi

Sesuai Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 716K/40/MEM/2003 tentang Batas Horizontal Cekungan Air Tanah Di Pulau Jawa dan Pulau Madura, Jakarta berada di Cekungan Air Tanah (CAT) Provinsi Jawa Barat dan Jakarta yang merupakan cekungan air tanah lintas provinsi. CAT ini memiliki luas sekitar 1.439 km².



Gambar 2.5 Peta Tematik Sungai di Jakarta

Sumber: Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Jakarta, 2023

Jakarta dilalui 17 sungai/kanal dengan sungai terpanjangnya adalah Sungai Ciliwung. Sungai ini memiliki panjang 21.660 meter dan luas 515.600 m². Debit air Sungai Ciliwung berkisar antara 5-14,5 m³/detik. Detail panjang, luas dan peruntukan 17 sungai di Jakarta dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2 Panjang, Luas Sungai dan Peruntukan Sungai di Jakarta

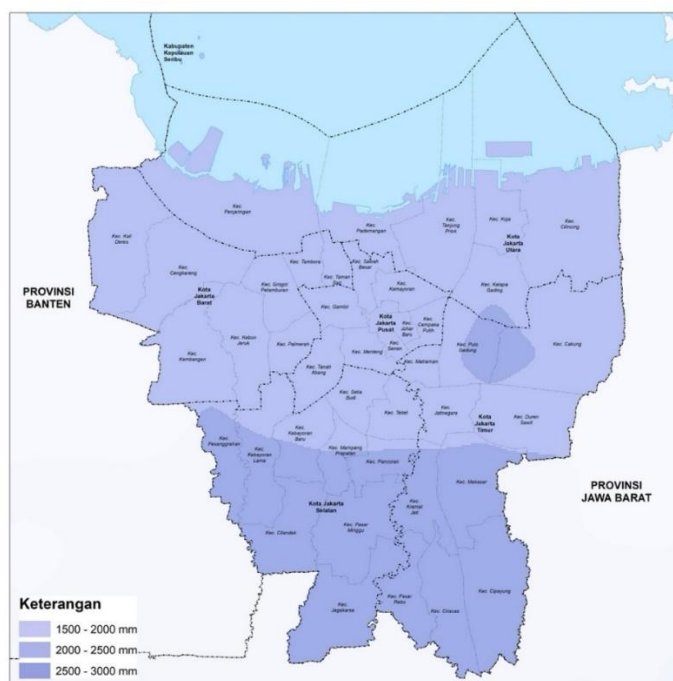
No.	Sungai/Kanal	Panjang (m)	Luas Area (m ²)	Peruntukan Sungai/Kanal
1	Ciliwung	21.660	515.600	Usaha Perkotaan/ <i>Urban Business</i>
2	Krukut	18.370	206.340	Air Baku Air Minum/ <i>Core of Drink Water</i>
3	Mookervart	8.600	215.000	Air Baku Air Minum/ <i>Core of Drink Water</i>
4	Kali Angke	4.350	175.375	Usaha Perkotaan/ <i>Urban Business</i>
5	Kali Pesanggrahan	11.400	142.500	Perikanan/ <i>Fishery</i>
6	Kali Grogol	21.600	367.325	Perikanan/ <i>Fishery</i>
7	Kali Cideng	12.700	291.000	Usaha Perkotaan/ <i>Urban Business</i>
8	Kalibaru Timur	14.250	106.875	Usaha Perkotaan/ <i>Urban Business</i>
9	Cipinang	9.060	72.480	Usaha Perkotaan/ <i>Urban Business</i>
10	Sunter	21.290	540.900	Usaha Perkotaan/ <i>Urban Business</i>
11	Cakung	18.100	181.000	Usaha Perkotaan/ <i>Urban Business</i>
12	Buaran	8.800	154.000	Usaha Perkotaan/ <i>Urban Business</i>

No.	Sungai/Kanal	Panjang (m)	Luas Area (m ²)	Peruntukan Sungai/Kanal
13	Kalibaru Barat	14.250	106.875	Air Baku Air Minum/ <i>Core of Drink Water</i>
14	Cengkareng Drain	2.950	147.500	Usaha Perkotaan/ <i>Urban Business</i>
15	Jati Kramat	3.270	21.255	Usaha Perkotaan/ <i>Urban Business</i>
16	Ancol	8.605	301.175	Usaha Perkotaan/ <i>Urban Business</i>
17	Banjir Kanal Barat	3.650	155700	Usaha Perkotaan/ <i>Urban Business</i>

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, 2020

Klimatologi

Jakarta memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau terjadi pada bulan Juni hingga September dan pada musim ini arus angin berasal dari Benua Australia serta tidak banyak mengandung uap air. Musim hujan terjadi pada bulan Oktober hingga Maret yang arus anginnya banyak mengandung uap air yang berasal dari Benua Asia dan Samudera Pasifik.



Gambar 2.6 Peta Curah Hujan Jakarta

Sumber: BMKG 2023, diolah

Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Februari 2020 dan hari hujan terbanyak yaitu sebanyak 25 hari yang terjadi pada bulan Januari tahun 2020 dan 2021. Suhu udara Jakarta dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti letak geografis Jakarta yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa, curah hujan, lahan terbangun, kondisi lingkungan yang meliputi vegetasi dan air permukaan, serta aktivitas perkotaan seperti transportasi

maupun industri. Suhu udara Jakarta berkisar antara 23°C – 35°C. Data suhu udara pada tahun 2018-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3 Suhu Udara Menurut Bulan di Jakarta 2018-2021

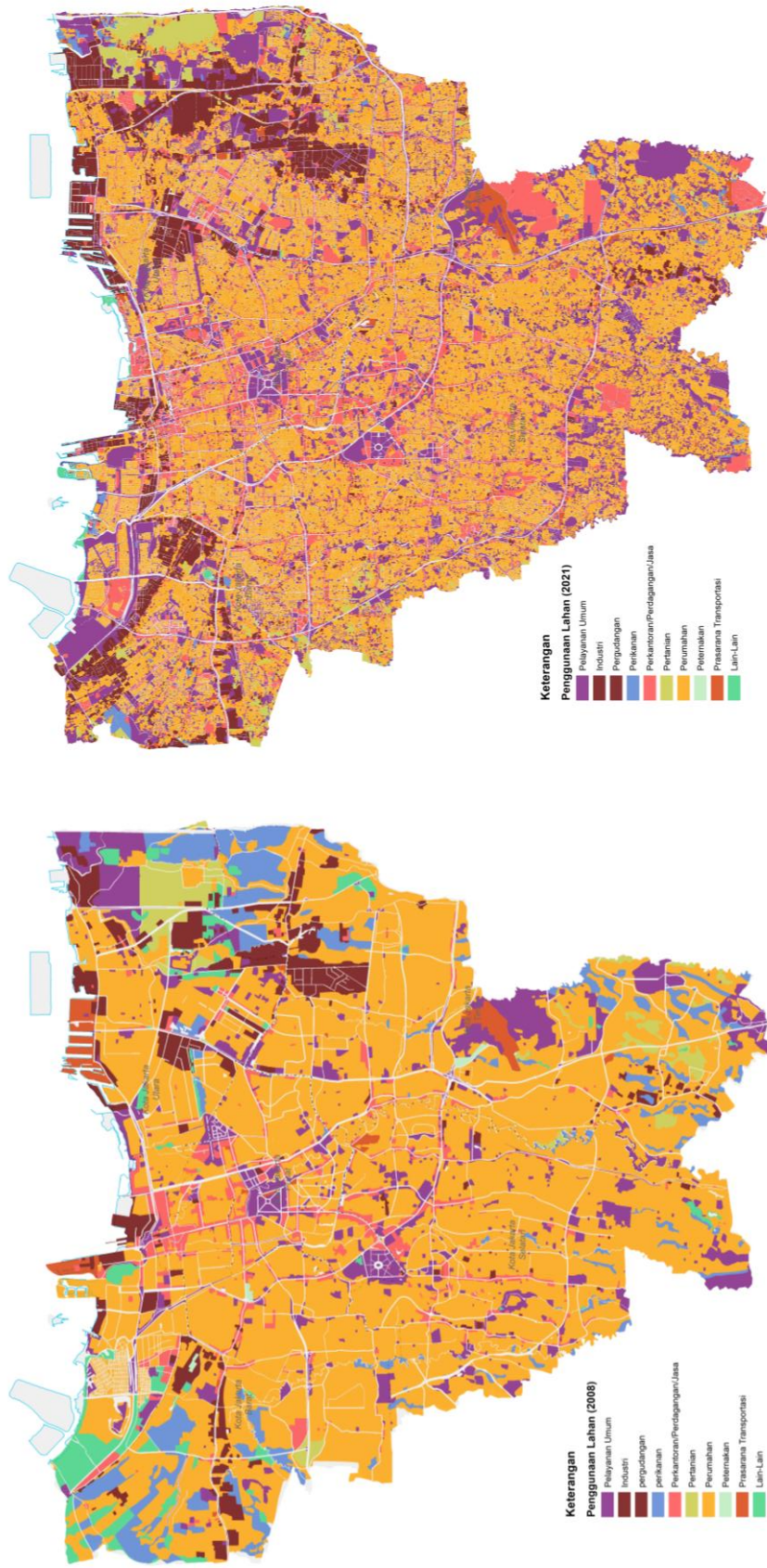
No	Bulan	2018			2019			2020			2021		
		Suhu Udara (°C)			Suhu Udara (°C)			Suhu Udara (°C)			Suhu Udara (°C)		
		Max	Min	Rerata	Max	Min	Rerata	Max	Min	Rerata	Max	Min	Rerata
1	Januari	33,80	23,00	27,70	34,00	23,60	27,90	34,30	24,00	28,02	34,20	23,40	27,30
2	Februari	32,40	23,40	27,20	34,00	24,00	28,20	34,60	24,00	27,72	34,00	23,80	27,40
3	Maret	34,20	23,80	27,90	34,80	23,80	28,10	34,60	25,00	28,60	33,40	23,00	28,30
4	April	34,40	24,00	28,70	35,20	24,80	28,80	34,80	25,00	29,08	34,20	24,40	28,70
5	Mei	34,60	25,00	29,40	35,00	25,00	29,60	35,60	24,80	29,58	34,80	23,40	29,40
6	Juni	35,00	24,00	28,90	34,40	24,40	29,20	35,00	24,40	29,49	34,20	24,20	28,50
7	Juli	34,20	24,00	28,20	34,00	24,00	28,70	34,20	24,00	28,93	34,00	24,00	28,80
8	Agustus	34,20	23,00	28,20	33,60	24,00	28,20	34,80	24,00	29,12	34,40	24,60	29,00
9	September	35,40	24,20	28,60	35,00	24,00	28,80	35,00	24,00	29,29	35,00	23,60	29,20
10	Oktober	35,20	24,00	29,30	35,00	24,60	29,40	34,60	24,00	28,83	34,20	24,60	29,20
11	November	36,60	24,40	28,90	34,60	25,00	29,50	35,20	25,00	29,00	34,60	24,00	28,50
12	Desember	35,40	24,40	28,70	33,80	24,80	28,40	34,80	24,20	28,25	35,20	24,00	28,20

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2022

Pemanfaatan Ruang dan Alih Fungsi Lahan

Fisik wilayah Jakarta mengalami perkembangan pesat yang ditunjukkan oleh peningkatan luas lahan terbangun sejak empat dekade yang lalu. Peningkatan lahan terbangun ini salah satunya diakibatkan oleh pertumbuhan jumlah penduduk dan peningkatan aktivitas perkotaan yang membutuhkan ruang yang cukup masif.

Pada tahun 2008, sebagian besar penggunaan lahan di wilayah Jakarta adalah perumahan dan pelayanan umum dengan persentase masing-masing hingga 67 persen dan 10 persen. Pelayanan umum meliputi seluruh fasilitas umum, seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, pemerintahan, dan sosial lainnya. Fungsi Jakarta sebagai pusat pertumbuhan wilayah, termasuk pusat perdagangan dan jasa, yang dapat menarik dan meningkatkan jumlah penduduk sehingga kebutuhan lahan untuk hunian serta fasilitas pelayanan umum menjadi tinggi. Sementara itu, persentase penggunaan lahan paling sedikit adalah peternakan sebesar 0,12 persen.



Gambar 2.7 Perubahan Guna Lahan di Wilayah Jakarta Tahun 2008 (kiri) dan 2021 (kanan)

Sumber: Rancangan Peraturan Daerah RTRW Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024-2044

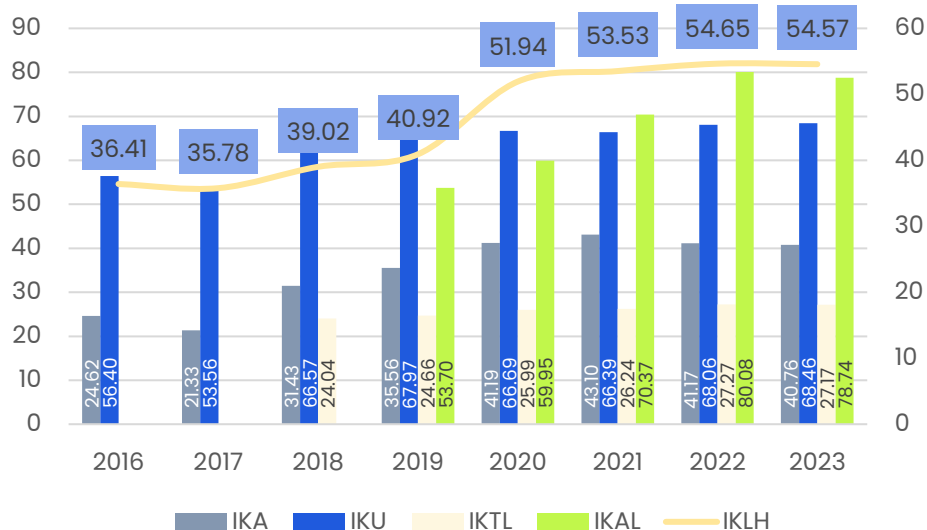
Jakarta mengalami perkembangan yang pesat dalam kurun waktu 14 tahun dengan adanya perubahan dalam penggunaan lahan. Walaupun fungsi perumahan dan pelayanan umum masih menjadi guna lahan yang paling besar, namun persentasenya berubah signifikan, terutama pada fungsi pelayanan umum. Selain itu, perubahan yang cukup besar terjadi pada fungsi perkantoran/perdagangan/jasa yang awalnya berada pada persentase 4 persen menjadi 13 persen. Meningkatnya aktivitas ekonomi dan investasi di Jakarta hingga tahun 2022 menjadi salah satu penyebab berkembangnya guna lahan pada sektor-sektor tersebut.

Selain itu, peningkatan penggunaan lahan juga terjadi pada aktivitas industri, pergudangan, prasarana transportasi, dan pertanian. Guna lahan yang mengalami penurunan luas wilayah selain hunian adalah perikanan, peternakan, dan fungsi lainnya.

B. Kualitas Lingkungan dan Ketahanan Bencana

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Daerah disusun sebagai alat ukur untuk menggambarkan target dan ukuran pencapaian sehingga dapat merefleksikan sejauh mana hubungan pembangunan suatu wilayah terhadap lingkungan. Secara sederhana, IKLH dapat dijadikan sebagai indikator awal untuk mengidentifikasi dampak implementasi pembangunan di Jakarta terhadap kondisi lingkungan hidup. IKLH disusun berdasarkan indeks lainnya seperti Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Perbandingan masing-masing indeks dapat dilihat pada gambar berikut.



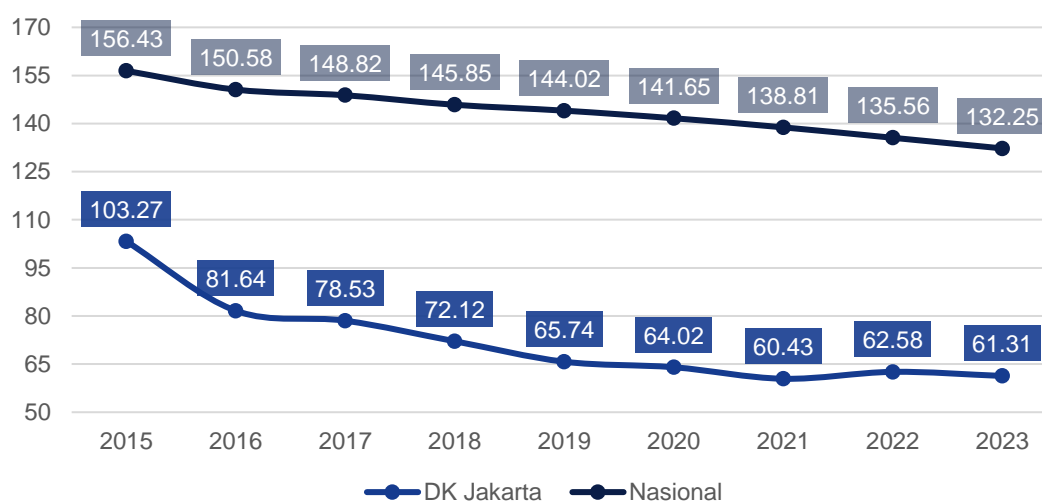
Gambar 2.8 Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Daerah Jakarta 2016 – 2022

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa terjadi sedikit penurunan capaian IKLH Jakarta pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu dari 54,65 menjadi 54,57. Pada kedua tahun tersebut, IKLH Jakarta termasuk dalam kategori “Sedang”. Namun, tren peningkatan IKLH terjadi konsisten sejak tahun 2016 hingga 2023 yang menandakan adanya upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup secara terus menerus melalui berbagai program dan kebijakan oleh pemerintah daerah dan pusat.

Risiko Bencana

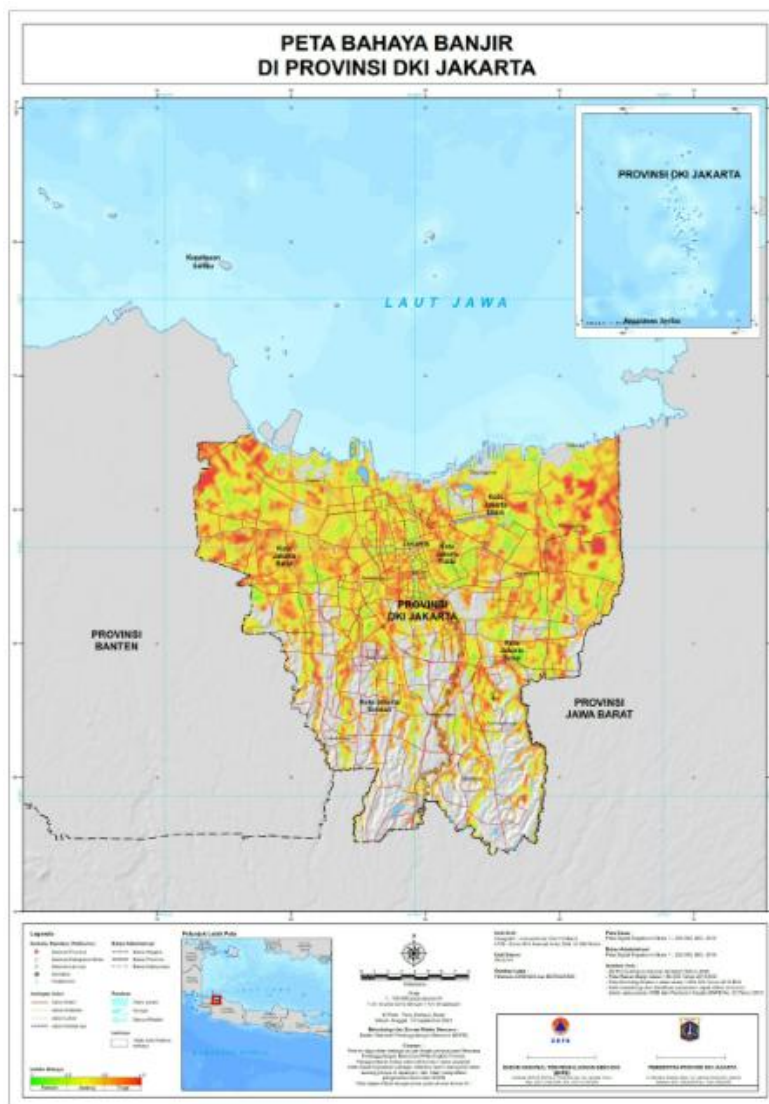
Untuk menilai dan mengetahui tingkat risiko bencana, dilakukan tinjauan terhadap Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2024, Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2027, dan digunakan Indeks Risiko Bencana yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.



Gambar 2.9 Nilai Indeks Risiko Bencana Jakarta Tahun 2015 - 2023

Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2021

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2023, Jakarta memiliki indeks risiko sebesar 61,31 yang termasuk kategori “Sedang”. Dalam lima tahun terakhir, indeks risiko Jakarta mengalami penurunan, kecuali pada tahun 2022. Pada tahun 2022, terjadi peningkatan kejadian bencana dari 962 kejadian menjadi 1.411 kejadian di Jakarta yang berimplikasi terhadap peningkatan jumlah korban, jumlah pengungsi, dan taksiran kerugian. Terdapat tiga jenis bencana alam yang dominan terjadi di Jakarta dan masuk dalam prioritas penanganan pertama yaitu, banjir, gempa bumi, dan kebakaran wilayah perkotaan. Jenis bencana ini dipengaruhi oleh letak Jakarta yang berada pada daerah muara sungai dengan topografi yang relatif rendah. Lokasi ini membuat Jakarta cukup rentan terhadap perubahan iklim. Selain itu, ancaman bencana lain yang tercatat adalah likuefaksi, kekeringan, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem, dan abrasi, epidemi dan wabah penyakit, tsunami, serta kegagalan teknologi.



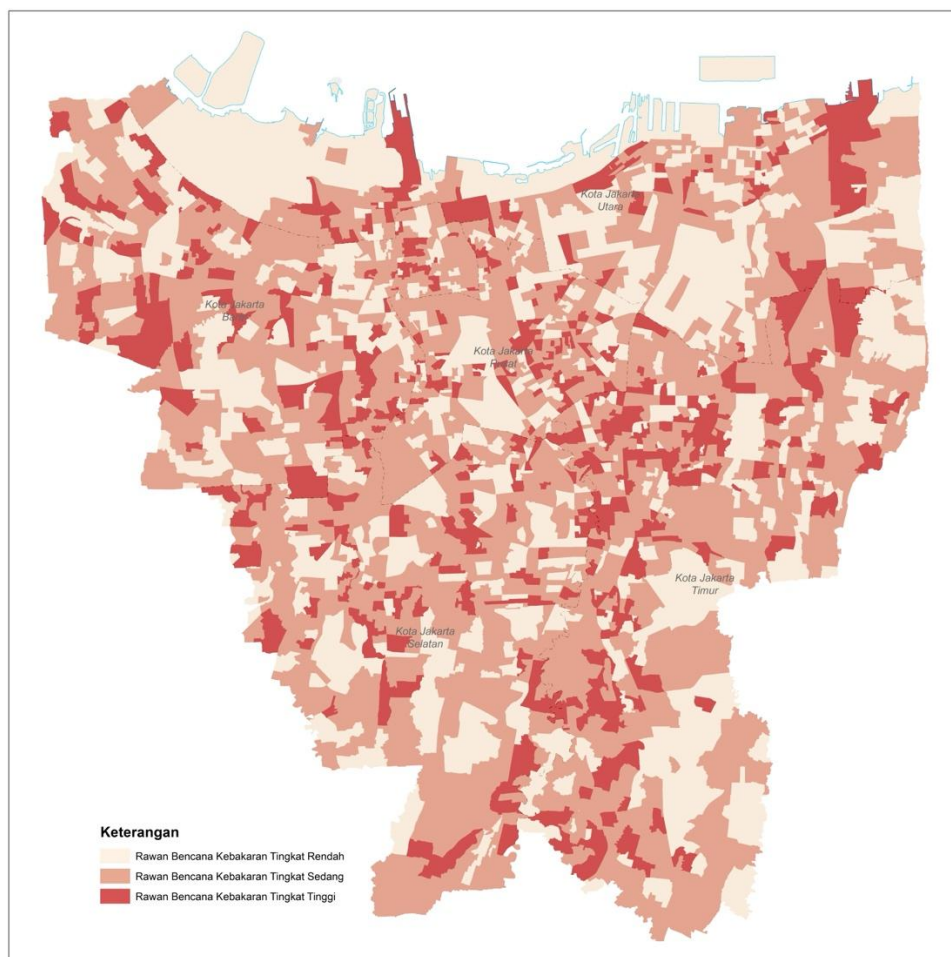
Gambar 2.10 Peta Tingkat Kerawanan Banjir di Jakarta

Sumber: BNPB, 2021

Dari Gambar 2.12, dapat diketahui bahwa wilayah dengan wilayah dengan tingkat kerawanan banjir tertinggi berada di Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan terutama berada di sepanjang aliran Sungai Ciliwung. Menurut data BPBD Provinsi DKI Jakarta, sepanjang tahun 2022 terjadi rata-rata 11 hingga 12 kejadian banjir di 32 kecamatan dan 110 kelurahan terdampak. Dari 110 kelurahan tersebut, terdapat 889 wilayah RT yang terdampak. Total jumlah jiwa yang terdampak adalah 22.023 jiwa dan menyebabkan 3.672 di antaranya mengungsi ke 48 lokasi pengungsian.

Kejadian banjir rob juga menjadi perhatian Jakarta karena peningkatan tinggi muka air laut dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2007, tercatat tinggi muka air laut +233 cm dengan tinggi puncak tanggul +220 cm, sedangkan pada tahun 2017 terjadi

peningkatan tinggi muka air laut menjadi +255 cm dan tinggi puncak tanggul menjadi +240 cm. Peningkatan kejadian banjir rob di daerah pantai utara Jakarta. Daerah yang terdampak banjir rob meliputi Kamal Muara, Kapuk Muara, Pluit, Penjaringan, Ancol, Tanjong Priok, Koja, Kalibaru, Cilincing, dan Marunda.



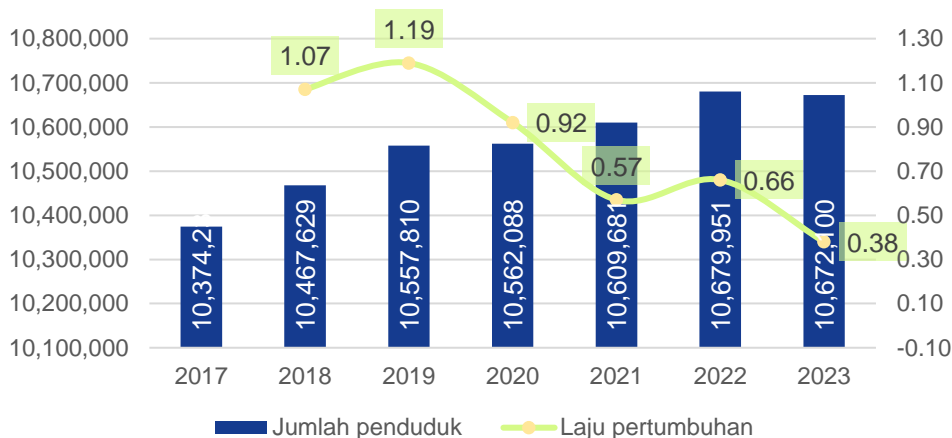
Gambar 2.11 Peta Tingkat Kerawanan Kebakaran di Jakarta

Sumber: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, 2019

Bencana kebakaran merupakan peristiwa yang sering kali melanda Jakarta. Pada tahun 2019, terdapat 19 kelurahan di wilayah Jakarta yang diidentifikasi sebagai rawan bencana kebakaran. Dampak ekonomi dari kebakaran cukup signifikan, terlihat dari kerugian materi yang mencapai jumlah yang tidak sedikit. Pada tahun 2017, kebakaran di Jakarta menyebabkan kerugian sebesar Rp 475 miliar dengan total 1.471 kejadian kebakaran. Angka kejadian kebakaran meningkat menjadi 1.751 kejadian pada tahun 2018, 2.183 kejadian pada tahun 2019, dan 1.505 kejadian pada tahun 2020, dengan kerugian diperkirakan mencapai Rp 90 miliar. Pada tahun 2021, tercatat sebanyak 1.535 kejadian kebakaran.

2.2.2 Demografi

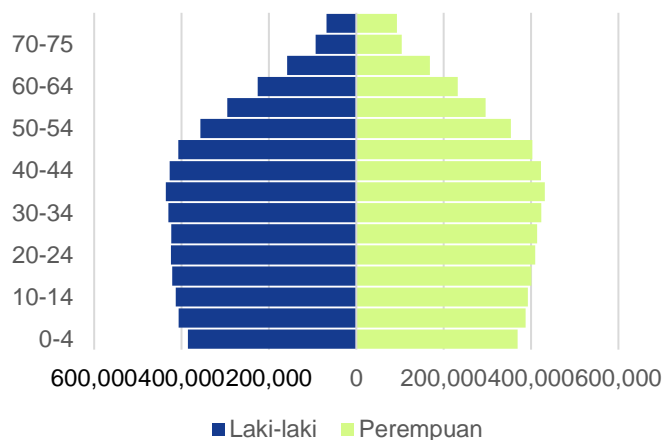
Kondisi kependudukan merupakan salah satu aspek penting dalam perencanaan daerah karena perkembangan penduduk dapat memberikan gambaran serta dapat memetakan jumlah dan struktur layanan berbagai sektor yang dibutuhkan. Pertumbuhan penduduk ditentukan oleh beberapa faktor seperti kelahiran, kematian, dan migrasi.



Gambar 2.12 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Jakarta Tahun 2017-2023

Sumber: BPS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 2024

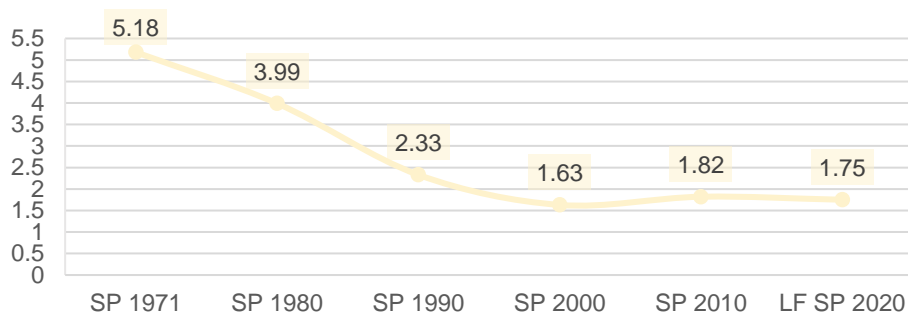
Berdasarkan BPS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jumlah penduduk Jakarta pada tahun 2023 adalah 10.672.100 jiwa. Dalam kurun waktu 6 tahun terakhir, pertumbuhan penduduk mengalami fluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,79 persen dengan laju pertumbuhan tertinggi sebesar 1,19 persen pada tahun 2019. Namun, pada tahun selanjutnya penambahan penduduk berjalan lambat hingga pada tahun 2021 yaitu melambat sebesar 0,52 persen. Salah satu penyebab pelambatan ini adalah pandemi Covid-19 yang berlangsung antara tahun 2019 hingga 2021. Pandemi Covid-19 membawa pengaruh terhadap produktivitas penduduk usia subur yang menurunkan angka kelahiran. Selain itu, terjadi pembatasan pergerakan penduduk pada setiap wilayah sehingga memengaruhi angka migrasi masuk ke Jakarta. Jumlah penduduk Jakarta kembali turun pada tahun 2023 dengan pertumbuhan terendah dalam 6 tahun terakhir sebesar 0,38 persen. Penurunan jumlah penduduk Jakarta diakibatkan migrasi ke luar Jakarta yang cukup tinggi dan Jakarta bukan tujuan utama migrasi. Hal ini diakibatkan oleh perkembangan daerah penyangga Jakarta seperti Depok, Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bekasi terutama pada sektor infrastruktur, ekonomi, dan pendidikan. Perkembangan sektor infrastruktur ditunjukkan dari kualitas transportasi yang semakin andal dan perkembangan hunian yang lebih terjangkau. Selain itu, terdapat tren pembangunan ke arah luar Jakarta seperti perkembangan industri dan kawasan perkotaan baru.



Gambar 2.13 Piramida Penduduk Jakarta Tahun 2023

Sumber: BPS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 2024

Dari piramida penduduk di atas, mayoritas struktur penduduk Jakarta pada tahun 2023 diisi oleh penduduk produktif dengan kisaran usia 15-64 tahun dengan persentase sebesar 71,52 persen. Sedangkan penduduk berusia 0-14 tahun dan lebih dari 64 tahun memiliki persentase masing-masing hingga 22,07 persen dan 6,41 persen. Bila kelas usia produktif dan nonproduktif dibandingkan maka didapatkan angka ketergantungan di Jakarta sebesar 39,73 yang berarti bahwa setiap 100 jiwa penduduk produktif dapat menanggung 39 hingga 40 jiwa penduduk tidak produktif. Selain itu, didapatkan juga rasio seks laki-laki perempuan sebesar 101,34 yang berarti terdapat 101 hingga 102 penduduk perempuan untuk setiap 100 jiwa penduduk laki-laki.

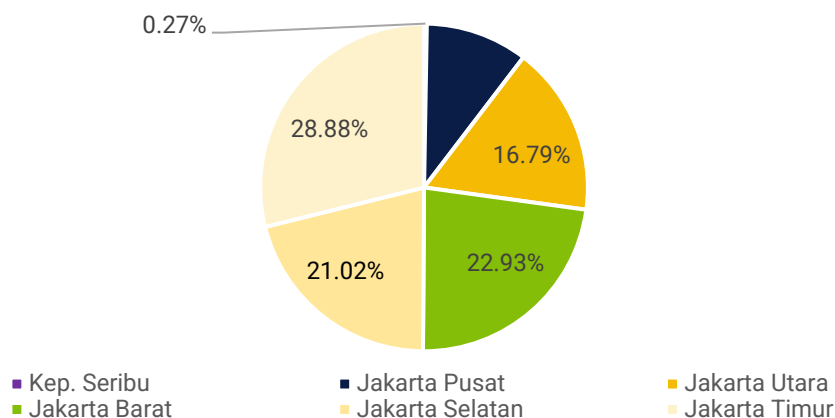


Gambar 2.14 Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) Jakarta Tahun 1971-2020

Sumber: BPS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 2023

Pertumbuhan penduduk salah satunya dipengaruhi oleh tingkat kelahiran yang dapat diukur melalui Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR). Berdasarkan data dari Sensus Penduduk 2020 oleh BPS yang dimulai pada tahun 1971 hingga Long Form SP2020, terlihat bahwa telah terjadi penurunan fertilitas di Jakarta selama lima dekade terakhir. Pada tahun 1971, TFR Jakarta adalah 5,18, yang menunjukkan bahwa rata-rata

perempuan melahirkan antara 5 hingga 6 anak. Sementara itu, data terbaru dari Long Form SP2020 menunjukkan TFR sebesar 1,75, yang berarti rata-rata perempuan hanya melahirkan sekitar 1 hingga 2 anak. Ini mengindikasikan bahwa Jakarta mengalami penurunan yang signifikan dalam pertumbuhan penduduknya.

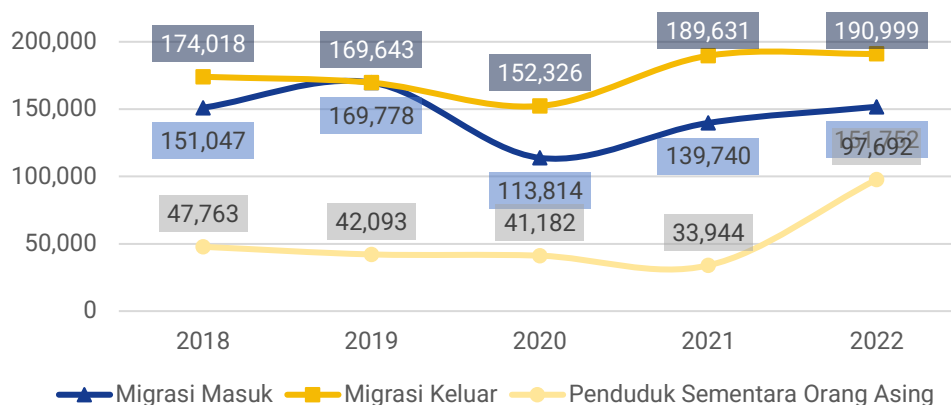


Gambar 2.15 Distribusi Penduduk Jakarta Tahun 2023

Sumber: BPS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 2024

Ditinjau dari sebaran penduduknya, Jakarta Timur dan Jakarta Barat memiliki jumlah penduduk paling banyak yaitu 3.079.618 jiwa (28,88 persen) dan 2.470.054 jiwa (22,93 persen). Distribusi penduduk yang tinggi di Jakarta Timur diakibatkan oleh banyaknya jumlah pendatang baru yang menjadikan Jakarta Timur sebagai tujuan migrasi. Selain karena Jakarta Timur memiliki wilayah yang luas dibandingkan kota Administrasi lainnya, terdapat banyak sentra industri dan perdagangan di Jakarta Timur seperti di Cijantung dan Pulogadung hingga ke wilayah Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Sementara itu, wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kepulauan Seribu dengan jumlah penduduk sebanyak 28.523 jiwa (0,27 persen). Selain karena luas wilayahnya yang kecil dan lokasi geografisnya yang jauh dari kota-kota administrasi lainnya, fasilitas dan sarana yang minim tidak mampu menarik jumlah penduduk baru. Kepulauan Seribu berkembang menjadi pusat pariwisata yang diisi oleh wisatawan yang tidak bermukim lama.

Dalam enam tahun terakhir, kepadatan penduduk Jakarta secara keseluruhan mengalami peningkatan. Pada tahun 2023, kepadatan penduduk Jakarta mencapai 16.146 jiwa/km². Angka ini lebih tinggi dibandingkan kondisi kepadatan penduduk pada tahun-tahun sebelumnya. Namun, peningkatan kepadatan penduduk kontras dengan jumlah penduduk yang menurun pada tahun 2023. Hal ini diakibatkan karena perbedaan luas wilayah setiap kota/kabupaten Administrasi yang digunakan dalam dasar perhitungan kepadatan penduduk yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.



Gambar 2.16 Jumlah Mobilisasi Permanen dan Mobilisasi Nonpermanen

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, 2022

Dinamika penduduk ditunjukkan melalui mobilisasi permanen (yang terdiri dari jumlah penduduk masuk dan penduduk keluar) serta mobilisasi nonpermanen (yang ditunjukkan melalui keberadaan penduduk sementara orang asing). Jumlah migrasi masuk ke Jakarta pada tahun 2022 adalah 151.752 orang dan jumlah ini naik dibandingkan tahun 2018. Jumlah migrasi masuk meningkat tajam melebihi jumlah migrasi keluar pada tahun 2019 yaitu 169.778. Sementara itu, jumlah migrasi keluar dari Jakarta pada tahun 2022 sebesar 190.999 orang yang tidak jauh berbeda dari pada tahun 2018. Dengan demikian, secara keseluruhan migrasi net pada 5 tahun terakhir bersifat negatif yang menandakan bahwa jumlah penduduk yang keluar dari Jakarta melampaui jumlah penduduk yang masuk. Beberapa penyebab terjadinya migrasi net negatif tersebut adalah bergesernya preferensi penduduk Jakarta untuk mencari hunian di luar Jakarta, terutama di kota-kota satelit Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi akibat biaya hidup yang tinggi, keamanan, dan kondisi lingkungan (polusi, banjir, atau masalah lingkungan lain) yang buruk. Selain itu, perkembangan ekonomi dan infrastruktur di daerah lain juga mendorong terjadinya migrasi net negatif.

Sementara itu, jumlah sementara orang asing yang bermukim dihitung berdasarkan jumlah orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas di Jakarta. Tercatat ada 97.692 orang asing yang bermukim di Jakarta pada tahun 2022. Jumlah ini meningkat tajam dibandingkan data tahun lalu yakni sebanyak 33.944 orang asing. Perkembangan Jakarta dalam berbagai sektor seperti ekonomi, pariwisata, dan infrastruktur juga turut menarik minat orang asing untuk bermukim sementara di Jakarta. Hal ini tentu dapat berdampak kontribusi terhadap produktivitas ekonomi, industri, perdagangan, dan investasi. Namun di saat yang sama, tantangan kebutuhan pelayanan dan peningkatan kualitas pendukung menjadi perhatian bila jumlah orang asing yang bermukim terus meningkat.

Tabel 2.4 Arus Komuter Antarwilayah di Jabodetabek Tahun 2023

Tempat tinggal	Lokasi Kegiatan Komuter													Jumlah	
	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Jakarta Pusat	Jakarta Barat	Jakarta Utara	Kab. Bogor	Kab. Bekasi	Bogor	Bekasi	Depok	Kab. Tangerang	Tangerang	Tangerang Selatan		Luar Jabodetabek
Jakarta Selatan	979.000	54.470	83.323	55.977	16.095	5.454	3.622	1.522	4.339	31.469	4.780	7.727	31.891	-	1.279.669
Jakarta Timur	157.515	1.198.186	110.562	34.395	62.003	6.185	23.196	4.235	52.471	45.270	3.297	4.034	4.193	5.710	1.711.252
Jakarta Pusat	41.960	25.730	417.071	35.603	43.812	640	548	-	2.732	2.478	482	2.596	2.153	672	576.477
Jakarta Barat	71.515	13.273	85.344	1.009.234	84.040	-	3.020	501	2.103	2.854	18.096	55.399	17.828	843	1.364.050
Jakarta Utara	30.436	47.790	78.104	55.642	730.601	413	3.959	996	8.348	2.502	2.539	6.068	2.137	2.158	971.693
Bogor	17.905	5.414	6.443	2.903	1.261	80.586	381	421.841	186	9.321	1.037	1.258	2.536	1.239	552.311
Bekasi	75.214	123.971	53.857	21.796	43.365	23.330	89.866	-	968.380	12.929	2.587	4.571	3.094	11.680	1.434.640
Depok	206.930	60.331	68.689	21.848	13.690	40.986	5.260	5.049	9.295	709.780	1.031	4.384	46.262	1.600	1.195.135
Tangerang	60.947	2.958	30.928	85.500	11.874	684	711	308	1.360	4847	64.664	764.125	60.713	1.726	1.091.345
Tangerang Selatan	104.458	8.503	31.215	27.023	7.671	7.502	774	253	1.895	9.832	17.734	22.355	580.299	769	820.283
Kabupaten Bogor	64.151	41.660	50.029	17.021	15.702	2.301.363	21.809	142.087	33.192	92.840	28.140	2.983	51.526	22.901	2.885.404
Kabupaten Bekasi	34.376	35.207	26.990	7.600	40.338	13.846	1.413.921	4.604	142.838	1.400	590	714	-	24.981	1.747.405
Kabupaten Tangerang	16.925	1.526	22.098	29.208	10.675	7.260	739	-	-	1.668	1.531.923	162.013	22.575	4.424	1.811.034
Jumlah	1.861.332	1.619.019	1.064.653	1.403.750	1.081.127	2.488.249	1.567.806	581.396	1.227.139	927.190	1.676.900	1.038.227	825.207	78.703	17.440.698

Sumber: BPS, 2024

Sebagai pusat perekonomian, pertumbuhan, dan lapangan kerja, Jakarta memainkan peranan penting dalam kawasan metropolitan Jabodetabek. Salah satu dampak ikutannya adalah fenomena komuter yang tidak dapat dihindarkan. Berdasarkan Statistik Komuter Jabodetabek tahun 2023 yang dikeluarkan oleh BPS tercatat bahwa di dalam wilayah administrasi Jakarta sendiri, jumlah arus komuter cukup tinggi, terutama pergerakan di dalam wilayah kota Administrasi yang sama seperti Jakarta Timur yang mencatatkan hingga 1,19 juta komuter. Arus komuter antarkota Administrasi tertinggi adalah hubungan Jakarta Timur – Jakarta Selatan, Jakarta Timur – Jakarta Pusat, Jakarta Barat – Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan – Jakarta Pusat. Hal ini menjelaskan bahwa keempat kota tersebut terindikasi sebagai pusat hunian dan pusat kegiatan.

Bila dilihat dalam cakupan regional, maka pergerakan dari dan ke luar Jakarta, khususnya Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Bodetabek) cukup signifikan. Jumlah komuter menuju Jakarta yang berasal dari Bodetabek sebesar 1.508.200 orang. Angka ini cukup signifikan, mengingat arus komuter dapat meningkatkan jumlah dan kepadatan penduduk pada waktu tertentu sehingga selanjutnya dapat memberikan tekanan terhadap kebutuhan dan kualitas pelayanan infrastruktur perkotaan seperti layanan air bersih, air limbah, persampahan, listrik, transportasi, dan energi. Selain itu, tingginya angka komuter memberikan pengaruh terhadap daerah lain di sekitar Jakarta akibat berubahnya pola permukiman yaitu berkembangnya pusat-pusat aktivitas baru dan timbulnya masalah lingkungan. Sementara itu, jumlah komuter menuju Bodetabek dan luar Jabodetabek dari Jakarta sebanyak 381.460 orang.

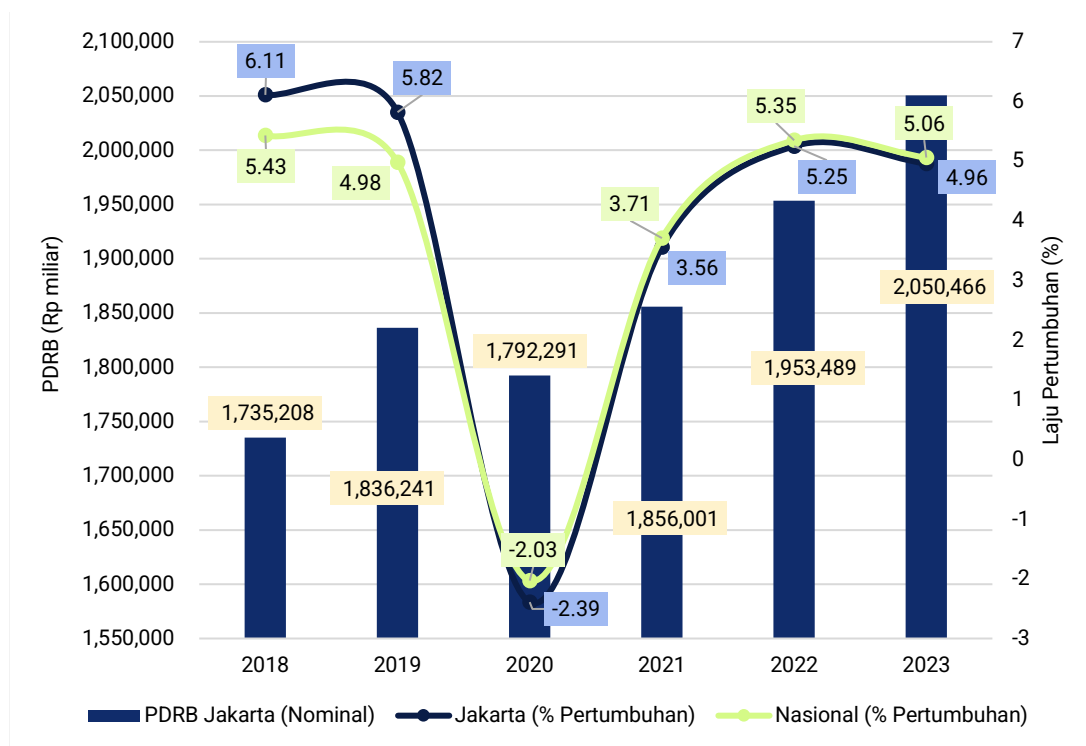
2.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.3.1 Kesejahteraan Ekonomi

Tingkat kesejahteraan ekonomi menjadi salah satu tolok ukur dalam melihat kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan ekonomi, maka dapat diindikasikan bahwa kesejahteraan masyarakat pun tinggi. Namun demikian, tidak hanya tingkat pertumbuhan ekonomi yang diukur, melainkan juga aspek pemerataan, sehingga manfaat dari tingginya pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam bagian ini akan diuraikan beberapa indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Jakarta.

A. Pertumbuhan Ekonomi

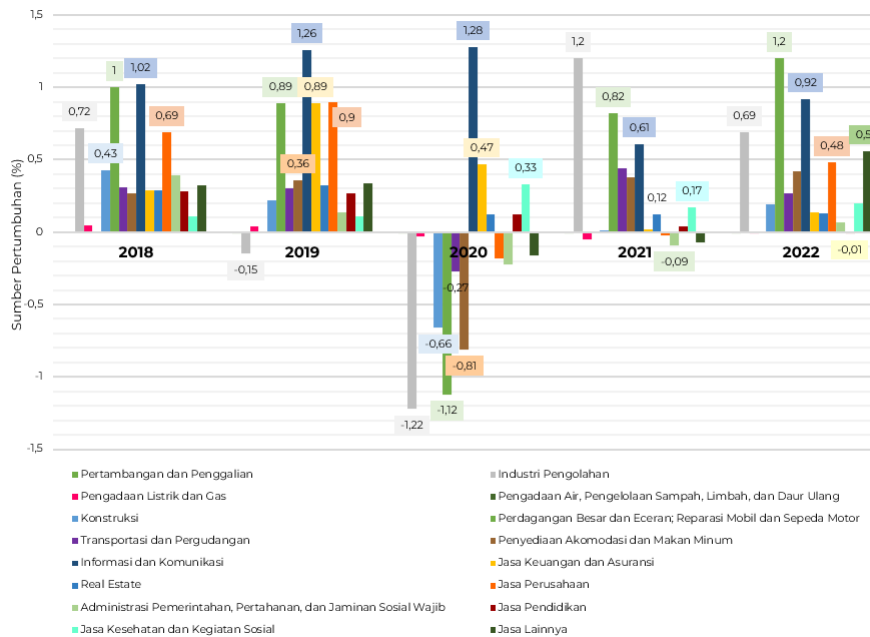
Salah satu indikator penting untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara makro adalah melalui laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai dan laju pertumbuhan PDRB Jakarta Pada tahun 2018 – 2023 dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 2.17 Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Jakarta Tahun 2018 – 2023

Sumber: BPS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 2018 – 2023

Perekonomian Jakarta dalam periode 2018 – 2023 mengalami fluktuasi yang cukup tinggi. Pandemi Covid-19 sangat memengaruhi kondisi perekonomian negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Kondisi ini memberikan dampak yang besar bagi perekonomian Jakarta, sehingga pada tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi Jakarta melambat sampai dengan -2,39 persen dan berada di bawah rata-rata laju pertumbuhan ekonomi nasional dengan nilai PDRB menurun menjadi 1.792.291 miliar rupiah. Tahun 2020 merupakan puncak perlambatan ekonomi Jakarta dalam enam tahun terakhir. Pada tahun berikutnya, ekonomi berhasil membaik yang dapat dilihat dari peningkatan laju pertumbuhan ekonomi yang signifikan di tahun 2021 hingga 3,56 persen dan terus meningkat di tahun 2022 hingga 5,25 persen. Di tahun 2023, perekonomian Jakarta mengalami sedikit perlambatan dengan laju pertumbuhan ekonomi menjadi 4,96 persen. Meski pertumbuhan ekonomi sedikit melambat, namun nilai PDRB terus meningkat hingga 2.050.466 miliar rupiah di tahun 2023.



Gambar 2.18 Struktur dan Sumber Pertumbuhan Ekonomi Jakarta Tahun 2018 – 2023

Sumber: BPS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 2018 – 2023

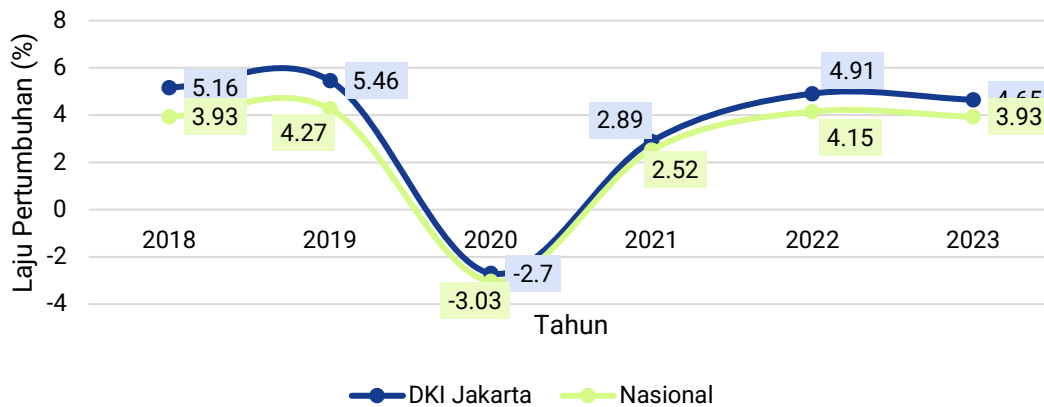
Dari sisi lapangan usaha, sektor utama yang berperan besar dalam mendorong pertumbuhan PDRB Jakarta selama kurun waktu lima tahun terakhir adalah sektor perdagangan besar, eceran, dan reparasi kendaraan bermotor; sektor informasi dan komunikasi; serta sektor jasa perusahaan. Dalam enam tahun terakhir, struktur ekonomi Jakarta didominasi oleh i) sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan kontribusi 15,61 persen, ii) sektor informasi dan komunikasi dengan persentase 12,68 persen, iii) sektor industri pengolahan dengan persentase 11,66 persen, iv) sektor konstruksi, v) sektor jasa keuangan dan asuransi dengan persentase 10,96 persen, serta vi) sektor jasa perusahaan dengan persentase 8,28 persen. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa struktur ekonomi Jakarta mengarah kepada sektor tersier dan sekunder.

Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan gambaran dari pertumbuhan ekonomi penduduk di suatu wilayah, dilihat dari kemampuan dan kualitas ekonomi masing-masing penduduknya. Dalam pembangunan jangka panjang, PDRB per kapita digunakan sebagai indikator makro untuk melihat rata-rata pertumbuhan ekonomi setiap individu di suatu wilayah.

Pertumbuhan PDRB per kapita Jakarta dalam kurun waktu lima tahun terakhir secara umum mengalami fluktuasi yang cukup tinggi, dari 5,16 persen di tahun 2018, sempat

mengalami percepatan sampai 5,46 persen di tahun 2019, tetapi pada tahun 2020 mengalami perlambatan yang signifikan hingga -2,7 persen karena Pandemi Covid-19. Namun demikian, pada tahun 2021 - 2022 PDRB per kapita berhasil tumbuh secara positif hingga 2,89 persen di tahun 2021 dan 4,91 persen di tahun 2022. Selanjutnya, di tahun 2023 laju pertumbuhan sedikit melambat menjadi 4,65 persen. Selama tahun 2018 – 2023 nilai PDRB per kapita Jakarta selalu lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan nasional.

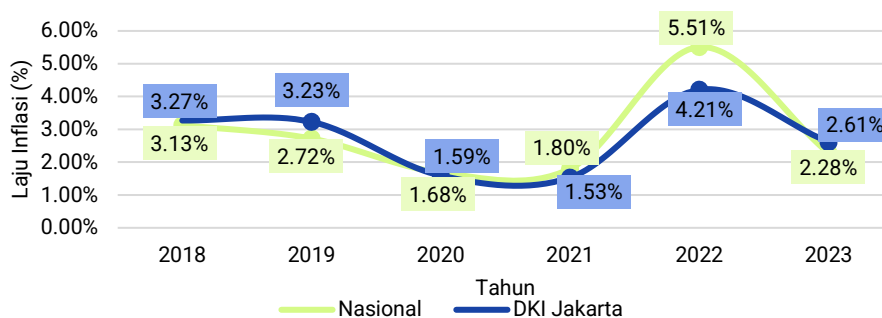


Gambar 2.19 Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita (ADHK) Jakarta Tahun 2018 – 2023

Sumber: BPS, 2023

B. Laju Inflasi

Laju inflasi Jakarta pada tahun 2018 – 2023 menunjukkan tren menurun dan relatif terjaga. Inflasi terendah di Jakarta terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 1,53 persen dan tertinggi pada tahun 2022 yaitu sebesar 4,21 persen.



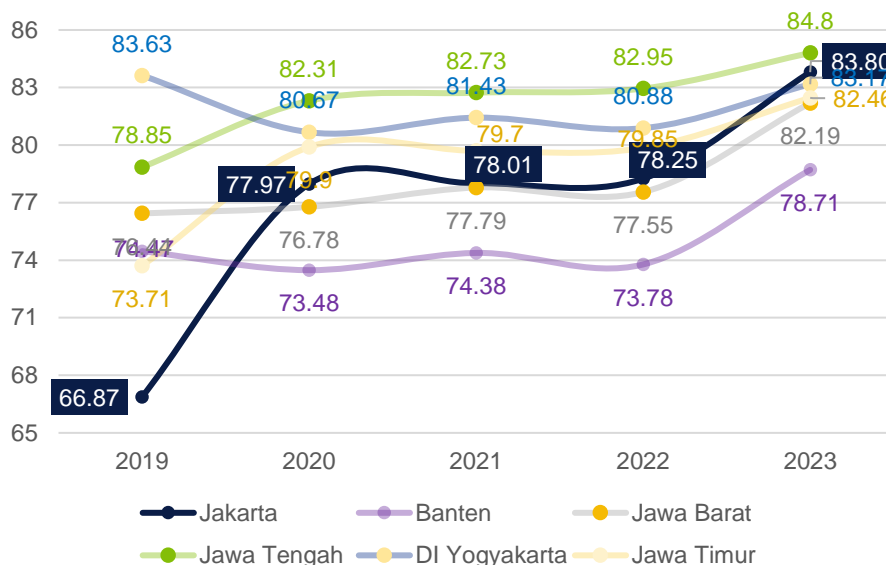
Gambar 2.20 Laju Inflasi Jakarta Tahun 2018 – 2023

Sumber: BPS, 2018 – 2023

Apabila dibandingkan dengan inflasi nasional, inflasi Jakarta memiliki tren yang hampir sama. Hal tersebut menunjukkan bahwa jika terjadi kenaikan harga barang di Jakarta, maka akan berpengaruh besar terhadap kenaikan harga barang secara nasional. Namun demikian, pada tahun 2020 dan 2021 terjadi penurunan inflasi secara signifikan yaitu inflasi Jakarta lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional sebagai dampak dari kondisi Pandemi Covid-19. Secara umum, inflasi Jakarta tahun 2021 telah menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan tahun 2020, terlebih lagi pada tahun 2022 yang mencapai 4,21 persen, di atas inflasi tahun 2018 dan 2019. Kondisi ini menunjukkan adanya pemulihan ekonomi yang disebabkan meningkatnya permintaan pasar yang ditunjukkan oleh bertumbuhnya tingkat inflasi. Pada tahun 2023, laju inflasi Jakarta mengalami penurunan menjadi 2,61 persen, menunjukkan bahwa pada tahun 2023 harga-harga komoditas yang diatur pemerintah, seperti tarif energi, terkendali dengan baik. Terkendalinya harga komoditas merupakan salah satu pencapaian baik dari semakin efektifnya program pengendalian inflasi oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jakarta, serta konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter (Bank Indonesia, 2023).

Indeks Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan diartikan sebagai suatu kondisi terpenuhinya pangan dari tingkat wilayah hingga perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, keamanan, keragaman, nilai gizi, dan keterjangkauan serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Untuk mengetahui tingkat ketahanan pangan tersebut, digunakan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang dapat menggambarkan status pilar ketahanan pangan suatu daerah. Terdapat tiga aspek utama yang digunakan dalam penentuan nilai IKP yaitu aspek ketersediaan pangan, aspek keterjangkauan pangan, dan aspek pemanfaatan pangan. Khusus untuk daerah perkotaan, aspek ketersediaan pangan tidak dimasukkan ke dalam perhitungan karena fungsi produksi pangan bukan menjadi karakteristik sebuah kota. IKP Jakarta dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.21 Perbandingan Capaian Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Jakarta dan Provinsi Lain di Pulau Jawa pada Tahun 2019 - 2023

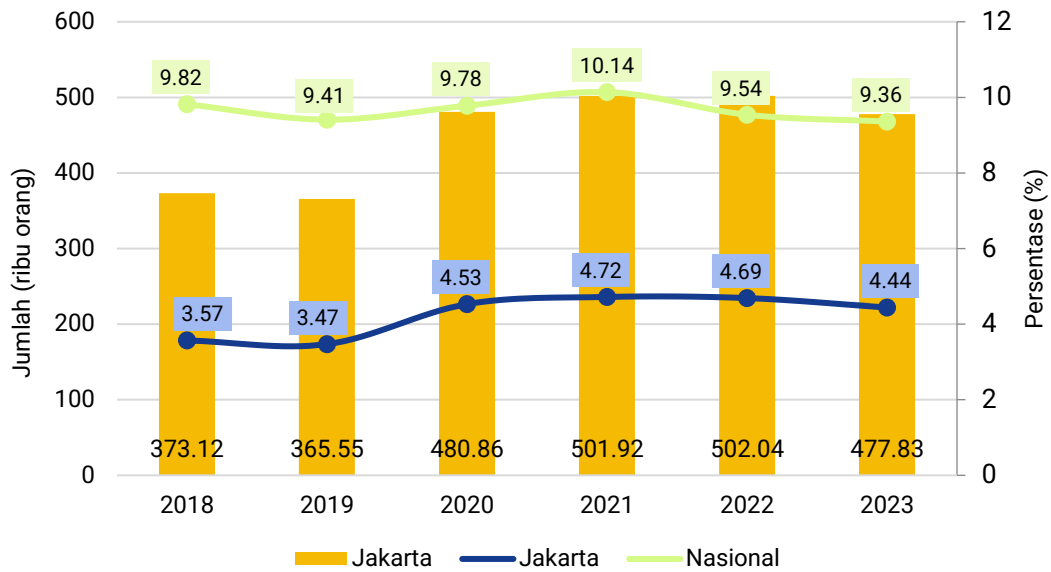
Sumber: Badan Pangan Nasional, 2023

Pada tahun 2023, Jakarta menempati urutan ke-3 dari 34 provinsi dalam hal ketahanan pangan dengan nilai IKP sebesar 83,80 yang masuk ke dalam kategori “Sangat tahan”. Indikasi dari peningkatan indeks ini adalah adanya perbaikan pada setiap aspek indikator penyusun indeks yaitu aspek keterjangkauan pangan dan aspek pemanfaatan pangan.

Kebutuhan pangan Jakarta 99,6 persen dipasok dari luar daerah di Indonesia ataupun impor dengan jenis komoditas sayur-sayuran, umbi-umbian, rimpang, buah-buahan, dan beras. Begitu juga pasokan daging hewan yang didatangkan dari daerah lain yang terus mengalami peningkatan. Sebagian besar pasokan pangan Jakarta berasal dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Lampung, dan Banten.

C. Tingkat Kemiskinan

Pada periode tahun 2018-2023, tingkat kemiskinan di Jakarta cenderung fluktuatif. Tahun 2018 tingkat kemiskinan berada pada angka 3,57 persen dan meningkat pada tahun 2019 persentase menjadi 3,47 persen. Di tahun 2020, pandemi Covid-19 berdampak pada peningkatan persentase angka kemiskinan secara signifikan hingga mencapai angka 4,53 persen. Pada tahun 2021 cenderung masih dalam kondisi dampak dari penyebaran Covid-19 dengan persentase angka 4,72 persen. Namun demikian, pada tahun 2022 dan 2023 kondisi perekonomian masyarakat semakin membaik sehingga tingkat kemiskinan berhasil mengalami penurunan hingga 4,44 persen.

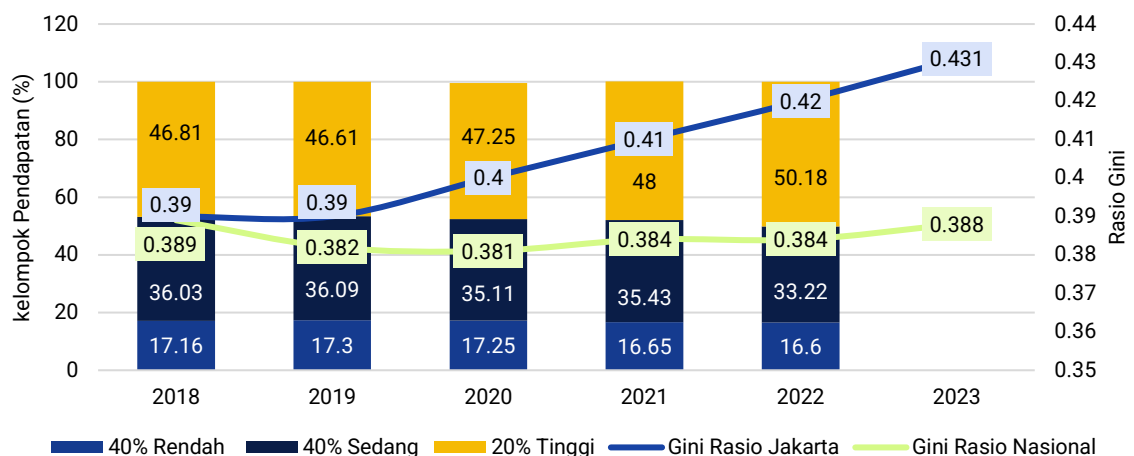


Gambar 2.22 Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Jakarta Periode 2018 – 2023

Sumber: BPS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 2018-2023

Selama enam tahun terakhir, jumlah penduduk miskin tertinggi di Jakarta terjadi pada tahun 2022 dengan jumlah 502.040 ribu orang. Seiring dengan kondisi perekonomian Jakarta yang berangsur membaik, jumlah penduduk miskin semakin berkurang di tahun 2023 menjadi 477.830 orang.

D. Rasio Gini



Gambar 2.23 Rasio Gini Jakarta 2018 - 2023

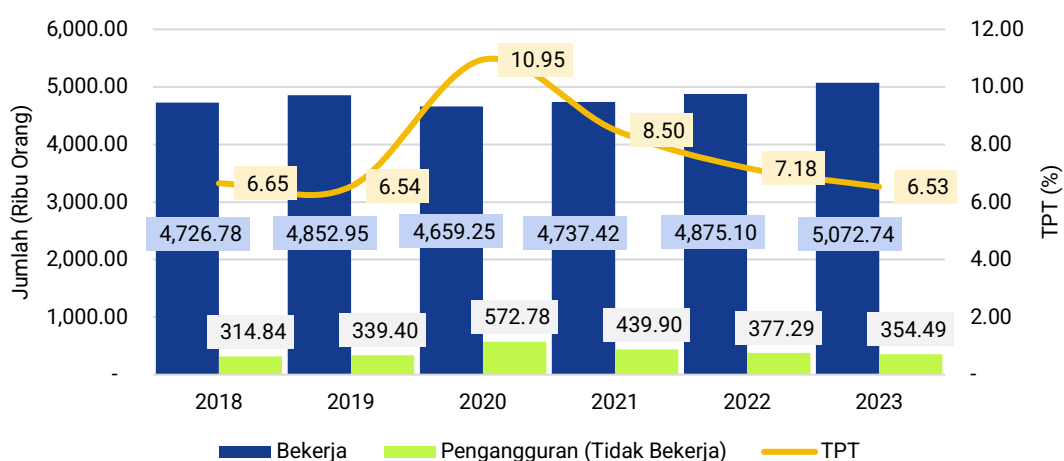
Sumber: BPS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 2018 – 2023

Secara umum Rasio Gini Jakarta pada rentang 2018 – 2023 kembali mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 dan 2019, Rasio Gini dapat dipertahankan di angka 3,9, namun pada tahun 2020 terjadi *outlier* yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19 yang menyebabkan krisis ekonomi global. Hal ini juga mempengaruhi Jakarta, karena pertumbuhan ekonomi mencapai minus sehingga menyebabkan banyaknya pemutusan hubungan tenaga kerja. Dalam konteks krisis ekonomi, penduduk berpendapatan rendah lebih rentan untuk mengalami dampak yang signifikan. Pada tahun 2019 – 2023 nilai Rasio Gini Jakarta terus meningkat dari 0,39 hingga 0,431. Angka ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan penduduk pada kelas bawah dan kelas atas semakin tinggi. Peningkatan ketimpangan erat kaitannya dengan tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin di Jakarta.

Berdasarkan tren Rasio Gini 2018 – 2023, ketimpangan pendapatan di Jakarta cenderung meningkat dan berada di atas rata-rata nasional. Artinya, ketimpangan pendapatan di Jakarta lebih besar dibandingkan dengan ketimpangan pendapatan secara keseluruhan di Indonesia. Tingginya ketimpangan pendapatan ini disebabkan oleh timpangnya akses ke lapangan pekerjaan yang memiliki nilai tambah tinggi bagi penduduk Jakarta karena perbedaan kualitas dan kapasitas tenaga kerja yang ada, dilihat dari pendidikan dan keahliannya. Fenomena tersebut terjadi karena adanya perbedaan akses terhadap pendidikan dan pelatihan profesional yang lebih banyak dinikmati oleh kelompok ekonomi menengah ke atas.

E. Tingkat Pengangguran Terbuka

Selama periode 2018 – 2023 terjadi gejolak pada performa ketenagakerjaan yang tergambarkan melalui peningkatan angka pengangguran terbuka. Hal ini disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang melanda selama tahun 2020.



Gambar 2.24 Tingkat Pengangguran Terbuka Jakarta 2018 – 2022

Sumber: BPS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 2023

Pada tahun 2020 tingkat pengangguran terbuka meningkat dibanding tahun 2019, dengan angka TPT mencapai 10,95 persen. Namun demikian angka tersebut terus turun seiring dengan perbaikan ekonomi global. Tercatat pada tahun 2022, TPT Jakarta kembali di bawah 10 persen, yaitu sebesar 7,18 persen dan terus menurun hingga tahun 2023 menjadi 6,53 persen. Meski mengalami penurunan, angka tersebut belum lebih baik dibanding kondisi sebelum pandemi, sehingga Jakarta masih memiliki tugas dalam rangka mencapai performa yang lebih baik dibanding tahun 2019.

Tabel 2.6 Jumlah Pengangguran Berdasarkan Pendidikan Tertinggi (Orang)
Jakarta Tahun 2018 – 2022

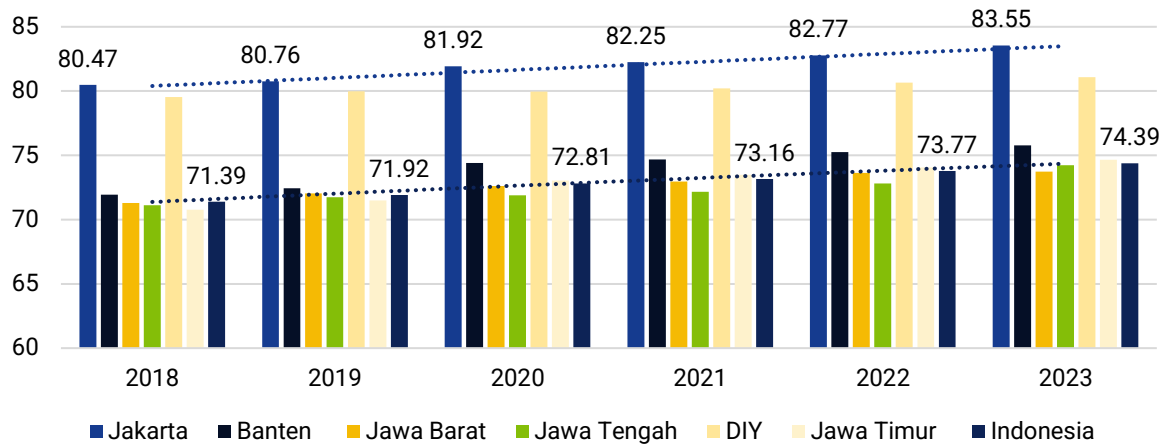
Tahun	SD ke Bawah	SMP	SMA	SMK	Diploma I/II/III	Universitas
2018	22.187	38.715	96.101	96.782	14.090	46.966
2019	25.452	40.028	97.863	108.184	13.524	35.850
2020	57.791	76.702	155.103	197.112	25.931	60.141
2021	38.881	52.713	129.246	147.392	11.942	59.725
2022	21.343	49.791	140.553	104.203	9.363	52.041
2023	24.320	57.450	121.360	89.500	7.280	54.590

Sumber: BPS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 2023

Melihat lebih dalam, penyumbang TPT tertinggi Jakarta selama 5 tahun terakhir adalah lulusan SMA dan SMK.

F. Indeks Pembangunan Manusia

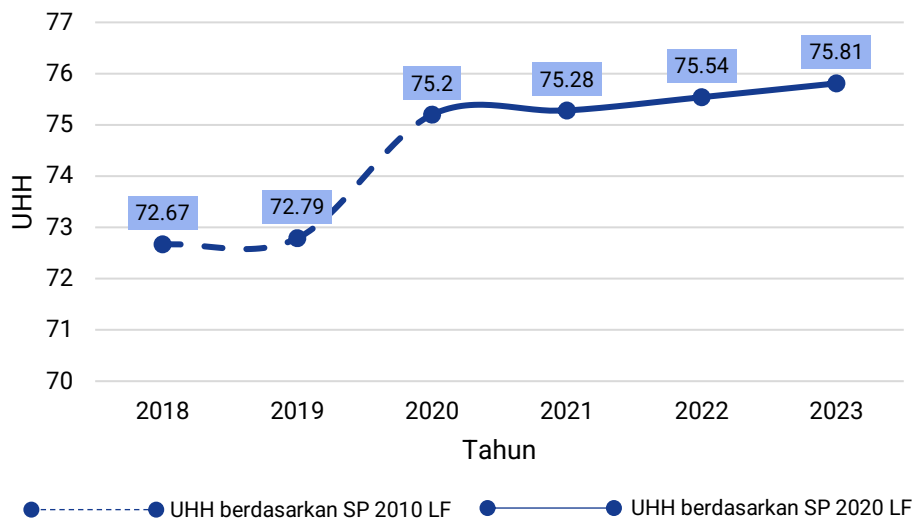
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jakarta pada tahun 2018 persentase IPM mencapai angka 80,47 persen dan terus meningkat hingga angka 83,55 persen 82,46 persen pada tahun 2023. IPM Jakarta dalam enam tahun terakhir selalu berada di atas rata-rata nasional, dan lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi lain seperti Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat pembangunan manusia dan kualitas hidup masyarakat Jakarta dapat dikatakan lebih baik dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, serta menunjukkan bahwa produktivitas dan akses terhadap sumber daya dan hasil pembangunan bagi masyarakat di Jakarta lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Berikut merupakan grafik perkembangan persentase Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jakarta dibandingkan dengan IPM provinsi lain di Pulau Jawa dan IPM nasional selama kurun enam tahun terakhir.



Gambar 2.25 Indeks Pembangunan Manusia Jakarta 2018 - 2023

Sumber: BPS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 2018 – 2023

Secara umum, IPM Jakarta termasuk ke dalam kelompok tinggi karena berada pada angka lebih dari 70 dan indeks tersebut terus meningkat dalam enam tahun terakhir. Peningkatan IPM Jakarta didorong oleh peningkatan nilai pada semua dimensi yaitu kesehatan, yang digambarkan oleh Usia Harapan Hidup (UHH); pendidikan, yang digambarkan oleh Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS); serta daya beli masyarakat yang digambarkan oleh pengeluaran per kapita.

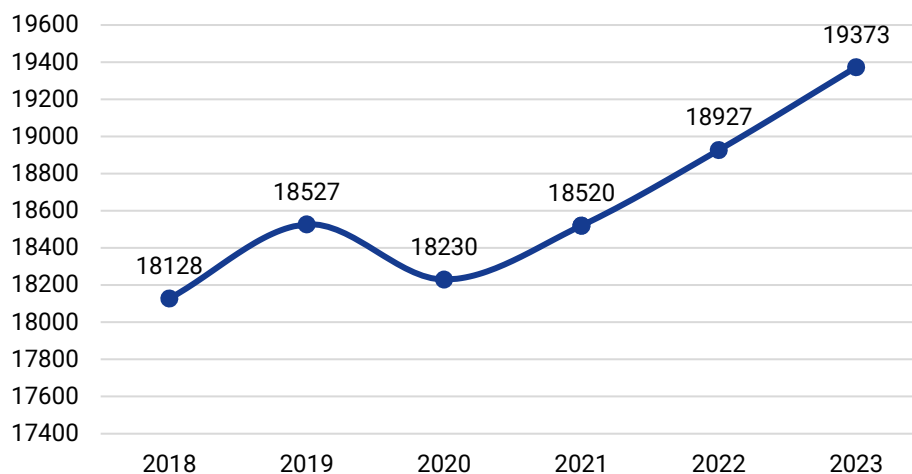


Gambar 2.26 Usia Harapan Hidup (UHH) 2018 – 2023 (tahun)

Sumber: BPS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 2023

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator statistik yang mencerminkan perkiraan usia rata-rata seorang individu dapat hidup dalam suatu populasi tertentu. UHH penduduk Jakarta meningkat dari tahun 2018 hingga tahun 2019 yaitu dari 72,67 tahun menjadi 72,79 tahun berdasarkan data dari hasil sensus penduduk tahun 2010 menggunakan metode *long form*. Pada tahun 2020, perhitungan dilakukan dengan menggunakan sumber data sensus penduduk tahun 2020 dengan metode *long form* sehingga terdapat peningkatan yang cukup signifikan karena perbedaan basis data. Pada tahun 2020 sampai tahun 2023 terus meningkat dari 75,2 tahun menjadi 75,81 tahun. UHH dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan. Dengan data yang menunjukkan tren yang terus meningkat, hal ini juga menunjukkan bahwa kesadaran dan akses masyarakat dalam pendidikan, kesehatan, serta lingkungan yang bersih meningkat setiap tahunnya menjadi semakin baik.

Rata-rata Lama Sekolah penduduk Jakarta pada tahun 2018 sampai tahun 2023 terus meningkat dari 11,05 hingga 11,45. Hal ini menunjukkan bahwa aksesibilitas, kualitas, dan kebijakan pendidikan, serta tingkat kesadaran masyarakat Jakarta terhadap pendidikan terus meningkat dari tahun ke tahun, dan sangat pesat di tahun 2021 hingga 2022. Peningkatan yang lebih tinggi di tahun 2021 ke 2022 dari tahun-tahun sebelumnya disebabkan karena kondisi yang semakin membaik setelah pandemi Covid-19 di tahun 2020-2021. Sementara itu, Harapan Lama Sekolah (HLS) Jakarta dari tahun 2018 hingga tahun 2023 juga mengalami peningkatan yang konsisten, dari 12,95 menjadi 13,33 yang menunjukkan adanya perbaikan dalam kesadaran dan kesempatan sekolah yang semakin besar bagi penduduk Jakarta dalam enam tahun terakhir.



Gambar 2.27 Pengeluaran Per Kapita 2018 – 2023 (Rp. ribu)

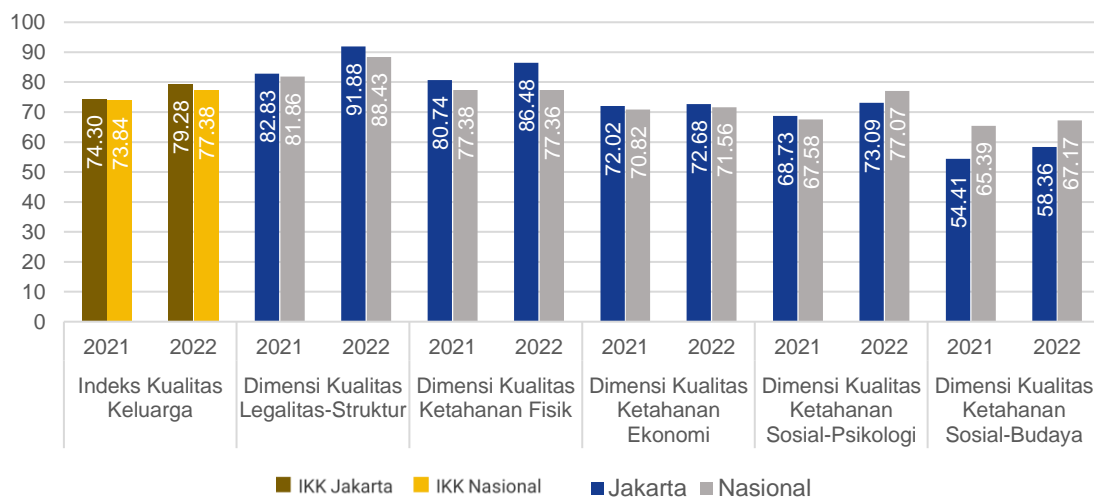
Sumber: BPS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 2022

Pengeluaran Per Kapita penduduk Jakarta pada tahun 2018 sampai 2019 meningkat yaitu dari 18.128 juta rupiah menjadi 18.527 juta rupiah. Namun demikian, angka tersebut menurun drastis pada tahun 2020 menjadi 18,23 juta karena pandemi Covid-19 yang menyebabkan berbagai kegiatan ekonomi melambat. Setelah itu, angka terus meningkat di tahun 2021 hingga 2023 menjadi 19.373 juta di tahun 2023 yang menunjukkan bahwa kondisi perekonomian Jakarta telah membaik dan terus meningkat hingga tahun 2023, beserta dengan daya beli atau pengeluaran masyarakatnya.

2.3.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

A. Kualitas Keluarga

Pengukuran pembangunan kualitas keluarga diukur menggunakan dua indeks, yaitu Indeks Kualitas Keluarga (IKK) dan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga). Indeks Kualitas Keluarga (IKK) menjadi salah satu alat untuk mengukur capaian pembangunan keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak, yang selanjutnya hasil indeks ini dapat dijadikan sebagai dasar pengidentifikasian masalah keluarga di suatu wilayah. IKK terdiri atas 5 dimensi dan 29 indikator yang meliputi Kualitas Legalitas Struktur (KLS), Kualitas Ketahanan Fisik (KKF), Kualitas Ketahanan Ekonomi (KKE), Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologi (KKSP), dan Kualitas Ketahanan Sosial-Budaya (KKSB).



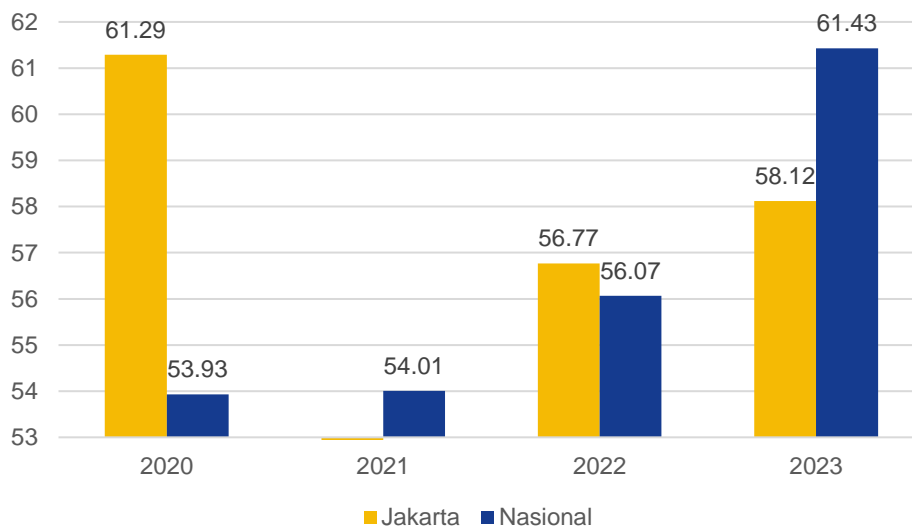
Gambar 2.28 Perbandingan Indeks Kualitas Keluarga (Metadata Baru) Jakarta dan Nasional pada Tahun 2021 dan 2022

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023

Pada tahun 2022, capaian IKK Jakarta adalah 79,28 yang masuk kategori “Responsif Gender dan Hak Anak”. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 74,30 yang masuk kategori “Cukup Responsif Gender dan Hak Anak”. Peningkatan nilai

indeks merupakan konsekuensi dari peningkatan pada seluruh dimensi yang mana Dimensi Kualitas Legalitas-Struktur mengalami peningkatan tertinggi. Walaupun, seluruh kondisi dimensi membaik, dua di antaranya masih berada di bawah capaian nasional yaitu Dimensi Kualitas Ketahanan Ekonomi (KKE) dan Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Budaya (KKSb).

Pada tahun 2021, capaian KKE berada di atas nasional namun tertinggal pada tahun 2022. Beberapa akibat dari penurunan ini adalah peningkatan jumlah rumah tangga yang tidak memiliki rumah, capaian persentase anak putus sekolah setara capaian nasional, penurunan jumlah perempuan bekerja, dan penurunan jumlah rumah tangga yang memiliki tabungan. Sementara itu, capaian dimensi KKSb selalu berada di bawah capaian nasional walaupun terjadi peningkatan capaian. Beberapa catatan kinerja yang berada di bawah capaian nasional adalah jumlah rumah tangga dengan tempat cuci tangan tetap, jumlah rumah tangga yang melakukan kegiatan sosial dan keagamaan, jumlah rumah tangga yang melakukan aktivitas bersama dalam mengakses internet, dan jumlah rumah tangga yang anggota keluarganya berusia di atas 60 tahun.



Gambar 2.29 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Jakarta Tahun 2020 - 2023

Sumber: BKKBN, 2023

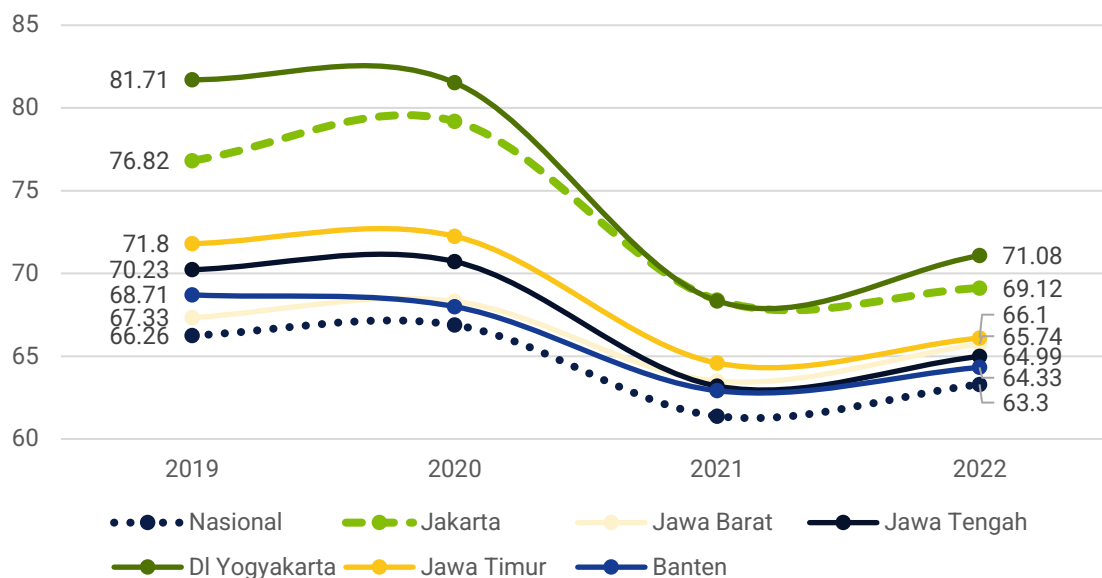
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu daerah dalam membangun kualitas keluarga dengan status pembangunan keluarga tangguh, berkembang, atau rentan. Indeks ini memiliki 3 dimensi, mencakup ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan, yang keseluruhan diturunkan ke dalam 17 variabel. Dimensi ketenteraman menggambarkan kondisi keluarga yang aman dan tenang baik dari segi hari maupun pikiran dalam kehidupan berkeluarga; dimensi kemandirian menunjukkan kemampuan keluarga untuk tidak bergantung pada keluarga lain dengan mampu memenuhi kebutuhan hidup serta mampu bertindak sesuai dengan keadaan; sedangkan dimensi kebahagiaan

menandakan kondisi keluarga yang memiliki unsur kasih sayang, menerima kondisi keluarga dan lingkungan, serta memberi kesempatan untuk mengaktualisasikan diri.

Capaian iBangga Jakarta pada tahun 2023 sebesar 58,12 masuk ke dalam kategori “Berkembang”. Capaian ini meningkat dibandingkan pencapaian tahun lalu, namun tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2021 karena data Jakarta tidak tersedia.

B. Perlindungan Anak

Untuk mengukur capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia serta efektivitas dan keberlanjutan upaya perlindungan anak, digunakan Indeks Perlindungan Anak (IPA). IPA menjadi potret capaian perlindungan anak melalui presentasi lima klaster, yaitu (i) hak sipil dan kebebasan, (ii) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, (iii) kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, (iv) pemanfaatan waktu luang, dan (v) perlindungan khusus. Kelima klaster tersebut dinilai menggunakan 27 indikator terpilih.

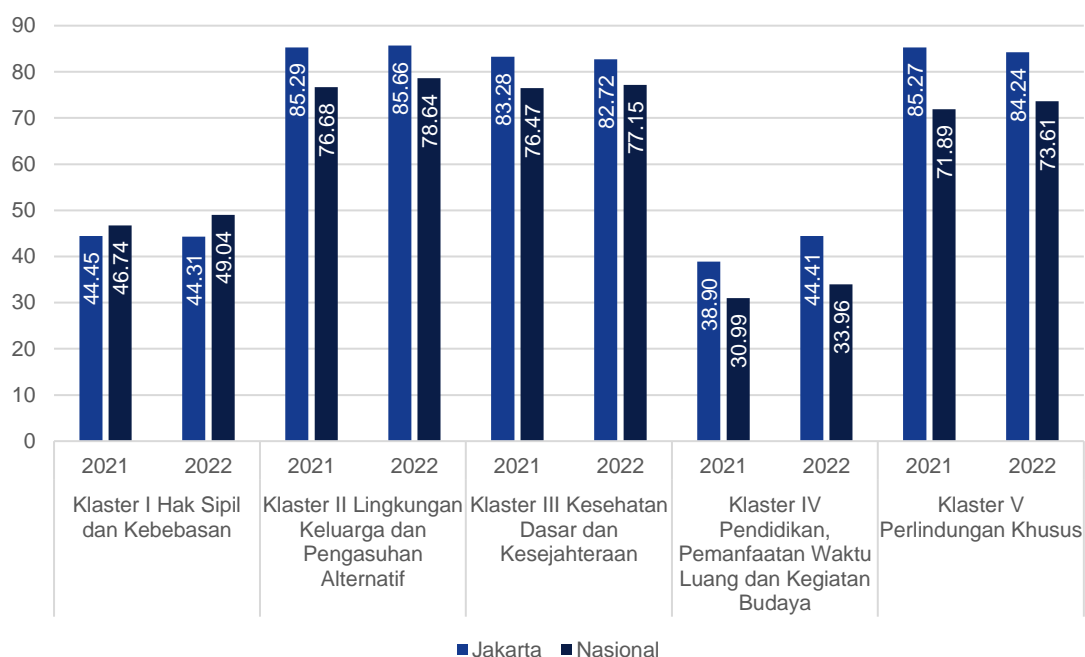


Gambar 2.30 Perbandingan Indeks Perlindungan Anak (IPA) Jakarta, Nasional, dan Provinsi Lain di Pulau Jawa pada Tahun 2019 – 2022

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023

Secara keseluruhan, pencapaian IPA Jakarta pada tahun 2019 hingga 2022 lebih tinggi dari pencapaian nasional. IPA Jakarta berfluktuasi selama empat tahun dengan pencapaian akhir pada tahun 2022 sebesar 69,12 yang membuat Jakarta mendapat predikat “Provinsi Layak Anak (PROVILA)”. Pencapaian ini lebih baik dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa, kecuali D.I. Yogyakarta yang mampu mencapai skor IPA sebesar 71,08 atau terbaik senasional. Dalam empat tahun terakhir, pencapaian IPA Jakarta relatif menurun. Namun, perbaikan IPA Jakarta pada tahun 2021-2022 menunjukkan Jakarta terus berusaha menciptakan lingkungan yang aman,

adil, dan mendukung bagi pertumbuhan serta perkembangan anak-anak, salah satunya kesuksesan menekan angka perkawinan anak di Jakarta. Langkah-langkah yang Jakarta telah ambil dalam menekan angka perkawinan pada usia anak dilakukan melalui berbagai program seperti mendorong anak wajib program pendidikan 12 tahun, menyediakan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) untuk anak lulusan SMA agar dapat menempuh pendidikan tinggi, serta menggencarkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terkait pencegahan perkawinan pada usia anak.



Gambar 2.31 Perbandingan Klaster dalam Indeks Perlindungan Anak (IPA) Jakarta dan Nasional pada Tahun 2021 dan 2022

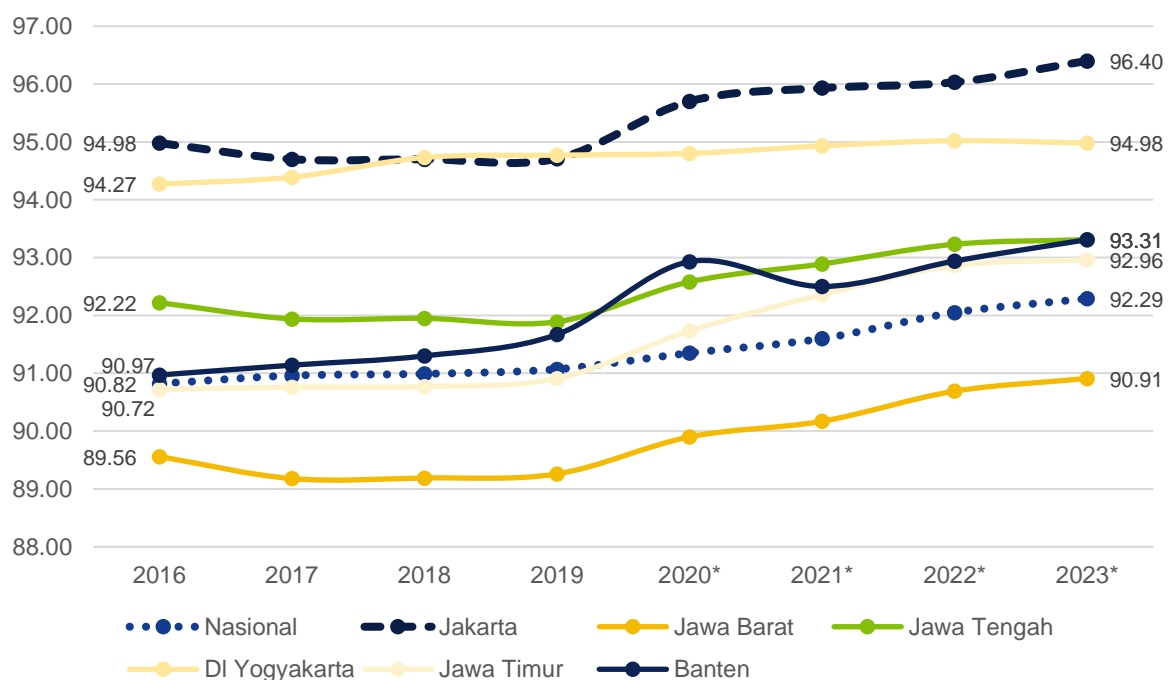
Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023

Dari lima klaster, hanya Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan yang capaian Jakarta berada di bawah rata-rata capaian nasional. Pada tahun 2021 dan 2022, skor Jakarta pada klaster ini masing-masing sebesar 44,45 dan 44,31, dibandingkan dengan rata-rata skor nasional sebesar 46,74 dan 49,04. Posisi ini merupakan konsekuensi dari beberapa indikator penyusun klaster yang mengalami penurunan capaiannya atau posisinya tidak lebih baik dari nasional.

Persentase anak (5 – 17 tahun) di Jakarta yang pernah mengunjungi perpustakaan atau memanfaatkan taman bacaan masyarakat terendah kedua senasional setelah Provinsi Papua. Akses yang lebih mudah ke teknologi digital seperti ponsel pintar, komputer, atau tablet memberikan kesempatan yang lebih luas bagi anak untuk belajar dan mendapatkan informasi

Selain itu, persentase anak (10 - 17 tahun) di Jakarta yang pernah mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar dan kegiatan organisasi selain di tempat kerja atau sekolah jauh lebih rendah dibandingkan persentase nasional. Selain akibat maraknya perkembangan gaya hidup individualistis dan perkembangan teknologi hiburan digital yang dapat mengalihkan perhatian anak-anak dari kegiatan sosial dan organisasi di dunia nyata, prioritas terhadap dunia akademik atau profesionalisme kerja memberikan tekanan yang lebih tinggi kepada anak-anak untuk memberikan waktu dan tenaga di luar kegiatan sosial.

C. Pembangunan Gender



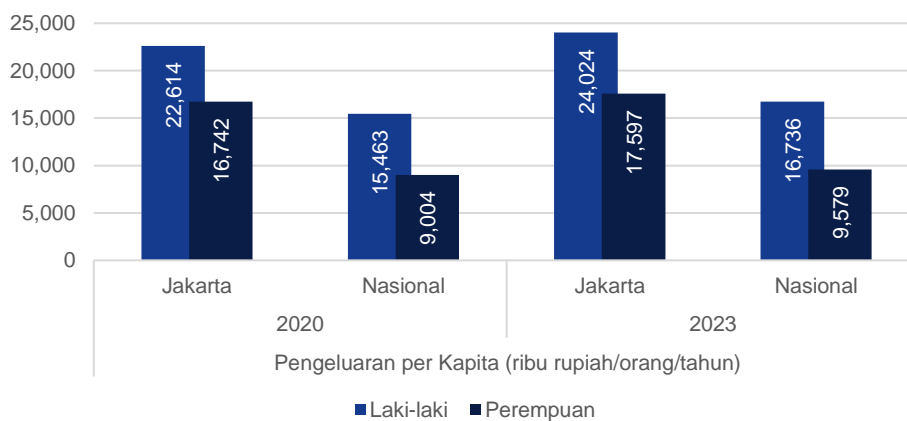
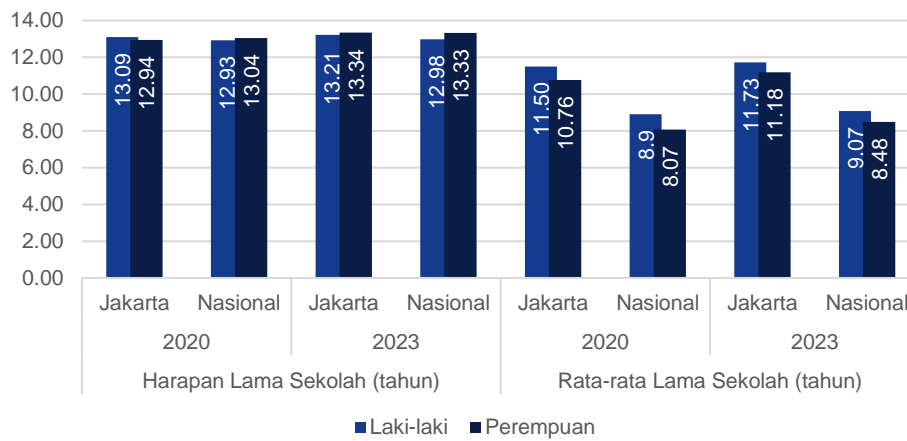
*) IPG tahun 2020-2023 menggunakan IPM yang dihitung berdasarkan hasil SP2020LF

Gambar 2.32 Perbandingan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Jakarta, Nasional, dan Provinsi Lain di Pulau Jawa pada Tahun 2016 – 2023

Sumber: BPS, 2024

IPG Jakarta selama delapan tahun cenderung meningkat, dengan pencapaian sebesar 95,24 pada tahun 2023 (status capaian: Kesetaraan Gender Menengah Tinggi). Capaian tersebut di atas capaian nasional dan di atas capaian provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa. Peningkatan hasil IPG menunjukkan kesadaran dan implementasi kesetaraan gender di Jakarta terus membaik dari tahun ke tahun, terutama dalam pendidikan, kesehatan, dan partisipasi ekonomi. Namun, di lain sisi angka tersebut juga masih menunjukkan manfaat dan hasil pembangunan yang didapatkan perempuan masih di bawah laki-laki.

RPJPD JAKARTA 2025-2045



Gambar 2.33 Perbandingan Komponen dalam Indeks Pembangunan Gender (IPG) Jakarta dan Nasional pada Tahun 2020 dan 2023

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023

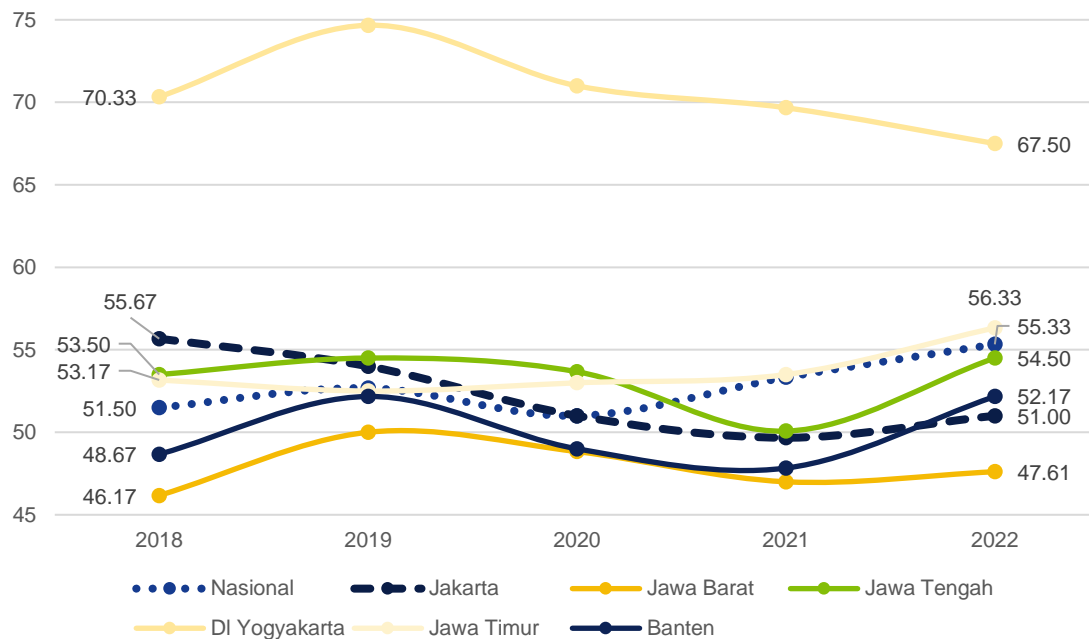
Dalam dimensi usia panjang dan hidup sehat, terlihat bahwa di Jakarta, UHH perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki dengan perbedaan sekitar 5-6 tahun. Perbedaan angka ini disebabkan oleh beragam faktor mulai dari biologis, penyakit bawaan, lingkungan, gaya hidup dan perilaku kesehatan, kesehatan mental dan stres, hingga risiko dalam pekerjaan.

Perbedaan yang signifikan juga tidak terlihat pada indikator HLS dan RLS. Capaian HLS Jakarta untuk penduduk laki-laki dan perempuan adalah sekitar 13 tahun. Hal ini berarti baik laki-laki maupun perempuan memiliki harapan peluang yang sama untuk mendapatkan pendidikan hingga Diploma I. Sementara itu, nilai RLS Jakarta laki-laki terpaut 7-9 bulan lebih lama dibandingkan RLS Jakarta perempuan. Walaupun perbedaan lama sekolah tidak signifikan berbeda, perlu dipastikan bahwa kualitas pengajaran yang diterima penduduk laki-laki dan perempuan sama serta didukung oleh lingkungan tanpa diskriminasi dan kekerasan.

Sementara itu, dalam dimensi standar hidup layak, pengeluaran per kapita yang disesuaikan dihitung berdasarkan paritas daya beli 66 komoditas makanan dan 30 komoditas non-makanan. Pada tahun 2023, penduduk Jakarta secara keseluruhan mengalami peningkatan pengeluaran per kapita dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, disparitas pengeluaran per kapita masih terjadi di antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dapat dijelaskan berdasarkan perbedaan pendapatan laki-laki dan perempuan akibat perbedaan kesempatan dan akses bekerja serta kesenjangan upah. Selain itu, perbedaan gender dalam pengelolaan rumah tangga yang tidak seimbang seperti pengeluaran yang berkaitan dengan rumah tangga dan keluarga sering dibebankan kepada perempuan membuat pengeluaran per kapita laki-laki dan perempuan timpang.

D. Pembangunan Pemuda

Untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda, digunakan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang dikeluarkan oleh Kementerian PPN/Bappenas. IPP tersebut dihitung berdasarkan lima domain yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi.

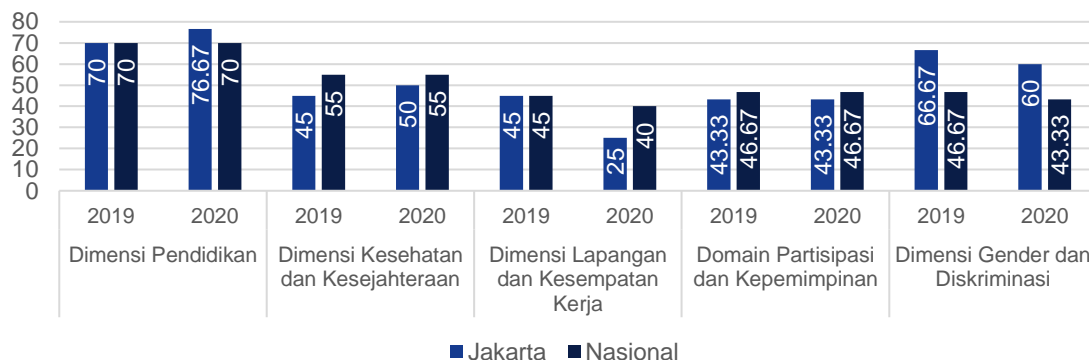


Gambar 2.34 Perbandingan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Jakarta, Nasional, dan Provinsi Lain di Pulau Jawa pada Tahun 2018 - 2022

Sumber: Kementerian Pemuda dan Olahraga, 2022

Capaian IPP Jakarta cenderung menunjukkan penurunan dari tahun 2018 ke tahun 2022, dan semakin berada di bawah capaian Indeks Pembangunan Pemuda Nasional hingga pada tahun 2021 mencapai skor paling rendah sebesar 49,67.

Bila ditinjau dari domain penyusunnya, terdapat tiga domain yang capaian Jakarta lebih rendah dibandingkan rata-rata capaian nasional. Domain pertama adalah Domain Kesehatan dan Kesejahteraan. Tingginya persentase remaja perempuan (15-18 tahun) yang sedang hamil dan persentase pemuda yang menjadi korban kejahatan menjadi kontributor utama dalam rendahnya capaian Jakarta pada domain ini. Tingginya persentase remaja perempuan yang sedang hamil dipicu oleh peningkatan kasus kehamilan yang tidak diinginkan (*unintended birth*). Hal ini tentu tidak bisa diabaikan karena kehamilan yang tidak diinginkan berakibat pada faktor-faktor lain seperti sosial (putus sekolah dan kemiskinan), ekonomi (beban finansial dan penurunan produktivitas), kesehatan (risiko kesehatan ibu dan anak serta kesehatan mental), hingga terhadap anak yang dilahirkan (kurangnya perawatan dan perhatian serta dampak psikologis).



Gambar 2.35 Perbandingan Domain Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Jakarta dan Nasional pada Tahun 2019 dan 2020

Sumber: Kementerian Pemuda dan Olahraga, 2021

Sementara itu, tingginya jumlah pemuda yang menjadi korban kejahatan diakibatkan oleh naiknya kasus kejahatan dengan pemuda sebagai korbannya, seperti kasus pencurian, pencurian dengan kekerasan, pemaksaan (*abuse*), dan kekerasan seksual. Dalam waktu mendatang, perlu diantisipasi jenis kejahatan digital yang erat hubungannya dengan aktivitas pemuda. Kejahatan digital dapat berupa *cyberbullying*, pencurian identitas, penipuan daring, hingga eksploitasi dan pornografi.

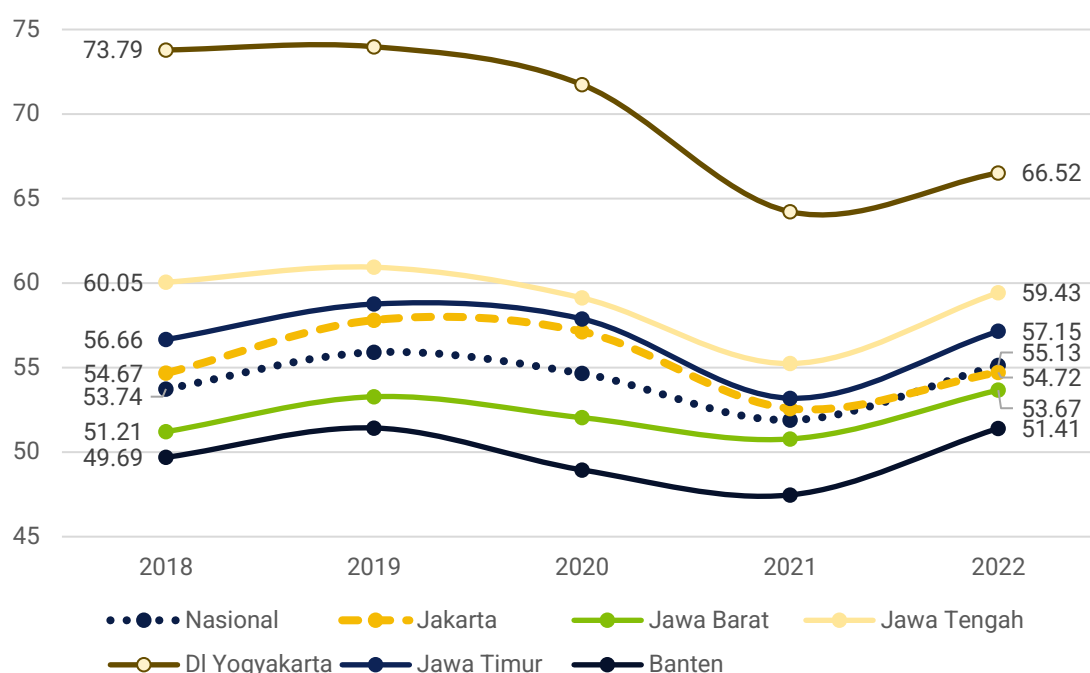
Kemudian, rendahnya capaian Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja Jakarta pada tahun 2020 diakibatkan oleh tingginya TPT pemuda dan rendahnya jumlah pemuda wirausaha kerah putih. Tingginya TPT pemuda merupakan imbas dari pandemi Covid-19 yang menutup banyak lapangan kerja serta kesempatan kerja bagi tenaga kerja baru. Namun, selain dampak dari pandemi, kualitas pemuda dan rendahnya daya saing pemuda Jakarta di pasar kerja juga berkontribusi terhadap tingginya pengangguran selama tahun 2021. Pola pikir pemuda yang lebih memilih untuk bekerja sebagai pegawai atau karyawan alih-alih sebagai wirausahawan yang mampu membuka lapangan pekerjaan baru juga berkontribusi terhadap tingkat pengangguran pemuda. Hal ini juga tergambar dari capaian indikator jumlah pemuda wirausaha kerah putih yang lebih rendah dibandingkan dengan nasional.

Domain ketiga adalah Domain Partisipasi dan Kepemimpinan yang terdiri tiga indikator penyusun yaitu persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan, persentase pemuda yang aktif dalam organisasi, dan persentase pemuda yang menyampaikan saran atau pendapat dalam rapat. Capaian Jakarta pada ketiga indikator-indikator penyusun tersebut berada di bawah capaian rata-rata nasional yang mengakibatkan nilai Domain Partisipasi dan Kepemimpinan lebih rendah. Rendahnya capaian Jakarta dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal pemuda seperti belum adanya kesadaran yang kuat dalam pemuda Jakarta untuk berkontribusi aktif dalam

lingkungan tempat tinggal atau menyuarakan pendapat dalam forum tertentu. Selain itu, adanya stigma yang melekat pada pemuda bahwa pemuda belum berpengalaman dan adanya risiko untuk berpendapat secara bebas dan terbuka di ruang publik membatasi kesempatan pemuda untuk mampu menyampaikan saran atau pendapat di dalam rapat.

E. Pembangunan Kebudayaan

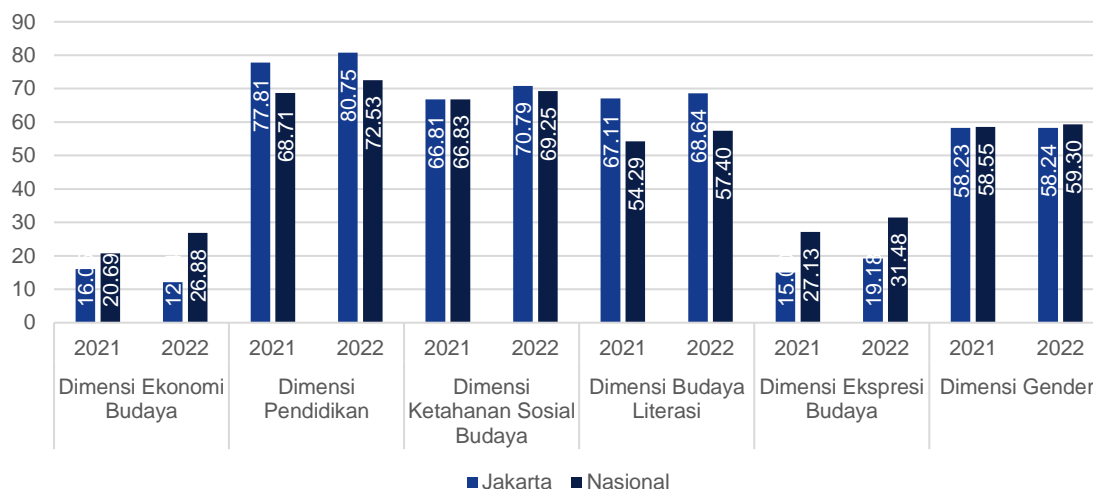
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan instrumen untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan.



Gambar 2.36 Perbandingan Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Jakarta, Nasional, dan Provinsi Lain di Pulau Jawa pada Tahun 2018 - 2022

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023

Capaian IPK Jakarta mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 54,72. Pencapaian tertinggi berada pada tahun 2019 dengan nilai 57,81 yang disebabkan oleh perbaikan pada semua dimensi. Namun, dalam periode 2020 hingga 2021, skor IPK Jakarta mengalami penurunan relatif kecil diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Nilai terendah yang dicapai Jakarta adalah 52,58 pada tahun 2021 diakibatkan oleh penurunan skor pada Dimensi Ekspresi Budaya, Dimensi Ketahanan Sosial Budaya, dan Dimensi Budaya Literasi.



Gambar 2.37 Perbandingan Capaian Dimensi Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Jakarta dan Nasional pada Tahun 2021 dan 2022

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023

Capaian Dimensi Ekspresi Budaya menurun secara tajam pada tahun 2021 sebesar 15 poin dan menjadi terendah dibandingkan dimensi lain. Hal ini diakibatkan oleh rendahnya partisipasi rumah tangga dalam menyelenggarakan atau menghadiri upacara adat setahun terakhir, rendahnya partisipasi penduduk dalam pertunjukan seni baik sebagai pelaku maupun pendukung, serta rendahnya penduduk berusia di atas 10 tahun yang aktif mengikuti organisasi.

Penurunan Dimensi Ketahanan Sosial Budaya pada tahun 2021 sebesar 66,81 diakibatkan oleh rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan gotong royong dan kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar, serta adanya kekhawatiran saat berjalan kaki sendirian dan perasaan tidak aman di lingkungan tempat tinggal.

Penurunan dimensi Budaya Literasi pada tahun 2021 sebesar 67,11 diakibatkan oleh rendahnya penduduk usia di atas 10 tahun yang mengunjungi perpustakaan atau memanfaatkan taman bacaan masyarakat.

Pada tahun 2022, sebagian besar dimensi mengalami perbaikan sehingga mampu meningkatkan skor IPK Jakarta. Namun, sama dengan tahun-tahun sebelumnya, Dimensi Ekonomi Budaya memiliki capaian yang selalu rendah dibandingkan dengan capaian nasional. Capaian pada tahun 2022 bahkan lebih buruk dibandingkan pada masa pandemi Covid-19. Dimensi Ekonomi Budaya merupakan aspek dalam pembangunan kebudayaan yang melihat hasil pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dari segi aktivitas ekonomi. Hasil pemanfaatan ini dihitung berdasarkan persentase penduduk berusia di atas 15 tahun yang menjadikan keterlibatan dalam pertunjukan seni (baik sebagai pelaku maupun pendukung) menjadi sumber penghasilan.

Pada tahun 2022, hanya terdapat 0,2 persen penduduk usia 15 tahun ke atas di Jakarta yang memiliki sumber penghasilan dari keterlibatan mereka sebagai pelaku atau pendukung pertunjukan seni yang berarti hanya ada sekitar 1 dari 500 penduduk Jakarta.

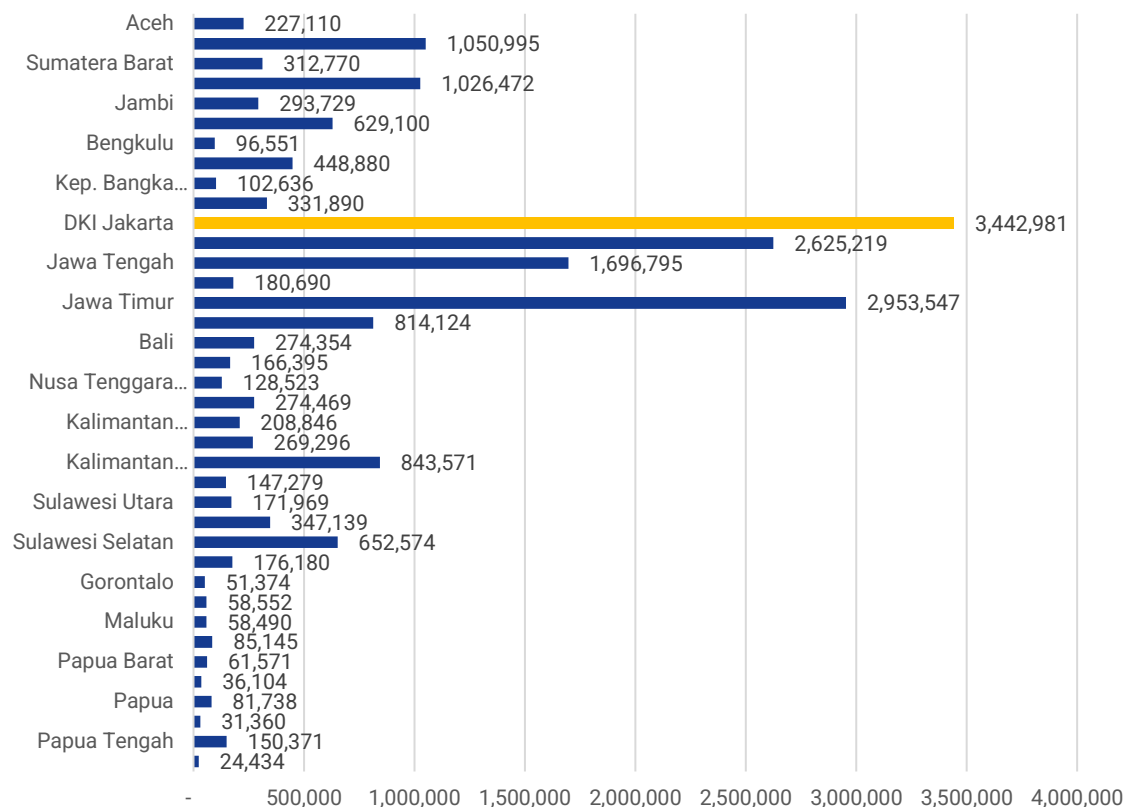
2.4. Aspek Daya Saing

2.4.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

Daya saing daerah menggambarkan kapasitas ekonomi daerah yang dapat menghasilkan daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi untuk masuk ke suatu daerah guna menciptakan nilai tambah bagi peningkatan ekonomi daerah. Pada bagian ini akan dijelaskan sektor unggulan daerah yang menjadi penopang perekonomian dan sektor lainnya yang potensial untuk dikembangkan.

A. Produk Domestik Regional Bruto

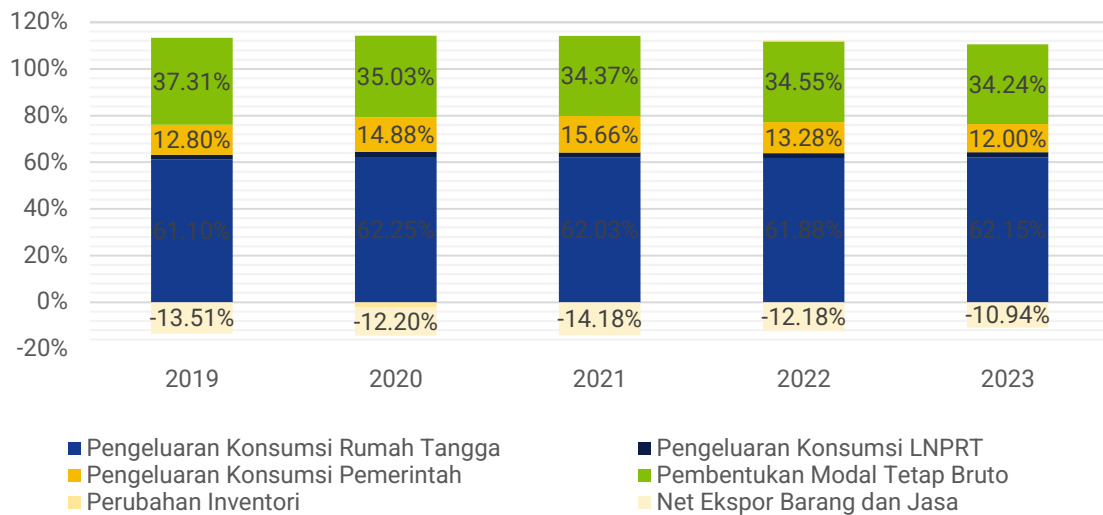
Pada tahun 2023 nilai PDRB Jakarta atas dasar harga berlaku mencapai Rp 3.442,87 triliun dan atas dasar harga konstan mencapai Rp 2.050,47 triliun, dengan *share* terhadap nasional sekitar 16,8 persen, tertinggi di antara 38 provinsi.



Gambar 2.38 PDRB 38 Provinsi Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2023 (Juta Rupiah)

Sumber: BPS, 2024

Dari segi produktivitas, capaian ekonomi Jakarta sangat kompetitif di level nasional. Dengan jumlah penduduk 10,6 juta, nilai PDRB per kapita mencapai 322 juta rupiah, yang juga paling tinggi di antara 38 provinsi. Hal ini menandakan sektor ekonomi di Jakarta cukup produktif dan menghasilkan nilai tambah yang tinggi.



Gambar 2.39 PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Jakarta Tahun 2019 – 2023

Sumber: BPS, 2024

Pengeluaran konsumsi rumah tangga selama lima tahun terakhir menjadi kontributor PDRB tertinggi di Jakarta. Dominasi tersebut menandakan bahwa kesejahteraan masyarakat sudah cukup baik serta pentingnya sektor perdagangan dan jasa untuk perputaran ekonomi di Jakarta. Namun demikian wilayah dengan proporsi konsumsi rumah tangga yang tinggi mungkin lebih rentan terhadap fluktuasi ekonomi. Jika terjadi penurunan dalam kondisi ekonomi, contohnya seperti pada Covid-19, konsumsi cenderung turun, yang menyebabkan dampak negatif pada kegiatan ekonomi lokal.

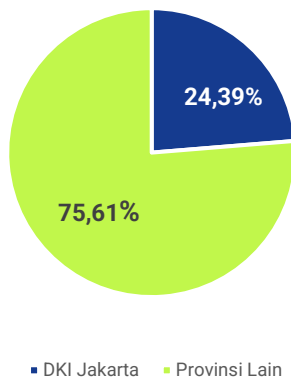
Sementara pembentukan modal tetap bruto sebagai kontributor PDRB terbesar kedua menandakan pertumbuhan total nilai barang modal dan peralatan yang dihasilkan cukup baik, yang berarti peningkatan produktivitas dan penambahan nilai ekonomi masih terus terjadi. Namun secara proporsi pembentukan modal bruto terus menurun dalam kurun lima tahun terakhir. Perlunya meningkatkan aspek ini sehingga akselerasi dan pelipatgandaan ekonomi di Provinsi Jakarta terus terjadi. Pengeluaran konsumsi pemerintah selama lima tahun berkisar di antara 13 – 14 persen. Nilai ini cukup moderat, namun menandakan belanja pemerintah untuk pembangunan terus terjadi secara konsisten.

Selama lima tahun terakhir, net ekspor Jakarta selalu mencapai angka minus, yang berarti nilai ekspor selalu lebih kecil dibanding nilai impornya. Hal ini menandakan Jakarta adalah wilayah pengguna, dibandingkan penghasil. Hal ini wajar, karena struktur ekonomi Jakarta didominasi oleh sektor perdagangan dan jasa atau tersier. Adapun nilai ekspor tertinggi yang dihasilkan di Jakarta adalah suku cadang kendaraan bermotor, perhiasan dan permata, serta ikan dan udang. Sementara impor terbesar di Jakarta adalah plastik dan barang dari plastik, besi dan baja, serta suku cadang kendaraan bermotor.

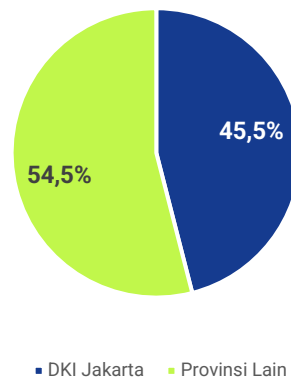
B. Keterbukaan Ekonomi

Keterbukaan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari indikator berupa rasio dari jumlah ekspor dan impor terhadap PDRB suatu daerah tersebut. Dalam konteks nasional Jakarta memiliki kontribusi terbesar dari nilai ekspor impor. Pada tahun 2023, nilai ekspor Jakarta mencapai 62,88 FOB miliar USD atau 24,29 persen dari total nilai ekspor nasional. Hal ini sejalan dengan proporsi impor sebesar 100,96 CIF miliar USD atau sebesar 45,5 persen dari total nilai impor nasional. Hal ini menunjukkan bahwa Jakarta masih menjadi gerbang utama dari sistem perdagangan Indonesia.

Share Nilai Ekspor Jakarta terhadap Nasional Tahun 2023



Share Nilai Impor Jakarta terhadap Nasional Tahun 2023

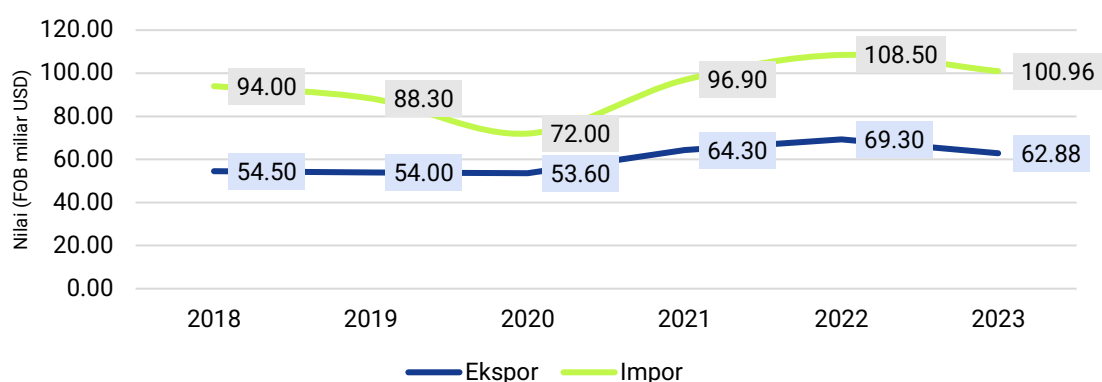


Gambar 2.40 Share Nilai Ekspor Impor Jakarta terhadap Nasional

Sumber: BPS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 2023

Adapun selama lima tahun terakhir capaian ekspor-impor Jakarta cukup fluktuatif, terutama akibat Covid-19. Namun demikian jika dibandingkan dengan nilai pada tahun 2018, capaian pada tahun 2022, baik dalam konteks ekspor maupun impor mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 nilai ekspor Jakarta sebesar 54,5 FOB miliar USD, namun mengalami penurunan pada tahun 2019 dan 2020 menjadi 54 dan 53,6 FOB miliar USD akibat pandemi Covid-19. Namun demikian angka tersebut kembali tumbuh pada tahun 2021 menjadi 64,3 FOB miliar USD dan tumbuh kembali secara signifikan pada tahun

2022 menjadi 69,3 FOB miliar USD, meskipun terjadi penurunan ekspor di tahun 2023 menjadi 62,88 FOB miliar USD. Hal ini menjadikan pertumbuhan nilai ekspor rata-rata Jakarta selama lima tahun terakhir sebesar 6,52 persen. Dari sisi impor juga memiliki pola yang serupa dengan perkembangan ekspor. Pada tahun 2018 nilai impor Jakarta sebesar 94,5 ICF miliar USD, kemudian turun menjadi 72 ICF miliar USD akibat pandemi Covid-19. Perbaikan perekonomian dunia kembali meningkatkan nilai impor Jakarta pada tahun 2021 menjadi 96,9 ICF miliar USD. Pada tahun 2022 tercatat nilai impor Jakarta mencapai 108,5 ICF miliar USD dan tahun 2023 menjadi 100,96 ICF miliar USD, dengan pertumbuhan rata-rata selama periode 2018 – 2023 sebesar 5,51 persen.



Gambar 2.41 Perkembangan Ekspor Impor Jakarta Tahun 2018 – 2023

Sumber: BPS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 2023

C. Ekonomi Hijau

Ukuran kemajuan pembangunan Ekonomi Hijau dapat dilihat melalui Indeks Ekonomi Hijau yang terdiri dari tiga pilar, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan total 15 indikator sebagai data pengukuran. Adapun Jakarta selama periode 2017 – 2021 memiliki capaian Indeks Ekonomi Hijau dalam kelompok baik yang dengan rata-rata capaian terus meningkat, dari 50,39 pada tahun 2017 dan mencapai 53,4 pada tahun 2021. Adapun capaian Indeks Ekonomi Hijau Jakarta selama periode 2017 – 2021 sebagaimana Tabel 2.14.

Tabel 2.5 Indeks Ekonomi Hijau Jakarta 2017 – 2021

Pilar	No	Indikator	Skor Indeks				
			2017	2018	2019	2020	2021
Ekonomi	1	Intensitas emisi	99,97	100	100	100	99,96
	2	Intensitas energi final	100	100	100	100	100
	3	Pendapatan regional domestik bruto (PDRB) per kapita	96,32	98,18	99,96	98,9	100

Pilar	No	Indikator	Skor Indeks				
			2017	2018	2019	2020	2021
Ekonomi	4	Produktivitas pertanian	53,23	68,97	53,3	50	56,69
		a. produktivitas padi	61,37	37,93	6,6	0	13,38
		b. produktivitas kelapa sawit	-	-	-	-	-
		c. produktivitas perikanan budidaya	45,1	100	100	100	100
	5	Produktivitas tenaga kerja sektor industri	100	100	100	100	100
	6	Produktivitas tenaga kerja sektor jasa	100	100	100	100	100
Skor Pilar Ekonomi			91,59	94,52	92,21	91,48	92,77
Sosial	7	Rata-rata lama sekolah	90,2	90,5	90,6	91,3	91,7
	8	Usia Harapan Hidup	85,83	86,41	86,93	87,56	88,1
	9	Tingkat kemiskinan	71	72,54	73,31	65,15	63,69
	10	Tingkat pengangguran	65,5	69,58	70,5	33,75	54,17
	Skor Pilar Sosial			78,13	79,76	80,33	69,44
Lingkungan	11	Persentase luas tutupan hutan dari luas daratan	0	0	0	0,94	0,94
	12	Bauran energi baru terbarukan dari sumber energi primer	12,82	9,54	14,95	27,7	20,12
	13	Kualitas air permukaan pada parameter BOD	0	0	0	0	0
	14	Persentase lahan gambut terdegradasi (penurunan tutupan gambut)	-	-	-	-	-
	15	Kualitas udara pada parameter NO ₂	44,35	47,42	28,09	26,39	27,88
	16	Persentase penurunan emisi kumulatif dari <i>baseline</i>	15,74	19,21	22,45	24,6	57,94
	Skor Pilar Lingkungan			14,58	15,23	13,1	15,92
SKOR INDEKS EKONOMI HIJAU			50,39	51,93	50,28	49,3	53,4

Klasifikasi Skor Indeks Ekonomi Hijau

0,00 – 25,00	Kurang
25,01 – 37,50	Sedang Tier 1
37,51 – 50,00	Sedang Tier 2
50,01 – 62,50	Baik Tier 1
65,51 – 75,00	Baik Tier 2
75,01 – 100,00	Sangat Baik

Sumber: Bappenas, 2023

Dari ketiga pilar pembentuk Indeks Ekonomi Hijau, Jakarta memiliki capaian terbaik pada pilar ekonomi dari 34 provinsi selama 2017 – 2021. Nilai tersebut dipengaruhi karena karakteristik Jakarta yang didominasi perkotaan dengan sektor penggerak ekonomi utama perdagangan jasa dan industri pengolahan. Hal ini berdampak pada tingginya nilai indikator produktivitas tenaga kerja sektor industri dan jasa. Karakteristik sektor jasa dan industri juga memiliki nilai tambah yang tinggi dibanding sektor

pertanian (primer), sehingga Jakarta memiliki PDRB per kapita yang tinggi, bahkan tertinggi di nasional.

Dari sisi intensitas emisi dan intensitas energi Jakarta juga memiliki capaian yang sangat baik yang berarti dari sisi ekonomi penggunaan energi dan emisi yang dihasilkan cukup efektif dalam level nasional. Di lain sisi produksi padi Jakarta menjadi satu-satunya indikator yang tidak mencapai predikat sangat baik pada pilar ekonomi. Sementara untuk produktivitas perikanan memiliki capaian sangat baik, hal ini juga diikuti oleh peningkatan konsumsi ikan selama 2017 – 2021.

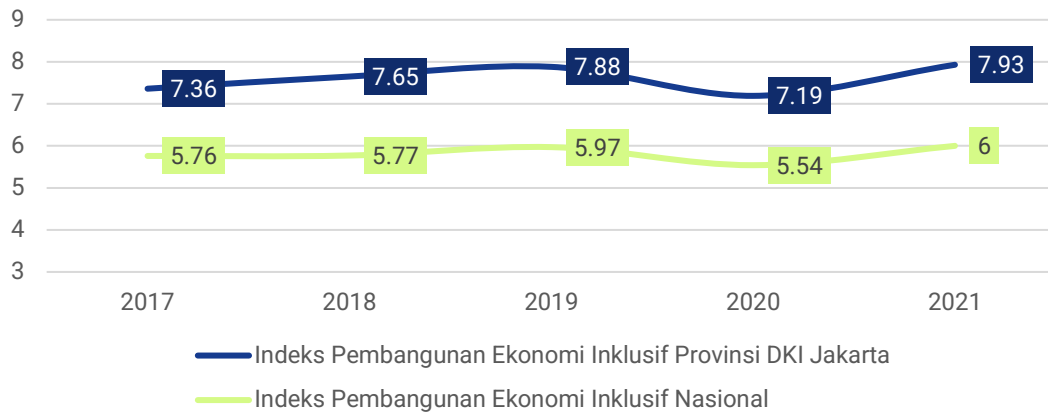
Dari pilar sosial Jakarta juga memiliki capaian yang baik, namun trennya mengalami penurunan pada tahun 2021 diakibatkan oleh indikator penyusun yang sifatnya sensitif dan mudah berubah setiap tahunnya, seperti tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka. Dari segi rata-rata lama sekolah dan Usia Harapan Hidup selalu mencapai predikat sangat baik, dan memiliki tren positif selama lima tahun.

Pilar lingkungan merupakan pilar yang kinerjanya masih perlu ditingkatkan oleh Jakarta. Sejak 2017 – 2021, capaian pilar lingkungan Jakarta secara berturut-turut termasuk dalam kategori rendah, dengan hampir seluruh capaian pembangunan pada indikator pembentuk pilar juga secara merata berada pada kategori rendah. Persentase luas tutupan hutan dari luas total daratan Jakarta rendah diakibatkan minimnya penggunaan lahan kawasan hutan di Jakarta. Rendahnya capaian tersebut karena Jakarta adalah provinsi dengan sifat perkotaan.

Indikator capaian lain yang masih menjadi permasalahan Jakarta pada pilar lingkungan adalah persentase bauran energi baru terbarukan yang hingga pada tahun 2021 persentase bauran energi baru berkelanjutan 0,08 persen.

D. Ekonomi Inklusif

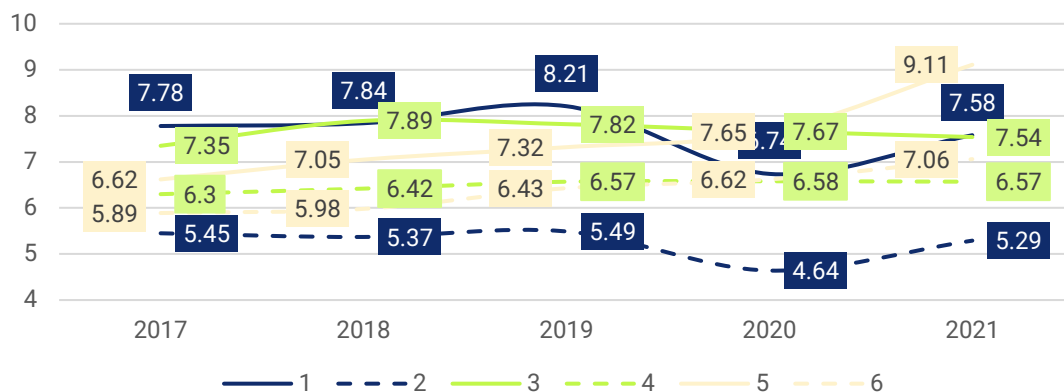
Dalam mengukur inklusivitas ekonomi, digunakan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif terdiri dari tiga pilar, yaitu Pilar Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi, Pilar Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan, dan Pilar Perluasan Akses dan Kesempatan Kerja. Adapun capaian Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif selama periode 2017 – 2021 sebagaimana gambar di bawah.



Gambar 2.42 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Jakarta 2017 – 2021

Sumber: Bappenas, 2023

Jika dibandingkan dengan capaian nasional, indeks ekonomi inklusif Jakarta memiliki capaian yang cukup baik. Selama kurun waktu lima tahun terakhir capaian pembangunan ekonomi inklusif Jakarta terus secara konsisten berada di atas rata-rata nasional. pada tahun 2020 capaian pembangunan ekonomi inklusif Jakarta menurun disebabkan pandemi Covid-19. Namun demikian, capaian tersebut kembali meningkat pada tahun 2021, bahkan melampaui capaian tertinggi terakhir sebelum Covid-19 (capaian tahun 2019). Hal disebabkan karena baiknya pembangunan ekonomi di Jakarta, terutama dari segi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dan perluasan akses dan kesempatan kerja. Untuk melihat lebih detail capaian pembangunan ekonomi inklusif Jakarta, perlu dilihat dari capaian masing-masing pilar selama lima tahun terakhir sebagaimana yang tergambarakan di bawah ini.



[1] Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Jakarta; [2] Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Nasional; [3] Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan Jakarta; [4] Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan Nasional; [5] Perluasan Akses dan Kesempatan Kerja Jakarta; [6] Perluasan Akses dan Kesempatan Kerja Nasional

Gambar 2.43 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Jakarta berdasarkan Tiga Pilar 2017 – 2021

Sumber: Bappenas, 2023

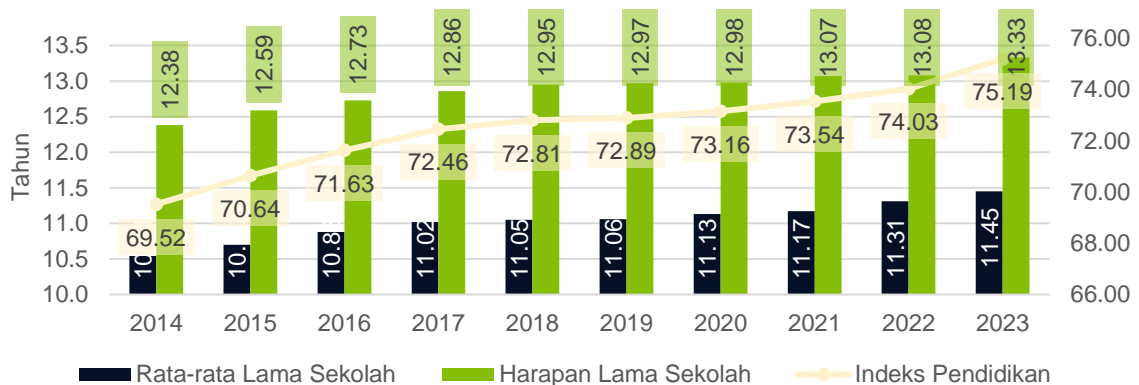
Jika dilihat dari tiga pilar Indeks Ekonomi Inklusif, yaitu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, dan perluasan akses dan kesempatan kerja, capaian Jakarta terus berada di atas capaian nasional. Dalam konteks pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, capaian Jakarta yang cukup tinggi dikarenakan sebagai pusat perekonomian dan ibu kota negara. Sementara dari pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, capaian penurunan kemiskinan Jakarta cukup baik, namun dalam konteks ketimpangan atau Rasio Gini masih perlu ditingkatkan. Dari segi perluasan akses dan kesempatan, capaian Jakarta sangat tinggi bahkan mencapai angka 9,11 di tahun 2021. Hal ini karena secara natural, infrastruktur dasar dan pembangunan manusia di Jakarta sudah berada di atas rata-rata nasional.

2.4.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia

A. Pendidikan

Jumlah penduduk Jakarta dan kondisi demografinya merupakan tantangan bagi pemerintah dalam menyediakan layanan pendidikan berkualitas yang merata. Pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, terdapat 1.746.854 peserta didik dari PAUD hingga SMA sederajat pada tahun 2022/2023, sedangkan pada tahun yang sama tercatat sebanyak 2.384.861 jiwa penduduk yang termasuk dalam usia sekolah (3-18 tahun). Dari data tersebut terdapat lebih dari 600.000 anak yang tidak terdata atau belum mengakses layanan pendidikan.

Untuk mengukur hasil pembangunan manusia di bidang pendidikan, maka digunakan Indeks Pendidikan. Indeks Pendidikan merupakan indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan merupakan penggabungan dua indikator bidang pendidikan yaitu Indeks Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Indeks Harapan Lama Sekolah (HLS).



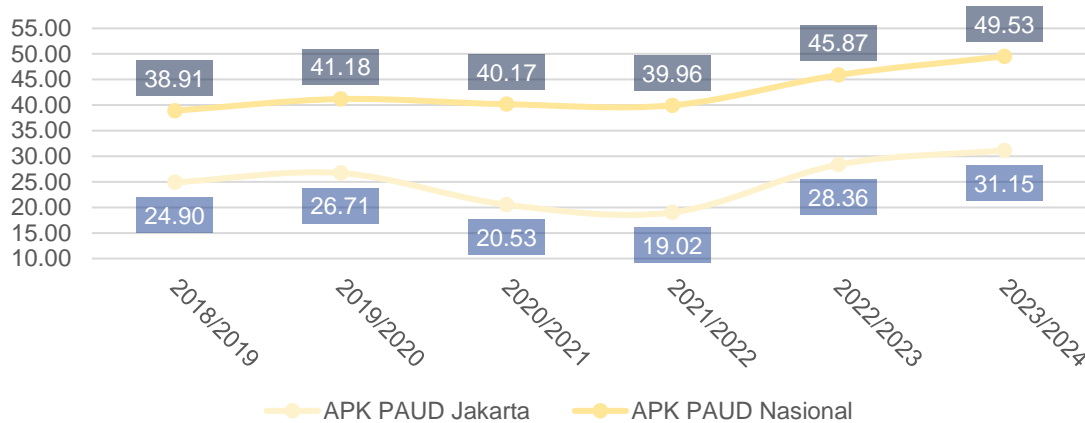
Gambar 2.44 Indeks Pendidikan, Rata-rata Lama Sekolah, dan Harapan Lama Sekolah Jakarta 2014 - 2022

Sumber: BPS dan Hasil Analisis Tim Penyusun, 2024

Selama periode tahun 2014 hingga tahun 2023 Indeks Pendidikan di Jakarta mengalami peningkatan setiap tahunnya. Angka ini mencerminkan perbaikan dalam beberapa dimensi atau komponen utama sistem pendidikan di Jakarta, seperti partisipasi pendidikan semakin tinggi, kualitas pendidikan semakin membaik, dan kesenjangan pendidikan pada kelompok-kelompok masyarakat yang rendah.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Jakarta juga tergambar melalui pencapaian yang ditunjukkan oleh rata-rata lama sekolah penduduk Jakarta yang meningkat, dari 10,54 di tahun 2014 menjadi 11,45 pada tahun 2023 atau setara dengan kelas XI. Peningkatan RLS menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk Jakarta yang telah menyelesaikan pendidikan dasar. Hal ini berimplikasi bahwa rata-rata penduduk Jakarta memiliki kemampuan membaca, menulis, berhitung serta keterampilan dan pengetahuan dasar lainnya.

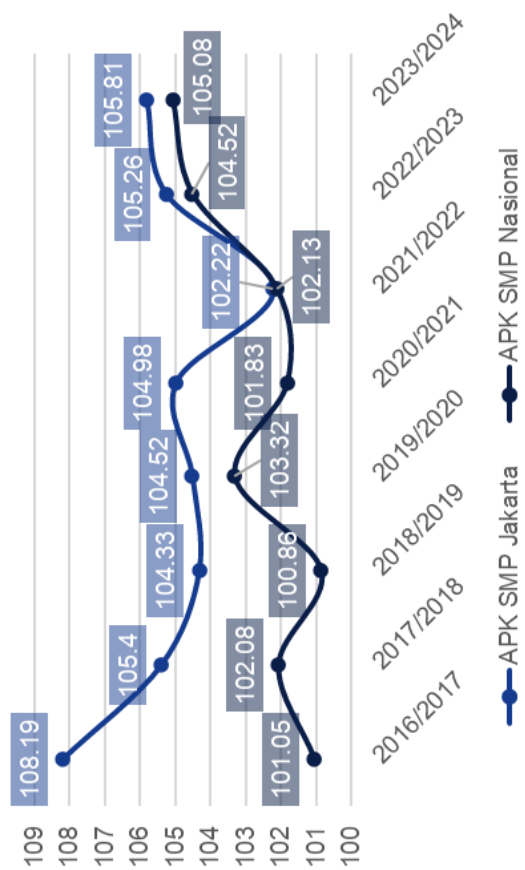
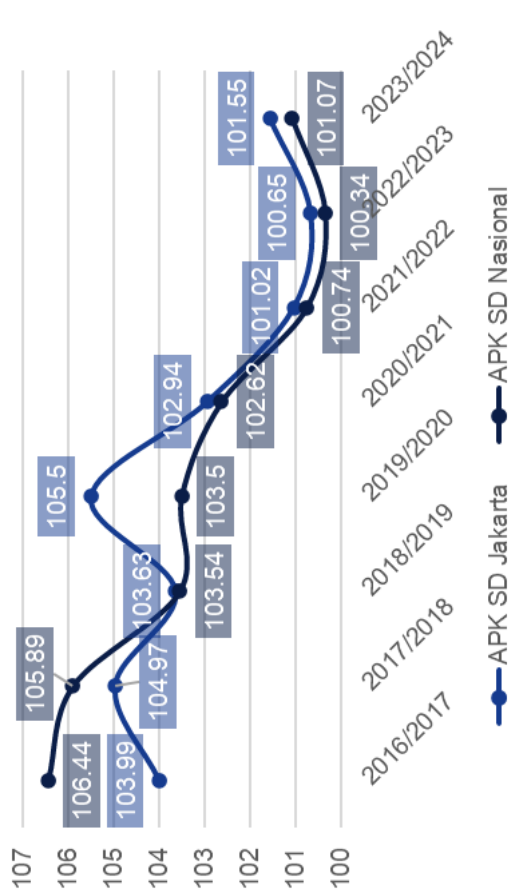
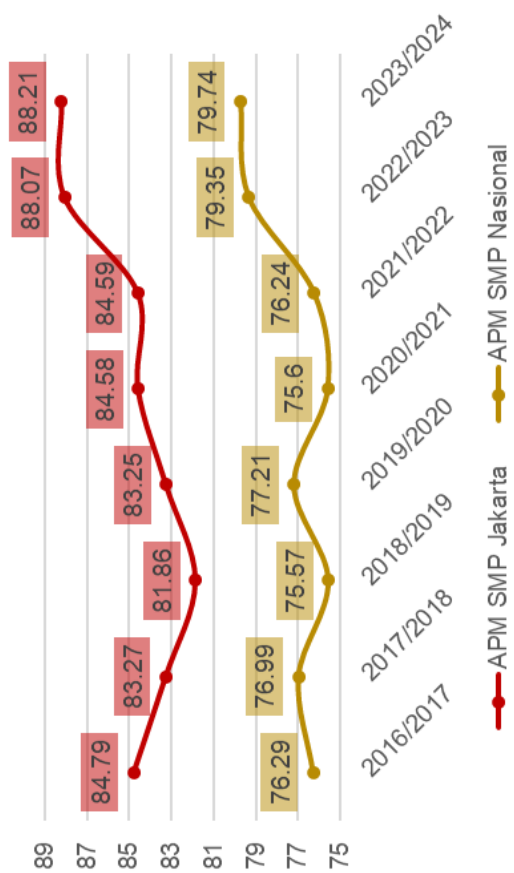
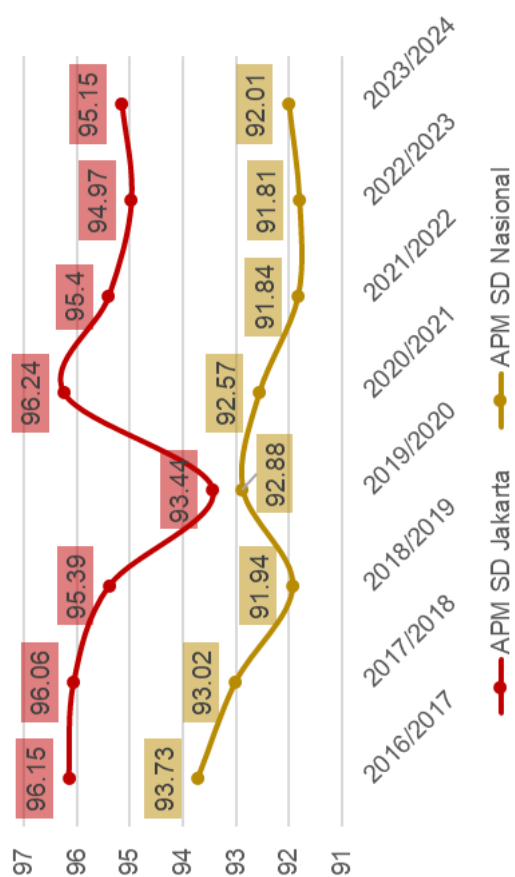
Selain itu, peningkatan angka HLS yaitu 12,38 pada tahun 2014 menjadi 13,33 pada tahun 2023 juga menunjukkan terjadinya perbaikan dalam kesadaran dan kesempatan sekolah yang semakin tinggi pada penduduk Jakarta. HLS sebesar 13,08 menggambarkan bahwa secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2023 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,33 tahun atau setara dengan Diploma I yang juga berarti bahwa pembangunan manusia yang lebih baik dan peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat.

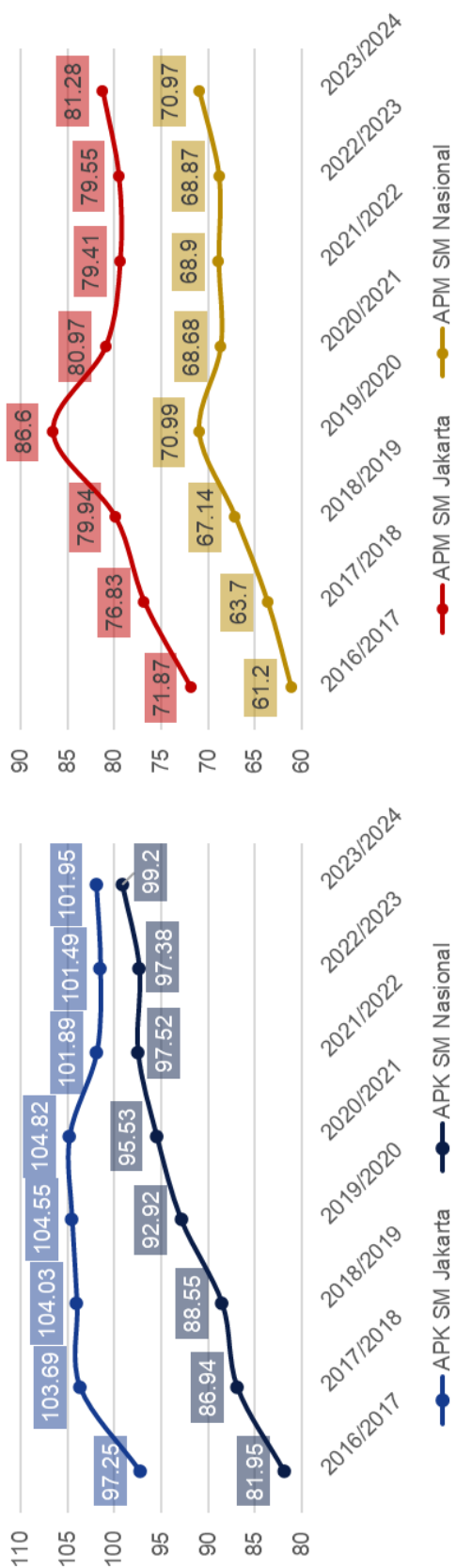


Gambar 2.45 Perbandingan APK PAUD Jakarta dan Nasional pada tahun 2018/2019 hingga 2023/2024

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2024

Pada pendidikan anak usia dini, capaian APK PAUD Jakarta selalu tertinggal dibandingkan capaian nasional. Pada tahun 2023/2024, APK PAUD Jakarta adalah sebesar 31,15, berada di bawah capaian nasional sebesar 49,53. Padahal, pendidikan anak usia dini yang berkualitas diperlukan dalam pembangunan manusia dalam jangka panjang.





Gambar 2.46 Perbandingan Perkembangan APK dan APM SD, SMP, dan SM Jakarta dan Nasional pada tahun 2016/2017 hingga 2023/2024

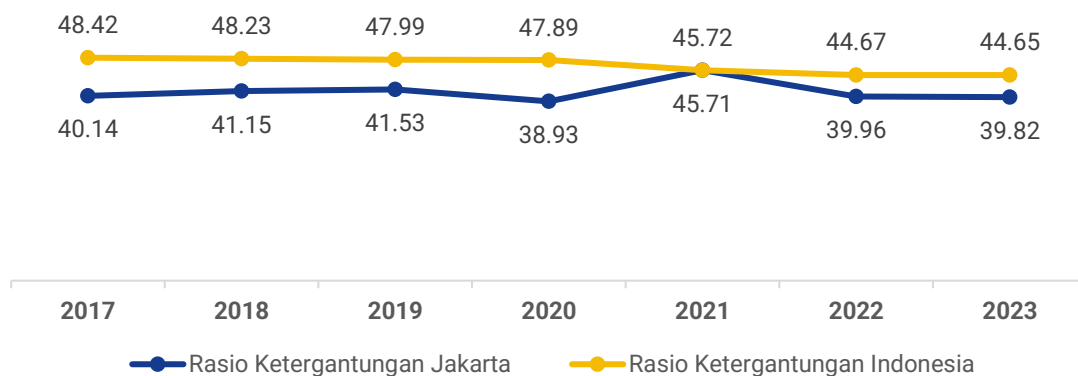
Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2024

Pada pendidikan dasar dan menengah, APK SD, SMP, dan SM di Jakarta mengalami fluktuasi pada tahun 2016/2017 hingga 2023/2024. Secara keseluruhan, APK dan APM SD, SMP, dan SMA mengalami peningkatan pada tahun 2023/2024.

APK SD dan SM mengalami penurunan pada periode 2019/2020 hingga 2022/2023 sebelum mengalami perbaikan pada tahun 2023/2024. Pada periode yang sama, APM SD dan SM cenderung mengalami stagnasi sehingga bisa disimpulkan bahwa partisipasi penduduk di luar usia sekolah jenjang SD dan SM mengalami penurunan. Di satu sisi, hal ini mengindikasikan kesempatan belajar pada kelompok usia yang seharusnya masuk SD dan SMA dapat terjaga, tetapi peningkatan APM tanpa adanya peningkatan signifikan pada APK menunjukkan penurunan kualitas pendidikan masyarakat secara umum karena adanya indikasi rendahnya partisipasi oleh penduduk yang berhenti atau mengulang sekolah. Salah satu penyebabnya adalah ketidakstabilan ekonomi terutama pada saat pandemi Covid-19 yang mengubah prioritas penduduk untuk mencari pekerjaan dibandingkan melanjutkan pendidikan. Pandemi juga menyebabkan APK dan APM SMP menurun pada tahun 2021/2022. Selain pada periode tersebut, capaian APK dan APM SMP cenderung stabil.

B. Ketergantungan Penduduk

Dalam jangka panjang, rasio ketergantungan di Jakarta menjadi sebuah parameter penting yang mencerminkan struktur demografis dan potensi dampaknya terhadap pembangunan ekonomi dan sosial kota ini. Rasio ketergantungan merujuk pada perbandingan antara jumlah penduduk yang tidak produktif secara ekonomi (usia muda dan usia lanjut) dengan jumlah penduduk yang produktif (usia kerja).



Gambar 2.47 Rasio Ketergantungan Jakarta 2018 - 2023

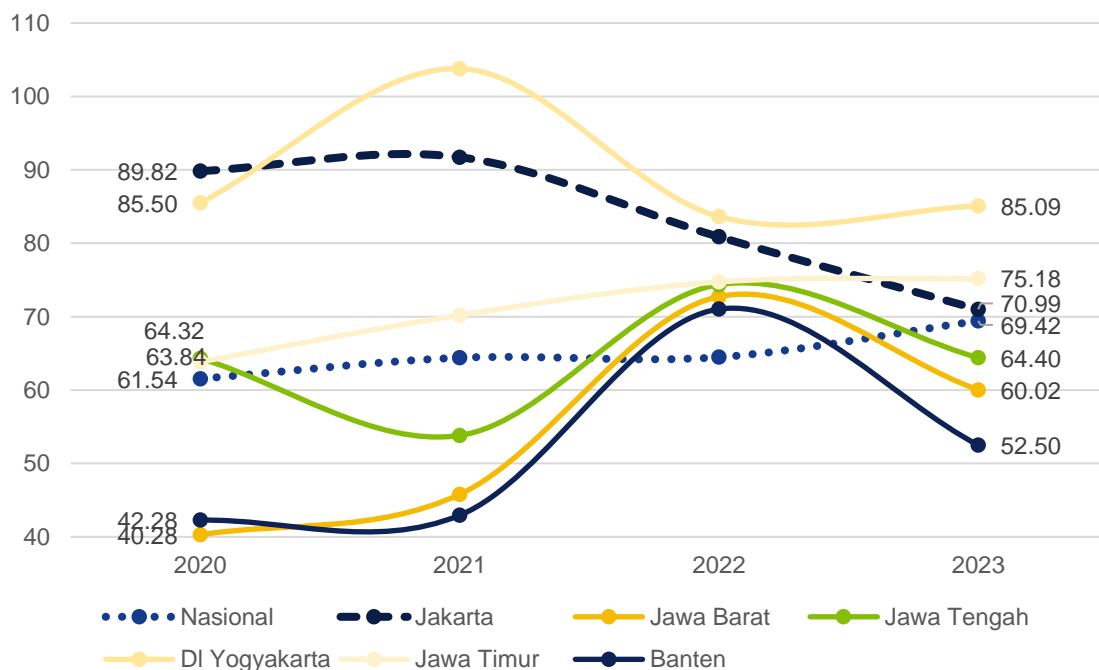
Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta, 2023

Sejak tahun 2017 hingga 2023, angka rasio ketergantungan penduduk Jakarta cenderung mengalami peningkatan meskipun sempat mengalami penurunan di tahun 2020. Pada tahun 2023, rasio ketergantungan Jakarta telah mencapai angka 39,82. Ini

berarti bahwa setiap 100 penduduk usia kerja harus menanggung hampir 40 penduduk non-produktif, baik yang berusia di bawah 15 tahun maupun yang berusia di atas 65 tahun. Rasio ketergantungan yang relatif tinggi ini menunjukkan tantangan signifikan dalam hal ekonomi dan sosial bagi Jakarta.

C. Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur, memantau, mengevaluasi, dan meningkatkan tingkat literasi masyarakat dalam suatu daerah. Selain itu, IPLM juga dapat digunakan sebagai pengukuran upaya pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Pengukuran IPLM didasarkan pada tujuh unsur yaitu (i) Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM1); (ii) Ketercukupan Koleksi Perpustakaan (UPLM2); (iii) Ketercukupan Tenaga Perpustakaan (UPLM3); (iv) Tingkat Kunjungan Masyarakat per Hari (UPLM4); (v) Jumlah Perpustakaan yang Dibina Sesuai SNP (UPLM5); (vi) Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi di Bidang Perpustakaan (UPLM6); dan (vii) Perkembangan Anggota Perpustakaan (UPLM7).



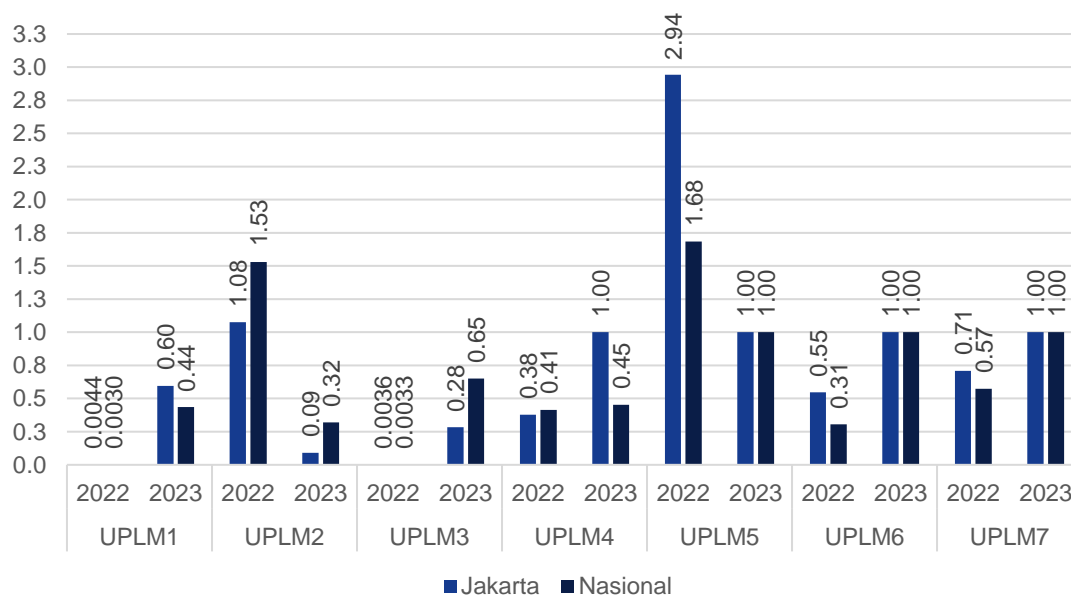
*) Skor IPLM pada tahun 2020 dan 2021 dikonversi dari skala 0-20 menjadi skala 0-100

Gambar 2.48 Perbandingan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Jakarta, Nasional, dan Provinsi Lain di Pulau Jawa pada Tahun 2020 – 2023 (dalam Skala 0-100)*

Sumber : Perpustakaan Nasional dan Olahan Tim Penyusun, 2023

Capaian IPLM Jakarta pada tahun 2023 sebesar 70,99 dengan kategori “Sedang (Memenuhi Standar)”. Capaian ini turun dibandingkan tahun-tahun lalu yang mampu mencapai nilai 91,72 pada tahun 2021 dengan kategori “Sangat Tinggi (Perpustakaan Percontohan)”. Dibandingkan dengan nasional dan beberapa provinsi lain di Pulau Jawa, capaian Jakarta masih lebih baik.

Bila ditinjau dari unsur penyusun indeks, terdapat dua unsur yang capaiannya di bawah capaian rata-rata nasional. Unsur pertama adalah Ketercukupan Koleksi Perpustakaan (UPLM2). Koleksi yang dimaksud dalam unsur ini adalah koleksi cetak maupun digital yang dimiliki perpustakaan berdasarkan jumlah judulnya, termasuk karya tulis, karya cetak, dan karya rekam. Semakin banyak koleksi yang dimiliki perpustakaan, semakin besar kemungkinan pemustaka mendapatkan wawasan yang luas. Jumlah koleksi dikatakan cukup bila seorang penduduk dapat membaca dua judul koleksi, sesuai standar yang ditetapkan oleh IFLA-UNESCO. Jumlah koleksi perpustakaan yang dimiliki oleh Jakarta pada tahun 2023 sebanyak 1.917.860 koleksi dan bila dibandingkan dengan jumlah penduduk Jakarta maka didapat rasio sebanyak 1:6 yang berarti setiap 1 koleksi dapat diakses oleh 6 penduduk. Maka, untuk memenuhi standar dibutuhkan penambahan sekitar 19.442.042 koleksi.



Gambar 2.49 Perbandingan Unsur Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Jakarta dan Nasional pada Tahun 2022 dan 2023

Sumber : Perpustakaan Nasional, 2023

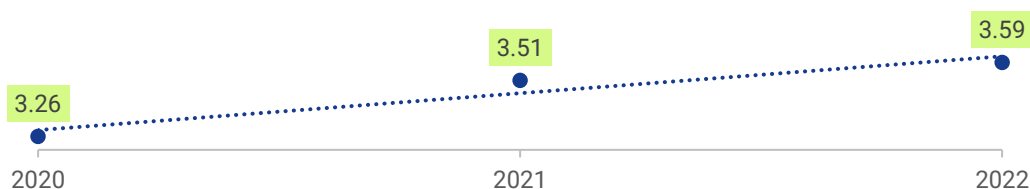
Unsur kedua yang capaiannya di bawah rata-rata capaian nasional adalah Ketercukupan Tenaga Perpustakaan (UPLM3). Tenaga perpustakaan terdiri dari pustakawan yang memenuhi kualifikasi sesuai standar nasional perpustakaan serta tenaga teknis

perpustakaan. Menurut, UU Nomor 43 Tahun 2007, tenaga teknis perpustakaan dapat dirangkap oleh pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan bersangkutan. Standar kecukupan tenaga perpustakaan yang ditetapkan oleh IFLA-UNESCO adalah 1:2500 yang berarti setiap tenaga pustakawan melayani 2.500 orang penduduk. Saat ini, jumlah tenaga perpustakaan di Jakarta sebanyak 1.213 orang sehingga bila dibandingkan dengan jumlah penduduk Jakarta, setiap tenaga perpustakaan di Jakarta harus melayani 8.805 penduduk. Dibandingkan dengan standar, terdapat kekurangan tenaga perpustakaan sebanyak 3.059 orang.

Selain kedua unsur di atas, terdapat unsur yang capaiannya lebih baik dibandingkan dengan capaian nasional namun bila dibandingkan dengan standar layanan, masih terdapat kekurangan. Unsur tersebut adalah Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM1). Pemerataan layanan perpustakaan ditunjukkan melalui ketersediaan perpustakaan di seluruh kelembagaan di suatu wilayah. Kelembagaan yang dimaksud adalah institusi provinsi, kota/kabupaten, kecamatan, kelurahan, sekolah (termasuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/K/MA), perguruan tinggi, dan instansi daerah. Menurut Perpustakaan Nasional, standar yang digunakan adalah jumlah perpustakaan yang tersedia sama dengan jumlah kelembagaan yang ada di masyarakat. Pada tahun 2023, terdapat 6.001 kelembagaan di Jakarta, sedangkan jumlah perpustakaan di Jakarta sebanyak 3.799. Terdapat kekurangan perpustakaan sebanyak 2.202 unit.

D. Literasi Digital

Pengembangan literasi digital di Jakarta diarahkan untuk mencakup seluruh lapisan masyarakat, mulai dari tingkat pendidikan dasar hingga tinggi, masyarakat umum.



Gambar 2.50 Indeks Literasi Digital Jakarta 2020 - 2022

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2023

Mengintegrasikan beberapa elemen dalam strategi literasi digital yang holistik akan membantu Jakarta mencapai tingkat literasi digital yang lebih tinggi di seluruh warga Jakarta. Indeks Literasi Digital Jakarta terus berkembang dari tahun 2020 di angka 3,26 terus meningkat menjadi 3,59 di tahun 2022. Berdasarkan Buku Status Literasi Digital Indonesia tahun 2020-2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, disebutkan bahwa Literasi Digital Jakarta tahun 2021 dan 2022 telah melebihi rata-rata literasi Digital Nasional. Pada Tahun 2021 literasi digital Jakarta 3,51 sedangkan literasi digital nasional 3,49. Sementara itu, pada tahun 2022 literasi digital Jakarta 3,59 sedangkan literasi Digital Nasional 3,54. Namun demikian, secara peringkat

Jakarta pada tahun 2021 masuk peringkat 18 dan pada tahun 2022 Jakarta pada posisi 8 dari 34 Provinsi di Indonesia (D. I. Yogyakarta, Kalimantan barat, Kalimantan Timur, Papua Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Jawa Barat dan Jakarta). Untuk meningkatkan literasi digital masyarakat Jakarta, beberapa kondisi yang perlu dikembangkan ialah dengan memastikan ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai, termasuk akses internet yang cepat dan stabil di seluruh wilayah Jakarta, mengadakan program literasi digital khusus untuk seluruh warga, termasuk pelatihan untuk meningkatkan pemahaman tentang pengembangan IPTEK, serta menyelenggarakan sistem pemantauan dan evaluasi untuk mengukur efektivitas program literasi digital.

E. Angkatan Kerja



Gambar 2.51 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Jakarta 2017-2022

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta, 2023

Kondisi ketenagakerjaan Jakarta menunjukkan adanya fluktuasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Angkatan kerja di Jakarta mencapai 5,42 juta orang pada 2023. Angka ini naik 3,24 persen dari tahun sebelumnya (*year-on-year/yoy*) yang sebesar 5,25 juta orang pada 2022. Selanjutnya pengangguran, yang mencapai 354 ribu orang pada 2023. Angka ini mengalami penurunan dari tahun 2022 yang mencapai 377 ribu orang. Di luar angkatan kerja, Jakarta juga dipadati kelompok bukan angkatan kerja, sebanyak 2,89 juta pada 2023. Salah satu ukuran keberhasilan kinerja suatu daerah dalam hal penanganan pengangguran bila diamati dari sisi ketenagakerjaan adalah dengan melihat tinggi rendahnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), namun demikian, tantangan terhadap isu ketenagakerjaan di masa depan perlu dicermati, termasuk mengenai peningkatan keterampilan tenaga kerja, penyerapan tenaga kerja di sektor formal, dan pengurangan tingkat pengangguran terbuka.

2.4.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

Kesiapan infrastruktur wilayah merupakan salah satu faktor utama dalam menentukan tingkat daya saing daerah. Infrastruktur berkualitas baik dan efisien dapat memudahkan mobilitas barang dan orang serta dapat meningkatkan produktivitas. Selain itu, keberlanjutan lingkungan dalam infrastruktur dapat memberikan citra positif yang dapat menarik investasi dan memberikan keunggulan kompetitif dalam persaingan global. Berikut penjelasan terkait kondisi infrastruktur Jakarta untuk mewujudkan Jakarta yang berdaya saing.

A. Infrastruktur Transportasi

Transportasi merupakan salah satu aspek penting yang dapat memengaruhi daya saing suatu wilayah. Kemampuan Jakarta dalam memwadahi pergerakan orang dan barang secara andal dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang berdaya saing serta meningkatkan konektivitas berbagai sektor ekonomi dan pusat bisnis. Daya saing infrastruktur transportasi dinilai berdasarkan sektor perhubungan darat, perhubungan laut, dan perhubungan udara. Masing-masing sektor tersebut akan dilihat bagaimana kondisi sistem dan jaringannya.

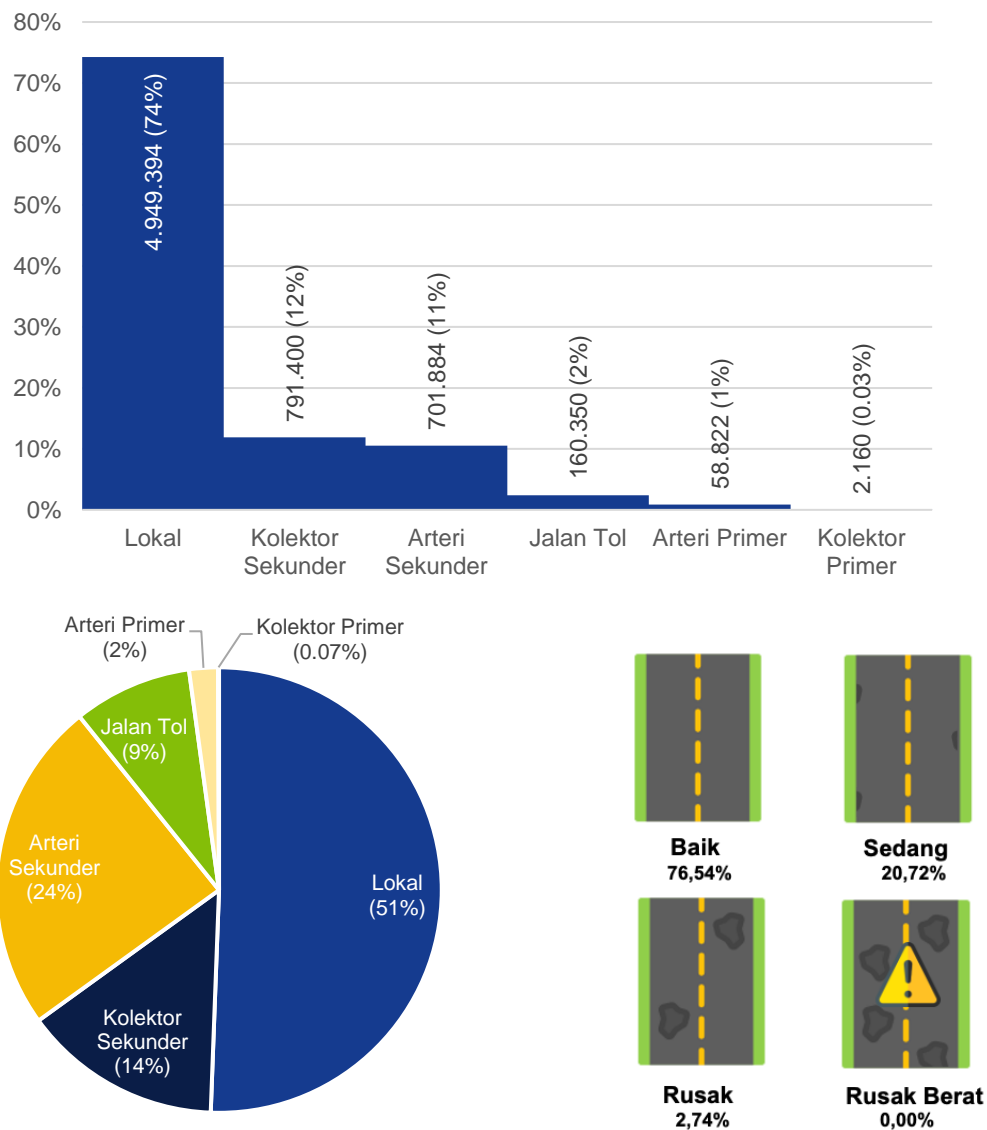


Gambar 2.52 Sistem Jaringan Transportasi Jakarta

Sumber: Bappeda, 2024

Infrastruktur Transportasi Darat

Daya saing infrastruktur transportasi Jakarta pada dasarnya ditentukan oleh keandalan sistem dan jaringan transportasi darat. Sebagai metropolitan yang padat penduduk dan padat kegiatan, aspek daya saing transportasi darat perlu mendapatkan perhatian khusus agar perencanaan pembangunan dapat diarahkan menuju pemenuhan kebutuhan mobilitas masyarakat di darat. Infrastruktur transportasi darat meliputi sistem dan jaringan jalan serta sistem dan jaringan transportasi massal.



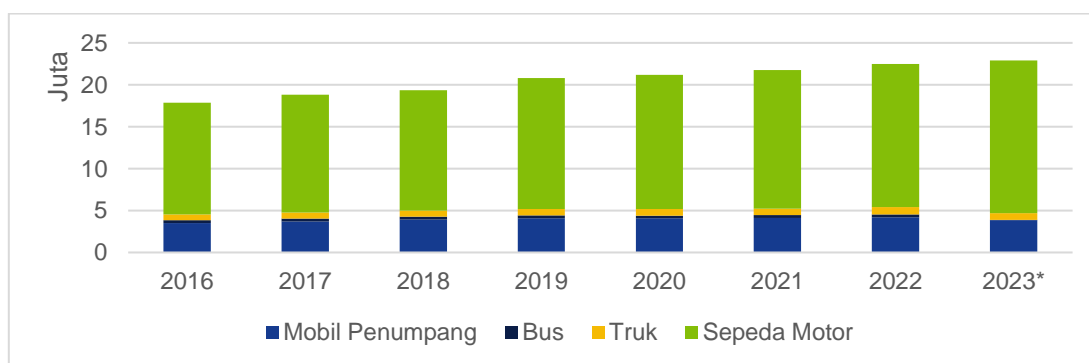
Gambar 2.53 Panjang (m), Luas (m²), dan Kualitas Jalan dan di Jakarta Tahun 2023

Sumber: BPS, 2024

Jaringan jalan di Jakarta terdiri dari jaringan jalan tol, arteri primer, arteri sekunder, kolektor primer, kolektor sekunder, dan lokal. Sementara itu, pola jaringan jalan di Jakarta terdiri dari sistem jaringan jalan lingkaran, yaitu lingkaran dalam (*inner ring road*) dan lingkaran luar (*outer ring road*), serta jaringan jalan berpola *grid* di wilayah pusat kota. Dari seluruh jalan tersebut, hanya jalan tol yang tidak dikelola oleh pemerintah provinsi. Jalan tol yang beroperasi di Jakarta dan sebagian melintas Jakarta berjumlah 15 ruas dengan total panjang 160.350 meter.

Selain jalan tol, distribusi panjang jalan di Jakarta didominasi oleh jalan lokal sebesar 74 persen (4.949.394 meter), diikuti oleh jalan kolektor sekunder sebesar 12 persen (791.400 meter) dan jalan arteri sekunder sebesar 11 persen (701.884 meter). Dari segi luas, ketiga jalan tersebut juga mendominasi jenis jalan yang ada di Jakarta. Bila ditotal, seluruh jaringan jalan di Jakarta menyumbang hingga 7 persen dari luas wilayah Jakarta. Persentase ini lebih kecil dibandingkan dengan ukuran luas jaringan jalan di beberapa kota besar lainnya seperti Singapura (12 persen), London (21 persen), dan Tokyo (22 persen). Walaupun pertumbuhan jalur kendaraan bermotor perlu dikendalikan, rasio jalan terhadap luas wilayah diperlukan dalam manajemen mobilitas (terutama bagi transportasi publik, keamanan dan kesiapsiagaan darurat) serta pengembangan kota dan ekonomi.

Hingga tahun 2023, hampir seluruh jaringan jalan yang berada di bawah kewenangan Jakarta sudah dalam kondisi yang baik. Terdapat hanya sekitar 2,74 persen jaringan jalan berkualitas rusak dan tidak ada jalan rusak berat. Melalui Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, kondisi jalan pada tingkat terbaik dipertahankan kualitasnya melalui pemeliharaan berkala dan pemeliharaan rutin, sedangkan pada jalan dengan kondisi sedang dan rusak yang sebagian besar merupakan jalan lokal, penataan terus diupayakan. Kualitas jaringan jalan yang baik mampu mendukung konektivitas wilayah dengan memperlancar lalu lintas kendaraan.

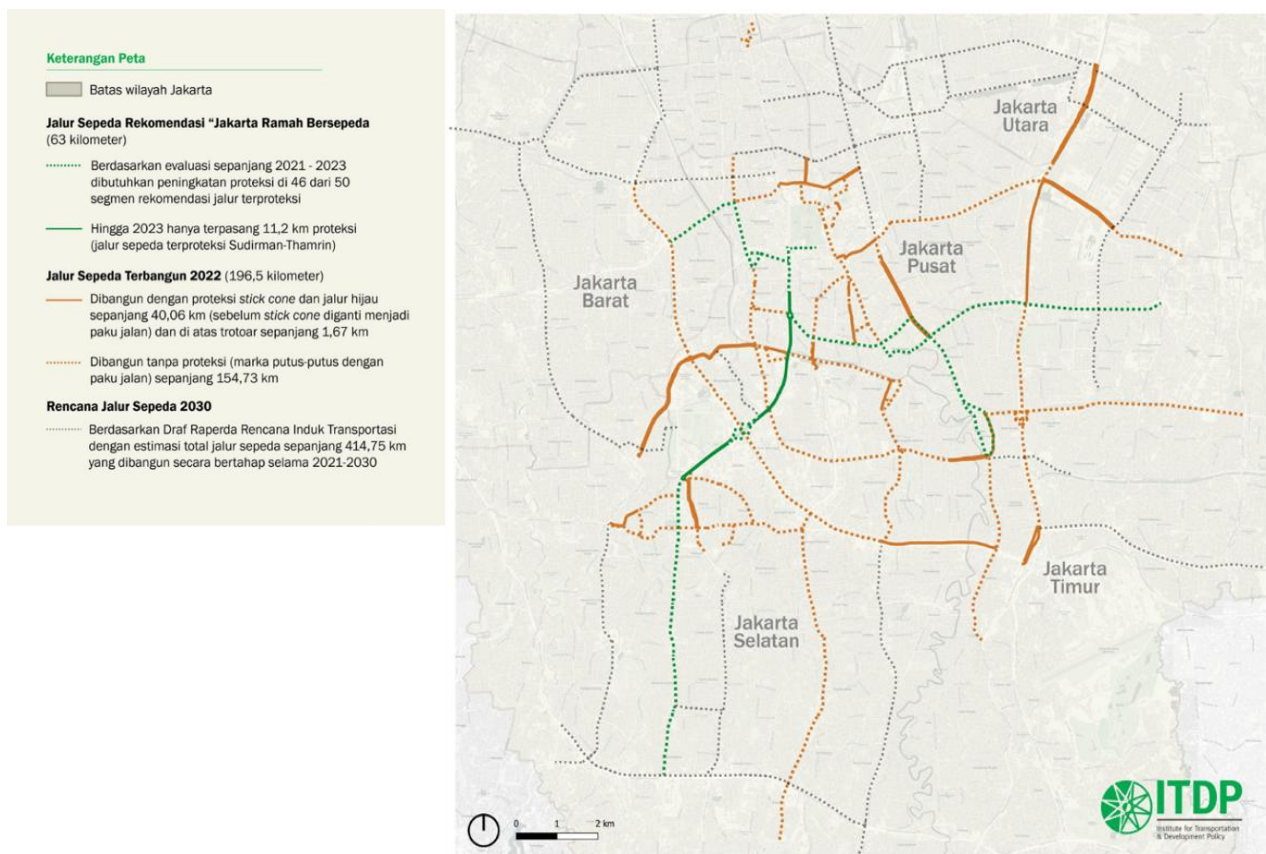


*) Data per Februari 2024

Gambar 2.54 Jumlah Kendaraan Bermotor di Jakarta Tahun 2016 - 2023

Sumber: BPS, 2024

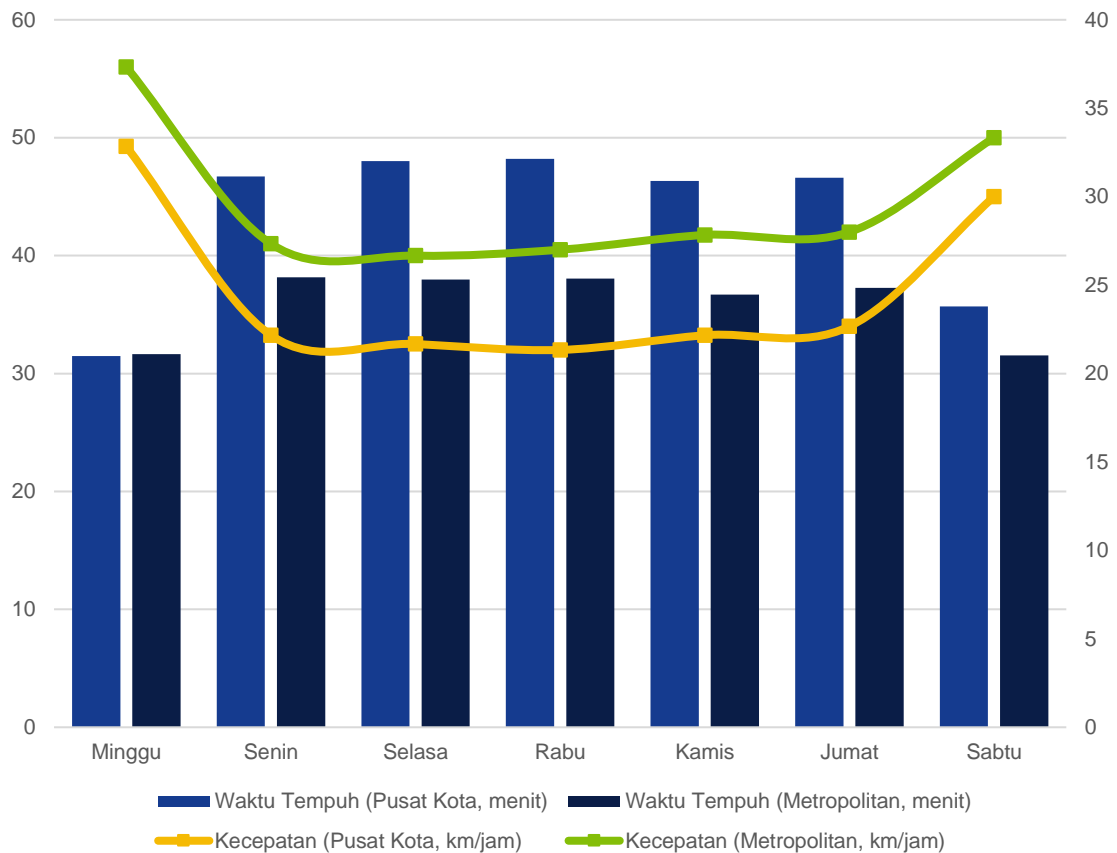
Tingginya jumlah kendaraan bermotor menjadi perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Terlebih, Jakarta berkomitmen dalam mengurangi gas emisi melalui peralihan penggunaan kendaraan bermotor ke kendaraan tidak bermotor, salah satunya sepeda. Hingga awal tahun 2023, Jakarta telah membangun 301,07 km jalur sepeda, yang sebagian dibatasi dengan proteksi berupa pot beton tanaman dan *stick tone*, sebagai jenis proteksi yang sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 05/P/BM/2021 tentang Pedoman Perancangan Fasilitas Bersepeda.



Gambar 2.55 Pembangunan Jalur Sepeda di Jakarta

Sumber: ITDP, 2023

Berdasarkan survei, jumlah pesepeda paling banyak terlihat di jalur terproteksi di Jalan Jenderal Sudirman mencapai 38 pesepeda per jam, area permukiman (Pemuda, Cipete, Tomang, dan Cideng) mencapai 50 pesepeda per jam, area perkantoran dan komersial (Sarinah, Imam Bonjol, Pramuka, CSW, Matraman, dan Jatinegara) mencapai 130 pesepeda per jam. Berdasarkan survei ITDP, dari 2.194 sepeda, profil pesepeda meliputi pedagang keliling dan kurir, pesepeda rekreasi, pesepeda komuter harian, dan pesepeda olahraga.



Catatan:

- 1) Data yang ditampilkan menggunakan rerata data saat waktu sibuk pagi hari (pukul 07.00 – 09.00) dan sore hari (pukul 16.00 – 18.00)
- 2) Data yang ditampilkan adalah rerata waktu dan kecepatan untuk menempuh jarak 17 km. Jarak ini merupakan rata-rata jarak yang ditempuh oleh penduduk Jakarta menuju sekolah/tempat bekerja

Gambar 2.56 Kinerja Jalan di Jakarta yang Dinyatakan dalam Waktu Tempuh dan Kecepatan Berkendara selama Seminggu pada Tahun 2023

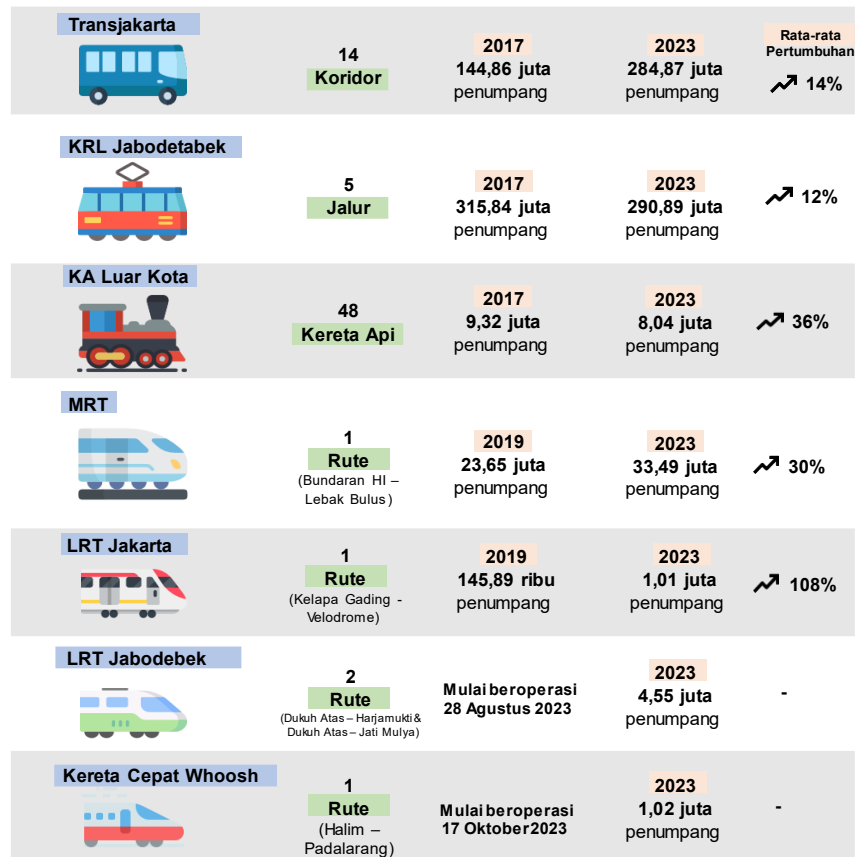
Sumber: TomTom Traffic Index, 2024

Kinerja lalu lintas Jakarta diukur berdasarkan waktu tempuh dan kecepatan tempuh dalam jarak tertentu. Kinerja lalu lintas ini salah satunya dapat dilihat melalui Indeks Lalu Lintas TomTom (*TomTom Traffic Index*). Dalam indeks tersebut, Jakarta menempati urutan ke-30 pada tahun 2023 dengan tingkat kemacetan mencapai 53 persen. Butuh waktu sekitar 23 menit 20 detik untuk mencapai 10 km dengan rata-rata kecepatan 21 km/jam pada waktu sibuk. Dibandingkan tahun lalu, waktu tempuh dalam jarak yang sama membutuhkan waktu lebih lama 40 detik. Tingkat kemacetan ini lebih parah bila dibandingkan dengan Berlin (22 menit), Bangkok (21 menit 40 detik), Hong Kong (17 menit 40 detik), serta Singapura dan Kuala Lumpur (16 menit 50 detik).

Dalam seminggu, penduduk Jakarta membutuhkan waktu 46 hingga 48 menit untuk mencapai sekolah atau tempat bekerja. Menurut Indeks Lalu Lintas TomTom, rata-rata terburuk waktu tempuh yang mungkin terjadi dapat mencapai 57 menit 14 detik pada waktu sibuk sore pada hari Jumat. Padahal waktu optimal yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 17 km adalah sebesar 24 menit sehingga ada waktu tambahan sekitar 22 – 33 menit untuk setiap perjalanan. Bila divalusi, tentu akumulasi waktu tambahan ini merupakan kerugian yang dialami penduduk Jakarta baik dari segi finansial, lingkungan, sosial, dan psikologis.

Untuk sarana terminal, Jakarta memiliki 17 terminal bus penumpang. Terminal bus yang ada di Jakarta melayani perjalanan penumpang antarkota dan dalam kota. Empat di antaranya berstatus Tipe A yaitu Terminal Terpadu Pulo Gebang, Terminal Kampung Rambutan, Terminal Kalideres, dan Terminal Tanjung Priok. Terminal-terminal tersebut melayani bus AKAP ke Jawa Barat, Jawa Tengah dan DIY, Jawa Timur, Bali dan NTB, hingga Sumatera. Terminal lainnya adalah terminal tipe B yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta dan melayani rute dalam kota. Selain terminal pengangkutan penumpang, terdapat juga empat terminal barang yang melayani sistem logistik serta pengangkutan dan distribusi barang yaitu Terminal Tanah Merdeka, Terminal Pulo Gebang, Terminal Pulo Gadung, dan Terminal Rawa Buaya.

Sejak tahun 2004, pengembangan transportasi massal bus Transjakarta telah berlangsung, dan sekarang terdapat 14 koridor serta beberapa jalur di luar koridor. Ekspansi rute juga telah dilakukan untuk mencapai lebih banyak masyarakat, mewujudkan peningkatan cakupan pelayanan. Saat ini Transjakarta melayani rute BRT sebanyak 45 rute, non-BRT sebanyak 62 rute, Royaltrans sebanyak 12 rute, dan Mikrotrans sebanyak 96 rute. Rute dan koridor ini saling terintegrasi satu sama lain dan tersebar di seluruh wilayah Jakarta. Hingga tahun 2023, tercatat Transjakarta sudah melayani 284,87 juta penumpang, termasuk layanan angkutan penumpang (Angkutan Umum Integrasi, Mikrotrans, Transjabotabek, dan Rusun), angkutan khusus (bus wisata, penugasan, dan *Transjakarta Cares*), dan angkutan premium (Royal Trans). Rata-rata pertumbuhan setiap tahun jumlah penumpang Transjakarta sejak tahun 2017 sebanyak 14 persen dibandingkan tahun 2017.



Gambar 2.57 Kondisi Transportasi Publik di Jakarta

Sumber: BPS, MRT, LRT Jabodebek, KCIC, 2024

Selain Transjakarta, moda transportasi basis rel yang banyak digunakan adalah Kereta Rel Listrik (KRL). KRL tidak hanya melayani pergerakan di Jakarta saja, namun KRL merupakan tulang punggung transportasi publik pada skala regional yang banyak dimanfaatkan oleh para komuter dari luar Bodetabek menuju Jakarta dan sebaliknya. Terdapat 5 rute yang dilayani hingga Stasiun Bogor (Kota Bogor, Jawa Barat), Stasiun Cikarang (Kabupaten Bekasi, Jawa Barat), Stasiun Rangkasbitung (Kabupaten Lebak, Banten), Stasiun Tangerang (Kota Tangerang, Banten), dan Stasiun Tanjung Priok (Jakarta Utara); ditambah 1 rute khusus untuk Kereta Bandara yang melayani rute Manggarai – Bandara Soekarno Hatta. Pada tahun 2017, jumlah penumpang KRL Jabodetabek mencapai 315,84 juta dan pada tahun 2023 mencapai 290,89 juta orang. Jumlah ini mulai meningkat kembali karena sempat turun pada tahun 2020 dan 2021 akibat dampak pembatasan penggunaan transportasi publik saat pandemi Covid-19. Rata-rata jumlah pertumbuhan jumlah penumpang per tahun sejak 2017 sebesar 12 persen.

Tidak hanya KRL Jabodetabek saja, KA Luar Kota dan MRT juga mulai mengalami peningkatan jumlah penumpang yang terlayani setelah dampak pembatasan kegiatan

saat pandemi Covid-19. KA Luar Kota melayani 48 kereta api untuk kelas ekonomi hingga eksekutif. Tujuan relasi perjalanan yang melalui jalur kereta api lintas Jakarta meliputi, Tegal, Semarang, Surabaya, Malang, Cilacap, Kutoarjo, Yogyakarta, Surakarta, Jombang, Blitar, Purwokerto, Bandung, Banjar, dan Garut.

Sementara untuk MRT, hingga tahun 2023, jumlah penumpang MRT mencapai 33,49 juta naik 30 persen dibandingkan jumlah penumpang pada tahun 2019 sebanyak 23,65 juta penumpang. MRT saat ini melayani 1 rute yaitu Lebak Bulus - Bundaran HI dan sedang dalam pembangunan rute perjalanan hingga menuju Kota. Selain itu, pada tahun 2024 ini Pemerintah Daerah Provinsi Jakarta juga telah memulai pengembangan rute layanan MRT, melalui pembangunan MRT jalur Utara - Selatan dan Timur - Barat, yang juga merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN).

LRT Jakarta juga mengalami peningkatan jumlah penumpang yang signifikan pada tahun 2023 sejak beroperasi penuh pada 1 Desember 2019 yaitu sekitar 1,01 juta penumpang. Dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai 145,89 penumpang, rata-rata peningkatan jumlah penumpang setiap tahun mencapai 108 persen. Saat ini, pemerintah tengah merencanakan penambahan jalur LRT Jakarta menuju Manggarai, Dukuh Atas, Tanah Abang, Klender, dan Halim.

Pada tahun 2023, dua moda transportasi resmi beroperasi di Jakarta. Kedua moda tersebut adalah LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Whoosh. LRT Jabodetabek saat ini melayani 2 rute yaitu Dukuh Atas – Harjamukti (Depok, Jawa Barat) dan Dukuh Atas – Bekasi Timur (Kota Bekasi, Jawa Barat), sedangkan Kereta Cepat Whoosh melayani 1 rute yaitu Halim – Padalarang (Bandung, Jawa Barat). Beberapa bulan setelah pengoperasian, kedua moda tersebut berhasil mengangkut penumpang masing-masing sebanyak 4,55 juta orang dan 1,02 juta orang.

Infrastruktur Transportasi Laut

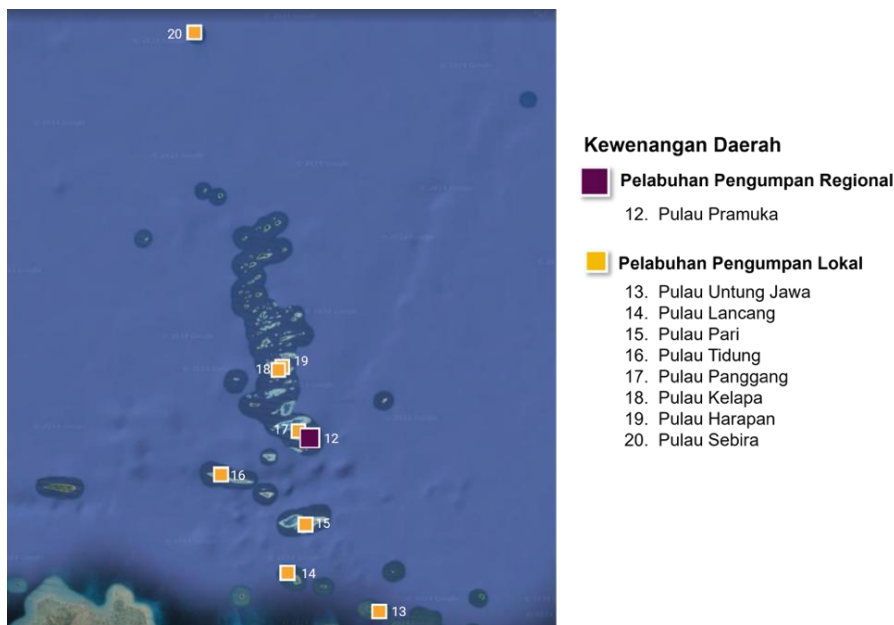
Jakarta merupakan simpul perdagangan strategis yang menghubungkan Selat Malaka/Selat Sunda di sisi barat Indonesia dan Selat Lombok/Selat Sulawesi di sisi timur Indonesia sehingga sistem transportasi laut Jakarta memegang peran penting dalam perekonomian Indonesia. Selain pergerakan barang, transportasi laut Jakarta juga melayani angkutan penumpang dan menjadi salah satu pintu masuk pulau Jawa dari dan ke daerah-daerah lain di Indonesia, seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara.

Jakarta memiliki 21 pelabuhan dengan berbagai klasifikasi dan 11 pelabuhan di antaranya berada di bawah kewenangan Jakarta. Selain Pelabuhan Muara Angke yang berada di Jakarta Utara, sebagian besar pelabuhan berada di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang berperan sebagai pelabuhan pengumpan lokal dan pendukung transportasi laut antarpulau

Persebaran Pelabuhan di Kota Jakarta Utara



Persebaran Pelabuhan di Kabupaten Kepulauan Seribu

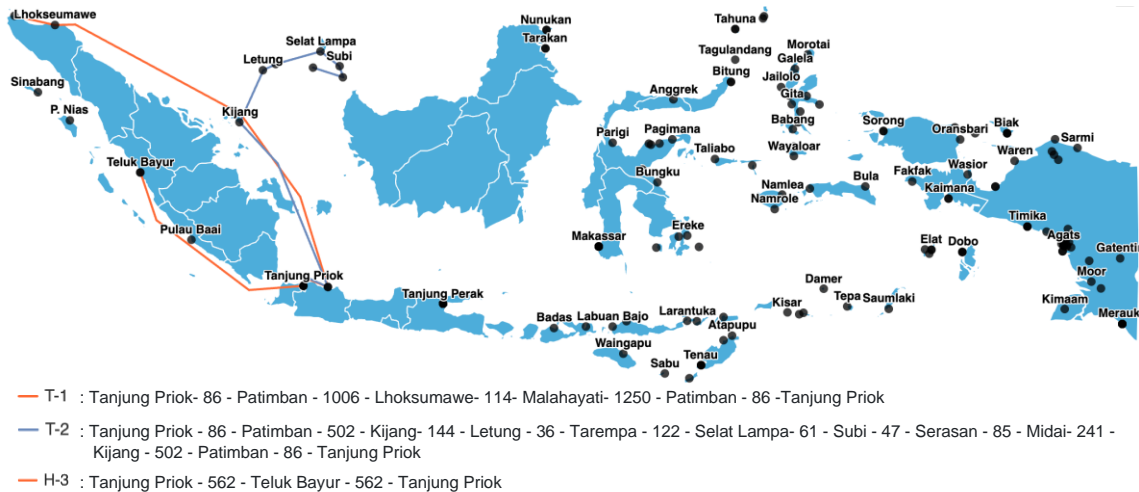


Gambar 2.58 Persebaran Pelabuhan di Jakarta

Sumber: Renstra Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta 2023-2026, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP/432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional, dan Olahan Tim Penyusun, 2024

Sebagai pelabuhan terbesar dan tersibuk di Indonesia, Pelabuhan Tanjung Priuk menjadi fokus utama untuk sistem layanan transportasi laut Jakarta yang melayani perdagangan barang antarpulau dan ekspor-impor. sementara pelabuhan lainnya berperan sebagai pendukung untuk transportasi laut antar pulau. Terdapat lima terminal di pelabuhan ini

yaitu (i) Jakarta Internasional Kontainer Terminal I (JICT); (ii) Jakarta Internasional Kontainer Terminal II (JICT II); (iii) Terminal Peti Kemas Koja (TPK Koja); (iv) Mustika Alam Lestari (MAL); dan (v) Multi Terminal Indonesia (MTI).

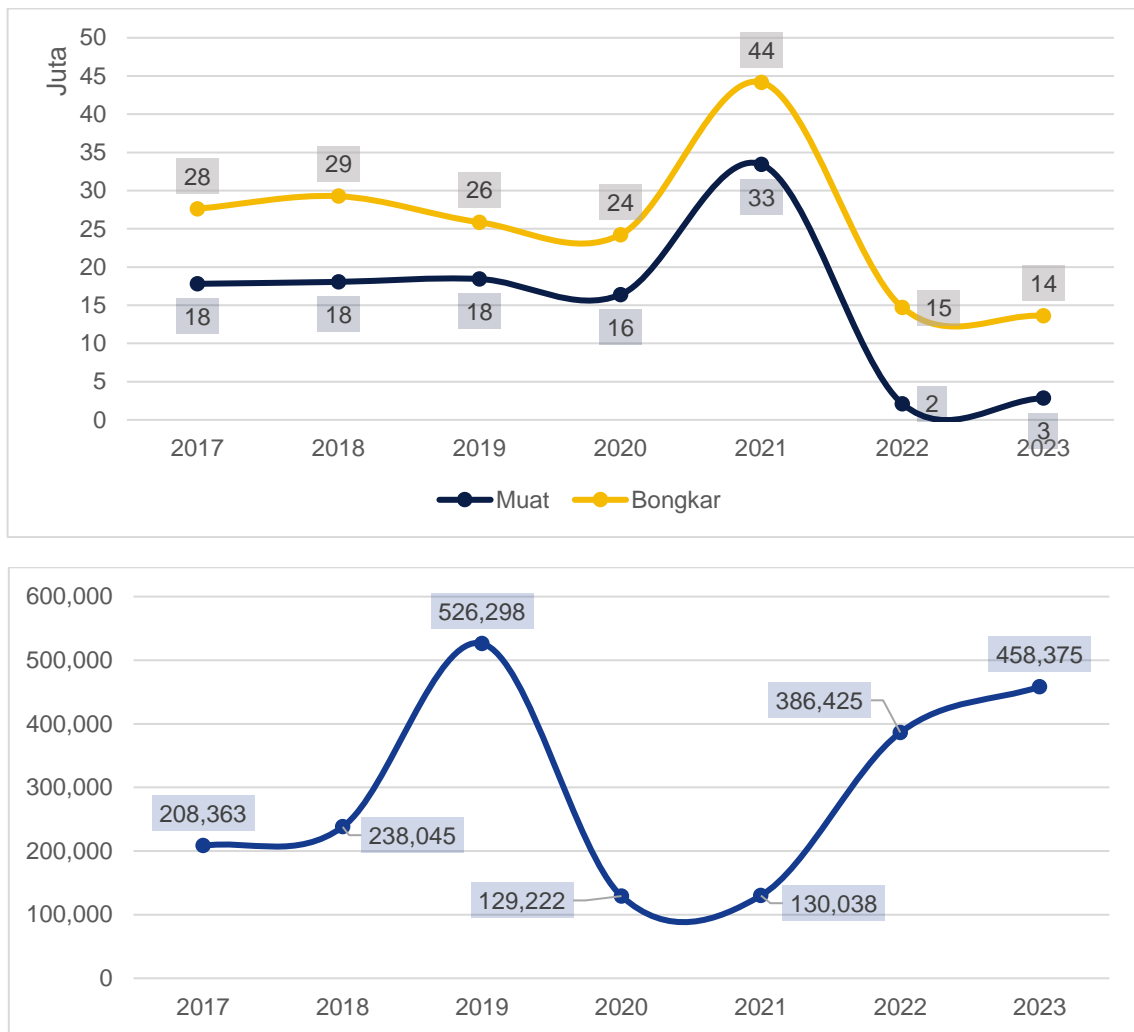


Gambar 2.59 Peta Rute Tol Laut Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2024

Sumber: Kementerian Perdagangan, 2024

Pelabuhan Tanjung Priok merupakan salah satu pelabuhan di Indonesia yang termasuk dalam sistem Tol Laut. Sistem ini memungkinkan pelabuhan-pelabuhan besar di Indonesia saling terhubung dan mampu memperlancar distribusi barang hingga ke pelosok Indonesia demi mewujudkan pemerataan harga logistik barang. Pada tahun 2024, Pelabuhan Tanjung Priok melayani tiga trayek menuju Pelabuhan Malahayati di Aceh, Pelabuhan Selat Lampa di Kepulauan Riau, dan Pelabuhan Teluk Bayur di Sumatera Barat. Komoditas yang dikirimkan melalui Pelabuhan Tanjung Priok meliputi Tepung, Minyak, Beras, Sayuran, Ayam Beku, Telur, Gula, Pakaian, Besi, Sabun, Besi Konstruksi, Garam, Bahan Bangunan, Bata Ringan, Semen, Mebel, Besi Beton, Triplek, Kabel, Alat Kesehatan. Pada tahun 2023, tercatat jumlah bongkar di Pelabuhan Tanjung Priok pada Pelayanan Nusantara dan Samudera turun menjadi 13,6 juta ton dari tahun sebelumnya yang berjumlah 14,6 juta ton, sedangkan jumlah muat bertambah menjadi 2,8 juta ton dari sebelumnya 2,1 juta ton.

Selain Pelabuhan Tanjung Priok, terdapat pelabuhan-pelabuhan pengumpan lokal lain yang sebagian besar berada di Kepulauan Seribu. Beberapa pelabuhan yang tersebar di Kepulauan Seribu tersebut masih belum memiliki peralatan penunjang kegiatan operasional pelabuhan. Hingga saat ini, terdapat 35 kapal berkapasitas hingga 200 tempat duduk yang berlabuh di pelabuhan tersebut. Namun, dua di antaranya sedang dalam penghapusan dan delapan kapal akan dihapus karena dalam kondisi rusak ataupun sudah memasuki usia tua.



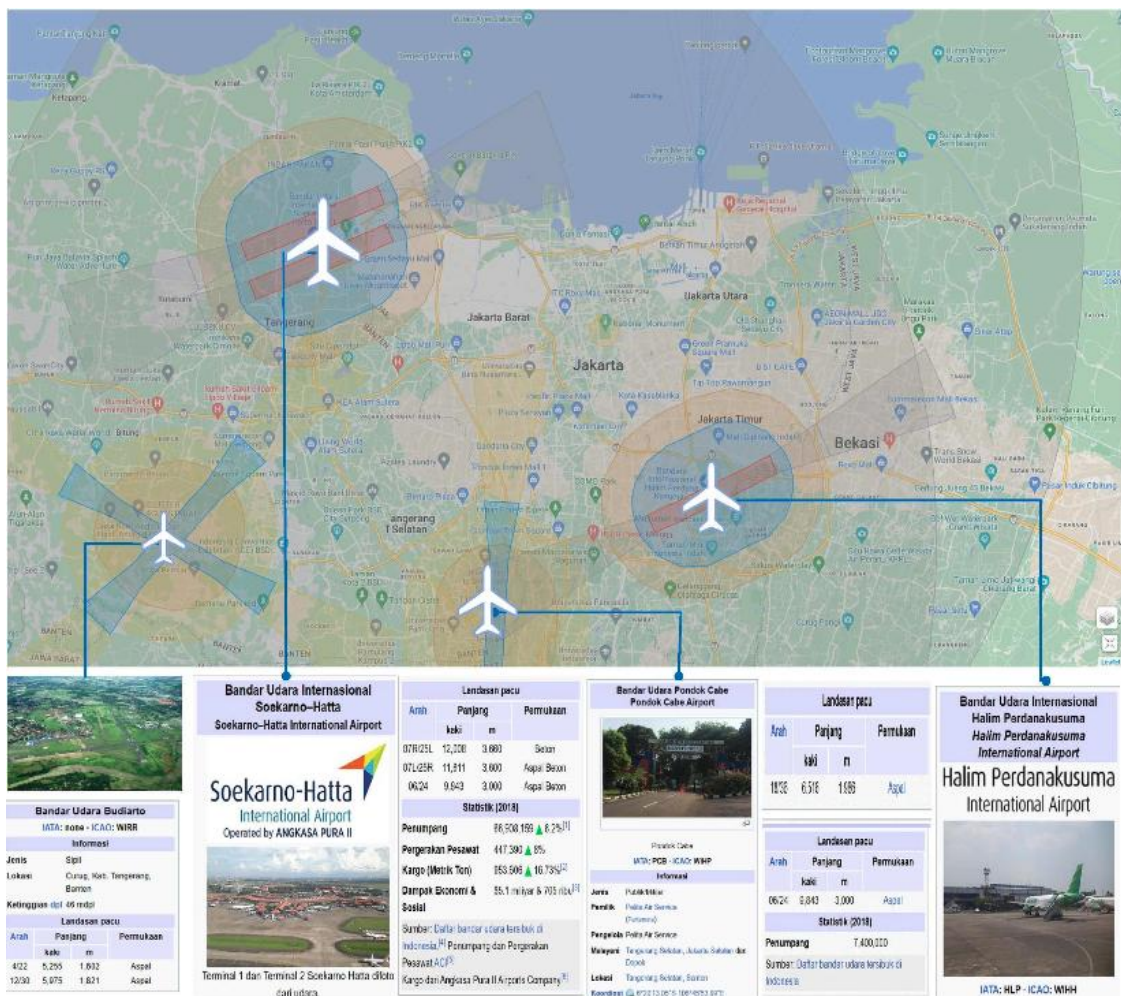
Gambar 2.60 Jumlah Muat dan Bongkar (atas) dan Jumlah Penumpang pada Pelayanan Nusantara dan Samudera melalui Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2017 – 2023

Sumber: BPS, 2024

Pelabuhan Tanjung Priok juga melayani perjalanan kapal penumpang dengan rute tujuan domestik meliputi Surabaya, Makassar, Ambon, Sorong, Manokwari, Ternate, Bitung, hingga Jayapura. BPS mencatat jumlah penumpang yang diangkut melalui Pelabuhan Tanjung Priok merangkak naik pada dua tahun terakhir, yaitu 458.375 penumpang pada tahun 2023 dan 386.425 penumpang pada tahun 2022. Sebelumnya, jumlah penumpang mencapai titik terendah yaitu 130.038 penumpang pada tahun 2021 diakibatkan oleh pandemi Covid-19 yang membatasi perjalanan antardaerah. Namun, capaian jumlah penumpang pada tahun 2023 belum melebihi jumlah penumpang yang tercatat pada tahun 2019 yaitu lebih dari 500.000 penumpang.

Infrastruktur Transportasi Udara

Transportasi udara berfungsi sebagai sarana untuk mengalirkan penumpang dan barang dengan cepat. Dalam konteks kondisi geografis nasional, pengembangan transportasi udara tidak hanya bertujuan untuk menghubungkan kawasan-kawasan dalam wilayah nasional dengan pusat perkembangan internasional, tetapi juga untuk membuka dan mendorong pertumbuhan kawasan-kawasan yang kurang berkembang dan terisolasi. Kualitas pelayanan suatu bandara tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi fisik dan layanan bandara itu sendiri, tetapi juga terkait dengan aksesibilitas bandara tersebut dari dan ke daerah pelayanan yang bersangkutan.

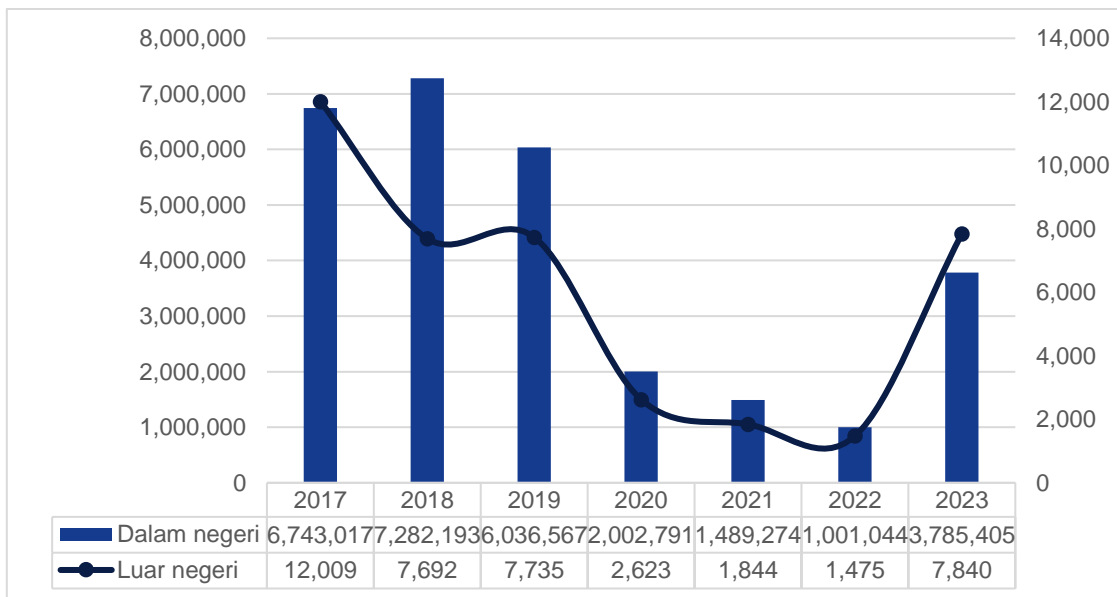
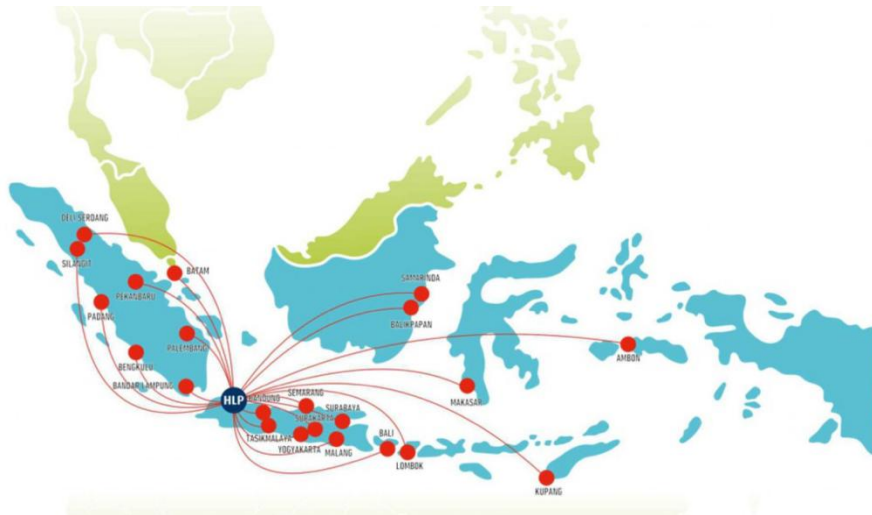


Gambar 2.61 Lokasi Bandara di dan sekitar Jakarta

Sumber: Bappenas, 2023

Jakarta hanya memiliki 1 pelabuhan udara yaitu Bandara Halim Perdanakusuma yang berlokasi di Kota Administrasi Jakarta Timur. Di sekitar Jakarta terdapat tiga pelabuhan udara lain yaitu Bandara Soekarno-Hatta di Kota Tangerang, Bandara Budiarto di

Kabupaten Tangerang, dan Bandara Pondok Cabe di Kota Tangerang Selatan. Bandara Soekarno-Hatta merupakan bandara terbesar dan tersibuk di Indonesia yang melayani penerbangan domestik dan penerbangan internasional sehingga bandara ini merupakan salah satu pintu gerbang bagi orang-orang yang datang ke Jakarta.



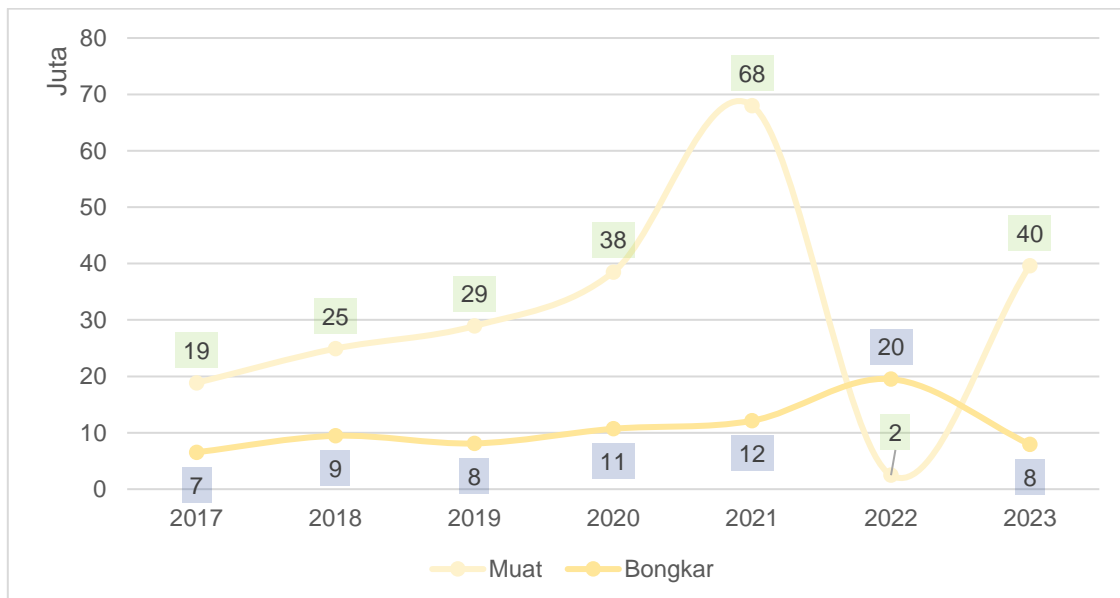
Gambar 2.62 Rute dan Jumlah Penumpang yang Berangkat dan Tiba di Pelabuhan Udara Halim Perdanakusuma Tahun 2017 – 2023

Sumber: BPS dan Angka Pura II, 2024

Bandara Halim Perdanakusuma melayani rute penerbangan domestik dengan tujuan meliputi Denpasar, Medan, Malang, Padang, Palembang, Pekanbaru, Samarinda, Semarang, Solo, Surabaya, Yogyakarta, dan kota-kota lainnya. Selain itu, Bandara Halim Perdanakusuma juga melayani penerbangan internasional dengan tujuan Malaysia,

Singapura, Cina, dan Jepang. Total perjalanan (berangkat dan tiba) penerbangan domestik dan internasional pada tahun 2023 masing-masing berjumlah 41.820 perjalanan dan 2.634 perjalanan.

Menurut BPS, jumlah penumpang yang tercatat berangkat dan datang pada penerbangan domestik mencapai 3,7 juta pada tahun 2023, meningkat hampir empat kali lipat dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 hingga 2022, jumlah penumpang berturut-turut turun hingga mencapai hanya 1 juta penumpang. Penurunan ini diakibatkan karena larangan perjalanan selama pandemi Covid-19. Tren penurunan yang sama juga terjadi pada penerbangan internasional tahun 2020 hingga 2022. Pada tahun 2023, tercatat peningkatan jumlah penumpang terjadi sebesar 7.840 penumpang dari tahun sebelumnya sebanyak 1.475 penumpang.



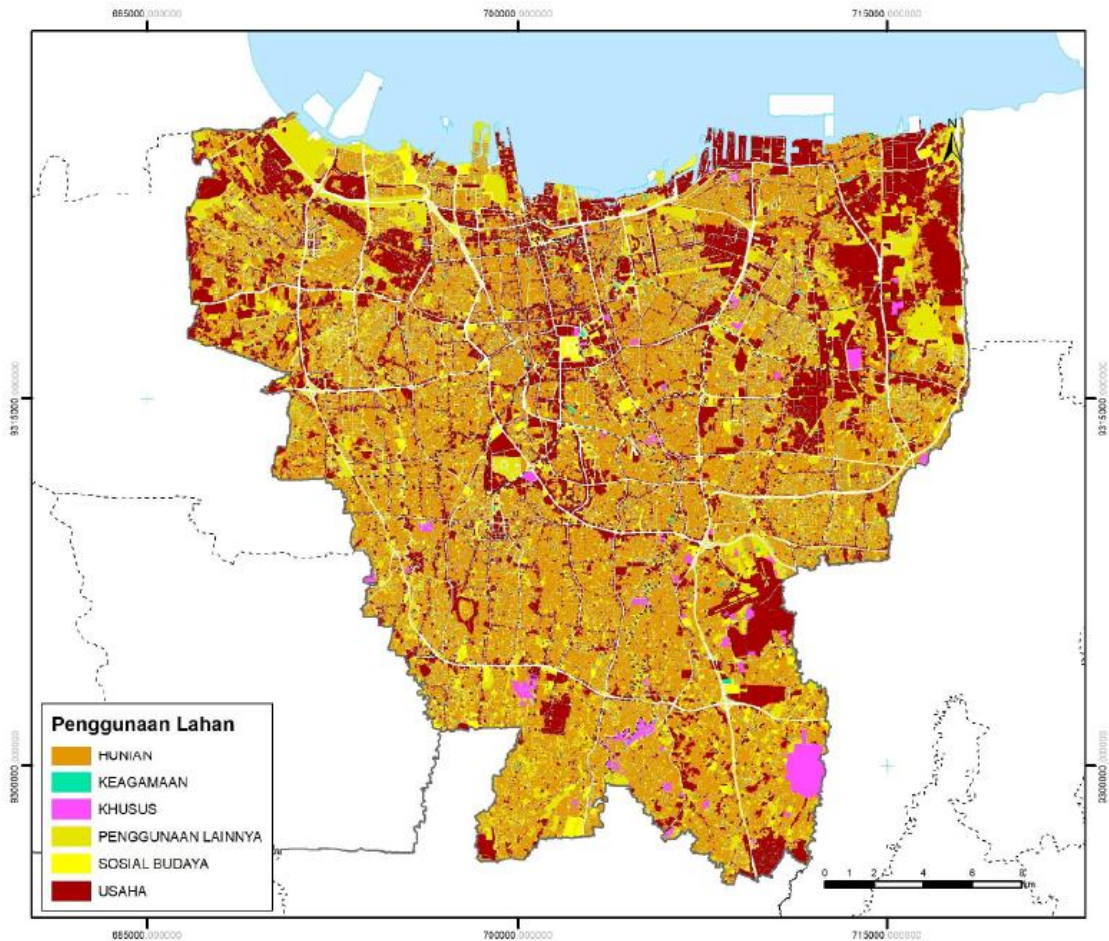
Gambar 2.63 Jumlah Muat Bongkar Kargo Pelabuhan Udara Halim Perdanakusuma Tahun 2017 - 2023

Sumber: BPS, 2024

Di tengah pertumbuhan ekonomi Jakarta yang pesat, bandara memiliki peran sebagai pusat distribusi kargo. Peningkatan aktivitas ekspor dan impor, serta perubahan dinamika perdagangan internasional, memberikan dampak langsung pada volume kargo yang ditangani di bandara, termasuk Bandara Halim Perdanakusuma. Pada kegiatan muat barang, jumlah kargo yang ditangani Bandara Halim Perdanakusuma mengalami peningkatan sejak tahun 2017 hingga 2021 sebelum mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 68 juta ton hingga menjadi 2 juta ton. Namun, terjadi peningkatan kembali pada tahun 2023 menjadi hampir 40 juta ton. Pada kegiatan bongkar, jumlah kargo terus terjadi hingga tahun 2022 yaitu sebesar 19,5 juta ton. Pada tahun 2023, total kargo bongkar turun menjadi 7,9 juta ton.

B. Infrastruktur Perumahan

Infrastruktur perumahan merupakan salah satu infrastruktur fundamental dalam membentuk pola ruang kota yang juga merupakan urusan wajib pelayanan dasar untuk pemenuhan kebutuhan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Di Jakarta persoalan perumahan yang menjadi isu strategis, terutama dalam konteks penyediaan hunian layak dan terjangkau.

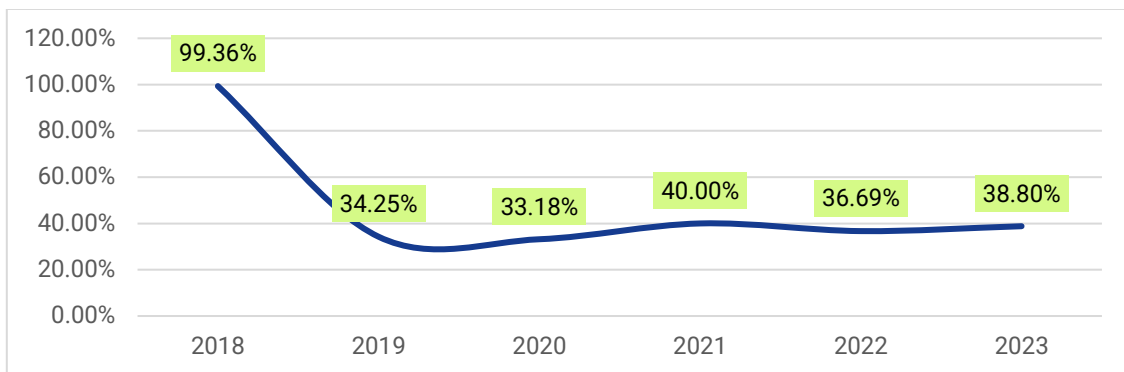


Gambar 2.64 Peta Permukiman DKI Jakarta

Sumber: Peta Penggunaan Lahan Jakarta 2021, Jakarta Satu

Hingga saat ini peruntukan lahan untuk perumahan dan permukiman sudah menduduki proporsi terbesar di Jakarta yaitu sebesar 63 persen (KLHS RTRW Provinsi DKI Jakarta). Dengan kepadatan penduduk lebih dari 16.000 jiwa/km menjadikan Jakarta menjadi wilayah paling padat di Indonesia juga di dunia. Laju perkembangan kota Jakarta yang semakin pesat membuat pemanfaatan lahan yang semakin kompetitif, sedangkan di sisi lain perkembangan kota menjadi daya tarik urbanisasi yang pada akhirnya menyebabkan tingginya permintaan akan tempat tinggal di dalam kota oleh pendatang baru dari segala kelas ekonomi. Namun permintaan ini sulit untuk dipenuhi karena terbatasnya akses

masyarakat dengan kelas ekonomi rendah terhadap rumah layak huni baik dari privat maupun pasar perumahan formal (UN-Habitat, 2008). Adanya permukiman baru juga kerap tidak selaras dengan tata ruang dan jaringan infrastruktur yang ada, sehingga menyebabkan timbulnya permukiman kumuh dan tidak teratur. Demikian pula tantangan dalam menghadapi dinamika penataan dan pemanfaatan ruang akibat adanya kebutuhan ruang untuk kegiatan pembangunan infrastruktur strategis pemerintah seperti pembangunan jaringan jalan, fasilitas olah raga dan lainnya yang berdampak pada wilayah permukiman penduduk.



Gambar 2.65 Rasio Jumlah Rumah Layak Huni terhadap Jumlah Rumah Tangga Provinsi DKI Jakarta 2018 – 2023

Sumber: BPS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 2024

Dilihat dari data di atas, rasio rumah layak huni di Jakarta mengalami penurunan secara signifikan dari 99,36% pada tahun 2018, menjadi 34,25% pada tahun 2019 dan kisaran angka tersebut terus konsisten hingga tahun 2023. Hal ini sesuai dengan perubahan indikator Rumah Layak Huni yang digunakan oleh BPS dengan mengacu pada kriteria dari *Sustainable Development Goals* (SDGs). Adapun perbedaan kriteria rumah layak huni sejak tahun 2019 adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.6 Perbedaan Kriteria Rumah Layak Huni

Kriteria Rumah Layak Huni sebelum 2019	Kriteria Rumah Layak Huni 2019
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanitasi Layak 2. Air Minum Layak 3. Lantai Bukan Tanah 4. Atap bukan ijuk/daun-daunan/lainnya 5. Dinding bukan bambu atau lainnya 6. Luas per kapita lebih dari atau sama dengan 7,2 m² 7. Penerangan utama adalah Listrik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m² per kapita (<i>sufficient living space</i>) 2. Memiliki akses terhadap air minum layak 3. Memiliki akses terhadap sanitasi layak 4. Ketahanan bangunan (<i>durable housing</i>), yaitu atap terluas berupa beton/ genteng/ seng/ kayu/ sirap; dinding terluas berupa tembok/ plesteran anyaman bambu/kawat, kayu/papan dan batang kayu; dan lantai terluas berupa marmer/ granit/ keramik/ parket/vinil/karpet/ ubin/tegel/teraso/ kayu/papan/ semen/bata merah.

Sumber: BPS, 2019

Terdapat penyesuaian metodologi/algorithm pengukuran atas indikator dimaksud sejak tahun 2019 yang menyebabkan rendahnya capaian akses terhadap hunian yang layak di Provinsi DKI Jakarta, dan secara umum masih di bawah rata-rata capaian Nasional. Perhitungan SDGs melihat seluruh komponen mempunyai bobot yang sama penting dan mutlak wajib dipenuhi kelayakannya. Artinya jika salah satu indikator komponen tidak memenuhi standar, maka hunian dianggap tidak layak. Untuk indikator ketahanan bangunan, sebanyak 52,1% rumah di Daerah Khusus Jakarta masih menggunakan material asbes sebagai atap rumah (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2022). Material asbes dianggap tidak layak karena dapat menimbulkan dampak kesehatan, memicu kanker (bersifat karsinogenik), dan asbestosis (kerusakan paru permanen).

Seiring dengan pertumbuhan penduduk di Jakarta, kebutuhan akan perumahan dan permukiman juga semakin meningkat. Hingga saat ini peruntukan lahan untuk perumahan dan permukiman sudah menduduki proporsi terbesar di Jakarta. Di sisi lain, beragamnya profil penduduk Jakarta juga terlihat melalui bervariasinya jumlah penghuni dalam suatu unit rumah, sehingga dimungkinkan jika dalam 1 KK hanya terdiri dari 1-2 orang, atau 1 rumah layak huni yang dihuni lebih dari 1 KK. Standar kecukupan luas tempat tinggal minimal yang secara umum digunakan di Indonesia adalah sebesar 9 m² per kapita, atau 7 m² per kapita berdasarkan standar rumah layak huni dari SDGs. Pada tahun 2023, jumlah rumah tangga yang memiliki luas lantai per kapita kurang dari 9 m² adalah sebanyak 402.287 KK, yang diasumsikan bahwa rumah yang dibutuhkan tahun 2023 juga sebesar 402.287 unit (Draf RP3KP, 2024).

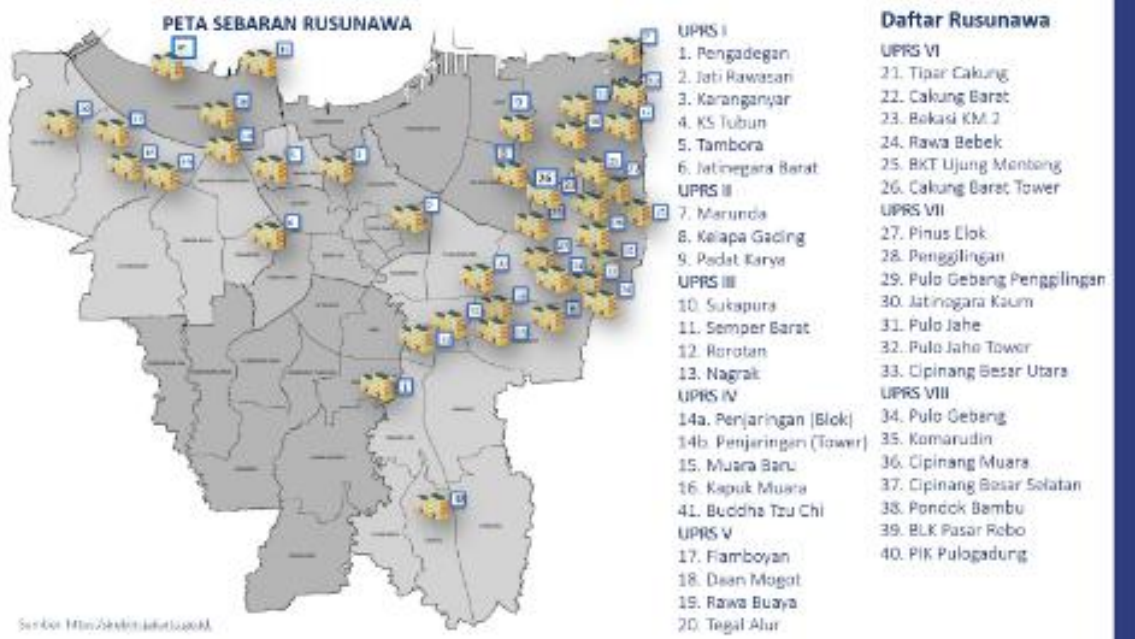
Tabel 2.7 Jumlah Rumah Tangga berdasarkan Luas Lantai Per Kapita Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

No.	Kota/Kabupaten	Rumah Tangga dengan Rasio <7,2m ² /jiwa	Rumah Tangga dengan Rasio 7,2-9m ² /jiwa	Rumah Tangga dengan Rasio >9m ² /jiwa
1	Kepulauan Seribu	1.703	360	2.063
2	Jakarta Barat	83.204	22.459	105.663
3	Jakarta Pusat	38.222	6.367	44.589
4	Jakarta Selatan	55.271	18.719	73.990
5	Jakarta Timur	70.100	27.685	97.785
6	Jakarta Utara	64.287	13.910	78.197
Provinsi DKI Jakarta		312.787	89.500	402.287

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2023

Vertikalisasi menjadi solusi kebutuhan hunian di perkotaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan ruang, agar dapat dimanfaatkan sebagai Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum seperti ruang terbuka hijau, ruang publik, dan lainnya. Jakarta telah menyediakan hunian berupa rumah susun sederhana sewa

(rusunawa) dan rumah susun sederhana milik (rusunami). Hingga tahun 2024, Jakarta mengelola 42 lokasi rumah susun sederhana sewa dengan jumlah unit sebanyak 32.897 unit.

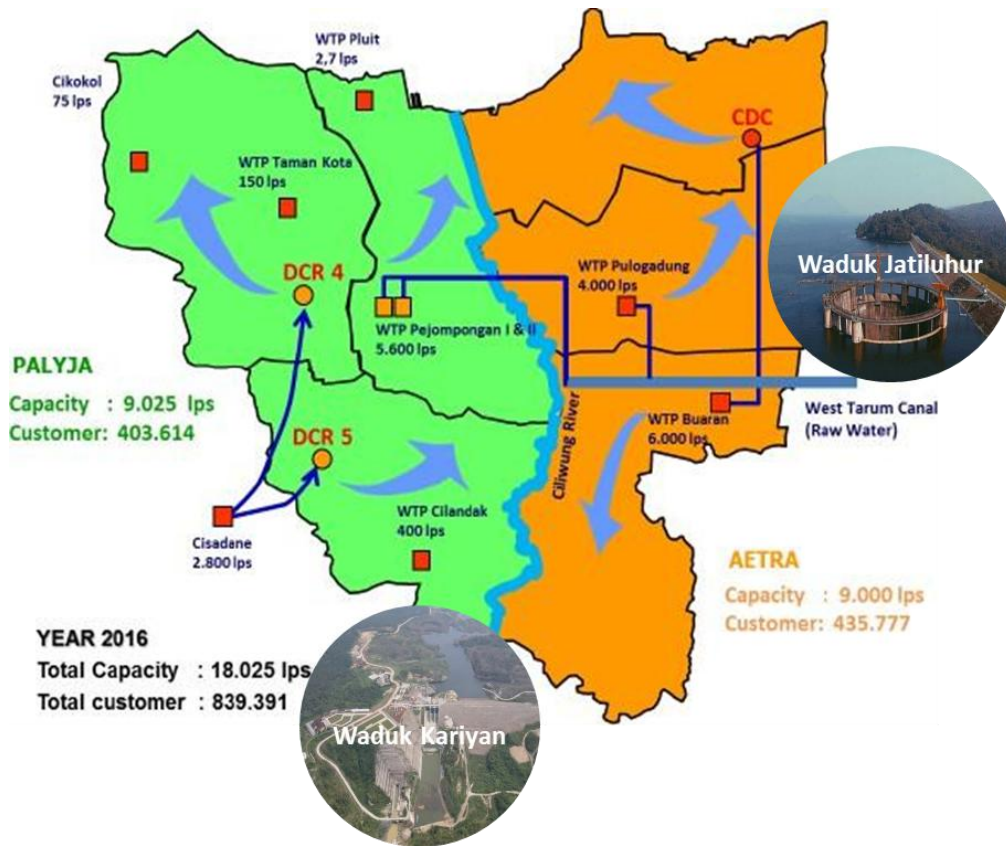


Gambar 2.66 Peta Lokasi Rumah Susun DKJ

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2023

C. Infrastruktur Air Bersih

Salah satu tolok ukur tingkat kesejahteraan suatu wilayah diukur dari konsumsi air per kapita dan kapasitas (reliabilitas) penyediaan airnya. Adapun pengelolaan air bersih di Jakarta saat ini dikelola oleh PAM Jaya.

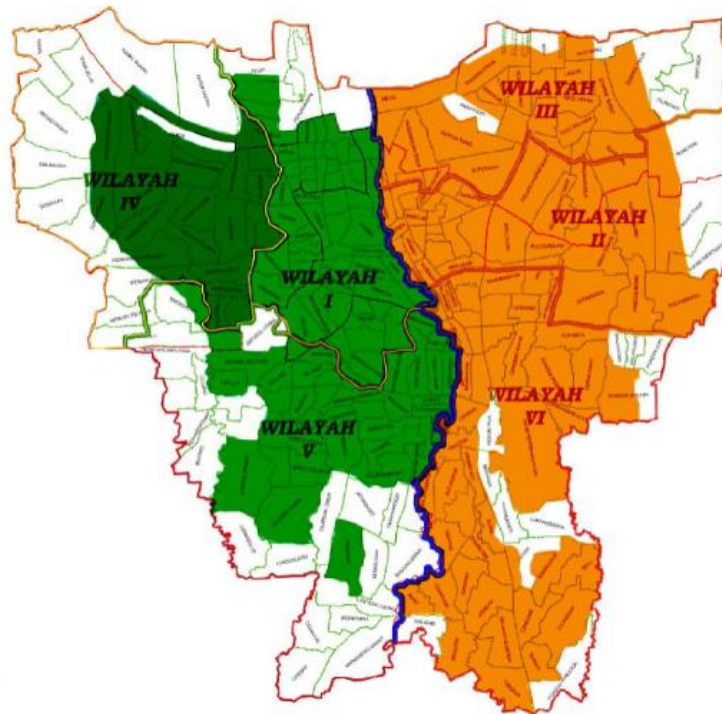


Gambar 2.67 Pembagian Zona Pelayanan Air Minum Jakarta

Sumber: PD PAM Jaya

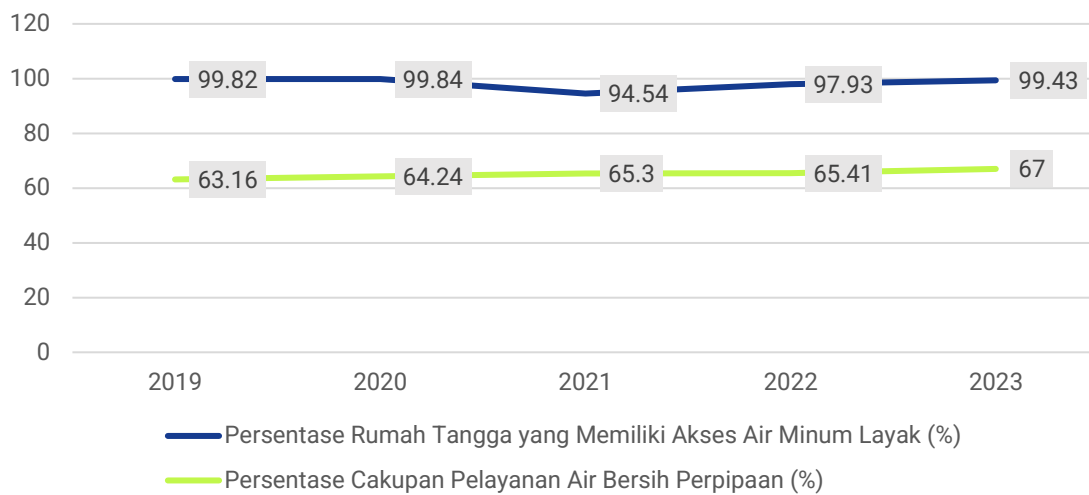
Dalam pemenuhannya kebutuhan air baku di Jakarta didapatkan dari beberapa sumber, antara lain 97 persen sumber air baku Jakarta berasal dari luar wilayah Jakarta. 82 persen berasal merupakan air yang berasal dari Jatiluhur yang dialirkan melalui Kanal Tarum Barat. 15 persen merupakan air curah yang dibeli dari wilayah Tangerang dan mata air Ciburial di Bogor. Sedangkan 3 persen sisanya diperoleh dari sungai Krukut, sungai Pesanggrahan dan air tanah yang berada di Jakarta. Dalam hal ini peran kerja sama antardaerah menjadi hal krusial dalam pemenuhan kebutuhan air bersih Jakarta.

Pada tahun 2023, cakupan rumah tangga yang terlayani akses air minum layak di Jakarta mencapai 99,42 persen, namun demikian berdasarkan data dari Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta diketahui bahwa jaringan air bersih perpipaan di Jakarta pada tahun 2023 baru melayani kurang lebih 66.73 persen penduduk Jakarta, dengan kondisi yang mengalami kebocoran adalah sebesar 45,61 persen. Cakupan suplai air bersih yang dialirkan melalui sistem penyediaan air minum perpipaan oleh perusahaan air minum di Jakarta baru mencapai 21,1 m³/detik dan total kebutuhan Jakarta untuk tahun 2020 mencapai 33 m³/detik, sehingga terjadi defisit antara pasokan dan kebutuhan.



Gambar 2.68 Wilayah Cakupan Pelayanan PDAM DKI Jakarta Wilayah Barat dan Timur

Sumber: ATLAS, 2023



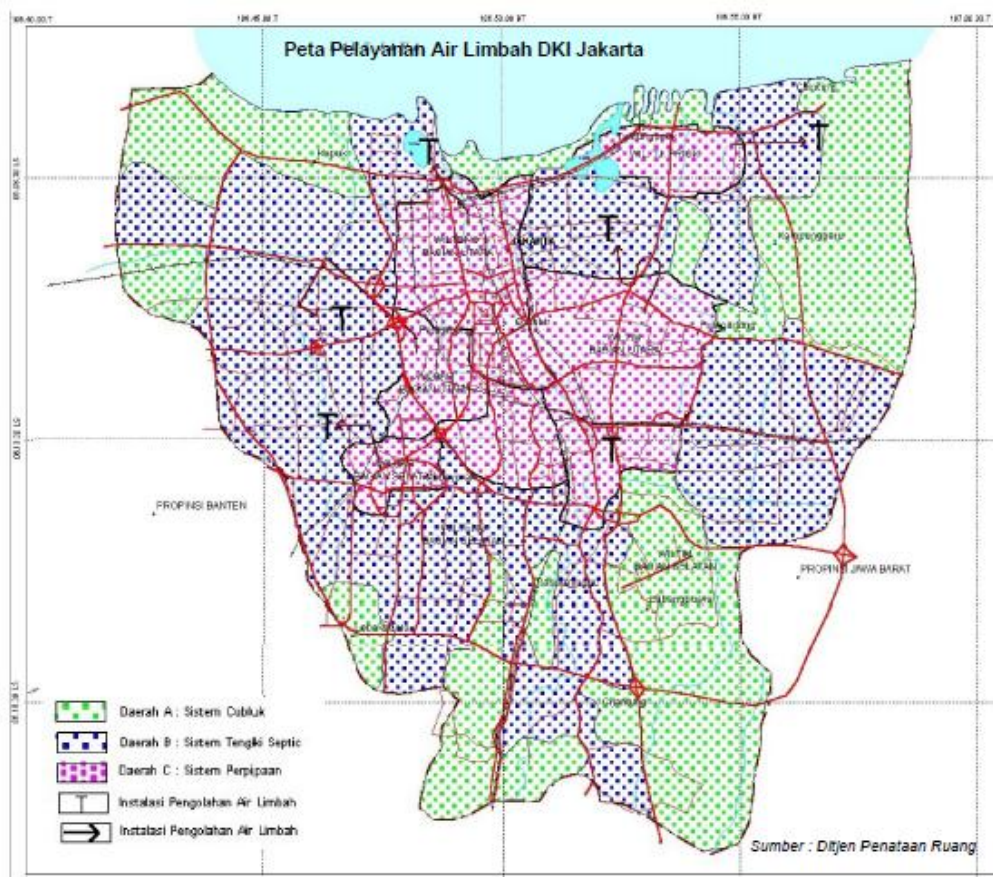
Gambar 2.69 Pelayanan Air Bersih dan Air Minum Provinsi DKI Jakarta 2019 – 2023

Sumber: BPS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 2024

D. Infrastruktur Sanitasi

Dalam konteks pengelolaan air limbah, satu-satunya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Jabodetabekpunjur adalah IPAL Setia Budi yang hanya melayani 2,5 persen dari Jakarta. Saat ini lebih dari 80 persen air limbah domestik saat ini dibuang ke badan air publik (sungai dan laut) atau bawah tanah melalui tangki limbah (*septic tank*) tanpa diolah (ATLAS, 2023). Hal ini menyebabkan memburuknya kualitas air dari air permukaan dan juga air tanah.

Dikarenakan buruknya kualitas air dari air permukaan, sumber penyediaan air harus didapatkan dari daerah terpencil di luar Jakarta yang dapat menyebabkan tingginya tarif air dan ekstraksi air tanah yang berlebihan, yang dianggap sebagai penyebab utama penurunan tanah dalam skala besar di wilayah tersebut. Terlebih lagi, buruknya kualitas air juga menyebabkan penyakit yang ditularkan melalui air pada wilayah tersebut. Lebih dari 70 persen jumlah BOD yang dihasilkan dibuang ke badan air publik (termasuk air tanah). Sementara itu, lebih dari 70 persen jumlah SS yang dihasilkan juga dibuang ke badan air publik. Hal ini jelas bahwa situasi tersebut memperburuk kualitas air sungai dan juga memperburuk kualitas air tanah.

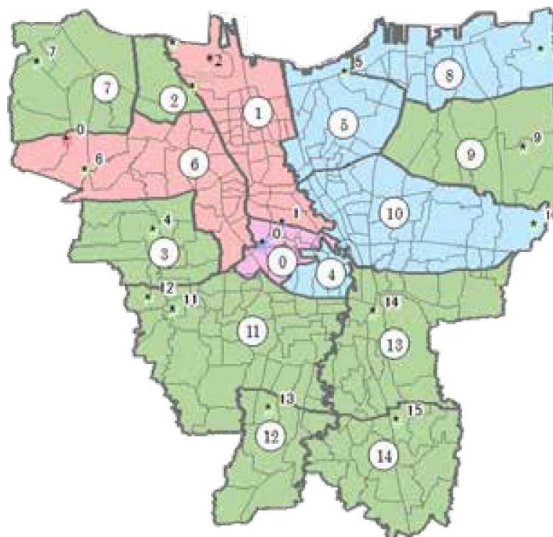


Gambar 2.70 Peta Penyediaan Air Limbah

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2024

Berdasarkan *Review Master Plan* Pengembangan Pengelolaan Air Limbah di Jakarta, tahun 2012 yang dilaksanakan oleh Tim Studi *Japan International Cooperation Agency* (JICA), pengembangan sistem perpipaan air limbah di Jakarta dibagi menjadi 15 zona (termasuk zona 0). Target cakupan pelayanan adalah sebesar 80 persen pada tahun 2050. Dari 15 zona sistem sanitasi terpusat (*off-site sanitation*), direncanakan dalam 5 tahun ke depan akan dibangun setidaknya, namun tidak terbatas, 3 (tiga) Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat (SPALT) Jakarta Sewerage System (JSS), yang skema pendanaannya direncanakan melalui APBN, APBD, pinjaman luar negeri, hibah, *climate finance*, dan/atau Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Selain itu diupayakan pula pembangunan sistem sanitasi setempat (*on-site sanitation*) pada 50 lokasi. Saat ini Persentase Akses Sanitasi Layak mencapai 93,50 persen (BPS, 2024) dengan cakupan Aman Perpipaan sebesar 21,18 persen (SAKIP, 2023) Sehingga masih terdapat gap sebesar 38,82 persen untuk mencapai 60 persen akses sanitasi aman, inklusif, dan berkelanjutan di tahun 2045.

Zona No.	Sita No	Lokasi IPAL (Alternatif)	Area (ha)
0	0	Kali Krukut	Rencana
	1	Waduk Setiabudi	Eksisting
1	2	Waduk Pluit	4
2	3	Muara Angke	0,8
3	4	Hutan Kota Srengseng	4,0
4		Transfer ke IPAL Zona 10	16
5	5	Hutan Kota Waduk Sunter	4,6
6	6	Duri Kosambi	8,2
7	7	Kamal - Pegadungan	3,9
8	8	Rencana Waduk Marunda	6,0
9	9	Rencana Situ Rawa Rorotan	2,9
10	10	Pulo Gebang	8,7
11	11	Taman Bendi	3,0
	12	Rencana Waduk Ulujami	5,9
12	13	Kebun Binatang Ragunan	3,1
13	14	Rencana Waduk Kp. Dukuh	5,7
14	15	Rencana Waduk RW 05 Ceger	3,6
Total			65,10

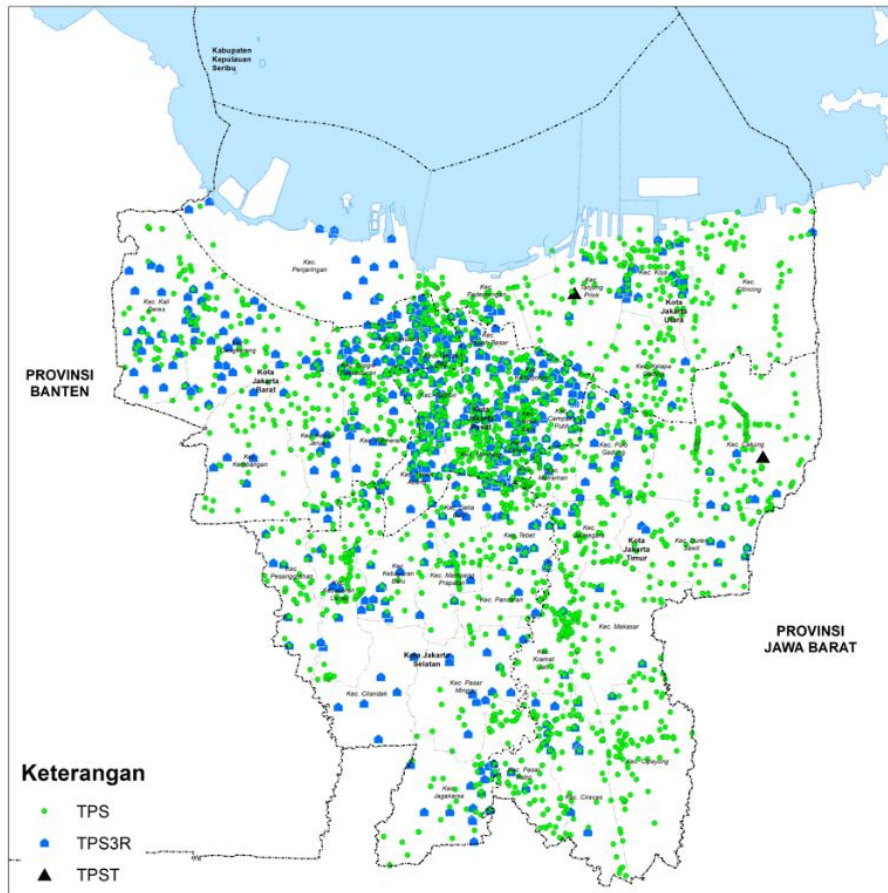


Gambar 2.71 Pengembangan Jakarta Sewerage System

Sumber: RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017 – 2022

E. Infrastruktur Sampah

Berdasarkan data Dinas LH tahun 2023 jumlah rata-rata sampah yang diangkut ke TPST Bantargebang sebesar 7.361 ton/hari. Sumber sampah terbesar berasal dari permukiman sebesar 60,5 persen dan dari dunia usaha sebesar 28,7 persen, dan dari fasilitas sosial dan fasilitas umum sebesar 10,8 persen. Terjadi penurunan persentase penanganan sampah dalam kurun waktu 2018-2022. Pada tahun 2022, sampah yang tertangani (meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir) turun menjadi 73,68 persen dan persentase ini masih lebih rendah dibandingkan target TPB/SDGs Jakarta.



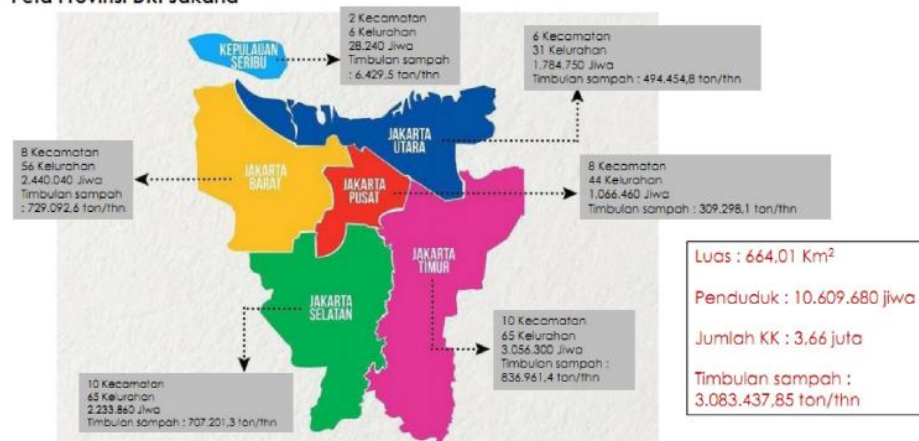
Gambar 2.72 Persebaran TPS, TPS3R, dan TPST di Wilayah Jakarta

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2024

Timbulan sampah yang berasal dari pemakaian kantong plastik sangat tinggi, namun setelah ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 mengenai pemakaian kantong plastik. Dari jumlah penggunaan tahun 2018 sebanyak 115.200 ton/tahun menjadi 20.154 ton/tahun di tahun 2020. Dari banyaknya timbulan sampah maka harus ada tempat pembuangan akhir untuk sampah tersebut. Tempat pembuangan akhir yang dituju oleh Jakarta adalah TPST Bantargebang dengan luas 104,70 hektare, dengan kapasitas 21.878.000 m³. Pada tahun 2023, volume sampah di TPST Bantargebang mencapai 22.387.370 m³. Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di Jakarta dan mengurangi beban TPST Bantargebang, diperlukan kerjasama lintas wilayah, khususnya dengan daerah-daerah penyangga sekitar Jakarta. Pemerintah Provinsi Jakarta dapat memperkuat kolaborasi dengan kota-kota seperti Bekasi, Tangerang, dan Bogor dalam hal pengelolaan sampah regional. Kerjasama ini dapat mencakup pembangunan infrastruktur pengolahan sampah berbasis teknologi modern, seperti fasilitas daur ulang, pengelolaan sampah organik, dan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa).

RPJPD JAKARTA 2025-2045

Peta Provinsi DKI Jakarta



Gambar 2.73 Timbulan Sampah per Kota Administrasi

Sumber: ATLAS Metropolitan Jakarta 2023

F. Energi

Infrastruktur energi yang andal dan efisien memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing suatu wilayah.

Tabel 2.8 Indikator Infrastruktur Energi Jakarta 2018 - 2022

No.	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Rasio ketersediaan daya listrik	106,87%	107,48%	109,18%	106,95%	-
2.	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Konsumsi listrik per kapita	3.132,00	3.256,00	3.021,00	3.307,00	3.237,68
4.	Bauran energi terbarukan	0%	0,04%	0,12%	0,08%	0,32%

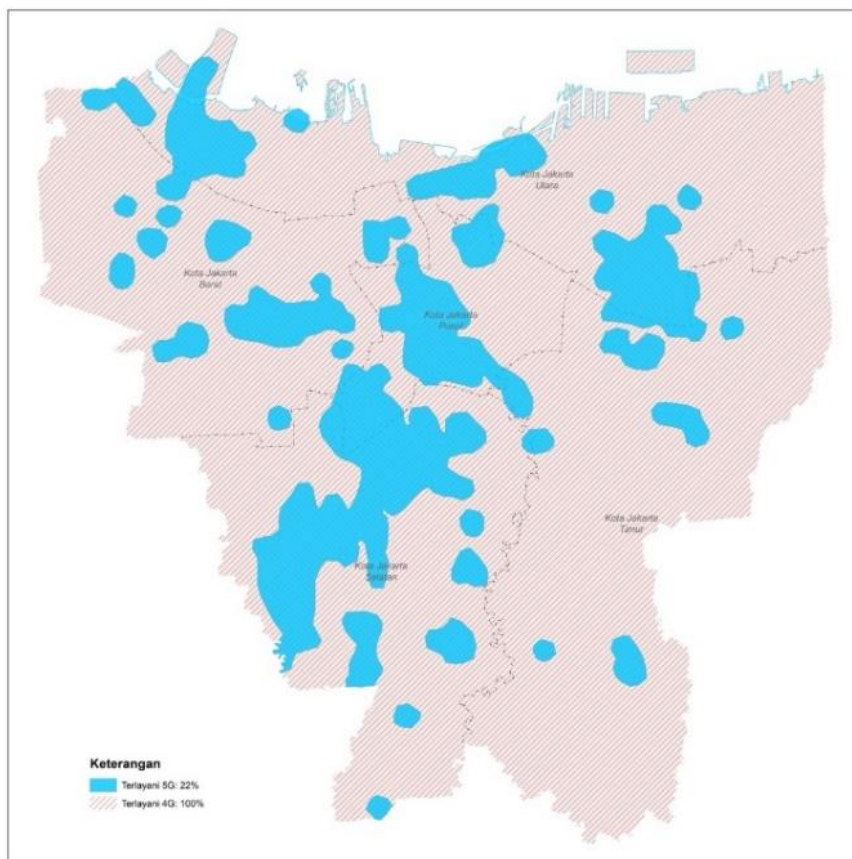
Sumber: KLHS RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2025-2045 dan RPD Provinsi DKI Jakarta 2023 -2026

Salah satu indikator kualitas infrastruktur energi adalah jumlah listrik yang tersedia dan sesuai Tabel 2.18 hingga tahun 2021, rasio ketersediaan daya listrik Jakarta mencapai 106,95 persen yang berarti pasokan listrik sudah melebihi kebutuhan daya listrik rumah tangga. Rasio elektrifikasi atau persentase rumah tangga yang menggunakan listrik pun menunjukkan bahwa seluruh rumah telah tersambung dengan listrik. Pulau-pulau berpenghuni di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pun sudah mencapai keterhubungan dengan listrik 100 persen. Sepuluh pulau dialiri listrik melalui kabel laut dan satu pulau, yaitu Pulau Sebir, dialiri listrik melalui Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) atau genset dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berdaya 400 *kilowatt peak*. Walaupun begitu, tercatat terjadi penurunan konsumsi listrik per kapita pada tahun 2022 sebesar 3.237,68 kWh, turun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 3.307 kWh.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah tingkat bauran energi terbarukan sebagai sumber energi primer masih sangat rendah yaitu 0,32 persen. Capaian ini sebenarnya sudah memenuhi target TPB/SDGs Jakarta sebesar 0,11 persen, namun di sisi lain bauran EBT sebesar 0,32 persen menandakan bahwa masih tingginya penggunaan bahan bakar fosil.

G. Infrastruktur Telekomunikasi

Suatu wilayah yang memiliki infrastruktur telekomunikasi yang berkualitas dapat menciptakan lingkungan bisnis dan investasi yang kondusif yang kemudian dapat meningkatkan perkembangan usaha dan ekonomi serta meningkatkan daya saing. Keandalan infrastruktur telekomunikasi ditentukan oleh ketersediaan jaringan internet yang cepat.



Gambar 2.74 Cakupan Layanan Jaringan Internet 4G dan 5G di Jakarta

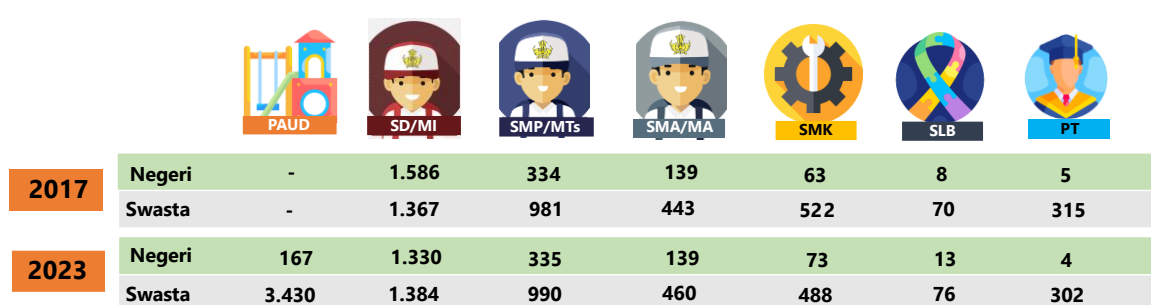
Sumber: BPS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 2023

Dari peta di atas, tampak sebagian besar wilayah Jakarta sudah terhubung dengan jaringan internet jenis 4G/LTE dengan cakupan hingga 100 persen. Namun, layanan jaringan 5G masih mencakup 22 persen dari seluruh wilayah Jakarta, yang sebagian

besar berada di Jakarta Selatan. Diperlukan pengembangan jaringan internet 5G yang lebih masif mengingat peningkatan kualitas layanan telekomunikasi mampu meningkatkan produktivitas ekonomi dan daya saing Jakarta.

H. Infrastruktur Pendidikan dan Kesehatan

Infrastruktur pendidikan dan kesehatan merupakan infrastruktur dasar dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas yang pada akhirnya dapat memberikan daya saing terhadap wilayah. Infrastruktur pendidikan dan kesehatan di Jakarta juga menjadi landasan penting bagi perkembangan intelektual dan potensi generasi muda.



Gambar 2.75 Jumlah Sekolah Negeri dan Swasta berdasarkan Tingkat Pendidikan di Jakarta 2017 dan 2023

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2023

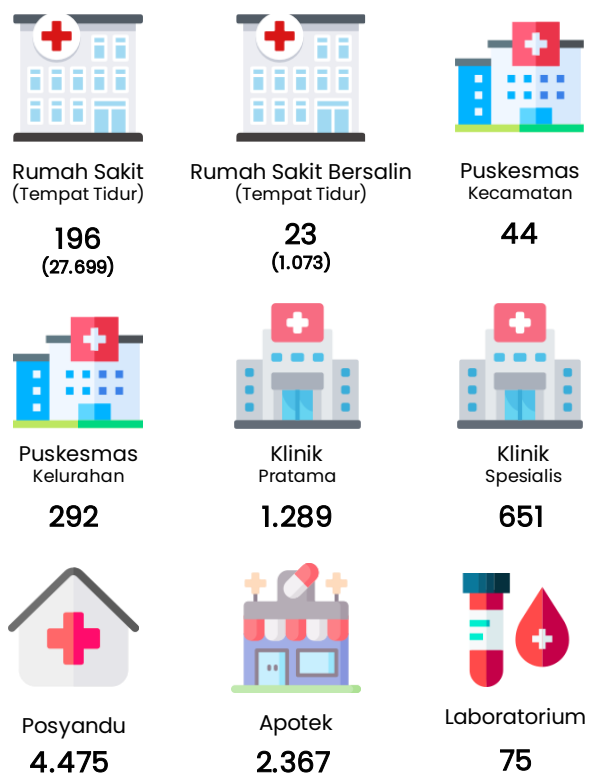
Secara keseluruhan, jumlah sekolah swasta pada setiap jenjang pendidikan lebih banyak daripada jumlah sekolah negeri. Pada tahun 2023, jenjang pendidikan PAUD yang meliputi TK, Raudatul Atfhal, Kelompok Bermain, Tempat Penitipan Anak, Satuan PAUD Sejenis, dan satuan pendidikan PAUD lainnya berjumlah 3.597 sekolah. Selain SD/MI, SMA/MA dan Perguruan Tinggi, jumlah sekolah negeri bertambah di wilayah Jakarta. Selain itu, pada tingkat SD/MI hingga SMA/MA dan pendidikan luar biasa, terdapat penambahan jumlah sekolah swasta bila dibandingkan dengan data tahun 2017. Namun, jumlah SMK dan Perguruan Tinggi swasta mengalami penurunan jumlah pada tahun 2023. Fasilitas sekolah ini sudah tersebar di seluruh wilayah Jakarta.

Tabel 2.9 Jumlah Fasilitas Penunjang Pendidikan Tahun 2018 - 2023

Fasilitas Penunjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Perpustakaan Berstandar Internasional	2	2	2	1	1	0
Perpustakaan Berbasis Teknologi Informasi	7	7	7	7	6	4
Taman Bacaan Masyarakat	185	70	-	55	56	69
Koleksi Buku	1.217.070	1.685.123	1.692.998	1.695.501	1.118.045	813.311

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2023

Selain sekolah, terdapat fasilitas penunjang pendidikan lainnya seperti perpustakaan, taman bacaan, dan koleksi buku. Pada tahun 2018 hingga 2022, jumlah perpustakaan dan taman bacaan masyarakat tidak berubah signifikan pada lima tahun terakhir. Namun, pada tahun 2023, Jakarta tidak memiliki perpustakaan berstandar internasional dan jumlah perpustakaan berbasis teknologi informasi berkurang menjadi 4 perpustakaan. Selain itu, jumlah koleksi buku mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 813.311 buku dari 1.118.045 buku.



Gambar 2.76 Jumlah Fasilitas Kesehatan Tahun 2023

Sumber: BPS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 2024

Sementara itu, untuk sektor kesehatan, fasilitas kesehatan di Jakarta terbangun cukup merata di seluruh wilayah Jakarta. Pada tahun 2023, fasilitas kesehatan primer berupa puskesmas kelurahan dan puskesmas kecamatan berturut-turut berjumlah 292 dan 44 unit. Sesuai Renstra Dinas Kesehatan 2023-2026, rasio ketersediaan puskesmas per 1.000 jiwa penduduk pada tahun 2021 adalah 0,0313. Angka ini lebih rendah dibandingkan pada tahun 2018 yaitu sebesar 0,0320. Penurunan rasio ini diakibatkan oleh kebijakan peningkatan status beberapa puskesmas menjadi Rumah Sakit Daerah Kelas D di wilayah kecamatan.

Selain itu, terdapat 196 rumah sakit dan 27.699 tempat tidur yang melayani seluruh penduduk Jakarta. Pada tahun 2017 hingga 2021, terjadi peningkatan rasio ketersediaan

tempat tidur terhadap 1.000 jiwa penduduk yaitu pada tahun 2021 adalah 2.234. Peningkatan rasio ini sejalan dengan peningkatan jumlah rumah sakit dan tempat tidur terutama dari sektor swasta. Untuk fasilitas bersalin dan layanan kesehatan ibu dan anak, Jakarta memiliki 23 rumah sakit/tempat bersalin dan 4.475 posyandu.

I. Infrastruktur Perdagangan dan Jasa

Jakarta sebagai pusat aktivitas perdagangan dan jasa memiliki infrastruktur pendukung yang berdaya saing. Fasilitas perdagangan dapat ditunjukkan melalui jumlah pasar dan pusat-pusat perbelanjaan sementara fasilitas jasa dapat dilihat dari jumlah lembaga keuangan seperti bank, dan fasilitas jasa wisata dan akomodasi yang menjadi salah satu jenis fasilitas jasa yang dominan di Jakarta.



Gambar 2.77 Jumlah Fasilitas Perdagangan dan Jasa Tahun 2023

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta dan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, 2024

Pada tahun 2023, terdapat 4 pasar grosir, 2 pasar khusus, 1 pasar induk, 144 eceran/retail, 74 mal, dan 20 pusat perbelanjaan. Jumlah pasar dan pusat perdagangan di Jakarta tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan sejak tahun 2018.

Tabel 2.10 Jumlah Bank Berdasarkan Jenis Tahun 2018 - 2022

Jenis Bank	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bank Persero	1.710	1.648	1.590	1.643	1.371	1.311
Bank Pembangunan Daerah	331	326	318	337	530	288
Bank Swasta	2.052	1.960	1.863	1.781	1.658	1.588
Bank Asing	27	26	26	22	18	16
Bank Umum Syariah	255	254	240	225	205	209
Bank Umum Syariah BPD	-	-	-	1	2	2
Total	4.375	4.214	4.037	4.009	3.784	3.414

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2023

Sementara itu, jumlah lembaga keuangan seperti perbankan di Jakarta cukup banyak dan beragam. Pada tahun 2023, bank swasta dan bank persero memiliki jumlah kantor paling banyak di Jakarta. Jumlah ini meliputi jumlah kantor pusat, kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor kas. Namun secara total jumlah kantor bank dan lembaga keuangan di Jakarta mengalami penurunan hingga 370 kantor karena saat ini tren

menunjukkan peralihan operasional lembaga keuangan, termasuk perbankan, menuju layanan digital yang lebih efisien. Hal ini tentu berdampak pada jumlah kantor yang berada di Jakarta.

Sebagai pusat ekonomi dan bisnis di Indonesia, Jakarta memiliki infrastruktur budaya dan pariwisata untuk memperkuat identitas kota sebagai destinasi budaya dan pariwisata yang menarik.



Gambar 2.78 Jumlah Fasilitas Budaya Tahun 2023

Sumber: BPS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 2023 dan Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta 2022

Di Jakarta, terdapat beberapa fasilitas budaya dan pariwisata seperti museum berjumlah 63, stadion berjumlah 10 dan sanggar seni budaya berjumlah 11 gedung. Peningkatan infrastruktur budaya dan pariwisata diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, pelestarian warisan budaya, dan meningkatkan citra kota sebagai pusat kehidupan budaya yang dinamis.



Gambar 2.79 Jumlah Fasilitas Pariwisata Tahun 2023

Sumber: BPS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 2024

Selain menjadi fasilitas pariwisata, akomodasi juga menjadi salah satu fasilitas penunjang bagi bisnis dan kegiatan konferensi. Pada tahun 2023, Jakarta memiliki 448 akomodasi berbintang dan 57.116 kamar. Dari jumlah tersebut, total tempat tidur yang tersedia sebanyak 74.333. Jumlah ini meningkat dari tahun 2022 yang berjumlah 74.762 tempat tidur.

2.4.4 Daya Saing Iklim Investasi

Dalam era globalisasi dan ketatnya persaingan ekonomi, pentingnya daya saing sebuah wilayah menjadi krusial dalam menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Jakarta sebagai pusat politik, ekonomi, dan budaya Indonesia memiliki peran

strategis dalam menciptakan lingkungan investasi yang menarik. Terlebih lagi, Jakarta diarahkan untuk menjadi pusat perekonomian nasional dan kota global, Jakarta akan memiliki potensi besar untuk menjadi magnet investasi domestik maupun internasional. Fungsi investasi sangat penting untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah. Besarnya investasi dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan non ekonomi. Faktor ekonomi yang berpengaruh di Jakarta antara lain ketersediaan tenaga kerja baik kualitas maupun kuantitas, tingkat suku bunga, kondisi pasar, dan kondisi makro ekonomi daerah lainnya. Sedangkan, faktor nonekonomi adalah simplifikasi investasi baik dalam hal perizinan dan pembayaran pajak, retribusi, insentif, atau disinsentif, serta mekanisme insentif fiskal untuk menarik investor dalam jangka panjang. Selain itu, kondisi keamanan, ketenteraman dan ketertiban, serta kepastian hukum dalam berusaha juga memegang peran penting dalam meningkatkan daya saing iklim investasi. Jakarta perlu mendorong investasi pada sektor yang berpotensi memberikan Pendapatan Asli Daerah dan dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta memiliki intervensi yang tinggi pada sektor tersebut, seperti sektor pariwisata, pendidikan, dan kesehatan.

A. Penanaman Modal

Penanaman modal menjadi salah satu kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) memiliki peran penting dalam meningkatkan daya saing investasi sebuah kota, karena dari penanaman modal tersebut akan membawa modal, teknologi, dan lapangan kerja baru yang sangat dibutuhkan untuk perkembangan ekonomi kota. Di Jakarta, penanaman modal baik dari dalam negeri maupun luar negeri menunjukkan tren yang fluktuatif selama periode 2018 – 2022. Berikut merupakan nilai penanaman modal di Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2018 hingga 2023.

Tabel 2.11 Penanaman Modal di Jakarta 2018 - 2023

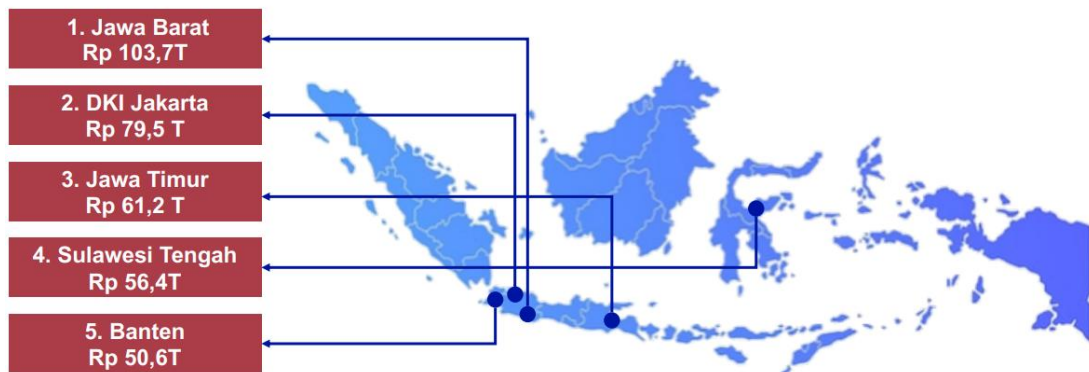
Tahun	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PMDN (Proyek)	666	3.344	17.667	27.119	24.950	68.704
PMDN (Investasi) (triliun rupiah)	49,10	62,09	42,95	54,71	89,22	95,20
PMA (Proyek)	6.499	8.092	16.787	7.620	8.942	20.028
PMA (Investasi) (miliar USD)	4,85	4,12	3,61	3,33	3,74	4,83

Sumber: BPS, 2024

Secara umum tren PMDN di Jakarta mengalami peningkatan. PMDN meningkat dari tahun 2018 sampai tahun 2019 dengan nilai investasi 49,10 triliun rupiah dan jumlah proyek 666 proyek di tahun 2018 menjadi 62,09 triliun rupiah dengan jumlah proyek bertambah secara signifikan hingga 3.344 proyek di tahun 2019. Pada tahun 2020, meskipun nilai investasi mengalami penurunan menjadi 42,95 triliun rupiah akibat

pandemi Covid-19, jumlah penanaman modal dalam negeri dalam kategori proyek meningkat tajam hingga 17.667 proyek. Hal ini bersamaan dengan upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional melalui percepatan pembangunan infrastruktur dan pengutamaan kegiatan padat karya. Pada tahun 2021 investasi kembali meningkat hingga 54,71 triliun rupiah dengan jumlah proyek sebanyak 27.119 proyek, diikuti dengan peningkatan investasi di tahun 2022 sebesar 89,22 triliun rupiah meskipun secara jumlah proyek menurun di tahun 2022 menjadi 24.950 proyek. Pada tahun 2023, nilai investasi meningkat secara signifikan menjadi 95,20 triliun rupiah dengan jumlah proyek yang lebih kembali meningkat yaitu mencapai 68.704 proyek.

PMA memiliki proporsi yang lebih kecil dibandingkan dengan PMDN yang ada di Jakarta. Secara umum, nilai investasi PMA mengalami penurunan dari tahun 2018 sebesar 4,95 miliar USD menjadi 4,83 miliar USD di tahun 2023, dengan penurunan tajam terjadi di tahun 2021 dengan nilai investasi 3,33 miliar USD. Namun demikian, jika dilihat dari PMA dalam kategori proyek mengalami peningkatan yaitu 6.499 di tahun 2018 menjadi 20.028 di tahun 2023. Pada tahun 2020, PMA dalam kategori proyek mengalami lonjakan besar yaitu 16.787 proyek bersamaan dengan peningkatan proyek PMDN di tahun yang sama, namun diikuti dengan penurunan yang signifikan di tahun 2021 menjadi 7.620 proyek. Pada tahun 2022, penanaman modal berupa proyek kembali meningkat hingga 8.942 dan terus bertambah pesat hingga tahun 2023.



Gambar 2.80 5 Besar Lokasi Realisasi (PMA & PMDN) Semester I 2023 di Indonesia

Sumber: BKPM, 2024

Pada semester I 2023, berdasarkan data dari Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta berada di peringkat kedua untuk lokasi realisasi investasi secara nasional di bawah Provinsi Jawa Barat, dengan total realisasi investasi sebesar 79,5 triliun rupiah. Data ini menunjukkan bahwa Jakarta memiliki keunggulan kompetitif yang tinggi di Indonesia dalam penanaman modal atau pelaksanaan proyek investasi baik dari penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing. Hal ini menjadi potensi yang baik bagi Jakarta untuk mengoptimalkan peluang investasi yang ada, didukung dengan penciptaan iklim investasi yang baik dan kondusif. Namun demikian, efisiensi investasi menjadi tantangan bagi Jakarta. Berdasarkan hasil perhitungan Bappenas tahun 2022,

Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Jakarta berada di angka 7,54, lebih besar pada dari nilai nasional yaitu 6,25 yang menunjukkan bahwa tingkat efisiensi investasi di Jakarta lebih rendah dibandingkan nasional.

B. Keamanan dan Ketertiban

Keamanan dan ketertiban memiliki peran penting dalam meningkatkan investasi di suatu daerah karena keamanan dan ketertiban mencerminkan keberhasilan suatu daerah dalam menciptakan lingkungan yang aman, stabil, dan teratur. Tingkat keamanan dan ketertiban digambarkan melalui jumlah kejahatan atau kriminalitas yang terjadi di Jakarta dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Semakin tinggi jumlah kejahatan atau kriminalitas, maka tingkat keamanan dan ketertiban semakin rendah.

Tabel 2.12 Keamanan dan Ketertiban Tahun 2018 - 2022

No	Uraian	2018*	2019*	2020	2021**	2022**
1	Jumlah Kejahatan	8.898	-	8.112	20.370	18.583
2	Jumlah Penduduk	10.467.600	10.557.800	10.562.088	10.609.681	10.679.951

Sumber: *Buku Jakarta Dalam Angka 2019 – 2020, BPS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 **Buku Statistik Kriminalitas, BPS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Jumlah tindak kriminalitas di Jakarta dari tahun 2018 hingga 2020 cenderung menurun, meskipun jumlah penduduk terus meningkat. Pada tahun 2021 dan 2022, terdapat perbedaan klasifikasi perhitungan jumlah kejahatan sehingga terdapat perbedaan basis data. Namun demikian, dalam dua tahun terakhir, data menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah kejahatan dari tahun 2021 hingga tahun 2022. Penurunan jumlah kriminalitas di Jakarta tidak terlepas dari meningkatnya sistem pengawasan, strategi pencegahan kriminal yang diterapkan, serta partisipasi masyarakat.

C. Kemudahan Perizinan

Kemudahan perizinan juga menjadi faktor kunci terhadap peningkatan investasi di suatu daerah. Proses perizinan yang semakin sederhana dan mudah, akan mempersingkat waktu dan meminimalkan biaya perizinan sehingga memudahkan investor untuk melakukan berinvestasi di Jakarta. Kemudahan perizinan di Jakarta termasuk ke dalam proses yang sudah baik dan mudah bagi investor. Hal ini dapat tergambarkan dari proses perizinan yang saat ini sudah dapat diproses dalam satu hari.

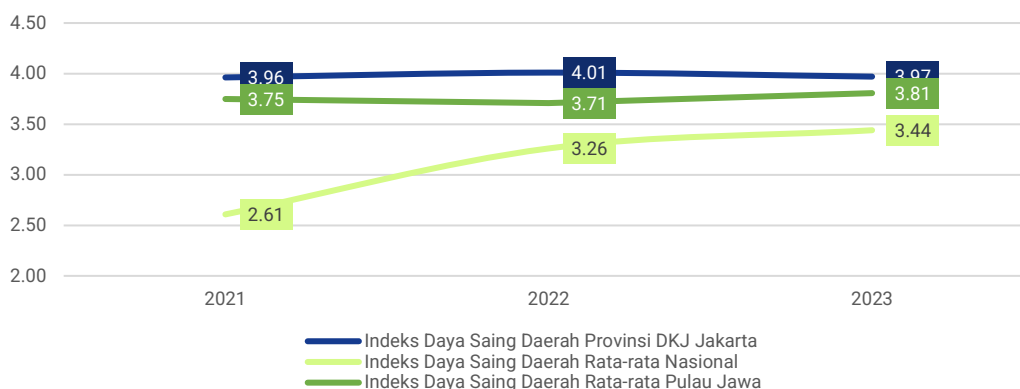
Tabel 2.13 Lama Proses Perizinan Jakarta Tahun 2023

No	Uraian	Lama Mengurus (hari)
1	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	1
2	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	1
3	Izin Usaha Industri (IUI)	7
4	Tanda Daftar Industri (TDI)	1
5	Izin Mendirikan Bangunan	7

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 2023

D. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. IDSD sebagai alat ukur produktivitas mengombinasikan perspektif mikro di level industri/perusahaan dan level makro pada level institusi publik. Secara konseptual kedua perspektif tersebut dibagi ke dalam tiga komponen, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, dan pasar, yang ketiganya dibentuk dari total 12 pilar daya saing. Adapun capaian Indeks Daya Saing Daerah Jakarta selama periode 2021 – 2023 sebagaimana gambar di bawah ini.



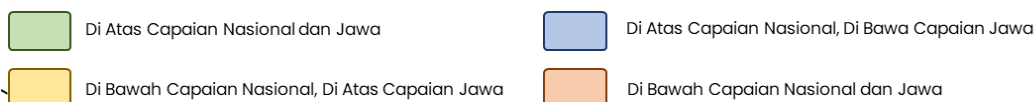
Gambar 2.81 Indeks Daya Saing Daerah Jakarta 2021 – 2023

Sumber: BRIN, 2024

Jika dibandingkan dengan capaian rata-rata nasional dan rata-rata Pulau Jawa, capaian IDSD Jakarta terus secara konsisten berada di atas keduanya. Hal ini mengindikasikan bahwa capaian produktivitas daerah Jakarta sangat baik, dan memiliki daya saing di kancah nasional maupun regional. Namun demikian untuk mengamati lebih cermat mengenai capaian IDSD Jakarta, perlu dilihat dari capaian masing-masing pilar selama tiga tahun terakhir sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.14 Indeks Daya Saing Daerah Jakarta berdasarkan Tiga Pilar Daya Saing Tahun 2021 – 2023

Komponen	Pilar	2021			2022			2023		
		Jakarta	Jawa	Nasional	Jakarta	Jawa	Nasional	Jakarta	Jawa	Nasional
Lingkungan Pendukung	Institusi	4,58	4,53	3,15	4,28	4,33	4,14	4,56	4,31	4,30
	Infrastruktur	3,92	4,03	3,02	2,77	3,07	2,91	4,09	3,68	2,71
	Adopsi TIK	5,00	4,10	2,76	5,00	4,26	3,57	4,99	4,24	3,58
	Stabilitas Ekonomi Makro	3,59	3,14	2,20	4,02	3,58	3,05	3,77	3,45	3,54
Sumber Daya Manusia	Kesehatan	4,38	3,85	2,92	4,00	3,99	3,76	4,03	4,01	3,79
	Keterampilan	3,68	3,32	2,44	3,85	3,64	3,73	4,04	3,76	3,77
Pasar	Pasar Produk	3,58	3,52	2,48	2,56	2,31	2,68	2,60	2,19	2,64
	Pasar Tenaga Kerja	4,00	4,13	3,17	3,96	3,63	3,73	4,75	3,91	3,85
	Sistem Keuangan	2,67	2,93	1,89	3,23	3,06	2,66	4,16	3,40	2,53
	Ukuran Pasar	3,67	3,87	2,58	5,00	3,31	1,31	5,00	4,84	4,36
	Dinamisme Bisnis	3,75	3,79	2,20	5,00	5,00	5,00	2,18	3,80	3,22
	Kapabilitas Inovasi	4,19	3,79	2,35	4,45	4,34	2,62	3,51	4,10	3,03
Rara-rata		3,96	3,75	2,61	4,01	3,71	3,26	3,97	3,81	3,44



Sumber: BRIN, 2024

Dalam konteks lingkungan pendukung, secara umum Jakarta memiliki capaian di atas rata-rata nasional dan Pulau Jawa, baik dari pilar institusi, adopsi TIK, dan stabilitas ekonomi makro. Hal ini memang dikarenakan dalam konteks adopsi TIK Jakarta berkembang dibanding daerah lain pada umumnya, dan menjadi *trendsetter* terkait teknologi dan informasi pada konteks nasional. Sementara itu stabilitas ekonomi Jakarta juga memiliki capaian yang baik, bahkan, hal ini dikarenakan Jakarta memang merupakan pusat perekonomian nasional, sehingga dari segi pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, nilai investasi, hingga kapasitas fiskal daerah yang dimiliki menguatkan daya saing Jakarta sendiri. Namun demikian dari segi infrastruktur pada tahun 2021 dan 2022 nilai Jakarta lebih rendah dibandingkan rata-rata Pulau Jawa, bahkan pada 2022 lebih rendah dibandingkan nasional. Namun hal tersebut kembali membaik secara signifikan pada tahun 2022. Hal ini dapat dimengerti karena dari segi infrastruktur transportasi, kelistrikan, Jakarta sudah memiliki daya saing yang cukup tinggi. Sementara dari utilitas air minum masih memerlukan perbaikan.

Dalam konteks komponen sumber daya manusia, Jakarta memiliki capaian yang sangat baik jika dibandingkan dengan nasional dan Pulau Jawa. Hal ini dikarenakan dari segi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jakarta memiliki rerata tertinggi. Namun dari segi kesehatan dan keterampilan Jakarta bukan merupakan provinsi terbaik. Dari segi

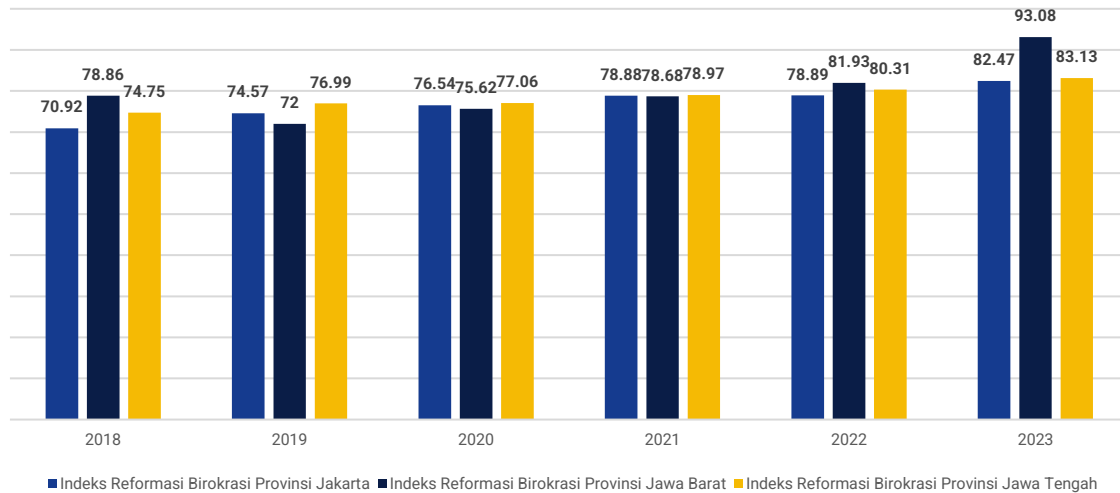
kesehatan masih belum melampaui Provinsi Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta, sementara di luar Pulau Jawa Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara memiliki capaian yang lebih baik dibandingkan Jakarta. Sejalan dengan capaian pilar kesehatan, capaian pilar keterampilan Jakarta juga bukan merupakan yang terbaik, dan masih tertinggal dibanding beberapa provinsi lain di luar Pulau Jawa. Karenanya Jakarta masih memiliki ruang-ruang perbaikan untuk memaksimalkan indeks daya saingnya.

Sementara pada komponen pasar, Jakarta terus mengalami perbaikan dari tahun 2021 hingga 2023, terutama pada pilar pasar tenaga kerja, sistem keuangan, dan ukuran pasar. Hal ini tidak mengherankan, karena Jakarta adalah pusat perekonomian nasional, dengan struktur PDRB berdasarkan pengeluaran didominasi oleh konsumsi, yang diikuti dengan tingkat pendapatan/PDRB per kapita yang tinggi membuat ukuran pasar sangat besar. Di lain sisi, Jakarta juga adalah kota menyediakan peluang kerja yang luas sehingga banyak talenta-talenta terbaik dari seluruh penjuru Indonesia, yang membuat pasar tenaga kerja juga semakin besar. Namun demikian, terdapat dua pilar yang menjadi catatan karena mengalami penurunan performa, yaitu dinamisme bisnis dan kapabilitas inovasi. Hal yang perlu diperhatikan pada pilar dinamisme bisnis adalah kinerja pelayanan publik, yang dapat sejalan dengan biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk memulai usaha (*ease of doing business*). Dari segi kapabilitas riset dan inovasi, aspek yang membuat capaian menurun adalah anggaran riset yang menurun. Padahal anggaran riset sejalan dengan performa riset dan inovasi, yang secara teori akan meningkatkan daya saing.

Dari aspek Indeks Daya Saing Daerah, Jakarta perlu berfokus pada aspek-aspek yang masih perlu ditingkatkan, seperti infrastruktur air bersih dan transportasi, pengembangan sumber daya manusia dan keterampilan, kemudahan berusaha, serta belanja riset yang optimal.

2.5. Aspek Pelayanan Umum

2.5.1 Indeks Reformasi Birokrasi

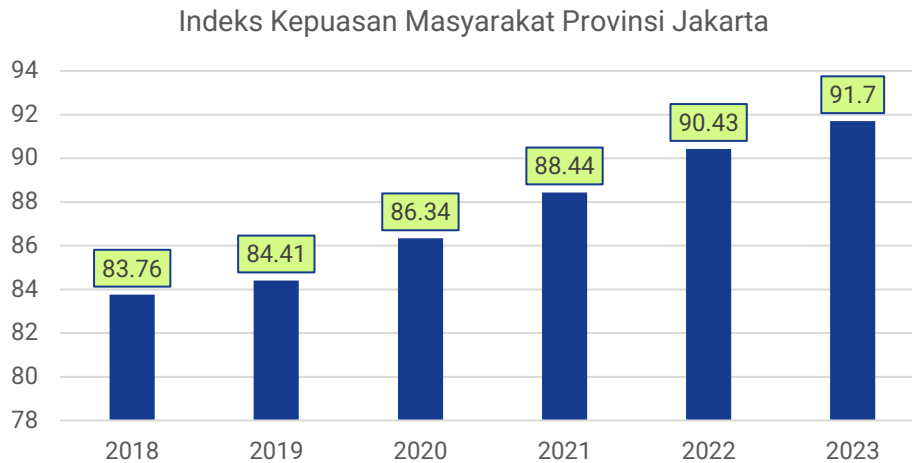


Gambar 2.82 Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2018 - 2023

Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, Evaluasi Reformasi Birokrasi adalah serangkaian aktivitas pengambilan informasi, analisis, dan pemberian nilai dengan tujuan untuk mengukur kemajuan capaian pelaksanaan reformasi birokrasi serta memberikan rekomendasi perbaikan yang berkelanjutan. Adapun 8 area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan yaitu a) Manajemen Perubahan, b) Penguatan pengawasan, c) Penguatan akuntabilitas, d) Penataan Organisasi, e) Penataan tatalaksana, f) Penataan manajemen SDM, g) Deregulasi Kebijakan, dan h) Peningkatan kualitas pelayanan publik. Penilaian IRB dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB dan dirancang untuk memberikan gambaran holistik tentang kemajuan dalam transformasi birokrasi di Jakarta. Dengan mengukur dan mengevaluasi berbagai aspek ini, pemerintah dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan mengukur dampak dari kebijakan reformasi yang diimplementasikan. Pada tahun 2023 Indeks Reformasi Birokrasi Jakarta berada pada angka 93 yang berarti upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi birokrasi di Jakarta tercapai dan terlaksana secara maksimal.

2.5.2 Kepuasan Masyarakat



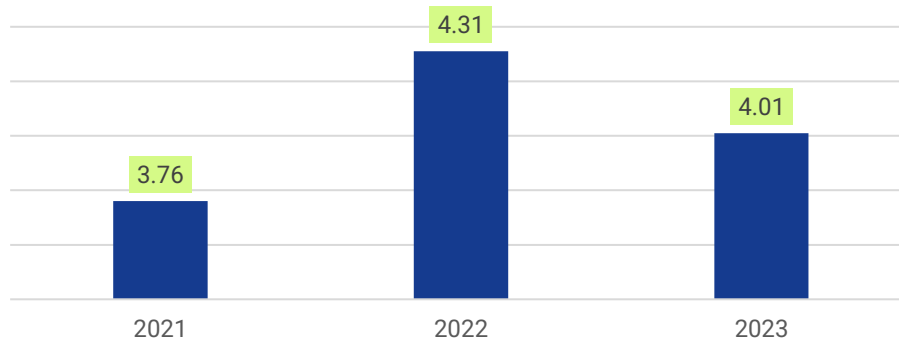
Gambar 2.83 Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2018 - 2023

Sumber: Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Provinsi DKI Jakarta, 2023

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menjadi salah satu tolak ukur bagi instansi pemerintah dalam melakukan evaluasi pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat agar tetap prima. Seluruh instansi pemerintah yang menyelenggarakan layanan publik kepada masyarakat menjadikan nilai IKM sebagai parameter untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik. Pengukuran yang berkesinambungan untuk mengetahui kinerja pelayanan dan untuk memperoleh aspek pelayanan mana yang dianggap perlu oleh masyarakat dan menjadi prioritas guna memperbaiki kualitas layanan. Sebagai upaya optimalisasi transparansi pelayanan publik, dalam mengukur tingkat capaian IKM Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang berbasis dan menggunakan aplikasi Jakarta Kini (JAKI).

2.5.3 Pelayanan Publik

Peningkatan pelayanan publik yang prima merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Pelayanan publik prima ditujukan untuk memberikan bentuk layanan yang mampu memberikan kepuasan bagi pelanggannya dengan biaya yang terjangkau serta meningkatkan motivasi pelanggan untuk berperan aktif dalam pelaksanaan pelayanan prima. Peningkatan pelayanan publik prima di Jakarta diarahkan untuk meningkatkan kualitas bentuk pelayanan publik yang dapat dijangkau seluruh masyarakat melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan perangkat birokrasi, penguasaan aspek teknis secara profesional, kemampuan manajerial dan kepemimpinan, peningkatan keterampilan dalam menghadapi perubahan dalam bisnis pelayanan dan penguasaan teknologi. Untuk itu peningkatan kapasitas sumber daya manusia merupakan aspek penting dalam peningkatan pelayanan publik prima.

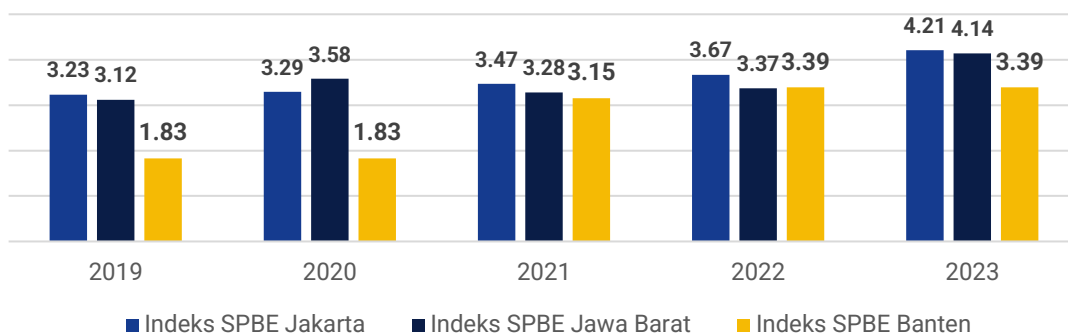


Gambar 2.84 Indeks Pelayanan Publik Tahun 2023

Sumber: Kemenpan RB, 2023

2.5.4 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Hasil pengukuran indeks ini diterbitkan ataupun melalui pendampingan oleh Kementerian PAN dan RB. Dalam rangka menerapkan transformasi digital dan perwujudan *good governance* serta pengelolaan reformasi birokrasi yang transparan, perlu dilakukan pengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terpadu dan efisien. Hasil capaian indeks SPBE Jakarta terus mengalami peningkatan, pada tahun 2019 dengan nilai sebesar 3,23 dan pada tahun 2023 dengan nilai sebesar 4,21. Hasil ini didapat melalui beberapa cara yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seperti melakukan evaluasi penerapan kebijakan teknologi informasi dan komunikasi yang telah ada; menetapkan arsitektur SPBE Jakarta; melakukan integrasi proses bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang jasa, akuntabilitas kinerja, pemantauan-evaluasi, kepegawaian dan kearsipan sesuai arsitektur SPBE; melaksanakan audit TIK; menyelenggarakan sistem jaringan intra pemerintah daerah; membentuk dan mengelola pusat data daerah; membangun sistem keamanan informasi daerah; meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan sertifikasi SPBE; serta melakukan inovasi terhadap proses bisnis SPBE.



Gambar 2.85 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2019 - 2023

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2023

2.5.5 Inovasi Daerah

Untuk mendukung perkembangan kota Jakarta, diperlukan inovasi dan kreativitas daerah dalam berbagai aspek dan skala. Aspek-aspek tersebut meliputi aspek pemerintahan, sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan. Sedangkan skala inovasi dan kreativitas daerah meliputi lokal, nasional, regional, dan global. Pengembangan inovasi dan kreativitas daerah harus didukung oleh kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata laksana berbasis ilmu pengetahuan dengan mengutamakan penelitian. Dalam pelaksanaannya diperlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan secara sinergis, efektif, efisien dan terpadu. Globalisasi di segala bidang menuntut setiap negara untuk berinovasi. Saat dunia bergerak dinamis dan cepat, ditambah dengan adanya globalisasi dan perubahan revolusi di bidang informasi teknologi, inovasi menjadi sebuah keharusan. Jakarta sejauh ini sudah dalam kategori cukup baik dalam menciptakan riset dan inovasi, pada tahun 2023 Jakarta berada pada kategori “sangat inovatif” pada penilaian indeks inovasi daerah. Namun Jakarta memiliki banyak inovasi yang perlu ditingkatkan dalam hal kematangan inovasi dengan mengoptimalkan variabel infrastruktur dan pengetahuan teknologi. Bentuk inovasi daerah terdiri dari inovasi tata kelola yang merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah, lalu berupa inovasi pelayanan publik yang meliputi proses pemberian layanan barang/jasa publik, serta inovasi bentuk lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah seperti inovasi dalam bidang urusan lingkungan hidup dan lain sebagainya.



Gambar 2.86 Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021 - 2023

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2023

2.6. Hasil Evaluasi RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2005 – 2025

2.6.1 Capaian Indikator Makro Pembangunan

Sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian nasional, Jakarta telah menjadi “wajah” Indonesia di mata dunia. Selama dua dekade terakhir Jakarta telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam berbagai aspek pembangunan. Jakarta memiliki visi jangka panjang yang tertuang dalam RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2005 – 2025, “Jakarta: Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Aman, Nyaman, Sejahtera, Produktif, Berkelanjutan, dan Berdaya Saing Global”. Visi tersebut menunjukkan Jakarta memiliki cita-cita besar untuk terus bertumbuh, berdaya saing global, dan dapat berdiri sejajar dengan kota-kota dunia lainnya, namun dengan tetap memprioritaskan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan warganya.

Pembangunan Jakarta bukan berarti telah sempurna, masih terdapat tantangan, baik internal maupun eksternal yang perlu dihadapi dan diselesaikan guna mencapai pembangunan yang optimal. Namun demikian hal tersebut tidak menghalangi Jakarta untuk terus berbenah diri dan berkembang. Berbagai kebijakan dan strategi telah dilaksanakan untuk mewujudkan pembangunan daerah, melalui intervensi infrastruktur fisik maupun non-fisik. Berdasarkan hasil evaluasi Capaian beberapa indikator makro pembangunan diharapkan dapat menggambarkan secara umum capaian pembangunan Jakarta hasil dari berbagai intervensi yang komprehensif dan kompleks. Adapun hasil capaian pembangunan ini bukan merupakan akhir, tapi sebagai acuan dasar untuk menjadi lebih baik lagi di masa depan, terutama dalam menghadapi dinamika dan *megatrend* global yang semakin cepat dan tidak menentu. Capaian masing-masing indikator pembangunan serta tantangan dan rekomendasi kebijakannya dijabarkan lebih lanjut pada tabel berikut.

Tabel 2.15 Hasil Evaluasi RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2005-2025

No	Indikator Makro	Capaian Awal Periode Perencanaan (2007)	Capaian Tahun Berjalan (2022)	Pembelajaran Capaian Pembangunan	Tantangan ke Depan	Rekomendasi Kebijakan
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,42 persen (data 2010)	0,66 persen	Sejak tahun 2012 hingga tahun 2022 laju pertumbuhan penduduk Jakarta terus menurun; Rasio ketergantungan Jakarta meningkat dari 37,36 persen pada tahun 2010 dan meningkat menjadi 40,18 persen pada tahun 2022	Inovasi di bidang kesehatan secara global serta peningkatan pelayanan kesehatan akan terus meningkatkan usia harapan hidup penduduk Jakarta; Kecenderungan penduduk negara/kota dengan tingkat ekonomi tinggi yang enggan memiliki keturunan akibat tingginya biaya hidup contoh: Jepang /Tokyo, Perancis /Paris; dan Dengan potensi peningkatan usia harapan hidup dan penurunan angka kelahiran di Jakarta memungkinkan percepatan penuaan penduduk di Jakarta lebih cepat dari tahun tahun sebelumnya	Menyusun kebijakan dan strategi agar penduduk memiliki tabungan di hari tua; Menyusun kebijakan ketenagakerjaan yang ramah bagi penduduk usia lanjut, seperti memperpanjang masa pensiun
2	Pertumbuhan Ekonomi	6,90 persen	5,30 persen	Sejak tahun 2007 hingga tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Jakarta terus meningkat, kecuali pada tahun 2022 yang mengalami penurunan karena Pandemi Covid 19; Sumber pertumbuhan ekonomi Jakarta berasal dari sektor jasa, perdagangan, hotel dan restoran, informasi dan komunikasi, serta industri pengolahan; dan PDRB per kapita mengalami trend meningkat dari tahun 2007 sampai tahun 2022.	Rencana pemindahan IKN yang diarahkan menjadi pusat perekonomian baru di Indonesia, sehingga pusat perekonomian tidak hanya ada di Jakarta; Ketidakstabilan ekonomi global yang fluktuatif, seperti kemungkinan terjadinya resesi	Melakukan kajian dan penyusunan kebijakan terkait sumber pendapatan utama yang dapat menopang dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jakarta secara optimal seiring dengan arah pembangunan Jakarta menuju kota global untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar pembuatan kebijakan; Melakukan inovasi dan pengembangan sektor jasa yang memiliki high value added sehingga sektor jasa yang ada di Jakarta dapat bersaing secara global; dan Penyusunan kebijakan terkait stabilitas dan ketahanan ekonomi Jakarta, untuk mitigasi terjadinya krisis secara tiba tiba atau terjadinya pendapatan yang lebih rendah dibandingkan belanja

No	Indikator Makro	Capaian Awal Periode Perencanaan (2007)	Capaian Tahun Berjalan (2022)	Pembelajaran Capaian Pembangunan	Tantangan ke Depan	Rekomendasi Kebijakan
3	Indeks Manusia Pembangunan	76,59	81,65	Dimensi pendidikan dan kesehatan pada IPM cenderung meningkat namun terdapat kesenjangan nilai IPM antara masyarakat Kepulauan Seribu dengan lima kota administrasi Jakarta (IPM Kabupaten Kepulauan Seribu 72,79 sedangkan rata-rata IPM Jakarta 81,65)	Kondisi gejalak ekonomi yang terus berlanjut perlu di perhatikan dalam rangka menjaga angka pencapaian IPM; Peningkatan Angka Harapan Hidup masyarakat Indonesia menuntut adanya jaminan perlindungan sosial; Kesenjangan spasial antara Kabupaten Kepulauan Seribu dan lima kota administrasi Jakarta, di sektor kesehatan, pendidikan dan tingkat pengeluaran yang menjadi dimensi pokok pembentuk IPM; dan Potensi perkembangan teknologi digital untuk meningkatkan pelayanan masyarakat	Menyiapkan fasilitas serta layanan dasar kota yang berketahanan dan merata di seluruh wilayah Jakarta, termasuk Kepulauan Seribu; Peningkatan infrastruktur digital untuk mengoptimalkan pelayanan masyarakat; Mengubah paradigma dari Keluarga Berencana menjadi Keluarga Berkualitas; dan Menyiapkan dana cadangan darurat sebagai upaya mitigasi potensi krisis ekonomi untuk menjaga tingkat pengeluaran masyarakat
4	Angka Pengangguran	12,57 persen	7,18 persen	Sejak tahun 2007 TPT Jakarta terus mengalami penurunan, sempat kembali naik karena pandemi Covid 19 pada 2020, namun kembali membaik pada tahun 2021 dan 2022. Saat ini TPT Jakarta di angka 7,18 persen capaian terbaik pada 2019 sebesar 5,13 persen); Lulusan SLTA Umum dan Kejuruan menjadi penyumbang TPT tertinggi dalam kurun 15 tahun	Dengan tujuan Jakarta sebagai kota global akan menipiskan hambatan administrasi antarnegara, sehingga persaingan dengan tenaga kerja asing akan semakin tinggi; Sebagai bagian dari kota global, tren perkembangan ekonomi Jakarta mengarah kepada sektor perdagangan, jasa keuangan, serta komunikasi dan informasi; dan Dengan pesatnya perkembangan teknologi, terutama pada otomatisasi akan mengurangi kebutuhan tenaga kerja kasar, karenanya perlu dipersiapkan sumber daya manusia yang keahliannya tidak dapat digantikan oleh teknologi.	Melakukan <i>profiling</i> angkatan kerja sebagai landasan penentuan kebijakan pendidikan, ketenagakerjaan, dan arah pengembangan ekonomi; Menyiapkan pelatihan pengembangan kapasitas tenaga kerja, terutama bagi lulusan SLTA Umum Kejuruan, yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja Jakarta; dan Menyusun kebijakan ketenagakerjaan yang inklusif (pro penduduk lokal), sehingga memudahkan masyarakat, terutama penduduk Jakarta, untuk mendapat pekerjaan

No	Indikator Makro	Capaian Awal Periode Perencanaan (2007)	Capaian Tahun Berjalan (2022)	Pembelajaran Capaian Pembangunan	Tantangan ke Depan	Rekomendasi Kebijakan
5	Angka Kemiskinan	3,61 persen	4,69 persen	Pandemi Covid-19 menjadi salah satu faktor penyebab kenaikan jumlah penduduk miskin di Ibu Kota, namun demikian jumlah kemiskinan di Jakarta merupakan yang terendah jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia, serta jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan persentase jumlah penduduk miskin nasional sebesar 10 19 persen pada tahun 2020	Rumah tangga miskin di Jakarta masuk ke dalam perangkap demografi, sehingga akan sulit untuk keluar dari rantai kemiskinan; Keberhasilan program pengentasan kemiskinan bergantung pada ketepatan dalam pemberian bantuan sosial	Menyiapkan data terpadu yang berbasis sistem informasi, lewat data terpadu yang dapat diakses akan bermanfaat untuk memetakan wilayah maupun data warga yang masuk dalam kategori warga miskin, sehingga penyaluran fasilitas bantuan akan lebih tepat sasaran; Meningkatkan tingkat pendidikan, keahlian, dan penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat miskin
6	Ketimpangan Pendapatan	0,32	0,42	Sejak tahun 2007 rasio gini Jakarta terus meningkat dari 0,32 menjadi 0,41 pada tahun 2022	Ketimpangan terjadi akibat adanya masyarakat yang tidak dapat mengakses pendapatan layak karena keterbatasan kapasitas yang melekatinya; Tren ekonomi Jakarta mengarah kepada sektor perdagangan dan jasa yang membutuhkan keahlian; dan Perlu nya mempersiapkan penduduk marginal untuk dapat mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi Jakarta seluas luasnya	Mempersiapkan kualitas hidup penduduk sejak dini salah satunya dengan penurunan tengkes (<i>stunting</i>); Menurunkan angka kemiskinan melalui stabilisasi harga pangan serta bantuan sosial tepat sasaran; Menyusun kebijakan ketenagakerjaan yang inklusif (pro penduduk lokal), sehingga memudahkan masyarakat, untuk mendapat pekerjaan; dan Menyusun kebijakan ekonomi inklusif yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat

Sumber: Evaluasi RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2005 – 2025

2.6.2 Rekomendasi Kebijakan Pembangunan

Dalam waktu 15 tahun terakhir, capaian indikator makro pembangunan Jakarta cenderung mengalami performa yang baik, terutama di bidang pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan PDRB per-kapita, indeks pembangunan manusia, dan tingkat pengangguran terbuka. Pada tahun 2020 terjadi *outliers* pandemi Covid-19 yang menyebabkan performa indikator makro mengalami hambatan, namun pada tahun 2021 dan 2022 performanya mulai kembali membaik. Meski demikian masih terdapat indikator yang perlu menjadi perhatian ke depan, terutama indikator yang berhubungan dengan pemerataan, yaitu tingkat kemiskinan dan Rasio Gini. Hal ini perlu menjadi perhatian, sehingga di masa depan pembangunan Jakarta tidak hanya tumbuh, namun juga merata dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Terkait keberhasilan capaian RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2005 – 2025 didorong oleh banyak faktor, namun secara dominan faktor pendorong keberhasilan capaian pembangunan adalah (1) baiknya koordinasi dan kerja sama antar-pemangku kepentingan; (2) kuatnya kebijakan dan regulasi yang telah disusun; (3) tingginya komitmen pemerintah daerah; (4) didapatkannya dukungan pendanaan alternatif; (5) baiknya sistem pendataan daerah; serta (6) optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai proses pembangunan. Meskipun telah mencapai capaian yang sangat tinggi, namun terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti adanya (1) Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan banyaknya kegiatan yang tidak berjalan sesuai dengan rencana, (2) kendala teknis dan administrasi dalam proses pelaksanaan kegiatan, terutama pembangunan infrastruktur, serta (3) faktor eksternal yang tidak terprediksi sehingga mempengaruhi kondisi Jakarta.

Jakarta juga memiliki tantangan yang dihadapi, yaitu tingginya arus urbanisasi, yang menyebabkan pembangunan infrastruktur dan pengadaan pelayanan umum ke depannya perlu mengimbangi pertumbuhan penduduk Jakarta, sehingga pembangunannya dapat melayani seluruh masyarakat secara keseluruhan. Selain itu tantangan lain yang perlu menjadi perhatian adalah, Perlunya Jakarta untuk memiliki *high value added* dan daya saing yang tinggi, mengingat saat ini Jakarta sudah menjadi bagian dari kota global.

Pelaksanaan pembangunan jangka panjang Jakarta telah memasuki periode keempat dari lima periode, dan akan segera berakhir pada tahun 2025. Dari hasil evaluasi yang dilaksanakan, sampai tahun 2022 pembangunan Jakarta telah berhasil mewujudkan berbagai capaian guna mewujudkan visi RPJPD “Jakarta: Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Aman, Nyaman, Sejahtera, Produktif, Berkelanjutan, dan Berdaya Saing Global” dengan berbagai kendala dan tantangannya.

Terdapat beberapa hal yang dapat menjadi masukan untuk penyusunan dokumen perencanaan jangka panjang Jakarta periode berikutnya agar pembangunan Jakarta semakin baik, semakin maju, berdaya saing, dan berkelanjutan. Adapun rekomendasi yang

dapat diusulkan dari hasil pelaksanaan evaluasi RPJPD 2005 – 2025 adalah sebagai berikut:

1. Indikator pembangunan Jakarta ke depan dapat mengacu kepada indikator-indikator kota global karena sejalan dengan cita-cita Jakarta untuk bersaing dengan kota-kota global lainnya;
2. Indikator – indikator yang ditetapkan pada dokumen RPJPD 2025 – 2045 perlu menggunakan indikator kuantitatif, sehingga dapat dilakukan penilaian yang terukur sesuai dengan amanat Permendagri 86 Tahun 2017;
3. Dalam penyusunan RPJPD 2025 – 2045 perlu untuk merumuskan misi dan indikator yang berkesinambungan yang dituangkan pada setiap tahapan RPJMD, sehingga ke depan capaian pembangunan dapat dihitung secara berkelanjutan dari awal hingga akhir tahun perencanaan RPJPD.

2.7. Tren Demografi dan Kebutuhan Prasarana dan Sarana Pelayanan Publik

2.7.1 Tren Demografi

Dalam mendukung Indonesia Emas 2045, angka ketergantungan serta bonus demografi akan menjadi dasar perencanaan yang fundamental dalam perencanaan pembangunan selama 20 tahun ke depan.

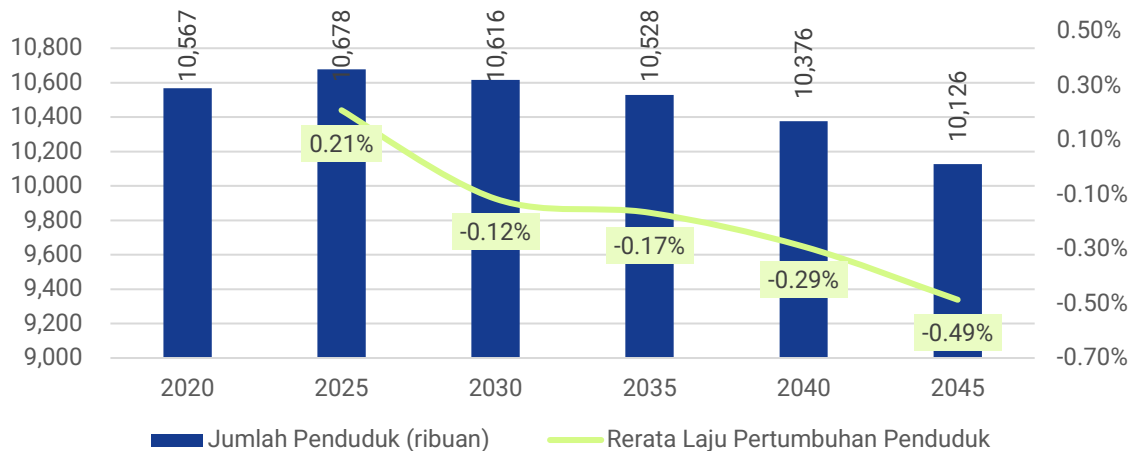
A. Proyeksi Penduduk dan Kepadatan Penduduk

Proyeksi demografi mencakup beberapa indikator kunci seperti jumlah penduduk, distribusi usia, tingkat kelahiran, tingkat kematian, migrasi, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi komposisi demografi.

Proyeksi demografi memiliki peran krusial dalam perencanaan wilayah suatu daerah, termasuk Jakarta. Proyeksi demografi memberikan landasan informasi yang diperlukan untuk merumuskan kebijakan publik, terutama yang berkaitan dengan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, transportasi, dan sarana prasarana lainnya.

Berdasarkan perhitungan proyeksi penduduk yang dilakukan BPS, jumlah penduduk Jakarta mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2025. Namun, laju pertumbuhan penduduk Jakarta mengalami perlambatan sejak tahun 2025 sehingga jumlah penduduk terus menurun hingga tahun 2045. Rata-rata perlambatan paling signifikan terjadi antara tahun 2040 dan 2045 yaitu sebesar minus 0,29 persen dan minus 0,49 persen. Bila dibandingkan secara keseluruhan, selisih jumlah penduduk pada tahun 2020 dan tahun 2045 sebesar minus 441.000 jiwa penduduk.

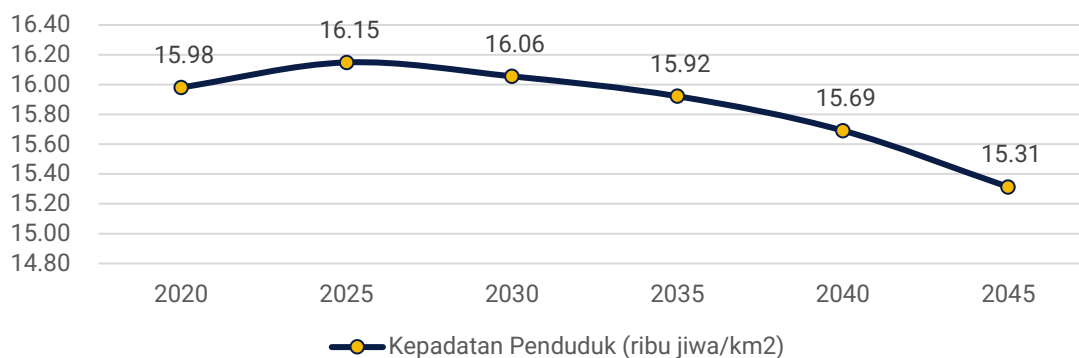
RPJPD JAKARTA 2025-2045



Gambar 2.87 Proyeksi Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Jakarta Tahun 2020 - 2045

Sumber: BPS, 2023

Seiring dengan penurunan jumlah penduduk di Jakarta, tingkat kepadatan di Jakarta secara keseluruhan pun mengalami penurunan. Namun penurunan ini tidak signifikan karena kepadatan penduduk hanya turun dari 15,980 jiwa/km² pada tahun 2020 menjadi 15,310 jiwa/km² pada tahun 2045. Jakarta merupakan provinsi terpadat di Indonesia, dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup jauh dibanding dengan provinsi lainnya. Kepadatan penduduk ini merupakan potensi sekaligus tantangan yang jika dikelola dengan baik dapat menopang pembangunan wilayah dari sumber daya manusianya.



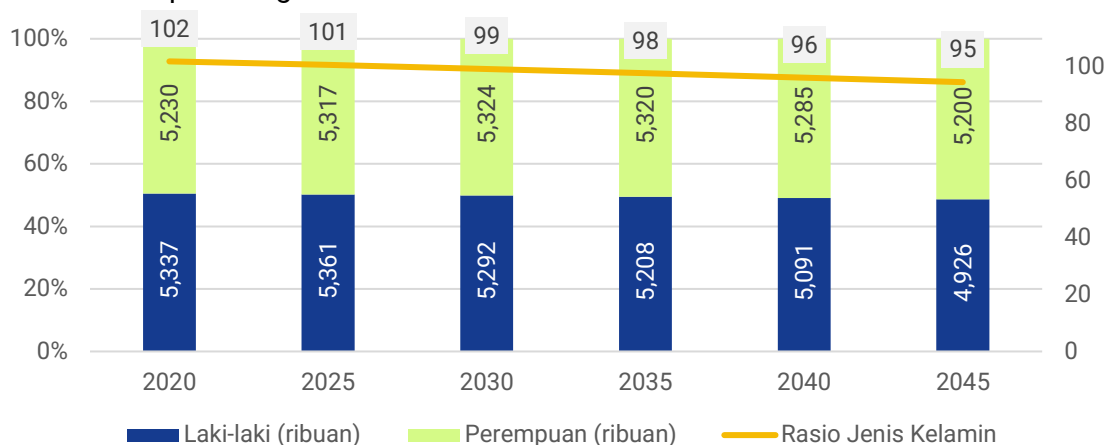
Gambar 2.88 Proyeksi Kepadatan Penduduk Jakarta Tahun 2020 - 2045

Sumber: BPS, 2023

B. Proyeksi Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

Pada tahun 2020, Rasio Jenis Kelamin penduduk Jakarta sebesar 102 dan terus mengalami penurunan menjadi 95. Rasio ini berarti bahwa jumlah penduduk laki-laki terus menurun dan jumlah penduduk perempuan terus meningkat. Jumlah penduduk perempuan akan melebihi jumlah penduduk laki-laki pada tahun 2030 dan seterusnya. Hal

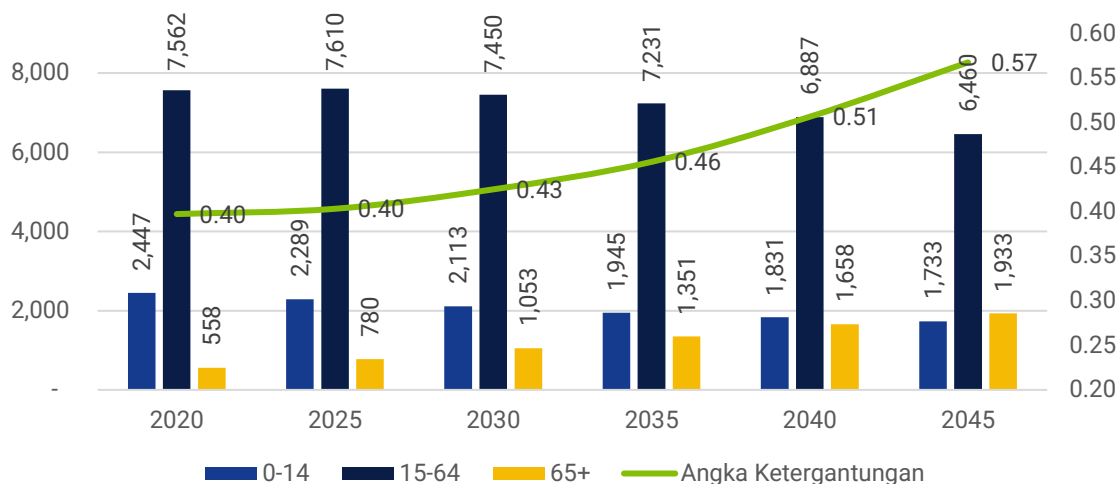
ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender semakin mendapat tempat dalam perencanaan pembangunan di Jakarta.



Gambar 2.89 Proyeksi Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin Jakarta Tahun 2020 - 2045

Sumber: BPS, 2023

C. Proyeksi Penduduk berdasarkan Kelompok Umur



Gambar 2.90 Proyeksi Penduduk berdasarkan Kelompok Umur Jakarta Tahun 2020 - 2045

Sumber: BPS, 2023

Berdasarkan proyeksi penduduk secara keseluruhan, jumlah penduduk Jakarta mulai menurun sejak periode 2025 hingga 2030, dan tren tersebut terus terjadi dan penurunan semakin besar hingga 2045. Hal ini dikarenakan migrasi dan kelahiran yang semakin menurun. Fenomena tersebut menyebabkan terjadi pergeseran struktur penduduk usia produktif dan nonproduktif.

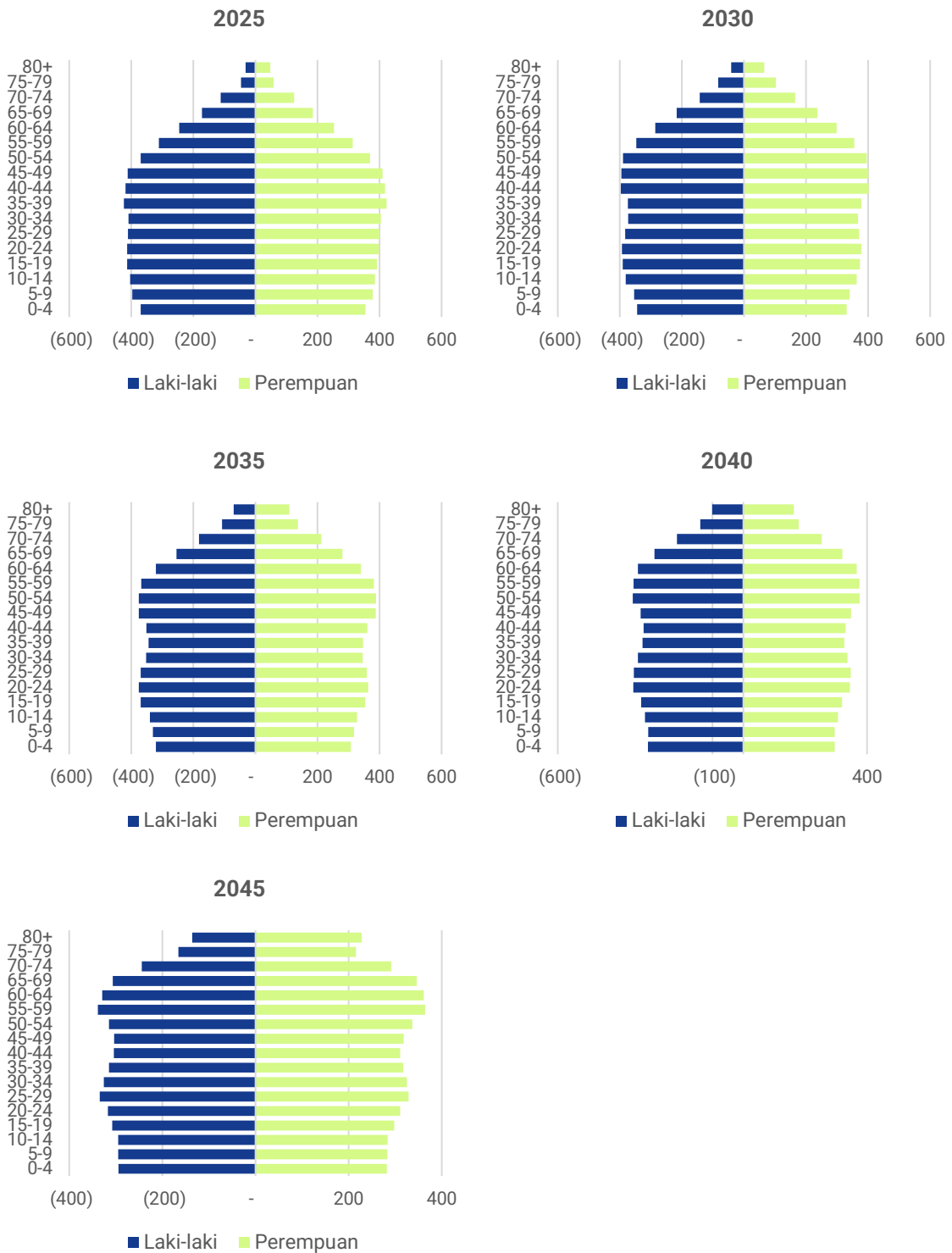
Jumlah penduduk kelompok umur 0 - 14 tahun terus menurun dari 2,4 juta penduduk pada tahun 2020 menjadi 1,7 juta pada tahun 2045. Sementara penurunan tersebut memengaruhi jumlah penduduk usia produktif yang juga semakin menurun, dari 7,5 juta penduduk pada tahun 2020 menjadi 6,4 juta pada akhir tahun 2045. Namun untuk penduduk usia lanjut jumlahnya cenderung meningkat. Hal ini adalah konsekuensi dari perbaikan pelayanan kesehatan di Jakarta yang mengakibatkan peningkatan angka harapan hidup. Jumlah penduduk kelompok usia lanjut di Jakarta meningkat pesat, dari 558 ribu penduduk pada tahun 2020 menjadi 1,9 juta pada akhir 2045, atau meningkat hampir empat kali lipat selama 20 tahun.

Dengan proyeksi pergeseran struktur penduduk yang demikian, Jakarta perlu mempersiapkan diri, terutama dalam kebijakan pendidikan, yang karena jumlah penduduk usia sekolah akan menurun, maka fokus pada kualitas pelayanan pendidikan wajib untuk dilaksanakan. Sementara meskipun proporsi penduduk produktif (15 - 64 tahun) masih lebih tinggi dibanding usia non produktif, namun proporsinya terus menurun. Hal ini berarti Jakarta perlu memaksimalkan "jendela" bonus demografi dengan optimal melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kapasitas tenaga kerja, serta pengembangan sektor ekonomi yang produktif. Sementara sektor kesehatan, kebijakan tenaga kerja ramah penduduk usia lanjut, serta sarana prasarana pendukungnya juga semakin menjadi hal yang krusial, mengingat proporsi penduduk usia lanjut di Jakarta akan terus meningkat hingga tahun 2045.

D. Proyeksi Struktur Penduduk

Sesuai proyeksi penduduk yang telah dilakukan, maka akan terlihat perkembangan struktur kependudukan Jakarta pada tahun 2020 hingga tahun 2045. Pada tahun 2020, terlihat bahwa tingkat kelahiran masih lebih tinggi dibandingkan tingkat kematian sehingga sebagian besar masuk dalam kelompok umur muda dan pertumbuhan penduduk masih tinggi. Namun perubahan penurunan tingkat kelahiran dan penambahan jumlah penduduk usia tua sejak tahun 2035 mulai terlihat. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia tua dan muda mulai seimbang yang juga menunjukkan tingkat ketergantungan yang tinggi. Pada tahun 2045, piramida penduduk Jakarta sudah berbentuk stasioner yang berarti bahwa pertumbuhan penduduk mengalami penurunan dengan tingkat kelahiran rendah.

RPJPD JAKARTA 2025-2045



Gambar 2.91 Proyeksi Struktur Penduduk Jakarta Tahun 2025 – 2045

Sumber: BPS, 2023

E. Faktor yang Memengaruhi Perubahan Jumlah Penduduk

Terdapat tiga faktor utama yang memengaruhi perubahan jumlah penduduk pada suatu daerah yaitu kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), dan perpindahan (migrasi) penduduk. Fertilitas dan mortalitas bersifat kontradiktif karena fertilitas menambah jumlah penduduk sedangkan mortalitas mengurangi jumlah penduduk. Migrasi dapat menambah atau mengurangi penduduk bergantung pada selisih jumlah migrasi masuk dan keluar ke dan dari daerah tersebut.

Jumlah kelahiran penduduk Jakarta mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2045, jumlah kelahiran diprediksi sebesar 115.060 kelahiran. Walaupun angka Tingkat Kelahiran Total (TFR) tidak berubah secara signifikan tetapi penurunan Tingkat Kelahiran Kasar (CBR) turut memengaruhi jumlah kelahiran setiap tahunnya. Hal ini dapat disebabkan oleh perubahan dalam struktur usia kelahiran atau ketidakseimbangan dalam tingkat kelahiran di antara kelompok usia tertentu. Selain itu, peran migrasi keluar juga turut memengaruhi penurunan CBR.

Sementara itu, jumlah kematian penduduk Jakarta terus mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga pada tahun 2045 terdapat 107.260 kematian. Namun, Umur Harapan Hidup pada Kelahiran (E_0) penduduk Jakarta serta Angka Kematian Bayi (IMR) diperkirakan akan terus meningkat setiap tahun yang menandakan bahwa tingkat kesehatan penduduk serta kesehatan ibu dan bayi secara umum akan membaik. Peningkatan E_0 dan IMR juga memberikan indikasi bahwa ada potensi peningkatan produktivitas serta peningkatan kualitas dan harapan hidup.

Tingkat Migrasi Bersih (NMR) penduduk Jakarta terus menurun yang menandakan bahwa migrasi keluar dari Jakarta akan lebih besar dari migrasi masuk ke Jakarta. Tingkat migrasi keluar paling tinggi terjadi pada tahun 2025 dan seterusnya akan melambat hingga pada tahun 2045 sebesar -6,76. Tren ini didukung oleh data migrasi Susenas dalam kurun waktu 2013-2021 yang menerangkan bahwa daerah penyangga menjadi tujuan baru para pendatang akibat daya tarik baru seperti pembangunan, ekonomi, dan pendidikan.

Tabel 2.16 Faktor yang Memengaruhi Perubahan Jumlah Penduduk Jakarta

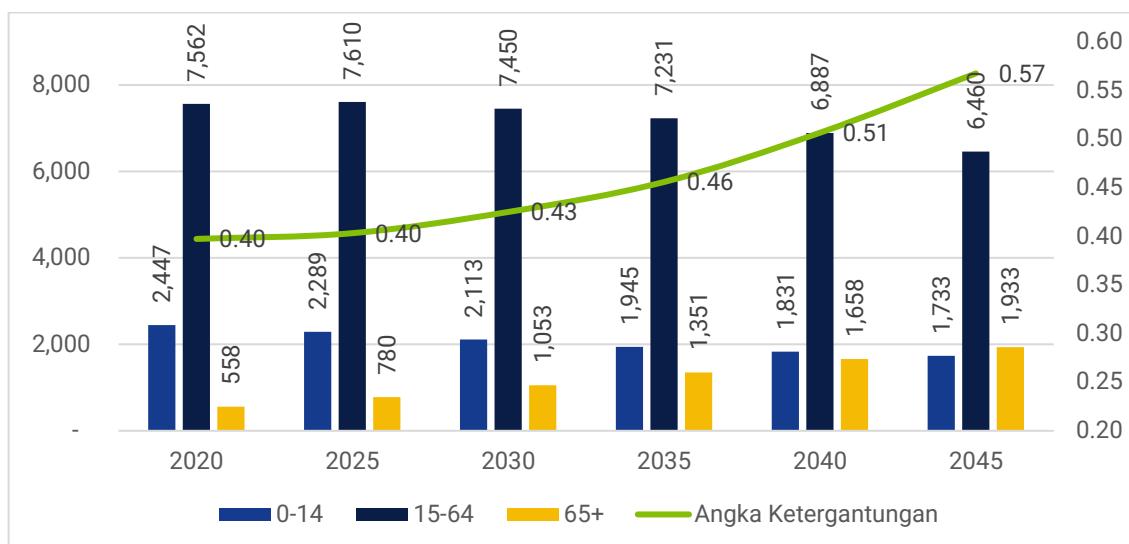
Parameter	2025	2030	2035	2040	2045
Laki-laki (ribuan)	5.360,83	5.292,27	5.207,80	5.090,57	4.926,36
Perempuan (ribuan)	5.317,15	5.324,05	5.320,26	5.285,13	5.199,54
Total (ribuan)	10.677,98	10.616,32	10.528,06	10.375,70	10.125,90
Komposisi Umur (%)					
0-14	21,44	19,91	18,48	17,65	17,11
15-64	71,26	70,17	68,69	66,38	63,79
65+	7,30	9,92	12,84	15,97	19,09
Rasio Ketergantungan (%)	40,32	42,50	45,59	50,65	56,76
Tingkat Kelahiran Total (TFR)	1,79	1,77	1,79	1,80	1,79
Tingkat Kelahiran Kasar (CBR)	13,65	12,49	12,02	11,73	11,36

Parameter	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Kelahiran (ribuan)	145,74	132,65	126,59	121,69	115,06
E ₀ Laki-Laki	73,08	73,38	74,01	74,59	74,89
E ₀ Perempuan	78,71	79,30	80,08	80,73	81,09
E ₀ Laki-Laki + Perempuan	75,83	76,26	76,97	77,58	77,91
Angka Kematian Bayi (IMR) Laki-Laki	10,33	9,22	7,56	6,91	6,55
Angka Kematian Bayi (IMR) Perempuan	7,71	7,00	5,92	5,42	5,15
Angka Kematian Bayi (IMR) Laki-Laki + Perempuan	9,05	8,14	6,76	6,18	5,87
Angka Kematian Kasar (CDR)	5,23	6,38	7,58	8,96	10,59
Jumlah Kematian (ribuan)	55,84	67,68	79,79	92,92	107,26
Tingkat Migrasi Bersih (NMR)	-9,09	-7,69	-6,46	-6,63	-6,76

Sumber: BPS, 2023

F. Rasio Ketergantungan Penduduk

Dalam kurun 20 tahun diproyeksikan rasio ketergantungan Jakarta akan terus meningkat. Peningkatan tertinggi terjadi dalam kurun 2040 hingga 2045, dengan peningkatan sebesar 0,06. Hal ini berarti pada tahun 2020, setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 40 penduduk usia produktif, sementara pada tahun 2045, setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 57 penduduk usia nonproduktif. Terdapat beberapa penyebab meningkatnya rasio ketergantungan di Jakarta hingga 2045, yang dapat dilihat dari berbagai perspektif.



Gambar 2.92 Rasio Ketergantungan Jakarta Tahun 2020 - 2045

Sumber: BPS, 2023

Dari perspektif kelahiran dan regenerasi penduduk usia produktif, jumlah penduduk Jakarta yang terus menurun akibat tidak lagi menjadi tujuan migrasi utama memengaruhi angka kelahiran yang terus menurun meskipun nilai TFR konsisten di angka 1,75 - 1,8, karena meskipun TFR konsisten namun jumlah penduduk sebagai pembentuk dasar

angka kelahiran berdasarkan TFR menurun. Selain itu angka TFR juga di bawah dua, yang berarti tidak seluruh pasangan ayah dan ibu melahirkan dua anak sebagai penerusnya. Hal ini menyebabkan regenerasi penduduk usia produktif yang terhambat. Sementara dilihat dari perspektif usia non produktif kelompok umur lanjut usia (65+) menunjukkan penambahan jumlah populasi akibat banyaknya penduduk usia produktif di masa lampau yang menginjak usia non-produktif. Hal ini dikarenakan angka harapan hidup Jakarta terus membaik setiap tahunnya akibat meningkatnya kualitas dan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan serta peningkatan kesejahteraan hidup.

G. Bonus Demografi

Bonus demografi adalah kondisi suatu negara atau wilayah yang memiliki potensi pertumbuhan ekonomi akibat struktur penduduk usia produktif (15 - 64 tahun) lebih besar dibanding penduduk usia non produktif. Saat ini Indonesia dan Jakarta sedang menikmati bonus demografinya dan menjadi "jendela" yang dapat secara positif memengaruhi pembangunan serta mencapai target Indonesia Emas 2045. Namun demikian apabila bonus demografi tidak dimanfaatkan akan menjadi perlambatan pembangunan karena terjadi penumpukan penduduk usia produktif yang tidak berdaya saing. Karenanya untuk dapat memanfaatkan bonus demografi ke depan juga perlu mempertimbangkan mega tren global, seperti tren kependudukan, teknologi, serta geopolitik dan geoekonomi.

Dari tahun 2020 – 2045, Jakarta sedang menikmati bonus demografinya, meskipun proporsi penduduk usia produktif terus menurun. Karenanya dalam 20 tahun ke depan, jendela ini perlu dimaksimalkan agar Jakarta dapat mendukung Indonesia Emas 2045 serta secara persaingan global dapat berdiri sejajar dengan kota-kota maju di negara lainnya. Beberapa hal yang perlu difokuskan dalam memaksimalkan bonus demografi yang utama adalah meningkatkan kualitas penduduk, yaitu dengan menguatkan struktur pelayanan kesehatan dan pendidikan agar tercipta sumber daya manusia yang berkualitas. Selain itu di sektor ketenagakerjaan, perlu menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif serta mengikuti peningkatan keahlian yang sesuai dengan tren global. Dari sisi ekonomi Jakarta perlu menyesuaikan tren ekonomi global, terutama berbasis teknologi, agar produktivitas dapat diciptakan dan melakukan akselerasi pembangunan, terutama ekonomi, untuk bersaing dengan kota-kota global lainnya.

2.7.2 Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana

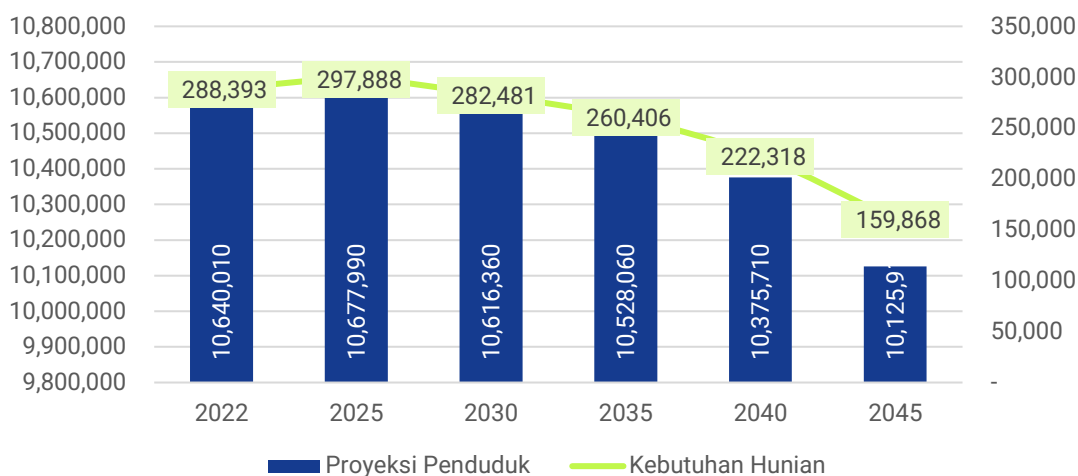
Seiring dengan perubahan jumlah dan struktur penduduk, kebutuhan akan sarana dan prasarana pelayanan publik perlu menyesuaikan dengan kebutuhan penduduk di masa datang serta tantangan yang dihadapi Jakarta, baik dalam konteks global, nasional, regional, maupun kota. Pembangunan sarana dan prasarana Jakarta mendatang perlu memperhatikan prinsip produktivitas, berkeadilan, serta berkelanjutan. Pada bagian ini akan menjabarkan kebutuhan sarana dan prasarana Jakarta mempertimbangkan proyeksi penduduk 2020 – 2050. Adapun sarana dan prasarana yang dimaksud

melingkupi, perumahan/hunian, air bersih, listrik, persampahan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas pendidikan.

A. Proyeksi Kebutuhan Hunian

Dalam mengidentifikasi kebutuhan hunian dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu sesuai kebutuhan yang dapat dilihat dari demografi yang berkaitan dengan jumlah penduduk dan asumsi keluarga yang menghuni rumah, sementara dari sisi penyediaan dapat dilihat dari data *backlog* hunian yang dapat menjadi dasar kebutuhan rumah saat ini untuk selanjutnya disesuaikan dengan perkembangan penduduk di masa depan.

Kebutuhan akan rumah di kawasan perkotaan yang tinggi perlu diimbangi dengan penyediaan unit hunian yang layak. Selisih antara jumlah kebutuhan akan rumah dengan jumlah unit hunian yang tersedia disebut dengan *backlog*, dengan asumsi konsep perhitungan ideal yaitu satu unit rumah dihuni oleh satu KK beranggotakan empat orang. Upaya Pemerintah Provinsi Jakarta dalam penyediaan unit hunian layak hingga tahun 2022 adalah dengan membangun dan mengelola 32 ribu unit rusunawa. Dengan demikian proyeksi kebutuhan hunian Jakarta hingga tahun 2045 jika tidak dilakukan intervensi pembangunan perumahan adalah sebagai berikut.



Gambar 2.93 Proyeksi Kebutuhan Hunian Jakarta Tahun 2020 - 2045

Dilihat dari grafik, dengan asumsi tidak ada penyediaan perumahan, kebutuhan akan hunian di Jakarta diproyeksikan akan terus menurun seiring dengan penurunan jumlah penduduk, yaitu sebesar 159.858 di tahun 2045. Melihat kekhususan kondisi Jakarta, perhitungan kebutuhan hunian dapat mempertimbangkan kepadatan, kecukupan luas tempat tinggal, kepemilikan serta faktor-faktor lainnya yang sesuai dengan standar rumah layak huni Indonesia.

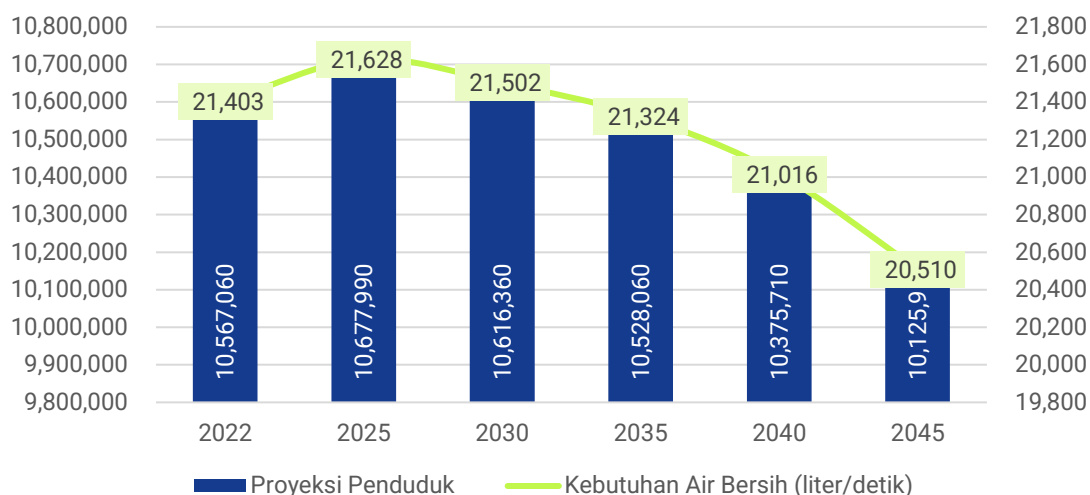
Meskipun diproyeksikan kebutuhan rumah terus berkurang seiring dengan berkurangnya jumlah penduduk, namun kebutuhan akan rumah masih menjadi isu perkotaan di Jakarta. Keterbatasan lahan menjadi permasalahan utama dalam penyediaan hunian yang tidak

hanya tersedia namun juga layak huni. Dengan keterbatasan lahan dan kebutuhan akan perumahan, arah penyediaan hunian Jakarta ke depan perlu untuk berorientasi pada penyediaan hunian vertikal untuk memaksimalkan ketersediaan lahan yang ada. Skema-skema pendanaan kreatif juga perlu dimaksimalkan guna melakukan akselerasi penyediaan hunian layak.

B. Proyeksi Kebutuhan Air Bersih

Kebutuhan air domestik ditentukan oleh jumlah penduduk dan konsumsi air per kapita sedangkan kebutuhan air non domestik merupakan air yang digunakan di luar kegiatan rumah tangga dan permukiman seperti untuk keperluan industri, pariwisata, tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, dan layanan umum lainnya. Dalam proyeksi ini, hanya kebutuhan air bersih domestik yang akan dilakukan penghitungan proyeksi kebutuhan.

Berdasarkan SNI 6728.1-2015 tentang Penyusunan Neraca Spasial Sumber Daya Alam, kebutuhan air domestik per kapita untuk ukuran kota metropolitan dengan penduduk lebih dari 1.000.000 jiwa adalah 150-200 liter/detik. Namun demikian dalam proyeksi penghitungan kebutuhan air domestik per kapita digunakan nilai tengah dari standar tersebut yaitu 150 liter/detik sebagaimana amanat Peraturan Gubernur Nomor 122 tahun 2005 tentang Pengelolaan Limbah Domestik di DKI Jakarta. Berdasarkan simulasi *baseline* data PAM Jaya tahun 2023, jumlah penduduk terlayani mencapai 7.229.875 jiwa dari 10.672.100 jiwa penduduk Jakarta (BPS) atau setara dengan 67,7 persen. Selanjutnya dengan menggunakan angka proyeksi penduduk dari BPS tahun 2020-2050, diperoleh hasil simulasi bahwa kebutuhan air Jakarta pada tahun 2045 adalah sebesar 32.000 liter/detik. Hasil proyeksi kebutuhan air bersih Jakarta hingga tahun 2045 adalah sebagai berikut.



Gambar 2.94 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Jakarta Tahun 2020 – 2045

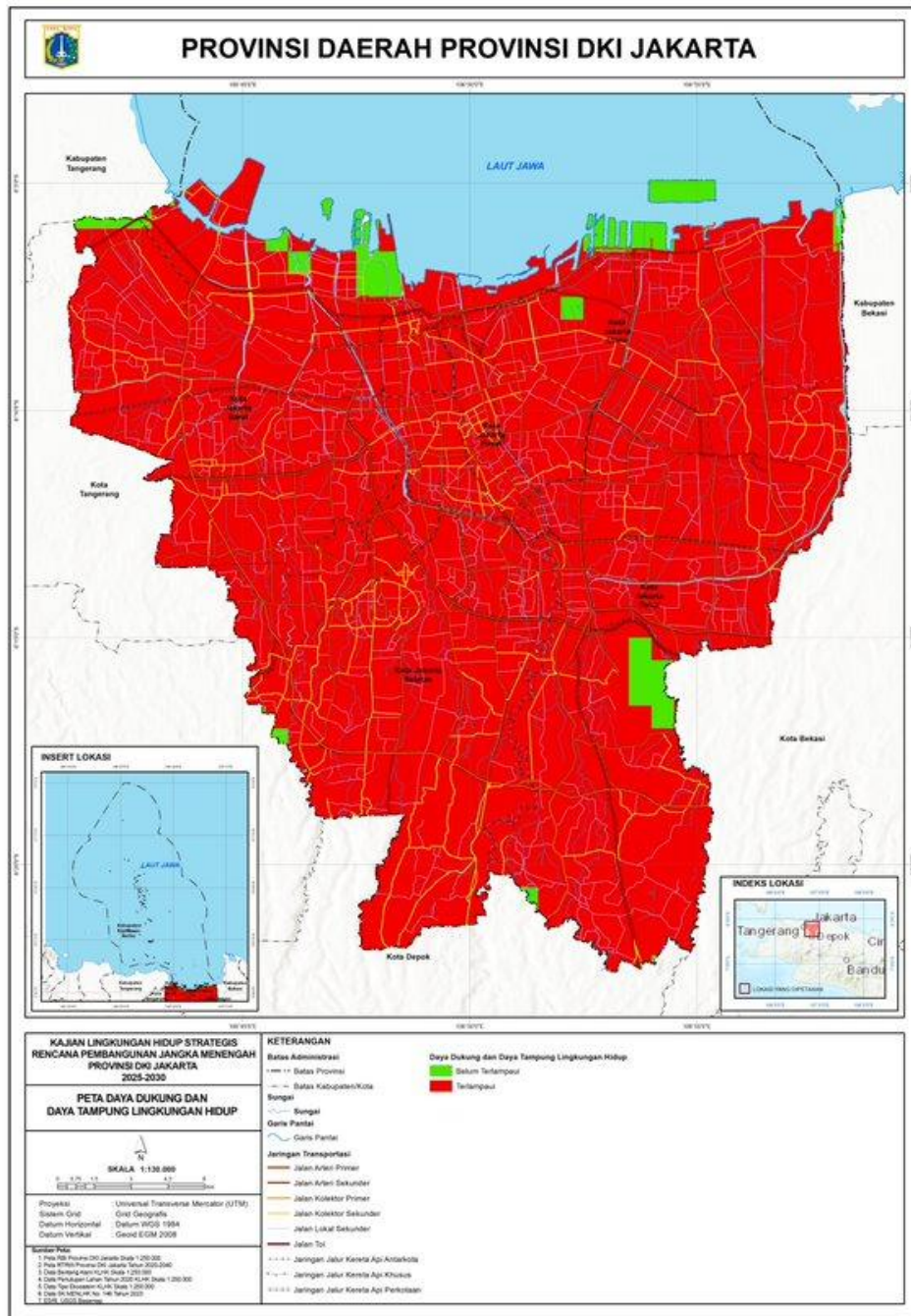
Kebutuhan penyediaan air bersih di Jakarta hingga tahun 2045 menurun seiring dengan penurunan jumlah penduduk yang harus dilayani. Kondisi saat ini pelayanan air bersih perpipaan baru mencakup sekitar 65 persen dari wilayah daratan Jakarta, yang menyebabkan peningkatan risiko *land subsidence* akibat penggunaan air tanah dan pengembangan jaringan air perpipaan mengalami stagnasi. Faktor utama yang menyebabkan hal ini adalah terbatasnya air baku layak pakai dalam wilayah Jakarta, 97 persen air yang digunakan dalam menghasilkan air bersih perpipaan berasal dari luar wilayah Jakarta, terutama dari Waduk Jatiluhur yang airnya dialirkan melalui Kanal Tarum Barat.

Tabel 2.17 Daya Dukung dan Daya Tampung Air Jakarta

Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota	Ketersediaan Air Jakarta	Volume (m ³ /Tahun)			Selisih	Luas D3TLH Air (Air)		Ambang Batas (Jiwa)	Indikasi Status D3TLH Air
		Domestik	Lahan	Kebutuhan Total		Belum Terlampaui	Terlampaui		
Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	4,163,057.32	2,396,044.80	1,109,769.45	3,505,814.25	657,243.07	658.91	419.13	28,574	Terlampaui
Kota Administratif Jakarta Barat	102,105,718.45	221,240,073.60	12,756,910.02	233,996,983.62	-131,891,265.17	144.29	12,414.16	2,395,781	Terlampaui
Kota Administratif Jakarta Pusat	34,911,044.24	91,315,728.00	172,052.54	91,487,780.54	-56,576,736.29		4,781.08	986,176	Terlampaui
Kota Administratif Jakarta Selatan	118,049,489.86	203,236,560.00	3,629,945.37	206,866,505.37	-88,817,015.52	39.68	14,791.38	2,241,236	Terlampaui
Kota Administratif Jakarta Timur	152,307,750.72	287,173,814.40	20,180,742.05	307,354,556.45	-155,046,805.74	500.85	17,817.79	3,129,956	Terlampaui
Kota Administratif Jakarta Utara	138,578,941.54	154,893,340.80	38,546,111.31	193,439,452.11	-54,860,510.57	1,329.83	13,522.02	1,724,190	Terlampaui
Total	550,116,002.13	960,255,561.60	76,395,530.74	1,036,651,092.35	-486,535,090.22	2,673.56	63,745.56	10,505,913	

Sumber: KLHS RPJPD Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan tabel di atas, seluruh kota dan kabupaten administrasi di DKI Jakarta telah melampaui daya dukungnya. Pengambilan air baku Jakarta sebagian besar berasal dari Waduk Jatiluhur, IPA Cikokol, dan IPA Serpong, yang dipengaruhi oleh lima wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai area fungsional. Meskipun DKI Jakarta didukung oleh lima DAS, wilayah ini masih mengalami defisit air. Dari total ketersediaan air permukaan 6,042.870.443 m³/tahun, hanya 4,69% yang terdistribusi ke Jakarta atau sekitar 283.250.615 m³. Pada 2019, kebutuhan air di wilayah DKI Jakarta mencapai 1,650.486.049 m³/tahun, dengan mayoritas sebesar 92,61% untuk keperluan domestik. Hal ini menyebabkan Jakarta mengalami defisit air secara berkelanjutan, dengan jumlah penduduk yang mencapai 10,5 juta jiwa, jauh melampaui daya tampung air lokal untuk 1,94 juta jiwa.



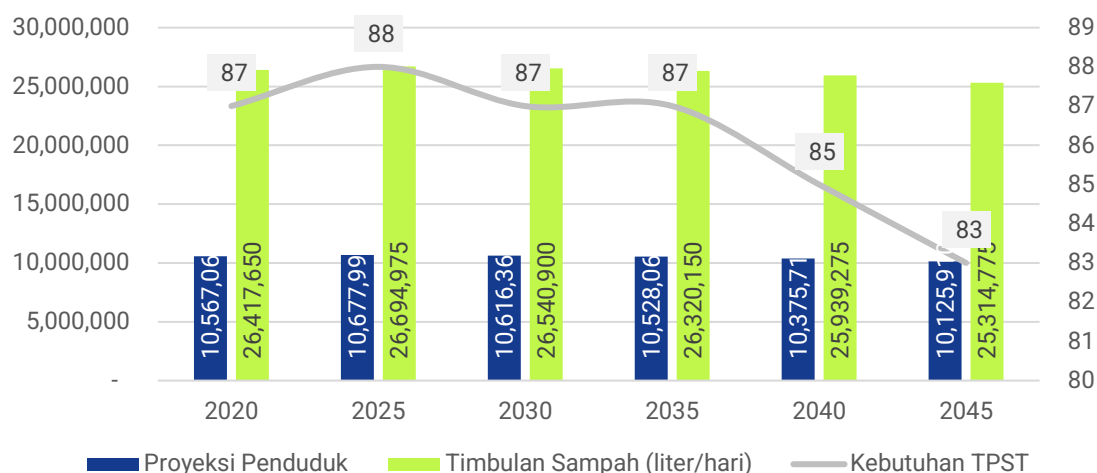
Gambar 2.95 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Sumber: KLHS RPJPD Provinsi DKI Jakarta

C. Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan

Dalam menentukan kebutuhan sarana prasarana pengelolaan persampahan didasari dari proyeksi penduduk yang kemudian dilakukan perhitungan timbulan sampah yang dihasilkan masing-masing penduduk dengan mengacu SNI 03-1733-2004 yang

menyatakan bahwa besar timbulan sampah yang dihasilkan satu orang adalah 2,5 L/hari. Kemudian hasil timbulan sampah akan disesuaikan dengan kebutuhan sarana prasarana sesuai jumlah KK dengan mengacu kepada SNI yang sama. Dengan demikian proyeksi kebutuhan hunian Jakarta hingga tahun 2045 jika tidak dilakukan intervensi pembangunan sarana prasarana pengelolaan persampahan adalah sebagai berikut.



Gambar 2.96 Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan Jakarta Tahun 2020 - 2045

Dengan menurunnya proyeksi jumlah penduduk, maka kebutuhan akan sarana prasarana pengelolaan persampahan juga turut menurun. Diperkirakan hingga tahun 2045 kebutuhan TPST sebanyak 83 TPST dengan asumsi tidak ada pembangunan TPST selama dua puluh tahun. Sementara itu kebutuhan tertinggi akan sarana prasarana pengolahan persampahan tercatat pada tahun 2025 sebanyak 88 TPST. Hal yang perlu menjadi catatan bahwa saat ini, Jakarta sudah memiliki 1 TPST yang berlokasi sama dengan TPA, yaitu TPST Bantargebang.

D. Proyeksi Kebutuhan Energi

Energi listrik merupakan salah satu aspek penunjang utama aktivitas perkotaan. Dalam melakukan perhitungan kebutuhan sarana dan prasarana energi, tidak tertera dalam SNI 6728.1-2015, sehingga pada kasus ini digunakan *baseline* yang mengacu kepada Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Umum Energi Daerah Tahun 2023 – 2050. Berikut merupakan kebutuhan energi listrik Provinsi Jakarta hingga 2050.

Tabel 2.18 Kebutuhan Energi Listrik Jakarta 2020 – 2050

Sektor	2020	2025	2030	2040	2050
	(Ribuan Ton Oil Equivalent)				
Rumah Tangga	1.559	1.685	1.849	2.139	2.427
Komersial	1.635,7	1.974,9	2.476,5	3.817,7	5.506,5

Sektor	2020	2025	2030	2040	2050
	(Ribu Ton Oil Equivalent)				
Industri	1.173	1.390	1.780	2.925	4.672
Transportasi	3.100	3.498	3.929	4.559	5.312
Lainnya	83,6	93,9	104,3	122,7	142,4
Total	7.552	8.642	10.139	13.564	18.060

Sumber: Rencana Umum Energi Daerah Tahun 2023 – 2050

Meskipun secara jumlah penduduk Jakarta akan menurun pada tahun 2045, namun kebutuhan energi listrik pada rumah tangga diperkirakan akan tetap meningkat. Hal ini dikarenakan penduduk Jakarta akan semakin sejahtera dan dapat mengakses teknologi canggih berdaya besar di hunian masing-masing. Selain itu dengan target bersaing dengan kota global lainnya, Jakarta dapat menarik talenta-talenta global untuk bekerja dan bermukim di Jakarta, sehingga kebutuhan energi listrik rumah tangga dapat meningkat.

Dengan arahan Jakarta menjadi pusat bisnis, jasa keuangan, dan perdagangan dan jasa baik pada level regional maupun nasional, maka kegiatan sektor jasa diperkirakan terus meningkat yang diiringi dengan meningkatnya kebutuhan konsumsi energi di sektor ini. Penggunaan energi di sektor komersial sebagian besar adalah untuk penerangan, pendingin ruangan, serta peralatan listrik lainnya. Pertumbuhan rata-rata energi dari sektor komersial adalah 4,2 persen per tahun dari tahun 2026 – 2050. Diperkirakan pada rentang 2040 – 2050 kebutuhan energi sektor jasa mencapai 13.564 – 18.060 ribu TOE.

Sejalan dengan sektor komersial, kebutuhan energi di sektor industri juga diproyeksi akan mengalami peningkatan, namun tidak setajam sektor komersial. Hal ini dikarenakan, meskipun secara nilai PDRB sektor industri terus meningkat, pertumbuhannya di Jakarta cenderung melambat. Diperkirakan peningkatan tertajam terjadi pada rentang 2040 – 2050, yaitu meningkat dari 2.925 ribu TOE menjadi 4.672 TOE.

Sektor transportasi merupakan pengguna energi besar di Jakarta sebesar 39 persen dari total pemakaian energi. Sektor ini juga merupakan penyumbang emisi gas rumah kaca dan polusi udara terbesar di Jakarta. Dengan kondisi tersebut Pemerintah Provinsi Jakarta memiliki komitmen untuk mengurangi pemakaian energi di sektor transportasi dengan berbagai pendekatan, seperti peningkatan cakupan dan kualitas layanan transportasi publik, penggunaan kendaraan ramah lingkungan, pembangunan tata ruang *mix-used* yang memungkinkan mengurangi kebutuhan pergerakan, hingga disinsentif penggunaan kendaraan pribadi. Karenanya pangsa pemakaian energi sektor transportasi terhadap pemakaian energi total di Jakarta akan turun dari 40,4 persen pada tahun 2025 menjadi 29,4 persen pada tahun 2050.

Sektor lainnya terdiri atas sektor pertanian (termasuk perikanan), sektor pertambangan dan sektor konstruksi. Kegiatan sektor pertanian dan sektor pertambangan di Jakarta relatif kecil, sedangkan sektor konstruksi cukup besar, yaitu sekitar 12 persen PDRB

Jakarta. Sektor pertanian dan sektor konstruksi diproyeksikan masih akan tumbuh dengan pertumbuhannya pada saat ini sedangkan sektor pertambangan diproyeksikan akan tetap pada tingkat kegiatannya saat ini. Pertumbuhan rata-rata pemakaian energi di sektor lainnya pada tahun 2025 – 2050 sebesar 1,7 persen per tahun. Pangsa pemakaian energi sektor lainnya akan menjadi 1,1 persen dari pemakaian energi total pada tahun 2025 dan menjadi 0,8 persen pada tahun 2050.

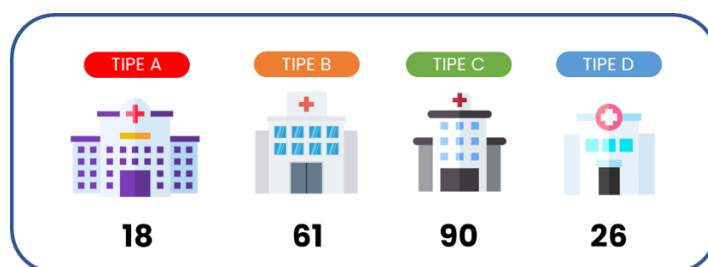
Tabel 2.19 Data Titik SPBU, SPKLU, SPBKLU, dan Depo BBM utama di Jakarta

Jenis Fasilitas	Jumlah Titik	Lokasi Utama
Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)	168	Tersebar di seluruh wilayah Jakarta
Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU)	133	Tersebar di seluruh wilayah Jakarta
Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU)	470	Tersebar di seluruh wilayah Jakarta
Depo Bahan Bakar Minyak (BBM)	2	Pelabuhan Tanjung Priok dan Plumpang

Sumber: Kementerian ESDM

E. Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana Kesehatan

Penyediaan sarana kesehatan merupakan salah satu strategi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan menjaga ketahanan sosial masyarakat Jakarta. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, jumlah rumah sakit di Jakarta adalah 195 dengan pembagian berdasarkan tipe rumah sakit sebagai berikut.

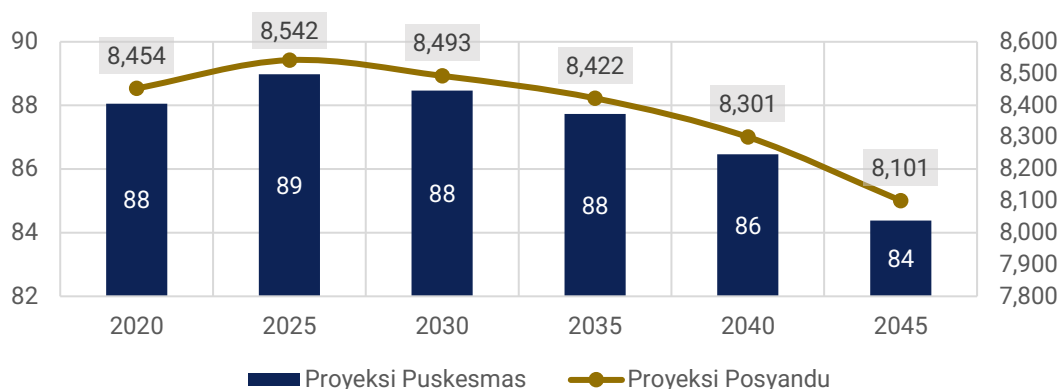


Gambar 2.97 Jumlah Rumah Sakit di Jakarta berdasarkan Tipe

Sumber: Kementerian Kesehatan, 2023

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memberikan izin operasional untuk rumah sakit dengan tipe B hingga D. Bila dilihat berdasarkan tipe tersebut, maka jumlah rumah sakit sudah cukup untuk melayani seluruh kebutuhan kesehatan di Jakarta. Peningkatan jumlah rumah sakit dapat dilakukan dengan pengembangan puskesmas kecamatan dan/atau puskesmas kelurahan menjadi rumah sakit tipe D di wilayah kecamatan.

RPJPD JAKARTA 2025-2045



Gambar 2.98 Proyeksi Kebutuhan Puskesmas dan Posyandu Jakarta Tahun 2020 -2045

Rasio pelayanan tempat tidur di Jakarta pada tahun 2022 adalah 1:401 yang berarti satu tempat tidur dapat digunakan oleh 401 orang. Rasio ini sudah cukup baik dibandingkan dengan standar yang ditetapkan oleh WHO yaitu sebesar 1:1000. Dalam beberapa tahun ke depan, ditargetkan rasio pelayanan tempat tidur di Jakarta turun agar semakin banyak masyarakat yang terlayani.

Dilihat dari pertumbuhan penduduk yang menurun, seharusnya jumlah tempat tidur juga diprediksi terus menurun sesuai tren. Namun, salah satu target Jakarta untuk melayani masyarakat dari daerah lain dan penduduk global, maka proyeksi rasio pelayanan tempat tidur tetap ditargetkan menurun dengan interval pengurangan 1:5. Penurunan penyediaan tempat tidur baru terjadi pada tahun 2040 dan 2045.

Kebutuhan puskesmas dan posyandu mengalami penurunan sesuai dengan perkembangan penduduk yang semakin berkurang. Kebutuhan puskesmas dan posyandu paling banyak adalah pada tahun 2025 yaitu sebanyak 89 dan 8.541 sedangkan pada tahun 2045, diperkirakan kebutuhan puskesmas dan posyandu berkurang menjadi sebanyak 84 dan 8.101.

Tabel 2.20 Proyeksi Kebutuhan Tempat Tidur Jakarta Tahun 2020 - 2045

	2022	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (ribuan)	10.640	10.678	10.616	10.528	10.376	10.126
Proyeksi Tempat Tidur	26.559	27.033	27.221	27.345	27.305	27.003
Rasio	401	395	390	385	380	375
Jumlah penambahan		474	188	125	-40	-303

F. Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana Pendidikan

Standar penyediaan sarana dan prasarana pendidikan mengacu pada SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya. Sarana dan prasarana pendidikan terbagi ke dalam beberapa jenis, seperti TK, SD, SLTP, dan SLTA dengan kebutuhan masing-masing berdasarkan jumlah

penduduk: (i) TK setiap 1.250 penduduk; (ii) SD setiap 1.600 penduduk; (iii) SMP setiap 4.800 penduduk; dan (iv) SMA setiap 4.800 penduduk.

Standar tersebut kemudian disesuaikan dengan proyeksi penduduk hingga tahun 2045 dan dikurangi dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan saat ini sehingga dapat teridentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan yang proporsional. Adapun proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan di Jakarta hingga tahun 2045 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.21 Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan Jakarta Tahun 2020 - 2045

Tahun	2022	2025	2030	2035	2040	2045
Proyeksi Penduduk	10.640.010	10.677.990	10.616.360	10.528.060	10.375.710	10.125.910
Kebutuhan TK	4.143	4.173	4.124	4.053	3.932	3.732
Kebutuhan SD	3.937	3.961	3.922	3.867	3.772	3.616
Kebutuhan SMP	896	904	891	872	841	789
Kebutuhan SMA	1.080	1.088	1.075	1.056	1.025	973

Dilihat dari proyeksi penduduk serta ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, Jakarta masih perlu untuk memenuhi gap antara kebutuhan dan penyediaan sekolah hingga 2045. Namun demikian kebutuhan ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor lain yang dapat memengaruhi angka penyediaan yang relevan. Beberapa faktor tersebut antara lain:

- Proyeksi penduduk usia sekolah. Di Jakarta sendiri, penduduk kelompok umur usia sekolah terus mengalami penurunan setiap tahunnya.
- Ketersediaan ruang kelas pada satu sekolah. Setiap sekolah memiliki kapasitas daya tampung yang berbeda-beda, sehingga penting untuk mengetahui berapa daya tampung siswa dari masing-masing sekolah.
- Adopsi metode pembelajaran baru seiring perkembangan teknologi. Ke depan metode pembelajaran melalui daring semakin menunjukkan potensinya, terutama diuji pada saat Covid-19. Jika dalam 20 tahun pendidikan daring semakin menjadi andalan, maka kebutuhan akan sarana dan prasarana sekolah dapat berkurang, namun tergantikan dengan sarana dan prasarana penyediaan telekomunikasi (internet), serta alat dukung lainnya seperti komputer.
- Selain infrastruktur fisik, *soft* infrastruktur seperti ketersediaan guru juga perlu menjadi perhatian. Jumlah sekolah/ruang kelas yang tidak diimbangi dengan ketersediaan guru akan menimbulkan tidak kondusifnya proses belajar mengajar sehingga transfer pengetahuan menjadi tidak optimal.

2.8. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Pusat pertumbuhan wilayah merupakan suatu daerah atau lokasi yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan memiliki peran penting dalam menentukan arah dan keberlanjutan pembangunan. Pusat pertumbuhan wilayah tidak hanya mencakup pertumbuhan ekonomi, namun juga mencakup aspek-aspek sosial dan kultural yang masyarakat. Adanya pusat pertumbuhan wilayah tidak hanya menekankan peningkatan produktivitas ekonomi beserta kegiatan ekonomi di dalamnya, namun juga pengembangan infrastruktur, serta kualitas hidup masyarakat yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan.

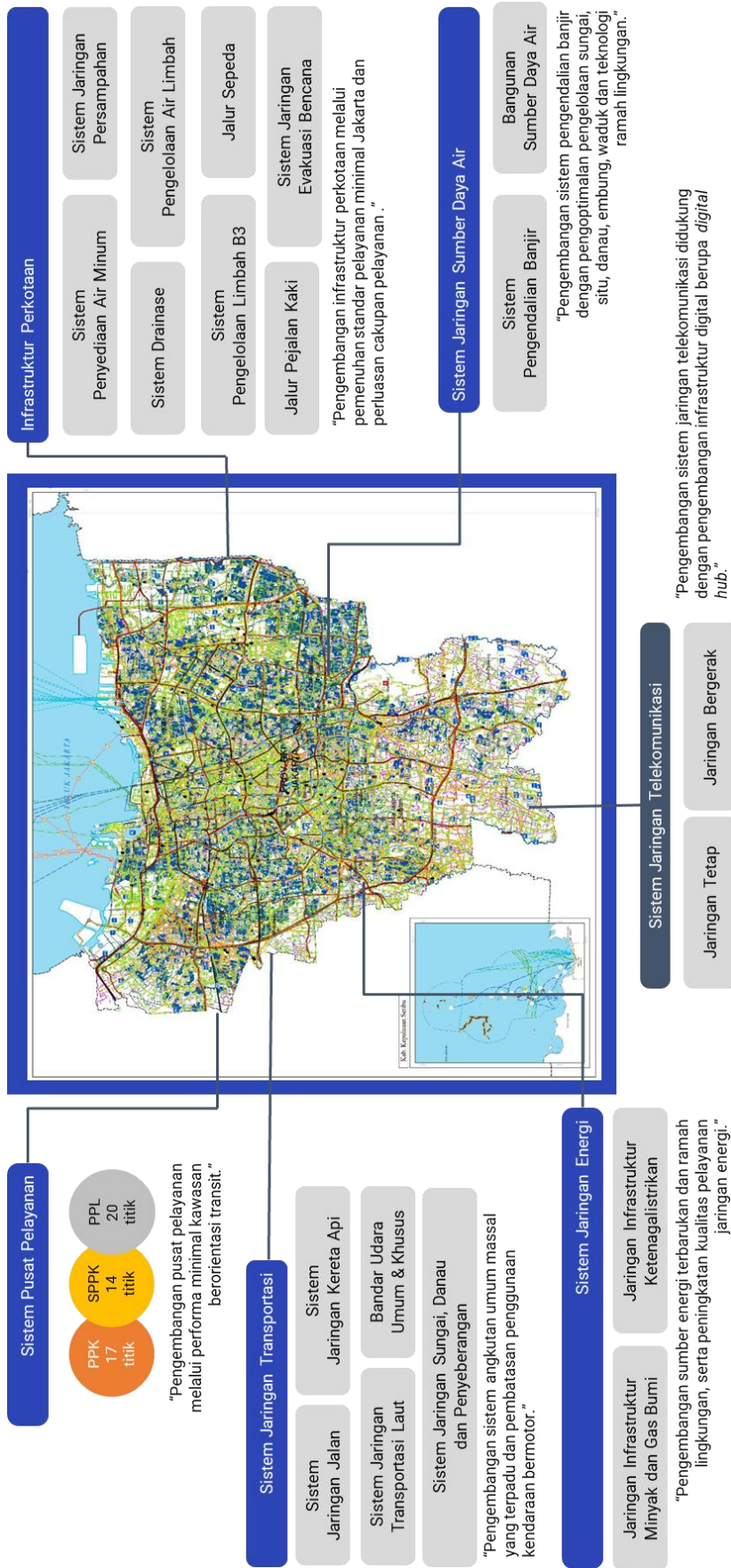
Jakarta terdiri dari lima kota administrasi dan satu kabupaten yang masing-masing memiliki pusat pertumbuhannya. Dalam hal ini, pusat pertumbuhan memiliki peran menjadi simpul kegiatan di wilayah tersebut, maupun keterkaitannya dengan wilayah lain di sekitarnya. Kebijakan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Jakarta diuraikan menjadi beberapa pusat yaitu sebagai berikut.

2.8.1 Kebijakan Pengembangan Kewilayahan dalam Perspektif Provinsi

Kebijakan pengembangan wilayah Jakarta diarahkan pada pembangunan kota yang berorientasi pada transportasi publik, pembangunan berorientasi digital dan pembangunan berorientasi pemenuhan infrastruktur dasar. Pengembangan wilayah tersebut telah tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta. Untuk mencapai kondisi tersebut dapat diwujudkan melalui pengembangan pusat-pusat pelayanan dan pengembangan kawasan strategis provinsi.

A. Pusat Pelayanan

Pengembangan pusat-pusat pelayanan di Jakarta didasarkan atas ketersediaan jaringan transportasi dengan tujuan untuk mengembangkan pusat pelayanan sebagai kawasan berorientasi transit dan untuk memusatkan kegiatan hunian pada kawasan berorientasi transit. Jaringan transportasi umum massal direncanakan sebagai struktur ruang utama pembentuk ruang kota Jakarta. Pemusatan aktivitas dan penduduk akan diarahkan di sekitar titik transit dalam radius berjalan kaki dan bersepeda untuk mempermudah pencapaian kebutuhan sehari-hari serta akses terhadap angkutan umum. Berdasarkan rencana pengembangan jaringan angkutan umum massal, berupa MRT, LRT, KRL, jaringan perkeretaapian perkotaan, serta BRT koridor utama dalam hasil kajian Rencana Induk Transportasi Jakarta, pengembangan setiap kawasan-kawasan di sekitar titik transit pada jaringan tersebut dengan konsep *Transit Oriented Development* (TOD). Kawasan-kawasan simpul transit tersebut secara berjejing dan berhierarki diarahkan untuk berperan sebagai pusat-pusat pelayanan kota.



Gambar 2.99 Penetapan Struktur Ruang dan Sistem Pelayanan Pusat

Sumber: Rancangan Peraturan Daerah RTRW Provinsi DKI Jakarta

Sistem pusat pelayanan dioptimalkan pembangunannya sebagai kawasan kompak dengan densitas dan intensitas lebih tinggi untuk menunjang pemusatan tempat tinggal dan aktivitas penduduk di sekitar titik transit angkutan umum massal yang terintegrasi dengan sarana prasarana dan utilitas yang memadai. Sistem pusat pelayanan dikembangkan dengan perencanaan berbasis performa yang pengembangan kawasannya harus memenuhi kriteria teknis sesuai tipologi dan performa minimal kawasan.

Penetapan kawasan mempertimbangkan jarak layanan angkutan serta jumlah dan jenis moda transportasi, sehingga menghasilkan titik-titik Pusat Pelayanan Kota (PPK), Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK), dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Berikut merupakan Sistem Pusat Pelayanan yang akan dikembangkan di wilayah Jakarta.

Tabel 2.22 Sistem Pusat Pelayanan Jakarta

No.	Sistem Pusat Pelayanan	Lokasi Sistem Pusat Pelayanan
1.	Pusat Pelayanan Kota	Dukuh Atas di Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat
		Bundaran HI di Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat
		Tanah Abang di Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat
		Senen di Kecamatan Senen, , Kota Administrasi Jakarta Pusat
		Harmoni di Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat
		Pesing di Kecamatan Grogol Petamburan, , Kota Administrasi Jakarta Barat
		Kebon Jeruk di Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat
		Kawasan Kota di Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat
		Manggarai di Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan
		Tebet di Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan
		Blok M - CSW di Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan
		Lebak Bulus di Kecamatan Kebayoran Lama, Kota

No.	Sistem Pusat Pelayanan	Lokasi Sistem Pusat Pelayanan
		Administrasi Jakarta Selatan Sentra Primer Timur di Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur Cakung di Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur Kampung Rambutan di Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur Kawasan Cawang di Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur Kawasan Monas di Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat
2.	Sub Pusat Pelayanan Kota	Istora Senayan di Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Selatan Rajawali di Kecamatan Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat Ancol di Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara Angke di Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat Sentra Primer Barat di Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat Rawa Buaya di Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat Kebayoran Lama di Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan Tanjung Barat di Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan Setiabudi di Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan Fatmawati di Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan Pulogadung di Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur Pulomas di Kecamatan Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur

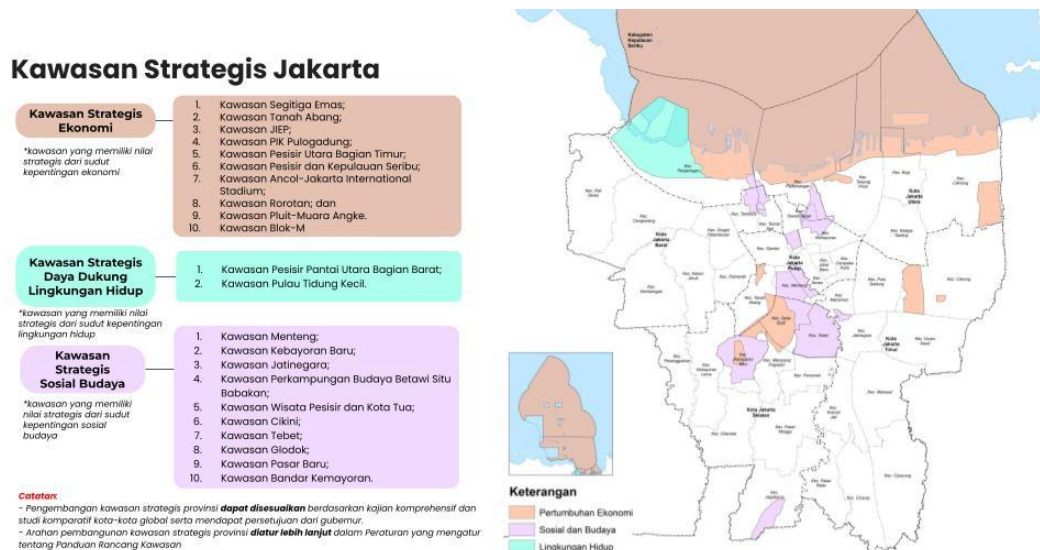
No.	Sistem Pusat Pelayanan	Lokasi Sistem Pusat Pelayanan
		Halim di Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur
3.	Pusat Pelayanan Lingkungan	Juanda di Kecamatan Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat
		Kemayoran di Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat
		Cempaka Mas di Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta
		Bendungan Hilir di Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan
		Sunter di Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara
		Tanjung Priok di Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara
		Pegangsaan Dua di Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara
		Rorotan di Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara
		Joglo di Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat
		Palmerah di Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat
		Tanjung Duren di Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat
		Grogol di Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat
		Slipi di Kecamatan Palmerah, Kota Administrasi Jakarta Barat
		Ragunan di Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan
		Pesanggrahan di Kecamatan Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan
		Pancoran di Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan
Pramuka di Kecamatan Matraman, Kota Administrasi		

No.	Sistem Pusat Pelayanan	Lokasi Sistem Pusat Pelayanan
		Jakarta Timur
		Jatinegara di Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur
		Cipinang di Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur
		Velodrome Rawamangun di Kecamatan Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur

Sumber: Rancangan Peraturan Daerah RTRW Provinsi DKI Jakarta

B. Kawasan Strategis Provinsi

Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Penentuan kawasan strategis provinsi didasarkan pada besar peran dan/atau pengaruh strategis yang diberikan kawasan tersebut terhadap pembangunan yang dilihat berdasarkan kepentingan sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan Jakarta. Secara keseluruhan, terdapat 22 kawasan strategis provinsi yang terbagi ke dalam tiga kelompok kepentingan, yaitu kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan lingkungan hidup; dan kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan sosial budaya.



Gambar 2.100 Penetapan Kawasan Strategis Provinsi DKI Jakarta

Sumber: Rancangan Peraturan Daerah RTRW Provinsi DKI Jakarta

Kawasan Strategis Provinsi dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi.

Jakarta sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional memiliki beberapa wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan strategis kepentingan ekonomi yang pengembangannya diharapkan dapat diharapkan mempercepat dan memperkuat daya saing Jakarta sebagai kota bisnis berskala global. Kawasan Strategis Provinsi dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi, meliputi:

1. Kawasan Segitiga Emas;
2. Kawasan Tanah Abang;
3. Kawasan Jakarta *Industrial Estate* Pulogadung;
4. Kawasan Pusat Industri Kecil Pulogadung;
5. Kawasan Pesisir dan Kepulauan Seribu;
6. Kawasan Ancol-Jakarta International Stadium;
7. Kawasan Rorotan;
8. Kawasan Pesisir Utara bagian Timur;
9. Kawasan Pluit-Muara Angke; dan
10. Kawasan Blok M.

Tabel 2.23 Tujuan dan Arahan Pengembangan Kawasan Strategis Jakarta dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Kawasan Segitiga Emas	
Tujuan	Sebagai kawasan bisnis terpadu berskala nasional, regional, dan global
Arahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyediaan jalur pejalan kaki yang lebar dan nyaman bagi pejalan kaki serta untuk menunjang aktivitas bisnis, komersial dan perkantoran kawasan; 2. penyediaan kelengkapan infrastruktur digital dan pusat aktivitas digital skala kota (<i>tech commerce</i>); 3. pembentukan areal penghubung antar bangunan dan/atau kompleks bangunan untuk meningkatkan integrasi pembangunan kawasan diikuti dengan penyediaan ruang untuk golongan usaha skala kecil, sektor informal, ruang hijau, dan ruang publik; 4. peningkatan kapasitas tampung kawasan terhadap kegiatan perdagangan dan jasa serta campuran dengan mengacu pada standar perencanaan bangunan internasional serta meningkatkan kualitas ruang sesuai kemampuan daya dukung lingkungan; 5. penyediaan utilitas dasar seperti pengelolaan sampah dan air limbah, penyediaan air minum, jaringan telekomunikasi, serta jaringan energi dan gas; 6. peningkatan konektivitas dan permeabilitas kawasan, melalui peningkatan opsi aksesibilitas dengan tujuan memperpendek jarak dan mempersingkat waktu tempuh pejalan kaki, melalui penyediaan jalur pejalan kaki; 7. peningkatan kemampuan pelayanan, manajemen, sistem jaringan komunikasi, sarana dan prasarana dalam memanfaatkan peluang ekonomi global serta kemampuan dan kepekaan mengenal iklim investasi yang terjadi pada tingkat nasional dan internasional; dan

	8. penyediaan Indeks Hijau Biru Indonesia kawasan setara dengan 30 (tiga puluh) persen RTH dari total luas kawasan.
Kawasan Tanah Abang	
Tujuan	Sebagai pusat grosir dan perdagangan jasa berskala global
Arahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. pengembangan pada kawasan perdagangan dan jasa wajib menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang timbul dari aktivitas yang berlangsung di kawasan tersebut; 2. pembangunan fasilitas perdagangan dan/atau jasa dilaksanakan dengan memenuhi kebutuhan sarana tempat usaha yang ditata secara adil bagi semua golongan usaha termasuk pengembangan golongan usaha skala kecil dan sektor informal; 3. penentuan alokasi ruang bagi sektor informal dan golongan usaha skala kecil secara terintegrasi dengan pengembangan sektor formal dari berbagai jenis kegiatan perekonomian; dan 4. penyediaan utilitas dasar seperti pengelolaan sampah dan air limbah, penyediaan air minum, jaringan telekomunikasi, serta sarana dan prasarana lain yang mendukung kegiatan perdagangan dan jasa.
Kawasan Jakarta <i>Industrial Estate</i> Pulogadung	
Tujuan	Sebagai kawasan industri terpadu yang mengintegrasikan bisnis kreativitas dan komunitas
Arahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. peningkatan aksesibilitas melalui integrasi dengan transportasi publik; 2. penyediaan ruang hijau dan badan air skala kawasan sebagai tempat rekreasi dan usaha penanggulangan banjir; 3. penyediaan perumahan yang terjangkau, aman, dan nyaman; 4. penyediaan jalur pejalan kaki untuk meningkatkan konektivitas pejalan kaki; dan 5. pengembangan kawasan dengan fungsi industri dan komersial yang dapat mengakomodir tenaga kerja baru.
Kawasan Pusat Industri Kecil Pulogadung	
Tujuan	Sebagai sentra UMKM
Arahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. peningkatan konektivitas dan permeabilitas kawasan, melalui peningkatan opsi aksesibilitas dengan tujuan mempendek jarak dan mempersingkat waktu tempuh pejalan kaki, melalui penyediaan jalur pejalan kaki; 2. penataan kawasan menjadi lokasi yang kondusif untuk berinvestasi bagi penanaman modal dalam negeri dan asing, didukung dengan prasarana dan sarana yang memadai; 3. peningkatan aksesibilitas kawasan dengan pengintegrasian titik transit dengan kawasan UMKM dan permukiman sekitarnya; dan 4. pengembangan ruang bisnis kreatif sebagai wadah inovasi untuk meningkatkan daya saing kawasan serta mendukung keberlanjutan usaha UMKM.
Kawasan Pesisir dan Kepulauan Seribu	
Tujuan	Sebagai pusat pariwisata dan lumbung pangan berbasis lingkungan yang berkelanjutan
Arahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. pemaduan unsur pembangunan budaya dan pariwisata yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya; 2. pemanfaatan lingkungan baik sumber daya alam maupun kondisi geografis, dengan menerapkan keseimbangan hubungan manusia dengan alam untuk mencegah kerusakan alam;

	<ol style="list-style-type: none"> 3. perencanaan pariwisata menggunakan pendekatan partisipatif untuk mengoptimalkan potensi lokal; 4. perencanaan pengembangan pariwisata dengan pendekatan kewilayahan, pengembangan produk wisata, dan pasar, yang terintegrasi dalam suatu kesatuan sistem wilayah pengaturan spasial yang selaras dengan rantai komoditas pada sentra perikanan; 5. perencanaan pengembangan ekonomi biru sebagai sumber daya pangan alternatif 6. pembangunan infrastruktur, bangunan, dan kawasan yang adaptif terhadap bencana; dan 7. pengintegrasian kawasan dengan jaringan dan titik transit Angkutan Umum Massal.
Kawasan Ancol-Jakarta International Stadium	
Tujuan	Sebagai pusat rekreasi, olahraga dan ekshibisi
Arahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. pengembangan sarana rekreasi untuk berupa wahana, <i>event</i> olahraga, <i>MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition)</i> dan kegiatan edukasi dan konservasi yang memperhatikan aspek lingkungan; 2. pengintegrasian transportasi publik baik di dalam kawasan maupun di luar kawasan; 3. pengembangan sistem transportasi dalam kawasan yang memperhatikan kebutuhan pengguna difabel; 4. penyediaan sarana parkir kendaraan bermotor dan jalur pejalan kaki yang memadai dan terintegrasi; 5. penyediaan serta peningkatan kualitas fasilitas publik bagi pengunjung; dan 6. revitalisasi dan peremajaan kawasan hunian di sekitar Ancol-Jakarta International Stadium guna mendukung tujuan pengembangan kawasan.
Kawasan Rorotan	
Tujuan	Sebagai pusat hunian dan komersial terpadu yang terintegrasi dengan RTH berkualitas
Arahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. pengembangan kawasan hunian dan komersial yang memperhatikan daya dukung lingkungan hidup dan aspek berkelanjutan; 2. pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengembangan kawasan; 3. pengembangan RTH yang berkualitas dan terintegrasi dengan pengembangan kawasan; 4. pengintegrasian transportasi publik baik di dalam kawasan maupun di luar kawasan; 5. penyediaan sarana parkir kendaraan bermotor dan jalur pejalan kaki yang memadai dan terintegrasi; 6. penyediaan utilitas dasar seperti pengelolaan sampah dan air limbah, penyediaan air minum, jaringan telekomunikasi, serta jaringan energi dan gas; dan 7. peningkatan konektivitas dan permeabilitas kawasan, melalui peningkatan opsi aksesibilitas dengan tujuan memperpendek jarak dan mempersingkat waktu tempuh pejalan kaki, melalui penyediaan jalur pejalan kaki.
Kawasan Pesisir Utara bagian Timur	
Tujuan	Sebagai sentra industri, pergudangan dan perikanan berskala global

Arahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. pembangunan dan pengembangan kawasan yang memperhatikan daya dukung lingkungan hidup dan aspek keberlanjutan; 2. pembangunan tempat tambat labuh kapal nelayan Kalibaru, Cilincing, Marunda (KCM); 3. pengembangan kawasan industri dan pergudangan yang terpadu serta terhubung dengan jaringan distribusi logistik; 4. penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan sentra perikanan; 5. pengaturan spasial yang selaras dengan rantai komoditas pada sentra perikanan; 6. pembangunan infrastruktur, bangunan, dan kawasan yang adaptif terhadap bencana; dan 7. integrasi kawasan dengan jaringan dan titik transit angkutan umum massal.
Kawasan Pluit-Muara Angke	
Tujuan	Sebagai kawasan perikanan yang berkelanjutan secara ekonomi dan lingkungan
Arahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. pembangunan dan peningkatan kualitas tanggul rob; 2. peningkatan penataan manajemen pelabuhan melalui pengadaan SOP (<i>Standard Operational Procedure</i>) alur pelayaran kapal perikanan, penataan dan pembangunan dermaga, penataan dan pembangunan Tempat Pelelangan Ikan, penataan kawasan galangan kapal dan perbekalan, serta penambahan dan penataan kios; 3. penataan kawasan industri dan pasar grosir perikanan; 4. peningkatan infrastruktur dasar kawasan melalui peningkatan ketersediaan dan layanan air bersih dan listrik, penataan sistem sungai dan drainase kawasan secara menyeluruh dan terpadu, serta peningkatan kualitas sistem persampahan dan limbah; 5. penataan akses kawasan melalui penataan akses jalan permukiman, jalan pelabuhan, industri, pasar grosir perikanan, dan wisata maritim; dan 6. penataan kawasan permukiman.
Kawasan Blok-M	
Tujuan	sebagai kawasan ibukota diplomatik ASEAN yang dikembangkan dengan konsep Kawasan Berorientasi Transit
Arahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. peningkatan daya saing bisnis dan investasi Jakarta sebagai kota bisnis berskala global; 2. pengembangan sistem logistik kota yang efisien dan terkoneksi secara optimal dengan sistem logistik regional/internasional; 3. penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan kesekretariatan ASEAN; dan 4. perwujudan Jakarta sebagai Ibukota Negara ASEAN.

Sumber: Rancangan Peraturan Daerah RTRW Provinsi DKI Jakarta

Kawasan Strategis Provinsi dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya

Kawasan strategis kepentingan sosial budaya merupakan bagian wilayah provinsi yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah provinsi pada bidang sosial budaya. Sejumlah kawasan strategis kepentingan sosial budaya di wilayah Jakarta, yaitu sebagai berikut:

1. Kawasan Menteng;
2. Kawasan Kebayoran Baru;
3. Kawasan Jatinegara;
4. Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Situ Babakan;
5. Kawasan Wisata Pesisir dan Kota Tua;
6. Kawasan Cikini;
7. Kawasan Tebet;
8. Kawasan Glodok;
9. Kawasan Pasar Baru; dan
10. Kawasan Bandar Kemayoran.

Tabel 2.24 Tujuan dan Arahan Pengembangan Kawasan Strategis Jakarta dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya

Kawasan Menteng	
Tujuan	Pemugaran bangunan bersejarah, pelestarian konsep pengembangan kawasan permukiman taman, serta pusat budaya dan kesenian berskala internasional
Arahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. pengembangan kawasan dilakukan dengan prinsip keselarasan dengan lingkungan sekitar dan tidak mengganggu fungsi sebagai kawasan pemugaran; 2. pemugaran dan pelestarian objek dan kawasan cagar budaya; dan 3. pengembangan ruang publik termasuk ruang hijau biru yang inklusif untuk kegiatan sosial budaya masyarakat.
Kawasan Kebayoran Baru	
Tujuan	Pemugaran bangunan bersejarah dan pengembangan budaya perkotaan
Arahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. pengembangan kawasan dilakukan dengan prinsip keselarasan dengan lingkungan sekitar dan tidak mengganggu fungsi sebagai kawasan pemugaran; dan 2. pengemasan koridor Blok M CSW – Senopati – Wolter Monginsidi – Kemang – Cipete sebagai koridor pengembangan pariwisata budaya perkotaan dengan mengedepankan wisata kuliner, belanja, dan hiburan.
Kawasan Jatinegara	
Tujuan	Sebagai pusat kebudayaan Betawi dan pelestarian bangunan bersejarah meliputi Taman Benyamin Sueb dan Stasiun Jatinegara
Arahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. pengembangan kegiatan pariwisata berbasis pelestarian budaya Betawi; 2. pelestarian objek cagar budaya berupa Gedung Eks Kodim 0505 dan Stasiun Jatinegara; dan 3. pengembangan sebagai kawasan terpadu dengan mengoptimalkan fungsi Pasar Jatinegara sebagai kawasan perdagangan untuk mendukung kegiatan pariwisata.
Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Situ Babakan	
Tujuan	Sebagai pusat kebudayaan Betawi
Arahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. pengembangan kegiatan pariwisata berbasis pelestarian budaya Betawi yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan sistem transportasi publik;

	<ol style="list-style-type: none"> 2. penyediaan ruang publik yang inklusif bagi masyarakat lokal dan wisatawan; 3. pelestarian budaya dan nilai-nilai masyarakat setempat; 4. pengembangan kawasan secara inklusif dengan melibatkan masyarakat setempat dalam aspek sosial dan ekonomi; 5. penyediaan RTH; dan 6. pengembangan kawasan dengan tetap memperhatikan fungsinya sebagai daerah resapan air.
Kawasan Wisata Pesisir dan Kota Tua	
Tujuan	Sebagai kawasan pariwisata berbasis budaya sejarah dan budaya perkotaan meliputi Kota Tua, Kawasan Pantai Kita, Kawasan Pantai Maju, Rumah Si Pitung di Marunda, Masjid Al-Alam, Museum Bahari, Menara Syahbandar, Kampung Luar Batang, Pelabuhan Sunda Kelapa, Pulau Onrust, Pulau Cipir, dan Pulau Kelor
Arahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. pengembangan situs-situs cagar budaya sebagai kegiatan pariwisata budaya sejarah bertaraf internasional yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan ketentuan pelestarian cagar budaya; 2. pengembangan kegiatan pariwisata berbasis budaya perkotaan meliputi wisata kuliner, pasar tematik ikan, <i>MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition)</i>, museum, serta hiburan dan rekreasi; 3. pengembangan sebagai kawasan inklusif untuk mendukung kegiatan sosial dan ekonomi melalui penciptaan ekosistem usaha kecil menengah serta ekonomi kreatif masyarakat yang kondusif; 4. pengembangan, penyediaan, dan optimalisasi fungsi ruang publik dan ruang hijau termasuk pantai publik untuk dimanfaatkan oleh masyarakat lokal maupun wisatawan; 5. pengemasan secara terpadu objek-objek wisata dalam Kawasan Wisata Pesisir melalui penyediaan aksesibilitas dan konektivitas antar kawasan serta pengelolaan rute wisata; dan 6. pengembangan fasilitas publik meliputi pasar tematik ikan, prasarana ibadah, dermaga, dan prasarana umum lainnya.
Kawasan Cikini	
Tujuan	Sebagai pusat kreatif dan kebudayaan
Arahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. pengembangan pusat pariwisata berbasis budaya sejarah dan budaya perkotaan dengan meningkatkan dan mengembangkan sistem pencapaian pejalan kaki, pesepeda, sistem angkutan umum massal, dan meningkatkan nilai ekonomi kawasan serta dapat mengakomodasi kepentingan pendidikan, penelitian, dan dokumentasi; 2. pengembangan kawasan Cikini meliputi Taman Ismail Marzuki (TIM) dan sekitarnya sebagai pusat pertunjukan, pameran, penelitian, dan pelatihan budaya serta kesenian sebagai wadah berkreasi bagi seniman serta masyarakat; 3. pengemasan koridor Cikini – Gondangdia – Agus Salim/Sabang sebagai koridor pengembangan kegiatan pariwisata budaya perkotaan dengan mengedepankan wisata kuliner, pertunjukan, dan belanja; dan

	4. pelestarian dan penataan fungsi sejarah dan budaya untuk mendukung kegiatan pariwisata, perdagangan, dan jasa dengan pengaturan dan penataan <i>complete street</i> .
Kawasan Tebet	
Tujuan	Sebagai kawasan wisata urban berupa kawasan berbasis kuliner fusion, distro, olahraga, dan kesenian
Arahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. pengembangan kawasan wisata urban berupa kawasan berbasis kuliner fusion, distro, olahraga, dan kesenian; 2. Peningkatan aksesibilitas kawasan dengan penataan jalur pejalan kaki dan pedagang kaki lima; 3. Penyediaan lahan dan penataan parkir kendaraan bermotor; dan 4. Pengembangan RTH dan ruang publik untuk mendukung aktivitas rekreasi, olahraga dan kesenian.
Kawasan Glodok	
Tujuan	Sebagai pusat wisata urban
Arahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. pengembangan Glodok <i>Chinatown Market</i>, Pasar Petak Sembilan, Vihara Dharma Jaya Toasebio dan Vihara Dharma Bhakti sebagai atraksi wisata urban; 2. peningkatan kualitas moda transportasi umum menuju dan dalam kawasan; 3. peningkatan sarana dan prasarana umum untuk menunjang fungsi kawasan; 4. revitalisasi kawasan melalui revitalisasi bangunan dan penataan jalur pejalan kaki; dan 5. digitalisasi dan transformasi digital melalui pengembangan aplikasi dan internet untuk membangun narasi kawasan.
Kawasan Pasar Baru	
Tujuan	Sebagai pusat revitalisasi bangunan bersejarah dan pengembangan wisata perkotaan
Arahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. pengembangan pariwisata perkotaan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendukung pariwisata perkotaan; 2. peningkatan konektivitas melalui perbaikan jalur pejalan kaki, fasilitas difabel dan jalur sepeda yang lebih aman dan nyaman; dan 3. revitalisasi bangunan-bangunan cagar budaya dan bernilai sejarah.
Kawasan Bandar Kemayoran	
Tujuan	Sebagai pusat ekshibisi
Arahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. pengembangan prasarana dan fasilitas pendukung serta pemenuhan kebutuhan utilitas dasar di dalam dan sekitar kawasan; dan 2. pengembangan ruang publik pada kawasan strategis sebagai pusat kegiatan sosial budaya masyarakat tanpa menghilangkan identitas dan karakter kawasan.

Sumber: Rancangan Peraturan Daerah RTRW Provinsi DKI Jakarta

Kawasan Strategis Provinsi dari Sudut Kepentingan Lingkungan Hidup

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi:

1. Kawasan Pesisir Utara bagian Barat;
2. Kawasan Pantai Kita, Kawasan Pantai Maju, Kawasan Pantai Bersama; dan
3. Kawasan Pulau Tidung Kecil.

Tabel 2.25 Tujuan dan Arahan Pengembangan Kawasan Strategis Jakarta dari Sudut Kepentingan Lingkungan Hidup

Kawasan Pesisir Utara Bagian Barat	
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. mewujudkan sistem pengendalian banjir terpadu di kawasan pesisir; 2. meningkatkan ketahanan kawasan pesisir terhadap risiko bencana; 3. melakukan rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Pesisir Utara Bagian Barat Jakarta dalam rangka optimalisasi fungsi kawasan; 4. menata permukiman daratan Pantai Utara Jakarta untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir dan nelayan; 5. mewujudkan pariwisata berbasis lingkungan (<i>ecotourism</i>); 6. mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan pesisir dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan; 7. melestarikan keanekaragaman hayati pesisir; 8. mendukung penyediaan ruang publik yang berkelanjutan.
Arahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. pada kawasan daratan pesisir yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan tinggi dapat dikembangkan untuk kegiatan budidaya dengan intensitas rendah sampai tinggi dengan tetap memperhatikan keberlanjutan ekosistem pesisir; 2. pada kawasan daratan pesisir yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan rendah tetapi subur dan merupakan kawasan resapan air dapat dikembangkan sebagai perkebunan, agroindustri, pertanian, pariwisata dan hutan produksi; 3. pada area hutan bakau/<i>mangrove</i> dapat dikembangkan untuk wisata <i>mangrove</i> dan/atau kegiatan yang bersifat pendidikan dan penelitian tetap mempertahankan kelestarian ekosistem <i>mangrove</i>; 4. pada area tanah timbul dan/atau area yang terbentuk sebagai akibat dari pembangunan tanggul pantai, dimanfaatkan untuk kepentingan umum dan perumahan dengan intensitas rendah sampai sedang serta tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan; 5. pemanfaatan sempadan pantai wajib memperhatikan kepentingan konservasi lingkungan pesisir dan memastikan ketersediaan ruang bagi pembangunan tanggul pantai dengan desain yang memperhatikan kepentingan nelayan; 6. prasarana ibadah, kantor pemerintah, dermaga dan prasarana umum lainnya; 7. pengembangan pelabuhan diarahkan menuju pelabuhan ramah lingkungan (<i>greenport</i>); dan 8. penyediaan pantai publik diarahkan pada area tanah timbul, kawasan pantai, kawasan Ancol dan kawasan lainnya di sepanjang pesisir Pantai Utara Jakarta.

Kawasan Pantai Kita, Kawasan Pantai Maju, dan Kawasan Pantai Bersama	
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. mewujudkan kawasan pesisir yang berorientasi pada konsep kota tepi laut (<i>waterfront city</i>); 2. mewujudkan pengembangan Kawasan Pantai yang tidak membebani daratan pesisir; 3. mendukung penyediaan ruang publik yang berkelanjutan. 4. mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan pesisir dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan; dan 5. mewujudkan pariwisata berbasis lingkungan (<i>ecotourism</i>).
Arahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyediaan perumahan sebagai upaya pemenuhan hunian layak huni dan terjangkau dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta potensi bencana; 2. penyediaan lahan kontribusi yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya sebesar 5 (lima) persen dari total luas area kotor yang telah menjadi daratan. 3. pengembangan Kawasan Pantai mengutamakan kemandirian dan tidak membebani daratan dalam hal penyediaan prasarana tata air, penyediaan air bersih, pengelolaan limbah dan sampah, sistem pengerukan kanal, serta mengembangkan fasilitas publik.
Kawasan Pulau Tidung Kecil	
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. sebagai pusat edukasi yang mengedepankan pelestarian lingkungan; 2. sebagai pusat konservasi; dan 3. sebagai pusat budidaya pembibitan karang, ikan, penyu, dan biota laut lainnya.
Arahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. pengembangan kawasan wisata yang mengedepankan aspek lingkungan (<i>ecotourism</i>); 2. perlindungan biota sebagai upaya konservasi; 3. pengembangan sarana edukasi berbasis lingkungan; dan 4. pengembangan budidaya ekosistem laut.

Sumber: Rancangan Peraturan Daerah RTRW Provinsi DKI Jakarta

2.8.2 Kebijakan Pengembangan Kewilayahan dalam Perspektif Nasional

Kebijakan pengembangan wilayah merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan pembangunan wilayah-wilayah di Indonesia secara merata dan berkelanjutan. Kebijakan pengembangan wilayah menjadi salah satu perwujudan dari upaya pemanfaatan potensi wilayah secara optimal sesuai dengan karakteristik masing-masing, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi disparitas antar wilayah, dan mencapai tujuan pembangunan nasional secara menyeluruh.

Dalam pengembangannya, Jakarta juga beraglomerasi dengan daerah sekitarnya yaitu Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur menjadi sebuah Kawasan Metropolitan Jabodetabekpunjur. Oleh karena itu, setiap perencanaan pembangunan di Jakarta tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus bekerja sama dan berkoordinasi dengan daerah sekitarnya, agar pengembangan kewilayahan di kawasan Perkotaan

Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur dapat berjalan dengan baik dan tidak saling tumpang tindih satu sama lain.

Kawasan Metropolitan Jabodetabekpunjur diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur). Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur bertujuan untuk mewujudkan Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur sebagai Kawasan Perkotaan yang merupakan pusat kegiatan perekonomian berskala internasional, nasional, maupun regional yang terintegrasi antara satu kawasan dengan kawasan lainnya, berbasis daya dukung lingkungan dan memiliki keterpaduan dalam pengelolaan kawasan. Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur mencakup:

- a. seluruh wilayah Jakarta;
- b. seluruh wilayah Kota Bogor;
- c. seluruh wilayah Kabupaten Bogor;
- d. seluruh wilayah Kota Depok;
- e. seluruh wilayah Kota Tangerang;
- f. seluruh wilayah Kabupaten Tangerang;
- g. seluruh wilayah Kota Tangerang Selatan;
- h. seluruh wilayah Kota Bekasi;
- i. seluruh wilayah Kabupaten Bekasi;
- j. sebagian wilayah Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, yang mencakup Kecamatan Cipanas, Kecamatan Cugenang, Kecamatan Pacet, dan Kecamatan Sukaresmi.

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang di Kawasan Metropolitan Jabodetabekpunjur adalah sebagai berikut.

Tabel 2.26 Kebijakan dan Strategis Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur

No	Kebijakan	Strategi
1.	Pengembangan dan pemantapan sistem kota-kota secara hierarki dan terintegrasi dalam bentuk Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya sesuai dengan fungsi dan perannya	<ol style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan Jakarta sebagai pusat pemerintahan nasional, pusat perekonomian dan jasa skala internasional, nasional, dan regional, serta mendorong perkotaan sekitarnya yang berada dalam kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur untuk mendukung kegiatan perkotaan inti. b. Mendorong pengembangan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya sesuai peran dan fungsinya masing-masing. c. Meningkatkan keterkaitan Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya dalam rangka mendukung keterpaduan peran fungsi antara kota inti

No	Kebijakan	Strategi
		<p>dan kota sekitarnya melalui penyediaan infrastruktur yang terintegrasi; dan</p> <p>d. Mendorong terselenggaranya pengembangan kawasan yang berdasar atas keterpaduan antardaerah sebagai satu kesatuan wilayah perencanaan.</p>
2.	Pengendalian perkembangan Kawasan Perkotaan Inti untuk membatasi penjalaran pertumbuhan ke kawasan sekitarnya	<p>a. Mengembangkan konsep kota kompak (<i>compact city</i>) di kawasan Perkotaan inti.</p> <p>b. Meningkatkan pembangunan perumahan vertikal di Kawasan Perkotaan Inti; dan</p> <p>c. Menyebarkan beberapa fungsi dan peran lain ke Kawasan Perkotaan di Sekitarnya sesuai potensi yang dimiliki.</p>
3.	Pengembangan sistem prasarana untuk meningkatkan keterkaitan antara Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya, serta meningkatkan keterhubungan dalam konteks internasional dan nasional	<p>a. Meningkatkan keterpaduan dalam penyediaan sistem prasarana dan aksesibilitas antara Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya untuk mendukung terwujudnya Struktur Ruang yang efektif dan efisien;</p> <p>b. Mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan dan memantapkan manajemen dan rekayasa lalu lintas.</p> <p>c. Mengembangkan sistem transportasi massal melalui pengembangan jalur komuter berbasis jalan dan rel, serta pengembangan prasarana transportasi berbasis air.</p> <p>d. Mengembangkan keterpaduan sistem transportasi Kawasan perkotaan melalui konsep Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit (<i>Transit Oriented Development</i>); dan</p> <p>e. Mengembangkan keterpaduan sistem jaringan transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara, untuk menjamin aksesibilitas yang tinggi antar-PKN dan antarnegara.</p>

Sumber: Rancangan Peraturan Daerah RTRW Provinsi DKI Jakarta



Jakarta
Kota Global
Berjuta Pesona



BAB 03

Permasalahan dan isu strategis

Bersama dengan cita-cita yang besar, terdapat tantangan yang dihadapi, dalam pertumbuhan ekonomi, riset, dan inovasi, lingkungan, layanan dan infrastruktur dasar, aksesibilitas, ketahanan sosial budaya, serta tata kelola dan kerja sama dalam upaya mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing

BAB 3

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Permasalahan Jakarta

Jakarta telah berhasil mewujudkan berbagai pembangunan hingga dapat menjadi Jakarta saat ini. Namun demikian, dalam upaya mencapai cita-cita Jakarta di masa depan, terdapat berbagai isu dan tantangan yang dihadapi. Berbagai isu dan tantangan tersebut meliputi berbagai aspek mulai dari ekonomi, sosial budaya, infrastruktur, lingkungan, dan tata kelola. Beberapa isu dan tantangan pembangunan ke depan, yaitu:

PDRB per kapita Jakarta belum kompetitif dibanding dengan kota global di negara maju. Jakarta memiliki PDRB yang paling tinggi di Indonesia, bahkan menjadi kontributor utama PDB Nasional hingga 16,9 persen pada tahun 2022. Jakarta juga memiliki *share* terbesar hingga 70 persen dalam PDRB metropolitan Jabodetabek yang merupakan penyumbang 23 persen dari PDB nasional sesuai dengan data BPS tahun 2023. Namun demikian, jika dilihat dari PDRB per kapita dan dibandingkan dengan kota global lainnya, PDRB per kapita Jakarta masih rendah dan belum kompetitif. Jakarta memiliki jumlah penduduk 10,67 juta jiwa. Dalam lima tahun terakhir, Jakarta mencapai PDRB per kapita paling tinggi pada tahun 2022 sebesar Rp 298.630.000 juta atau USD 17.996 menurut *Global Power City Index*. Sementara itu, pada tahun 2022 PDRB per kapita Singapura mencapai USD 59.828 dan Tokyo mencapai USD 88.322. Jika dibandingkan dengan New York yang merupakan kota dengan peringkat lima besar kota global selama lima tahun terakhir, Jakarta masih jauh tertinggal dengan PDRB per kapita New York yang mencapai USD 122.980. Rendahnya PDRB per kapita Jakarta dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk di Jakarta yang pesat namun tidak disertai dengan peningkatan kualitas tenaga kerja dan lapangan pekerjaan yang bernilai tambah tinggi.

Tingkat konsumsi masyarakat Jakarta mempengaruhi PDRB secara signifikan. Meskipun pendapatan per kapita di Jakarta relatif tinggi dibandingkan daerah lain di Indonesia, namun tidak semua masyarakat mampu melakukan pengeluaran (*spending*) yang tinggi pula, sedangkan berdasarkan data BPS tahun 2011 sampai dengan 2023, komponen konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi rata-rata sebesar 71,2 persen terhadap pertumbuhan PDRB. Selain itu, konsumsi pemerintah belum memberikan kontribusi yang signifikan dengan porsi rata-rata 14,89 persen. Investasi perlu didorong untuk menjadi daya ungkit perekonomian serta membuka lapangan pekerjaan yang luas. Kegiatan ekspor dan impor masih perlu didorong untuk bisa memberikan efek berganda pada produktivitas ekonomi kota dilihat dari nilai impor

Jakarta masih lebih besar daripada ekspor sehingga memberikan proporsi -41,25 persen.

Kualitas tenaga kerja yang ada menjadi faktor penting dalam peningkatan produktivitas penduduk Jakarta. Selain itu, penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan pendidikan yang ada (*link and match*) juga menjadi kunci dalam peningkatan kualitas lapangan kerja dan pendapatan per kapita penduduknya. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah, berdasarkan proyeksi penduduk 2020-2050, Jakarta termasuk ke dalam daerah yang cukup cepat memasuki *aging population* dan diperkirakan pada tahun 2040 rasio ketergantungan penduduk Jakarta sudah lebih dari 50 persen. Artinya 2 orang penduduk produktif menanggung lebih dari 2 orang penduduk non-produktif. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Jakarta dalam 2 dekade terakhir stagnan di level ± 5 persen. Fenomena ini menjadi tantangan bagi Jakarta ke depan untuk dapat memperkuat produktivitas masyarakat Jakarta dan meningkatkan PDRB per kapita Jakarta sehingga mampu bersaing dengan kota-kota global lainnya di negara maju.

Ketimpangan pendapatan masih tinggi dan akses terhadap fasilitas publik serta pelayanan dasar yang berkualitas belum merata. Selama 15 tahun terakhir, rasio gini Jakarta berada di kelompok moderat (0,3 - 0,5) dengan tren meningkat. Hal ini sekaligus menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat di Jakarta selama 15 tahun terakhir, tetapi belum dapat dirasakan dampaknya secara luas oleh seluruh penduduk. Rasio gini Jakarta merupakan tertinggi kedua di Indonesia dengan angka melebihi rasio gini rata-rata nasional di tahun 2023. Jika dibandingkan dengan kota global lainnya, ketimpangan pendapatan sudah tidak begitu tinggi, salah satunya rasio gini di Singapura menunjukkan angka 0,37 dan cenderung stabil (terkontrol). Ketimpangan yang terjadi di Jakarta disebabkan adanya perangkap demografi pada rumah tangga miskin yang bekerja di sektor informal dan berpenghasilan kecil, namun menanggung 4 – 5 anggota keluarga. Tingginya ketimpangan di Jakarta juga disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang diterima masyarakat kelas atas lebih cepat dibandingkan dengan kelas menengah – bawah. Selain itu, hingga saat ini masih terdapat kesenjangan akses masyarakat terhadap fasilitas publik dan layanan dasar yang berkualitas, sehingga berimplikasi pada kualitas hidup masyarakat yang tidak merata, terutama di Kepulauan Seribu. Hal ini ditunjukkan dengan nilai IPM Kepulauan Seribu sebesar 72,79 berada di bawah rata-rata nilai IPM Jakarta 83,55 dan menjadi nilai IPM terendah di Jakarta pada tahun 2023. Ketimpangan pendapatan menjadi tantangan besar bagi Jakarta sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional untuk dapat meningkatkan produktivitas ekonomi yang tinggi dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di semua lapisan.

Tingkat Pengangguran Terbuka Jakarta masih tinggi. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Tingkat Pengangguran Terbuka Jakarta memiliki tren yang baik, yakni mengalami perbaikan dengan capaian terbaik pada tahun 2019 sebesar 6,22 persen.

Akibat pandemi Covid-19, pada tahun 2020 mengalami penurunan namun kembali naik di tahun 2022 mencapai 7,18 persen. Namun demikian, angka ini termasuk tinggi baik di tingkat nasional maupun global. Pada tahun 2023, Tingkat Pengangguran Terbuka Jakarta berada di angka 6,53 persen yang menempati peringkat ke-4 di Indonesia. Sedangkan, jika dibandingkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka di kota global lainnya, Jakarta masih sangat tinggi dibandingkan dengan Singapura dengan TPT 1,9 persen, Tokyo 2,7 persen, dan New York 5,3 persen di tahun 2023. Berdasarkan data BPS, penyumbang TPT terbesar Jakarta selama kurun waktu 5 tahun terakhir adalah lulusan SMA dan SMK yang mencapai 244.756 jiwa atau 64,89 persen terhadap total angkatan kerja di tahun 2022. Kerja sama SMA/SMK dengan Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI) dalam peningkatan kualitas pendidikan vokasi di SMK juga masih rendah.

Tingginya angka pengangguran dipengaruhi oleh kualitas tenaga kerja yang kurang kompetitif serta ketersediaan lapangan pekerjaan yang tidak sesuai dengan pendidikan dan keterampilan yang ada (*mismatch*). Jika dilihat dari struktur ekonomi Jakarta, sektor jasa, perdagangan, dan TIK menjadi sektor yang dominan dalam perekonomian kota. Sedangkan, lapangan pekerjaan dengan nilai tambah tinggi pada sektor tersebut belum dapat diakses secara merata oleh semua masyarakat karena membutuhkan kualifikasi SDM yang tinggi pula. Selain itu, tenaga kerja yang ada di Jakarta belum mampu berdaya saing di kancah global. Hal ini ditunjukkan dengan peringkat *Global Talent Competitiveness Index* dari INSEAD, Jakarta yang berada di posisi 133, sedangkan beberapa kota global lainnya seperti Singapura berada di peringkat 6, New York peringkat 23, dan Seoul 68 di tahun 2022. Saat ini, seluruh kota di dunia sudah memasuki era perkembangan digital dan teknologi yang begitu cepat. Disrupsi teknologi menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk seluruh kota, tidak terkecuali Jakarta. Untuk dapat berkompetisi di pasar kerja internasional, penduduk Jakarta harus mampu meningkatkan penguasaan teknologi dan mampu beradaptasi pada proses digitalisasi yang cepat di semua aspek.

Tantangan lain yang dihadapi Jakarta dalam 20 tahun ke depan adalah transformasi ekonomi hijau yang akan mempengaruhi jenis lapangan pekerjaan yang tersedia, yaitu lapangan kerja hijau (*green job*). Hal ini akan berimplikasi pada perlunya Jakarta untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas tenaga kerjanya agar mampu bersaing dan menjawab tantangan yang ada. Di samping itu, Jakarta diproyeksikan mengalami penuaan penduduk (*aging population*) dalam dua puluh tahun mendatang sehingga memberikan dampak terhadap pada struktur penduduk dan lapangan pekerjaan yang diperlukan di masa depan.

Efisiensi investasi Jakarta perlu ditingkatkan. Statistik realisasi investasi Jakarta pada Januari-Desember Tahun 2023 menunjukkan lanskap investasi yang kuat. Jakarta menempati posisi kedua yaitu sebesar Rp166,7 triliun (11,7 persen) terhadap capaian realisasi penanaman modal nasional. Realisasi penanaman modal di Jakarta periode

Januari – Desember 2023 sebesar Rp166,7 triliun atau meningkat sebesar 16,6 persen dari tahun 2022 (Rp143,0 triliun) pada periode yang sama. Namun demikian, tingkat efisiensi investasi Jakarta masih lebih rendah dari nasional dengan nilai ICOR Jakarta 7,54 dan ICOR Nasional 6,25. Semakin tinggi nilai ICOR sebuah daerah, maka tingkat efisiensi investasinya semakin rendah. Tingginya nilai ICOR di Jakarta dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia disebabkan oleh PDRB yang lebih tinggi dibandingkan daerah lain, namun Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang ada relatif kurang meningkatkan PDRB. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya investasi terhadap riset, teknologi, dan inovasi, regulasi dan birokrasi yang kompleks, biaya logistik yang tinggi, sumber daya manusia yang kurang produktif, dan korupsi.

Efisiensi investasi Jakarta perlu dilakukan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi di Jakarta yang maksimal. Ke depan, investasi Jakarta perlu diarahkan kepada riset, inovasi, investasi hijau, dan investasi berorientasi ekspor. Investasi berorientasi ekspor dapat mengembangkan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif serta meningkatkan partisipasi Jakarta dalam rantai produksi global. Peningkatan efisiensi investasi dapat dimulai dengan penciptaan iklim investasi yang kondusif didorong dengan simplifikasi prosedur investasi dan bisnis, serta penguatan kepastian berusaha.

Rendahnya partisipasi untuk memperoleh pendidikan dini, dasar, dan menengah. Saat ini, Jakarta didominasi oleh penduduk berusia produktif dan untuk menjadi daerah yang unggul, maka potensi sumber daya manusia tersebut penting untuk dioptimalkan sejak usia sekolah. Pada tingkat pendidikan dini, capaian APK PAUD Jakarta berada di bawah capaian nasional pada 6 tahun terakhir. Padahal, pendidikan anak usia dini yang berkualitas diperlukan dalam pembangunan manusia dalam jangka panjang. Anak-anak yang mendapatkan pendidikan dini yang baik memiliki kesempatan untuk berkembang lebih optimal baik dari segi kognitif, emosional, sosial, dan motorik sehingga anak lebih siap memasuki pendidikan formal pada tingkat dasar dan menengah. PAUD juga berperan dalam pendeteksian dini permasalahan fisik maupun psikologis anak yang mampu menghambat tumbuh kembang dalam tahun-tahun mendatang. Kesempatan ini dapat digunakan untuk memberikan intervensi terhadap anak sebelum kondisi anak semakin memburuk.

Partisipasi siswa pada tingkat pendidikan dasar dan menengah menunjukkan fluktuasi yang pada periode 2020/2021 hingga 2022/2023 menunjukkan penurunan APK sementara di saat yang bersamaan stagnasi APM. Di satu sisi, hal ini mengindikasikan kesempatan belajar pada kelompok usia yang seharusnya masuk SD dan SMA dapat terjaga, tetapi peningkatan APM tanpa adanya peningkatan signifikan pada APK menunjukkan penurunan kualitas pendidikan masyarakat secara umum karena adanya indikasi rendahnya partisipasi oleh penduduk yang berhenti atau mengulang sekolah. Salah satu penyebabnya adalah ketidakstabilan ekonomi terutama pada saat pandemi

Covid-19 yang mengubah prioritas penduduk untuk mencari pekerjaan dibandingkan melanjutkan pendidikan. Dalam jangka panjang, rendahnya APK pada jenjang pendidikan dasar dapat memengaruhi kualitas sumber daya manusia karena pendidikan dasar merupakan fondasi utama dalam pendidikan selanjutnya. Hal ini turut berkontribusi pada rendahnya partisipasi masyarakat untuk mengenyam pendidikan tinggi dan berkontribusi pada aktivitas ekonomi yang produktif.

Rendahnya kualitas capaian peserta didik. Dari segi kualitas, capaian peserta didik Jakarta belum mencerminkan keunggulan dan kesiapan untuk bersaing pada tingkat global. Berdasarkan hasil Asesmen Nasional, satuan pendidikan di Jakarta telah mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca sebanyak 67,64 persen, sedangkan untuk numerasi sebanyak 30,96 persen.

Daya serap lulusan pendidikan vokasi masih rendah. Pada tahun 2019, Jakarta menempati urutan keempat persentase tingkat pengangguran terbuka SMK tertinggi dengan total jumlah sebanyak 108.184 orang. Dari jumlah tersebut, terdapat 38.772 siswa atau 35,83 persen berusia 18-21 tahun yang berarti terdapat masa tunggu untuk mendapatkan pekerjaan atau terserap lapangan pekerjaan ketika lulus. Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian kompetensi keahlian dengan sektor usaha di Jakarta. Pada tahun 2019, lulusan SMK terbanyak berasal dari kompetensi keahlian Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran; Akuntansi dan Keuangan Lembaga; dan Bisnis Daring dan Pemasaran, sedangkan sektor usaha yang banyak menyerap lulusan SMK adalah Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil; Transportasi dan Pergudangan; serta Industri Pengolahan. Dapat disimpulkan, terjadi kelebihan jumlah lulusan di bidang-bidang yang tidak mudah terserap oleh sektor-sektor usaha di Jakarta. Ketidaksesuaian antara lulusan SMK dan sektor usaha juga dapat menyebabkan rendahnya kualitas tenaga kerja secara keseluruhan dan kesenjangan pendapatan akibat kualitas pekerjaan yang tidak baik.

Budaya hidup sehat dan bersih serta layanan kesehatan belum optimal dalam mengeliminasi penyakit menular dan mencegah penyakit tidak menular. Jumlah kasus penyakit menular, seperti tuberkulosis dan kusta, di Jakarta masih cukup tinggi dibandingkan dengan kota-kota global lainnya. Misalnya pada kasus tuberkulosis, jumlah kasus yang dilaporkan di Jakarta sebanyak 26.854 kasus. Bila dibandingkan dengan kota global lain seperti Tokyo (1.429 kasus), Berlin (4.076 kasus), dan London (1.464 kasus), jumlah kasus di Jakarta lebih tinggi. Padahal, salah satu karakteristik kesehatan masyarakat kota-kota global adalah rendahnya insiden tuberkulosis. Selain itu, tingginya penyakit menular dapat mengancam kesehatan masyarakat secara keseluruhan, menurunkan produktivitas sumber daya manusia, membebani layanan kesehatan, dan menghambat pembangunan ekonomi.

Sumber daya manusia yang tidak produktif juga ditengarai oleh penyakit tidak menular yang mampu menurunkan kualitas hidup orang tersebut. Faktor penyebab kematian dan

disabilitas tertinggi di Jakarta adalah penyakit tidak menular seperti stroke, jantung iskemik, diabetes, dan obesitas sentral. Misalnya, prevalensi obesitas Jakarta pada tahun 2022 adalah 29,8 dan tertinggi kedua secara nasional.

Selain itu, kasus tengkes (*stunting*) yang tinggi, terutama di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, menjadi bukti ketimpangan pelayanan kesehatan khususnya bagi ibu dan anak. Secara keseluruhan, prevalensi *stunting* Jakarta sebesar 17,6 persen pada tahun 2023 dan persentase tersebut jauh di atas rata-rata prevalensi kota di negara maju yang hanya 5 persen. Salah satu penyebabnya adalah layanan kesehatan primer, salah satunya posyandu yang belum maksimal. Jumlah posyandu aktif hanya berkisar 8,7 persen yang menandakan layanan kesehatan primer yang pasif dan belum partisipatif dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar, penyuluhan, serta pemantauan kesehatan keluarga, gizi, dan lingkungan.

Pembangunan kepeloporan dan kepemimpinan pemuda yang dilakukan belum sinkron dan terintegrasi secara optimal sehingga belum mampu berperan sebagai mitra pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat. Terjadi kecenderungan penurunan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dari tahun 2018 hingga tahun 2023 yang mengindikasikan adanya penurunan kondisi pada indikator pada kesejahteraan pemuda dalam hal pendidikan, kesehatan, kesempatan bekerja; keterlibatan pemuda dalam kegiatan positif dan produktif seperti pelatihan, pengembangan keterampilan dan kontribusi terhadap masyarakat; dan kualitas hidup pemuda, terutama akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Pencapaian IPP pada tahun 2023 sebesar 52,67 berada di bawah pencapaian nasional. Capaian ini menjadi tantangan mengingat pemuda sebagai agen perubahan serta mitra pemerintah dalam pembangunan daerah yang menentukan arah pembangunan masa depan Jakarta. Kesenjangan kualitas pemuda dapat memberikan hambatan bagi perkembangan kemajuan ekonomi, sosial, dan politik.

Pembangunan kebudayaan masih kurang berperan dalam membentuk karakter dan jati diri masyarakat yang berdaya saing global. Interaksi global yang tidak bisa dihindarkan pada masa ini memperkuat dampak globalisasi terhadap kondisi sosial masyarakat Jakarta. Salah satu efek globalisasi adalah terjadinya pelemahan nilai-nilai positif pada sebagian kelompok masyarakat seperti kejujuran, empati, kesukarelawanan, dan toleransi. Hal ini diperparah oleh perubahan pola interaksi yang semakin individualistis. Kondisi ini menimbulkan degradasi moral, konflik, rasa tidak aman, kerentanan yang mengancam harmonis dan keberfungsian sosial dalam keluarga dan masyarakat. Salah satu alat ukur untuk menilai perubahan ini adalah Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK). Pencapaian IPK Jakarta mengalami fluktuasi dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Pada tahun 2022, nilai IPK Jakarta sebesar 54,72 dan nilai tersebut berada di bawah nilai IPK nasional (55,13).

Ketimpangan pembangunan gender dan kekerasan berbasis gender masih tinggi.

Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di Jakarta menjadi perhatian utama karena masih terdapat sejumlah permasalahan yang perlu diatasi. Salah satu masalah yang muncul adalah ketidaksetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan. Meskipun ada kemajuan dalam mewujudkan kesetaraan gender, (IPG) Jakarta yang berada di angka 96,40. Meskipun berada di atas rata-rata nasional tetapi masih menunjukkan bahwa manfaat dan hasil pembangunan untuk perempuan masih di bawah dari laki-laki. Selain itu, kekerasan terhadap perempuan dan anak juga menjadi isu serius. Isu kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A) di Jakarta yang layaknya fenomena gunung es jumlah kasus pada tahun-tahun sebelumnya cukup besar namun belum terungkap. Pada periode 2019-2021, tercatat sebanyak 3.439 orang menjadi korban kekerasan serta tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Infrastruktur digital masih tertinggal dibanding kota-kota global di negara maju.

Kapasitas infrastruktur digital dapat diukur menggunakan cakupan layanan serta kualitas internet. Kecepatan internet Jakarta pada tahun 2023 untuk *download* sebesar 39,55 Mbps, sementara untuk *upload* sebesar 32,03 Mbps angka tersebut masih di bawah rata-rata dunia yang memiliki kecepatan *download* 90,93 Mbps dan kecepatan *upload* 41,76 Mbps. Kondisi ini salah satunya disebabkan karena cakupan layanan 5G yang belum optimal, dan baru mencapai 22 persen dari seluruh wilayah Jakarta. Dengan kualitas kecepatan internet yang baik secara ekonomi dapat meningkatkan produktivitas perusahaan dan pekerja, pembukaan lapangan pekerjaan, efektivitas proses produksi, dan mengakselerasi inovasi. Dari segi sumber daya manusia kualitas internet dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan membantu menurunkan tingkat kemiskinan.

Angka kemiskinan stagnan dan indeks gini dalam lima tahun terakhir terus meningkat sampai 0,42. Tingkat kemiskinan Jakarta pada tahun 2018 - 2022 meningkat dan cenderung stagnan di rentang 4,53 - 4,69 sedangkan target nasional dan Jakarta adalah mewujudkan tingkat kemiskinan menuju 0. Rasio gini terus meningkat dalam lima tahun terakhir, menunjukkan semakin rendahnya peran kelompok penduduk dengan pendapatan rendah dalam pembentukan total pendapatan yang diterima penduduk Jakarta. Artinya, ketimpangan antarkelompok pendapatan semakin meningkat setiap tahunnya.

Dampak pandemi Covid-19 pada tahun 2019 - 2020 yang menyebabkan pemberhentian tenaga kerja masih memengaruhi kondisi ketenagakerjaan sampai saat ini. Penduduk berpendapatan rendah adalah kelompok yang paling rentan mengalami dampak yang signifikan apabila terjadi krisis ekonomi. Kemiskinan dan ketimpangan tidak hanya mengenai pendapatan, namun juga berkorelasi erat dengan aspek kesehatan, pendidikan, dan kualitas hidup masyarakat. Permasalahan sosial ekonomi ini perlu mendapatkan perhatian yang serius dari Pemerintah Jakarta untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera secara adil dan merata.

Pariwisata dan ekonomi kreatif belum optimal dalam menarik wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Jakarta dan meningkatkan perekonomian secara signifikan. Nilai PDRB pariwisata baru berkontribusi 16,65 persen terhadap total PDRB Jakarta, sedangkan PDRB ekonomi kreatif berkontribusi tidak lebih dari 11 persen terhadap total PDRB. Jumlah wisatawan mancanegara sepanjang tahun 2023 sebanyak 1.963.059 wisatawan, berada jauh di bawah kota global lainnya seperti Singapura pada tahun 2023 dengan jumlah 13,6 Juta wisatawan dan Bangkok 19 Juta wisatawan. Beberapa hal yang menjadi penyebab belum optimalnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam menarik wisatawan mancanegara adalah harga tiket internasional yang mahal serta jumlah penerbangan langsung menuju Jakarta yang masih rendah. Hal ini membuat Jakarta belum dapat berdaya saing jika dibandingkan dengan kota-kota di negara lain yang memiliki tingkat aksesibilitas dan konektivitas internasional yang lebih tinggi.

Jakarta memiliki wisata urban, alam, dan budaya yang dapat dikembangkan menjadi daya tarik tersendiri, namun belum dioptimalkan. Selain itu, Jakarta perlu memberikan perhatian khusus kepada sektor ekonomi kreatif untuk berkembang karena sektor ini menjadi salah satu kontributor utama dalam pendapatan daerah dan penyediaan lapangan pekerjaan. Jakarta memiliki 17 subsektor ekonomi kreatif yang dapat dikembangkan, yaitu *fashion*, pasar seni dan barang antik, permainan interaktif, film, video dan fotografi, kerajinan, musik, desain, periklanan, televisi dan radio, seni pertunjukan, riset dan pengembangan, layanan komputer dan *software*, penerbitan dan percetakan, serta arsitektur. Jakarta memiliki potensi wisata lain yang dapat dikembangkan yaitu wisata kuliner. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif perlu didorong pertumbuhannya karena sektor ini merupakan salah satu sumber pendapatan dan investasi yang efektif, serta dapat dianggap sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan masyarakat Jakarta.

Rendahnya penggunaan transportasi publik Sebagai metropolitan kedua terbesar di dunia, Jakarta saat ini termasuk ke dalam 10 besar kota metropolitan termacet di dunia dengan Rata-rata jarak dan waktu tempuh perjalanan menuju sekolah/tempat kerja mencapai 52 menit untuk menempuh 17 km. Rata-rata waktu yang dihabiskan penduduk Jakarta akibat kemacetan dalam satu tahun mencapai 169 jam, masih lebih panjang dibandingkan kota lain seperti Bangkok (136 jam), London (134 jam), dan New York (114 jam). Menurut kajian JUTPI, dikutip dari laporan Asian Development Bank (ADB), kemacetan lalu lintas berdampak negatif terhadap ekonomi negara-negara di Asia dengan estimasi kerugian sebesar 2-5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) tiap tahunnya. Kerugian ekonomi terjadi akibat dari waktu perjalanan dan semakin tingginya biaya transportasi. Atas dasar perhitungan variabel *Value of Time (delay)* dan *Vehicle Operating Cost*, kerugian ekonomi di Jabodetabek akibat kemacetan mencapai Rp. 40 Triliun untuk biaya operasional transportasi dan Rp. 60 Triliun untuk waktu perjalanan setiap tahunnya.

Salah satu penyebab utama permasalahan kemacetan Jakarta adalah rendahnya penggunaan transportasi publik yang saat ini baru mencapai 18,86 persen yang masih sangat jauh jika dibandingkan kota-kota global lain seperti Singapura (61 persen), Tokyo (61,7 persen), dan Shanghai (43,3 persen). Selain dari sisi kota Jakarta, penggunaan kendaraan pribadi dari wilayah penyangga Jakarta sangat tinggi, mencapai 90,3 persen. Karenanya peningkatan cakupan dan kualitas layanan transportasi publik sangat dibutuhkan untuk menjadikan Jakarta kota global yang berdaya saing sangat dibutuhkan dalam pengurangan kemacetan. Sementara itu dari sisi lingkungan, penggunaan transportasi publik akan meningkatkan efisiensi penggunaan energi di Jakarta yang secara linier mengurangi gas rumah kaca.

Aksesibilitas dan konektivitas ke Kepulauan Seribu masih terhambat. Jakarta tidak hanya terdiri dari pulau utama yang berada di bagian utara Pulau Jawa, namun juga pulau-pulau kecil yang berada di administrasi Kabupaten Kepulauan Seribu. Akses dari Kepulauan Seribu menuju *main land* dan sebaliknya menggunakan transportasi air atau kapal. Namun saat ini belum sepenuhnya rute reguler melingkupi seluruh wilayah Kepulauan Seribu, seperti dari *main land* ke Pulau Sebira ataupun antarpulau permukiman. Di sisi lain okupansi harian di saat hari libur mencapai lebih dari 100 persen kapasitas pelayanan. Selain dari sisi cakupan pelayanan kualitas pelayanan juga masih menjadi tantangan. Saat ini kapal tradisional merupakan tulang punggung transportasi manusia dan barang antara Kepulauan Seribu dan Jakarta, namun kualitasnya belum mumpuni, seperti performa kapal, hingga sistem tiket. Hal ini menjadi catatan penting untuk ke depannya diperbaiki.

Konektivitas ke Kepulauan Seribu merupakan bentuk keberpihakan dan pemerataan. Saat ini dari beberapa indikator makro pembangunan, Kabupaten Kepulauan Seribu berada di bawah rata-rata capaian Jakarta secara umum. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh konektivitas yang belum merata. Di sisi lain Kepulauan Seribu memiliki potensi sumber daya alam yang mumpuni, terutama untuk pariwisata. Konektivitas antara Kepulauan Seribu dan daratan utama Jakarta dapat menimbulkan simbiosis mutualisme yang baik, antara pemerataan pembangunan serta akselerasi ekonomi melalui pariwisata.

Tantangan mempertahankan dan meningkatkan performa pelayanan publik Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dibutuhkan pegawai ASN yang bertalenta. Dalam hal ini adalah pegawai ASN yang memiliki kompetensi dan kinerja yang tinggi, serta profesionalisme, sehingga dapat mendukung prioritas pembangunan daerah dengan efektif dan efisien. Pemerintah Jakarta perlu mewujudkan dan meningkatkan kualitas pegawai ASN melalui manajemen talenta untuk meningkatkan kondisi lingkungan kerja dengan mengembangkan proses rekrutmen dan seleksi,

pengembangan, pengikatan, dan mempertahankan pegawai yang memiliki keahlian dan bakat dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi di masa sekarang ini dan di masa yang akan datang.

Sebagai upaya untuk mengoptimalkan penerapan sistem merit di lingkungan Pemerintah Jakarta khususnya pada aspek pengembangan karier serta aspek promosi dan mutasi, Pemprov DKI Jakarta dapat melaksanakan pengembangan dan pembaharuan *database* secara berkala pada aplikasi *talent pool* serta melaksanakan pengisian jabatan di semua level melalui manajemen talenta.

Pengeluaran riset belum menunjukkan komitmen dalam mendukung penciptaan inovasi dan pengembangan bisnis Dalam kaitannya dengan riset dan inovasi, Jakarta saat ini jauh tertinggal dibanding kota-kota global lainnya. Menurut Global Power City Index posisi dalam aspek *research and development* Jakarta berada di peringkat 45 dari 48 kota, bahkan masih tertinggal dibanding kota-kota di ASEAN lain seperti Bangkok dan Kuala Lumpur. Salah satu aspek yang menonjol dan menunjukkan komitmen pembangunan riset dan inovasi adalah pengeluaran riset. Pengeluaran riset Jakarta 2023 sebesar 50,9 juta US\$ (0,024 persen PDRB) jauh lebih rendah dibandingkan kota global lain seperti Seoul 10,4 miliar US\$ (3,28 persen PDRB) dan Singapura 6,6 miliar US\$ (1,92 persen PDB).

Selain pengeluaran riset, menurut GPCI salah satu aspek yang inovasi adalah jumlah *startup* pada suatu kota. Pada tahun 2020 jumlah *startup* di Jakarta sebanyak 377, sementara Shanghai memiliki 971, Tokyo 1.200, dan Singapura 4.000. Hal ini menunjukkan Jakarta belum menjadi kota yang “ramah” bagi model bisnis berbasis inovasi. Karenanya ke depan, Jakarta perlu meningkatkan komitmen dalam bidang riset dan inovasi, serta meningkatkan jejaring kerja sama dengan pihak swasta. Dengan hal tersebut Jakarta dapat mengakselerasi pembangunan ekonomi yang berbasis riset dan inovasi dalam meningkatkan daya saing kota.

Minimnya sumber daya riset di Jakarta. Salah satu faktor terpenting dalam peningkatan riset dan inovasi adalah subjek yang melakukan riset. Hal ini dapat terdiri dari lembaga Litbang di pemerintahan, universitas, bidang riset dan pengembangan (R&D) pada industri, hingga peneliti independen. Saat ini jumlah periset di Jakarta sebanyak 3.375/1juta penduduk, jauh lebih sedikit dibandingkan kota global lain seperti Seoul (15.483), Beijing (15.705), dan Singapura (7.225). Sementara itu dari segi kualitas sumber daya riset dari dunia universitas, Jakarta memiliki 1 universitas top 1000 dunia (Universitas Indonesia), sementara kota lain seperti London memiliki lebih dari 15 universitas, Bangkok memiliki 4 universitas, dan Singapura 2 universitas yang keduanya menempati peringkat 19 dan 32 universitas terbaik dunia. Ke depan Jakarta perlu meningkatkan kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya riset yang lebih mumpuni untuk menjadi penggerak pengembangan riset dan

inovasi dalam mengakselerasi pembangunan ekonomi dan penyelesaian masalah perkotaan berbasis riset.

Tata kelola pemerintahan sebagai fondasi utama pembangunan Jakarta perlu dipertahankan dan dioptimalkan. Salah satu permasalahan yang terjadi adalah kompleksitas struktur organisasi pemerintah daerah yang sering kali menyebabkan tumpang tindih tugas dan tanggung jawab. Sistem kelembagaan yang kompleks dapat menghambat efisiensi dan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Adanya banyak unit dan badan yang saling tumpang tindih dalam melakukan fungsi tertentu dapat memperlambat proses pengambilan keputusan dan menyulitkan koordinasi antarinstansi. Oleh karena itu, perlu upaya restrukturisasi yang lebih efisien untuk mengatasi masalah ini. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan perlu diperkuat. Walaupun sudah ada kemajuan, masih terdapat kebutuhan untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik, menyederhanakan proses birokrasi, dan meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah.

Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Jakarta yang masih rendah. sebagai sebuah kota metropolitan yang padat, Jakarta dihadapkan pada permasalahan terkait ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Persentase ketersediaan RTH Jakarta baru menyentuh angka 5,21 persen, hal ini berkontribusi untuk mencapai target persentase RTH publik sesuai dengan amanat UU Nomor 26 Tahun 2007 sebesar 20 persen. Minimnya lahan yang disediakan untuk RTH menjadi salah satu hambatan dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Pesatnya urbanisasi dan pertumbuhan populasi telah mengakibatkan tekanan besar terhadap lahan di Jakarta. Di kota-kota lain seperti Singapura, persentase luas Ruang Terbuka Hijau telah tersedia sebanyak 46 persen dan di Tokyo sebesar 30 persen.

Banyak lahan yang seharusnya dijadikan RTH telah dikonversi menjadi bangunan komersial, perumahan, atau infrastruktur transportasi. Hal ini menyebabkan keterbatasan akses masyarakat terhadap area terbuka yang diperlukan untuk kegiatan rekreasi, olahraga, dan sebagai penyeimbang ekosistem kota. Minimnya RTH bukan hanya menjadi masalah fisik, tetapi juga memiliki dampak serius terhadap kesehatan dan kualitas hidup penduduk Jakarta. Selain itu, RTH juga berperan dalam mitigasi risiko bencana, terutama banjir, yang menjadi ancaman reguler di Jakarta.

Sistem pengelolaan air bersih di Jakarta belum merata. Persentase Akses Air Minum Layak di Jakarta mencapai 99,42 persen (BPS, 2024) dengan cakupan Aman Perpipaan sebesar 66,73 persen (SAKIP, 2023) Sehingga masih terdapat gap sebesar 33,27 persen untuk mencapai 100 persen akses air minum aman dan berkelanjutan. Serta tingkat kebocoran pipa air bersih/*Non Revenue Water* (NRW) sebesar 45,61 persen (PAM Jaya, Laporan Realisasi RKA 2024) yang dapat mempengaruhi kualitas air perpipaan. Kota besar lainnya seperti Seoul telah memiliki cakupan perpipaan air bersih sebesar 94 persen yang menjangkau area perkotaan. Namun seiring pertumbuhan pesat populasi

dan urbanisasi yang tak terbandung telah menempatkan tekanan besar pada infrastruktur air bersih kota ini sehingga masih terdapat area yang menjadi krisis air bersih pada wilayah Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu serta masih belum terlayannya air perpipaan pada kawasan selatan Jakarta. Kurangnya infrastruktur yang memadai menjadi hambatan utama. Distribusi air bersih yang tidak merata di berbagai wilayah Jakarta menciptakan ketimpangan dalam akses penduduk terhadap layanan air. Beberapa daerah masih mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air yang memadai, sementara daerah lain mungkin mengalami kerugian air yang signifikan karena kebocoran dan infrastruktur yang belum memadai.

Perumahan dan permukiman masih menghadapi berbagai permasalahan. Rendahnya akses Rumah Tangga hunian layak di Jakarta sebesar 38,8 persen (BPS, 2023) dapat menjadi hambatan yang signifikan dalam upaya Jakarta menuju Kota Global yang berkelanjutan. Hal tersebut disebabkan oleh masih maraknya penggunaan material asbes sebagai atap pada hunian, tingkat kepadatan yang tinggi, serta belum optimalnya integrasi antara penyediaan perumahan dengan sarana prasarana. Pertumbuhan populasi yang pesat, urbanisasi yang tinggi, dan kurangnya regulasi yang efektif menyebabkan sejumlah masalah perlu diatasi. Kondisi di kota global lainnya, seperti di Singapura akses hunian layak telah mencapai angka 80 persen serta di kota Madrid sebesar 74 persen.

Salah satu tantangan utamanya adalah rasio luasan kawasan permukiman kumuh terhadap luasan Jakarta masih sebesar 9,23 persen (DPRKP, 2023), salah satu penyebabnya karena terkendala keterbatasan kewenangan pemerintah daerah yang tidak bisa menyentuh aset privat (bangunan dan lahan), sehingga intervensi dari Pemerintah terbatas pada perbaikan fisik lingkungan permukimannya (mencakup jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengolahan air limbah, pengolahan persampahan, dan proteksi kebakaran). Harga tanah yang tinggi dan kurangnya lahan yang tersedia membuat sulit bagi sebagian besar warga Jakarta, terutama mereka dengan pendapatan rendah, untuk memiliki atau menyewa perumahan yang layak. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan dan kesenjangan sosial yang signifikan dalam akses terhadap perumahan yang aman dan nyaman. Selain itu kampung kumuh terus menjadi realitas di beberapa bagian kota. Kurangnya infrastruktur dasar seperti sanitasi yang memadai dan akses air bersih menciptakan kondisi lingkungan yang tidak sehat dan dapat menyebabkan masalah kesehatan masyarakat.

Pengelolaan sanitasi dan pengelolaan air limbah masih terbatas. Jakarta menghadapi tantangan serius yang memerlukan perhatian mendalam untuk mencapai standar kesehatan masyarakat yang baik dan menjaga lingkungan yang berkelanjutan. Salah satu masalah mendasar adalah ketidakseimbangan antara pertumbuhan populasi dan infrastruktur sanitasi yang tersedia. Jumlah penduduk yang terus meningkat di Jakarta menyebabkan peningkatan limbah domestik dan komersial. Persentase Akses Sanitasi

Layak mencapai 93,50 persen (BPS, 2024) dengan cakupan Aman Perpipaan sebesar 21,18 persen (SAKIP, 2023) Sehingga masih terdapat gap sebesar 38,82 persen untuk mencapai 60 persen akses sanitasi aman, inklusif, dan berkelanjutan di Tahun 2045. Tingkat Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Jakarta mencapai 5,47 persen (Dinkes, 2023).

Pada perkembangan kota global lainnya seperti di kota Tokyo dan London cakupan pengelolaan air limbah telah mencapai angka 100 persen. Meskipun ada upaya untuk menyediakan fasilitas sanitasi, seperti pengembangan sistem perpipaan air limbah/ *sewerage* di Jakarta dengan Target cakupan pelayanan sebesar 80 persen pada tahun 2050, saluran pembuangan dan instalasi pengolahan air limbah, namun perkembangan kota yang cepat sering kali melampaui kemampuan infrastruktur yang ada. Akibatnya, sebagian besar masyarakat, terutama di permukiman padat penduduk dan kampung kumuh, masih mengandalkan sistem pembuangan air sederhana atau bahkan langsung ke saluran air tanpa pengolahan.

Pelayanan dan pengelolaan sampah belum menjangkau ke seluruh wilayah Jakarta.

Sebagai salah satu kota megapolitan terpadat di dunia, Jakarta dihadapkan pada tantangan serius dalam isu pengelolaan sampah. Pertumbuhan pesat populasi dan aktivitas ekonomi menyebabkan peningkatan volume sampah yang saat ini jauh melampaui kapasitas sistem pengelolaan yang ada. Salah satu masalah utama adalah kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai. Berdasarkan data Dinas LH tahun 2023 jumlah rata-rata sampah yang diangkut ke TPST Bantargebang sebesar 7.361 ton/hari dan telah mencakup 90 persen dari timbulan sampah yang ada di Jakarta. Analisis potensi timbulan sampah pada tahun 2022 mencapai 6.555,26 kg/kapita/hari, sedangkan laju pengurangan volume sampah terus menurun sejak tahun 2019.

Terjadi penurunan persentase penanganan sampah dalam kurun waktu 2018-2022. Pada tahun 2022, sampah yang tertangani (meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir) turun menjadi 73,68 persen dan persentase ini masih lebih rendah dibandingkan target SDGs Jakarta. Untuk persentase tingkat daur ulang sampah di Jakarta mencapai 20,26 persen, jika dibandingkan kota global lainnya masih Jakarta masih tertinggal seperti Brussels dengan capaian 39 persen dan Singapura 52 persen. Akibatnya, sebagian besar sampah akhirnya dibuang ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir), yang bukan solusi berkelanjutan dan dapat mencemari tanah dan air.

Perubahan iklim yang menjadi ancaman serius bagi Jakarta, terutama dalam beberapa dekade terakhir. Salah satu dampak paling nyata adalah kenaikan permukaan air laut yang mengancam wilayah pesisir kota. Jakarta, sebagai kawasan yang sebagian besar terletak di bawah permukaan laut, mengalami penurunan tanah signifikan, yang disebabkan oleh penggunaan air tanah secara berlebihan dan pembangunan tidak

terkendali. Kenaikan temperatur Jakarta 1,1oC selama 47 tahun (0,23oC per dekade), dan kenaikan cuaca ekstrem 15-26 persen pada periode ulang 100 tahunan dari kondisi saat ini menyebabkan terjadinya banjir karena cuaca ekstrem. Serta telah terjadi peningkatan emisi *direct* dan *indirect* sejak tahun 2020 hingga tahun 2022 yaitu total emisi sebanyak 60.399 Gg (ribu ton) CO₂e, sedangkan persentase reduksi emisi (selisih emisi GRK *baseline* dan inventori) menurun dari 27 persen (2021) menjadi 25,4 persen (2022), dimana kota global lainnya seperti Melbourne berhasil mereduksi emisi GRKnya sebesar 76 persen dari tahun 2011-2020. Puncak dari masalah ini adalah ketidakseimbangan antara tingkat curah hujan yang tinggi dan sistem drainase yang tidak memadai. Selain itu, perubahan iklim juga berkontribusi pada polusi udara yang semakin memburuk di Jakarta dan peningkatan suhu global menyebabkan cuaca yang lebih panas.

Tingginya risiko Bencana Banjir di Jakarta. Banjir di Jakarta menjadi permasalahan yang terus menghantui kota ini setiap tahunnya. Berdasarkan letaknya, Kota Jakarta termasuk dalam kota delta (*delta city*) yaitu kota yang berada pada muara sungai. Kota delta umumnya berada di bawah permukaan laut, dan cukup rentan terhadap perubahan iklim, terutama terkait banjir (BPLHD, 2013). Wilayah Jakarta merupakan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) bagian hilir dari beberapa DAS yaitu DAS Ciliwung, DAS Pesanggrahan, DAS Angke, DAS Cakung, DAS Sunter, dan DAS Krukut Grogol. Selain itu, karakteristik ekoregion daratan Jakarta hampir 50 persen luasnya memiliki karakteristik ekoregion rawan banjir yaitu berupa ekoregion fluvial bermaterial alluvium, fluviomarine dan dataran organik. Sampai tahun 2020, masih terdapat 40 persen wilayah yang berisiko tinggi terdampak banjir pada Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur. Kejadian banjir di wilayah Jakarta yang merupakan hilir DAS ini tidak dapat dipisahkan dengan kondisi di wilayah DAS bagian Hulu dan DAS bagian Tengah yang mana letaknya di luar wilayah administrasi Jakarta. Oleh karenanya penanganan banjir di Jakarta harus terintegrasi dengan pemerintah daerah di sekitarnya.

Kejadian banjir dan genangan yang melanda Kota Jakarta secara rutin terjadi sejak tahun 1961 baik banjir yang terjadi karena luapan sungai maupun luapan air laut. 200-300 RW rata-rata terdampak banjir per tahun (2018-2022), pada saat cuaca ekstrem bisa 3 kali lipat. Rata-rata jumlah jiwa terdampak banjir 65.769 ribu jiwa di tahun 2018-2020 (data BPBD Provinsi DKI Jakarta 2018-2020). Dampak perubahan iklim juga berpengaruh terhadap banjir di Jakarta dengan meningkatnya curah hujan ekstrem, Pada bulan Februari 2021 telah terjadi bencana banjir yang melanda Jakarta dengan curah hujan tertinggi mencapai 226 mm/hari (kategori ekstrim di atas 150 mm/hari serta dampak perubahan iklim lainnya mengakibatkan kenaikan muka air laut dan abrasi sehingga risiko bencana seperti banjir dan banjir rob menjadi tinggi. Secara geografis pun Jakarta berada di Teluk Jakarta sebagai wilayah pesisir dan muara 13 sungai termasuk pada dataran banjir sehingga risiko penurunan muka tanah yang terjadi menjadi penyebab kejadian banjir, banjir rob dan genangan di beberapa lokasi Jakarta.

Kota London sebagai salah satu kota terbesar di dunia hanya memiliki 6 persen wilayah yang berisiko tinggi terjadinya banjir. Untuk mengatasi permasalahan banjir ini, pemerintah Jakarta perlu melakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah dengan meningkatkan infrastruktur drainase, termasuk pembangunan saluran air dan kolam retensi, serta peningkatan kapasitas sungai-sungai utama. Selain itu, upaya pembersihan saluran air dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan juga dilakukan secara terus-menerus. Selain itu, pemerintah juga mendorong adopsi teknologi dalam penanganan banjir, seperti sistem peringatan dini dan pemantauan banjir secara *real-time*.

Pengembangan energi baru terbarukan di Jakarta belum optimal. Hambatan utama Jakarta dalam mendorong pembangunan berkelanjutan adalah ketergantungan yang masih tinggi pada energi fosil, terutama listrik yang berasal dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Bauran EBT pada tahun 2023 TW III mencapai 0,45 persen yang menunjukkan tingginya penggunaan bahan bakar fosil hal ini menciptakan tantangan dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan memasukkan sumber energi bersih ke dalam kisi-kisi energi kota. Sementara bauran EBT pada kota global lainnya seperti Tokyo telah mencapai persentase sebesar 13,10 persen dan Beijing sebesar 10,40 persen. Selain itu, kebutuhan energi yang terus meningkat di Jakarta menambah tekanan pada infrastruktur energi yang ada. Kapasitas pembangkit listrik dan distribusi energi saat ini mungkin tidak memadai untuk memenuhi pertumbuhan permintaan yang cepat. Ini menuntut investasi dalam infrastruktur energi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Sampai tahun 2022, penyediaan energi terbarukan melalui PLTS *rooftop* pada gedung pemerintahan daerah baru mencapai 3,195 MWp yang tersebar pada 136 titik.

Kapasitas ketahanan daerah terhadap bencana belum optimal. Sebagai megapolitan dengan pertumbuhan populasi yang cepat, perlu dilakukan upaya peningkatan kapasitas ketahanan daerah dalam menghadapi tingginya risiko kebencanaan yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari penduduknya. Capaian Indeks Risiko Bencana Jakarta Tahun 2023 sebesar 61,31. Walaupun pencapaiannya menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun 2022, namun dari sisi ketahanan daerah masih perlu penguatan mengingat capaian Indeks Ketahanan Daerah pada tahun 2023 sebesar 0,57 masih berpotensi untuk ditingkatkan. Peningkatan tersebut terutama pada 3 (tiga) prioritas yang nilainya masih rendah, yaitu: Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana, Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana, serta Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik. Mengatasi risiko kebencanaan di Jakarta memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan perencanaan perkotaan yang berkelanjutan, sistem peringatan dini yang efektif, dan partisipasi aktif masyarakat. Dengan memahami dan mengelola risiko ini, Jakarta dapat membangun ketahanan yang lebih baik dan menjadikan kota ini lebih aman dan berkelanjutan bagi penduduknya.

Pada Tabel berikut ini rekapitulasi dari data pendukung untuk pernyataan permasalahan yang ada di Jakarta.

Tabel 3.1 Data Pendukung Permasalahan Jakarta

No	Aspek	Data Pendukung		Permasalahan Jakarta
		Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	
1	Pendidikan	Capaian APK PAUD berada di bawah capaian nasional pada 5 tahun terakhir sedangkan APK SD dan SM mengalami penurunan pada periode 2020/2021 hingga 2022/2023	Mengingat potensi penduduk usia bersekolah, maka peningkatan APM juga harus diimbangi peningkatan APK pada setiap jenjang pendidikan	Rendahnya partisipasi untuk memperoleh pendidikan dini, dasar, dan menengah
2		Hasil asesmen literasi membaca sebanyak 67,64 persen, sedangkan untuk numerasi sebanyak 30,96 persen. Capaian tersebut masih di bawah capaian Provinsi D.I. Yogyakarta.	Dengan visi kota global, peningkatan hasil asesmen nasional yang lebih baik memberikan kepastian kualitas sumber daya manusia Jakarta	Rendahnya kualitas capaian peserta didik
3		Persentase tingkat pengangguran terbuka SMK tertinggi keempat di Indonesia yaitu sebanyak 108.184 orang pada tahun 2019. Dari jumlah tersebut, 35,83 persen penganggurannya berusia 18-21 tahun	Peningkatan penyerapan lulusan SMK di dunia kerja dan dunia industri diharapkan mampu menurunkan pengangguran terbuka SMK dengan kesesuaian kompetensi lulusan	Daya serap lulusan pendidikan vokasi masih rendah
4	Kesehatan	Jumlah kasus penyakit menular, seperti tuberkulosis dan kusta, di Jakarta masih cukup tinggi dibandingkan dengan kota-kota global lainnya. Misalnya pada kasus tuberkulosis,	Dalam kasus tuberkulosis, bila dibandingkan dengan kota global lain seperti Tokyo (1.429 kasus), Berlin (4.076 kasus), dan London (1.464 kasus), jumlah kasus di Jakarta	Layanan kesehatan belum optimal dalam mengeliminasi penyakit menular dan mencegah penyakit tidak menular sehingga menyebabkan SDM yang tidak produktif

No	Aspek	Data Pendukung		Permasalahan Jakarta
		Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	
		jumlah kasus yang dilaporkan di Jakarta sebanyak 26.854 kasus. Selain itu, prevalensi tengkes (<i>stunting</i>) Jakarta sebesar 17,6 persen.	lebih tinggi. Selain itu, persentase <i>stunting</i> jauh di atas rata-rata prevalensi kota di negara maju yang hanya 5 persen.	
5	Kemiskinan	Tingkat kemiskinan Jakarta pada tahun 2018 - 2022 meningkat dan cenderung stagnan di rentang 4,53 - 4,69,	Dalam pencapaian kesejahteraan, penurunan kemiskinan setiap tahun perlu diupayakan	Angka kemiskinan stagnan dalam lima tahun terakhir
6	Ekonomi	PDRB per kapita Jakarta tahun 2022 sebesar USD 17.996 (GPCI, 2022)	PDRB per kapita kota global lainnya seperti Singapura mencapai USD 59.828, Tokyo mencapai USD 88.322, dan New York USD 122.980 (GPCI, 2022)	PDRB per kapita Jakarta belum kompetitif dibanding dengan kota global di negara maju
7	Ekonomi	Selama 15 tahun terakhir, rasio gini Jakarta menunjukkan tren yang meningkat. Sejak tahun 2012 hingga tahun 2022 rasio gini Jakarta secara konsisten berada pada kelompok moderat (0,3 < rasio gini < 0,5)	Rasio gini di Singapura menunjukkan angka 0,37 dan cenderung stabil/terkontrol dan kualitas hidup masyarakatnya yang merata dari segi penyediaan infrastruktur dan akses terhadap layanan dasar	Ketimpangan pendapatan masih tinggi dan akses terhadap fasilitas publik serta pelayanan dasar yang berkualitas belum merata
8		kualitas hidup masyarakat yang tidak merata, terutama di Kepulauan Seribu, ditunjukkan dengan nilai IPM Kepulauan Seribu 72,79 berada di bawah rata-rata nilai IPM Jakarta		

No	Aspek	Data Pendukung		Permasalahan Jakarta
		Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	
		83,55 dan menjadi nilai IPM terendah di Jakarta.		
9		Pada tahun 2023, Tingkat Pengangguran Terbuka Jakarta berada di angka 6,53 persen yang menempati peringkat ke-4 tertinggi di Indonesia.	TPT di kota global lainnya seperti Singapura, 1,9 persen, Tokyo 2,7 persen, dan New York 5,3 persen.	Tingkat Pengangguran Terbuka Jakarta masih tinggi
10		Tingkat efisiensi investasi Jakarta masih lebih rendah dari nasional dengan nilai ICOR Jakarta 7,54 dan ICOR Nasional 6,25 (semakin tinggi nilai ICOR, efisiensi investasi semakin rendah)	Nilai investasi yang tinggi dan efisien, didorong dengan kebijakan <i>ease of doing business</i> dan simplifikasi regulasi investasi	Efisiensi investasi Jakarta masih termasuk rendah.
11	Pariwisata	Jumlah wisatawan mancanegara sepanjang tahun 2023 sebanyak 1.963.059 wisatawan	berada jauh di bawah kota global lainnya seperti Singapura pada tahun 2023 dengan jumlah 13,6 Juta wisatawan dan Bangkok 19 Juta wisatawan	Pariwisata dan ekonomi kreatif belum optimal dalam menarik wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Jakarta dan meningkatkan perekonomian secara signifikan

No	Aspek	Data Pendukung		Permasalahan Jakarta
		Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	
12	Riset dan Inovasi	<p>a. Pengeluaran riset Jakarta 2023 sebesar 50,9 juta US\$ (0,024 persen PDRB)</p> <p>b. Jumlah <i>startup</i> di Jakarta sebanyak 377</p>	<p>a. Pengeluaran riset Seoul 10,4 miliar US\$ (3,28 persen PDRB) dan Singapura 6,6 miliar US\$ (1,92 persen PDB)</p> <p>b. Jumlah <i>startup</i> Shanghai 971, Tokyo 1.200, dan Singapura 4.000</p>	Pengeluaran riset belum menunjukkan komitmen dalam mendukung penciptaan inovasi dan pengembangan bisnis
13		<p>a. Jumlah periset di Jakarta sebanyak 3.375/1juta penduduk (Jumlah peneliti Jakarta jumlah dosen di PTN dan PTS di Jakarta ditambah dengan ASN dengan jabatan Peneliti di BRIN)</p> <p>b. Jakarta memiliki 1 universitas top 1000 dunia (Universitas Indonesia) sebagai sumber daya riset yang berkualitas</p>	<p>a. Jumlah periset Seoul (15.483), Beijing (15.705), dan Singapura (7.225)</p> <p>b. Kota lain seperti London memiliki lebih dari 15, Bangkok memiliki 4, dan Singapura 2 (meskipun hanya 2, universitas top dunia di Singapura menempati peringkat 19 dan 32)</p>	Minimnya sumber daya riset di Jakarta
14	Informasi dan Komunikasi	Kecepatan internet Jakarta pada tahun 2023 untuk <i>download</i> sebesar 39,55 Mbps, sementara untuk <i>upload</i> sebesar 32,03 Mbps	Kecepatan internet rata-rata dunia untuk <i>download</i> 90,93 Mbps dan kecepatan <i>upload</i> 41,76 Mbps	Infrastruktur digital masih tertinggal dibanding kota-kota global di negara maju
15	Transportasi	Penggunaan transportasi publik yang saat ini baru mencapai 18,86 persen	Masih tertinggal kota-kota global lain seperti Singapura (61 persen), Tokyo (61,7 persen), dan Shanghai (43,3 persen)	Rendahnya penggunaan transportasi publik

No	Aspek	Data Pendukung		Permasalahan Jakarta
		Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	
16		Belum sepenuhnya rute reguler melingkupi seluruh wilayah Kepulauan Seribu, seperti dari main <i>land</i> ke Pulau Sebira ataupun antarpulau permukiman	Seluruh wilayah Jakarta terlayani pelayanan transportasi reguler tanpa terkecuali	Aksesibilitas dan konektivitas ke Kepulauan Seribu masih terhambat
17	Tata Kelola dan Kelembagaan	a. Indeks Pelayanan Publik: 4,01 b. Indeks Kepuasan Masyarakat: 90,43	Saat ini Jakarta telah memiliki tata kelola dan kelembagaan yang baik, namun tantangan ke depan adalah mempertahankan bahkan meningkatkan performa pelayanan publik, terutama dalam menunjang aktivitas Jakarta sebagai kota global	Tantangan mempertahankan dan meningkatkan performa pelayanan publik
18		Capaian Indeks SPBE Jakarta pada tahun 2023 yaitu 4,21	Saat ini Jakarta telah memiliki tata kelola dan kelembagaan yang baik, namun tantangan ke depan adalah mempertahankan bahkan meningkatkan performa pelayanan publik, terutama dalam menunjang aktivitas Jakarta sebagai kota global	Tata kelola pemerintahan sebagai fondasi utama pembangunan Jakarta masih perlu dipertahankan dan dioptimalkan
19	Kepemudaan	Capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) berfluktuasi pada tahun 2018 hingga 2022. Dibandingkan tahun sebelumnya, IPP 2022 mencapai 52,67.	Mengingat potensi sumber daya manusia Jakarta, terutama kelompok pemuda, Jakarta memiliki peluang untuk mencapai IPP di atas rata-rata nasional	Pembangunan kepeloporan dan kepemimpinan pemuda yang dilakukan belum sinkron dan terintegrasi secara optimal sehingga belum mampu

No	Aspek	Data Pendukung		Permasalahan Jakarta
		Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	
				berperan sebagai mitra pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat.
20	Gender	Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 93,84 pada tahun 2022. Capaian ini terendah dalam lima tahun terakhir	Walaupun pencapaian Jakarta di atas pencapaian nasional, IPG Jakarta diharapkan terus mengalami peningkatan untuk mengindikasikan keseimbangan hasil pembangunan gender	Ketimpangan pembangunan gender dan kekerasan berbasis gender
21	Lingkungan	Persentase ketersediaan RTH Jakarta baru menyentuh angka 5,21 persen, hal ini berkontribusi untuk mencapai target persentase RTH publik sesuai dengan amanat UU Nomor 26 Tahun 2007 sebesar 20 persen.	Di kota-kota lain seperti Singapura, persentase luas Ruang Terbuka Hijau telah tersedia sebanyak 46 persen dan di Tokyo sebesar 30 persen.	Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Jakarta yang masih rendah.
22	Lingkungan	Persentase Akses Air Minum Layak di Jakarta mencapai 99,42 persen (BPS, 2023) dengan cakupan Aman Perpipaan sebesar 66,73 persen (SAKIP, 2023) Sehingga masih terdapat gap sebesar 33,27 persen untuk mencapai 100 persen akses air	Kota besar lainnya seperti Seoul telah memiliki cakupan perpipaan air bersih sebesar 94 persen yang menjangkau area perkotaan.	Sistem pengelolaan air bersih di Jakarta belum merata

No	Aspek	Data Pendukung		Permasalahan Jakarta
		Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	
		minum aman dan berkelanjutan.		
23	Lingkungan	Rendahnya akses Rumah Tangga hunian layak di Jakarta yang sebesar 38,8 persen (BPS,2023). Salah satu tantangan utamanya adalah rasio luasan kawasan permukiman kumuh terhadap luasan Jakarta masih sebesar 9,23 persen (DPRKP, 2023)	Kondisi di kota global lainnya, seperti di Singapura akses hunian layak telah mencapai angka 80 persen serta di kota Madrid sebesar 74 persen.	Perumahan dan permukiman masih menghadapi berbagai permasalahan
24	Lingkungan	Persentase Akses Sanitasi Layak mencapai 93,50 persen (BPS, 2024) dengan cakupan Aman Perpipaan sebesar 21,18 persen (SAKIP, 2023) Sehingga masih terdapat gap sebesar 38,82 persen untuk mencapai 60 persen akses sanitasi aman, inklusif, dan berkelanjutan di Tahun 2045. Tingkat Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Jakarta mencapai 5,47 persen (Dinkes, 2023).	Pada perkembangan kota global lainnya seperti di kota Tokyo dan London cakupan pengelolaan air limbah telah mencapai angka 100 persen.	Pengelolaan sanitasi dan pengelolaan air limbah masih terbatas

No	Aspek	Data Pendukung		Permasalahan Jakarta
		Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	
25	Lingkungan	Analisis potensi timbulan sampah pada tahun 2022 mencapai 6.555,26 kg/kapita/hari, sedangkan laju pengurangan volume sampah terus menurun sejak tahun 2019. Untuk persentase tingkat daur ulang sampah di Jakarta mencapai 20,26 persen.	Jika dibandingkan kota global lainnya, tingkat daur ulang sampah di Jakarta masih tertinggal seperti Brussels dengan capaian 39 persen dan Singapura 52 persen.	Pelayanan dan pengelolaan sampah belum menjangkau ke seluruh wilayah Jakarta
26	Lingkungan	Terjadi peningkatan emisi <i>direct</i> dan <i>indirect</i> sejak tahun 2020 hingga tahun 2022 yaitu total emisi sebanyak 60.399 Gg (ribu ton) CO ₂ e, sedangkan persentase reduksi emisi (selisih emisi GRK <i>baseline</i> dan inventori) menurun dari 27 persen (2021) menjadi 25,4 persen (2022)	Dimana kota global lainnya seperti Melbourne berhasil mereduksi emisi GRKnya sebesar 76 persen dari tahun 2011-2020.	Perubahan iklim yang menjadi ancaman serius bagi Jakarta, terutama dalam beberapa dekade terakhir
27	Lingkungan	Bauran EBT pada tahun 2023 TW III mencapai 0,45 persen yang menunjukkan tingginya penggunaan bahan bakar fosil hal ini menciptakan tantangan dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan memasukkan sumber energi bersih ke dalam kisi-kisi energi kota	Sementara bauran EBT pada kota global lainnya seperti Tokyo telah mencapai persentase sebesar 13,10 persen dan Beijing sebesar 10,40 persen.	Pengembangan energi baru terbarukan di Jakarta belum optimal

No	Aspek	Data Pendukung		Permasalahan Jakarta
		Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	
28	Kebencanaan	Sampai tahun 2020, masih terdapat 40 persen wilayah yang berisiko tinggi terdampak banjir pada Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur.	Kota London sebagai salah satu kota terbesar di dunia hanya memiliki 6 persen wilayah yang berisiko tinggi terjadinya banjir	Tingginya risiko bencana banjir di Jakarta
29	Kebencanaan	Capaian Indeks Risiko Bencana Jakarta Tahun 2023 sebesar 61,31. Walaupun pencapaiannya menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun 2022, namun dari sisi ketahanan daerah terhadap risiko bencana masih dikategorikan "Sedang"	Sebagai Kota Global, nilai Indeks Risiko Bencana perlu diupayakan agar berada di bawah 13 atau mencapai kategori "Rendah"	Kapasitas ketahanan daerah terhadap bencana belum optimal.

3.2. Tantangan Jakarta pasca Pemindahan Ibu Kota Negara

Pemerintah Indonesia telah memulai langkah besar untuk memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta menuju Kalimantan Timur yang ditandai dengan terbitnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2023. Hal ini memberikan peluang untuk mendefinisikan kembali peran dan fungsi Jakarta dalam pembangunan bangsa. Meskipun ke depan Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota, Pemerintah Jakarta tetap berkomitmen untuk menjadikan Jakarta sebagai pusat perdagangan, jasa keuangan, dan investasi yang berkelanjutan, global, dan regional. Perubahan status ibu kota negara tentu akan berdampak kepada fundamental pembangunan Jakarta ke depan. Peluang beserta tantangan yang dihadapi dari perubahan status ibu kota negara menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Berikut merupakan beberapa prakiraan implikasi yang akan dihadapi Jakarta pasca pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.

3.2.1 Permasalahan Kemacetan, Polusi, dan Banjir

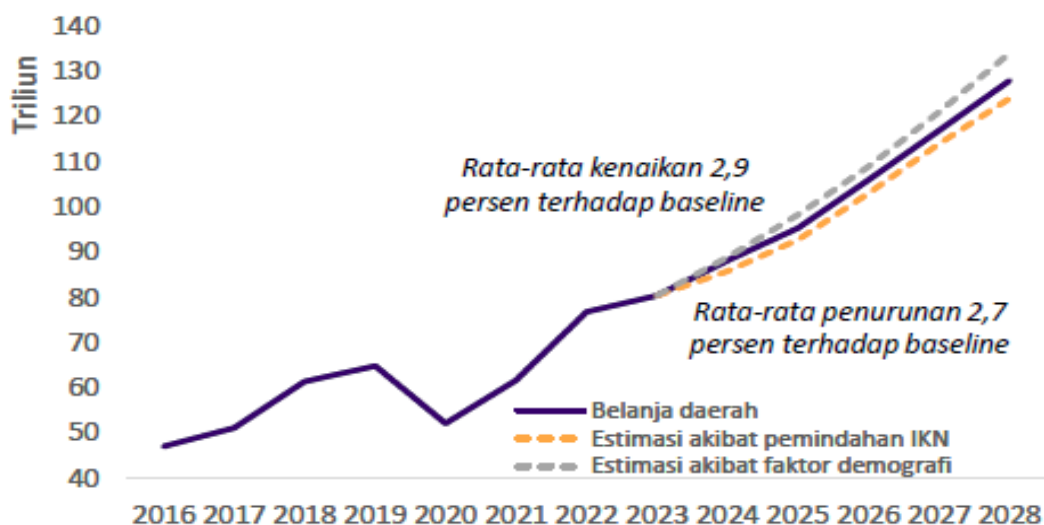
Seiring dengan berpindahnya sumber daya manusia, terutama aparat sipil negara Pemerintah Pusat, maka diperkirakan akan terjadi penurunan kemacetan dan tingkat polusi yang dihasilkan. Namun demikian penurunan tingkat kemacetan dan polusi pasca

pemindahan IKN diperkirakan tidak berdampak signifikan, karena kontribusi aktivitas pemerintahan terhadap kemacetan Jakarta hanya 7 persen, yang sisanya dikontribusi oleh kegiatan rumah tangga dan aktivitas bisnis (BPS dalam Creco Research & Constuling, 2023). Seiring dengan Jakarta tetap menjadi pusat perekonomian nasional dan target menjadi kota bisnis berskala global maka aktivitas industri dan mobilitas kendaraan bermotor diperkirakan akan stabil. Karenanya diperlukan komitmen penyediaan transportasi publik yang memadai serta upaya menggeser paradigma pembangunan menjadi *transit oriented* dalam rangka menanggulangi masalah kemacetan dan polusi yang dihasilkannya.

Sementara itu meskipun pemindahan IKN akan mengurangi, secara tidak signifikan, populasi Jakarta. Namun demikian risiko masalah banjir tidak serta merta terselesaikan. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, seperti masalah cuaca ekstrem yang semakin tidak dapat diprediksi, tingginya angka timbulan sampah per hari yang dihasilkan, jaringan air bersih yang belum optimal sehingga isu tingginya ekstraksi air tanah masih sulit diselesaikan, serta permukiman kumuh seluas 10,7 ribu ha atau 16,4 persen area Jakarta yang masih kumuh dan berkontribusi mengganggu area resapan (Creco Research & Constuling, 2023). Pemenuhan pelayanan dasar juga menjadi kunci yang dapat mengurangi risiko banjir, sekaligus meningkatkan posisi Jakarta dalam kontestasi persaingan kota global.

3.2.2 Penurunan Belanja dan Pendapatan Daerah

Selama masa transisi pemindahan ibu kota negara, APBD Jakarta diperkirakan akan menghadapi sejumlah konsekuensi, di antaranya penurunan belanja daerah akibat pemindahan penduduk, namun juga diiringi dengan penurunan pendapatan daerah akibat aktivitas ekonomi yang “hilang”. Namun faktor urbanisasi dan demografi lainnya berimplikasi pada kenaikan sisi pendapatan dan belanja daerah. Dengan asumsi pemindahan IKN dimulai pada tahun 2024 dan estimasi penduduk yang berpindah selama lima tahun ke depan berjumlah 1,5 juta jiwa maka estimasi belanja Pemerintah Provinsi Jakarta akibat faktor demografi dan pemindahan IKN sekitar 2,7 – 2,9 persen. Oleh karena itu, dalam jangka pendek perlu dilakukan restrukturisasi bagaimana *cut loss* dan *cut cost* dari belanja.



Gambar 3.1 Estimasi Belanja Jakarta Akibat Pemindahan IKN

Sumber: Creco Research & Constuling, 2023

3.2.3 Alih Fungsi dan Pemanfaatan Barang Milik Negara

Dalam kaitannya dengan pemanfaatan aset milik negara di Jakarta dalam mendukung pembangunan diperlukan beberapa fleksibilitas ruang dan regulasi yang dapat mengakselerasi pelaksanaannya. Hal ini berarti dalam mengidentifikasi aset prioritas yang dapat dimanfaatkan perlu diintegrasikan dengan kebijakan tata ruang yang ada di Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta. Adapun aset pemerintah pusat saat ini diperkirakan mencapai 1.400 triliun rupiah. Namun angka tersebut tidak dapat seluruhnya dilakukan monetisasi dan optimalisasi karena beberapa BMN tetap akan digunakan oleh Kementerian/Lembaga.

3.2.4 Potensi Penurunan Daya Tarik

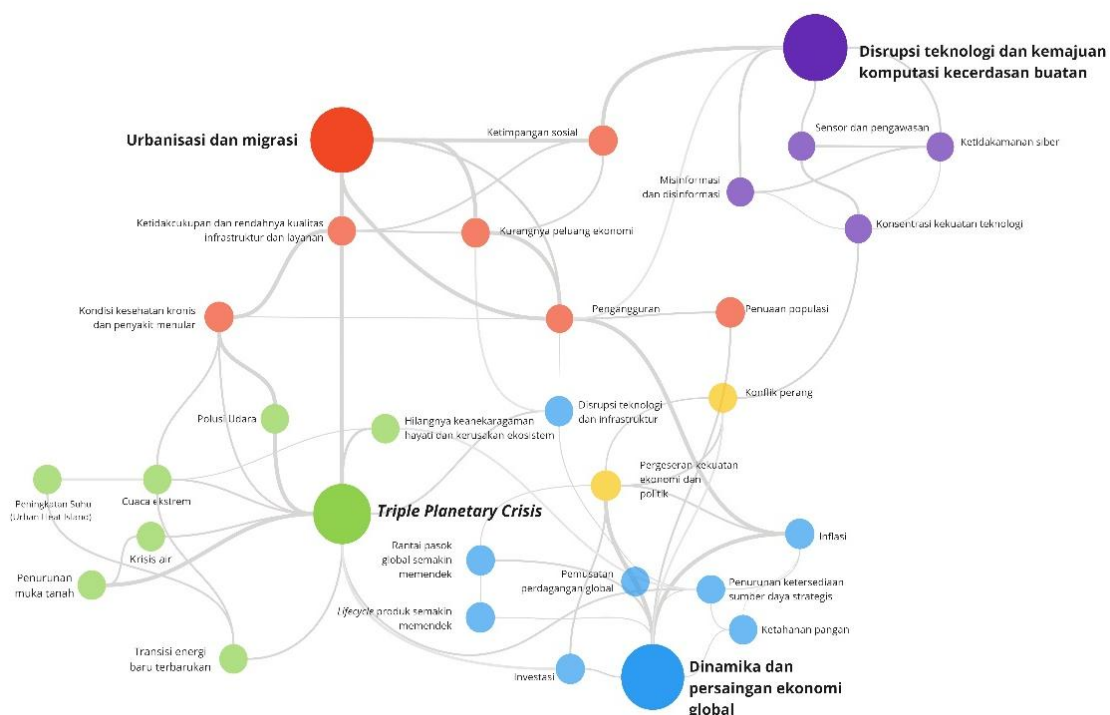
Dengan peran Jakarta sebagai ibu kota negara, kegiatan koordinasi pemerintahan yang membutuhkan infrastruktur MICE terus berjalan. Namun dengan berpindahnya lembaga negara dan kantor Perwakilan Negara Asing lembaga internasional yang merupakan bagian dari aktivitas wisatawan domestik dapat berpotensi menurunkan aktivitas MICE di Jakarta. Hal ini dikarenakan 96 persen tamu hotel di Jakarta adalah wisatawan domestik (2021) dengan 53 persen di antaranya bertujuan aktivitas bisnis dengan sisanya ada pada *leisure*. Dengan mempertahankan Jakarta sebagai pusat bisnis berskala global, dapat mempertahankan daya tarik Jakarta untuk aktivitas pariwisata MICE didukung dengan pengembangan alternatif objek wisata untuk meningkatkan *length of stay*.

3.3. Tantangan Global, Nasional dan Regional

Pembangunan adalah proses yang kompleks dan terus berubah yang mencakup berbagai dimensi seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan. Di tengah dinamika global dan nasional, serta tantangan kompleks yang dihadapi oleh masyarakat, isu-isu strategis pembangunan sangat penting untuk diuraikan sebagai upaya perbaikan pembangunan dan mewujudkan cita-cita pembangunan.

3.3.1 Tantangan Global

Saat ini, dunia dihadapkan pada berbagai risiko global yang semakin kompleks. Dalam tatanan global, terdapat beberapa isu yang saling berkaitan dan mampu memengaruhi setiap negara. Beberapa kajian menyebutkan, risiko jangka pendek yang paling mendesak adalah disrupsi teknologi dan penggunaan kecerdasan buatan yang semakin masif. Selain itu, perubahan iklim masih menjadi perhatian dan tetap menjadi ancaman utama dengan dampak berkepanjangan pada semua sektor terutama ekonomi. Ketidakstabilan ekonomi global menjadi tantangan yang menciptakan persaingan antarnegara dalam memanfaatkan sumber daya.



Gambar 3.2 Tantangan Pembangunan Global

Dinamika dan persaingan geopolitik dan geoekonomi. Adanya ketegangan geopolitik seperti perang Rusia-Ukraina dan konflik Iran-Israel menyebabkan berbagai ancaman kestabilan ekonomi yang meliputi inflasi, potensi resesi, ancaman terhadap daya beli global, serta rantai perdagangan internasional. Jakarta sebagai pusat ekonomi Indonesia sangat tergantung pada kondisi perekonomian dan perdagangan internasional. Ketegangan geopolitik akan mempengaruhi aliran perdagangan dan ekspor-impor serta mempengaruhi rantai nilai global yang semakin memendek. Ketidakpastian politik, konflik regional, atau perubahan dalam kebijakan ekonomi internasional juga dapat mempengaruhi keputusan investasi asing di Jakarta, mempengaruhi fluktuasi harga-harga komoditas pokok dari berbagai produsen yang membawa pada inflasi, potensi resesi, dan juga ancaman daya beli global dan domestik, serta mempengaruhi ketahanan energi dan pangan.

Geopolitik dan geoekonomi yang tidak stabil akan mempengaruhi siklus kehidupan (*life cycle*) produk, teknologi dan gaya hidup yang semakin pendek. Ketegangan antara Rusia-Ukraina menyebabkan tekanan ekonomi global dan berdampak pada inflasi nasional yang terus naik dari 2,06 persen hingga 5,51 persen (Februari - Desember 2022) diikuti dengan kenaikan suku bunga dari 3,5 persen ke 3,75 persen (Februari – Desember 2022), berimplikasi pada kenaikan inflasi Jakarta hingga 4,21 persen (Desember 2022). Begitu juga konflik Iran-Israel menyebabkan melambungnya harga minyak hingga 4 persen dan peningkatan suku bunga hingga 6 persen (BI, 2024).

Dalam skala regional Asia Tenggara, Jakarta memainkan peran penting dalam ASEAN sehingga menjaga kestabilan geopolitik dilakukan melalui dialog serta kerja sama dengan kota-kota ASEAN lainnya. Forum-forum seperti ASEAN Mayor Forum menjadi salah satu wadah bagi Jakarta berpartisipasi aktif dalam dinamika internasional dan kesempatan untuk menunjukkan eksistensi sebagai kota global.

Disrupsi teknologi dan kemajuan komputasi kecerdasan buatan yang sangat cepat. Kemajuan teknologi yang cepat membuat masyarakat dituntut untuk mampu mengikuti perkembangan teknologi yang ada agar dapat bersaing di kancah global dengan negara-negara maju lainnya dan terus menciptakan inovasi. Tantangan terbesar adalah kemajuan dalam otomatisasi dan kecerdasan buatan yang dapat menggantikan pekerjaan manusia sehingga SDM Jakarta ke depan harus adaptif dan memiliki keahlian tinggi. Perkembangan teknologi di masa depan akan mempengaruhi sektor pendidikan serta jenis pekerjaan secara global, serta menyebabkan disrupsi dalam industri jasa keuangan. Ketimpangan dalam akses digital dan pemanfaatan teknologi akan menimbulkan permasalahan yaitu kesenjangan digital yang dapat memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi.

Populasi dunia meningkat serta tingginya arus urbanisasi dunia. Pada tahun 2020, populasi dunia mencapai lebih dari 7 miliar jiwa dan diperkirakan akan terus meningkat sampai 9,7 miliar pada tahun 2050 (*World Population Prospects*, 2022). Batas-batas

antarnegara saat ini sudah tidak lagi menjadi kendala, menyebabkan manusia dapat berpindah dari satu kota ke kota lain di berbagai belahan dunia. Hal yang menjadi tantangan adalah populasi meningkat namun sumber daya alam terkait dengan pangan, energi, air, dan lahan yang tersedia terbatas. Kelangkaan dan persaingan untuk mengakses sumber daya alam di tingkat global diproyeksikan akan meningkat di masa mendatang. Dalam konteks sosial ekonomi, urbanisasi yang cepat akan mempengaruhi struktur demografi dan persaingan dalam mendapatkan pekerjaan. Jenis lapangan pekerjaan baru akan semakin beragam, membutuhkan tenaga kerja dengan kualitas dan keterampilan tinggi untuk dapat bersaing secara global. Perubahan struktur dan bentuk keluarga, perkembangan teknologi digital, serta pengaruh budaya global akan mempengaruhi kualitas keluarga dan penduduk kota di seluruh dunia.

Perdagangan internasional diproyeksikan akan berpusat di kawasan Asia-Afrika.

Pertumbuhan perdagangan negara berkembang diperkirakan akan meningkat tinggi dan mendominasi perekonomian dunia, didorong oleh perdagangan intra-Asia terutama dari Tiongkok, India, dan negara-negara ASEAN. Sementara itu, kawasan Asia Timur dan ASEAN akan berkembang menjadi pusat *Global Value Chain* dunia seiring dengan infrastruktur yang memadai, pangsa pasar yang substansial, dan kompetensi SDM industri yang berkualitas tinggi untuk memproduksi barang berorientasi ekspor. Hal ini merupakan peluang bagi Jakarta untuk dapat bergabung menjadi simpul utama perdagangan dunia. Untuk memaksimalkan peluang tersebut, Jakarta perlu meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur dan SDM mengikuti tantangan perkembangan teknologi, termasuk mendorong UMKM agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan mulai berorientasi ekspor.

Di kawasan Asia Tenggara, ASEAN bersama lima negara mitra membentuk *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) sebagai perjanjian perdagangan bebas terbesar di dunia. RCEP meningkatkan perdagangan, investasi, dan integrasi ekonomi di Asia Timur dan Tenggara. Perdagangan di kawasan Asia Tenggara akan mampu mendorong pertumbuhan sektor jasa dan teknologi serta peluang jaringan bisnis bagi Jakarta melalui kerja sama RCEP. Jakarta menjadi pasar yang besar dan berkembang untuk produk dan jasa dari kota atau negara lain serta menjadi *hub* regional untuk bagi ASEAN dan wilayah regional lainnya.

Ancaman *triple planetary crisis*. Tiga krisis global yaitu perubahan iklim, meningkatnya polusi udara, serta ancaman hilangnya keanekaragaman hayati berdampak pada berbagai aspek, yaitu lingkungan, kesehatan, penghidupan masyarakat, dan laju pembangunan. Dampak yang disebabkan oleh kondisi ini adalah meningkatnya bencana alam seperti banjir, penurunan muka tanah (*land subsidence*), peningkatan permukaan air laut (*sea level rise*), krisis air, krisis pangan, kemacetan dan polusi, serta berkurangnya keanekaragaman hayati. Pembangunan diperkirakan akan mulai mengarah ke aktivitas ekonomi yang lebih rendah karbon, penerapan ekonomi sirkular, dan pergeseran

penggunaan energi ke arah energi baru terbarukan (EBT). Tren pertumbuhan ekonomi hijau dan rendah karbon ini menjadi kebijakan dan strategi global sebagai upaya menghadapi isu *triple planetary crisis* yang sudah di depan mata.

Selain itu, munculnya fenomena *urban heat island* akibat perubahan guna lahan dan masifnya lingkungan terbangun menjadi perhatian kota-kota di dunia, terutama yang berada di daerah tropis. Di Jakarta, suhu udara di pusat kota bisa lebih tinggi 1-3 derajat Celsius dibandingkan dengan daerah pinggiran Jakarta. Kepadatan bangunan tinggi tidak diimbangi dengan proporsi luas ruang terbuka. Jakarta hanya memiliki 5,21 persen RTH pada tahun 2023.

Selain isu-isu di atas. Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi Jakarta dalam konteks regional di negara-negara ASEAN. Sebagai kota global, Jakarta menjadi pilar kunci yang dapat memperkuat diplomasi Indonesia di antara negara-negara Asia Tenggara ini. Adapun beberapa potensi serta tantangan yang akan dihadapi Jakarta dalam konstelasi regional ini adalah sebagai berikut.

3.3.2 Tantangan Nasional

Optimalisasi Bonus Demografi. Indonesia hingga tahun 2050 diprediksi masih akan menikmati bonus demografi. Belajar dari Jepang, Korea, Tiongkok, dan negara lain yang telah menjadi negara maju karena memanfaatkan bonus demografi secara efektif, Indonesia harus menerapkan strategi sumber daya manusia yang unggul. Selanjutnya dengan terus meningkatkan produktivitas serta menjaga pola konsumsi berkelanjutan, Indonesia dapat kembali meraih bonus demografi berikutnya, baik karena peningkatan investasi yang menerus maupun penjaga keberlanjutan penduduk usia lanjut. Oleh karenanya dibutuhkan intervensi hulu-hilir untuk mengoptimalkan potensi bonus demografi.

Lemahnya kapasitas ilmu pengetahuan, riset, teknologi, dan inovasi. Kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi nasional masih lemah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya komitmen pemerintah, terutama dari segi anggaran riset yang hanya mencapai 0,28 persen dari PDB, jauh tertinggal dibandingkan Korea Selatan (4,81), Thailand (1,31), dan Malaysia (1,04) pada tahun 2020. Selain itu fondasi riset juga belum optimal, terutama dari kuantitas dan kualitas SDM peneliti yang tercermin dari jumlah peneliti riset dan inovasi per satu juta penduduk yang baru mencapai 388, jauh lebih rendah dibanding Thailand (1.790), Singapura (7.287), dan Korea Selatan (8.408) pada tahun 2019. Selain itu permasalahan-permasalahan lain seperti belum kondusifnya ekosistem riset dan inovasi, hasil riset tidak aplikatif akibat lemahnya kerja sama lembaga riset dan industri, serta terbatasnya kerja sama lembaga riset domestik dan internasional juga perlu menjadi perhatian.

Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif. Kinerja pariwisata masih berada di bawah potensinya disebabkan, terutama oleh masih

terbatasnya atraksi, aksesibilitas, dan amenitas, adanya pergeseran preferensi pasar dan disrupsi terkait teknologi digitalisasi, serta kapasitas pengelolaan dan penerapan pariwisata berkelanjutan masih rendah. Sementara pemanfaatan potensi ekonomi kreatif belum optimal dikarenakan kurangnya dukungan dan kebijakan yang memadai, transformasi digital belum merata, inovasi pengembangan produk masih rendah, ekosistem untuk mendukung komersialisasi belum terbentuk, serta akses ke pasar internasional masih terbatas.

Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut. Optimalisasi ekonomi biru masih dihadapkan pada rendahnya pemanfaatan sumber daya laut serta belum berkembangnya *Sea Lines of Communication* (SLoC) dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) sehingga PDB kemaritiman masih berada pada kisaran 7,6 persen. Kondisi ini disebabkan belum optimalnya pengelolaan wilayah pengelolaan perikanan dan pengembangan budidaya perikanan, diversifikasi industri dalam menciptakan nilai tambah ekonomi, serta masih terbatasnya riset dan teknologi kelautan. Di sisi lain pencemaran lingkungan laut juga masih menjadi tantangan yang perlu dihadapi dalam pengembangan ekonomi kemaritiman.

Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi. Kontribusi UMKM terhadap PDB belum sebanding dengan penyerapan tenaga kerja. Hal ini disebabkan karena UMKM memiliki tenaga kerja berkeahlian rendah dan bergerak di sektor bernilai tambah rendah. Selain itu penggunaan teknologi, inovasi, dan investasi untuk pengembangan usaha juga masih rendah. Rendahnya partisipasi UMKM dalam rantai nilai produksi dan rendahnya jumlah koperasi yang bergerak di sektor riil.

Produktivitas tenaga kerja Indonesia masih relatif tertinggal. Produktivitas tenaga kerja Indonesia (US\$ 7.274) masih di bawah rata-rata kawasan ASEAN (US\$ 8.449). Hal ini disebabkan karena rendahnya kualitas SDM (56,3 persen lulusan SLTP ke bawah), ketidaksesuaian antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, dan pasar kerja di Indonesia belum mampu merespons perubahan cepat jenis lapangan kerja, kebutuhan keahlian, struktur penduduk, serta pola budaya kerja.

Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan. Tingginya produksi listrik (87,1 persen) dan emisi GRK (1.317 GtCO₂eq) akibat dominasi penggunaan energi fosil untuk pembangkit listrik dan transportasi menghambat pembangunan ekonomi hijau dan menjaga keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Rendahnya penggunaan energi terbarukan. Porsi EBT dalam bauran energi nasional terus meningkat dari 4,24 persen tahun 2005 menjadi 12,3 persen pada tahun 2022. Namun hal tersebut belum cukup baik dan menunjukkan masih tingginya pemanfaatan energi berbasis bahan bakar fosil.

Pencemaran lingkungan dan ekonomi hijau. Pencemaran air, udara, dan tanah terus terjadi sebagai dampak aktivitas pembangunan yang tidak berkelanjutan. Timbulan limbah B3 terus meningkat hingga mencapai 74 juta ton. Dalam konteks limbah domestik hanya satu persen rumah tangga di Indonesia yang dilayani oleh IPAL terpusat. Pengaturan sistem insentif dan disinsentif untuk ekonomi hijau juga masih lemah.

Tingginya laju kehilangan dan rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati berkelanjutan. Tingginya tingkat bencana hidrometeorologi yang mencapai 95 persen dari 3.207 kejadian bencana pada tahun 2022, serta kurang efektifnya mitigasi bencana, sistem peringatan dini, dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup belum optimal. Ketidakseimbangan antara kebutuhan dan pasokan pangan, energi, dan air juga terjadi di berbagai wilayah.

Konektivitas laut dan penyebrangan serta konektivitas udara yang menjadi tulang punggung angkutan barang dan penumpang belum optimal dalam menunjang konektivitas domestik dan global. Konektivitas intrapulau masih perlu ditingkatkan. Tantangan lainnya berupa masih terbatasnya sistem angkutan umum massal perkotaan, terutama di wilayah metropolitan dan kota-kota dan masih rendahnya jangkauan jaringan serat optik sebagai tulang punggung layanan digital yang berkualitas.

Rendahnya peran perkotaan di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi. Elastisitas pertumbuhan penduduk perkotaan terhadap pertumbuhan PDB per kapita perkotaan di Indonesia yang hanya mencapai 1,4 persen, sedangkan di Tiongkok elastisitasnya mencapai 3 persen. Masih tingginya ketimpangan pembangunan di kawasan maupun antarkawasan perkotaan, kapasitas pengelolaan perkotaan yang masih terbatas, serta kualitas lingkungan perkotaan yang semakin menurun.

Akses dan kualitas yang belum merata di bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Beban penyakit menular dan tidak menular, termasuk permasalahan kesehatan penduduk usia lanjut dan kesehatan jiwa yang semakin tinggi akibat transisi demografi, epidemiologi, urbanisasi, dan perilaku tidak sehat. Akses pangan tidak terjangkau menyebabkan pola konsumsi tidak sehat yang berpengaruh terhadap kekurangan gizi mikro dan makro.

Dari sektor pendidikan pembangunan dihadapkan pada tantangan untuk mengoptimalkan bonus demografi dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat mendukung percepatan pembangunan di berbagai bidang. Isu lainnya dalam konteks pendidikan adalah rendahnya kualitas pendidikan yang ditunjukkan oleh skor PISA siswa Indonesia yang jauh tertinggal dibandingkan siswa di negara OECD. Beberapa permasalahannya seperti kuantitas dan kualitas guru, serta pendidikan nonformal yang berkualitas belum memadai. Pada bidang pendidikan tinggi juga masih memiliki tantangan daya saing dan produktivitas, terutama dalam kualitas publikasi ilmiah.

Rendahnya kualitas sumber daya manusia berdampak pada keterserapan tenaga kerja, hal ini ditunjukkan dengan keterserapan tenaga kerja di pasar kerja yang hanya mencapai 40,49 persen yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi. Dalam hal perlindungan sosial perubahan struktur dan peningkatan jumlah penduduk yang diiringi peningkatan Lansia menuntut cakupan sistem perlindungan sosial yang lebih menyeluruh di sepanjang siklus kehidupan.

Hyper regulation berkualitas rendah menyebabkan tumpang tindih regulasi. Banyaknya pengujian materiil yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pelaku usaha dan masyarakat umum akibat kuatnya ego sektoral dan masih terbatasnya kewenangan pengelolaan regulasi. Selain itu lemahnya pemantauan atas dampak keberlakuan regulasi dan belum memadainya kuantitas dan kualitas SDM di bidang regulasi juga masih menjadi tantangan.

Proses bisnis dan tata kelola urusan pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak adaptif. Fragmentasi birokrasi menyebabkan tumpang tindihnya pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pada berbagai bidang serta melanggengkan ego sektoral. Fragmentasi kelembagaan juga terkait dengan pembagian kewenangan dalam kerangka hubungan pemerintah pusat-daerah. Hal lainnya juga masih terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan program pembangunan antara kementerian/lembaga yang berpotensi menimbulkan inefektivitas dan inefisiensi.

Transformasi digital di tingkat pemerintahan masih dihadapkan oleh berbagai tantangan mendasar. Digitalisasi pemerintahan masih menghadapi tantangan terkait dengan tata kelola keamanan siber, keterpaduan data dan informasi, serta rendahnya literasi digital.

Kapasitas pembiayaan untuk memenuhi percepatan dan peningkatan kebutuhan pembangunan dari pemerintah pusat, daerah, dan non publik masih terbatas. Dalam hal pembiayaan pembangunan terdapat sejumlah tantangan utama yang dihadapi antara lain, belum berkembangnya inovasi pembiayaan pembangunan, tingginya *cost of fund*, terbatasnya basis sumber pendanaan dan peran sektor keuangan nonbank (utamanya dana pensiun, asuransi, dan pasal modal), serta belum optimalnya fungsi intermediasi dan inklusi keuangan.

3.3.3 Tantangan Regional Jabodetabekpunjur

Kawasan Metropolitan Jabodetabekpunjur menjadi sebuah aglomerasi yang tidak dapat terpisahkan dalam pembangunan wilayah, karena jika salah satu daerah dilakukan pembangunan, maka akan mempengaruhi atau dipengaruhi daerah lain di sekitarnya. Begitu juga dengan permasalahan dan tantangan yang dihadapi juga tidak dapat terlepas satu sama lain. Terdapat beberapa tantangan pembangunan di Metropolitan Jabodetabekpunjur yang perlu menjadi perhatian dalam pembangunan Jakarta ke depan.

Tingginya Potensi Ancaman Banjir

Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur berada pada Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane, Citarum dan Ciujung-Cidanau-Cidurian yang secara historis merupakan kawasan rawan bencana banjir. Sejalan dengan hal itu, hingga tahun 2020 masih terdapat 40 persen wilayah yang memiliki risiko tinggi terdampak banjir pada kawasan tersebut. Banjir di Jabodetabekpunjur disebabkan oleh dua faktor, yakni faktor alamiah yang dipengaruhi peningkatan intensitas curah hujan akibat perubahan iklim, serta faktor antropogenik, yakni terkait alih fungsi lahan resapan air yang menyebabkan daya resap wilayah berkurang. Menurut PMO TKPR Jabodetabekpunjur, kerugian ekonomi akibat bencana banjir di Jabodetabekpunjur dari tahun 2002 hingga 2020 mencapai 19,2 triliun rupiah. Kerugian ini secara langsung berdampak lebih besar kepada daerah hilir seperti Jakarta yang menerima banjir kiriman dari wilayah dataran tinggi (daerah hulu) yang berbatasan. Selama ini penanganan banjir hanya berfokus pada pembangunan fasilitas pengendali banjir pada daerah hilir. Melihat banjir pada Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur diperlukan upaya-upaya dengan pendekatan lintas wilayah Administrasi berupa penanganan yang juga mulai memberikan atensi pada daerah.

Ketersediaan Air Bersih belum Terpenuhi

Sebagai kawasan metropolitan kedua terbesar di dunia setelah Tokyo kawasan perkotaan Jabodetabekpunjur diperlukan penyediaan air sampai mencapai akses air aman dan layak melalui jaringan perpipaan guna meningkatkan kualitas kehidupan seluruh masyarakat. Pelayanan air bersih jaringan perpipaan di Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur masih berkisar pada angka 29 persen, yang mana angka ini masih berada di bawah target SDGs tahun 2030 sebesar 80 persen. Belum meratanya pelayanan air bersih ini berdampak pada fenomena *stunting* dan gizi buruk. Mengutip dari kajian Asian Development Bank, kerugian ekonomi akibat *stunting* dan kekurangan gizi lainnya adalah 2 hingga 3 persen terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) per tahun. Pemerataan akses air bersih di Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur dihadapkan dengan tantangan ketersediaan air baku serta efisiensi infrastruktur SPAM. Oleh sebab itu, diperlukan aksi guna percepatan pemerataan akses air bersih serta penyelesaian isu strategis penyediaan air bersih. Aksi tersebut berfokus pada pengelolaan sumber daya air secara regional dengan mempersiapkan konsep pengelolaan yang berkelanjutan serta pengembangan alternatif pendanaan dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur SPAM.

Kerentanan Bencana di Wilayah Pesisir dan Pantai

Sebagai satu-satunya wilayah metropolitan di Indonesia, wilayah pantai utara Jabodetabekpunjur yang meliputi Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi dan Kota Administrasi Jakarta Utara merupakan wilayah pesisir yang rentan terhadap bencana pesisir seperti banjir rob, *land subsidence*, dan abrasi. Hasil studi JICA tahun 2021, menunjukkan bahwa terdapat penurunan tanah cukup pesat di utara Jakarta sebesar 0,2 m/tahun. Bencana di wilayah pesisir seringkali menelan banyak korban jiwa dan

material. Kerugian ekonomi yang dihadapi masyarakat antar lain meliputi berkurangnya pendapatan ekonomi warga, status kepemilikan tanah dan termasuk biaya pencegahan banjir rob itu sendiri. Beberapa faktor yang memengaruhi potensi kebencanaan wilayah pesisir Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur antara lain seperti, efek perubahan iklim dan pemanasan global, ketidakteraturan kawasan pesisir, alih fungsi lahan, dan eksploitasi lingkungan berlebihan, serta kerentanan sosial ekonomi masyarakat bahari. Oleh karena itu diperlukan penanganan multisektoral dengan mengedepankan keberlanjutan ekologi dan sosial-ekonomi masyarakat dalam penataan pantai utara, seperti penguatan kapasitas tanggap bencana dan kapasitas masyarakat, penataan ruang dan infrastruktur, serta pemulihan lingkungan dan revitalisasi kawasan pesisir.

Tingginya Kemacetan Lalu Lintas

Sebagai pusat aktivitas ekonomi nasional, Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur dengan DKI Jakarta sebagai kota intinya, memiliki karakteristik masyarakat bermobilitas tinggi dan dengan jarak *commuting* harian yang terhitung jauh, dengan rata-rata 20 kilo meter per hari. Menurut BPS, pergerakan penduduk Jabodetabek tahun 2023 sebesar 4,4 juta penduduk. Dari jumlah tersebut, pergerakan dari dalam Jakarta dan Provinsi Banten dan Jawa Barat menuju Jakarta (tidak termasuk Kepulauan Seribu) mencapai 2,6 juta, dengan 1,5 juta penduduk berasal dari Jabar dan Banten. Pergerakan komuter Jabodetabek sebesar 79 persen menggunakan kendaraan pribadi, dengan *mode share* transportasi publik baru mencapai 19,5 persen. Tak pelak kondisi ini memicu permasalahan kemacetan yang menyebabkan kerugian signifikan dalam ekonomi, polusi, bahkan kesehatan masyarakat tampak melekat dengan citra Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur. Mengutip PMO TKPR Jabodetabekpunjur kerugian ekonomi terjadi akibat dari waktu perjalanan dan semakin tingginya biaya transportasi. Atas dasar perhitungan variabel *Value of Time (delay)* dan *Vehicle Operating Cost*, kerugian ekonomi di Jabodetabek akibat kemacetan mencapai Rp. 40 Triliun untuk biaya operasional transportasi dan Rp60 Triliun untuk waktu perjalanan setiap tahunnya. Beberapa penyebab kemacetan di Jabodetabek, antara lain *mode share* angkutan umum yang rendah, sistem transportasi publik belum efektif dan menjangkau seluruh wilayah, *urban sprawl* yang semakin meluas, serta sarana dan prasarana transportasi yang belum inklusif dan andal. peningkatan cakupan dan kualitas layanan transportasi publik merupakan hal fundamental dalam penyelesaian permasalahan kemacetan. Selain itu kebijakan penataan ruang dan kawasan, serta pengarusutamaan *non-motorized transportation* dan inklusivitas akses transportasi menjadi pendukung yang dapat menjawab tantangan kemacetan Jabodetabek dan kerugian ekonomi yang dihasilkannya

Pengelolaan dan Kapasitas Penampungan Sampah yang Belum Optimal

Pertumbuhan penduduk secara masif yang terjadi di Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur menimbulkan berbagai permasalahan, tak terkecuali permasalahan persampahan. Tingginya jumlah sampah yang dihasilkan setiap tahunnya kian

membebani TPA hingga melebihi kapasitas. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2023, lebih dari 8.500 ton sampah per hari (33 persen) yang dihasilkan setiap tahunnya tidak dapat terkelola di kawasan Jabodetabekpunjur. Sampah yang tidak terkelola ini disebabkan oleh Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang melebihi kapasitas, kurangnya infrastruktur pendukung, *impermeable surface* yang tidak layak sehingga menyebabkan pencemaran. Sampah yang tidak terkelola ini disebabkan oleh Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang melebihi kapasitas, kurangnya infrastruktur pendukung, *impermeable surface* yang tidak layak sehingga menyebabkan pencemaran. Selain itu, masih minimnya kegiatan pengolahan dan daur ulang sampah, serta keterbatasan kemampuan layanan persampahan dari pemerintah daerah menjadi salah satu alasan tingginya jumlah sampah yang tidak terkelola. Pengelolaan sampah di Kawasan Jabodetabekpunjur yang belum optimal menyebabkan beberapa masalah, di antaranya munculnya TPS liar, fenomena *open dumping* dan *open burning*, hingga mencemari sungai dan badan air. Lebih jauh lagi, apabila dibiarkan akan menyebabkan kerugian dari sisi ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Tumbuhnya Permukiman Kumuh yang Tidak Terkendali

Seiring bertambahnya populasi penduduk, kebutuhan akan lahan juga semakin meningkat. Keterbatasan lahan merupakan kondisi yang pasti terjadi, terutama didorong oleh tingginya laju urbanisasi ke Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur untuk memperoleh kualitas hidup yang lebih baik. Lahan yang semakin terbatas juga diikuti oleh kurang terjangkaunya harga lahan maupun hunian di perkotaan menyebabkan berkembangnya kawasan permukiman pada lokasi-lokasi yang kurang layak huni dan sesuai peruntukannya. Sebagai gambaran, pada tahun 2018 jumlah kelurahan kumuh di Kawasan Perkotaan Jabodetabek mencapai 201 kelurahan dengan luas 1.446 hektare. Keberadaan permukiman kumuh ini meningkatkan potensi ancaman pencemaran lingkungan, kebakaran dan banjir, penyebaran penyakit, serta kriminalitas. Selain itu hal ini juga memengaruhi citra kawasan perkotaan itu sendiri. Beberapa hal yang diidentifikasi menjadi penyebab tumbuhnya permukiman kumuh adalah Disparitas ekonomi dan rendahnya kemampuan penyediaan perumahan layak huni dan terjangkau di kawasan perkotaan; tidak optimalnya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya; dan pertambahan penduduk dan semakin berkurangnya ketersediaan lahan. Beberapa hal fundamental yang dapat dilakukan adalah penataan kawasan permukiman kumuh dan penyediaan hunian terjangkau yang layak huni, yang dapat memanfaatkan metode konsensus pemanfaatan lahan (*land consolidation*).

Potensi Bencana di Kawasan Hulu yang Berdampak pada Kawasan Hilir

Dinamika yang terjadi di area hulu akan berdampak pada area hilir. Kawasan metropolitan Jabodetabekpunjur dilalui oleh beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS). Kabupaten Bogor dan Kawasan Puncak bagian Kabupaten Cianjur merupakan bagian

dari area hulu. Dinamika yang terjadi di area hulu tentunya dapat memberikan dampak pada area di bagian hilir dalam suatu ekosistem regional. Kawasan hulu di dalam Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur memiliki tipikal morfologi yang berbentuk hamparan dataran tinggi, perbukitan, dan pegunungan serta memiliki curah hujan yang tinggi. Keadaan yang sedemikian rupa membuat area hulu memiliki kerentanan terhadap bencana-bencana seperti gerakan tanah, longsor, dan banjir. Penyebab utama dari terjadinya bencana-bencana tersebut kebanyakan diakibatkan oleh alih fungsi lahan yang menyebabkan permasalahan lingkungan, terutama pada area hutan dan sempadan sungai. Pendekatan penataan ruang berbasis kesesuaian daya dukung daya tampung serta partisipatif masyarakat dapat menjadi solusi dalam penyelesaian isu strategis ini.

Tata Kelola Kawasan Aglomerasi belum Optimal

Jakarta sebagai kota metropolitan tidak dapat terlepas dari wilayah sekitarnya dalam lingkup aglomerasi Jabodetabekpunjur, yang mencakup Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur. Sebelum pembentukan UU DKJ, belum ada kelembagaan aglomerasi di tingkat daerah yang dapat menangani urusan lintas wilayah secara komprehensif. Sementara beberapa permasalahan infrastruktur seperti kemacetan lalu lintas, pengelolaan air, sampah, dan kebutuhan perumahan memerlukan kesepahaman urgensi dan pendekatan pembangunan yang terintegrasi dan sinergis antardaerah. Saat ini, telah diatur pembentukan kawasan aglomerasi pada Undang-Undang Daerah Khusus Ibukota Jakarta (UU DKJ) sebagai payung tata kelola lintas wilayah untuk Jabodetabekpunjur. Dengan adanya peraturan tersebut, diharapkan Jakarta dapat menjawab tantangan tata kelola dan koordinasi antar daerah dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh kawasan Jabodetabekpunjur.

3.4. Tantangan Jakarta Menuju Kota Global yang Kompetitif

Sehubungan dengan disahkannya Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang menjadi dasar hukum pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Nusantara, Kalimantan Timur, maka Jakarta akan mengalami perubahan status dan kedudukan yang tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara. Pasca pemindahan Ibu Kota Negara, Jakarta diarahkan sebagai pusat perekonomian nasional dan kota bisnis berskala global.

Diskursus tentang kota global telah banyak dilakukan oleh berbagai institusi, akademisi, maupun praktisi internasional. Menurut Ann Markusen (1994), kota global adalah kota yang berhasil bersaing mendapatkan status kota besar dalam, setidaknya, salah satu fungsi penting dalam mengintegrasikan ekonomi kapitalis internasional. Menurut Saskia Sassen (2006), kota global merupakan simpul utama dari berbagai kota-kota di dunia dan memiliki hubungan yang mengikat dengan kota-kota lain, serta memiliki dampak langsung pada urusan sosio-ekonomi global. Menurut Derek Gregory et.al (2009), kota global adalah simpul utama dalam organisasi ekonomi dunia sebagai: pusat-pusat

kendali ekonomi, produksi dan perdagangan, perputaran informasi, dan transmisi budaya, serta kekuatan politik. Menurut Greg Clark (2016), Kota global dicirikan oleh: (1) mendukung dan memiliki spesialisasi dari sektor yang diperdagangkan; (2) menarik dan mempertahankan wirausaha dengan populasi yang beragam; (3) mendorong inovasi untuk menciptakan pengaruh; (4) terdepan dalam penciptaan pasar, rute, produk, atau layanan baru; dan (5) memiliki keunggulan geopolitik. Dari penelaahan definisi menurut para pakar, definisi kota global diarahkan kepada “sebuah kota yang memiliki peran penting dalam pengintegrasian ekonomi transnasional (menjadi *primary node* dalam jaringan ekonomi dunia) yang mampu menarik modal, barang, sumber daya manusia, gagasan, serta informasi secara global.”

Dari definisi kota global beserta dengan berbagai variabel dan indikator yang ada, dalam 20 tahun ke depan, Jakarta diarahkan untuk menjadi kota global yang berdaya saing dan dapat berdiri sejajar dengan kota-kota global lain di dunia, dengan karakteristik sebagai berikut.

Tabel 3.2 Karakteristik Kota Global yang Berdaya Saing

Aspek	Karakteristik
Ekonomi yang mapan dan terkoneksi secara global	Memiliki skala ekonomi yang berdaya saing, memiliki potensi (iklim) pengembangan ekonomi yang baik, memiliki sumber daya tenaga kerja yang kompetitif, dan terhubung secara global (ditunjukkan dengan keberadaan perusahaan internasional skala besar)
Kapasitas riset dan inovasi yang baik dan menerus	Memiliki hasil riset dan inovasi dengan kuantitas dan kualitas yang mumpuni, memiliki iklim yang mendukung penciptaan riset dan inovasi, memiliki lembaga riset (termasuk universitas) yang kompetitif secara global
Ruang yang nyaman untuk dihuni	Memiliki kelengkapan infrastruktur dasar perkotaan yang baik, kondisi keamanan dan konflik sosial yang terkendali, kemudahan dalam memenuhi penghidupan, biaya hidup terjangkau, hingga kualitas sumber daya manusia yang baik (kesehatan dan pendidikan), serta kemudahan mengakses informasi
Pariwisata dan interaksi budaya yang menarik untuk wisatawan berkunjung	Memiliki daya tarik wisata dan budaya, memiliki kualitas untuk menerima <i>event-event</i> internasional (konser, <i>event</i> olahraga), memiliki infrastruktur wisata (stadion, museum, teater), dan memiliki fasilitas penunjang wisata yang memadai (hotel, restoran, hiburan malam, dll)
Lingkungan yang bersih, nyaman dan berkelanjutan	Memiliki kualitas lingkungan yang baik, berketahanan terhadap perubahan iklim, dan mengarah pada keberlanjutan
Aksesibilitas yang terkoneksi secara intra dan interkota	Memiliki kemudahan diakses oleh penduduk negara lain, memiliki kemudahan dan pilihan moda transportasi dalam kota, nyaman dan bebas hambatan bermobilitas di dalam kota

Saat ini Jakarta telah menjadi bagian kota global, namun belum dapat berdiri sejajar dengan kota-kota global lainnya. Beberapa lembaga internasional, melakukan pemeringkatan kota-kota global di dunia dengan masing-masing pendekatan dan indikator penilaian yang berbeda. Dari lima indeks kota global yang diterbitkan oleh beberapa lembaga pemeringkatan, posisi Jakarta di antara kota-kota global lainnya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.3 Peringkat Jakarta dalam Indeks Kota Global

Indeks	Variabel dan Indikator	Peringkat
<i>Global City Index (GCI)</i>	<i>Business Activity; Human Capital; Information Exchange; Cultural Experience; and Political Engagement (total 29 indikator)</i>	Tahun 2023 Jakarta peringkat 74 dari 156 kota
<i>Global Power City Index (GPCI)</i>	<i>Economy; Research and Development; Cultural Interaction; Livability; Environment; and Accesibility (total 68 indikator)</i>	Tahun 2022 Jakarta peringkat 45 dari 48 kota
<i>Economic Intelligence Unit (EIU) Livability Index</i>	<i>Stability; Healthcare; Cultural and Environment; Education; Infrastructure (total 30 indikator)</i>	Saat ini secara keseluruhan Jakarta berada di 139 dari 173 kota
<i>Cities in Motion Index</i>	<i>Economy; Social Cohesion; Environment; Human Capital; Governance; Mobility and Transportation; Urban Planning; International Profile; Technology (total 103 indikator)</i>	Tahun 2022 Jakarta peringkat 152 dari 183 kota

Karakteristik yang tertuang dalam enam aspek tersebut memiliki hubungan yang erat dan saling memengaruhi serta dipengaruhi satu sama lain. Adapun dengan kondisi Jakarta saat ini dan karakteristik kota global yang ingin diwujudkan, masih terdapat gap yang perlu dikejar dengan posisi sebagai berikut.

Tabel 3.4 Gap Kondisi Jakarta dan Kota Global

Variabel	Komponen	Data Dukung			
		Indikator	Jakarta	Kota Lain	
Aksesibilitas yang terkoneksi secara inter dan intra kota	Rendahnya penggunaan transportasi publik	<i>Mode share transportasi publik (persen)</i>	18,80 persen	Singapura	61 persen
				Tokyo	61,70 persen
				Shanghai	43,30 persen
	<i>Pergerakan metropolitan menggunakan kendaraan pribadi (persen)</i>	90,30 persen	Greater London	42 persen	
Panjangnya waktu tempuh akibat kemacetan	Rata-rata jarak dan waktu tempuh perjalanan menuju		17 km / 52 menit	Tokyo dan Singapura	14,5 km / 41 menit
				Bangkok	15,84 km / 45 menit

Variabel	Komponen	Data Dukung			
		Indikator	Jakarta	Kota Lain	
	sekolah/tempat kerja (km / menit)	Rata-rata waktu yang dihabiskan selama <i>rush hour</i> akibat kemacetan (jam)	169 jam	Tokyo	193 jam
				Bangkok	136 jam
				London	134 jam
				New York	114 jam
	Konektivitas menuju bandara belum optimal	Waktu tempuh dari bandara ke pusat kota dan <i>headway</i> kereta bandara (menit)	52 menit / 30 menit	Bangkok	26 menit / 10-15 menit
				Singapura	34 menit / 7-12 menit
	Rendahnya konektivitas Jakarta terhadap kota-kota dunia lainnya	Jumlah penerbangan <i>direct</i> internasional ke dan dari Jakarta (kota)	37 kota	Bangkok	83 kota
				Singapura	116 kota
				New York	126 kota
				London	365 kota
Kapasitas Riset dan Inovasi yang menerus	Kualitas pendidikan tinggi sebagai pintu gerbang riset dan inovasi belum berdaya saing	Jumlah universitas top 1000's dunia	1	London	> 15
				Bangkok	4
				Singapura	2 (<i>rank</i> 19 dan 32)
	Belum optimalnya kuantitas dan kualitas sumber daya riset Jakarta	Jumlah pelajar internasional di universitas top 1000's dunia (siswa)	5772 siswa	London	> 100.0000 siswa
				Singapura	14.492 siswa
				Bangkok	3.079 siswa
	Belum optimalnya kuantitas dan kualitas sumber daya riset Jakarta	Jumlah tenaga riset / 1 juta penduduk	3.375/1 juta penduduk	Beijing	15.075/1 juta penduduk
				Seoul	15.483/1 juta penduduk
				London	13.104/1 juta penduduk
				Singapura	7.225/1 juta penduduk
	Iklim riset belum optimal dalam mendukung penciptaan inovasi dan pengembangan bisnis	Jumlah paten yang diberikan	9.970	London	39,02
				New York	16,12
				Seoul	14,07
				Cina	798.347
				US	323.410
		Jumlah <i>start-up</i>	377	Jepang	201.420
				Korea Selatan	135.180
				Jerman	23.592
New York				25.000	
Singapura				4.000	
Pengeluaran riset (USD)	USD 50,8 juta	Tokyo	1.200		
		Shanghai	971		
		Seoul	USD 10,4 miliar		
Ekonomi yang mapan dan	Produktivitas ekonomi di Jakarta belum cukup bersaing	PDRB per kapita	USD 17.966	Singapura	USD 6,6 miliar
				New York	USD 122.980
				Tokyo	USD 88.322
				Singapura	USD 59.828
				Singapura	1,90 persen

Variabel	Komponen	Data Dukung				
		Indikator	Jakarta	Kota Lain		
terkoneksi secara global	dengan kota-kota global lainnya di dunia	Tingkat Pengangguran Terbuka	7.18 persen (377 ribu jiwa)	Tokyo	2,70 persen	
				New York	5,30 persen	
	Iklim usaha dan investasi di Jakarta belum kondusif dibandingkan dengan kota-kota global lainnya	<i>Ease of Doing Business Score</i>	82,2	China	94,1	
				Malaysia	92,4	
				Thailand	83,3	
	Kualitas SDM yang masih rendah	Global Talent Competitiveness Index	Peringkat 133 dengan skor 30,1	Tokyo	50	
				New York	53	
				Beijing	18	
	Lingkungan yang bersih, nyaman, dan berkelanjutan	Kualitas lingkungan hidup di wilayah Jakarta yang masih belum baik	Nilai AQI US	102 (per 5 Januari 2024)	Brussels	27 (per 5 Januari 2024)
				Persentase luas RTH	5,21 persen	Tokyo
Shanghai						38,15 persen
Singapura		46,50 persen				
Sistem pengelolaan sampah yang di Jakarta yang belum efisien untuk menopang pembangunan berkelanjutan		Persentase tingkat daur ulang sampah	26,11 persen	Brussel	39 persen	
				Singapura	52 persen	
				Beijing	87 persen	
Masih terdapat penduduk Jakarta yang tinggal di kawasan kumuh		Persentase penduduk tinggal di permukiman kumuh	23 persen	Seoul	0,02 persen	
				Tokyo	2 persen	
				Bangkok	20 persen	
Pengelolaan energi yang berkelanjutan belum maksimal	Bauran EBT	0,32 persen	Beijing	10,40 persen		
			Tokyo	13,70 persen		
			Paris	25,30 persen		
Sistem pengelolaan air bersih di Jakarta belum menyeluruh	Persentase cakupan layanan	66,73 persen	Singapura	100 persen		
			London	99,82 persen		
			Seoul	99,19		
Pengelolaan sanitasi dan pengelolaan air limbah masih terbatas	Persentase cakupan layanan	21,18 persen	Seoul	85 persen		
			Tokyo	100 persen		
			London	100 persen		
Ruang yang Nyaman untuk dihuni	Tingginya tingkat kriminalitas serta belum ramah terhadap kelompok rentan (perempuan, anak, lansia, dan disabilitas)	Jumlah Kriminalitas	8.112	Sydney	6.588	
				Melbourne	5.536	
				Tokyo	230	

Variabel	Komponen	Data Dukung			
		Indikator	Jakarta	Kota Lain	
	Pembangunan dan kualitas sumber daya manusia yang masih rendah akibat <i>mismatch</i> keterampilan dan minimnya keahlian berdaya saing global	Angka Harapan Hidup	73,22 tahun	Brussels	81,7 tahun
				Singapura	83 tahun
		Tingkat Pengangguran	7,18 persen	Singapura	2,76 persen
				Amsterdam	4,08 persen
		Indeks Pembangunan Manusia	81,65	Singapura	0,939
				Jepang	0,925
	Kualitas pendidikan yang tidak berdaya saing	Rata-rata Lama Sekolah	11,31 tahun	Singapura	13,9 tahun
				Tokyo	13 tahun
		Peringkat PISA	216	Sydney	64
				Singapura	1
		London	70		
Budaya dan wisata yang menarik wisatawan untuk berkunjung	Minimnya daya tarik wisata dan budaya	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	1.963.059 wisatawan	Paris	36,9 juta wisatawan
				Bangkok	22,78 juta wisatawan
				Singapura	13,6 juta wisatawan
	Belum optimalnya infrastruktur wisata	Jumlah Museum	63 museum	Bangkok	152 triliun
				Singapura	143 triliun
				Seoul	130 museum
			New York	240 museum	

Jakarta masih memiliki berbagai tantangan besar yang harus diselesaikan. Beberapa tantangan tersebut antara lain kepadatan penduduk, kurangnya tenaga kerja terampil, permukiman kumuh, kemacetan, polusi udara, pengelolaan persampahan, akses air bersih, pengelolaan limbah, tingginya risiko bencana alam seperti banjir, rob, dan penurunan tanah, serta tantangan perubahan iklim. Selain itu, sebagai kota global, Jakarta harus mampu bersaing untuk memiliki perekonomian yang kuat sehingga memungkinkan Jakarta untuk menjadi *primary node* dalam jaringan perekonomian dunia. Jakarta juga harus mampu menyediakan lingkungan yang nyaman untuk dihuni oleh warga lokal maupun internasional, serta mampu memperkenalkan budaya Jakarta di mata dunia.

Dalam dua puluh tahun ke depan, Jakarta diharapkan mampu berada di jajaran Top 20 kota global dunia. Dengan posisi Jakarta saat ini yang masih berada di posisi menengah ke bawah, masih banyak ketertinggalan Jakarta dengan kota global lainnya, seperti:

1. Dalam konteks ekonomi, Jakarta belum memiliki kondisi yang mendukung untuk pengembangan bisnis skala global, dilihat dari hanya ada 1 dari Top 500 perusahaan dunia yang berasal dari Jakarta yaitu Pertamina. Sementara itu, hampir 50 persen dari

- Top 100 perusahaan dunia ada di London. Dilihat dari skala ekonominya, Jakarta belum menjadi *primary node* dalam perekonomian dunia seperti New York, London, Tokyo, dan Jakarta yang memiliki iklim yang baik untuk melakukan bisnis berskala internasional, memiliki *ease of doing business* yang baik, serta memiliki kemudahan menjalin kerja sama global dalam bidang ekonomi.
2. Dalam hal *research and development*, performa akademis Jakarta masih sangat tertinggal dari kota lain, dilihat dari peringkat R&D Jakarta berada di posisi 48 dari 48 kota menurut GPCI 2022. Skor PISA Jakarta juga jauh berada di bawah rata-rata OECD. Ekosistem akademik di Jakarta belum cukup kondusif untuk dapat menarik mahasiswa internasional bersekolah di Jakarta yang ditunjukkan dengan jumlah mahasiswa internasional di Jakarta hanya mencapai 5.772 siswa, jauh dibandingkan dengan Singapura yang berjumlah 14.492 siswa dan London yang memiliki mahasiswa internasional lebih dari 100.000 siswa. Faktor keberadaan universitas Top 1000 dunia juga berpengaruh, Jakarta hanya memiliki 1 universitas Top 1000 dunia, sedangkan Singapura terdapat 2 universitas dengan peringkat Top 50 serta London memiliki lebih dari 15 universitas Top 1000 dunia. *Research and development* memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan ekonomi Jakarta untuk menghasilkan industri-industri baru berteknologi tinggi dan bernilai tambah tinggi melalui pengembangan *start-up*. Namun, Jakarta masih tertinggal dari kota global lainnya karena pada tahun 2022 tercatat jumlah *start-up* di Jakarta hanya 377 sedangkan Singapura memiliki jumlah *start-up* 4.000 dan Tokyo 1.200.
 3. Dalam aspek kelayakhunian dan lingkungan, Jakarta memiliki peringkat yang cukup baik karena memiliki biaya hidup yang murah dan harga sewa properti yang rendah dibanding dengan kota global lainnya. Angka kriminalitas juga cenderung lebih rendah daripada kota global lainnya seperti London, New York, dan Paris, namun lebih rendah dibanding Tokyo. Ketertinggalan Jakarta dengan kota lain dalam aspek kelayakhunian adalah dalam penyediaan layanan dan fasilitas dasar yang berkualitas. Ketersediaan hunian layak, pasokan air bersih, dan listrik belum seluruhnya merata dan memenuhi standar global. Jaringan pipa air bersih baru menjangkau 65 persen wilayah Jakarta. Selain itu, Jakarta memiliki risiko bencana yang tinggi. Penurunan permukaan tanah yang tinggi dan meningkatnya level air laut membaut potensi bencana banjir rob meningkat, sementara progres pengembangan sistem pengendali banjir di sekitar pesisir tanggul, sistem polder, dan sarana prasarana pengendali banjir lainnya di Jakarta belum terbangun seluruhnya. Selain itu, fasilitas teknologi, informasi, dan komunikasi belum sepenuhnya terbangun secara merata dan memiliki standar internasional, terutama terkait dengan internet. Suhu udara di sebuah kota juga menjadi sebuah indikator untuk menciptakan kelayakhunian kota. Dalam hal ini, suhu udara di Jakarta rata-rata mencapai 27,95 namun terus meningkat karena fenomena *urban heat island*.
 4. Dalam konteks interaksi budaya, jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Jakarta belum kompetitif dibandingkan dengan kota lain. Hal ini disebabkan karena jumlah

- tourist attraction* dan fasilitas penunjang skala internasional yang belum memadai, seperti museum, teater, dan studio. Sebagai contoh, perbandingan jumlah museum Jakarta dengan Seoul sangat timpang, Jakarta hanya memiliki 63 museum dan Seoul 130 museum, Jakarta hanya memiliki 8 teater dan Seoul 436 teater, serta Jakarta hanya memiliki 2 studio dan Seoul 11 studio. Budaya dan pariwisata di Jakarta memiliki potensi yang tinggi untuk dikembangkan dan menarik wisatawan asing maupun domestik untuk datang ke Jakarta. Perlu pengelolaan yang komprehensif terhadap seluruh obyek wisata, baik yang menjadi aset pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan swasta. Di samping hal tersebut, perlu dukungan terhadap ekosistem industri hiburan dan literatur agar dapat bersaing secara global.
5. Terkait dengan aksesibilitas, Jakarta masih memiliki banyak kendala dan ketertinggalan. Aksesibilitas menjadi aspek vital untuk keterhubungan Jakarta dengan dunia internasional maupun konektivitas Jakarta dengan kota lainnya di Indonesia. Dalam hal konektivitas internasional, jumlah *international direct flight* dari dan ke Jakarta masih rendah dibandingkan dengan kota global lainnya yaitu hanya berjumlah 37 kota, sedangkan Bangkok memiliki jumlah 83 kota, Singapura 116 kota dan New York 126 kota. Waktu tempuh dari bandara internasional yang menghubungkan Jakarta dengan kota lain termasuk ke dalam kategori cukup lama karena bandara internasional berada di provinsi lain (Provinsi Banten), sedangkan hampir semua kota global memiliki bandara internasional di dalam kota tersebut.
 6. Dalam hal konektivitas darat domestik, ketimpangan infrastruktur transportasi di dalam kota Jakarta (*main land*) dengan infrastruktur yang ada di Kepulauan Seribu. Padahal, Kepulauan Seribu memiliki potensi pariwisata maritim yang besar untuk dikembangkan untuk menarik wisatawan domestik dan internasional. *Mode share* transportasi Jakarta juga masih rendah sebesar 18 persen, dibandingkan dengan kota global lainnya yang rata-rata sudah mencapai 50 persen. Selain itu, sistem logistik yang ada di Jakarta belum cukup andal dan saat ini baru tersedia jalur darat berbasis jalan. Perlu pengembangan transportasi berbasis rel untuk meningkatkan *mode share* dan memperbaiki sistem logistik. Dalam konteks transportasi laut, Jakarta sebagai kota global belum memiliki Pelabuhan dalam (*deep sea port*) untuk mendukung *transshipment* dalam skala nasional maupun global.

3.5. Isu Strategis Jakarta

Perumusan isu strategis Jakarta 2025 – 2045 didasari dari beberapa lapisan konteks, yaitu permasalahan Jakarta, isu pembangunan global, nasional, hingga regional dalam konteks ini Wilayah Aglomerasi Jabodetabekpunjur. Adapun identifikasi lapisan konsideran isu strategis Jakarta 2025 – 2045 didapatkan dari beberapa sumber seperti kondisi aktual Jakarta saat ini, hasil evaluasi RPJPD Jakarta 2005 – 2045, RPJPN 2025 – 2045, Rancangan Peraturan Daerah RTRW Provinsi DKI Jakarta 2024 – 2044, KLHS RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2025 – 2045, RPPLH Provinsi DKI Jakarta 2022 – 2052,

dokumen lain yang dianggap relevan dan dapat dipertanggungjawabkan, serta hasil kajian kota global dan hasil penjarangan isu kota global yang telah dilaksanakan.



Gambar 3.3 Konsideran Perumusan Isu Strategis Jakarta 2025 – 2045

Berdasarkan permasalahan dan isu-isu global, nasional, serta kewilayahan Jabodetabek, maka dirumuskan isu strategis pembangunan Jakarta sebagai berikut.

1. **Peningkatan kualitas sumber daya manusia berdaya saing global.** Persaingan Jakarta dalam tataran global membutuhkan dukungan utama melalui sumber daya manusia yang unggul dan berkeahlian tinggi. Kurang optimalnya kualitas ini memberikan hambatan bagi pengembangan wilayah dan daya saing Jakarta terhadap kota-kota global lainnya. Terlebih lagi, jumlah penduduk Jakarta diproyeksikan akan berkurang pada tahun 2045 sehingga pengoptimalan kualitas penduduk berusia produktif menjadi fokus utama. Kualitas ini ditentukan oleh beberapa penyebab krusial seperti kualitas kesehatan masyarakat yang belum optimal, partisipasi pendidikan yang merata dan kualitas pendidikan mulai dari tingkat dini hingga menengah, serta lulusan sekolah vokasi yang belum terserap dan berdaya saing. Selain itu, kualitas masyarakat ditunjukkan oleh penurunan pembangunan gender dan kualitas pembangunan pemuda di bawah rata-rata nasional. Perhatian terhadap pembangunan kualitas sumber daya manusia juga dilihat melalui inklusivitas sosial yang ditandai dengan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya di dalam dunia kerja. Proporsi perempuan dan penyandang disabilitas yang bekerja cukup rendah menandakan adanya kesenjangan pada kelompok masyarakat yang berbeda.

2. **Pemerataan kesejahteraan masyarakat.** Angka kemiskinan mengalami stagnansi dan indeks gini terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Tingkat kemiskinan Jakarta pada tahun 2018 - 2023 meningkat dan cenderung stagnan di rentang 4,53 - 4,69, sedangkan target nasional dan Jakarta adalah mewujudkan tingkat kemiskinan menuju 0. Berdasarkan data BPS Ibukota Jakarta tahun 2023 (telah dijabarkan dalam Bab 2 Subbab Kesejahteraan Ekonomi), rasio gini Jakarta terus meningkat dalam lima tahun terakhir hingga 0,42, menunjukkan semakin rendahnya peran kelompok penduduk dengan pendapatan rendah dalam pembentukan total pendapatan yang diterima penduduk Jakarta dan menandakan bahwa kesejahteraan masyarakat belum merata.
3. **Peningkatan produktivitas ekonomi yang setara dengan kota global di negara maju dan stabilitas ekonomi yang kokoh.** Produktivitas ekonomi menjadi landasan utama bagi daya saing sebuah kota di kancah global. Dengan tingkat produktivitas yang tinggi, sebuah kota mampu menghasilkan lebih banyak barang dan jasa dengan sumber daya yang tersedia, meningkatkan efisiensi dalam proses produksi, serta menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Sebuah kota yang produktif dapat menarik investasi baik domestik maupun asing, meningkatkan ekspor, dan membangun reputasi yang baik terkait daya saingnya dengan kota lain. Jakarta diarahkan menjadi pusat ekonomi dan bisnis tidak hanya nasional tapi juga regional Asia Tenggara. Namun demikian, produktivitas Jakarta dibandingkan dengan kota-kota global lainnya, terutama di Asia Tenggara masih belum cukup bersaing, yaitu berada di bawah Singapura dan Bangkok, dilihat dari nilai PDRB per kapita Jakarta sebesar USD 17.996, sedangkan Singapura mencapai USD 59.828 dan Bangkok mencapai USD 19.099 di tahun 2022. Produktivitas ekonomi yang tinggi tidak hanya memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Jakarta, tetapi juga memperkuat posisi Jakarta dalam persaingan global serta menarik berbagai kegiatan ekonomi global untuk beroperasi atau berpusat di Jakarta.
4. **Peningkatan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkenalkan budaya di kancah global.** Pariwisata dan ekonomi kreatif diarahkan untuk menjadi sumber pertumbuhan ekonomi Jakarta, selain sektor industri pengolahan dan jasa keuangan. Namun demikian, kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap total nilai PDRB Jakarta masih rendah dan belum optimal dalam memberikan sumber pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Nilai PDRB pariwisata baru berkontribusi 4,51 persen terhadap total PDRB Jakarta, sedangkan PDRB ekonomi kreatif berkontribusi tidak lebih dari 11 persen terhadap total PDRB. Padahal, Jakarta memiliki berbagai atraksi wisata yang menarik dan sub sektor ekonomi kreatif yang beragam namun jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung sebesar 1.963.059 pada tahun 2023 masih berada jauh dengan kota global lainnya seperti Bangkok dan Singapura. Selain itu, Jakarta memiliki kebudayaan khas yaitu budaya Betawi, serta menjadi pusat kebudayaan nasional karena Jakarta merupakan tempat berkumpulnya masyarakat Indonesia

dari berbagai daerah dengan masing-masing tradisinya. Jakarta adalah miniatur Indonesia, dan memiliki potensi besar yang perlu dioptimalkan untuk memperkenalkan budaya yang ada di kancah global yang saat ini belum optimal.

5. **Optimalisasi riset dalam mendukung penciptaan inovasi dan pengembangan bisnis.** Riset memiliki peran yang cukup penting dalam mendorong kemajuan ekonomi dan pembangunan wilayah. Melalui riset yang optimal dan berkualitas, penciptaan inovasi menjadi lebih efektif yang kemudian dapat mendukung pengembangan bisnis dan menciptakan nilai tambah barang dan meningkatkan daya saing wilayah, terutama dalam persaingan global. Ekosistem riset yang ideal dibangun oleh beberapa faktor yang saling berkaitan seperti kualitas sumber daya riset, tata kelembagaan, skema pendanaan, akuntabilitas, dan kerangka regulasi. Namun, Jakarta saat ini sedang menghadapi tantangan dalam meningkatkan kualitas ekosistem riset pada setiap aspek-aspek tersebut sehingga investasi dan pengoptimalan perlu dilakukan. Investasi riset dapat memberikan dampak langsung dan dampak jangka panjang. Untuk dampak langsung peningkatan riset dan inovasi dapat membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pertumbuhan bisnis, serta menciptakan produk, bisnis, serta jasa. Sementara dalam jangka panjang dapat meningkatkan kesejahteraan secara umum, serta membangun identitas dan *prestige* Jakarta di kancah dunia.
6. **Optimalisasi pergerakan manusia, barang, dan informasi.** Jakarta sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pusat pemerintahan menghasilkan bangkitan dan tarikan yang besar. Populasi yang datang, pergi, maupun bermobilisasi di dalam Jakarta berjumlah tinggi, baik dalam lingkup lokal, regional, nasional, maupun internasional. Tidak hanya pergerakan penumpang, pergerakan barang atau logistik juga menjadi suatu pergerakan yang menjadi tulang punggung kegiatan perkotaan. Permasalahan kemacetan tidak dapat dihindari oleh penduduk Jakarta, dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mengurangi kemacetan adalah salah satunya dengan meningkatkan efisiensi transportasi umum karena *mode share* angkutan umum Jakarta saat ini baru mencapai 18,86 persen di tahun 2023. Peningkatan kemudahan pergerakan manusia dan barang juga termasuk optimalisasi konektivitas laut dan udara di Jakarta yang mudah diakses secara nasional maupun internasional. Selain itu, pertukaran informasi juga penting ditingkatkan dengan mendorong pembangunan infrastruktur telekomunikasi di seluruh wilayah Jakarta, karena dengan infrastruktur telekomunikasi yang baik secara ekonomi dapat meningkatkan produktivitas perusahaan dan pekerja, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan efektivitas proses produksi, dan mengakselerasi inovasi. Dari segi sumber daya manusia infrastruktur telekomunikasi yang baik dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan membantu menurunkan tingkat kemiskinan.
7. **Penyelenggaraan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik yang efisien dan efektif.** Layanan publik melalui tata kelola birokrasi menjadi aspek krusial dalam meningkatkan kualitas layanan pemerintahan. Permasalahan kapasitas pegawai

dapat menghambat responsivitas dalam menanggapi kebutuhan masyarakat dan menyelesaikan permasalahan. Jakarta perlu mewujudkan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengembangan manajemen talenta untuk meningkatkan kondisi lingkungan kerja melalui proses rekrutmen dan seleksi, pengembangan, pengikatan, dan mempertahankan pegawai yang memiliki keahlian dan bakat dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi di masa sekarang ini dan di masa yang akan datang. Selain itu, pergantian status Jakarta yang tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara juga menjadi tantangan tersendiri bagi Jakarta untuk menyesuaikan dengan regulasi dan tata kelola baru yang lebih *agile*, transparan, dan akuntabel.

8. **Perwujudan kota layak huni yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.** Keberlanjutan dan kualitas lingkungan hidup merupakan faktor yang saling berkaitan dalam penciptaan kota yang layak untuk dihuni dan mampu menopang seluruh kegiatan masyarakatnya. Dengan melihat daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup Jakarta, sektor lingkungan menjadi isu yang cukup strategis untuk ditangani guna meningkatkan kualitas kelayakan hidup. Beberapa perhatian khusus juga perlu diberikan kepada fenomena penurunan muka tanah yang akan memberikan dampak negatif cukup besar bagi perkembangan kota dan kehidupan masyarakat di pesisir Jakarta. Selain itu, penyediaan fasilitas layanan dasar seperti pengelolaan air bersih, penyediaan perumahan dan permukiman, pengolahan air limbah, pengolahan sampah juga tetap perlu dipenuhi tidak hanya dari sisi jumlah atau ketersediaan, tetapi juga kualitas yang dapat mendukung ketahanan kota.
9. **Penciptaan lingkungan perkotaan yang mandiri, adaptif, dan tangguh terhadap perubahan iklim.** Fenomena *global boiling* dan dampak perubahan iklim dapat memperburuk kondisi lingkungan hidup Jakarta yang sudah berada pada kondisi yang tidak optimal, seperti suhu yang terus meningkat serta ancaman penurunan muka tanah dan peningkatan muka air laut di Jakarta. Dampak yang ditimbulkan dapat menjadi besar seperti kerugian finansial akibat meningkatnya faktor risiko bencana alam dan keamanan masyarakat. Untuk menjaga ketahanan kota dalam menghadapi efek dari perubahan iklim tersebut, maka diperlukan upaya adaptasi perubahan iklim yang dapat mengurangi risiko perubahan iklim serta usaha mereduksi emisi gas rumah kaca. Begitu juga langkah mitigasi yang dapat dilakukan melalui pengelolaan energi berkelanjutan dan percepatan transisi energi baru terbarukan perlu menjadi perhatian dalam pembangunan Jakarta dalam 20 tahun mendatang.

Tabel 3.5 Rumusan Isu Strategis Pembangunan Daerah Tahun 2025 - 2045

No	Permasalahan Jakarta	Tantangan IKN	Tantangan Kota Global	Isu Sesuai Konteks		Jabodetabek	Isu Strategis Jakarta
				Global	Nasional		
1	Rendahnya partisipasi untuk memperoleh pendidikan dini, dasar, dan menengah		Ruang yang nyaman untuk dihuni	<p>a. Disrupsi teknologi dan kemajuan komputasi kecerdasan buatan yang sangat cepat</p> <p>b. Populasi dunia meningkat serta tingginya arus urbanisasi dunia.</p>	<p>Akses dan kualitas yang belum merata di bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial</p>		Peningkatan kualitas sumber daya manusia berdaya saing global
2	Rendahnya kualitas capaian peserta didik			<p>Produktivitas tenaga kerja Indonesia masih relatif tertinggal</p>			
3	Daya serap lulusan pendidikan vokasi masih rendah			<p>a. Produktivitas tenaga kerja Indonesia masih relatif tertinggal</p> <p>b. Akses dan kualitas yang belum merata di bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial</p> <p>c. Pengoptimalan Bonus Demografi</p>			
4	Angka kemiskinan stagnan dan indeks gini dalam lima tahun terakhir terus meningkat (berdasarkan data yang telah dijabarkan pada Bab 2 terkait Rasio Gini)			<p>a. Disrupsi teknologi dan kemajuan komputasi kecerdasan buatan yang sangat cepat</p> <p>b. Populasi dunia meningkat serta tingginya arus urbanisasi dunia.</p>	<p>a. Akses dan kualitas yang belum merata di bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial</p> <p>b. Produktivitas tenaga kerja Indonesia masih relatif tertinggal</p>		Pemerataan kesejahteraan masyarakat
5	Pembangunan kepeloporan dan kepemimpinan pemuda yang dilakukan belum sinkron dan terintegrasi secara optimal sehingga belum mampu berperan			<p>a. Akses dan kualitas yang belum merata di bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial</p>			

No	Permasalahan Jakarta	Tantangan IKN	Tantangan Kota Global	Isu Sesuai Konteks		Jabodetabek	Isu Strategis Jakarta
				Global	Nasional		
6	sebagai mitra pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat Layanan kesehatan belum optimal dalam mengeliminasi penyakit menular dan mencegah penyakit tidak menular sehingga menyebabkan SDM yang tidak produktif						
7	Ketimpangan pembangunan gender dan kekerasan berbasis gender masih tinggi						
8	PDRB per kapita Jakarta belum kompetitif dibanding dengan kota global di negara maju.	Penurunan Belanja dan Pendapatan Daerah	Ekonomi yang mapan dan terkoneksi secara global	Dinamika dan persaingan geopolitik dan geoekonomi	a. Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi b. Rendahnya peran perkotaan di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi Akses dan kualitas yang belum merata di bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.		Peningkatan produktivitas ekonomi yang setara dengan kota global di negara maju dan stabilitas ekonomi yang kokoh
9	Ketimpangan pendapatan masih tinggi dan akses terhadap fasilitas publik serta pelayanan dasar yang berkualitas belum merata.			Dinamika dan persaingan geopolitik dan geoekonomi			

No	Permasalahan Jakarta	Tantangan IKN	Tantangan Kota Global	Isu Sesuai Konteks		Jabodetabek	Isu Strategis Jakarta
				Global	Nasional		
10	Tingkat Pengangguran Terbuka Jakarta masih tinggi			<p>a. Disrupsi teknologi dan kemajuan komputasi kecerdasan buatan yang sangat cepat</p> <p>b. Rendahnya peran perkotaan di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi</p>	Lemahnya kapasitas ilmu pengetahuan, riset, teknologi, dan inovasi		
11	Efisiensi investasi Jakarta perlu ditingkatkan	Alih Fungsi dan Pemanfaatan Barang Milik Negara		Perdagangan internasional diproyeksikan akan berpusat di kawasan Asia-Afrika	Pemindahan Ibu Kota Negara		
12	Infrastruktur digital masih tertinggal dibanding kota-kota global di negara maju		Ruang yang nyaman untuk dihuni	Disrupsi teknologi dan kemajuan komputasi kecerdasan buatan yang sangat cepat	Transformasi digital di tingkat pemerintahan masih dihadapi oleh berbagai tantangan mendasar		
13	Pariwisata dan ekonomi kreatif belum optimal dalam menarik wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Jakarta dan meningkatkan perekonomian secara signifikan	Potensi Penurunan Daya Tarik	Budaya dan wisata yang menarik wisatawan untuk berkunjung	Perdagangan internasional diproyeksikan akan berpusat di kawasan Asia-Afrika	Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata, ekonomi kreatif, dan budaya		Peningkatan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkenalkan budaya di kancah global
14	Pembangunan kebudayaan masih kurang						

No	Permasalahan Jakarta	Tantangan IKN	Tantangan Kota Global	Isu Sesuai Konteks		Isu Strategis Jakarta
				Global	Nasional	
	berperan dalam membentuk karakter dan jati diri masyarakat yang berdaya saing global.				Jabodetabek	
15	Pengeluaran riset belum menunjukkan komitmen dalam mendukung penciptaan inovasi dan pengembangan bisnis		Kapasitas riset dan inovasi yang baik dan menerus	Disrupsi teknologi dan kemajuan komputasi kecerdasan buatan yang sangat cepat	Lemahnya kapasitas ilmu pengetahuan, riset, teknologi, dan inovasi	Optimalisasi riset dalam mendukung penciptaan inovasi dan pengembangan bisnis
16	Minimnya sumber daya riset di Jakarta				Kuantitas dan kualitas SDM peneliti belum memadai	
17	Rendahnya penggunaan transportasi publik	Permasalahan Kemacetan, Polusi, dan Banjir	Aksesibilitas yang terkoneksi secara intra dan inter kota	Populasi dunia meningkat serta tingginya arus urbanisasi dunia	<p>a. Pembangunan infrastruktur masih jauh di bawah kebutuhannya</p> <p>b. Kapasitas pembiayaan untuk memenuhi percepatan dan peningkatan kebutuhan pembangunan dari pemerintah pusat, daerah, dan non publik masih terbatas</p>	Optimalisasi pergerakan manusia, barang, dan informasi
18	Aksesibilitas dan konektivitas ke Kepulauan Seribu masih terhambat				<p>a. Konektivitas laut dan penyebrangan serta konektivitas udara yang menjadi tulang punggung angkutan barang dan penumpang belum optimal dalam menunjang konektivitas domestik dan global</p> <p>b. Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut</p>	Kerentanan Bencana di Wilayah Pesisir dan Pantai

No	Permasalahan Jakarta	Tantangan IKN	Tantangan Kota Global	Isu Sesuai Konteks		Jabodetabek	Isu Strategis Jakarta
				Global	Nasional		
19	Tantangan mempertahankan dan meningkatkan performa pelayanan publik			Dinamika dan persaingan geopolitik dan geoekonomi	a. <i>Hyper regulation</i> berkualitas rendah menyebabkan tumpang tindih regulasi Transformasi digital di tingkat pemerintahan masih dihadapkan oleh berbagai tantangan mendasar		Penyelenggaraan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik yang efisien dan efektif
20	Tata kelola pemerintahan sebagai fondasi utama pembangunan Jakarta masih perlu dipertahankan dan dioptimalkan				a. Proses bisnis dan tata kelola urusan pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak adaptif Transformasi digital di tingkat pemerintahan masih dihadapkan oleh berbagai tantangan mendasar		
21	Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Jakarta yang masih rendah.		Lingkungan yang bersih, nyaman dan berkelanjutan	Ancaman <i>triple planetary crisis</i>	Pembangunan infrastruktur masih jauh di bawah kebutuhannya	Tingginya Potensi Ancaman Banjir	Perwujudan kota layak huni yang aman, nyaman, dan berkelanjutan
22	Sistem pengelolaan air bersih di Jakarta belum merata			Urbanisasi dunia berlangsung dengan cepat dan tanpa batas	Pembangunan infrastruktur masih jauh di bawah kebutuhannya	Ketersediaan Air Bersih belum Terpenuhi	
23	Perumahan dan permukiman masih menghadapi berbagai permasalahan			Populasi dunia meningkat serta tingginya arus urbanisasi dunia	Pembangunan infrastruktur masih jauh di bawah kebutuhannya	Tumbuhnya Permukiman Kumuh yang Tidak Terkendali	
24	Pengelolaan sanitasi dan pengelolaan air limbah masih terbatas			Populasi dunia meningkat serta tingginya arus urbanisasi dunia	Pembangunan infrastruktur masih jauh di bawah kebutuhannya		
25	Pelayanan dan pengelolaan sampah belum menjangkau ke			Populasi dunia meningkat serta tingginya arus urbanisasi dunia	a. Rendahnya penggunaan energi terbarukan b. Pencemaran lingkungan dan ekonomi hijau	Pengelolaan dan Kapasitas Penampungan Sampah yang Belum Optimal	

No	Permasalahan Jakarta	Tantangan IKN	Tantangan Kota Global	Isu Sesuai Konteks		Isu Strategis Jakarta
				Global	Nasional	
26	seluruh wilayah Jakarta Perubahan iklim yang menjadi ancaman serius bagi Jakarta, terutama dalam beberapa dekade terakhir	Permasalahan Kemacetan, Polusi, dan Banjir		Ancaman <i>triple planetary crisis</i>	a. Pencemaran lingkungan dan ekonomi hijau b. Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan	Penciptaan lingkungan perkotaan yang mandiri, adaptif, dan tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim
27	Pengembangan energi baru terbarukan di Jakarta belum optimal				Rendahnya penggunaan energi terbarukan	
28	Tingginya risiko bencana banjir di Jakarta				a. Pencemaran lingkungan dan ekonomi hijau b. Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan	a. Tingginya Potensi Ancaman Banjir b. Potensi Bencana di Kawasan Hulu yang Berdampak pada Kawasan Hilir
29	Kapasitas ketahanan daerah terhadap bencana belum optimal					Potensi Bencana di Kawasan Hulu yang Berdampak pada Kawasan Hilir






BAB **04**

Visi dan Misi

Pada tahun 2045, Jakarta mampu berdiri sejajar dengan kota-kota global di negara maju, dengan ciri khas tersendiri dan daya saing yang tinggi di kancah internasional



BAB 4

VISI DAN MISI

4.1 Visi

Berdasarkan kekuatan modal dasar yang dimiliki Jakarta, isu dan permasalahan yang dihadapi, tantangan nasional, regional, dan global ke depan, pencapaian pembangunan pada periode sebelumnya, serta upaya perwujudan Visi Indonesia Emas 2045, maka visi Jakarta diterjemahkan dalam Visi Pembangunan Jangka Panjang Jakarta Tahun 2025 - 2045 sebagai

Jakarta Kota Global yang Maju, Berkeadilan, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan.

Maju

Jakarta sebagai kota yang maju pada tahun 2045, merupakan manifestasi dari cita-cita besar untuk menjadi kota yang modern, inovatif, responsif, dan progresif, dengan semangat terus beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Dengan prinsip tersebut, Jakarta adalah kota berbasis pengetahuan dan teknologi sebagai pusat peradaban nasional yang terhubung dengan dunia internasional, serta mampu mengikuti perkembangan global dan merespons tuntutan zaman. Jakarta yang maju dicirikan dengan pemanfaatan pengetahuan dan inovasi pada seluruh elemen pembangunan wilayah, pembangunan infrastruktur modern yang berkualitas dan adaptif, penyediaan layanan dan jasa yang terdepan, regulasi dan tata kelola pelayanan publik yang transparan, responsif, dan efektif terhadap kebutuhan aktivitas perkotaan, serta penduduk yang sejahtera, setara, dan berkebudayaan maju yang tetap mempertahankan identitas budaya Jakarta serta nilai-nilai luhur bangsa.

Berkeadilan

Jakarta yang berkeadilan merupakan perwujudan Jakarta sebagai kota inklusif yang memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh warganya dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, akses infrastruktur, layanan publik, dan perlindungan hukum. Pembangunan Jakarta ke depan memperhatikan pelibatan peran yang setara sebagai bagian dari upaya perwujudan cita-cita besar Jakarta 2045 serta memastikan setiap masyarakat Jakarta mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari tujuan pembangunan.

Berdaya Saing

Jakarta yang berdaya saing berarti Jakarta mampu menempatkan diri sebagai kota yang kompetitif dan memiliki semangat menjadi sebuah kota yang unggul di kancah nasional maupun global, untuk dapat menarik sumber daya finansial, manusia, barang, serta informasi dan pengetahuan seluas-luasnya dengan memaksimalkan keunggulan komparatif, kompetitif, dan kolaboratif. Untuk mewujudkan kota yang berdaya saing, Jakarta memaksimalkan potensi sumber daya dan keunikan yang dimiliki serta memperkuat dan memperluas kolaborasi dengan berbagai elemen pembangunan untuk dapat meningkatkan citra dan pengaruh dalam diplomasi global, sehingga pada tahun 2045 Jakarta berdiri sejajar dengan kota-kota global di negara maju lainnya. Jakarta yang berdaya saing dicirikan dengan sumber daya manusia yang unggul dan berkeahlian tinggi, ekonomi yang berketahanan, produktif dan berdaya saing global, infrastruktur yang andal dan mumpuni, interaksi budaya yang mendunia, serta memiliki peran dan pengaruh diplomasi yang kuat dalam pergaulan kota-kota dunia.

Berkelanjutan

Jakarta yang berkelanjutan adalah sebuah pernyataan komitmen bahwa pembangunan Jakarta ke depan tetap mengutamakan keseimbangan dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Jakarta ke depan adalah kota yang memiliki kualitas lingkungan hidup yang baik, nyaman, dan lestari serta menghadapi berbagai risiko dan ancaman perubahan iklim, bencana alam, maupun non alam. Selain memastikan Jakarta tetap eksis di masa depan secara lingkungan fisik, kata berkelanjutan juga dapat dimaknai dengan kesinambungan pembangunan. Hal ini berarti pembangunan Jakarta memperhatikan dan dilandaskan oleh perencanaan, pembiayaan, serta penyelenggaraan yang efektif dan berkesinambungan selama 20 tahun sehingga tetap harmonis dan konsisten, serta mampu mewujudkan tercapai tujuan besar Jakarta pada tahun 2045. Jakarta yang berkelanjutan ditandai dengan terciptanya kualitas lingkungan yang baik, nyaman, dan lestari, berketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dengan meminimalisasi produksi emisi gas rumah kaca, serta memiliki ketahanan air, energi, dan pangan. Ketangguhan Jakarta didukung oleh sistem pembangunan adaptif dan berketahanan, infrastruktur yang kokoh, andal, dan selaras dengan kondisi lingkungan yang lestari.

4.2 Sasaran Visi

01 Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

	Baseline 2025	Target 2045
Indeks Modal Manusia	0,63	0,85

02 Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang

	Baseline 2025	Target 2045
Tingkat Kemiskinan (%)	3,55 - 3,85	0,00 - 0,50
Rasio gini (Indeks)	0,425 - 0,430	0,363 - 0,386
Kontribusi PDRB Provinsi (%)	16,69	14,17
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,98 - 5,23	5,07 - 5,92

03 Peningkatan Pendapatan per Kapita

	Baseline 2025	Target 2045
PDRB per kapita (Rp Juta)	358,71 - 360,53	2.015,97 - 2.405,05
Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	23,72	91,58
Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	11,87	13,91 - 14,38

04 Perwujudan Jakarta sebagai Kota Global yang Berdaya Saing

	Baseline 2025	Target 2045
Rank Kota Global Dimensi Aktivitas Bisnis	54	21

05 Penurunan Emisi GRK menuju Net Zero Emission

	Baseline 2025	Target 2045
Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	14,65	88,47
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	51,34	57,47

*) angka mengacu pada SEB/Rakortek namun masih dalam pembahasan pasca forum indikator

Gambar 4.1 Sasaran Visi Jakarta Kota Global yang Maju, Berkeadilan, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan

Sasaran pertama, peningkatan daya saing sumber daya manusia yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam hal pendidikan, keterampilan, dan kompetensi, mendorong inovasi dan kreativitas, yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam berbagai sektor ekonomi. Peningkatan daya saing sumber daya manusia ditekankan pada akses dan mutu kesehatan dan pendidikan, pembangunan keterampilan, penguasaan teknologi, dan internalisasi nilai

dan budaya masyarakat Indonesia. Ketercapaian sasaran ini ditandai melalui peningkatan Indeks Modal Manusia menjadi 0,85 pada tahun 2045.

Sasaran kedua, kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang. Seiring dengan tumbuhnya perekonomian Jakarta akan berdampak pada meningkatnya kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat. Hal ini secara langsung dapat mengurangi kemiskinan mencapai 0,00 – 0,50 persen pada tahun 2045. Selain itu dengan pembangunan ekonomi yang inklusif, ketimpangan pendapatan antarpenduduk akan semakin merata yang dicerminkan dengan capaian rasio gini menurun dari 0,425 – 0,430 menjadi 0,363 – 0,386 pada tahun 2045. Selaras dengan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia serta kondisi perekonomian Indonesia yang sudah maju dan mapan di tahun 2045, PDRB Provinsi DKI Jakarta akan memberikan kontribusi sebesar 14,17 persen terhadap PDB Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi berada pada rentang 5,07 – 5,92 persen.

Sasaran ketiga, peningkatan pendapatan per kapita yang menggambarkan pertumbuhan ekonomi yang positif dan dapat meningkatkan standar hidup masyarakat Jakarta. Jakarta ditargetkan dapat mencapai pendapatan per kapita setara dengan kota global di negara maju sehingga Jakarta mampu berdiri sejajar dengan kota lain yang memiliki perekonomian yang kuat. Penciptaan lapangan pekerjaan layak (*decent job*), terutama untuk sektor-sektor dengan nilai tambah tinggi menjadi penekanan dalam upaya peningkatan pendapatan per kapita masyarakat. Ketercapaian sasaran ini ditandai dengan meningkatnya PDRB per kapita masyarakat Jakarta hingga Rp 2.015.970.000 - Rp 2.405.050.000 pada tahun 2045.

Sasaran keempat, perwujudan Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing. Jakarta memiliki potensi akselerasi pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan dalam 20 tahun mendatang. Hal ini dapat menjadi bekal bagi Jakarta untuk memiliki posisi yang setara dengan kota-kota global lainnya. Daya saing dan pengaruh global ini ditandai dengan peringkat Jakarta dalam jajaran kota global pada indeks ekonomi yaitu pada posisi 21, berdasarkan Global City Indeks pada dimensi *Business Activity*.

Sasaran kelima, penurunan emisi GRK menuju *net zero emission*. Dengan usaha penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) menuju *net zero emission*, Jakarta berkomitmen menjadi kota global yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan menurunkan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) secara signifikan serta memperbaiki Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah melalui berbagai inovasi dan inisiatif kebijakan berkelanjutan. Melalui sasaran ini Jakarta tidak hanya bertujuan untuk mengurangi jejak karbon tetapi juga meningkatkan kualitas hidup warganya, menciptakan lingkungan yang lebih sehat, dan menunjukkan kepemimpinan global dalam penanggulangan perubahan iklim. Hal ini ditandai melalui penurunan intensitas emisi gas rumah kaca sebesar 88,47 persen serta nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah sebesar 57,47 pada tahun 2045.

4.3 Misi

Misi dirumuskan dalam upaya mendukung perwujudan Visi Jakarta 2045. Perumusan misi disusun dengan berpedoman pada misi nasional yang tertuang dalam Delapan Misi (Agenda) Pembangunan Nasional 2045 yaitu sebagai berikut.



Gambar 4.2 Delapan Misi (Agenda) Pembangunan Nasional 2045

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Berdasarkan Delapan Misi Pembangunan 2045 yang tertuang dalam RPJPN 2025 – 2045 beserta Visi Jakarta 2045, dirumuskan 8 Misi RPJPD Jakarta 2025 – 2045 yang selaras dengan 8 Misi RPJPN 2025 – 2045 yaitu sebagai berikut.

Tabel 4.1 Keselarasan Misi RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2025 – 2045 dengan Misi RPJPN 2025 – 2045

No	RPJPN		RPJPD Provinsi DKI Jakarta
	Kelompok Agenda/Misi	Agenda/Misi	Agenda/Misi
1	Transformasi Indonesia	Transformasi Sosial	Transformasi Sosial: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Jakarta yang Unggul, Produktif, dan Sejahtera

No	RPJPN		RPJPD Provinsi DKI Jakarta
	Kelompok Agenda/Misi	Agenda/Misi	Agenda/Misi
2		Transformasi Ekonomi	Transformasi Ekonomi: Mewujudkan Ekonomi Jakarta yang Inklusif, Berdaya Saing Global, dan Berkelanjutan
3		Transformasi Tata Kelola	Transformasi Tata Kelola: Mewujudkan Regulasi dan Tata Kelola Pelayanan Publik Jakarta yang Berkualitas, Harmonis, Adaptif, dan Berintegritas
4	Landasan Transformasi	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Mewujudkan Keamanan Daerah yang Tangguh, Demokrasi Substansial, Stabilitas Ekonomi Makro, dan Pengaruh Jakarta di Kancah Global
5		Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Mewujudkan Jakarta yang Layak Huni melalui Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologis
6	Kerangka Implementasi Transformasi	Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Mewujudkan Pembangunan Wilayah Jakarta yang Merata dan Berkeadilan
7		Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Mewujudkan Infrastruktur Jakarta yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
8		Kesinambungan Pembangunan	Mewujudkan Pembangunan Jakarta yang Sinergis dan Berkesinambungan

Dalam upaya mewujudkan **Jakarta Kota Global yang Maju, Berkeadilan, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan**, 8 Misi Pembangunan Jangka Panjang Jakarta 2025 – 2045 yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut.

1. Transformasi Sosial: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Jakarta yang Unggul, Produktif, dan Sejahtera

Dalam 20 tahun mendatang, Jakarta akan turut menghadapi perubahan dan tantangan global, seperti perubahan demografi, perkembangan teknologi, fenomena urbanisasi, perubahan tatanan geoekonomi dan perdagangan, hingga tantangan politik dan tata kelola. Setiap perubahan tersebut memberikan pengaruh yang cukup mendasar dan

signifikan terhadap perkembangan Jakarta, terutama menyangkut hajat hidup seluruh masyarakat Jakarta. Untuk mengantisipasi tantangan-tantangan tersebut, Jakarta perlu memanfaatkan dan mengoptimalkan modal dasar yang dimiliki Jakarta, salah satunya adalah sumber daya manusia. Pembangunan sumber daya manusia menjadi sangat penting karena manusia sebagai aktor memiliki peran dalam upaya pemecahan masalah, inovasi, dan penggerak produktivitas.

Visi Jakarta Kota Global yang Maju, Berkeadilan, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan mengandung cita-cita untuk menempatkan manusia sebagai tujuan utama pembangunan sehingga tercipta peningkatan derajat hidup serta keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Jakarta. Untuk merealisasikan visi tersebut, misi pertama Jakarta adalah “Transformasi Sosial: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Jakarta yang Unggul, Produktif, dan Sejahtera”. Hal ini berarti Jakarta akan memiliki sumber daya manusia yang unggul dari segi kualitas keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi sehingga mampu meningkatkan produktivitas ekonomi dan memenuhi kebutuhan sesuai tuntutan global yang kompleks. Sumber daya manusia Jakarta yang produktif mampu menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas secara efisien melalui inovasi dan kreativitas.

Tercapainya misi ini bertumpu pada pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan yang menyeluruh, berkualitas, dan setara serta menysar seluruh tahap siklus kehidupan pada tingkat individu dan masyarakat. Kestinambungan pemenuhan kebutuhan dasar ini diiringi dengan ketahanan sosial melalui perlindungan dan penegakan sosial sesuai dengan kerentanan dan kondisi masyarakat Jakarta yang beragam dari segi ekonomi, sosial, budaya, dan disabilitas.

2. Transformasi Ekonomi: Mewujudkan Ekonomi Jakarta yang Inklusif, Berdaya Saing Global, dan Berkelanjutan.

Jakarta memiliki peran yang besar dalam kegiatan ekonomi Indonesia dan ditargetkan menduduki posisi yang strategis dalam kegiatan ekonomi global dalam 20 tahun ke depan. Pembangunan ekonomi memiliki peran yang sangat esensial dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang maju, berkeadilan, berdaya saing, dan berkelanjutan. Saat ini Jakarta telah menjadi pusat perekonomian dan bisnis Indonesia, serta menjadi kontributor dengan proporsi terbesar dalam PDB nasional. Peluang yang ada seiring dengan tantangan dan dinamika yang akan dihadapi, seperti persaingan ekonomi dan perdagangan global yang semakin kompetitif, perkembangan teknologi yang semakin cepat, perubahan demografi penduduk nasional dan global, degradasi lingkungan dan perubahan iklim, serta meningkatnya ketimpangan kesejahteraan penduduk Jakarta itu sendiri.

Cita-cita Jakarta yang dituangkan dalam visi Jakarta Kota Global yang Maju, Berkeadilan, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan mengandung semangat bahwa Jakarta akan mampu

menjadi kota yang memiliki daya saing tinggi di kancah global dan memiliki keselarasan dalam pembangunan ekonomi, lingkungan, dan sosial. Visi besar tersebut diwujudkan melalui misi kedua yaitu “Transformasi Ekonomi: Mewujudkan Ekonomi Jakarta yang Inklusif, Berdaya Saing Global, dan Berkelanjutan” yang berarti pada tahun 2045, ekonomi Jakarta akan mencapai sebuah kondisi yang menunjukkan bahwa Jakarta menduduki posisi yang setara dengan kota-kota global lainnya di negara maju, memiliki sumber daya ekonomi yang kompetitif, serta memiliki peran yang strategis dalam berbagai kegiatan ekonomi dan bisnis di tingkat regional dan global. Misi ini akan mendorong perwujudan Jakarta sebagai Kota Global yang maju, berdaya saing, serta berkelanjutan. Ekonomi yang mapan dan kokoh terus tumbuh diiringi dengan lingkungan yang semakin lestari dan masyarakat yang semakin berdaya dan sejahtera. Ekonomi yang kuat dan berpengaruh tidak hanya akan menghasilkan efek berganda (*multiplier effect*) yang signifikan seperti merangsang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, namun juga menciptakan berbagai peluang baru bagi semua masyarakat tanpa terkecuali.

Dalam mewujudkan misi ini, Jakarta perlu untuk terus mendorong penciptaan inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menerus sehingga mampu merumuskan strategi yang adaptif dan berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing ekonomi sesuai dengan dinamika dunia yang ada. Disrupsi teknologi menjadi tantangan tersendiri sehingga transformasi digital menjadi salah satu aspek prioritas yang terus ditingkatkan. Akses dan konektivitas yang mendukung perluasan jejaring ekonomi Jakarta di kancah global juga menjadi hal vital yang perlu dibangun dan diperkuat. Seiring dengan penguatan produktivitas dan peran ekonomi, Jakarta juga menjamin bahwa seluruh masyarakatnya memiliki kesempatan yang sama dalam ekosistem ekonomi yang terbentuk.

3. Transformasi Tata Kelola: Mewujudkan Regulasi dan Tata Kelola Pelayanan Publik Jakarta yang Berkualitas, Harmonis, Adaptif, dan Berintegritas

Dalam dua dekade mendatang, Jakarta akan mengalami berbagai transformasi dari segi sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan. Di tengah pesatnya perkembangan sosial budaya, pergerakan ekonomi, dan upaya masif dalam mewujudkan ketahanan lingkungan, diperlukan perencanaan regulasi dan tata kelola yang adaptif dan responsif untuk menjawab tantangan pembangunan dan perkembangan ekonomi yang pesat. Dalam hal ini, pemerintah melalui tata kelola pelayanan publik yang efektif, pemerintah harus berperan sebagai katalis dalam mengakomodasi peluang-peluang pertumbuhan ekonomi masa depan.

Menjawab tantangan tersebut, Jakarta memiliki visi menjadi Kota Global yang Maju, Berkeadilan, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan yang bermaksud untuk mencapai suatu transformasi tata kelola yang progresif dan mendorong Jakarta menjadi kota yang maju. Upaya pencapaian visi tersebut dituangkan dalam misi ketiga yaitu “Transformasi Tata

Kelola: Mewujudkan Regulasi dan Tata Kelola Pelayanan Publik Jakarta yang Berkualitas, Harmonis, Adaptif, dan Berintegritas”. Misi ini bertujuan untuk menciptakan kondisi di mana perencanaan regulasi dan sistem tata kelola selalu sejalan dengan cita-cita pembangunan yang inklusif, inovatif, dan mutakhir. Adapun beberapa aspek yang menjadi fokus dalam misi ini seperti pengembangan kapasitas dan integritas aparat pemerintahan untuk menurunkan tingkat korupsi, perencanaan dan perancangan regulasi yang adaptif dan inovatif terhadap tren global, serta peningkatan responsivitas pemerintahan dalam mendukung keberlanjutan pemberdayaan masyarakat.

4. Mewujudkan Keamanan Daerah yang Tangguh, Demokrasi Substansial, Stabilitas Ekonomi Makro, dan Pengaruh Jakarta di Kancah Global

Pada tahun 2045, Jakarta memiliki visi menjadi Kota Global yang Maju, Berkeadilan, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan yang diwujudkan melalui transformasi sumber daya manusia, ekonomi, dan tata kelola pelayanan publik dengan kapasitas yang setidaknya setara dengan kota-kota di negara maju lainnya. Dalam mewujudkan visi berdaya saing tersebut, dalam 20 tahun ke depan Jakarta akan menghadapi tantangan-tantangan baru, seperti dengan berkembangnya teknologi digital, penguatan keamanan tidak hanya berfokus pada fisik, namun juga pada ketahanan di ruang-ruang ketiga (digital). Di sisi lain itu terdapat tantangan-tantangan pergolakan ekonomi dunia dan ketidakpastian pergeseran geopolitik dan geoekonomi, maka dibutuhkan ketahanan ekonomi internal yang kokoh untuk dapat menghadapi ketidakpastian global. Sementara itu dengan pesatnya arus globalisasi yang semakin memudahkan batasan-batasan Administrasi, maka peningkatan jejaring melalui hubungan diplomasi dan kerja sama menjadi penting dalam menyelesaikan masalah-masalah perkotaan di dunia.

Dengan kondisi demikian, diperlukan fondasi berupa kondisi lingkungan internal yang kondusif dan stabil yang memiliki daya tahan terhadap eksternalitas negatif atas kondisi global yang cepat berubah dan tidak menentu di masa depan. Selain penjagaan kondisi internal, penguatan jejaring eksternal juga merupakan modal dasar yang esensial. Karenanya diperlukan kapasitas kolaborasi dan diplomasi yang tangguh, terutama di tatanan dunia untuk dapat mengakses seluas-luasnya sumber daya melalui kerja sama dalam meningkatkan daya saing kota. Misi keempat yang dituangkan dalam pembangunan Jakarta 2045 adalah “Mewujudkan Keamanan Daerah yang Tangguh, Demokrasi Substansial, Stabilitas Ekonomi Makro, dan Pengaruh Jakarta di Kancah Global”. Hal ini berarti Jakarta akan menjadi sebuah kota yang stabil dan kokoh di dalam lingkup internal dan secara eksternal memiliki pengaruh dalam lingkup nasional dan global. Perwujudan misi keempat ini ditunjukkan dengan terciptanya lingkungan Jakarta yang aman, tangguh dan mampu menjaga kondusivitas internal dalam menghadapi potensi krisis yang akan terjadi di masa depan, serta memiliki kemampuan diplomasi dan kerja sama dalam lingkup pergaulan global.

Adapun beberapa aspek yang menjadi fokus utama pada perwujudan “Stabilitas Jakarta yang Tangguh dan Berpengaruh di Kancah Global” adalah penciptaan lingkungan yang aman dan terkendali, perwujudan masyarakat yang demokratis dan partisipatif, kestabilan ekonomi makro, serta kemampuan berdiplomasi dan berkolaborasi yang tangguh, baik di kancah nasional maupun global.

5. Mewujudkan Jakarta yang Layak Huni melalui Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologis

Jakarta akan menghadapi berbagai tantangan dan isu pada 20 tahun mendatang yang memerlukan perencanaan dan tindakan yang komprehensif. Salah satu tantangan utama adalah masalah urbanisasi yang terus meningkat, yang mengakibatkan tekanan besar pada kualitas hidup penduduk dan lingkungan hidup perkotaan. Dalam menghadapi tantangan dan isu ini, Jakarta perlu menerapkan strategi yang inklusif, berkelanjutan, dan inovatif, yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dengan pemerintah dalam mengambil kebijakan dan implementasi solusi-solusi yang efektif. Diperlukan juga kolaborasi untuk menciptakan kota yang berdaya saing dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Visi Jakarta Kota Global yang Maju, Berkeadilan, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan menempatkan manusia sebagai aspek utama pembangunan sehingga diperlukan penciptaan iklim bermasyarakat yang rukun, aman serta lingkungan perkotaan yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Jakarta. Dalam merealisasikan komponen visi Jakarta yang berkelanjutan, misi kelima yang tertuang dalam pembangunan Jakarta 2045 adalah Mewujudkan Jakarta yang Layak Huni melalui Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologis. Melalui perwujudan misi kelima ini ditunjukkan melalui tersedianya pemenuhan hak kebebasan beragama serta penguatan pemberdayaan dan partisipasi perempuan, anak, pemuda, penyandang disabilitas, lansia, dan keluarga yang setara. Ditunjang dengan terjaganya keseimbangan alam melalui aksi pengurangan dampak perubahan iklim serta peningkatan lingkungan yang adaptif dengan upaya keberlanjutan melalui energi terbarukan dan teknologi ramah lingkungan.

Kelima misi yang telah dijabarkan di atas merupakan cita-cita transformasi dan landasan transformasi dari visi Jakarta Kota Global yang Maju, Berkeadilan, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan. Manifestasi dari pencapaian transformasi tersebut dirangkum ke dalam tiga misi yang merupakan kerangka implementasi transformasi. Penjelasan ketiga misi tersebut adalah sebagai berikut.

6. Mewujudkan Pembangunan Wilayah Jakarta yang Merata dan Berkeadilan

Sejalan dengan visi Jakarta Kota Global yang Maju, Berkeadilan, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan pada tahun 2045, misi mewujudkan pembangunan wilayah Jakarta yang merata dan berkeadilan memiliki semangat untuk menciptakan pemerataan pembangunan dan kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan dasar. Untuk

mencapai pembangunan yang merata dan berkeadilan, diperlukan juga peningkatan dan pengembangan berbagai pilar pembangunan secara simultan. Pembangunan Jakarta yang merata dapat terlihat dari kualitas hidup masyarakat yang meningkat sehingga terciptanya masyarakat yang lebih sejahtera. Pemerataan pembangunan dilakukan tidak hanya dari segi fisik/infrastruktur tetapi juga dari segi ketahanan sosial, budaya, dan lingkungan.

Perwujudan misi ini merupakan refleksi dari upaya transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola yang juga dilandasi oleh terciptanya stabilitas serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Karenanya, pencapaian kelima misi Jakarta yang ditandai dengan terciptanya sumber daya yang unggul dan produktif, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, tata kelola yang efisien, lingkungan perkotaan yang aman, serta penduduk yang sejahtera, dan berkebudayaan maju, merupakan modal dasar dalam terciptanya pembangunan yang merata dan berkeadilan.

Dalam menghadapi tantangan 20 tahun ke depan, kesetaraan, dan keseimbangan pembangunan merupakan kunci untuk menjamin pertumbuhan wilayah yang tidak hanya resilien tapi juga mampu bersaing dengan kota-kota global lainnya di dunia.

7. Mewujudkan Infrastruktur Jakarta yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Dalam mewujudkan visi Jakarta “Kota Global yang Maju, Berkeadilan, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan”, pelaksanaan pembangunan manusia, ekonomi, dan lingkungan tidak dapat berdiri sendiri. Faktor pendorong yang penting dalam menyukseskan pembangunan Jakarta yang berkeadilan dan berdaya saing adalah penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan. Sasaran utama penyediaan infrastruktur adalah memberikan pembangunan yang merata dan menekan kesenjangan di seluruh wilayah Jakarta. Sebagai pusat ekonomi nasional, infrastruktur yang andal dan modern menjadi tumpuan bagi loncatan pembangunan Jakarta yang lebih maju. Secara keseluruhan, persaingan kota-kota global tidak hanya membutuhkan modal manusia yang unggul, tetapi juga dukungan oleh infrastruktur berkualitas yang mampu mewadahi aktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dari perspektif kelayakan hidup, kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat Jakarta ditopang oleh infrastruktur yang berkualitas. Seluruh masyarakat Jakarta mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari akses setara terhadap infrastruktur untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Dalam 20 tahun ke depan, penyediaan infrastruktur perlu memperhatikan aspek keberlanjutan dan ketangguhan untuk memastikan bahwa setiap pembangunan infrastruktur menghormati kelestarian alam serta mampu bertahan terhadap ancaman perubahan iklim ataupun bencana alam/non alam.

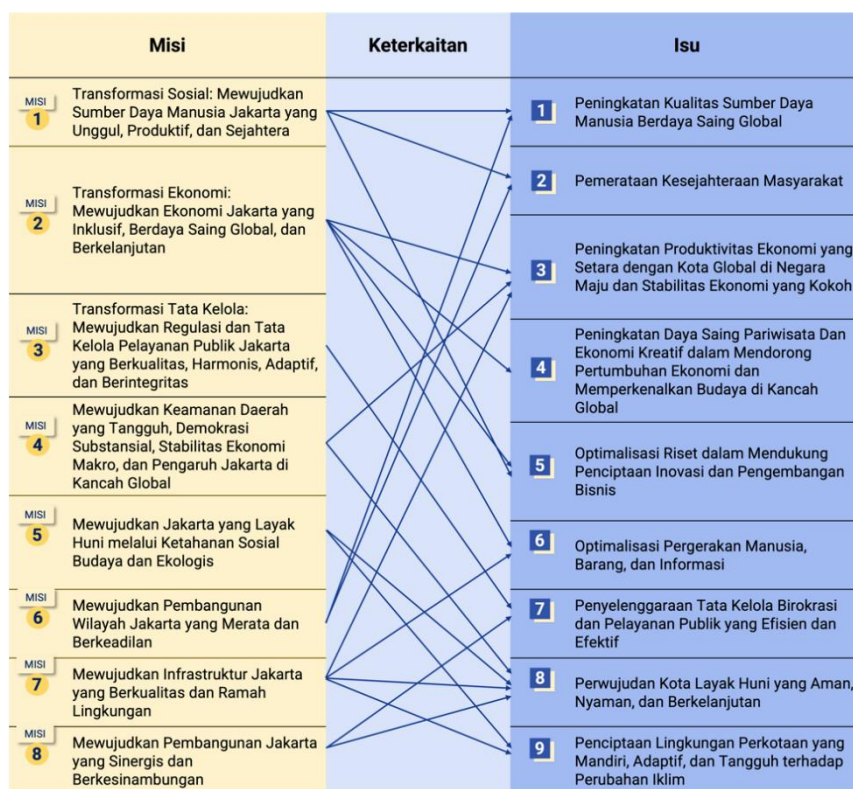
8. Mewujudkan Pembangunan Jakarta yang Sinergis dan Berkesinambungan

Upaya pencapaian visi Jakarta sebagai Kota Global yang Maju, Berkeadilan, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan harus diiringi dengan dukungan kebijakan dan pembiayaan yang berkelanjutan. Misi Mewujudkan Pembangunan Jakarta yang Sinergis dan Berkesinambungan bertujuan untuk memastikan rencana pembangunan dan implementasinya terus sinergis dari suatu periode ke periode selanjutnya. Pembangunan sinergis menghasilkan sistem yang saling terkait dan mendukung, di mana berbagai sektor dan pemangku kepentingan bekerja bersama untuk mencapai tujuan pembangunan yang bersifat inklusif, berkelanjutan, dan berdampak positif bagi semua masyarakat.

Ketercapaian misi ini diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan pembangunan yang efektif serta pembiayaan pembangunan yang berkesinambungan. Sinergi antara pembiayaan dan pembangunan daerah juga mencakup penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan serta perencanaan anggaran pembangunan.

Pada tahun 2045, Jakarta dimanifestasikan telah menjadi kota global yang maju, berkeadilan, berdaya saing, dan berkelanjutan yang terwujud dari hasil perencanaan dan implementasi pembangunan yang sinergis dan berkesinambungan.

4.4 Relevansi Misi dengan Isu Strategis



Gambar 4.3 Relevansi Misi terhadap Isu Strategis

Misi pertama yaitu “Transformasi Sosial: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Jakarta yang Unggul, Produktif, dan Sejahtera” akan menjawab isu Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Global (Isu Strategis 1), isu Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat (Isu Strategis 2), serta isu Optimalisasi Riset dalam Mendukung Penciptaan Inovasi dan Pengembangan Bisnis (Isu Strategis 3). Misi pertama ini diharapkan dapat menyelesaikan isu kualitas sumber daya manusia di Jakarta seperti rendahnya partisipasi untuk memperoleh pendidikan dini, dasar, dan menengah, rendahnya kualitas capaian peserta didik, serta daya serap lulusan pendidikan vokasi masih rendah. Selain itu, misi pertama juga diharapkan menyelesaikan isu kesejahteraan masyarakat seperti tingkat kemiskinan dan ketimpangan melalui kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan mampu berkontribusi dalam kegiatan ekonomi yang produktif. Rendahnya peran riset dalam mendukung penciptaan inovasi dan pengembangan bisnis menjadi salah satu sasaran dari misi pertama dengan menghasilkan sumber daya manusia yang berkeahlian tinggi.

Misi kedua yaitu “Transformasi Ekonomi: Mewujudkan Ekonomi Jakarta yang Inklusif, Berdaya Saing Global, dan Berkelanjutan” diharapkan dapat menjawab empat isu strategis Jakarta, yaitu isu Peningkatan Produktivitas Ekonomi yang Setara dengan Kota Global di Negara Maju dan Stabilitas Ekonomi yang Kokoh (Isu Strategis 3), isu Peningkatan Daya Saing Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Memperkenalkan Budaya di Kancah Global (Isu Strategis 4), isu Optimalisasi Riset dalam Mendukung Penciptaan Inovasi dan Pengembangan Bisnis (Isu Strategis 5), isu Optimalisasi Pergerakan Manusia, Barang, dan Informasi (Isu Strategis 6). Dengan dilaksanakannya misi ini diharapkan pembangunan perekonomian Jakarta dapat bertumbuh secara signifikan.

Misi ketiga yaitu “Transformasi Tata Kelola: Mewujudkan Regulasi dan Tata Kelola Pelayanan Publik Jakarta yang Berkualitas, Harmonis, Adaptif, dan Berintegritas” diharapkan dapat menjawab isu yaitu Penyelenggaraan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Efektif (Isu Strategis 7). Misi ini diharapkan dapat menjawab tantangan tata kelola Jakarta dalam mempertahankan dan meningkatkan performa pelayanan publik.

Misi keempat yaitu “Mewujudkan Keamanan Daerah yang Tangguh, Demokrasi Substansial, Stabilitas Ekonomi Makro, dan Pengaruh Jakarta di Kancah Global” akan mendorong isu Peningkatan Produktivitas Ekonomi yang Setara dengan Kota Global di Negara Maju dan Stabilitas Ekonomi yang Kokoh (Isu Strategis 3), serta isu Perwujudan Kota Layak Huni yang Aman, Nyaman, dan Berkelanjutan (Isu Strategis 8). Perwujudan misi ini diharapkan dapat menjawab tantangan stabilitas ekonomi di antara dinamika dan persaingan geopolitik dan geoekonomi global seperti kenaikan inflasi Jakarta yang terjadi pada 2022 yang merupakan implikasi dari inflasi nasional akibat ketegangan Rusia-Ukraina sehingga berimplikasi kondisi perkotaan yang aman dan nyaman.

Misi kelima yaitu “Mewujudkan Jakarta yang Layak Huni melalui Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologis” diharapkan menyelesaikan isu Perwujudan Kota Layak Huni yang Aman, Nyaman, dan Berkelanjutan (Isu Strategis 8), serta isu Penciptaan Lingkungan Perkotaan yang Mandiri, Adaptif, dan Tangguh terhadap Perubahan Iklim (Isu Strategis 9). Pelaksanaan misi ini diharapkan dapat menyelesaikan beberapa permasalahan utama terkait lingkungan seperti ketersediaan air bersih, kerentanan bencana, serta pengelolaan persampahan yang belum optimal.

Misi keenam “Mewujudkan Pembangunan Wilayah Jakarta yang Merata dan Berkeadilan” menekankan pada tujuan pembangunan yang dapat didapatkan oleh seluruh masyarakat. Layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dapat dinikmati seluruh masyarakat di seluruh wilayah Jakarta sehingga mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Isu Strategis 1) untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif. Hasil dari pembangunan yang ditunjukkan oleh tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dicapai secara merata oleh seluruh masyarakat (Isu Strategis 2).

Misi ketujuh yaitu “Mewujudkan Infrastruktur Jakarta yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan” menyorot pembangunan infrastruktur yang andal dan tetap memperhatikan kaidah keberlanjutan lingkungan. Perwujudan infrastruktur ini diharapkan menyelesaikan Isu Strategis 3 terkait dengan peningkatan produktivitas daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif, Isu Strategis 6 terkait dengan optimalisasi pergerakan manusia, barang, dan informasi, Isu Strategis 8 terkait dengan perwujudan kota layak huni, dan Isu Strategis 9 penciptaan lingkungan perkotaan yang adaptif dan tangguh terhadap perubahan iklim.

Misi terakhir yaitu “Mewujudkan Pembangunan Jakarta yang Sinergis dan Berkesinambungan” menekankan pada keberlanjutan perencanaan dalam jangka panjang dan kesesuaian perencanaan antarwilayah yaitu kawasan aglomerasi. Perwujudan misi ini menyorot Isu Strategis 7 terkait tata kelola birokrasi yang berintegritas sebagai dasar penopang keberlanjutan perencanaan Jakarta. Pembangunan yang sinergis dalam konteks kawasan aglomerasi juga menyelesaikan permasalahan penyediaan infrastruktur berkualitas sehingga terwujud kota layak huni dan berkelanjutan (Isu Strategis 8).





BAB **05**

Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok

**Penguatan ekonomi nasional dan global,
ketahanan sosial yang inklusif dan
berkeadilan, sumber daya manusia yang
terampil dan berdaya saing, ruang kota
yang layak huni dan berkelanjutan, serta
tata kelola yang efektif dan efisien menjadi
arah pembangunan Jakarta dalam dua
puluh tahun kedepan**

BAB 5

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Pembangunan jangka panjang daerah dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan. Untuk melaksanakan hal ini diperlukan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah sebagai pedoman dalam menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok RPJPD Jakarta 2025 - 2045.

5.1 Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah ini memberikan arahan dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam konteks ini, sinergi, koordinasi, dan kerja sama antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang daerah. Adapun arah kebijakan dalam pembangunan jangka panjang Jakarta dijabarkan secara umum ke dalam 4 (empat) tahapan pembangunan utama.

Tabel 5.1 Arah Kebijakan RPJPD Jakarta Tahun 2025 - 2045

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
Jakarta Kota Global yang Maju, Berkeadilan, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan	Transformasi Sosial: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Jakarta yang Unggul, Produktif, dan Sejahtera	Pemenuhan Layanan Dasar Kesehatan, Pendidikan dan Perlindungan Sosial	Penguatan Landasan Pembangunan menuju Sumber Daya Manusia Jakarta Berdaya Saing Global	Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan dan Pendidikan Bertaraf Global	Perwujudan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Global
	Transformasi Ekonomi: Mewujudkan Ekonomi Jakarta yang Inklusif, Berdaya Saing Global, dan Berkelanjutan	Penguatan Landasan Ekonomi Produktif berbasis Riset dan Inovasi yang Berkelanjutan	Akselerasi Pembangunan Ekosistem Ekonomi yang Berorientasi pada Daya Saing Global	Perluasan Peran Ekonomi Jakarta di Tingkat Global dan Transisi menuju Ekonomi Hijau	Perwujudan Ekonomi Jakarta yang Inklusif, Berdaya Saing Global, dan Berkelanjutan berbasis Riset dan Inovasi

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
	Transformasi Tata Kelola: Mewujudkan Regulasi dan Tata Kelola Pelayanan Publik Jakarta yang Berkualitas, Harmonis, Adaptif, dan Berintegritas	Peningkatan Kapasitas dan Integritas Aparat Pemerintahan	Peningkatan Responsivitas Pelayanan Publik berbasis Teknologi Informasi	Peningkatan Kualitas Regulasi dan Pelayanan Publik yang Mewadahi Kebutuhan Transisi menuju Kota Global	Perwujudan Regulasi dan Tata Kelola Pelayanan Publik yang Berkualitas, Harmonis, Adaptif, dan Berintegritas
	Mewujudkan Keamanan Daerah yang Tangguh, Demokrasi Substansial, Stabilitas Ekonomi Makro, dan Pengaruh Jakarta di Kancah Global	Penguatan Keamanan Daerah, Demokrasi Substansial, Stabilitas Ekonomi Makro, dan Pengaruh Jakarta	Pemantapan Keamanan Daerah, Demokrasi Substansial, Stabilitas Ekonomi Makro, dan Pengaruh Jakarta	Pemeliharaan Keamanan Daerah, Demokrasi Substansial, Stabilitas Ekonomi Makro, dan Pengaruh Jakarta	Perwujudan Keamanan Daerah yang Tangguh, Demokrasi Substansial, Stabilitas Ekonomi Makro, dan Pengaruh Jakarta di Kancah Global
	Mewujudkan Jakarta yang Layak Huni melalui Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologis	Penguatan Landasan Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi sebagai Modal Dasar Pembangunan	Peningkatan Perlindungan Hak Dasar Sosial Budaya dan Pemulihan Kualitas Lingkungan	Aktualisasi Jakarta Berketahanan Sosial dan Ekologi yang Mampu Mewadahi Aktivitas Kota Global	Perwujudan Jakarta Kota Berketahanan Sosial Budaya dan Ekologi yang Adaptif terhadap Perubahan

A. Tahap I Perbaiki Fundamental

Pada tahap ini, fokus utama dalam pembangunan adalah pada pemenuhan layanan sosial dan lingkungan dasar serta penguatan landasan ekonomi. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, mengembangkan infrastruktur dasar, dan menciptakan lapangan kerja. Selain itu, pada tahap ini juga dilakukan penguatan landasan sosial dan lingkungan dengan memperkuat kelembagaan dan regulasi serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian lingkungan.

Pemenuhan Layanan Dasar Kesehatan, Pendidikan, dan Perlindungan Sosial. Lima tahun pertama menjadi langkah dasar pembangunan manusia dengan memfokuskan pada penyediaan layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan yang berkualitas. Peningkatan kualitas setiap layanan dasar diiringi oleh peningkatan akses yang merata dan setara serta penguatan sistem yang andal. Dengan demikian, seluruh masyarakat Jakarta dapat memperoleh hak dasar dan memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi dengan maksimal.

Penguatan Landasan Ekonomi Produktif berbasis Riset dan Inovasi yang Berkelanjutan. Tahun 2025 - 2030 menjadi lima tahun pertama yang difokuskan untuk mempersiapkan berbagai fondasi ekonomi yang produktif berbasis riset dan inovasi melalui dukungan regulasi, tata kelola yang suportif, dan kualitas sumber daya manusia yang mumpuni. Pada tahap ini riset dan inovasi akan dikembangkan sebagai dasar pembangunan ekonomi sehingga tercipta landasan yang kuat dan menciptakan ekonomi Jakarta yang memiliki keunggulan kompetitif di kancah global. Tidak hanya pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, namun kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat yang merata juga dipastikan tercapai pada tahap penyiapan fondasi ekonomi ini.

Peningkatan Kapasitas dan Integritas Aparat Pemerintahan. Pada tahap pertama ini, fokus pembangunan tata kelola di lingkungan pemerintahan difokuskan pada peningkatan kapasitas dan integritas Aparat Sipil Negara (ASN) di Jakarta. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan integritas ASN melalui beberapa upaya seperti penguatan manajemen ASN serta penguatan penilaian potensi dan kompetensi pengisi jabatan. Pada tahap ini diharapkan terbentuknya kapasitas aparat pemerintahan yang menunjang penerapan regulasi dan tujuan jangka panjang.

Penguatan Keamanan Daerah, Demokrasi Substansial, Stabilitas Ekonomi Makro, dan Pengaruh Jakarta. Tahap pertama penguatan keamanan, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi sebagai modal dasar diplomasi yang tangguh diarahkan untuk memperkuat kestabilan daerah, melalui penguatan keamanan dengan penekanan transformasi sistem keamanan daerah dan penguatan kesadaran masyarakat terhadap penjagaan keamanan. Peningkatan demokrasi substansial ditekankan kepada penguatan lembaga demokrasi yang kuat, akuntabel, inklusif yang berbasis digital. Sementara untuk stabilitas ekonomi daerah ditekankan untuk menciptakan stabilitas inflasi dalam rangka menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan fiskal. Ketiga fokus tersebut akan menjadi modal dasar untuk peningkatan pengaruh di kancah global, yang pada tahap ini diarahkan untuk mempertahankan kekuatan diplomasi dan jejaring Jakarta di kancah internasional.

Penguatan Landasan Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi sebagai Modal Dasar Pembangunan. Pada 2025- 2030 fokus pembangunan mengarah pada penguatan landasan dalam mewujudkan ketahanan sosial budaya ekologi, yang

melingkupi pada penguatan pada beberapa aspek seperti warisan budaya Pancasila dan agama sebagai landasan pendidikan karakter, serta pemahaman terhadap hak dasar bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, pemuda, dan keluarga. Fokus pengembangan rencana aksi jangka panjang dalam meningkatkan dan menjaga kualitas lingkungan akan menjadi pijakan pembangunan di tahap pertama, sejalan dengan penguatan tata kelola dan kerja sama dalam memenuhi kebutuhan dasar kota dan mitigasi perubahan iklim.

B. Tahap II Transformasi Ekosistem Global

Pada tahap kedua, fokus pembangunan dilaksanakan melalui penguatan landasan sosial dan lingkungan serta akselerasi ekonomi menuju ekosistem kota global yang kompetitif. Hal ini dilakukan dengan mengakselerasi sistem dan regulasi yang mendukung ekosistem global, mengembangkan layanan berbasis teknologi, mengakselerasi literasi digital masyarakat, serta mempercepat penciptaan iklim investasi yang kondusif dan memberikan kepastian berusaha. Selain itu, tahap transformasi ekosistem global juga dilakukan dengan membangun infrastruktur digital dan meningkatkan konektivitas antar daerah dan negara

Penguatan Landasan Pembangunan menuju Sumber Daya Manusia Jakarta Berdaya Saing Global. Setelah terpenuhinya kebutuhan layanan dasar dalam pembangunan manusia pada periode pertama, penguatan landasan pembangunan berupa penyempurnaan regulasi dan kebijakan yang mampu mendukung percepatan pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas. Selain itu, tahap ini juga menekankan pentingnya peningkatan tata kelola yang efektif dan andal, guna menjamin sistem pengelolaan sumber daya yang efisien dan tepat sasaran serta didukung oleh kolaborasi antara setiap pemangku kepentingan baik di dalam maupun luar negeri.

Akselerasi Pembangunan Ekosistem Ekonomi yang Berorientasi pada Daya Saing Global. Pada tahap kedua di tahun 2030 - 2035, setelah fondasi terbentuk dan hal-hal fundamental telah terpenuhi pada lima tahun pertama, Jakarta diarahkan untuk melakukan akselerasi pembangunan infrastruktur serta pembentukan iklim riset dan inovasi yang kondusif dan mumpuni untuk menunjang ekosistem ekonomi yang diharapkan. Daya saing ekonomi Jakarta mulai meningkat dan menguat, termasuk dalam hal pariwisata yang mulai dikenal luas, ekonomi kreatif yang mulai beragam dan produktif, sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global, serta infrastruktur digital, perkotaan, dan logistik yang mulai terbangun

Peningkatan Responsivitas Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi. Setelah tercapainya peningkatan kapasitas dan integritas ASN pada tahap pertama, tahap berikutnya di tahun 2030 - 2035 akan berfokus pada peningkatan regulasi dan pelayanan publik yang modern. Penerapan sistem komunikasi publik yang merata, adil, berdaulat,

akuntabel, dan menjunjung tinggi keterbukaan dalam proses pembangunan untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Pada tahap ini, pemerintah Jakarta akan menjadi lebih adaptif terhadap sistem pelayanan berbasis digital dan penerapan teknologi informasi lainnya yang relevan untuk mendukung pelayanan publik yang lebih responsif dan efisien.

Pemantapan Keamanan Daerah, Demokrasi Substansial, Stabilitas Ekonomi Makro, dan Pengaruh Jakarta. Tahap kedua merupakan lanjutan tahap pertama dalam menciptakan stabilitas internal untuk mempersiapkan daya saing Jakarta dalam berdiplomasi dan berkolaborasi di kancah global. Penciptaan lingkungan yang aman dan kondusif pada tahap ini ditekankan pada penguatan keamanan melalui pembangunan infrastruktur yang mutakhir dan penggunaan teknologi serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan daerah. Sementara itu kondisi stabilitas ekonomi dipertahankan dan diperkuat dengan fokus meningkatkan kepercayaan investor serta membangun sistem fiskal daerah yang tangguh dan adaptif. Dengan telah semakin menguatnya stabilitas internal daerah, maka kebijakan pembangunan semakin diarahkan pada peran kolaborasi dengan mitra pembangunan nasional maupun global untuk penyelesaian isu-isu strategis.

Peningkatan Perlindungan Hak Dasar Sosial Budaya dan Pemulihan Kualitas Lingkungan. Setelah landasan pembangunan ketahanan sosial budaya dan ekologi telah terbentuk, maka pada tahap kedua (tahun 2030-2035) diharapkan Jakarta dapat meningkatkan perlindungan hak dasar sosial budaya dan memulihkan kualitas lingkungannya melalui penguatan budaya literasi masyarakat serta perlindungan dan penegakan hak dasar bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, pemuda, dan keluarga. Pemetaan mengenai tren perubahan lingkungan juga akan dilaksanakan pada tahap ini dengan ditunjang pembangunan infrastruktur ketahanan kota serta meningkatkan kesadaran masyarakat terkait mitigasi, adaptasi, dan peringatan dini terkait perubahan iklim.

C. Tahap III Ekspansi Global

Pada tahap ini, fokus pembangunan beralih ke penguatan eksistensi dan akselerasi daya saing ekonomi dalam skala regional dan internasional. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan investasi, mengembangkan industri kreatif, dan meningkatkan daya saing produk dan jasa Indonesia di pasar global. Selain itu, pada tahap ini juga dilakukan penguatan kerja sama internasional dan membangun jaringan global untuk mendukung pembangunan ekonomi di Jakarta.

Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan dan Pendidikan Bertaraf Global. Pada tahap ketiga, Jakarta sudah memiliki layanan kesehatan dan pendidikan yang andal dan bertaraf global, sehingga mampu menciptakan sumber daya manusia Jakarta yang produktif dan inovatif. Sistem Jaminan Sosial Kesehatan Nasional dan Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan juga dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh seluruh lapisan masyarakat Jakarta. Pembangunan dititikberatkan pada penguatan daya saing serta layanan global yang ekspansif.

Perluasan Peran Ekonomi Jakarta di Tingkat Global dan Transisi menuju Ekonomi Hijau. Pada tahap ketiga di tahun 2035 - 2040, setelah regulasi, tata kelola, sumber daya manusia, dan infrastruktur telah siap, kondisi tersebut akan menjadikan ekosistem ekonomi Jakarta semakin kuat dan kondusif. Ekosistem ekonomi yang kuat dan kondusif ini akan menciptakan ekonomi Jakarta yang tangguh dan berpengaruh di kancah global dan menciptakan jejaring ekonomi global yang lebih luas. Selain itu pada tahap ini Jakarta diharapkan telah mampu bertransisi menuju ekonomi hijau yang menciptakan pertumbuhan ekonomi yang kuat, diiringi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya dan kelestarian lingkungannya.

Peningkatan Kualitas Regulasi dan Pelayanan Publik yang Mewadahi Kebutuhan Transisi menuju Kota Global. Setelah pelayanan publik yang responsif tercapai, tahap ketiga adalah meningkatkan kualitas regulasi dan pelayanan publik agar mampu mewadahi kebutuhan transisi Jakarta menuju kota global. Pada tahap transisi menuju kota global ini akan diperkuat upaya untuk penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah. Jakarta juga berfokus pada menghasilkan kebijakan publik yang sesuai dengan tahapan pembangunan lainnya yang sudah berorientasi pada daya saing global.

Pemeliharaan Keamanan Daerah, Demokrasi Substansial, Stabilitas Ekonomi Makro, dan Pengaruh Jakarta. Pada tahap ketiga keamanan dan demokrasi telah memiliki jaminan kebebasan sipil dan kesetaraan dalam mendapatkan, mengolah, dan memanfaatkan sumber daya sosial, ekonomi, dan politik untuk membangun kohesi sosial dan menjaga keamanan, ketertiban, serta kondusivitas bersama. Sementara kestabilan ekonomi diarahkan kepada peningkatan pendapatan daerah melalui efektivitas belanja dan pengoptimalan peran BUMD dalam pembiayaan pembangunan. Pada tahap ini adalah tahap permulaan ekspansi global Jakarta melalui kerja sama dan kepemimpinan Jakarta di kancah global, dan menemukan serta memaksimalkan potensi daya saing komparatif dan kompetitif Jakarta untuk menjadi *global player* di antara kota-kota lainnya.

Aktualisasi Jakarta Berketahanan Sosial dan Ekologi yang Mampu Mewadahi Aktivitas Kota Global. Pada tahap ketiga (tahun 2035-2040), Jakarta diperkirakan sudah memiliki peran dan pengaruh yang kuat di kancah global, sehingga diharapkan memiliki ketahanan sosial budaya dan ekologi yang responsif terhadap aktivitas kota global. Implementasinya dapat ditunjukkan dengan terpenuhinya hak kebebasan beragama serta meningkatnya keselarasan relasi agama dan kebudayaan, juga ditandai dengan optimalnya pemberdayaan dan partisipasi yang setara perempuan, anak, pemuda, penyandang disabilitas, lansia, dan keluarga. Dalam menciptakan lingkungan hidup

Jakarta yang maju dan berkelanjutan, Pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam menciptakan sumber-sumber energi terbarukan akan dioptimalkan. Serta adanya penambahan sumber pembiayaan lain dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup.

D. Tahap IV Perwujudan Kota Global

Pada tahap ini, fokusnya adalah pada perwujudan Jakarta Kota Global yang Maju, Berkeadilan, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan, serta menempatkan Jakarta berada pada peringkat 20 besar kota global. Hal ini dilakukan dengan memperluas jejaring ekonomi global, mengembangkan kota cerdas, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan menciptakan lingkungan yang berkelanjutan. Selain itu, pada tahap ini juga dilakukan perluasan akses terhadap layanan publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota.

Perwujudan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Global. Pada tahun 2040-2045, Jakarta sukses mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, produktif, dan sejahtera. Sumber daya manusia Jakarta berkarakter tangguh dan adaptif dalam setiap perubahan global dan tuntutan zaman. Masyarakat Jakarta juga mampu menempatkan diri dalam pergaulan internasional bersama talenta-talenta global lainnya dan tetap mencerminkan identitas dan nilai-nilai luhur bangsa.

Perwujudan Ekonomi Jakarta yang Inklusif, Berdaya Saing Global, dan Berkelanjutan berbasis Riset dan Inovasi. Pada tahap keempat di tahun 2040 - 2045, ekonomi Jakarta telah memiliki kesetaraan dengan kota global di negara maju yang berbasis riset dan inovasi, serta berorientasi pada keberlanjutan dan kesejahteraan yang merata.

Perwujudan Regulasi dan Tata Kelola Pelayanan Publik yang Berkualitas, Harmonis, Adaptif, dan Berintegritas. Pada tahap terakhir, Jakarta diharapkan dapat mewujudkan regulasi dan tata kelola pelayanan publik yang berkualitas, harmonis, adaptif, dan berintegritas. Di tahap ini diharapkan Jakarta sudah memiliki tata kelola layanan publik dan regulasi yang andal, Jakarta dapat memberikan serta mempertahankan performa pelayanan publik yang mengeskalasi daya saing global, namun tetap adaptif terhadap perubahan.

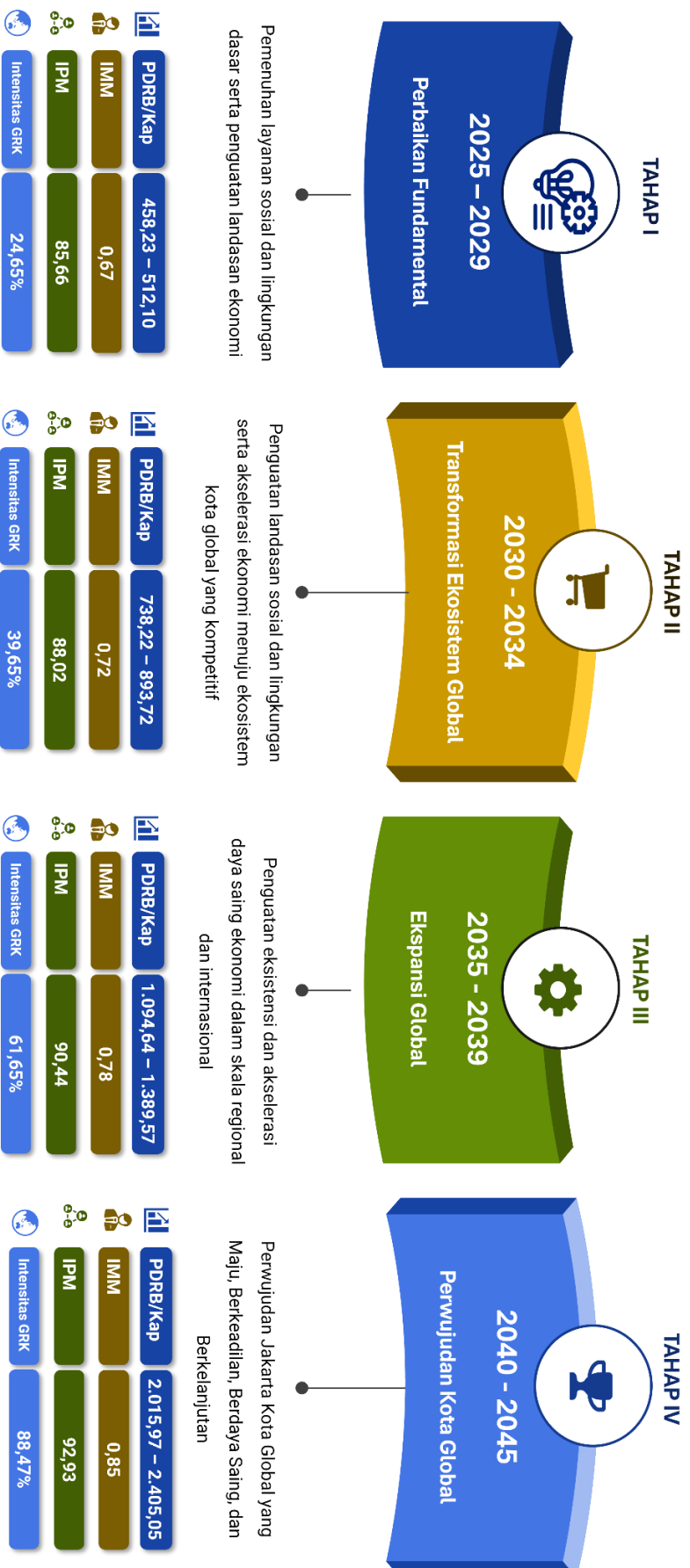
Mewujudkan Keamanan Daerah yang Tangguh, Demokrasi Substansial, Stabilitas Ekonomi Makro, dan Pengaruh Jakarta di Kancah Global. Setelah terwujudnya stabilitas internal yang telah dibangun selama tahap pertama dan kedua, pada tahap ketiga fokus yang dilakukan adalah mempertahankan performa stabilitas dan kondusivitas internal yang berdaya tahan terhadap segala ancaman perubahan global. Sementara itu Jakarta diarahkan untuk melakukan perluasan kerja sama strategis antarkota, serta memiliki kepemimpinan dan peran strategis sebagai *global player* di antara kota-kota global lainnya.

Perwujudan Jakarta Kota Berketahanan Sosial Budaya dan Ekologi yang Adaptif terhadap Perubahan. Pada tahap 2045, diharapkan Jakarta telah menjadi kota yang berketahanan sosial budaya dan ekologi, namun juga dapat menjadi kota yang adaptif terhadap dinamika perubahan yang terjadi di masa depan. Ketahanan sosial budaya menciptakan penguatan aktivitas ekonomi dari hasil pengimplementasian nilai budaya dan agama, serta perwujudan perempuan, pemuda, anak, penyandang disabilitas, lansia, dan keluarga yang setara, mandiri, dan produktif. Pada aspek lingkungan, telah terwujudnya penggunaan transportasi umum, sepeda, dan kendaraan listrik secara optimal. Jakarta juga tumbuh dengan berketahanan energi, air, dan berkemandirian pangan serta komitmen terhadap perubahan iklim pada semua sektor.

Dalam penetapan arah kebijakan prioritas untuk RPJPD Jakarta, proses perumusan tidak berhenti pada identifikasi awal kebijakan berdasarkan misi, tetapi diiterasi kembali dengan mempertimbangkan indikator-indikator makro pembangunan. Indikator utama yang digunakan dalam penahapan pembangunan ini meliputi Indeks Modal Manusia (IMM), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, dan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Keempat indikator ini diturunkan berdasarkan tiga pilar pembangunan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Dalam penahapan tersebut, setiap indikator memiliki sejumlah arah kebijakan yang strategis dan dipetakan berdasarkan periode waktu pelaksanaannya, yaitu apakah kebijakan tersebut harus dilaksanakan dalam lima tahun pertama, kedua, ketiga, atau keempat. Arah kebijakan ini dirancang untuk mendorong pencapaian target indikator makro pembangunan dalam setiap periode tahapannya, memastikan bahwa setiap kebijakan memiliki dampak yang terukur dan relevan dengan kebutuhan pembangunan pada waktu tersebut.

Gambar 5.1 Tahapan Implementasi Rencana Jangka Panjang Jakarta 2025 -2045



Catatan: Proyeksi IPM dihitung menggunakan data SP2010LF, PDRB per Kapita dalam Juta Rupiah

5.2 Sasaran Pokok

Sasaran pokok RPJPD Jakarta 2025 - 2045 merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam mewujudkan Jakarta Kota Global yang Maju, Berkeadilan, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan melalui transformasi pembangunan Jakarta yang selaras dengan transformasi pembangunan nasional dalam RPJPN 2025 – 2045. Rumusan sasaran pokok dilengkapi dengan Indikator Utama Pembangunan yang menjadi target pembangunan Jakarta dalam dua puluh tahun ke depan, yang telah diharmonisasi dengan target capaian nasional dalam RPJPN 2025 – 2045 dan disesuaikan dengan karakteristik Jakarta.

5.2.1 Arah Pembangunan Daerah

Arah Pembangunan Daerah merupakan manifestasi transformasi pembangunan jangka panjang Jakarta yang berkesinambungan dengan Arah Pembangunan Indonesia Emas 2045. Arah Pembangunan Daerah akan menjadi pedoman dalam membangun dan mewujudkan cita-cita Jakarta dua puluh tahun ke depan yang sesuai dengan karakteristik dan potensi Jakarta. Arah Pembangunan Jakarta 2025 – 2045 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.2 Arah Pembangunan Daerah 2025 – 2045

Transformasi/Landasan Transformasi	Arah Pembangunan Daerah	
Transformasi Sosial	1	Masyarakat Jakarta yang Sehat Menyeluruh
	2	Masyarakat Jakarta yang Berkeahlian Tinggi, Unggul, dan Bermartabat
	3	Masyarakat Jakarta yang Tangguh dan Terlindungi secara Sosial yang Inklusif serta Berkeadilan
Transformasi Ekonomi	4	Produktivitas Ekonomi Jakarta yang Berdaya Saing berbasis IPTEK dan Inovasi
	5	Ekonomi Jakarta yang Maju, Merata, dan Berkelanjutan
	6	Ekosistem Digital Jakarta yang Adaptif dan Berdaya Saing Global
	7	Ekonomi Jakarta yang Terintegrasi secara Domestik dan Global
	8	Keberlanjutan Peran Jakarta sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
Transformasi Tata Kelola	9	Regulasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif
Keamanan Daerah	10	Jakarta yang Aman, Damai, dan Partisipatif
	11	Ekonomi Jakarta yang Stabil Kuat, dan Mandiri

Transformasi/Landasan Transformasi	Arah Pembangunan Daerah	
Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	12	Diplomasi Jakarta yang Tangguh dan Berpengaruh di Kancah Global
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	13	Jakarta yang Beragama dan Berkebudayaan Maju
	14	Keluarga dan Masyarakat Jakarta yang Mandiri, Produktif, dan Setara
	15	Lingkungan Jakarta yang Berkualitas dan Berkelanjutan
	16	Jakarta Berketahanan Energi, Air, dan Berkemandirian Pangan
	17	Jakarta yang Tangguh dan Berketahanan terhadap Bencana serta Perubahan Iklim

5.2.2 Arah Kebijakan Transformasi Daerah

Arah Kebijakan Transformasi merupakan penerjemahan strategi transformasi dari RPJPN 2025 – 2045 untuk pembangunan daerah. Arah Kebijakan Transformasi menjadi pedoman arah pembangunan Jakarta untuk mewujudkan transformasi pembangunan Jakarta dalam dua puluh tahun ke depan yang sejalan dengan cita-cita Indonesia Emas 2045.

1. Arah Kebijakan Transformasi Sosial

Dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota yang berdaya saing global, diperlukan upaya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berfokus kepada pemenuhan pelayanan kesehatan dan pendidikan berkualitas, serta diiringi oleh ketahanan sosial melalui perlindungan dan pemberdayaan sosial. Perwujudan misi pertama dilaksanakan melalui arah kebijakan transformasi sosial yang dikelompokkan ke dalam tiga sasaran pokok yaitu terwujudnya masyarakat Jakarta yang sehat menyeluruh, terwujudnya masyarakat Jakarta yang berkeahlian tinggi, unggul, dan bermartabat, serta terwujudnya masyarakat Jakarta tangguh dan terlindungi secara sosial yang inklusif serta berkeadilan.

Tabel 5.3 Arah Kebijakan Transformasi Sosial

Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
Transformasi Sosial	1. Peningkatan pemerataan akses layanan kesehatan yang berkualitas dan menyeluruh dengan pendekatan <i>continuum of care</i> berstandar internasional.

Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Peningkatan kompetensi dan pemerataan sumber daya manusia kesehatan yang berkualitas. 3. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana kesehatan dengan sistem dan teknologi terkini. 4. Penguatan pelayanan kesehatan ibu, bayi dan anak, serta lanjut usia di setiap pusat-pusat kesehatan masyarakat. 5. Pengembangan pelayanan kesehatan reproduksi dan kesehatan jiwa yang berkualitas dan berkesinambungan. 6. Peningkatan dan pemantauan kualitas gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat dengan fokus utama pada masa emas anak (<i>golden age</i>). 7. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular melalui upaya kesehatan masyarakat yang memperhatikan karakteristik sosial masyarakat. 8. Perluasan upaya promotif melalui pembudayaan perilaku hidup sehat dan aktif yang didukung oleh sarana dan prasarana yang mumpuni serta komunikasi dan edukasi yang efektif. 9. Pemenuhan cakupan kepesertaan dan peningkatan pemanfaatan layanan jaminan kesehatan yang komprehensif. 10. Perluasan investasi pelayanan kesehatan primer yang komprehensif dengan fokus pada kesiapan layanan terhadap ancaman kesehatan iklim dan noniklim. 11. Pengembangan rumah sakit riset dan inovasi bekerja sama dengan universitas dan lembaga penelitian. 12. Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga kesehatan, khususnya untuk tenaga kesehatan yang bertugas di Kepulauan Seribu. 13. Percepatan penuntasan <i>stunting</i> dan pencegahan <i>stunting</i> 14. Penuntasan wajib belajar 13 tahun mulai dari pendidikan anak usia dini sampai dengan pendidikan menengah. 15. Peningkatan partisipasi dan pemerataan akses pendidikan yang inklusif untuk seluruh jenjang pendidikan. 16. Pembangunan, pemerataan, dan peremajaan infrastruktur pendidikan yang berkualitas internasional. 17. Peningkatan kualitas dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan. 18. Peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan penjaminan mutu pembelajaran. 19. Penguatan kurikulum dengan muatan berbasis talenta dan karakter, relevan dengan perkembangan ilmu dan teknologi, serta merespons dinamika dan tantangan masa depan.

Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
	<ol style="list-style-type: none"> 20. Peningkatan dukungan pemerintah dalam pengembangan ekosistem riset dan penelitian di seluruh jenjang pendidikan. 21. Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kondisi lokal, kebutuhan pasar, dan potensi keunggulan daerah. 22. Pendorongan partisipasi pendidikan tinggi terutama di bidang STEAM (<i>Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics</i>) yang menghasilkan sumber daya manusia berdaya saing global. 23. Peningkatan kemandirian dan kewirausahaan sekolah dalam mendorong kualitas pendidikan melalui mekanisme BLUD. 24. Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik melalui sistem inkubasi terarah berbasis kolaborasi antarsekolah. 25. Pencegahan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi di lingkungan sekolah. 26. Pemberian bantuan operasional dan personal pendidikan yang tepat sasaran serta peningkatan inovasi pembiayaan pendidikan. 27. Penanganan anak putus sekolah, dengan pendataan tepat, penjangkauan, dan pendampingan efektif, serta revitalisasi gerakan kembali bersekolah. 28. Pengembangan model pembelajaran tepat untuk anak berkebutuhan khusus, anak yang bekerja, berhadapan dengan hukum, terlantar, dan pada daerah rawan bencana. 29. Peningkatan kolaborasi dan sinergi antarpihak dalam perbaikan ekosistem pendidikan berkelanjutan yang mendukung konsep pembelajaran sepanjang hayat (<i>lifelong learning</i>). 30. Penuntasan segala bentuk dan dimensi kemiskinan melalui perlindungan sosial adaptif terintegrasi berbasis data sosial ekonomi masyarakat yang terpadu. 31. Penyelenggaraan program perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar terutama bagi kelompok marginal dan rentan. 32. Pemutakhiran data terpadu sosial ekonomi masyarakat untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi ketepatan sasaran penerima dan kebermanfaatannya program perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial. 33. Peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarga pekerja melalui jaminan sosial ketenagakerjaan meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. 34. Peningkatan partisipasi dan kesempatan kerja penyandang disabilitas di berbagai sektor melalui pelatihan, <i>link and match</i> lapangan kerja, dan pemberian modal usaha; 35. Penjaminan penerimaan, kuota khusus, dan keberlanjutan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi bagi

Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
	penyandang disabilitas pada instansi dan badan usaha milik pemerintah maupun perusahaan swasta; 36. Penciptaan lingkungan kerja beserta fasilitas pendukung yang layak dan sensitif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas.

2. Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi

Dalam mewujudkan ekonomi Jakarta yang Inklusif, Berdaya Saing Global, dan Berkelanjutan, diperlukan upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penerapan ekonomi hijau, penciptaan ekosistem digital, peningkatan kualitas layanan logistik, serta pembangunan infrastruktur penunjang pertumbuhan ekonomi. Perwujudan misi kedua dilaksanakan melalui arah kebijakan transformasi ekonomi yang dikelompokkan ke dalam lima sasaran pokok yaitu terciptanya produktivitas ekonomi Jakarta yang berdaya saing berbasis iptek dan inovasi, terwujudnya ekonomi Jakarta yang maju, merata, dan berkelanjutan, terwujudnya ekosistem digital Jakarta yang adaptif dan berdaya saing global, terwujudnya ekonomi Jakarta yang terintegrasi secara domestik dan global, serta terwujudnya keberlanjutan peran Jakarta sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

Tabel 5.4 Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi

Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
Transformasi Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sektor industri berteknologi tinggi yang menerapkan prinsip berkelanjutan dan berorientasi ekspor melalui riset dan inovasi. 2. Peningkatan daya saing industri pengolahan pada pasar skala domestik, regional, dan global; 3. Pengembangan ekonomi biru, teknologi kelautan, dan rekayasa akuakultur di kawasan perairan dan pesisir Jakarta, serta Kepulauan Seribu. 4. Penguatan citra kota dengan pendekatan model tiga budaya (<i>traditional culture - pop culture - tech culture</i>). 5. Peningkatan daya tarik wisata melalui pengembangan kualitas, jenama (<i>branding</i>), dan pemasaran produk-produk ekonomi kreatif yang bermitra dengan pelaku industri internasional. 6. Penciptaan ekosistem <i>creative hub</i> sebagai ruang mengembangkan ekonomi kreatif Jakarta.

Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
	<ol style="list-style-type: none"> 7. Peningkatan amenitas untuk mendukung pariwisata, industri kreatif, dan potensi wisata medis. 8. Pengembangan destinasi wisata unggulan baru seperti wisata urban, wisata warisan (<i>heritage</i>), dan wisata pesisir serta kepulauan. 9. Pengembangan industri <i>Meeting, Incentive, Convention, Exhibition</i> (MICE) yang dilengkapi dengan ragam infrastruktur kontemporer bertaraf internasional yang kompetitif dan adaptif. 10. Pemanfaatan ruang publik dan aset pemerintah sebagai daya tarik baru dan wadah aktivitas ekonomi kreatif dan seni budaya berjenjang. 11. Penguatan dukungan pembiayaan dan pengembangan skema pembiayaan alternatif untuk pemajuan sektor kebudayaan. 12. Fasilitasi pengembangan UMKM melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif, teknologi digital, dan pasar internasional. 13. Pembentukan kluster pengembangan UMKM berbasis lokasi atau sektor industri untuk meningkatkan kolaborasi, inovasi, dan daya saing. 14. Pendorongan inkubasi UMKM yang berbasis bioteknologi dan ekonomi biru di Kepulauan Seribu. 15. Pengembangan kreativitas pelaku usaha mikro dan rintisan secara inklusif untuk menghasilkan produk/jasa dengan kandungan lokal (<i>local sourcing</i>). 16. Peningkatan produktivitas koperasi melalui pengembangan SDM dengan keahlian khusus industri, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, kerja sama antar koperasi, dan perluasan cakupan keanggotaan. 17. Penguatan peran, kemandirian, dan produktivitas BUMD melalui kerja sama dengan sektor privat, seperti pengelolaan aset <i>idle</i> dan pemanfaatan aset strategis melalui <i>cost-sharing</i>. 18. Mendorong kerja sama antar BUMD dalam pemenuhan layanan kepada masyarakat (transportasi, hunian, dsb) yang berorientasi pada peningkatan pengalaman pengguna melalui integrasi layanan, perluasan jangkauan, peningkatan reliabilitas, dan kualitas layanan. 19. Perbaikan manajemen dan kapasitas finansial BUMD untuk meningkatkan potensi <i>Initial Public Offering</i> (IPO).

Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
	<ol style="list-style-type: none"> 20. Penggunaan standar internasional terkait dengan pencegahan korupsi dan strategi bisnis yang bertanggung jawab. 21. Penguatan ekonomi dan keuangan syariah sebagai alternatif pendanaan dalam mendukung pembangunan ekonomi. 22. Peningkatan insentif dan dukungan kebijakan dalam mewujudkan ekosistem riset dan inovasi yang menarik bagi talenta riset nasional dan global. 23. Pengembangan pusat dan hub inovasi yang didukung dengan sarana dan prasarana yang andal. 24. Pemetaan angkatan kerja sebagai landasan penentuan kebijakan ketenagakerjaan dan arah pengembangan ekonomi sebagai upaya <i>link and match</i> tenaga kerja. 25. Peningkatan kapasitas dan daya saing tenaga kerja melalui sertifikasi keahlian dan pelatihan bahasa internasional. 26. Perluasan sumber-sumber pembiayaan kreatif untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi potensial dan produktivitas ekonomi. 27. Penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau sebagai konsep pengembangan ekonomi prioritas. 28. Percepatan transisi teknologi ramah lingkungan yang bersih, efisien, dan terbarukan pada industri dan manufaktur. 29. Penciptaan peluang kerja baru (<i>green jobs</i>), wirausaha sosial, dan berbagai mata pencaharian berkelanjutan. 30. Implementasi prinsip ekonomi sirkular pada berbagai sektor usaha terutama industri dengan pemanfaatan sumber daya alam tinggi. 31. Peningkatan penggunaan produk dan material ramah lingkungan pada proses pembangunan infrastruktur, pengadaan barang dan jasa, serta layanan pemerintahan. 32. Peningkatan kemudahan prosedur untuk mendukung pembiayaan dan investasi hijau dalam pembangunan daerah. 33. Pembangunan infrastruktur digital yang andal dengan cakupan layanan di seluruh kota untuk mengurangi kesenjangan digital (<i>digital divide</i>). 34. Peningkatan kecepatan, kapasitas, dan jangkauan internet bagi seluruh masyarakat. 35. Peningkatan keamanan siber serta proteksi data dan informasi dari potensi ancaman digital melalui edukasi dan pemantauan yang tepat.

Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
	<ol style="list-style-type: none"> 36. Peningkatan produktivitas ekonomi melalui penggunaan TIK di berbagai sektor unggulan. 37. Penguatan literasi dan kecakapan digital masyarakat secara menyeluruh untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas talenta digital. 38. Perbaikan regulasi dan simplifikasi prosedur investasi dalam pengembangan ekosistem dan bisnis di bidang TIK. 39. Penguatan dukungan pembiayaan dan pemberian insentif bagi pengembang TIK. 40. Peningkatan kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait dalam pengembangan transformasi digital yang komprehensif. 41. Pemanfaatan mahadata dan pengindraan jarak jauh dalam proses perencanaan kebijakan (<i>data-driven policy</i>). 42. Pengembangan kerja sama dan perdagangan dengan pusat pertumbuhan ekonomi regional dan global dalam rantai pasok yang berkelanjutan. 43. Optimalisasi investasi pada sektor-sektor prioritas yang mendukung potensi Jakarta sebagai pusat ekonomi dan bisnis skala regional dan global. 44. Peningkatan penguasaan pasar dalam dan luar negeri melalui ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi. 45. Pembangunan dan peningkatan kapasitas infrastruktur kepelabuhanan yang berkualitas dan berdaya saing global. 46. Optimalisasi potensi pelabuhan sebagai hub perdagangan nasional dan internasional. 47. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur dan sistem logistik yang terkoneksi secara optimal dan efisien antara pusat distribusi logistik kota, regional, dan global. 48. Pemanfaatan teknologi dalam penguatan manajemen dan sumber daya manusia industri logistik. 49. Peningkatan efisiensi distribusi barang dan jasa dari dan menuju Jakarta melalui penguatan regulasi pendukung. 50. Penguatan kerja sama lintas aspek dan lintas pemangku kepentingan dalam meningkatkan performa logistik. 51. Pengembangan kawasan generator perekonomian baru, melalui rejuvenasi pemanfaatan berkelanjutan barang milik negara (BMN) yang dapat memenuhi kebutuhan ruang dan aktivitas masyarakat.

Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
	<p>52. Pengembangan kawasan ekonomi khusus sesuai dengan potensi dan keunggulan wilayah.</p> <p>53. Pembangunan dan revitalisasi kawasan pesisir Jakarta dengan konsep kota tepian air yang memadukan fungsi ekonomi dan ekologi.</p> <p>54. Pemanfaatan arahan pengembangan kawasan (<i>development brief</i>) sebagai panduan investasi bagi mitra pembangunan potensial.</p> <p>55. Penguatan kerja sama antara Jakarta dan Bodetabekpunjur sebagai kawasan aglomerasi dengan pembagian peran dalam sektor ekonomi sekunder dan tersier.</p> <p>56. Pengembangan kawasan kompak berkelanjutan dengan fungsi campuran (<i>mixed use</i>) pada titik-titik transit.</p> <p>57. Peningkatan pasokan dan tipologi hunian serta kualitas lingkungan permukiman yang memenuhi kriteria layak, aman, dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat di seluruh lapisan.</p> <p>58. Peningkatan efisiensi pemanfaatan lahan untuk penyediaan sarana prasarana dan utilitas yang terintegrasi di lingkungan perumahan serta permukiman antara lain melalui konsolidasi lahan.</p> <p>59. Peningkatan akses hunian privat terhadap material bangunan layak huni dengan melibatkan pemangku kepentingan dari berbagai sektor baik sektor kesehatan, konstruksi, perindustrian, maupun perdagangan.</p> <p>60. Pemadatan (<i>densification</i>) dan penyediaan perumahan yang berlokasi di titik transit dan pusat aktivitas kota.</p> <p>61. Pemberdayaan dan kemandirian penghuni rusunawa melalui penerapan sistem <i>housing career</i>.</p> <p>62. Pengembangan skema pembiayaan serta pendanaan untuk penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat berpenghasilan tertentu.</p> <p>63. Pembangunan infrastruktur transportasi publik perkotaan yang terintegrasi, ramah lingkungan, dan berkeselamatan.</p> <p>64. Peningkatan kualitas layanan dan manajemen transportasi publik berbasis teknologi terdepan.</p> <p>65. Pembangunan lintas atas/bawah pada perlintasan sebidang yang cukup padat di seluruh wilayah Jakarta.</p>

Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
	<ul style="list-style-type: none"> 66. Pengembangan kereta api cepat (HST/High Speed Train) Jakarta-Bandung-Cirebon-Semarang-Surakarta-Surabaya. 67. Optimalisasi pemanfaatan ruang bawah tanah (<i>underground</i>) yang terintegrasi dengan pemanfaatan ruang permukaan untuk mendukung pengembangan infrastruktur kota berorientasi transit dan digital. 68. Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur jalan yang lengkap (<i>complete street</i>) untuk mendukung aksesibilitas layanan transportasi publik yang inklusif disertai dengan sistem jaringan utilitas terpadu bawah tanah. 69. Penguatan konektivitas kawasan pesisir dan Kepulauan Seribu melalui perbaikan jaringan transportasi air. 70. Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan khusus pariwisata di Jakarta 71. Peningkatan kemudahan akses dan waktu tempuh dari dan ke bandar udara melalui pembangunan infrastruktur kebandarudaraan. 72. Penguatan kerja sama lintas-aspek dan lintas pemangku kepentingan dalam meningkatkan konektivitas global. 73. Pengembangan berbagai instrumen pembiayaan kreatif serta pemanfaatan kekhususan untuk pembangunan infrastruktur dan proyek besar (<i>mega project</i>).

3. Arah Kebijakan Transformasi Tata Kelola

Dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota berdaya saing global, diperlukan transformasi tata kelola pemerintahan yang efisien, responsif, dan profesional, harmonisasi regulasi, peningkatan efektivitas sistem pelayanan publik, serta peningkatan kompetensi dan integritas aparatur pemerintah merupakan upaya yang mutlak harus dilakukan. Perwujudan misi ketiga dilaksanakan melalui arah kebijakan transformasi tata kelola dengan sasaran pokok berupa terwujudnya regulasi dan tata kelola pelayanan publik Jakarta yang berkualitas, harmonis, adaptif, dan berintegritas. Perwujudan regulasi dan tata kelola pelayanan publik Jakarta yang berkualitas, harmonis, adaptif, dan berintegritas tersebut ditandai dengan indikator utama pembangunan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 5.5 Arah Kebijakan Transformasi Tata Kelola

Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
<p>Transformasi Tata Kelola</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas dan penataan regulasi daerah melalui harmonisasi proses penyusunan kebijakan yang transparan, akuntabel, serta berbasis data dan riset. 2. Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dalam penyusunan perencanaan, kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. 3. Pemanfaatan teknologi berbasis internet untuk segala (<i>internet of things</i>), pemelajaran mesin (<i>machine learning</i>), mahadata (<i>big data</i>), dan komunikasi waktu nyata (<i>real time communication</i>) untuk meningkatkan kinerja layanan publik. 4. Peningkatan respons terhadap laporan, saran, dan aspirasi masyarakat melalui berbagai kanal aduan. 5. Peningkatan kepercayaan publik melalui pengelolaan komunikasi yang transparan, akurat, dan efektif. 6. Pengembangan identitas digital bagi seluruh masyarakat yang dapat dimanfaatkan sebagai rujukan analisis kebutuhan pelayanan publik. 7. Inovasi layanan publik dan tata kelola pembangunan yang menerus berdasarkan hasil evaluasi kepuasan masyarakat. 8. Penguatan peran pemerintah daerah sampai dengan satuan kerja terendah dalam penyelesaian permasalahan sosial kemasyarakatan. 9. Penguatan kolaborasi dan kelembagaan wilayah aglomerasi dalam perencanaan dan tata kelola lintas urusan dan lintas wilayah. 10. Peningkatan akuntabilitas keuangan daerah dan maturitas sistem pengendalian internal pemerintah. 11. Pengimplementasian sistem merit dan manajemen talenta untuk menghasilkan ASN yang berintegritas, kompeten, dan kompetitif di level global. 12. Penguatan tata kelola pembangunan melalui penyusunan desain besar (<i>grand design</i>) atau rencana induk (<i>master plan</i>) yang berorientasi perwujudan kota global pada tiap urusan termasuk pengembangan wilayah Kepulauan Seribu. 13. Simplifikasi prosedur dan proses investasi dan bisnis yang menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kepastian berusaha.

4. Arah Kebijakan Penguatan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

Dalam mewujudkan stabilitas Jakarta sebagai kota yang tangguh dan berpengaruh, diperlukan upaya penciptaan lingkungan yang aman, perwujudan masyarakat demokratis, penciptaan kestabilan ekonomi makro, serta peningkatan kemampuan berdiplomasi yang tangguh. Perwujudan misi keempat dilaksanakan melalui arah kebijakan pemantapan demokrasi, stabilitas, dan daya saing global yang dikelompokkan

ke dalam tiga sasaran pokok yaitu terciptanya Jakarta yang aman, damai, dan partisipatif, terciptanya ekonomi Jakarta yang stabil, kuat, dan mandiri, serta terwujudnya diplomasi Jakarta yang kuat di kancah global.

Tabel 5.6 Arah Kebijakan Penguatan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
<p>Penguatan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan internalisasi nilai-nilai HAM bagi aparaturnya dan masyarakat. 2. Perluasan akses layanan bantuan hukum yang terjangkau dan inklusif, 3. Penguatan perlindungan masyarakat melalui pengawasan dan penegakan peraturan terkait ketenteraman dan ketertiban umum. 4. Pelibatan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban dengan pendekatan berbasis modal sosial dan kearifan lokal. 5. Peningkatan kapasitas individu dan komunitas untuk beradaptasi terhadap tekanan, guncangan, dan konflik sosial. 6. Penyediaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum di ruang publik yang modern dan fungsional untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan masyarakat. 7. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan. 8. Perbaikan kinerja lembaga legislatif melalui pendidikan politik kepada kader-kader partai politik. 9. Fasilitasi dan pelibatan akademisi, organisasi masyarakat, dan partai politik dalam membangun ekosistem politik yang sehat, bersih, dan adil. 10. Peningkatan netralitas pemerintah daerah pada proses penyelenggaraan pemilihan umum. 11. Penjaminan kebebasan pers dan hak menyuarakan pendapat yang bertanggung jawab. 12. Optimalisasi sumber pajak yang mengikuti perkembangan struktur ekonomi kota global. 13. Penguatan regulasi dan kebijakan yang mendukung perubahan sektor informal menuju formal dalam meningkatkan basis pajak. 14. Optimalisasi penciptaan sumber-sumber penerimaan pajak dan retribusi untuk peningkatan kapasitas fiskal daerah dan pembiayaan pembangunan infrastruktur. 15. Penguatan regulasi dan sinergi antara pusat-daerah dan antardaerah untuk menjaga keterjangkauan harga pangan, memastikan ketersediaan pasokan, dan menjamin kelancaran distribusi komoditas pangan. 16. Pengembangan pusat-pusat distribusi komoditas pangan (<i>distribution center</i>) di luar daerah melalui kolaborasi antarpihak.

Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
	<ol style="list-style-type: none"> 17. Pengembangan hub distribusi dan <i>cold storage</i> yang didasarkan atas kajian komprehensif dan kajian komparatif kota global untuk meningkatkan ketahanan pangan dan stabilitas harga. 18. Pengoptimalan kawasan pesisir dan Kepulauan Seribu sebagai lumbung pangan serta pengembangan inovasi perikanan dan kelautan dalam penguatan ketahanan pangan. 19. Penguatan belanja produktif daerah untuk memicu pertumbuhan ekonomi, investasi publik, dan pemerataan layanan dasar. 20. Peningkatan kemudahan berbisnis (<i>ease of doing business</i>) skala lokal, regional, dan internasional melalui simplifikasi prosedur investasi dan bisnis. 21. Pemberian insentif fiskal pada pengembangan dan inkubasi sektor-sektor produktif. 22. Peningkatan kemudahan akses layanan dan produk keuangan seperti kredit, tabungan, dan asuransi bagi semua kelompok masyarakat. 23. Pemanfaatan industri teknologi finansial (<i>fintech</i>) untuk mendukung inklusi keuangan. 24. Penguatan sinergi perencanaan dan penganggaran pembangunan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. 25. Penguatan kebijakan para diplomasi dan kerja sama bilateral serta multilateral yang strategis dan menguntungkan. 26. Partisipasi aktif pada forum dan organisasi internasional dan penguatan jejaring dengan pemangku kepentingan global. 27. Peningkatan visibilitas dan citra positif Jakarta di media global melalui strategi komunikasi yang efektif. 28. Pelaksanaan kesepakatan dan komitmen dunia internasional terutama terkait pembangunan berkelanjutan dengan memanfaatkan nilai ideologi dan budaya bangsa. 29. Peningkatan eksposur internasional melalui penyelenggaraan acara besar (<i>mega event</i>) yang dapat menjadi katalis perekonomian dan regenerasi kota. 30. Peningkatan kapasitas dan profesionalitas penyelenggaraan acara internasional.

5. Arah Kebijakan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Dalam mencapai visinya sebagai kota global, Jakarta perlu meningkatkan ketahanan sosial budaya dan ekologis di dalam wilayahnya sehingga menjadi kota yang layak huni bagi masyarakatnya. Dengan mempertahankan identitas sosial kulturalnya, Jakarta dapat memberikan warna dalam konstelasi global sekaligus menyaring eksternalitas negatif yang mungkin muncul di dalam komunitas masyarakat Jakarta. Hal ini dilaksanakan melalui berbagai upaya seperti penciptaan masyarakat yang beragama

dan berkebudayaan maju, pemberdayaan keluarga berkualitas dan penyetaraan gender. Selain itu, peningkatan produktivitas ekonomi dan pembangunan dalam jangka panjang menuju Jakarta global perlu diimbangi dengan komitmen dalam menjaga keberlanjutan dan ketahanan ekologis Jakarta. Upaya ini meliputi peningkatan kualitas lingkungan hidup, pembangunan ketahanan energi dan pangan, serta perencanaan yang kuat untuk mitigasi bencana dan perubahan iklim.

Tabel 5.5 Arah Kebijakan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
<p>Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur kebudayaan serta pelestarian cagar budaya. 2. Pemanfaatan museum dan pusat-pusat kebudayaan untuk menghidupkan aktivitas di kawasan perkotaan. 3. Pendayagunaan dan apresiasi terhadap warisan budaya tak benda yang berkelanjutan. 4. Peningkatan kapasitas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam dialog kerukunan, penyampaian pesan toleransi, dan pencegahan serta penyelesaian konflik antarumat. 5. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang kebebasan beragama dan beribadat, serta kemudahan dalam pembangunan fasilitas ibadah. 6. Pelibatan lembaga, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat sebagai agen perdamaian dan penyebaran nilai-nilai agama yang universal seperti perdamaian, keadilan, dan toleransi. 7. Penguatan muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama dan budi pekerti di seluruh jenjang dan jenis pendidikan. 8. Pengelolaan potensi ekonomi keagamaan umat melalui penguatan regulasi, pendataan, dan peningkatan kualitas lembaga pengelola dana sosial keagamaan. 9. Partisipasi lembaga keuangan dan dunia usaha dalam pemanfaatan dana ekonomi umat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. 10. Peningkatan kerja sama dan standardisasi penilaian produk halal. 11. Pengembangan pusat pelayanan keluarga sebagai pusat informasi dan koordinasi layanan kesejahteraan dan ketahanan keluarga. 12. Peningkatan perlindungan bagi kelompok rentan secara responsif melalui layanan pendampingan dan advokasi keluarga yang komprehensif dan terintegrasi. 13. Penguatan literasi pengelolaan keuangan rumah tangga dalam mewujudkan ketahanan ekonomi keluarga. 14. Peningkatan keberdayaan dan kemandirian kelompok rentan (perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia) melalui

Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
	<p>kesempatan mengembangkan diri sepanjang hayat, baik melalui pendidikan formal maupun informal.</p> <ol style="list-style-type: none"> 15. Penyediaan fasilitas yang mengakomodasi kebutuhan kelompok rentan (anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia) di ruang publik dan komersial. 16. Pemanfaatan ruang dan fasilitas publik untuk menampung aktivitas dan kebutuhan tumbuh kembang anak dan remaja yang aman dan relevan. 17. Pengembangan fasilitas layanan geriatri yang holistik mulai dari panti wreda, layanan medis, layanan pengasuhan, dan peningkatan aktivitas ramah lansia. 18. Optimalisasi perlindungan dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga melalui layanan penanganan tindak kekerasan yang terpadu dan edukasi pencegahan kekerasan. 19. Penguatan layanan konseling dan pendampingan anak dan remaja yang komprehensif dalam mencegah eksploitasi, kekerasan, pornografi, kehamilan tidak diinginkan, dan dampak negatif pernikahan bawah umur. 20. Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui pengawasan dan penegakan regulasi. 21. Peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan melalui pengembangan kompetensi maupun jenis-jenis pekerjaan yang ramah perempuan. 22. Peningkatan keterwakilan perempuan dalam jabatan manajerial perusahaan maupun jabatan publik. 23. Penguatan pembinaan kepemimpinan pemuda serta dukungan akses permodalan bagi kewirausahaan pemuda. 24. Pelibatan bermakna seluruh kelompok masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan. 25. Pengintegrasian perspektif gender dalam perencanaan, desain infrastruktur, akses terhadap pelayanan publik, dan pemenuhan hak-hak dasar. 26. Penguatan strategi dan kebijakan pengendalian penduduk berbasis kerja sama dengan daerah lain melalui pengembangan sistem informasi dan peningkatan penertiban administrasi kependudukan. 27. Peningkatan kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau (RTH) dan ruang terbuka biru (RTB) yang bernilai ekologis tinggi untuk memperbaiki ekosistem kota. 28. Penerapan mekanisme insentif-disinsentif dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas RTH dengan konsep solusi berbasis alam (<i>nature-based solution</i>) untuk mengurangi fenomena <i>urban heat island</i>.

Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
	<p>29. Pelestarian keanekaragaman hayati melalui pemulihan habitat dan penanaman serta pemeliharaan vegetasi endemi.</p> <p>30. Penciptaan konektivitas RTH perkotaan untuk konservasi serta pemanfaatan keanekaragaman hayati.</p> <p>31. Pemulihan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil melalui restorasi lahan basah, konservasi dan rehabilitasi bakau, terumbu karang, dan habitat laut lainnya, serta pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan.</p> <p>32. Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung Taman Wisata Angke.</p> <p>33. Penerapan indeks hijau-biru Indonesia dan regulasi gedung hijau untuk menjalankan mekanisme insentif dan disinsentif terhadap pembangunan bangunan dan infrastruktur lainnya.</p> <p>34. Percepatan akses sanitasi aman melalui pembangunan infrastruktur dan sistem pengolahan limbah terpusat (<i>Jakarta Sewerage System</i>) maupun setempat.</p> <p>35. Peningkatan operasional sarana/prasarana sanitasi aman</p> <p>36. Pengurangan timbulan sampah perkotaan di sumber secara kolaboratif.</p> <p>37. Penanganan sampah yang berkelanjutan melalui pembangunan dan pengoperasian infrastruktur persampahan berteknologi ramah lingkungan yang mendukung terciptanya ekonomi sirkular.</p> <p>38. Penyediaan sarana dan layanan pengolahan sampah B3 rumah tangga.</p> <p>39. Pengolahan sampah yang terintegrasi dengan pengembangan kawasan perairan pesisir.</p> <p>40. Pengembangan sarana pengolahan sampah perairan (sungai, danau, embung, waduk, situ, dan teluk).</p> <p>41. Pemanfaatan hasil olahan sampah menjadi sumber energi alternatif melalui kerja sama dengan pemasok kebutuhan industri/pasar (<i>oftaker</i>).</p> <p>42. Penguatan kerja sama dengan para pemangku kepentingan dalam peningkatan kualitas lingkungan (air, laut, udara, tutupan lahan dan pengelolaan sampah) Jakarta.</p> <p>43. Peningkatan pengelolaan sampah secara cerdas dan tepat guna melalui konsep <i>Reduce, Reuse, Recycle</i> (3R).</p> <p>44. Penerapan pembangunan kota yang menyesuaikan dengan kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.</p> <p>45. Penyediaan pasokan energi yang andal dan berkelanjutan di seluruh wilayah, terutama di wilayah Kepulauan Seribu.</p> <p>46. Diversifikasi sumber energi melalui optimalisasi sumber-sumber potensi energi baru terbarukan dan konversi energi dari hasil pengelolaan limbah dan biomassa.</p>

Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
	<p>47. Penguatan tata kelola dan regulasi yang mendorong penggunaan energi terbarukan di Jakarta.</p> <p>48. Peningkatan kerja sama antar daerah dalam menjaga rantai pasokan pangan.</p> <p>49. Diversifikasi sumber pangan melalui pertanian perkotaan, pengembangan industri pengolahan produk perikanan, budidaya perikanan, dan perikanan tangkap yang berkelanjutan.</p> <p>50. Penguatan ketahanan, keamanan, dan jaminan ketersediaan pangan;</p> <p>51. Pengendalian pemborosan pangan (<i>food waste</i>) melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan industri makanan.</p> <p>52. Penganekaragaman pola konsumsi pangan perseorangan dan masyarakat yang bernutrisi seimbang.</p> <p>53. Pemenuhan cakupan layanan air minum aman yang berkelanjutan baik secara kuantitas, kualitas, cakupan, kontinuitas, dan keterjangkauan.</p> <p>54. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan, pengembangan, dan pengelolaan SPAM yang profesional dan andal.</p> <p>55. Peningkatan kedaulatan air melalui pengembangan sumber air baku alternatif seperti reservoir muara, tangkapan air hujan, desalinasi, dan daur ulang air.</p> <p>56. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan, pengembangan, dan pengelolaan SPAM melalui pemanfaatan teknologi dalam penyediaan air baku Jakarta secara mandiri.</p> <p>57. Peningkatan efisiensi produksi, penguatan riset, dan pemanfaatan energi, air, dan pangan (FEW Nexus).</p> <p>58. Pembangunan dan peningkatan kapasitas infrastruktur penanggulangan bencana yang memadai.</p> <p>59. Integrasi fungsi ruang dan pemanfaatan infrastruktur kota dalam mitigasi dan adaptasi bencana, serta penerapan konsep solusi berbasis alam (<i>nature-based solution</i>).</p> <p>60. Pengendalian daya rusak air pada wilayah aglomerasi secara komprehensif dan terintegrasi</p> <p>61. Pengurangan risiko bencana melalui peningkatan kapasitas aparaturnya dan masyarakat dalam mengantisipasi segala jenis bahaya di lingkungan perkotaan.</p> <p>62. Pemanfaatan teknologi informasi dan pengelolaan pangkalan data kebencanaan terintegrasi dalam mengembangkan sistem peringatan bencana dini, simulasi dan penanggulangan bencana, serta layanan komunikasi kedaruratan.</p> <p>63. Akselerasi transisi energi dan peningkatan bauran energi baru terbarukan (EBT).</p>

Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
	<p>64. Penciptaan ruang kota yang responsif terhadap perubahan iklim dan penyediaan infrastruktur hijau untuk mewujudkan suhu perkotaan yang nyaman.</p> <p>65. Penerapan konsep bangunan hijau dan arsitektur pasif (<i>passive architecture</i>) untuk mengoptimalkan konsumsi energi pada bangunan, baik melalui perbaikan (<i>retrofit</i>) bangunan lama maupun regulasi bangunan baru.</p> <p>66. Pengendalian sumber polusi melalui pengetatan regulasi dan standar emisi, pengawasan baku mutu gas buang dan limbah sektor industri dan transportasi dari dalam Jakarta maupun wilayah sekitar (<i>transboundary pollution</i>).</p> <p>67. Perubahan pola mobilitas berbasis kendaraan pribadi menjadi transportasi publik yang ramah lingkungan.</p> <p>68. Implementasi kebijakan pembangunan rendah karbon melalui penerapan nilai ekonomi karbon (<i>carbon pricing</i>), pajak karbon, perluasan kawasan rendah emisi (<i>low emission zone</i>), serta penandaan anggaran perubahan iklim (<i>climate budget tagging</i>) dalam perencanaan pembangunan.</p> <p>69. Pemanfaatan hasil riset dan inovasi dalam penciptaan ruang kota yang responsif terhadap perubahan iklim dan mewujudkan iklim mikro perkotaan yang nyaman.</p> <p>70. Penguatan kelembagaan dan kerja sama antar pihak, baik dengan wilayah sekitar, lembaga internasional, akademisi, organisasi non-pemerintahan, dan masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang berkelanjutan dan sinergis.</p> <p>71. Mengarahkan kota yang berketahanan air dengan pembangunan infrastruktur Jakarta yang ramah dan adaptif terhadap air dan memastikan setiap pembangunan kota mengarah pada konsep <i>zero run off</i>.</p>

6. Arah Kebijakan Implementasi Transformasi

Untuk mendukung Jakarta menjadi kota global, telah disusun arah kebijakan implementasi transformasi yang merupakan upaya perwujudan dari agenda keenam yaitu Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan, agenda ketujuh yaitu Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan, serta agenda kedelapan yaitu Kestinambungan Pembangunan. Arah kebijakan implementasi transformasi yang disusun telah diselaraskan dengan arah kebijakan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sebagai berikut.

Tabel 5.6 Arah Kebijakan Implementasi Transformasi

Implementasi Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
<p>Implementasi Transformasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah. 2. Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain, termasuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb.). 3. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir. 4. Percepatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (<i>Land Acquisition and Resettlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated</i>) yang disusun secara kolaboratif dan partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, kepercayaan, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas. 5. Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke <i>green/low-cost financing</i>, bantuan/subsidi operasional dan ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan. 6. Percepatan pelaksanaan Reforma Agraria. 7. Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas peneliti, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, dunia usaha dan dunia industri (DUDI), masyarakat, baik dalam dan luar negeri. 8. Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim. 9. Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan <i>blended finance</i>. 10. Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah. 11. Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi. 12. Peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan sasaran prioritas nasional. 13. Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan

Implementasi Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
	keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan. 14. Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.

5.2.3 Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan Daerah

Berdasarkan Arah Pembangunan Daerah hasil penyelarasan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045, maka dirumuskanlah Sasaran Pokok beserta Indikator Utama Pembangunan (IUP) sebagai tolak ukur pencapaiannya. Dalam hal ini Indikator Utama Pembangunan Daerah merupakan alat ukur untuk melihat pencapaian dari tujuan pembangunan daerah serta kontribusi terhadap tujuan pembangunan nasional jangka panjang. Sasaran pokok RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2045 adalah:

1. Terwujudnya Masyarakat Jakarta yang Sehat Menyeluruh

Kebutuhan dasar yaitu kesehatan merupakan faktor utama dan penting dalam mendukung sumber daya manusia yang unggul dan sejahtera. Masyarakat yang sehat menyeluruh dimaknai sebagai kondisi kesehatan yang melampaui hanya sekadar ketiadaan penyakit fisik, namun secara holistik mencakup aspek fisik, mental, dan sosial kesejahteraan yang sehat pada setiap individu masyarakat Jakarta. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat Jakarta dilakukan melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang komprehensif pada seluruh siklus kehidupan (*continuum of care*) untuk menciptakan generasi emas dan sumber daya manusia yang berkualitas. Perbaikan kesehatan perkotaan didorong secara merata di seluruh wilayah Jakarta dan berkeadilan bagi seluruh kelompok masyarakat dengan penyediaan layanan kesehatan primer, sekunder hingga tersier yang terjangkau, berkualitas, dan optimal. Peningkatan derajat kesehatan fisik dan mental masyarakat Jakarta tidak hanya dilakukan melalui upaya memperkuat layanan kesehatan kuratif-rehabilitatif berbasis perawatan dan pengobatan perorangan, tetapi juga mempromosikan budaya bersih dan gaya hidup sehat dan pelayanan dengan pendekatan promotif-preventif. Pencapaian kesehatan masyarakat yang optimal ditandai dengan peningkatan usia harapan hidup serta peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak. Selain itu, penyakit menular dan tidak menular, seperti tuberkulosis, obesitas sentral, dan diabetes melitus juga dapat ditekan. Pelayanan kesehatan dapat diberikan secara maksimal dan merata melalui jaminan kesehatan nasional bagi seluruh masyarakat Jakarta.

2. Terwujudnya Masyarakat Jakarta yang Berkeahlian Tinggi, Unggul, dan Bermartabat

Agar sukses menjadi kota global, urgensi pembangunan sumber daya manusia Jakarta menjadi faktor kunci dalam memenangkan persaingan global. Kualitas sumber daya manusia yang produktif dan sejahtera didasarkan pada kualitas pembangunan pendidikan individu dan masyarakat. Tujuan perwujudan masyarakat Jakarta yang berkeahlian tinggi, unggul, dan bermartabat adalah menciptakan masyarakat yang luhur dan berkarakter, memiliki keterampilan dan keahlian yang tinggi, diakui dunia, serta mampu bersaing secara kompetitif di berbagai bidang, namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai moral Pancasila.

Prinsip pembangunan pendidikan adalah inklusif dan adaptif. Prinsip inklusif berarti akses yang merata di seluruh wilayah Jakarta dan kesempatan yang setara bagi seluruh masyarakat Jakarta tanpa memandang latar belakang ekonomi, sosial, fisik, mental, maupun usia (*lifelong learning*). Prinsip adaptif menekankan pada penyesuaian metode pengajaran, kurikulum, dan fasilitas pembelajaran yang mampu mengembangkan potensi unik setiap individu dengan optimal. Selain itu, pembangunan pendidikan yang adaptif juga mengarahkan pada kualitas pendidikan multidisiplin dan relevansi pendidikan dengan tuntutan global serta kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Kesuksesan pembangunan pendidikan dapat dilihat melalui peningkatan hasil pembelajaran peserta didik, meliputi kemampuan literasi membaca dan numerasi. Proporsi penduduk yang berkualifikasi pendidikan tinggi juga mengalami peningkatan seiring penambahan jumlah pekerja di bidang keahlian menengah tinggi.

3. Terwujudnya Masyarakat Jakarta Tangguh dan Terlindungi secara Sosial yang Inklusif serta Berkeadilan

Masyarakat yang tangguh (*resilient community*) dimaknai sebagai komunitas yang mampu bertahan dan beradaptasi dalam menghadapi krisis, serta mampu untuk tumbuh dan berkembang setelah pulih dari krisis tersebut. Pemerintah memiliki peran krusial dalam membangun masyarakat yang tangguh melalui upaya pemberdayaan masyarakat dan perlindungan sosial yang inklusif dan berkeadilan.

Kesejahteraan masyarakat Jakarta bertumpu pada kesiapan sosial dan ekonomi dalam setiap keadaan. Perlindungan sosial bertujuan untuk membantu peningkatan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, dan memberikan jaring pengaman sosial bagi masyarakat rentan dari risiko ekonomi, kesehatan, dan sosial.

Perlindungan sosial tersebut bertujuan untuk mengurangi ketidakpastian dan memberikan pengamanan dari risiko yang mungkin dihasilkan saat terjadi ancaman, serta jaminan bagi setiap individu untuk hidup sejahtera dan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki. Perlindungan sosial diarahkan bersifat inklusif dan berkeadilan untuk memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan

seperti penyandang disabilitas, perempuan, lanjut usia, dan penduduk rentan lainnya memiliki kesetaraan akses terhadap layanan dan manfaat perlindungan sosial sehingga dapat mengusahakan kesejahteraan dan penghidupan secara mandiri dan berdaya. Hal ini pada gilirannya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat, meningkatkan produktivitas ekonomi, dan mengurangi kemiskinan.

Penurunan tingkat kemiskinan menjadi gambaran dari ketangguhan masyarakat serta keberhasilan upaya pemberdayaan dan perlindungan sosial yang dilakukan, selain peningkatan cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang berguna untuk memastikan keamanan finansial dan sosial kepada pekerja. Selain itu, peningkatan persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal dapat menggambarkan inklusivitas serta partisipasi penuh dan setara pada angkatan kerja.

4. Terciptanya Produktivitas Ekonomi Jakarta yang Berdaya Saing berbasis IPTEK dan Inovasi

Dalam mewujudkan ekonomi yang berdaya saing global, inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang menerus memiliki peran yang sangat esensial. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sebagai pilar pengembangan ekonomi akan mendorong terciptanya efisiensi dan efektivitas, sehingga menciptakan ekonomi yang lebih produktif. Inovasi yang terus dikembangkan akan menciptakan ide/gagasan dan peluang baru dalam pembangunan ekonomi, sehingga mampu menciptakan ekonomi yang inovatif dan adaptif terhadap perkembangan dunia. Optimalisasi pemanfaatan IPTEK dan inovasi dalam peningkatan produktivitas ekonomi Jakarta yang berdaya saing bertujuan untuk menciptakan produktivitas ekonomi Jakarta yang kuat dan memiliki keunggulan kompetitif di kancah global. Dengan demikian, Jakarta akan mampu menjadi pusat perekonomian Asia Tenggara dan memiliki pengaruh yang besar di jaringan ekonomi global.

Peningkatan produktivitas ekonomi Jakarta tidak terlepas dari pengembangan IPTEK dan inovasi pada sektor-sektor ekonomi utama Jakarta, yang meliputi industri, koperasi dan UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta kualitas tenaga kerja Jakarta yang mampu bersaing di kancah global. Pengembangan IPTEK dan inovasi akan membuka peluang baru yang mampu menjadi stimulus peningkatan produktivitas ekonomi Jakarta, seperti penciptaan industri bernilai tambah tinggi serta perkembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. Produktivitas UMKM, koperasi, dan BUMD akan meningkat seiring dengan ekosistem dan iklim usaha yang semakin kondusif. Terciptanya berbagai peluang baru diiringi dengan penguasaan IPTEK yang terus meningkat akan mendorong peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja, sehingga dalam dua puluh tahun ke depan tingkat pengangguran terbuka di Jakarta semakin menurun dan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan semakin meningkat.

Dalam lima belas tahun terakhir, sektor industri termasuk salah satu sektor yang memiliki kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi Jakarta dan menjadi salah satu sektor basis perekonomian Jakarta. Dalam dua puluh tahun ke depan, sektor industri akan didorong untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produknya sehingga tetap menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi Jakarta, namun diarahkan untuk beralih ke industri berteknologi tinggi dan ramah lingkungan. Selain itu, pariwisata dan ekonomi kreatif diproyeksikan akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru yang produktif, bernilai tambah tinggi, dan mampu meningkatkan eksistensi Jakarta di kancah global. Di sisi lain, penguatan riset menjadi kunci dalam peningkatan inovasi dan nilai tambah ekonomi Jakarta menuju kota global yang berdaya saing diiringi dengan penguatan iklim usaha yang kondusif serta kemudahan dan kepastian berusaha.

5. Terwujudnya Ekonomi Jakarta yang Maju, Merata, dan Berkelanjutan

Ekonomi yang semakin maju dan kuat harus diikuti dengan lingkungan yang semakin lestari. Ekonomi hijau dihadirkan untuk menciptakan ekonomi yang ramah lingkungan dalam menghadapi tantangan lingkungan global, serta menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya sehingga mampu menciptakan produktivitas ekonomi yang berkelanjutan.

Ekonomi hijau tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang pesat saja, namun juga memperhitungkan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Penggunaan teknologi ramah lingkungan, energi terbarukan, dan efisiensi energi tidak hanya membantu mengurangi dampak lingkungan negatif, melainkan juga menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan daya saing industri. Pentingnya ekonomi hijau juga terkait dengan kesejahteraan sosial. Dengan memperhatikan keadilan sosial dan inklusi, ekonomi hijau berupaya memastikan bahwa manfaat ekonomi yang dihasilkan didistribusikan secara adil di seluruh lapisan masyarakat. Ini menciptakan kesempatan ekonomi bagi komunitas yang terpinggirkan dan memperkuat ketahanan sosial.

Terwujudnya ekonomi Jakarta yang maju, merata, dan berkelanjutan ditandai dengan meningkatkan Indeks Ekonomi Hijau yang merupakan gambaran komprehensif tentang selarasnya pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selain itu, keberhasilan sasaran pokok ini digambarkan melalui porsi EBT dalam bauran energi primer yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

6. Terwujudnya Ekosistem Digital Jakarta yang Adaptif dan Berdaya Saing Global

Perkembangan teknologi yang sangat pesat menjadi potensi sekaligus tantangan yang besar bagi Jakarta. Untuk mewujudkan Jakarta kota global yang memiliki produktivitas ekonomi yang berdaya saing tinggi, Jakarta harus mampu beradaptasi dan berkompetisi di era digital. Ekosistem digital yang mutakhir akan menciptakan peluang baru untuk inovasi, efisiensi, dan pertumbuhan ekonomi. Sasaran pokok ini bertujuan untuk

meningkatkan kemampuan Jakarta agar mampu mengikuti kemajuan teknologi yang cepat, sehingga produktivitas ekonomi semakin kuat dan berdaya saing.

Pentingnya ekosistem digital dalam mendukung produktivitas ekonomi tidak hanya terbatas pada tingkat nasional, tetapi juga berdampak secara global. Melalui konektivitas digital yang semakin meluas, ekosistem digital memungkinkan kolaborasi lintas batas, perdagangan internasional, dan transfer pengetahuan yang lebih cepat. Semuanya itu, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Jakarta secara keseluruhan. Selain itu, penguasaan digital bagi masyarakat Jakarta juga terus didorong untuk meningkatkan kualitas dan memberi nilai tambah tenaga kerja Jakarta.

7. Terwujudnya Ekonomi Jakarta yang Terintegrasi secara Domestik dan Global

Integrasi ekonomi Jakarta dengan ekonomi nasional dan global merupakan aspek penting yang menjadi fokus untuk mewujudkan produktivitas ekonomi yang berdaya saing. Jakarta memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia yaitu sebagai pusat kegiatan bisnis, keuangan, dan perdagangan. Jakarta menjadi magnet bagi investasi domestik dan asing, menarik perusahaan-perusahaan besar, institusi keuangan, dan pusat-pusat bisnis internasional. Kehadiran beragam industri, termasuk keuangan, manufaktur, teknologi, dan jasa, menciptakan ekosistem bisnis yang dinamis dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Sasaran pokok ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas konektivitas barang dan jasa, melancarkan aliran logistik dan rantai pasok nasional, serta pintu gerbang bagi perdagangan dan investasi asing ke Jakarta. Jakarta memfasilitasi aliran barang dan jasa yang lancar di seluruh Indonesia. Artinya, Jakarta memiliki peran dan kontribusi besar pada integrasi ekonomi antar daerah di Indonesia. Di tingkat global, Jakarta merupakan pintu gerbang bagi perdagangan dan investasi ke Indonesia. Hubungan erat antara Jakarta dan pasar global akan menciptakan peluang ekspor dan impor yang besar, meningkatkan daya saing industri domestik, dan memperluas akses di tingkat global.

Terwujudnya ekonomi Jakarta yang terintegrasi secara domestik dan global ditandai dengan koefisien variasi harga antarwilayah tingkat provinsi yang semakin menurun yang menunjukkan ketimpangan yang berkurang, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) semakin menurun menggambarkan berbagai infrastruktur fisik yang menunjang realisasi Jakarta menjadi kota global yang maju, berkeadilan, berdaya saing, dan berkelanjutan telah terbangun. Selain itu, proporsi ekspor barang dan jasa juga semakin meningkat.

8. Terwujudnya Keberlanjutan Peran Jakarta sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Jakarta, sebagai bagian tidak terpisahkan dari konstelasi wilayah metropolitan Jabodetabekpunjur, memiliki peran yang sangat penting sebagai pusat kegiatan ekonomi dan bisnis, politik, dan sosial budaya. Metropolitan Jabodetabek memberikan

kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian nasional yang hampir mencapai 25 persen. Artinya, Jakarta dan metropolitan Jabodetabek telah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional dan perlu untuk terus dijaga dan ditingkatkan dalam dua puluh tahun ke depan. Hal ini sejalan dengan misi Jakarta untuk mewujudkan produktivitas ekonomi Jakarta yang berdaya saing.

Sasaran pokok ini bertujuan untuk mendorong Jakarta memiliki kawasan perkotaan yang kondusif untuk melakukan berbagai kegiatan produktif. Sebagai pusat kegiatan, Jakarta ditargetkan mampu menyediakan sarana prasarana dan lingkungan yang memadai untuk masyarakatnya, seperti hunian yang layak serta sistem transportasi yang andal dan mumpuni. Jakarta diarahkan untuk menjadi pusat ekonomi, jasa, dan perdagangan yang maju dan berdaya saing, termasuk menjadi super hub ekonomi nasional, regional, hingga global. Untuk dapat memaksimalkan potensi dalam mencapai target menjadi pusat ekonomi tersebut, diperlukan integrasi antara Jakarta sebagai pusat kegiatan dengan wilayah penyangganya.

9. Terwujudnya Regulasi dan Tata Kelola Pelayanan Publik Jakarta yang Berkualitas, Harmonis, Adaptif, dan Berintegritas

Dalam semangat menciptakan pemerintahan Jakarta yang progresif dan responsif menjawab tantangan perubahan dan keberlanjutan pemberdayaan masyarakat, diperlukan transformasi tata kelola menuju perencanaan regulasi dan sistem pelayanan publik yang berkualitas, harmonis, adaptif dan berintegritas. Adapun keberhasilan dari sasaran pokok ini akan tercermin dalam tingkat integritas aparat pemerintahan yang tinggi, yang ditandai dengan penurunan tingkat korupsi. Selain itu, tata kelola pelayanan publik yang berkualitas dan adaptif dapat dilihat dari kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan publik yang diiringi dengan inovasi sistem berbasis elektronik. Perancangan regulasi yang harmonis juga menjadi tolak ukur dalam sasaran pokok ini agar tercipta regulasi yang berkualitas, dan akuntabel dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Perwujudan regulasi dan sistem pelayanan publik yang berkualitas, harmonis, adaptif dan berintegritas tersebut dilakukan melalui arah kebijakan transformasi tata kelola.

10. Terciptanya Jakarta yang Aman, Damai, dan Partisipatif

Dalam mewujudkan Jakarta yang stabil, kondusif dan memiliki pengaruh diplomasi di kancah global maka kondisi internal Jakarta perlu dijaga. Sasaran pokok ini bertujuan untuk menciptakan kondisi lingkungan yang aman, damai, dan kondusif, yang didukung oleh partisipasi seluruh elemen masyarakat dan aparat penegak hukum, serta penegakan HAM yang berkeadilan. Aman dan damai adalah prasyarat utama dalam menciptakan iklim yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, keberadaan sistem politik yang demokratis dan partisipatif memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan dapat mencerminkan aspirasi dan kebutuhan seluruh warga Jakarta, serta memungkinkan

masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan secara luas. Tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi juga dapat membangun rasa keterikatan dan kohesi sosial yang kuat. Terakhir, penegakan HAM yang adil bagi seluruh warganya, tak terkecuali bagi perempuan, anak, dan penyandang disabilitas dapat meningkatkan kondusivitas dan kesejahteraan masyarakat Jakarta. Keberhasilan capaian sasaran pokok ini ditunjukkan dengan terciptanya rasa aman bagi masyarakat untuk beraktivitas kapan pun dan di mana pun di Jakarta, serta meningkatnya tingkat demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam memperkuat kohesi sosial, serta terciptanya penegakan HAM tanpa terkecuali di dalam sistem sosial masyarakat Jakarta.

11. Terciptanya Ekonomi Jakarta yang Stabil, Kuat, dan Mandiri

Stabilitas ekonomi adalah salah satu faktor penting dalam menjaga kondusivitas internal Jakarta yang kokoh terhadap guncangan. Ekonomi Jakarta yang stabil, kuat, dan mandiri merupakan manifestasi dari komitmen Jakarta untuk menjaga kesinambungan fiskal dan stabilitas moneter agar memiliki ketahanan terhadap tantangan internal dan dinamika perekonomian global, yang diarahkan pada semangat pro-pertumbuhan, pro-pemerataan, dan pro-kestabilan. Tujuan dari sasaran pokok ini adalah untuk menjadikan Jakarta kota yang tangguh, kokoh, dan mandiri secara kapasitas fiskal serta memiliki kestabilan moneter yang terkendali, sehingga dapat menjadi fondasi kuat untuk segala perubahan aktivitas ekonomi dan perkotaan di Jakarta. Ketercapaian ekonomi Jakarta yang stabil, kuat, dan mandiri ditunjukkan dengan semakin proporsionalnya rasio pajak daerah terhadap perekonomian kota, terjaganya tingkat inflasi, terjaganya intermediasi sektor keuangan, seperti aset dana pensiun, dana pihak ketiga, dan total nilai kredit, serta terciptanya inklusi keuangan.

12. Terwujudnya Diplomasi Jakarta yang Tangguh dan Berpengaruh di Kancah Global

Dalam upaya mewujudkan cita-cita Jakarta untuk menjadi kota global yang maju, mandiri, dan berdaya saing maka pembangunan Jakarta tidak dapat terlepas dari hubungannya dengan entitas global. Diplomasi Jakarta yang tangguh dan berpengaruh di kancah global merupakan manifestasi dari reputasi positif Jakarta yang memungkinkan untuk melakukan hubungan kerja sama dan diplomasi. Kemampuan berdiplomasi dan kerja sama memungkinkan Jakarta mengakses sumber daya, seperti finansial, logistik, informasi dan pengetahuan, teknologi, hingga budaya, yang dimiliki mitra pembangunan untuk berkolaborasi menjawab tantangan isu strategis yang ada secara bersama-sama. Sasaran pokok ini ditujukan untuk mengembangkan dan memelihara hubungan yang konstruktif antara Jakarta dengan kota dan negara lain, menciptakan peluang-peluang kolaborasi dalam melakukan pembangunan, serta meningkatkan peran strategis, kepemimpinan dan pengaruh Jakarta di kancah internasional.

13. Terciptanya Jakarta yang Beragama dan Berkebudayaan Maju

Masyarakat Jakarta yang beragama dan berkebudayaan maju menitikberatkan pada praktik keagamaan dan kehidupan bermasyarakat yang mengedepankan kedamaian dan harmoni sosial untuk kebaikan bersama. Melalui pendekatan ini, diterapkan prinsip inklusi dan toleransi serta pengamalan terhadap semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang Jakarta juga berperan sebagai titik pertemuan berbagai kebudayaan Indonesia. Hal ini menjadi peluang bagi Jakarta untuk memajukan sekaligus menjadi cermin bagi kekayaan budaya Indonesia di mata internasional.

Jakarta yang beragama dan berkebudayaan maju dicirikan dengan perilaku masyarakat yang toleran dan gotong royong serta berpikiran terbuka dan matang. Guna menciptakan lingkungan tersebut diperlukan penguatan kerukunan antarumat beragama dengan mempromosikan nilai-nilai pluralisme dan multikulturalisme sesuai Pancasila serta memperkuat identitas budaya Jakarta sebagai kota yang maju. Tujuan pembangunan ke depan terletak pada aspek kehidupan masyarakat Jakarta yang lingkungan sosialnya inklusif dan toleran, di mana setiap warga dapat menjalankan keyakinan agamanya dengan damai dan saling menghormati satu sama lain. Demi mewujudkan kedamaian dan keharmonisan antarumat beragama maka setiap arah kebijakan mengadopsi pendekatan inklusif yang semua pihak turut serta dalam pemajuan pembangunan Jakarta.

Selain itu, komitmen untuk memajukan budaya Jakarta sebagai salah satu identitas kota dilakukan dengan memperkuat dukungan terhadap seni, budaya, dan warisan lokal sehingga dapat memunculkan keunikan dan keunggulan komparatif serta meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap keberagaman budaya Jakarta. Melalui pembangunan kebudayaan yang inklusif dan berkelanjutan, Jakarta dapat didorong menjadi pusat kegiatan seni dan budaya yang berdaya saing di tingkat internasional. Dengan demikian, Jakarta juga dapat terus berkembang sebagai kota yang berkebudayaan maju, yang menampung dan memajukan keberagaman budaya dan agama tanpa meninggalkan prinsip-prinsip inklusi dan toleransi.

14. Terwujudnya Keluarga dan Masyarakat Jakarta yang Mandiri, Produktif, dan Setara

Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran strategis dalam mentransformasi sumber daya manusia Jakarta yang maju dan berdaya saing global. Upaya peningkatan produktivitas masyarakat dimulai dari intervensi terhadap pembangunan keluarga yang setiap anggotanya dapat berfungsi secara produktif dan setara sehingga dapat mandiri dan berdaya. Pembangunan keluarga yang fungsional dan berkualitas secara kumulatif akan meningkatkan derajat hidup dan kesejahteraan masyarakat dalam lingkup yang lebih luas.

Dalam mendukung terwujudnya keluarga dan masyarakat Jakarta yang mandiri, produktif dan setara, kebijakan pengarusutamaan gender menjadi hal krusial sebagai pilar

utama pembangunan sosial dan ekonomi ke depan. Hal ini dilakukan dengan mendorong terciptanya kesetaraan gender dan partisipasi perempuan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial. Dukungan yang komprehensif juga diperlukan bagi kelompok rentan seperti, penyandang disabilitas, lansia, perempuan dan anak-anak Jakarta agar dapat berkembang secara optimal dan setara. Hal ini dilakukan dengan pengarusutamaan inklusi sosial yang diikuti oleh pemenuhan fasilitas, aktivitas dan perlindungan yang dibutuhkan dan relevan bagi masing-masing kelompok rentan tersebut.

Pemberdayaan pemuda juga menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan dalam memberdayakan keluarga sebagai agen perubahan yang produktif dan berdaya saing. Dominasi penduduk usia muda menunjukkan adanya potensi besar pada pemuda untuk mewujudkan pembangunan Jakarta dan meningkatkan kualitas keluarga dan masyarakat. Peran pemuda sangat penting dalam setiap tahap pembangunan tidak hanya sebagai penerima manfaat tetapi juga sebagai kolaborator dan inisiator. Hal ini dilakukan dengan memberi ruang dan mendorong partisipasi aktif pemuda sebagai motor penggerak pembangunan berkelanjutan, termasuk dalam pengembangan pengalaman bekerja, pengembangan inovasi teknologi, kewirausahaan, serta solusi-solusi kreatif untuk tantangan terhadap dinamika global.

15. Terwujudnya Lingkungan Jakarta yang Berkualitas dan Berkelanjutan

Daya saing perkotaan Jakarta tidak terlepas dari kondisi lingkungan yang perlu dijaga keberlanjutannya dan ditingkatkan kualitasnya. Upaya menciptakan lingkungan Jakarta yang berkualitas serta berkelanjutan, langkah strategis untuk menjamin terlaksananya

pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup di Jakarta dapat dicapai melalui penguatan kebijakan yang berkelanjutan dan program aksi yang terencana dengan baik. Jakarta ke depan akan tumbuh sebagai kota yang memiliki lingkungan asri, sehat, hijau, dan berkelanjutan bagi warganya.

Diperlukan komitmen bersama untuk melestarikan ekosistem keanekaragaman hayati agar tetap terjaga dari dampak kerusakan lingkungan dan perubahan iklim, serta menjamin kualitas udara, air, dan tanah di Jakarta terjaga dan terkelola dengan baik. Peningkatan kualitas lingkungan hidup juga berfokus pada peningkatan efisiensi pengelolaan limbah dengan mendorong program daur ulang serta menerapkan kebijakan ramah lingkungan. Selain itu, upaya lainnya memastikan bahwa setiap rumah tangga memiliki akses yang memadai dan aman terhadap fasilitas sanitasi lewat pembangunan infrastruktur air limbah. Terwujudnya lingkungan Jakarta yang berkualitas dan berkelanjutan akan menjadi modal dasar dalam meningkatkan kehidupan yang layak bagi warga Jakarta.

16. Terwujudnya Jakarta Berketahanan Energi, Air, dan Berkemandirian Pangan

Setelah perubahan fungsi Jakarta yang tidak lagi menjadi Ibukota negara, dibutuhkan pengembangan kota Jakarta yang mandiri dalam pasokan energi, air, dan pangan, serta mampu menjaga ketahanan kota terhadap berbagai tantangan yang mungkin terjadi di masa depan. Diperlukannya komitmen untuk mempromosikan pemanfaatan energi terbarukan dengan menyesuaikan sumber daya yang dimiliki oleh Jakarta melalui pembangunan infrastruktur ramah lingkungan, serta meningkatkan efisiensi energi di seluruh sektor kota dalam usaha mengurangi dampak perubahan iklim. Pada aspek ketersediaan air bersih, pembangunan infrastruktur juga dapat dioptimalkan sehingga memberikan akses yang layak bagi seluruh penduduk Jakarta. Manifestasi kedaulatan air perlu dilakukan melalui pengelolaan sumber air baku serta pembuatan skema alternatif terkait sumber pasokan air baru, salah satunya dengan mengelola air hujan dan penggunaan teknologi hemat air. Peningkatan ketahanan pangan dilakukan melalui penguatan kerja sama serta peningkatan produksi pangan lokal melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan potensi sumber daya pertanian perkotaan (*urban farming*) yang adaptif terhadap perubahan iklim dan perkembangan teknologi.

17. Terwujudnya Jakarta yang Tangguh dan Berketahanan terhadap Bencana serta Perubahan Iklim

Dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota yang tangguh dan berketahanan terhadap bencana serta perubahan iklim perlu dilakukan intervensi dalam mengurangi kerentanan kota terhadap bencana dan meningkatkan kapasitas mitigasi serta ketahanan masyarakat dalam menghadapi tantangan lingkungan yang semakin kompleks. Pembangunan Jakarta ke depan perlu memuat kemampuan adaptasi yang responsif terhadap ancaman bencana alam serta dampak perubahan iklim melalui komitmen peningkatan infrastruktur penanggulangan bencana serta kesiapan dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Upaya mengurangi kerentanan kota terhadap perubahan iklim dapat dilaksanakan dengan menggalakkan penggunaan energi terbarukan melalui pengembangan sarana prasarana energi baru terbarukan potensial sesuai karakteristik Jakarta. Tak kalah penting, peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat mengenai risiko bencana dan cara-cara mitigasi serta adaptasi yang dapat dilakukan akan membantu membangun ketahanan komunitas yang lebih baik dan mengurangi dampak negatif yang lebih besar dari terjadinya bencana. Penguatan kebijakan dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim dapat dilakukan melalui komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan menerapkan kebijakan pembangunan rendah karbon yang mendukung penggunaan energi terbarukan serta transportasi berkelanjutan.

Tabel 5.7 Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan Daerah

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan Daerah	Indikator Utama Pembangunan Daerah	Baseline 2025	Target 2045	Keterangan
1. Terwujudnya Masyarakat Jakarta yang Sehat Menyeluruh	1. Masyarakat Jakarta yang Sehat Menyeluruh	1. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75,76	81,31	
		2. Kesehatan Ibu dan Anak			
		a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	50 - 34	9	
		b) Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	15,8	5,6	
		3. Penanganan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
		a) Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	90 - 95	100	
		b) Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	86,57	98	
		c) Prevalensi Obesitas (%)	31,80	31,80	

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan Daerah	Indikator Utama Pembangunan Daerah	Baseline 2025	Target 2045	Keterangan
		d) Prevalensi Diabetes Melitus Tipe 2 (%)	3,10	3,10	
		4. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,5 – 99,5	99,5	Penentuan <i>baseline</i> mempertimbangkan adanya pengurangan PD Pemda, kebijakan KRIS (sehingga kemungkinan orang untuk menjadi peserta jaminan kesehatan yang didaftarkan mandiri berpotensi turun), dan rencana pemadanan NIK.
2. Terwujudnya Masyarakat Jakarta yang Berkeahlian Tinggi, Unggul, dan Bermartabat	2. Masyarakat Jakarta yang Berkeahlian Tinggi, Unggul, dan Bermartabat	5. Hasil pembelajaran			
		a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:			
		i) Literasi Membaca	i) 83,33 – 83,33	i) 100,00 – 100,00	
		ii) Numerasi	ii) 50,00 – 66,67	ii) 83,33 – 83,33	
		b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar			

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan Daerah	Indikator Utama Pembangunan Daerah	Baseline 2025	Target 2045	Keterangan
		kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: i) Literasi Membaca ii) Numerasi	i) 76,94 – 78,94 ii) 59,57 – 61,57	i) 90,56 – 92,56 ii) 81,00 – 83,00	
		c) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	11,50 - 11,79	14,93 - 15,12	
		d) Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,35 - 13,36	14,79 - 14,87	
		6. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	19,08	19,08 – 38,43	
		7. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	76,70	85,00	
		3. Terwujudnya Masyarakat Jakarta	3. Masyarakat Jakarta Tangguh dan	8. Tingkat Kemiskinan (%)	3,55 – 3,85
	9. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial	62,71		99,50	

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan Daerah	Indikator Utama Pembangunan Daerah	Baseline 2025	Target 2045	Keterangan
Tanggung dan Terlindungi secara Sosial yang Inklusif serta Berkeadilan	Terlindungi secara Sosial yang Inklusif serta Berkeadilan	Ketenagakerjaan Provinsi (%)			
		10. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	27	80	
4. Terciptanya Produktivitas Ekonomi Jakarta yang Berdaya Saing berbasis IPTEK dan Inovasi	4. Produktivitas Ekonomi Jakarta yang Berdaya Saing berbasis IPTEK dan Inovasi	11. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	11,87	13,91 - 14,38	
		12. Pengembangan Pariwisata			
		a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%)	4,89	8,56	
		b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (ribu orang)	1.800	6.345,02	
		13. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	17,83	14,21	
		14. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD			
		a) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non-	17,47	20,42	

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan Daerah	Indikator Utama Pembangunan Daerah	Baseline 2025	Target 2045	Keterangan
		Pertanian pada Level Provinsi (%)			
		b) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	14,70	18,37	
		c) Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,17	7,48	
		d) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,75	5,02	
		e) <i>Return of Aset (RoA)</i> BUMD (%)	2,19	5,73	
		15. Penciptaan Lapangan kerja yang Baik			
		a) Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,54 – 6,40	4,93 – 5,91	
		b) Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	65	90	
		16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	52,27	62,50	
		17. Pengeluaran IPTEK dan Inovasi (% APBD)	0,02	1	

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan Daerah	Indikator Utama Pembangunan Daerah	Baseline 2025	Target 2045	Keterangan
5. Terwujudnya Ekonomi Jakarta yang Maju, Merata, dan Berkelanjutan	5. Ekonomi Jakarta yang Maju, Merata, dan Berkelanjutan	18. Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau			
		a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah	54,74	61,87	
		b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	0,8	24,0	
6. Terwujudnya Ekosistem Digital Jakarta yang Adaptif dan Berdaya Saing Global	6. Ekosistem Digital Jakarta yang Adaptif dan Berdaya Saing Global	19. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	7,68	8,2	
7. Terwujudnya Ekonomi Jakarta yang Terintegrasi secara Domestik dan Global	7. Ekonomi Jakarta yang Terintegrasi secara Domestik dan Global	20. Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	9,46	5,47	
		21. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	34,29	27,71	
		22. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	13,51	15,78	
8. Terwujudnya Keberlanjutan Peran Jakarta sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	8. Keberlanjutan Peran Jakarta sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	23. Kota Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan			
		a) Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional (%)	24,63	31,19	
		b) Rumah Tangga	40,39	100	

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan Daerah	Indikator Utama Pembangunan Daerah	Baseline 2025	Target 2045	Keterangan
		dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)			
		c) <i>Mode Share</i> Transportasi Publik (%)	21,87	55	
9. Terwujudnya Regulasi dan Tata Kelola Pelayanan Publik Jakarta yang Berkualitas, Harmonis, Adaptif, dan Berintegritas	9. Regulasi dan Tata Kelola Pelayanan Publik Jakarta yang Berkualitas, Harmonis, Adaptif, dan Berintegritas	24. Indeks Reformasi Hukum	70	100	
		25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4,25	5	
		26. Indeks Pelayanan Publik	4,05	5	
		27. Indeks Integritas Nasional	76,82	92,54	
10. Terciptanya Jakarta yang Aman, Damai, dan Partisipatif	10. Jakarta yang Aman, Damai, dan Partisipatif	28. Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM di Daerah	70	90	
		29. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	40,17	57,55	
		30. Indeks Demokrasi Provinsi	Tinggi	Tinggi	

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan Daerah	Indikator Utama Pembangunan Daerah	Baseline 2025	Target 2045	Keterangan
11. Terciptanya Ekonomi Jakarta yang Stabil Kuat, dan Mandiri	11. Ekonomi Jakarta yang Stabil Kuat, dan Mandiri	31. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1,31	1,60	
		32. Tingkat Inflasi (%)	1,5 – 3,5	1,0 – 2,7	
		33. Pendalaman/ Intermediasi Sektor Keuangan			
		a) Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	129,13	199,2	
		b) Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	9,31	60	
		c) Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi (Rp)	273.009.547,60	5.368.435.235,20	
		d) Total Kredit/PDRB (%)	113,62	170,9	
12. Terwujudnya Stabilitas Jakarta yang Tangguh dan Berpengaruh di Kancah Global	12. Stabilitas Jakarta yang Tangguh dan Berpengaruh di Kancah Global	34. Inklusi Keuangan (%)	97,55	99,91	
		35. Peran Jakarta di Kancah Global			
		a) Peringkat kerja sama <i>Sister City</i>	14	6	
		b) Jumlah Sekretariat Organisasi Internasional di Jakarta	2	14	
		36. Jumlah Festival dan Acara Internasional yang Terlaksana	297	600 – 1.200	

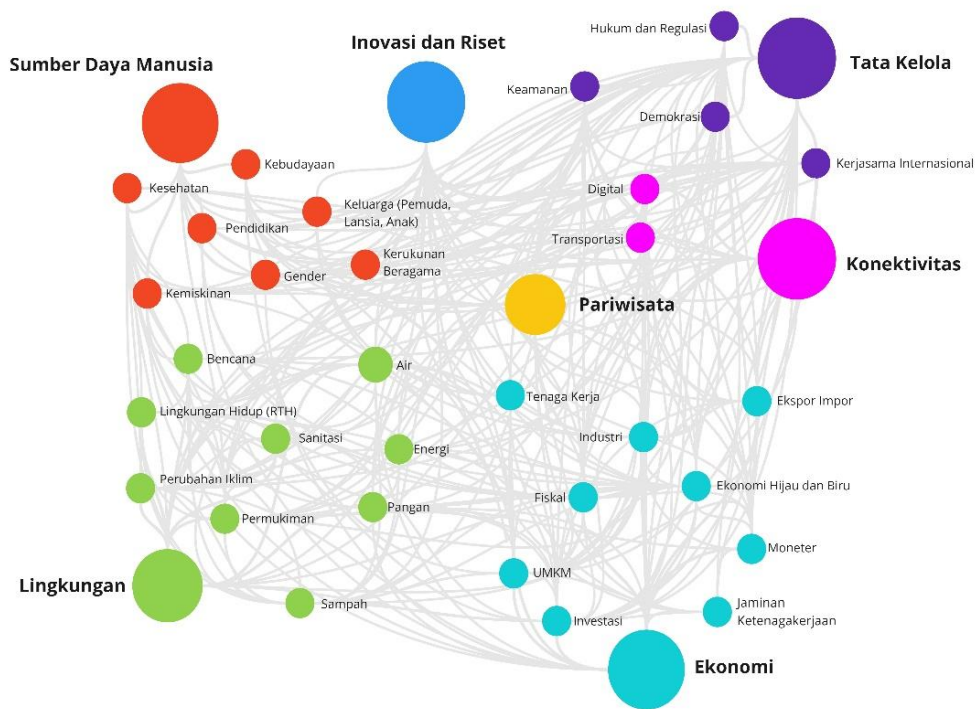
Sasaran Pokok	Arah Pembangunan Daerah	Indikator Utama Pembangunan Daerah	Baseline 2025	Target 2045	Keterangan
13. Terciptanya Jakarta yang Beragama dan Berkebudayaan Maju	13. Jakarta yang Beragama dan Berkebudayaan Maju	37. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	57,20 – 57,29	66,76 – 67,48	
		38. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	77,19 – 77,23	84,37 – 84,84	
14. Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Pemuda yang Produktif	14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Pemuda yang Produktif	39. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	42,51 – 42,89	47,57 – 50,48	
		40. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,310 - 0,240	0,210 – 0,083	
15. Terwujudnya Lingkungan Jakarta yang Berkualitas dan Berkelanjutan	15. Lingkungan Jakarta yang Berkualitas dan Berkelanjutan	41. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,618	0,676	
		42. Kualitas Lingkungan Hidup			
		a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	51,34	57,47	
		b) Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman (%)	23,10	100	

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan Daerah	Indikator Utama Pembangunan Daerah	Baseline 2025	Target 2045	Keterangan
		c) Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	18	90	
		d) Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	89	100	
16. Terwujudnya Jakarta Berketahanan Energi, Air, dan Berkemandirian Pangan	16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	43. Ketahanan energi, air, dan pangan			
		a) Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	3.614	18.430	
		b) Intensitas Energi Primer (SBM/Rp miliar)	71	51	
		c) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	1,99	0,18	
		d) Kapasitas Air Baku (m3)	2,43	11,25	Pada target 2045 tetap memperhitungkan kontribusi alokasi air baku dari luar Jakarta

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan Daerah	Indikator Utama Pembangunan Daerah	Baseline 2025	Target 2045	Keterangan
					untuk kebutuhan SPAM Regional DKI Jakarta.
		e) Akses Air Minum Perpipaan di Jakarta	70,04	100	
17. Terwujudnya Jakarta yang Tangguh dan Berketahanan terhadap Bencana serta Perubahan Iklim	17. Jakarta yang Tangguh dan Berketahanan terhadap Bencana serta Perubahan Iklim	44. Indeks Risiko Bencana (IRB)	52,93	51,00 - 41,11	
		45. Persentase Penurunan Emisi GRK			
		a) Kumulatif	13	25,42	
		b) Tahunan	25,40	70,34	
		c) Kualitas Suhu Udara rata-rata (°C)	26,7	28,4	

5.2.4 Game Changers

Pembangunan Jakarta 20 tahun ke depan mensyaratkan beberapa pengembangan prioritas demi terwujudnya visi pembangunan Jakarta. Rumusan pengembangan prioritas (*Game Changers*) dilakukan dengan penentuan beberapa sektor yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap sektor-sektor lainnya. Adapun keterhubungan antarsektor ini diilustrasikan melalui gambar berikut.



Gambar 5.2 Interconnection Map antar Sektor

Berdasarkan gambar tersebut diketahui bahwa terdapat 7 sektor prioritas yang dinilai memiliki paling banyak keterkaitan dengan sektor lainnya. Implikasi dari hal ini adalah dengan memprioritaskan sektor tersebut, maka akan didapatkan efek berganda sehingga sektor-sektor lainnya juga akan terdorong dan tujuan pembangunan makro dapat tercapai. Adapun ke tujuh subsektor tersebut adalah Sumber Daya Manusia, Ekonomi, Inovasi dan Riset, Pariwisata, Lingkungan, Konektivitas, dan Tata Kelola.

Game changer terkait sektor Sumber Daya Manusia yang telah dirumuskan ialah **Transformasi Jakarta menjadi Pusat Keunggulan**. Transformasi ini mengarahkan kondisi Jakarta yang kondusif untuk penciptaan talenta terbaik yang produktif dalam ekonomi global. Fokus utama dalam *game changer* pertama ialah penciptaan sistem pendidikan sepanjang hayat (*lifelong learning*) yang inklusif serta peningkatan kualitas sistem kesehatan secara menyeluruh melalui infrastruktur rumah sakit dan pelayanan medis berbasis riset dan bertaraf internasional.

Game changer terkait Ekonomi dirumuskan menjadi **Eskalasi Jakarta sebagai Kontributor Utama Perekonomian Indonesia yang Terintegrasi secara Global**. Dengan kondisi saat ini yaitu Jakarta sudah menjadi tulang punggung pagi perekonomian Jakarta, eskalasi ekonomi ini diharapkan akan mengantarkan Jakarta tidak hanya menjadi penggerak ekonomi di level nasional tetapi juga di level global. Fokus utama dari *game changer* ini adalah menciptakan iklim investasi yang mampu menarik pasar global serta ekspansi pengaruh ekonomi sehingga setara dengan kota global lainnya.

Game changer terkait inovasi dan riset dirumuskan menjadi **Pengarusutamaan Riset dan Pengembangan (R&D) dan Inovasi dalam Pembangunan**. Melalui *game changer* ini akan diwujudkan pembangunan Jakarta yang menempatkan riset, pengembangan, dan inovasi sebagai daya dorong utama dalam mencapai kesetaraan taraf hidup masyarakat Jakarta dengan kota global lainnya. Selain itu, pembangunan ekosistem riset yang komprehensif akan mengakselerasi kapasitas dan kualitas talenta produktif yang mampu bersaing di tingkat global.

Game changer terkait pariwisata dirumuskan menjadi **Akselerasi Jakarta sebagai Hub Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Budaya di Tingkat Nasional dan Internasional**. Pengoptimalan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif akan mentransformasi Jakarta sebagai pintu gerbang masyarakat global ke Indonesia serta menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Game changer terkait lingkungan yang telah dirumuskan adalah **Transformasi Infrastruktur Kota menuju Ketahanan dan Keberlanjutan Lingkungan**. Transformasi ini diharapkan dapat mengubah paradigma pembangunan infrastruktur yang konvensional menjadi ramah lingkungan dan menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan. Dengan diterapkannya *game changer* ini diharapkan Jakarta mampu beradaptasi dan berkontribusi dalam upaya kolektif dalam mengatasi ancaman perubahan iklim serta memastikan kelayakhunian untuk semua.

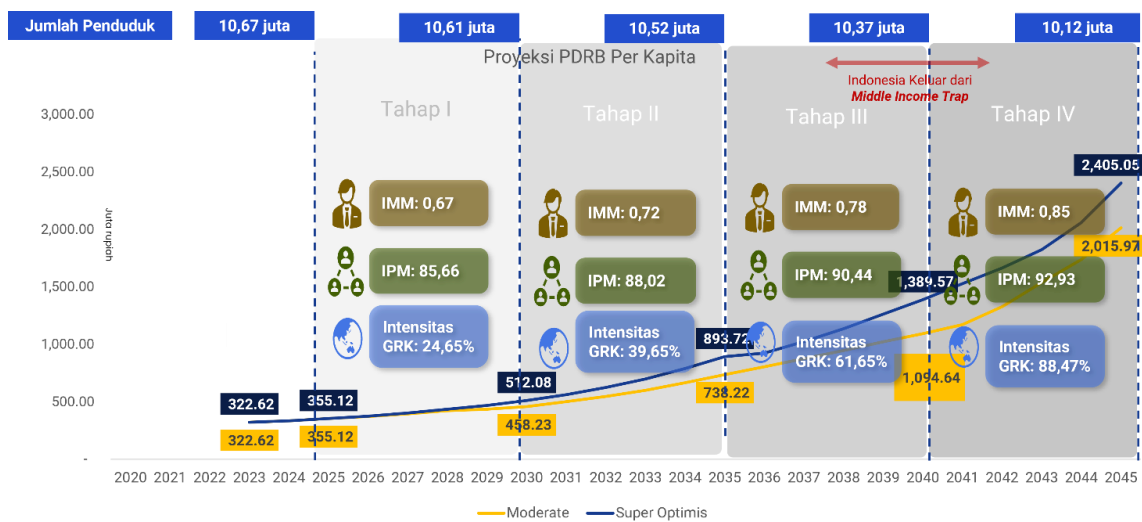
Game changer terkait konektivitas yang dirumuskan ialah **Penguatan Konektivitas Informasi, Barang, dan Penumpang Jakarta sebagai Pusat Transit Regional dan Global**. Upaya penguatan konektivitas ini akan menarik aktivitas ekonomi skala global melalui peningkatan aksesibilitas infrastruktur, perluasan jaringan transportasi yang efisien, dan integrasi sistem logistik yang modern.

Game changer terkait Tata Kelola dirumuskan menjadi **Reformasi Tata Kelola menuju Kota Global yang Berdaya Saing**. Melalui *game changer* ini, Jakarta diharapkan mampu mengadaptasi sistem kelembagaan, kebijakan, dan manajemen pemerintahan yang fleksibel dan kolaboratif. Tata kelola tersebut diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi yang kondusif serta kepastian berusaha.

Game changer yang telah disusun kemudian diuraikan dalam arah kebijakan prioritas. Arah kebijakan prioritas ini disusun berdasarkan peninjauan terhadap target indikator

makro pembangunan yang telah ditetapkan, dengan mempertimbangkan tahapan pembangunan yang akan dilalui. Arah kebijakan prioritas ini kemudian akan menjadi panduan rencana pembangunan yang dapat dirumuskan pada setiap tahapan.

Arah kebijakan prioritas sejatinya merupakan upaya strategis yang dirancang untuk mendorong pencapaian cita-cita aspek sosial, lingkungan, serta ekonomi yang kondusif dalam menjadikan Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing. Penyusunannya arah kebijakan prioritas dilakukan dengan melihat karakteristik, posisi, serta potensi yang dimiliki oleh Jakarta saat ini. Dengan demikian, diharapkan arah kebijakan prioritas ini dapat menjadi panduan yang efektif dalam mewujudkan pembangunan Jakarta yang berkelanjutan dan sejalan dengan visinya.



Gambar 5.3 Proyeksi Target Indikator Makro Pembangunan sebagai Pertimbangan Arah Kebijakan Prioritas

Game Changer 1 Transformasi Jakarta menjadi Pusat Keunggulan

Gamechanger	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
Transformasi Jakarta menjadi Pusat Keunggulan	Penguatan pelayanan kesehatan, ibu, bayi dan anak, serta lanjut usia di setiap pusat kesehatan masyarakat			
	Pengembangan rumah sakit daerah berbasis rumah sakit pendidikan (<i>teaching hospital</i>) sebagai pusat riset dan inovasi bekerja sama dengan universitas dan lembaga penelitian			
	Peningkatan dan pemantauan kualitas gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat dengan fokus utama pada masa emas anak (<i>golden age</i>)			
	Penuntasan wajib belajar 13 tahun mulai dari pendidikan anak usia dini sampai pendidikan menengah			
	Pendorongan partisipasi pendidikan tinggi terutama di bidang STEAM yang menghasilkan sumber daya manusia berdaya saing global.			
	Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kondisi lokal, kebutuhan pasar, dan potensi keunggulan daerah, serta peningkatan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri			Peningkatan kapasitas dan daya saing tenaga kerja melalui sertifikasi keahlian dan pelatihan bahasa internasional
	Pemberian bantuan operasional dan personal pendidikan yang tepat sasaran serta peningkatan inovasi pembiayaan pendidikan			

Gambar 5.4 Arah Kebijakan Transformasi Prioritas Game Changer 1

Perwujudan Jakarta sebagai kota global yang kompetitif hanya dapat tercapai melalui sumber daya manusia yang unggul dan berkompotensi. Sumber daya manusia yang berkualitas menjadi kunci utama dalam mendorong inovasi dan kemajuan di berbagai sektor, termasuk ekonomi. Selain itu, sumber daya manusia yang unggul mendukung terciptanya lingkungan sosial dinamis dan inklusif yang mencerminkan komunitas global.

Oleh karena itu, dalam dua tahap pembangunan pertama, pengembangan sumber daya manusia menjadi prioritas target pembangunan yang selanjutnya mampu mengakselerasi pertumbuhan di berbagai bidang dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di tahap-tahap selanjutnya.

Pada lima tahun pertama, sektor kesehatan didorong untuk menguatkan layanan kesehatan yang berfokus pada kesehatan ibu serta bayi dan anak. Peningkatan kualitas layanan kesehatan ibu memberikan dampak positif terhadap perkembangan kesehatan ibu selama kehamilan dan bayi yang dilahirkan kelak. Peningkatan akses ke perawatan kesehatan prenatal, persalinan, dan *post natal* yang berkualitas dapat mengurangi risiko komplikasi kehamilan dan kematian ibu secara signifikan. Pelayanan kesehatan ibu yang prima juga memberikan dampak positif terhadap pola pengasuhan ibu sehingga ibu lebih siap merawat anak. Perawatan dan pendidikan optimal yang diberikan ibu kepada anak berkontribusi pada perkembangan sosial dan kognitif anak.

Selain itu, pelayanan kesehatan bayi dan anak juga penting dalam meningkatkan kualitas hidup pada lima tahun pertama kehidupan. Lima tahun pertama kehidupan (*golden age*) merupakan periode kritis untuk pertumbuhan fisik dan perkembangan otak sehingga pada tahap ini pemberian imunisasi dan perawatan kesehatan dasar pada bayi dan anak mutlak untuk dilaksanakan. Tumbuh kembang bayi ditopang oleh pemenuhan gizi berkualitas yang dipantau oleh pusat-pusat kesehatan primer dan pemantauan gizi anak usia sekolah oleh sekolah. Secara keseluruhan, pemenuhan layanan kesehatan pada bayi dan anak mampu menurunkan Angka Kematian Balita.

Arah kebijakan transformasi sektor kesehatan yang didorong selanjutnya adalah sejalan dengan upaya Jakarta menjadi kota global di mana sumber daya kesehatan yang kompeten menjadi modal bagi pengembangan rumah sakit berbasis riset yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Jakarta serta menjadi pusat kolaborasi dan inovasi dalam menjawab tantangan kesehatan global. Rumah sakit daerah dan laboratorium kesehatan daerah di Jakarta berpotensi menjadi cikal bakal pengembangan rumah sakit riset yang bekerja sama dengan universitas dan lembaga riset sehingga secara tidak langsung terjadi pemerataan kualitas layanan kesehatan di Jakarta. Kualitas pelayanan kesehatan yang membaik dan pengembangan rumah sakit riset daerah juga mampu menjadi pendorong utama dalam perwujudan wisata medis di Jakarta.

Pada sektor pendidikan, fokus percepatan wajib belajar 13 tahun dimulai sejak tahap pertama. Wajib belajar 13 tahun merupakan wajib belajar yang dimulai sejak satu tahun prasekolah, enam tahun pendidikan dasar, dan enam tahun pendidikan menengah. Pendorongan pendidikan anak usia sekolah pada anak usia dini mampu memberikan dampak positif dari berbagai aspek kehidupan anak. Dengan pendidikan anak usia dini, anak-anak mampu mengembangkan kemampuan kognitif, seperti kemampuan berbicara, membaca, dan menulis, lebih awal. Pendidikan anak usia dini juga membantu anak berinteraksi dan mengelola emosi, serta mampu mempersiapkan anak secara psikis untuk beradaptasi pada lingkungan pendidikan formal. Harapannya adalah anak memiliki kesiapan secara kognitif dan psikis menempuh pendidikan dasar dan menengah sehingga mampu menunjukkan hasil pembelajaran yang positif.

Selain itu, percepatan wajib belajar 13 tahun difokuskan pada Kepulauan Seribu yang masih memiliki angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) paling rendah di Jakarta. Selain memperkuat pendidikan anak usia dini di Kepulauan Seribu, penguatan sekolah vokasi yang berbasis potensi lokal juga didorong pada tahap pertama. Sebagai kawasan pesisir dan kepulauan, Kepulauan Seribu memiliki potensi kekayaan alam perairan yang dapat dikembangkan sehingga pengembangan vokasi dengan fokus pada bioteknologi dan ekonomi biru di Kepulauan Seribu mulai dirintis sejak tahap pertama. Selain meningkatkan angka RLS penduduk usia sekolah di Kepulauan Seribu, pengembangan vokasi berbasis potensi lokal ini turut menurunkan tingkat pengangguran dan meningkatkan produktivitas daerah.

Untuk memastikan setiap anak bersekolah dan berpartisipasi aktif, pemberian bantuan operasional dan personal pendidikan yang tepat sasaran perlu diperkuat sejak tahap pertama. Pemberian bantuan ini dapat difokuskan pada daerah terluar seperti Kepulauan Seribu, serta pada daerah dengan persentase partisipasi sekolah rendah atau anak putus sekolah.

Menyongsong sumber daya manusia yang unggul pada tahun 2045, lulusan sekolah menengah didorong untuk mengenyam pendidikan tinggi pada bidang STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics*) terutama yang berhubungan dengan potensi Jakarta yang patut dikembangkan seperti ekonomi biru, perairan, serta bioteknologi. Jakarta kota global harus memosisikan diri di garis depan dalam inovasi dan teknologi sehingga pendidikan STEAM yang dapat mempersiapkan tenaga kerja terampil dan berkeahlian tinggi bisa dihasilkan. Dalam wewenangnya sebagai pemerintah daerah, Jakarta dapat mendorong partisipasi di perguruan tinggi melalui beasiswa atau bantuan personal atau dalam bentuk dukungan lainnya yang tidak bertentangan dengan wewenang pemerintah daerah.

Arah kebijakan transformasi di atas diharapkan mampu berkontribusi dalam pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia Jakarta baik dari sisi kesehatan dan pendidikan serta menjadi landasan dalam pembangunan pada tahap selanjutnya. Pada akhir tahap pertama, diproyeksikan capaian Indeks Modal Manusia (IMM) Jakarta meningkat sebesar 0,67 dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 85,66.

Pada tahap kedua, arah kebijakan transformasi yang diprioritaskan masih sama dengan tahap pertama yang berarti bahwa pembangunan di tahap ini adalah penguatan dari setiap arah kebijakan transformasi sebelumnya. Dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan masifnya peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan yang diprioritaskan sejak tahap pertama, diharapkan IMM Jakarta meningkat menjadi 0,72 dan peningkatan IPM Jakarta menjadi 89,98.

Pada tahap ketiga, akibat terjadinya peningkatan partisipasi sekolah vokasi dengan fokus pada bioteknologi dan ekonomi biru, akan bermunculan tenaga kerja yang memiliki kualifikasi unggul dalam bidangnya. Tidak hanya itu, peningkatan partisipasi pendidikan tinggi di bidang STEAM juga meningkatkan jumlah tenaga kerja berkeahlian tinggi sehingga pada tahap ketiga kebijakan transformasi yang diarahkan adalah peningkatan kapasitas dan daya saing tenaga kerja tersebut melalui sertifikasi keahlian sehingga memberikan peluang karier yang lebih besar serta potensi pendapatan yang lebih baik.

Dari sektor kesehatan, ketahanan kesehatan ibu serta bayi dan anak yang didorong sejak tahap pertama memberi dampak positif pada populasi pada rentang waktu tahap ketiga. Sumber daya manusia pada rentang tahun ini memiliki risiko yang lebih rendah terhadap berbagai penyakit kronis, seperti diabetes, penyakit jantung, dan obesitas akibat pemantauan gizi berkualitas dan pemberian layanan kesehatan dasar pada masa emas anak. Secara keseluruhan, akumulasi perkembangan ini memberikan dampak positif bagi pencapaian IMM Jakarta yaitu 0,72 dan pencapaian IPM Jakarta sebesar 90,44.

Tahap keempat digambarkan dengan Jakarta sebagai pusat keunggulan yaitu berkumpulnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian tinggi, unggul, dan berdaya saing. Rendahnya kematian balita, tingginya rata-rata lama anak dapat bersekolah, tingginya partisipasi vokasi dan pendidikan tinggi pada bidang-bidang unggul, serta tingginya produktivitas tenaga kerja tersertifikat. Arah kebijakan transformasi yang diprioritaskan adalah sertifikasi tenaga kerja yang mampu mendorong kesejahteraan tenaga kerja. Pada tahun 2045, ditargetkan IMM Jakarta sebesar 0,85 dan IPM Jakarta sebesar 92,93.

Game Changer 2 Eskalasi Jakarta sebagai Kontributor Utama Perekonomian Indonesia yang Terintegrasi secara Global

Gamechanger	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
Eskalasi Jakarta sebagai Kontributor Utama Perekonomian Indonesia yang Terintegrasi secara Global	Pengembangan sektor industri berteknologi tinggi yang menerapkan prinsip berkelanjutan dan berorientasi ekspor melalui riset dan inovasi		Peningkatan penguasaan pasar dalam dan luar negeri melalui ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi	
	Pembentukan kluster pengembangan UMKM berbasis lokasi atau sektor industri untuk meningkatkan kolaborasi, inovasi, dan daya saing		Pengembangan pusat-pusat distribusi komoditas pangan (<i>distribution center</i>) dan <i>cold storage</i>	
	Pengembangan ekonomi biru, teknologi kelautan, dan rekayasa akuakultur di kawasan perairan dan pesisir Jakarta, serta Kepulauan Seribu		Pembangunan dan revitalisasi kawasan pesisir Jakarta dengan konsep kota tepian air yang memadukan fungsi ekonomi dan ekologi	
			Pemanfaatan arahan pengembangan kawasan (<i>development brief</i>) sebagai panduan investasi bagi mitra pembangunan potensial	
	Peningkatan produktivitas ekonomi melalui utilisasi TIK di berbagai sektor unggulan		Pengembangan kawasan generator perekonomian baru, melalui rejuvenasi pemanfaatan berkelanjutan barang milik negara (BMN) yang dapat memenuhi kebutuhan ruang dan aktivitas masyarakat	
		Pengembangan berbagai instrumen pembiayaan kreatif serta pemanfaatan kekhususan untuk pembangunan infrastruktur dan proyek besar (<i>megaproject</i>)		

Gambar 5.5 Arah Kebijakan Transformasi Prioritas Game Changer 2

Ekonomi memiliki peran penting dalam perwujudan visi Jakarta sebagai Kota Global yang Maju, Berkeadilan, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan dalam dua puluh tahun ke depan. Penguatan peran Jakarta sebagai kontributor utama perekonomian Indonesia akan mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta untuk mencapai PDRB per kapita setara dengan kota global lainnya di negara maju yaitu 1.464,62 – 2.405,05 juta rupiah pada tahun 2045. Strategi ini dituangkan dalam berbagai arah kebijakan transformasi yang mampu mengeskalasi pembangunan ekonomi Jakarta melalui intervensi di sektor-sektor prioritas yang bernilai tambah tinggi, akselerasi investasi dan pertumbuhan ekonomi, perluasan pangsa pasar dan jaringan ekonomi secara global, serta pembangunan *megaproject* sebagai daya ungkit pertumbuhan ekonomi yang masif dan berdampak.

Pada tahap pertama, Jakarta ditargetkan mampu mencapai PDRB per kapita sebesar 458,23 – 512,08 juta rupiah di tahun 2030. Fokus utama pembangunan ekonomi pada tahap ini adalah penguatan sektor-sektor potensial dan bernilai tambah tinggi, yaitu jasa keuangan dan jasa profesional, TIK, perdagangan, pariwisata, pendidikan, kesehatan, dan industri berteknologi tinggi menggunakan konsep berorientasi masa depan (*future-focused concept*) yang mengikuti perkembangan teknologi, inklusif, serta berkelanjutan. Ekonomi akan bergeser dari yang berbasis pada keunggulan komparatif ke arah keunggulan kompetitif dengan mengoptimalkan riset dan inovasi. Ekosistem ekonomi diperkuat dan didukung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, kebijakan, dan pembangunan infrastruktur yang mampu menggerakkan kegiatan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas hidup, dan meningkatkan daya beli sehingga meningkatkan konsumsi.

Sejalan dengan peningkatan komponen konsumsi, perekonomian akan tumbuh dan menguat. Arah kebijakan transformasi yang diprioritaskan pada tahap pertama adalah pengembangan sektor industri berteknologi tinggi yang menerapkan prinsip berkelanjutan dan berorientasi ekspor melalui riset dan inovasi; pembentukan klaster pengembangan UMKM berbasis lokasi atau sektor industri untuk meningkatkan kolaborasi, inovasi, dan daya saing; pengembangan ekonomi biru, teknologi kelautan, dan rekayasa akuakultur di kawasan perairan dan pesisir Jakarta serta Kepulauan Seribu; peningkatan produktivitas ekonomi melalui penggunaan TIK di berbagai sektor unggulan; dan pengembangan berbagai instrumen pembiayaan kreatif serta pemanfaatan kekhususan untuk pembangunan infrastruktur dan proyek besar (*megaproject*).

Pada tahap kedua, pembangunan ekonomi Jakarta ditargetkan mampu mencapai PDRB per kapita hingga 738,22 – 893,72 juta rupiah di tahun 2035. Setelah ekosistem ekonomi yang kondusif tercipta dan infrastruktur mulai terbangun, seperti infrastruktur transportasi MRT, LRT, serta infrastruktur pendukung ekonomi lainnya, pembangunan pada tahap ini difokuskan untuk mengakselerasi dan membangkitkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berdasarkan potensi dan peluang yang ada dengan tetap memperhatikan prinsip berkelanjutan. Pengembangan pusat kegiatan ekonomi berbasis kawasan seperti kawasan internasional, kawasan ekonomi khusus, pusat kegiatan diplomatik, MICE, dan kawasan tematik lainnya, seperti konsep kota tepi perairan (*water front city*), kawasan industri dan digital, serta kawasan pariwisata dan budaya terus didorong untuk menjadi generator perekonomian Jakarta. Pada tahap ini, dominasi komponen sumber peningkatan ekonomi ditargetkan untuk beralih dari konsumsi menjadi investasi. Pembangunan *megaproject* terus didorong dan penciptaan inovasi serta teknologi tinggi terus diperkuat untuk mengeskalasi daya tarik investasi. Lapangan pekerjaan yang bernilai tambah tinggi semakin terbuka diikuti dengan kualitas tenaga kerja yang semakin kompetitif, terutama di sektor jasa keuangan dan jasa profesional, TIK, perdagangan, pariwisata, pendidikan, kesehatan, dan industri berteknologi tinggi.

Arah kebijakan transformasi yang diprioritaskan pada tahap I masih didorong pada tahap ini, diiringi dengan arah kebijakan transformasi pemanfaatan arahan

pengembangan kawasan (*development brief*) sebagai panduan investasi bagi mitra pembangunan potensial, serta pengembangan kawasan generator perekonomian baru, melalui pemanfaatan berkelanjutan barang milik negara (BMN) yang dapat memenuhi kebutuhan ruang dan aktivitas masyarakat. Kedua arah kebijakan transformasi tersebut akan terus menjadi prioritas hingga pembangunan tahap keempat.

Pada tahap ketiga, ekonomi Jakarta diproyeksikan mulai melakukan ekspansi global dan terintegrasi dengan jaringan rantai global antarpusat perekonomian. Peningkatan ekonomi pada tahap ini ditargetkan meningkat secara eksponensial dengan PDRB per kapita hingga 1.094,64 – 1.389,57 juta rupiah seiring dengan momentum Indonesia diproyeksikan keluar dari *middle income trap*. Investasi dan ekspor-impor akan menjadi daya ungkit yang besar bagi pertumbuhan ekonomi Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing dengan ekonomi yang mapan dan stabil. Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi beserta inovasi dan teknologi mutakhir telah terbangun dan memberikan efek berganda (*multiplier effect*) bagi perekonomian. Perluasan penguasaan pasar dan sumber daya manusia global semakin meningkat, diikuti dengan penguatan kualitas dan kemandirian industri lokal akan yang akan mengekskalasi daya saing pasar domestik.

Pembangunan *megaproject* dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru terus didorong untuk meningkatkan investasi. Arah kebijakan transformasi yang diprioritaskan untuk mewujudkan kondisi tersebut adalah peningkatan penguasaan pasar dalam dan luar negeri melalui ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi; pengembangan pusat-pusat distribusi komoditas pangan (*distribution center*) dan *cold storage*; pembangunan dan revitalisasi kawasan pesisir Jakarta dengan konsep kota tepian air yang memadukan fungsi ekonomi dan ekologi. Ketiga arah kebijakan transformasi ini akan terus diprioritaskan hingga pembangunan tahap keempat.

Tahap keempat merupakan tahap perwujudan ekonomi Jakarta yang produktif dengan pendapatan per kapita setara dengan kota global lainnya di negara maju yaitu mencapai 1.464,62 - 2.405,05 juta rupiah. Dengan ekonomi yang sudah mapan dan berkelanjutan, Jakarta akan mampu meningkatkan kekuatan ekonomi kota dan taraf hidup masyarakatnya secara signifikan. Infrastruktur telah beroperasi dengan baik. Teknologi digital terbangun dan tersebar secara merata. Investasi dan ekspor-impor semakin tereskalasi karena Jakarta menjadi pusat perekonomian di tingkat regional dan global. Arah kebijakan transformasi yang telah dimulai pada tahap kedua dan ketiga akan terus diperkuat hingga tahap keempat untuk mendukung perwujudan tujuan besar Jakarta di tahun 2045 sebagai kota global yang maju, berkeadilan, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Game Changer 3 Pengarusutamaan Research and Development (R & D) dan Inovasi (RDI) dalam Pembangunan

Gamechanger	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
Pengarusutamaan R&D dan Inovasi dalam Pembangunan	Pengembangan pusat dan hub inovasi yang didukung dengan sarana dan prasarana yang andal			
	Peningkatan insentif dan dukungan kebijakan dalam mewujudkan ekosistem riset dan inovasi yang menarik bagi talenta riset nasional dan global			

Gambar 5.6 Arah Kebijakan Tranformasi Prioritas Game Changer 3

Manifestasi Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing di tahun 2045 tidak lepas dari berbagai tantangan. Megatren global menunjukkan bahwa kondisi dunia dalam dua puluh tahun ke depan semakin kompleks seiring dengan perubahan yang sangat cepat di segala bidang. *Research and Development* dan Inovasi (RDI) menjadi resolusi besar dalam menjawab tantangan yang ada. Jakarta akan mengambil peran sebagai salah satu pusat pengembangan RDI di Indonesia, regional Asia, dan juga dunia.

Jakarta akan menjadi pembangkit ekonomi global (*global economic powerhouse*) dan hub inovasi (*hub for urban innovation*) dengan penciptaan platform-platform inovasi dan dukungan kebijakan serta kelembagaan yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi RDI. Pengarusutamaan RDI pada semua aspek pembangunan akan mempercepat peningkatan produktivitas ekonomi serta menciptakan solusi yang efektif dan tepat sasaran pada permasalahan pembangunan kota. Optimalisasi RDI akan memberikan nilai tambah yang tinggi bagi sektor-sektor ekonomi yang potensial, seperti penciptaan industri berteknologi tinggi, pengembangan bioteknologi, perluasan lanskap ekonom hijau yang inovatif, dan pengembangan produk-produk lokal yang kompetitif. Penguatan RDI akan mendukung penciptaan teknologi yang mutakhir seiring dengan perkembangan teknologi dan transformasi digital yang sangat cepat. Penguatan SDM di bidang RDI akan diprioritaskan karena menjadi modal penting bagi Jakarta untuk mendorong peningkatan daya saing kota dan penciptaan terobosan.

Tahap pertama difokuskan untuk penciptaan ekosistem RDI yang mapan. Penciptaan ekosistem yang mendukung RDI seperti penyediaan inkubator bisnis, program akselerasi, integrasi data riset, serta pengembangan kolaborasi *pentahelix* menjadi kunci pengembangan RDI di Jakarta. Dukungan kebijakan dan kelembagaan seperti penyederhanaan kebijakan dan regulasi, penjaminan hak kekayaan intelektual produk inovasi, dan penguatan tata kelola inovasi yang mampu mendorong penciptaan kluster inovasi memiliki peran besar dalam penciptaan ekosistem yang kondusif.

Pada tahap kedua dan ketiga, penggunaan RDI dalam berbagai sektor dan urusan pembangunan sudah luas dan merata di semua kalangan. Penentuan strategi, kebijakan, dan program pembangunan berdasarkan RDI. *Innovation hub* yang ada di Jakarta diproyeksikan mulai beroperasi dan menghasilkan riset yang digunakan sebagai dasar pengembangan berbagai industri. Kemudian, pada tahap keempat, Jakarta telah memiliki banyak *tech-enabled startup* yang kompetitif dan berkembang dengan pesat.

Dalam upaya perwujudan kondisi tersebut, arah kebijakan transformasi yang diprioritaskan untuk dilaksanakan pada tahap pertama, kedua, dan ketiga adalah i) pengembangan pusat dan hub inovasi yang didukung dengan sarana dan prasarana yang andal; serta ii) peningkatan insentif dan dukungan kebijakan dalam mewujudkan ekosistem riset dan inovasi yang menarik bagi talenta riset nasional dan global, yang didorong untuk diprioritaskan pada tahap pertama hingga tahap keempat pembangunan.

Game Changer 4 Akselerasi Jakarta sebagai Hub Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Budaya

Gamechanger	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
Akselerasi Jakarta sebagai Hub Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Budaya	Pengembangan destinasi wisata unggulan baru seperti wisata urban, wisata heritage, dan wisata pesisir serta kepulauan			
	Pengembangan industri Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE) yang dilengkapi dengan ragam infrastruktur kontemporer bertaraf internasional yang kompetitif dan adaptif			
	Penciptaan <i>creative hub</i> sebagai ruang ekosistem mengembangkan ekonomi kreatif Jakarta			

Gambar 5.7 Arah Kebijakan Transformasi Prioritas Game Changer 4

Sesuai dengan status barunya sebagai kota global, Jakarta harus memiliki daya tarik di berbagai sektor, termasuk di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Sebagai kota megapolitan, Jakarta memiliki berbagai potensi pariwisata, dengan beragam destinasi wisata unggulan dan amenities yang memadai. Dalam 20 tahun mendatang, Jakarta akan tumbuh menjadi kota yang lebih hidup (*vibrant*), inovatif, dan kompetitif di kancah global. Hal ini akan dicapai dengan pengembangan destinasi wisata unggulan dan industri MICE, serta penciptaan ekonomi kreatif sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan katalis perubahan sosial.

Pada tahap pertama, sektor pariwisata diarahkan untuk melakukan pengembangan destinasi wisata unggulan baru seperti wisata urban, wisata heritage, dan wisata pesisir serta kepulauan. Jakarta memiliki potensi besar untuk mengembangkan destinasi wisata unggulan yang mencakup wisata urban, wisata warisan (*heritage*), dan wisata pesisir serta kepulauan. Pengembangan ini tidak hanya akan meningkatkan daya tarik wisata, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Jakarta. Pengembangan

wisata urban di Jakarta akan berfokus pada revitalisasi dan aktivasi ruang-ruang kota yang menarik bagi wisatawan domestik dan internasional untuk berkunjung, sedangkan wisata *heritage* bertujuan untuk melestarikan dan mempromosikan warisan budaya dan sejarah Jakarta. Serta, wisata pesisir akan memanfaatkan potensi alam dan keindahan laut Jakarta khususnya di wilayah Kepulauan Seribu. Selain itu, potensi besar yang berperan penting dalam sektor pariwisata adalah MICE (*Meeting, Incentive, Conferences, Exhibitions*). Perlu pengembangan industri MICE yang dilengkapi dengan ragam infrastruktur kontemporer bertaraf internasional yang kompetitif dan adaptif. Dengan fasilitas seperti Jakarta Convention Center, Balai Sidang Jakarta, dan banyak hotel berbintang, Jakarta siap menjadi tuan rumah berbagai MICE. Pengembangan MICE di Jakarta juga akan mendorong sektor pariwisata lainnya, seperti wisata kuliner dan belanja. potensi besar dalam mengembangkan sektor ekonomi kreatif di Jakarta, salah satunya melalui penciptaan *creative hub* sebagai ruang ekosistem mengembangkan ekonomi kreatif Jakarta. Penciptaan *creative hub* di Jakarta merupakan langkah strategis untuk mengembangkan ekonomi kreatif kota Jakarta. Dengan menyediakan ruang, fasilitas, dan dukungan yang dibutuhkan oleh para pelaku kreatif, Jakarta dapat mendorong inovasi dan kolaborasi antarpihak.

Pada tahap kedua, pengembangan destinasi wisata dilakukan dengan memperkenalkan atraksi baru dan diversifikasi produk wisata serta peningkatan amenities wisata dan industri kreatif melalui kolaborasi antar pihak. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Kepulauan Seribu akan dikembangkan sebagai destinasi ekowisata unggulan. Pengembangan MICE difokuskan pada peningkatan kualitas layanan dan pemasaran internasional untuk menarik lebih banyak *event* global. *Creative hub* yang telah terbentuk akan diperluas dan diintegrasikan dengan komunitas seni dan teknologi, menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi dan kolaborasi.

Pada tahap ketiga, Jakarta akan fokus pada penguatan posisinya sebagai destinasi wisata dan MICE global. Infrastruktur yang telah tersedia akan diperbarui dan ditingkatkan, dengan penambahan fasilitas berteknologi tinggi dalam mendukung *event* internasional. Ekonomi kreatif akan dioptimalkan melalui penguatan citra kota dengan pendekatan model tiga budaya (*traditional culture - pop culture - tech culture*) dan pemanfaatan ruang publik dan aset pemerintah sebagai daya tarik baru dan wadah aktivitas ekonomi kreatif dan seni budaya berjenjang sehingga menjadi jaringan yang saling terhubung serta meningkatkan daya saing global.

Pada tahap keempat, upaya pemantapan dan keberlanjutan menjadi fokus utama. Dengan peningkatan amenities wisata dan industri kreatif melalui kolaborasi antar pihak akan memastikan semua fasilitas wisata, MICE, serta *creative hub* beroperasi secara berkelanjutan dan bertaraf global. Destinasi wisata unggulan akan dipromosikan secara global, dan menjadikan Jakarta sebagai tujuan utama wisata dan MICE di Asia. *Creative hub* akan terus berinovasi dan mendukung pertumbuhan industri kreatif lokal sehingga berkontribusi pada ekonomi dan budaya Jakarta secara berkelanjutan.

Game Changer 5 Transformasi Infrastruktur Kota menuju Ketahanan dan Keberlanjutan Lingkungan

Gamechanger	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
Transformasi Infrastruktur Kota menuju Ketahanan dan Keberlanjutan Lingkungan.	Peningkatan kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau (RTH) dan ruang terbuka biru (RTB) yang bernilai ekologis tinggi untuk memperbaiki ekosistem kota			
	Percepatan akses sanitasi aman melalui pembangunan infrastruktur dan sistem pengolahan limbah terpusat (<i>Jakarta Sewerage System</i>) maupun setempat			
	Penanganan sampah yang berkelanjutan melalui pembangunan dan pengoperasian infrastruktur persampahan berteknologi ramah lingkungan yang mendukung terciptanya ekonomi sirkular			
	Pemenuhan cakupan layanan air minum aman yang berkelanjutan baik secara kuantitas, kualitas, <i>coverage</i> , kontinuitas, dan keterjangkauan			
	Peningkatan kapasitas penyelenggaraan, pengembangan, dan pengelolaan SPAM diantaranya melalui pemanfaatan teknologi dalam penyediaan air baku Jakarta secara mandiri			
	Pembangunan dan peningkatan kapasitas infrastruktur penanggulangan bencana yang memadai			
	Perubahan pola mobilitas berbasis kendaraan pribadi menjadi transportasi publik yang ramah lingkungan			

Gambar 5.8 Arah Kebijakan Transformasi Prioritas Game Changer 5

Dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang layak huni dan berkelanjutan, prioritas dalam mengembangkan infrastruktur ketahanan kota serta mitigasi perubahan iklim dapat dilakukan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta Ruang terbuka Biru (RTB), percepatan akses sanitasi aman, penanganan sampah yang berkelanjutan, pemenuhan cakupan layanan air bersih perpipaan/air minum aman, peningkatan kapasitas infrastruktur penanggulangan bencana, serta perubahan pola mobilitas berbasis kendaraan pribadi menjadi transportasi publik.

Pada tahap pertama, perlunya merevitalisasi ruang terbuka hijau atau taman kota melalui peningkatan kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau dan ruang terbuka biru yang bernilai ekologis tinggi untuk memperbaiki ekosistem kota. Sehingga RTH maupun RTB yang terbangun bukan hanya mempunyai fungsi ekologis, melainkan sebagai ruang

aktivitas dan ruang terbuka yang dapat diakses oleh semua warga. Diperlukan percepatan penyediaan dan pemanfaatan infrastruktur sanitasi meliputi percepatan akses sanitasi aman melalui pembangunan infrastruktur dan sistem pengolahan limbah terpusat JSS (*Jakarta Sewerage System*) maupun setempat, sehingga dapat memenuhi cakupan wilayah Jakarta. Pada aspek pengolahan sampah yang berkelanjutan, Jakarta perlu mengurangi timbulan sampah yang masuk ke TPST Bantargebang dengan penanganan sampah yang berkelanjutan melalui pembangunan dan pengoperasian infrastruktur persampahan berteknologi ramah lingkungan yang mendukung terciptanya ekonomi sirkular. Isu lingkungan lainnya ialah ketersediaan air bersih bagi kelangsungan hidup warga Jakarta, diperlukannya pemenuhan cakupan layanan air minum aman yang berkelanjutan baik secara kuantitas, kualitas, cakupan layanan, kontinuitas, dan keterjangkauan cakupan layanan air bersih ke seluruh area Jakarta dengan memastikan efisiensi distribusi dan mengurangi tingkat kehilangan air (*Non Revenue Water*). Dalam memenuhi pasokan air baku, pengelolaan dan pengembangan SPAM menjadi isu krusial dalam pembangunan Jakarta ke depan. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan, pengembangan, dan pengelolaan SPAM yang profesional dan andal dapat mengembangkan sumber air baku alternatif yang berkelanjutan, sehingga mampu menghadapi tantangan kebutuhan air di masa depan. Lalu, Jakarta harus menyiapkan perubahan pola mobilitas dengan migrasi penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi umum guna mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan dengan menyiapkan pilihan moda transportasi yang beragam dan memadai agar mendorong pengguna kendaraan pribadi beralih menggunakan transportasi umum.

Pada tahap kedua, dalam upaya memenuhi target RTH sesuai dengan amanat UU Nomor 26 Tahun 2007 sebesar 20%, Jakarta perlu mengoptimalkan lahan yang ada melalui penerapan mekanisme insentif-disinsentif dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas RTH dengan konsep solusi berbasis alam (*nature-based solution*) untuk mengurangi fenomena *urban heat island*. Dalam upaya memperluas cakupan dan kualitas layanan sanitasi aman perkotaan dapat dicapai melalui peningkatan operasional sarana/prasarana sanitasi aman. Di pembangunan tahap kedua juga, potensi pengolahan sampah yang dapat diimplementasikan melalui penggunaan teknologi pengolahan sampah ramah lingkungan sehingga dapat mengurangi emisi gas rumah kaca, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Jakarta juga perlu memitigasi terkait ancaman bencana serta perubahan iklim dengan membangun infrastruktur penanggulangan bencana khususnya di wilayah pesisir akibat dampak kenaikan muka air laut dan perubahan iklim, kebijakan terkait mitigasi bencana dilakukan melalui pembangunan dan peningkatan kapasitas infrastruktur penanggulangan bencana yang memadai.

Pada tahap ketiga, pengelolaan RTH dan RTB difungsikan sebagai daya dukung lingkungan dalam mengendalikan pencemaran udara serta bernilai tinggi bagi keanekaragaman hayati dan kawasan ekosistem budidaya melalui upaya pelestarian keanekaragaman hayati melalui pemulihan habitat dan penanaman serta pemeliharaan vegetasi endemi dan penciptaan konektivitas RTH perkotaan untuk konservasi serta pemanfaatan keanekaragaman hayati. Lalu ditandai dengan pengelolaan

keanekaragaman hayati di wilayah pesisir melalui pemulihan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil melalui restorasi lahan basah, konservasi dan rehabilitasi bakau, terumbu karang, dan habitat laut lainnya, serta pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan. Pada tahap pembangunan ketiga, pengelolaan sampah berkelanjutan telah berkembang secara aspek infrastruktur dan pengolahan melalui pemanfaatan hasil olahan sampah menjadi sumber energi alternatif melalui kerja sama dengan pemasok kebutuhan industri/pasar (*offtaker*). Sebagian Jakarta memiliki wilayah lebih rendah dari permukaan laut akan rentan terhadap ancaman akibat perubahan iklim sehingga diperlukan integrasi fungsi ruang dan pemanfaatan infrastruktur kota dalam mitigasi dan adaptasi bencana, serta penerapan konsep solusi berbasis alam (*nature-based solution*) pada tahap pembangunan ketiga ini, dan penciptaan ruang kota yang responsif terhadap perubahan iklim dan penyediaan infrastruktur hijau untuk mewujudkan suhu perkotaan yang nyaman.

Pada tahap keempat, Jakarta diharapkan mampu menyediakan akses air minum aman dan air baku yang merata bagi seluruh penduduk. Infrastruktur mitigasi bencana akan dibangun menggunakan teknologi informasi dan sistem data kebencanaan terpadu, memungkinkan pengembangan sistem peringatan dini, simulasi bencana, serta komunikasi darurat yang efektif untuk menghadapi berbagai potensi ancaman alam. Transportasi umum yang ramah lingkungan menjadi pilihan utama masyarakat, dengan layanan yang efisien, nyaman, dan terintegrasi. Seluruh upaya ini harus disertai kebijakan pembangunan rendah karbon melalui penerapan nilai ekonomi karbon (*carbon pricing*), pajak karbon, perluasan kawasan rendah emisi (*low emission zone*), serta pendanaan anggaran perubahan iklim (*climate budget tagging*) untuk memastikan Jakarta tumbuh sebagai kota hijau yang kompetitif dan tangguh menghadapi perubahan iklim.

Game Changer 6 Penguatan Konektivitas Informasi, Barang, dan Penumpang Jakarta sebagai Pusat Transit Regional dan Global

Gamechanger	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
Penguatan Konektivitas Informasi, Barang, dan Penumpang Jakarta sebagai Pusat Transit Regional dan Global.	Peningkatan kecepatan, kapasitas, dan keterjangkauan internet bagi seluruh masyarakat			
	Penguatan kerja sama lintas-aspek dan lintas-stakeholder dalam meningkatkan konektivitas global			
	Penguatan konektivitas kawasan pesisir dan Kepulauan Seribu melalui perbaikan jaringan transportasi air			
	Pembangunan dan pengembangan infrastruktur dan sistem logistik yang terkoneksi secara optimal dan efisien antara pusat distribusi logistik kota, regional, dan global		Optimalisasi potensi pelabuhan sebagai hub perdagangan nasional dan internasional	
		Peningkatan kemudahan akses dan waktu tempuh dari dan ke bandar udara melalui pembangunan infrastruktur kebandarudaraan		

Gambar 5.9 Arah Kebijakan Transformasi Prioritas Game Changer 6

Penguatan konektivitas informasi, barang, dan penumpang Jakarta sebagai pusat transit regional dan global merupakan strategi transformatif untuk mengintegrasikan Jakarta dengan jejaring kota-kota dunia di berbagai aspek. Penguatan konektivitas Jakarta mengacu pada perluasan pertukaran informasi, peningkatan aksesibilitas infrastruktur, ekspansi jaringan transportasi yang efisien, dan integrasi sistem logistik yang modern.

Pada tahap pertama, Jakarta ditargetkan dapat mencapai pemerataan akses terhadap informasi, tempat, dan sumber daya produktif bagi semua kalangan di seluruh wilayah, termasuk Kepulauan Seribu. Pemerataan aksesibilitas akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat yang berimplikasi pada peningkatan produktivitas perekonomian kota. Pembangunan sistem transportasi publik berbasis rel seperti MRT dan LRT ditargetkan selesai pada akhir tahap pertama di tahun 2030. Sarana, prasarana, dan layanan moda transportasi perairan ke Kepulauan Seribu lebih teratur dan andal. Infrastruktur telekomunikasi seperti penyediaan jaringan internet 5G ditargetkan sudah menjangkau seluruh wilayah. Arah kebijakan transformasi yang mendukung pencapaian target ini adalah peningkatan kecepatan, kapasitas, dan keterjangkauan internet bagi seluruh masyarakat, penguatan kerja sama lintas aspek dan lintas pemangku kepentingan dalam meningkatkan konektivitas global, penguatan

konektivitas kawasan pesisir dan Kepulauan Seribu melalui perbaikan jaringan transportasi air, serta pembangunan dan pengembangan infrastruktur dan sistem logistik yang terkoneksi secara optimal dan efisien antara pusat distribusi logistik kota, regional, dan global.

Pada tahap kedua, saat infrastruktur dan sistem transportasi telah terbangun dan beroperasi dengan teratur, fokus pembangunan difokuskan pada peningkatan kemudahan akses dan waktu tempuh dari dan ke bandara, serta peningkatan kualitas dan kapasitas pelabuhan beserta sistem logistiknya. Intervensi dilakukan pada upaya penurunan waktu antara (*headway*) kereta bandara untuk mengurangi waktu tempuh yang diperlukan dari dan ke bandara, serta penentuan *first mile – last mile* dan tarif kereta bandara sehingga meningkatkan *ridership* masyarakat untuk menggunakan kereta bandara. Sementara itu, intervensi prioritas untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas pelabuhan serta sistem logistik dilakukan melalui transformasi digital dan pemanfaatan teknologi dalam penguatan manajemen dan SDM industri logistik, penguatan dukungan regulasi, serta penguatan tata kelola dan kelembagaan pelabuhan dan logistik. Pembangunan *deep sea port* dimungkinkan pada tahap ini sebagai pintu gerbang Jakarta menuju jejaring perdagangan internasional. Integrasi ekonomi domestik dan global akan mendorong peningkatan produktivitas perekonomian Jakarta secara signifikan dan mendukung partisipasi Jakarta dalam rantai pasok global. Arah kebijakan transformasi yang diprioritaskan pada tahap pertama terus dilanjutkan pada tahap kedua, disertai dengan arah kebijakan transformasi peningkatan kemudahan akses dan waktu tempuh dari dan ke bandar udara melalui pembangunan infrastruktur kebandarudaraan.

Pada tahap ketiga, setelah infrastruktur dan sistem transportasi (darat, perairan, udara) serta logistik telah terbangun dan andal, fokus pembangunan pada tahap ini adalah ekspansi global didukung dengan arah kebijakan transformasi optimalisasi potensi pelabuhan sebagai hub perdagangan nasional dan internasional. Jakarta dapat memaksimalkan potensi lokasi strategis dan aset milik pemerintah yang ada sebagai generator perekonomian baru dan mendorong peran Jakarta dalam perdagangan internasional melalui bisnis pelabuhan, logistik, atau pergudangan. Sistem logistik yang mapan didukung dengan pengumpan berbasis rel akan mengefisienkan biaya operasional. Strategi ini akan meningkatkan investasi dan ekspor-impor sehingga dapat mempercepat tingkat pertumbuhan ekonomi Jakarta serta kualitas hidup masyarakatnya.

Pada tahap keempat, konektivitas informasi, barang, dan penumpang Jakarta telah terkonsolidasi dengan baik. Pertukaran informasi terjalin secara luas dan inklusif. Pergerakan manusia lebih efektif dan ramah lingkungan dengan target *mode share* transportasi publik sebesar 55%. Kualitas dan kapasitas pelabuhan dan sistem logistik telah beroperasi secara produktif, efisien, dan berdaya saing. Pada tahap ini, arah kebijakan transformasi yang sudah mulai diprioritaskan di tahap-tahap sebelumnya akan terus ditingkatkan untuk mewujudkan Jakarta yang terintegrasi dan memiliki peran yang kuat di kancah global.

Game Changer 7 Reformasi Tata Kelola menuju Kota Global yang Berdaya Saing

Gamechanger	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
Reformasi Tata Kelola menuju Kota Global yang Berdaya Saing	Penguatan kolaborasi dan kelembagaan wilayah aglomerasi dalam perencanaan dan tata kelola lintas urusan dan lintas wilayah			
	Penguatan tata kelola pembangunan melalui penyusunan grand design/ masterplan yang berorientasi perwujudan kota global pada tiap urusan termasuk pengembangan wilayah Kepulauan Seribu			
	Pemanfaatan teknologi berbasis internet of things (IoT), machine learning, big data, dan real time communication untuk meningkatkan kinerja layanan publik			
	Transformasi tata kelola, sistem informasi, serta simplifikasi prosedur dan proses investasi dan bisnis			

Gambar 5.10 Arah Kebijakan Transformasi Prioritas *Game Changer 7*

Jakarta pada periode pembangunan jangka panjang tahun 2025-2045 memiliki momentum strategis dengan dibentuknya UU DKJ berupa pergeseran paradigma tata kelola dan kelembagaan yang belum tentu terjadi untuk kedua kalinya. Kewenangan dan berbagai tantangan baru pembangunan ini perlu dipandang sebagai potensi untuk membangun ulang sistem tata kelola yang lebih adaptif dan berkualitas demi tercapainya cita-cita Jakarta sebagai kota global. *Game changer* tata kelola merupakan manifestasi upaya strategis yang dapat dilakukan secara sistemis untuk mencapai berbagai target makro indikator pembangunan secara komprehensif.

Pada tahap pertama, reformasi tata kelola dilakukan melalui penguatan kelembagaan wilayah aglomerasi sesuai dengan amanat UU DKJ. Upaya ini mencakup penyusunan grand design pembangunan untuk setiap urusan, termasuk pengembangan wilayah Kepulauan Seribu. Di tahap ini juga dilakukan pengenalan dan *pemanfaatan IoT, machine learning, dan big data* dalam meningkatkan kinerja layanan publik. Selain itu, dilakukan simplifikasi prosedur dan regulasi insentif fiskal serta disinsentif pajak bagi investor.

Langkah-langkah ini diambil untuk menyusun fondasi tata kelola yang kuat dalam masa transisi DKI Jakarta ke dalam DKJ, dengan memperhatikan cita-cita sebagai kota global secara menyeluruh.

Pada tahap kedua, penguatan kelembagaan wilayah aglomerasi dan penyusunan grand design masih dilanjutkan. Diharapkan pada tahap ini, bentuk kelembagaan lintas wilayah yang efektif untuk setiap daerah di Jabodetabekpunjur sudah mulai terbentuk. Selain itu, diperkirakan terjadi penggunaan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) secara masif, sehingga pembangunan diarahkan untuk pemanfaatan teknologi dalam peningkatan kinerja pelayanan publik. Dengan demikian, reformasi tata kelola tidak hanya mengandalkan struktur kelembagaan tetapi juga teknologi canggih untuk mendukung operasional yang efisien.

Di tahap ketiga, diharapkan grand design untuk setiap urusan dan wilayah Kepulauan Seribu sudah selesai. Evaluasi per lima tahunan dilakukan untuk mengukur ketercapaian target pembangunan. Pada tahap ini, penguatan kolaborasi wilayah aglomerasi dan pemanfaatan teknologi bagi kinerja pelayanan publik terus digalakkan. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa semua rencana dan kebijakan yang telah diimplementasikan berjalan sesuai target dan dapat dilakukan penyesuaian jika diperlukan.

Pada tahap keempat, sistem tata kelola diharapkan sudah adaptif dan fleksibel serta menjadi akselerator dalam peningkatan investasi dan iklim usaha yang kondusif untuk sektor-sektor ekonomi yang produktif dalam skala global. Pemerintah diharapkan menjadi lini terdepan dalam pemanfaatan teknologi dan mampu menciptakan peradaban baru Jakarta yang setara dengan kota global lainnya. Pada tahap ini, tata kelola yang modern dan teknologi canggih akan menjadi fondasi utama dalam menjadikan Jakarta sebagai pusat ekonomi dan bisnis yang kompetitif di dunia internasional.

Tabel 5.8 Sandingan Gamechanger RPJPN 2025 – 2045 dengan RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2025 – 2045

RPJPN 2025-2045				RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2025-2045				
No	Transformasi/ Landasan Transformasi	No	Game Changer	No	Sektor Prioritas	Game Changer	No	Arah Kebijakan Transformasi Prioritas
1	Transformasi sosial	1	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)	1	Sumber Daya Manusia	Transformasi Jakarta menjadi Pusat Keunggulan	1	Penguatan pelayanan kesehatan, ibu, bayi dan anak, serta lanjut usia di setiap pusat kesehatan masyarakat
		2	Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan				2	Pengembangan rumah sakit daerah berbasis rumah sakit pendidikan (teaching hospital) sebagai pusat riset dan inovasi bekerja sama dengan universitas dan lembaga penelitian
		3	Restrukturisasi kewenangan pengelolaan pendidikan dan kesehatan seperti guru, tenaga medis dan tenaga kesehatan				3	Peningkatan dan pemantauan kualitas gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat dengan fokus utama pada masa emas anak (golden age)
		4	Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan <i>stunting</i> , dan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama tuberkulosis dan kusta)				4	Penuntasan wajib belajar 13 tahun mulai dari pendidikan anak usia dini sampai pendidikan menengah
		5	Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan				5	Pendorongan partisipasi pendidikan tinggi terutama di bidang STEAM yang

RPJPN 2025-2045				RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2025-2045				
No	Transformasi/ Landasan Transformasi	No	Game Changer	No	Sektor Prioritas	Game Changer	No	Arah Kebijakan Transformasi Prioritas
			perlindungan sosial adaptif terintegrasi					menghasilkan sumber daya manusia berdaya saing global
							6	Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kondisi lokal, kebutuhan pasar, dan potensi keunggulan daerah, serta peningkatan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri
							7	Peningkatan kapasitas dan daya saing tenaga kerja melalui sertifikasi keahlian dan pelatihan bahasa internasional
							8	Pemberian bantuan operasional dan personal pendidikan yang tepat sasaran serta peningkatan inovasi pembiayaan pendidikan
2	Transformasi ekonomi	6	Peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi oleh industri	2	Ekonomi	Eskalasi Jakarta sebagai Kontributor Utama Perekonomian Indonesia yang	9	Pengembangan sektor industri berteknologi tinggi yang menerapkan prinsip berkelanjutan dan berorientasi ekspor melalui riset dan inovasi
		7	Industrialisasi: hirilisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat				10	Peningkatan penguasaan pasar dalam dan luar negeri melalui ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi

RPJPN 2025-2045				RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2025-2045				
No	Transformasi/ Landasan Transformasi	No	Game Changer	No	Sektor Prioritas	Game Changer	No	Arah Kebijakan Transformasi Prioritas
			teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor			Terintegrasi secara Global		
		8	Percepatan transmisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau				11	Pembentukan kluster pengembangan UMKM berbasis lokasi atau sektor industri untuk meningkatkan kolaborasi, inovasi, dan daya saing
		9	<i>Superplatform</i> untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital				12	Pengembangan pusat-pusat distribusi komoditas pangan (distribution center) dan cold storage
		10	Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi				13	Pengembangan ekonomi biru, teknologi kelautan, dan rekayasa akuakultur di kawasan perairan dan pesisir Jakarta, serta Kepulauan Seribu
		11	Pembangunan Ibu Kota Nusantara				14	Pembangunan dan revitalisasi kawasan pesisir Jakarta dengan konsep kota tepian air yang memadukan fungsi ekonomi dan ekologi
							15	Pemanfaatan arahan pengembangan kawasan (development brief) sebagai

RPJPN 2025-2045				RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2025-2045				
No	Transformasi/ Landasan Transformasi	No	Game Changer	No	Sektor Prioritas	Game Changer	No	Arah Kebijakan Transformasi Prioritas
								panduan investasi bagi mitra pembangunan potensial
							16	Peningkatan produktivitas ekonomi melalui utilisasi TIK di berbagai sektor unggulan
							17	Pengembangan kawasan generator perekonomian baru, melalui rejuvenasi pemanfaatan berkelanjutan barang milik negara (BMN) yang dapat memenuhi kebutuhan ruang dan aktivitas masyarakat
							18	Pengembangan berbagai instrumen pembiayaan kreatif serta pemanfaatan kekhususan untuk pembangunan infrastruktur dan proyek besar (megaproject)
				3	Inovasi dan Riset	Pengarusutamaan Riset dan Pengembangan (R&D) dan Inovasi dalam Pembangunan	19	Pengembangan pusat dan hub inovasi yang didukung dengan sarana dan prasarana yang andal
							20	Peningkatan insentif dan dukungan kebijakan dalam mewujudkan ekosistem riset dan inovasi yang

RPJPN 2025-2045				RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2025-2045				
No	Transformasi/ Landasan Transformasi	No	Game Changer	No	Sektor Prioritas	Game Changer	No	Arah Kebijakan Transformasi Prioritas
								menarik bagi talenta riset nasional dan global
				4	Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Budaya	Akselerasi Jakarta sebagai Hub Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Budaya	21	Pengembangan destinasi wisata unggulan baru seperti wisata urban, wisata heritage, dan wisata pesisir serta kepulauan
							22	Pengembangan industri Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE) yang dilengkapi dengan ragam infrastruktur kontemporer bertaraf internasional yang kompetitif dan adaptif
							23	Penciptaan creative hub sebagai ruang ekosistem mengembangkan ekonomi kreatif Jakarta
				6	Konektivitas	Penguatan Konektivitas Informasi, Barang, dan Penumpang Jakarta sebagai Pusat Transit	24	Peningkatan kecepatan, kapasitas, dan keterjangkauan internet bagi seluruh masyarakat
							25	Penguatan kerja sama lintas-aspek dan lintas-stakeholder dalam meningkatkan konektivitas global

RPJPN 2025-2045				RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2025-2045				
No	Transformasi/ Landasan Transformasi	No	Game Changer	No	Sektor Prioritas	Game Changer	No	Arah Kebijakan Transformasi Prioritas
						Regional dan Global	26	Penguatan konektivitas kawasan pesisir dan Kepulauan Seribu melalui perbaikan jaringan transportasi air
							27	Pembangunan dan pengembangan infrastruktur dan sistem logistik yang terkoneksi secara optimal dan efisien antara pusat distribusi logistik kota, regional, dan global
							28	Optimalisasi potensi pelabuhan sebagai hub perdagangan nasional dan internasional
							29	Peningkatan kemudahan akses dan waktu tempuh dari dan ke bandar udara melalui pembangunan infrastruktur kebandarudaraan
3	Transformasi tata kelola	12	Transformasi manajemen ASN (terutama sistem penggajian tunggal dan pensiun), pemberantasan korupsi, dan pembentukan lembaga pengelola tunggal regulasi	7	Tata Kelola	Reformasi Tata Kelola menuju Kota Global yang Berdaya Saing	30	Penguatan kolaborasi dan kelembagaan wilayah aglomerasi dalam perencanaan dan tata kelola lintas urusan dan lintas wilayah
		13	Penguatan tata kelola partai politik				31	Penguatan tata kelola pembangunan melalui penyusunan grand design/

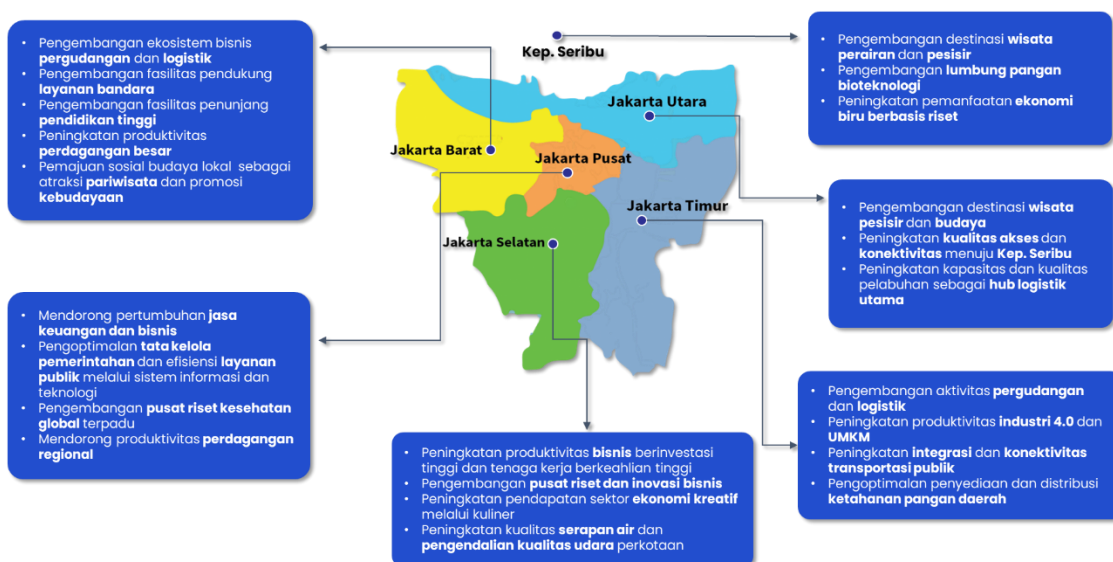
RPJPN 2025-2045				RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2025-2045				
No	Transformasi/ Landasan Transformasi	No	Game Changer	No	Sektor Prioritas	Game Changer	No	Arah Kebijakan Transformasi Prioritas
								masterplan yang berorientasi perwujudan kota global pada tiap urusan termasuk pengembangan wilayah Kepulauan Seribu
							32	Pemanfaatan teknologi berbasis internet of things (IoT), machine learning, big data, dan real time communication untuk meningkatkan kinerja layanan publik
							33	Transformasi tata kelola, sistem informasi, serta simplifikasi prosedur dan proses investasi dan bisnis
4	Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	14	Transformasi sistem penuntunan menuju <i>single prosecution system</i> dan transformasi lembaga kejaksaan sebagai <i>advocaat generaal</i>					
		15	Transformasi industri pertahanan menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi					

RPJPN 2025-2045				RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2025-2045				
No	Transformasi/ Landasan Transformasi	No	Game Changer	No	Sektor Prioritas	Game Changer	No Arah Kebijakan Transformasi Prioritas	
			dan penguatan value chain industri nasional					
		16	Reformasi perencanaan dan fiskal: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko; penerapan aturan fiskal adaptif; reformasi APBN; serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal					
		17	Reformasi subsidi terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran					
5	Ketahanan sosial budaya dan ekologi	18	Penguatan karakter dan jati diri bangsa	5	Lingkungan	Transformasi Infrastruktur Kota menuju Ketahanan dan Keberlanjutan Lingkungan	34	Peningkatan kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau (RTH) dan ruang terbuka biru (RTB) yang bernilai ekologis tinggi untuk memperbaiki ekosistem kota
		19	Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir				35	Percepatan akses sanitasi aman melalui pembangunan infrastruktur dan sistem pengolahan limbah terpusat (Jakarta Sewerage System) maupun setempat

RPJPN 2025-2045				RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2025-2045				
No	Transformasi/ Landasan Transformasi	No	Game Changer	No	Sektor Prioritas	Game Changer	No	Arah Kebijakan Transformasi Prioritas
		20	Ketahanan energi dan air serta kemandirian menuju kedaulatan pangan dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (food, energy, water)				36	Penanganan sampah yang berkelanjutan melalui pembangunan dan pengoperasian infrastruktur persampahan berteknologi ramah lingkungan yang mendukung terciptanya ekonomi sirkular
							37	Pemenuhan cakupan layanan air minum aman yang berkelanjutan baik secara kuantitas, kualitas, coverage, kontinuitas, dan keterjangkauan
							38	Peningkatan kapasitas penyelenggaraan, pengembangan, dan pengelolaan SPAM diantaranya melalui pemanfaatan teknologi dalam penyediaan air baku Jakarta secara mandiri
							39	Pembangunan dan peningkatan kapasitas infrastruktur penanggulangan bencana yang memadai
							40	Perubahan pola mobilitas berbasis kendaraan pribadi menjadi transportasi publik yang ramah lingkungan

5.4 Arah Pengembangan Kewilayahan

Arah pengembangan kewilayahan dapat dirumuskan berdasarkan 2 (dua) aspek, yaitu potensi pengembangan ruang dan potensi peningkatan ekonomi. Adapun arah pengembangan wilayah berdasarkan potensi ruang saat ini dapat dijabarkan pada gambar berikut.



Gambar 5.11 Arah Pengembangan Wilayah berdasarkan Potensi Ruang Eksisting

Selanjutnya, dalam rangka mendukung pencapaian Visi Jakarta 2045 “Jakarta Kota Global yang Maju, Berkeadilan, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan” pada Sasaran Visi “Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang” serta “Peningkatan Pendapatan Per Kapita”, pengembangan kewilayahan merupakan salah satu kunci dalam peningkatan ekonomi dan pengurangan ketimpangan antarwilayah.

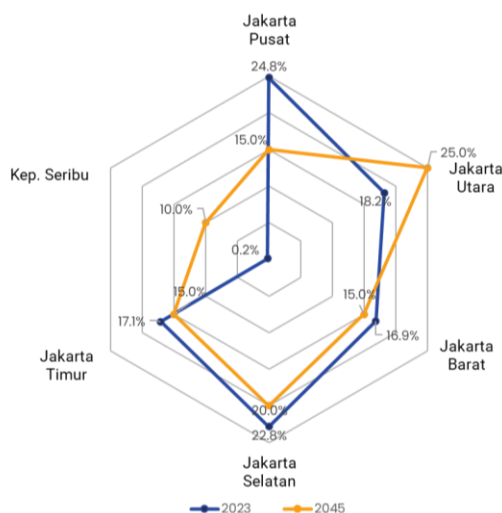
Dalam konteks tersebut, digunakan parameter kontribusi perekonomian masing-masing wilayah administrasi dalam pencapaian target perekonomian Jakarta tahun 2045. Adapun berdasarkan analisis terhadap data PDRB tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, lingkup provinsi dan enam wilayah, didapat kontribusi ekonomi enam wilayah tersebut terhadap perekonomian provinsi.

Tabel 5.9 Besaran PDRB Masing-masing Wilayah Administrasi dan Kontribusinya terhadap PDRB Provinsi Tahun 2019 - 2023

No.	Wilayah Administrasi	2019	2020	2021	2022	2023
Besaran (juta Rp)						
1.	Jakarta Pusat	699,86	700,79	728,05	795,39	860,04
2.	Jakarta Utara	522,36	496,66	535,96	587,77	631,41
3.	Jakarta Barat	470,44	469,05	493,86	540,71	585,42
4.	Jakarta Selatan	642,44	643,57	668,36	730,68	792,61
5.	Jakarta Timur	488,47	469,98	500,36	547,06	592,20
6.	Kepulauan Seribu	7,84	6,34	8,07	10,04	8,08
Kontribusi (%)						
1.	Jakarta Pusat	24,72	24,75	25,71	28,09	24,79
2.	Jakarta Utara	18,45	17,54	18,93	20,76	18,20
3.	Jakarta Barat	16,62	16,57	17,44	19,10	16,87
4.	Jakarta Selatan	22,69	22,73	23,61	25,81	22,84
5.	Jakarta Timur	17,25	16,60	17,67	19,32	17,07
6.	Kepulauan Seribu	0,28	0,22	0,29	0,35	0,23

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2024, diolah

Adapun desain kontribusi perekonomian masing-masing wilayah terhadap perekonomian Jakarta pada tahun 2045 dapat digambarkan pada grafik berikut.



Gambar 5.12 Kontribusi Wilayah terhadap Perekonomian Jakarta Tahun 2023 dan 2045

Berdasarkan kontribusi saat ini, potensi lapangan usaha, dan proyeksi PDRB per kapita Jakarta yaitu pada kisaran antara 1.464,62 - 2.405,05 juta rupiah, didapatkan arah pengembangan wilayah berdasarkan lapangan usaha PDRB potensial serta besaran kontribusi masing-masing wilayah untuk perekonomian Jakarta.

Pengembangan Wilayah Jakarta Pusat

Pada periode 2019–2023, kota administrasi Jakarta Pusat merupakan kontributor terbesar ekonomi Jakarta dengan rata-rata kontribusi tahunan sebesar 26,72 persen. Pada periode tersebut, sektor jasa menjadi penopang ekonomi Jakarta Pusat dengan rata-rata kontribusi tahunan sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, serta Jasa Perusahaan secara berturut-turut sebesar 23,86 persen dan 9,77 persen. Selanjutnya sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menyumbang sebesar 16,45 persen terhadap perekonomian kota dan menjadi kontributor terbesar kedua. Kemudian disusul sektor Informasi dan Komunikasi berkontribusi rata-rata sebesar 8,03 persen terhadap ekonomi kota.

Diproyeksikan hingga tahun 2045 perekonomian, Jakarta Pusat dengan kontribusi sekitar 17 persen terhadap ekonomi provinsi, masih didominasi oleh Jasa Keuangan dan Asuransi, diikuti sektor Jasa Perusahaan dengan kontribusi yang semakin meningkat, kemudian diikuti oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, serta Informasi dan Komunikasi. Sementara Sektor Administrasi Pemerintahan berkurang kontribusinya seiring dengan berpindahya kegiatan pemerintah pusat ke Nusantara.

Pengembangan Wilayah Jakarta Utara

Perekonomian Kota Jakarta Utara pada periode 2019–2023 secara rata-rata berkontribusi sebesar 19,60 persen terhadap ekonomi Jakarta. Sektor Industri Pengolahan menjadi penyokong terbesar bagi ekonomi Jakarta Utara dengan kontribusi sebesar 31,87 persen. Kemudian, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menjadi sektor terbesar kedua dengan rata-rata kontribusi tahunan sebesar 17,91 persen. Sedangkan, sektor Konstruksi berperan terhadap ekonomi kota dengan rata-rata kontribusi tahunan sebesar 14,27 persen.

Ke depannya kegiatan ekonomi Jakarta didorong berkembang pesat ke wilayah utara, salah satunya dengan mendorong pembangunan wilayah pesisir dengan berbagai potensi sektor wisata, logistik, perdagangan dan komersial. Diproyeksikan pada tahun 2045, ekonomi Jakarta Utara menjadi salah satu penyokong terbesar perekonomian Jakarta dengan kontribusi dapat mencapai 24 persen. Perekonomian Jakarta Utara bergeser dari yang semula berfokus pada Industri Pengolahan menjadi pusat Perdagangan Besar dan Eceran. Kemudian dengan semakin tumbuhnya kawasan utara Jakarta, kontribusi sektor Konstruksi juga mengalami peningkatan. Selain itu, sektor Properti dan Real Estate juga diproyeksikan meningkat kontribusinya.

Pengembangan Wilayah Jakarta Barat

Perekonomian Kota Jakarta Barat pada periode 2019–2023 secara rata-rata berkontribusi sebesar 18,08 persen terhadap ekonomi Jakarta. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menjadi penyokong terbesar bagi ekonomi Jakarta Barat dengan kontribusi sebesar 19,01 persen. Kemudian, sektor Informasi dan Komunikasi menjadi sektor terbesar kedua dengan rata-rata kontribusi tahunan sebesar 17,45 persen. Sedangkan, sektor Konstruksi berperan terhadap ekonomi kota dengan rata-rata kontribusi tahunan sebesar 13,69 persen.

Diproyeksikan pada tahun 2045, perekonomian Jakarta Barat berkontribusi terhadap 15 persen perekonomian Jakarta. Sektor Informasi dan Komunikasi masih menjadi sektor penyokong Kota Jakarta Barat. Selain itu sektor Perdagangan Kecil dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor masih berperan besar dengan kontribusi sebesar 19,40 persen. Kemudian dengan semakin terhubungnya wilayah Jakarta Barat melalui transportasi perkeretaapian, kontribusi sektor Transportasi dan Pergudangan juga tumbuh menjadi 8,81 persen.

Pengembangan Wilayah Jakarta Selatan

Perekonomian Kota Jakarta Selatan pada periode 2019–2023 secara rata-rata berkontribusi sebesar 24,56 persen terhadap ekonomi Jakarta. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menjadi penyokong terbesar bagi ekonomi Jakarta Selatan dengan kontribusi sebesar 16,03 persen. Kemudian, sektor jasa menjadi kontributor terbesar kedua, meliputi Sektor Keuangan & Asuransi dan Jasa Perusahaan secara berturut-turut berkontribusi sebesar 13,94 persen, dan 11,70 persen. Sedangkan, sektor Informasi dan Komunikasi berperan terhadap ekonomi kota dengan rata-rata kontribusi tahunan sebesar 12,37 persen.

Ke depannya kegiatan ekonomi kreatif difokuskan di wilayah selatan Jakarta. Melalui pengembangan ekonomi kreatif, diproyeksikan pada tahun 2045 ekonomi Jakarta Selatan berkontribusi terhadap 20 persen perekonomian Jakarta. Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi serta Jasa Perusahaan masih menjadi sektor dominan. Selain itu dengan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang difokuskan di selatan Jakarta, kontribusi sektor ini mengalami peningkatan pada tahun 2045. Lebih lanjut sektor Perdagangan Kecil dan Eceran serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor masih menjadi sektor ketiga terbesar meskipun kontribusinya turun dari kondisi saat ini.

Pengembangan Wilayah Jakarta Timur

Perekonomian Kota Jakarta Timur pada periode 2019–2023 secara rata-rata berkontribusi sebesar 18,35 persen terhadap ekonomi Jakarta. Sektor Industri Pengolahan menjadi penyokong terbesar bagi ekonomi Jakarta Timur dengan kontribusi

sebesar 27,60 persen, menjadi wilayah dengan porsi Industri Pengolahan terbesar kedua setelah Kota Jakarta Utara. Kemudian, sektor terbesar kedua adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang berkontribusi sebesar 17,20 persen. Sedangkan, sektor Konstruksi berperan terhadap ekonomi kota dengan rata-rata kontribusi tahunan sebesar 10,61 persen.

Diproyeksikan pada tahun 2045, ekonomi Kota Jakarta Timur berkontribusi terhadap 14 persen perekonomian provinsi. Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap ekonomi kota diproyeksikan meningkat dan menjadi kontributor utama. Selain itu, pergeseran dari sektor Industri Pengolahan ke sektor jasa dan perdagangan berpengaruh terhadap semakin berkembangnya sektor Konstruksi. Ada pun sektor Jasa Perusahaan juga berperan besar terhadap perekonomian kota Jakarta Timur.

Pengembangan Wilayah Kepulauan Seribu

Perekonomian Kabupaten Kepulauan Seribu pada periode 2019–2023 secara rata-rata berkontribusi sebesar 0,29 persen terhadap ekonomi Provinsi DKI. Sektor Pertambangan dan Penggalian menjadi penyokong terbesar bagi ekonomi Kabupaten Kepulauan Seribu dengan kontribusi sebesar 76,70 persen. Kemudian, sektor terbesar kedua adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang berkontribusi sebesar 5,45 persen. Sedangkan, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor berperan terhadap ekonomi kota dengan rata-rata kontribusi tahunan sebesar 4,29 persen.

Diproyeksikan pada tahun 2045, ekonomi Kepulauan Seribu berkontribusi terhadap 10 persen perekonomian provinsi. Dengan diarahkannya pengembangan sektor pariwisata bertaraf internasional di Kepulauan Seribu, kontribusi sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap ekonomi kota diproyeksikan meningkat dan menjadi kontributor utama. Selain itu, dengan berkembangnya sektor pariwisata di Kepulauan Seribu turut membuat sektor Perdagangan Besar dan Eceran serta sektor Reparasi Mobil dan Sepeda Motor bertumbuh sehingga kontribusinya meningkat. Sektor Transportasi dan Pergudangan turut tumbuh seiring dengan semakin tingginya mobilitas dari dan menuju Kepulauan Seribu, sehingga berkontribusi terhadap ekonomi Kabupaten Kepulauan Seribu.

5.5 Kerangka Pendanaan Pembangunan

Jakarta merupakan ‘rumah’ lebih dari 10 juta penduduk pada malam hari namun juga harus mengakomodasi tambahan sekitar tiga juta orang pelaju dari wilayah sekitar yang bekerja dan beraktivitas di Jakarta pada siang hari.

Sebagai pusat pemerintahan, bisnis, politik dan budaya, Jakarta adalah lokasi bagi kantor-kantor pusat Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perusahaan swasta nasional

maupun perusahaan multinasional. Jakarta juga menjadi tuan rumah untuk berbagai organisasi internasional seperti kantor Sekretariat ASEAN, duta besar, dan perwakilan negara lain.

Selain itu, Jakarta merupakan pusat aktivitas ekonomi dan keuangan nasional maupun internasional di mana banyak Investasi Asing/*Foreign Direct Investment* (FDI) di berbagai sektor yang diinvestasikan di Jakarta, seperti sektor transportasi, pergudangan, telekomunikasi, pertambangan, listrik, gas dan air, perumahan, industri dan perkantoran, makanan dan industri lainnya. Jakarta dipercaya akan tetap memegang peranan penting sebagai kota bisnis berskala global.

Sebagai konsekuensi logis atas fakta tersebut serta dalam rangka menjadikan Jakarta sebagai kota global yang maju, layak, nyaman dan berkelanjutan untuk dihuni bagi semua, maka perlu penyiapan berbagai infrastruktur strategis maupun pendukung seperti transportasi, pengendalian banjir, penyediaan air bersih, pengolahan sampah dan air limbah, serta pemenuhan pelayanan dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, dan perumahan rakyat dan pemukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial.

Secara empiris, tren realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jakarta 14 tahun terakhir (2010–2023) menunjukkan kemampuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengalokasikan belanja modal khususnya dalam penyediaan infrastruktur semakin terbatas, seiring dengan adanya peningkatan kebutuhan pelayanan publik dan telah hampir maksimalnya kemampuan daerah untuk melakukan pembiayaan hutang daerah. Untuk itu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah periode 2025-2045, kebijakan sumber pendanaan perlu diperluas.

Adapun beberapa sumber pendanaan yang perlu dijajaki antara lain dan tidak terbatas pada sumber pendanaan melalui Pembiayaan Utang Daerah seperti Pinjaman Daerah, Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah, Sinergi Pendanaan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah, pihak swasta, badan usaha milik Negara, BUMD, dan/atau dengan Pemerintah Daerah lainnya, skema Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU), pendanaan yang bersumber dari pemanfaatan ruang, optimalisasi pemanfaatan aset, penugasan kepada BUMD termasuk mendorong dilakukannya kerja sama secara *B-to-B* serta membuka peluang seluas-luasnya bagi peran serta masyarakat secara sukarela untuk penyelenggaraan skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU)/*Corporate Social Responsibility* (CSR) dan swa-pendanaan lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan.

Secara skematis, berbagai kerangka alternatif pendanaan yang dapat diimplementasikan untuk membiayai proyeksi kebutuhan infrastruktur Jakarta menuju kota global pada gambar berikut. Adapun besaran biaya kebutuhan masing-masing

infrastruktur merupakan anggaran indikatif sesuai dengan kondisi pada saat penyusunan RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2045.

Kebutuhan Infrastruktur		Keterangan	Rincian (Miliar Rupiah)	Potensi Skema Pendanaan / Pembiayaan			
1	Jakarta Sewerage System (JSS)	Zona 1, 2, 4, 5, 6, 8, dan 10 Zona 3, 7, 9, 11, 12, 13, dan 14	89,84	APBD/APBN	KPBU	Pinjaman Luar Negeri	Climate Finance Hibah
2	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Subsidi Air Bersih untuk daerah krisis air dan layanan SPAM Regional	14,47	APBD/APBN	KPBU	Blended Finance	Optimalisasi Pemanfaatan Aset
3	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rumah Susun dan Peningkatan Kualitas Permukiman	47,33	APBD/APBN	KPBU	Pinjaman Daerah	Optimalisasi Pemanfaatan Aset
4	Pengendalian Banjir	Pembangunan/rehabilitasi tanggul pengaman pantai, sistem polder, sistem pompa dan pintu air, waduk dan situ, pengadaan tanah sungai dan waduk, pengerukan dan peningkatan kapasitas saluran dan drainase	14,82	APBD/APBN	Pinjaman Daerah		
5	Penanganan Sampah	RDF dalam kota, saringan sampah, landfill mining, PLTSA, sarana (truck)	14,12	APBD/APBN	Transfer Development Right (TDR)	Pinjaman Daerah	
6	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan	Infrastruktur complete street	28,45	APBD/APBN	Transfer Development Right (TDR)	Disinsentif Pemanfaatan Ruang	
7	Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemda	Penerapan konsep green energy dan ramah disabilitas	11,74	APBD/APBN	Climate Finance		
8	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pengadaan tanah dan pembangunan taman	98,46	APBD/APBN	Climate Finance	CSR	
9	Pendidikan	Rehabilitasi/pembangunan sekolah	6,5	APBD/APBN	CSR		
10	Mass Rapid Transit (MRT)	North-South Line (extension), East-West (Fase 1)	123,91	Pinjaman Luar Negeri	Hibah		
11	Light Rail Transit (LRT)	Manggarai-Dukuh Atas-Karet-Pesing-Rajawali-JIS-Danau Sunter Barat-Kelapa Gading; Danau Sunter Barat-PIK; Velodrome-Klender-Halim; Pulogebang-Joglo	79,95	APBD/APBN	KPBU	Pinjaman Luar Negeri	Hibah
12	Penanggulangan Bencana	Infrastruktur Kebakaran dan Penyelamatan	2,13	APBD/APBN	CSR		
13	Transformasi Digital	SPBE, Ekosistem Kota Cerdas	2,76	KPBU			
14	Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN)	Fase B	123	APBD/APBN	KPBU	Private Investment	Obligasi/Sukuk Daerah
Total Kebutuhan Biaya			657,48				

Gambar 5.13 Kebutuhan Pembiayaan Infrastruktur Jakarta Menuju Kota Global

Selanjutnya, beberapa alternatif potensi skema pendanaan/pembiayaan pembangunan adalah sebagai berikut.

i. Sumber Pembiayaan melalui Pembiayaan Utang Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, Pembiayaan Utang Daerah adalah setiap penerimaan Daerah yang harus dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun – tahun anggaran berikutnya. Adapun Pembiayaan Utang Daerah digunakan untuk membiayai Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah dilarang melakukan Pembiayaan langsung dari pihak luar negeri.

Pembiayaan Utang Daerah harus memenuhi persyaratan teknis minimal: administrasi, keuangan dan kelayakan kegiatan. Persyaratan Keuangan terdiri atas: batas maksimal Pembiayaan Utang Daerah, rasio kemampuan Keuangan Daerah untuk mengembalikan Pembiayaan Utang Daerah, dan batas maksimal defisit APBD yang bersumber dari Pembiayaan Utang Daerah, yang dihitung pada saat pengajuan Pembiayaan Utang Daerah.

a. Pinjaman Daerah

Pinjaman daerah merupakan pembiayaan utang daerah yang diikat dalam suatu perjanjian pinjaman dan bukan dalam bentuk surat berharga, yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak

lain, sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Pinjaman daerah dapat bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, Pinjaman Daerah merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan dalam APBD untuk mendanai kegiatan yang merupakan inisiatif pemerintah daerah dalam rangka urusan pemerintahan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (*Grant/Loan*)

Pinjaman Luar Negeri sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah merupakan setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh pemerintah dari pemberi Pinjaman Luar Negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.

Pinjaman luar negeri dapat bersumber antara lain dari kreditor multilateral, kreditor bilateral, kreditor swasta asing, dan lembaga penjamin kredit ekspor. Di samping itu, pengajuan pinjaman luar negeri harus memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, kehati-hatian, tidak disertai ikatan politik, serta tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara.

c. Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, Obligasi Daerah adalah surat berharga berupa pengakuan utang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dan sukuk daerah adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan aset sukuk daerah yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.

Selain sebagai alternatif pembiayaan pembangunan daerah, baik obligasi daerah maupun sukuk daerah merupakan instrumen yang dapat dimanfaatkan oleh Jakarta dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah tanpa tergantung sepenuhnya pada APBD. Selain itu, obligasi daerah diharapkan mampu membuka lapangan kerja melalui pembangunan infrastruktur serta mampu meningkatkan daya saing daerah dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai. Penerbitan obligasi daerah ini juga dapat menjadi salah satu instrumen dalam peningkatan penerapan tata kelola keuangan dan pemerintahan yang baik, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, dan disiplin dalam pengelolaan keuangan Daerah, di mana penilaian atas tata kelola keuangan dan pemerintahan dimaksud dijadikan sebagai salah satu persyaratan untuk penerbitannya.

ii. Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Pembiayaan dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), merupakan kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara para pihak. Penggunaan skema KPBU dalam penyediaan infrastruktur strategis bertujuan untuk penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif, tepat sasaran dan tepat waktu sekaligus sebagai salah satu strategi Jakarta dalam memenuhi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan.

Beberapa kriteria yang dapat dibiayai dari skema KPBU berdasarkan peraturan perundang-undangan dimaksud di atas, antara lain (i) infrastruktur yang dapat dikerjasamakan meliputi infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial; (ii) termasuk ke dalam 22 jenis infrastruktur yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur; dan (iii) memberikan manfaat yang lebih bagi masyarakat dengan memperhatikan analisa biaya manfaat dan sosial dan analisa nilai manfaat uang (*value for money*) apabila dikerjasamakan dengan Badan Usaha.

iii. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)/Corporate Social Responsibility (CSR)

Pembangunan infrastruktur pelayanan publik semakin lama semakin menjadi kebutuhan yang mendesak, Di lain sisi, kemampuan keuangan Pemerintah semakin terbatas. Oleh karena itu, skema TJSL hadir sebagai salah satu solusi dengan risiko yang rendah sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan. Di samping itu, TJSL dapat mendorong peningkatan peran serta sektor swasta dalam pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan.

Dengan perbaikan yang dilakukan oleh Jakarta terhadap pelaksanaan kegiatan TJSL, diharapkan kegiatan TJSL dapat menjadi salah satu alternatif pembiayaan yang memiliki peran yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memiliki dampak yang lebih besar dan lebih luas terhadap pembangunan berkelanjutan.

iv. Pendanaan Terkait Pemanfaatan Ruang

Pendanaan terkait pemanfaatan ruang terdiri dari beberapa skema yaitu sebagai berikut.

- a. Kewajiban Pemegang Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR)

Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon yang akan memanfaatkan ruang, secara prinsip diperkenankan memanfaatkan ruang dalam batasan subzona tertentu sesuai Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, memenuhi persyaratan administrasi dan teknis berdasarkan aspek teknis, politis, sosial, budaya dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebelum IPPR, produk persetujuan prinsip ini dituangkan dalam bentuk Surat Gubernur atau yang dikenal dengan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) dan Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (IPPT). Di dalam IPPR telah ditetapkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang harus diwujudkan oleh pemegang IPPR sebagai bentuk suatu kewajiban.

Adapun pembangunan prasarana tersebut meliputi pembangunan jaringan jalan, jaringan saluran pembuangan air limbah, jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase), atau tempat pembuangan sampah.

Untuk pembangunan sarana meliputi pembangunan sarana perniagaan/perbelanjaan, sarana pelayanan umum dan pemerintahan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana rekreasi dan olahraga, sarana pemakaman, sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau, atau sarana parkir.

Sedangkan untuk pembangunan utilitas umum meliputi pembangunan jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas, jaringan transportasi, pemadam kebakaran, atau sarana penerangan jasa umum.

b. Pengenaan Kompensasi Pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB)

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 210 Tahun 2016 tentang Pengenaan Kompensasi Terhadap Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan, pelampauan KLB dapat diberikan pada lokasi yang ditetapkan sebagai zona Teknik Pengaturan Zonasi (TPZ) Bonus dengan kode a yang merupakan (i) pusat kegiatan primer; (ii) pusat kegiatan sekunder; (iii) kawasan strategis kepentingan ekonomi; (iv) kawasan terpadu kompak dengan pengembangan Konsep TOD; (v) kawasan yang memiliki fungsi sebagai fasilitas parkir perpindahan moda (*park and ride*); dan (vi) lokasi pertemuan angkutan umum massal.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 210 Tahun 2016 tentang Pengenaan Kompensasi Terhadap Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan, bentuk kompensasi terhadap pelampauan KLB antara lain (i) menyediakan lahan dan/atau membangun RTH publik; (ii) menyediakan lahan dan/atau membangun rumah susun umum; (iii) menyediakan lahan dan/atau membangun waduk atau situ; (iv) menyediakan infrastruktur; (iv) menyediakan jalur dan meningkatkan kualitas fasilitas pejalan kaki yang terintegrasi dengan angkutan umum; dan (v) menyediakan jalur sepeda yang terintegrasi dengan angkutan umum.

c. Konversi dari Pemenuhan Kewajiban Pembiayaan dan Pembangunan Rumah Susun Murah/Sederhana Melalui Konversi Oleh Para Pemegang Izin Pemanfaatan Ruang

Selaras dengan Kewajiban IPPR dan Kompensasi Pelampauan KLB, skema ini merupakan salah satu terobosan Jakarta yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2019 dengan pengaturan tata cara konversi dari kewajiban dan/atau sanksi yang dikenakan kepada para pemegang Izin Pemanfaatan Ruang berupa penyediaan Rumah Susun Murah/Sederhana akibat perizinan dan/atau pelanggaran perizinan SP3L (Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan untuk luas tanah lebih dari 5000 m²) yang telah dilakukan sebelumnya, menjadi bentuk lainnya yaitu penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Secara lebih detail, skema ini mengatur bahwa kewajiban/sanksi SP3L dapat berupa:

- 1) pembangunan rumah susun, yang pada pengaturan baru ini bukan saja harus di lokasi izin melainkan juga dapat dilakukan di lahan milik pemerintah daerah
- 2) pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum di lahan milik pemerintah daerah atau pembangunan konstruksi berikut tanah, berupa:
 - a) prasarana: jaringan jalan, air limbah, drainase atau persampahan
 - b) sarana: perbelanjaan, pelayanan umum dan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi dan olahraga, pemakaman, pertamanan dan RTH, parkir.
 - c) utilitas umum: jaringan air bersih, listrik, telepon, gas, jaringan transportasi, pemadam kebakaran, penerangan jalan umum.
- 3) pengadaan barang berupa benda bergerak/tidak bergerak dan/atau penyediaan barang dalam rangka melengkapi pembangunan rumah susun dan prasarana, sarana dan utilitas umum.

d. Peralihan Hak Membangun

Peralihan Hak Membangun atau *Transfer Development Rights* (TDR) adalah suatu perangkat pengendalian pemanfaatan lahan yang mendorong pengalihan hak membangun (baik sebagai aturan wajib maupun sukarela) dari suatu tempat/kawasan yang ingin dipertahankan atau dilindungi yang disebut dengan area pengirim, menuju tempat/kawasan yang diharapkan untuk berkembang yang disebut dengan area penerima.

TDR merupakan instrumen pendanaan pembangunan alternatif dan sekaligus dapat digunakan sebagai perangkat pengendalian pemanfaatan ruang yang mendorong pengalihan hak membangun luas lantai yang belum dimanfaatkan dari suatu tempat atau kawasan yang ingin dipertahankan atau dilindungi menuju tempat/kawasan yang diharapkan untuk berkembang. Perolehan dana dari TDR akan digunakan untuk

pembiayaan pembangunan/pengelolaan/perawatan prasarana, sarana, dan utilitas umum perkotaan.

v. Optimalisasi Pemanfaatan Aset

Manajemen aset publik di Indonesia secara teknis sering disebut sebagai pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D). Pengelolaan BMN dan BMD diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta aturan turunan lainnya, antara lain adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dalam pengelolaan aset (BMN/BMD), pemerintah berperan sebagai pemilik aset, pengelola, sekaligus regulator dari kebijakan terkait pemanfaatan BMN/BMD.

Jakarta memiliki nilai aset yang besar namun pemanfaatannya dan optimalisasinya masih rendah. Nilai aset berupa tanah dan bangunan di DKI Jakarta sejumlah 512,89 triliun (BPAD Jakarta, 2023). Dari besarnya nilai aset tersebut, realisasi pendapatan dari pemanfaatan aset di Jakarta pada tahun 2018-2021 masih berada di angka 50 miliar per tahun. Dan pada tahun 2021, karena adanya pandemi Covid-19 nilai tersebut turun menjadi 35,43 miliar atau sebesar 31% dari target yang dicanangkan. Di sisi lain, ada peningkatan yang cukup signifikan menjadi sebesar 229 miliar pada tahun 2022 sejak beroperasionalnya *Jakarta Aset Management Center* (JAMC) pada tahun 2022 (JAMC, 2023).

Ke depan, untuk mencapai optimalisasi BMD menganggur dan/atau kurang dimanfaatkan, JAMC memerlukan kolaborasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan terutama SKPD terkait dan BUMD. Selain itu, perluasan portofolio pemanfaatan BMD dapat dilaksanakan melalui: (i) *business case* pemanfaatan BMD termasuk sentralisasi kewenangan Pemanfaatan BMD pada BLUD selain JAMC; (ii) analisis pemanfaatan dan pendayagunaan BMD termasuk melakukan evaluasi pemanfaatan BMD pada waktu tersebut (nilai kontribusi, jangka waktu pemanfaatan dan skema pemanfaatan serta aspek lainnya); dan (iii) *feasibility study* pemanfaatan BMD termasuk penambahan skema pemanfaatan yang sebelumnya belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.

vi. Pembiayaan Berbasis Iklim

Pembiayaan berbasis iklim atau *green climate fund* (GCF) saat ini merupakan penyalur dana penanggulangan dampak perubahan iklim terbesar di dunia. Dana yang terhimpun sampai akhir 2019 sudah mencapai 10,3 miliar USD. Meski demikian, seperti halnya berbagai sumber pembiayaan hijau, GCF seharusnya dipandang bukan sebagai sumber pembiayaan konvensional, melainkan peluang untuk membuat sebuah program atau proyek aksi iklim yang inovatif.

GCF akan membiayai proyek yang memiliki potensi dampak positif yang besar terhadap iklim, perubahan paradigma, dan pembangunan berkelanjutan, sesuai dengan kebutuhan negara yang bersangkutan, ada kepemilikan yang kuat dari negara yang bersangkutan, juga efektif dan efisien. Untuk bisa memenuhi aspek perubahan paradigma ini membutuhkan program yang inovatif yaitu yang mampu menunjukkan potensi maksimal dari pergeseran pandangan menuju pembangunan berkelanjutan yang tahan terhadap perubahan iklim serta rendah karbon. Karena itu, apabila sebuah proyek iklim sudah layak untuk dibiayai melalui skema pembiayaan konvensional, pemilik proyek biasanya akan memanfaatkan peluang pembiayaan yang sudah tersedia di perbankan dibandingkan mengakses pendanaan GCF, terutama mengingat proses yang akan ditempuh akan membutuhkan pembelajaran.

Secara umum, perbankan sering kali kurang tertarik membiayai proyek hijau atau proyek aksi perubahan iklim. Beberapa alasannya karena pertama, ketidaksiapan bank dalam membiayai proyek yang dinilai baru dan berisiko tinggi serta tidak memiliki jaminan pinjaman. Kedua, nilai proyek yang dianggap terlalu kecil bagi standar lembaga keuangan atau dikenal dengan istilah 'tidak layak bank (*unbankable*)'. Nilai proyek yang terlalu kecil (misalnya di bawah 100 juta USD) juga membuat proyek dinilai kurang layak secara komersial. Hal ini dikarenakan lembaga keuangan lokal maupun internasional menilai biaya uji tuntas (*due diligence*) yang tinggi dan tidak sebanding dengan nilai proyek yang diusulkan.

Selain itu, lembaga keuangan tertarik membiayai bila sudah ada kepastian kebijakan pemerintah yang memberi insentif, misalnya di sektor energi terbarukan melalui skema tarif khusus untuk pembelian listriknya. Di dalam kondisi di mana pemilik proyek tidak dapat mengakses pembiayaan perbankan dikarenakan faktor risiko dan ketidakpastian kebijakan, GCF dapat dijadikan sumber solusi pembiayaan inovatif.

Tantangan utama untuk program aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim adalah ketiadaan sumber dana berjangka panjang (lebih dari 5 tahun), rendahnya imbal hasil (*rate of return*), kurangnya kapasitas pelaksanaan dan pengetahuan para pemain di sektor ini, serta berbagai risiko lain. Sejumlah literatur ilmiah dan kajian oleh berbagai pusat riset di dunia, lembaga keuangan, serta survei menunjukkan bahwa secara umum tidak ada instrumen pembiayaan universal yang sesuai untuk semua proyek-proyek tersebut. Sedangkan, pilihan pembiayaan untuk proyek iklim secara umum ditentukan oleh banyak faktor seperti ukuran proyek, tipe investasi yang dipilih, ketersediaan instrumen pembiayaan, peran negara, dan dukungan lembaga keuangan.

Untuk menurunkan risiko yang tinggi dari proyek perubahan iklim agar sebuah proyek menjadi layak dibiayai oleh perbankan atau dikenal dengan istilah *de-risking*, terdapat beberapa perangkat yang dapat digunakan oleh pemohon proyek untuk mengakses pendanaan perbankan seperti (i) memperkuat porsi ekuitas proyek sehingga kebutuhan pembiayaan yang akan diambil dari utang mengecil dan bank lebih berani menyalurkan

pinjaman; (ii) menyediakan kuasi ekuitas melalui skema pembiayaan mezanin yang menjembatani antara utang senior dari perbankan dan ekuitas dari pemegang saham proyek; (iii) berbagi risiko porsi utang melalui sindikasi atau memasukkan pemberi pinjaman lain ke dalam struktur pembiayaan; (iv) menyediakan kolateral melalui kredit garansi atau asuransi; dan (v) menyediakan fasilitas perlindungan (*hedging*) untuk valuta asing jika pinjaman untuk proyek berasal dari sumber luar negeri.

Perangkat *de-risking* di atas beserta metode penurunan risiko lainnya bisa dilakukan dengan memanfaatkan dana GCF. Misalnya, dalam proyek eksplorasi energi terbarukan panas bumi yang memiliki peluang keberhasilan kecil, maka GCF bisa membantu pemerintah dalam mengambil alih risiko tersebut. Salah satu contohnya adalah proyek *Geothermal Resource Risk Mitigation* (GREM) yang dibiayai oleh pemerintah Indonesia, GCF, dan Bank Dunia, yang dikelola oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) untuk melakukan eksplorasi potensi panas bumi di wilayah potensial Indonesia. Eksplorasi sumber energi panas bumi selain membutuhkan biaya besar juga memiliki risiko kegagalan yang cukup tinggi. Namun, bila proyek GEM ini nantinya mampu menemukan sumber panas bumi yang potensial, maka tahap eksploitasi dapat dibiayai oleh perbankan secara komersial karena memiliki tingkat kepastian yang lebih tinggi.

Dengan tersedianya berbagai perangkat *de-risking* ini, maka perbankan komersial akan bersedia terlibat dalam membiayai berbagai proyek iklim karena risiko yang akan mereka hadapi menjadi lebih kecil. Kredit komersial dari perbankan inilah yang perlu tetap dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan proyek setelah fase yang berisiko dari sebuah proyek didanai oleh instrumen *de-risking* GCF.

Kombinasi pembiayaan GCF dan perbankan dapat digunakan di dalam beberapa fase proyek tergantung dari profil risiko fase proyek. Apabila fase awal proyek dapat berjalan lancar dengan pembiayaan GCF, maka selanjutnya perbankan akan lebih terbuka atau berani terlibat memberikan pinjaman ke proyek iklim, atau setidaknya memperkenalkan proyek-proyek iklim ini ke lembaga keuangan yang sesuai. Bagi pemilik proyek iklim yang sebelumnya sudah menerima fasilitas *de-risking* GCF, otoritas negara yang ditunjuk atau *National Designated Authority* (NDA) GCF menyarankan pemilik proyek untuk memanfaatkan pembiayaan komersial dari perbankan untuk pengembangan proyek iklim dan mereplikasi proyek tersebut.





06

Penutup

Jakarta adalah Kota Global yang maju
berkeadilan, berdaya saing,
dan berkelanjutan

BAB 6

PENUTUP

6.1 Kaidah Pelaksanaan

Dokumen RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005–2025 merupakan acuan dan pedoman dalam:

- a. Perumusan Visi, Misi, dan Arah Kebijakan RPJMD sepanjang periode perencanaan tahun 2025-2045. Perumusan RPJMD mengacu dan selaras dengan Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045.
- b. Penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada dokumen RPJMD pada setiap periode sesuai dengan target pembangunan yang ditetapkan dalam Indikator Utama Pembangunan RPJPD DKI Jakarta Tahun 2025-2045
- c. Koordinasi antar-pemangku kepentingan dalam pencapaian visi dan misi daerah.
- d. Integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antarfungsi pemerintahan daerah.

Pelaksanaan RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2045 memperhatikan beberapa prinsip utama pembangunan. Pertama, prinsip pengarusutamaan gender yaitu pelaksanaan kebijakan dirancang untuk menciptakan kesetaraan akses dan kesempatan bagi semua gender sehingga tercipta kesetaraan gender dalam setiap sektor pembangunan. Hal ini juga termasuk pelibatan gender dalam proses pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Kedua, prinsip inklusi sosial yang menekankan pada setiap kelompok masyarakat terlepas dari status sosial dan ekonominya memiliki akses dan kesempatan yang sama dalam menerima manfaat pembangunan. Keterlibatan aktif masyarakat, khususnya kelompok rentan dan terpinggirkan, didorong selama pelaksanaan RPJPD.

Terakhir, prinsip keberlanjutan dan ketahanan yang mendorong pelaksanaan seluruh kebijakan jangka panjang memperhatikan praktik keberlanjutan yaitu penggunaan sumber daya alam dan energi yang efektif dan efisien serta mempertimbangkan mitigasi perubahan iklim. Pelaksanaan pembangunan harus memperkuat ketahanan masyarakat sehingga tercipta keseimbangan dan keberlanjutan.

Kaidah pelaksanaan mencakup konsistensi perencanaan dan pendanaan, kerangka pengendalian dan evaluasi, sistem insentif, mekanisme perubahan, dan komunikasi publik.

6.1.1 Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan

Konsistensi antara dokumen perencanaan pembangunan dan sinkronisasi dengan kebijakan pendanaan merupakan elemen penting dalam memastikan kualitas perencanaan dan implementasi pembangunan DKI Jakarta yang efektif. Konsistensi ini bertujuan untuk memastikan setiap langkah pembangunan selaras dengan rencana yang telah ditetapkan, serta didukung dengan pendanaan yang optimal agar pelaksanaannya dapat berlangsung tanpa hambatan. Perencanaan berkualitas tidak hanya menjadi pedoman utama bagi pemerintah, tetapi juga bagi seluruh pelaku pembangunan lainnya, termasuk sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga nonpemerintah.

Untuk mewujudkan konsistensi tersebut, dibutuhkan mekanisme pengambilan keputusan yang kuat dan tegas dalam menetapkan prioritas pembangunan hingga tingkat proyek atau keluaran. Proses ini mencakup kolaborasi dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berperan penting dalam memfasilitasi sinergi antara berbagai sektor, guna memastikan setiap kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan lokal dan mampu menghadapi tantangan spesifik perkotaan.

Selain itu, penguatan mekanisme ini juga bertujuan untuk mengatasi kendala dalam hal pendanaan, baik dari sumber dana lokal maupun dari potensi pendanaan lainnya. Dengan demikian, perencanaan dan pendanaan dapat berjalan secara paralel dan konsisten, serta mendukung pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup warga Jakarta.

6.1.2 Kerangka Pengendalian dan Evaluasi

Untuk memastikan pencapaian sasaran pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi yang berkelanjutan serta partisipatif dilakukan dengan memanfaatkan sistem elektronik terintegrasi dan pengelolaan data pembangunan. Proses pengendalian dan evaluasi dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi dalam konteks manajemen risiko yang berlangsung mulai dari tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Aktivitas ini didukung oleh sistem elektronik terintegrasi dari perencanaan hingga pelaksanaan. Sistem elektronik yang terintegrasi juga berkolaborasi dengan pengelolaan data pembangunan untuk mendorong kebijakan yang berbasis bukti.

Pengendalian dan evaluasi dalam perencanaan bertujuan untuk memastikan konsistensi dalam pembangunan, meningkatkan kualitas pembangunan prioritas daerah, serta menjamin ketersediaan alokasi anggaran dari pemerintah dan sumber nonpemerintah. Proses ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah dan tahunan.

Untuk pengendalian dan evaluasi jangka menengah, pengendalian dan evaluasi dilakukan melalui penjabaran RPJPD ke RPJMD, kesiapan desain proyek prioritas

pembangunan daerah dengan penerapan kerangka kerja logis dan penetapan ukuran keberhasilan, konsistensi dalam perencanaan dan penganggaran, serta identifikasi risiko beserta langkah mitigasinya. Sementara itu, pengendalian dan evaluasi tahunan mencakup penjabaran RPJMD ke dokumen RKPD, kesiapan desain proyek prioritas pembangunan daerah dengan penerapan kerangka kerja logis dan penetapan ukuran keberhasilan, konsistensi perencanaan dan penganggaran, serta identifikasi risiko dan langkah mitigasinya.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Aktivitas ini dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi rencana jangka menengah serta tahunan. Proses pemantauan dan evaluasi tersebut mencakup pemantauan pelaksanaan proyek prioritas pembangunan daerah, pemantauan mitigasi risiko pembangunan, evaluasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah, dan evaluasi pencapaian sasaran kinerja utama serta program dari Pemerintah Daerah yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Implementasi pengendalian dan evaluasi pembangunan membutuhkan kerangka regulasi yang komprehensif dan sinergis. Kerangka regulasi ini mencakup aspek pemantauan, evaluasi, pengendalian, manajemen risiko, dan manajemen kinerja. Sinergi regulasi sangat krusial untuk memastikan konsistensi pelaksanaan pengendalian dan evaluasi, serta mendukung pencapaian kinerja yang optimal sebagai salah satu basis dalam menyusun sistem manajemen kinerja pemerintah.

6.1.3 Sistem Insentif

Keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan daerah membutuhkan partisipasi aktif dari berbagai pihak. Untuk mendorong keterlibatan aktif dari semua pihak tersebut, perlu dibentuk sistem insentif yang baik. Sistem insentif ini diharapkan mampu meningkatkan partisipasi luas dan mendorong capaian pembangunan daerah. Bagi pemerintah daerah, insentif diintegrasikan dalam sistem manajemen kinerja dan anggaran, dengan kinerja diukur berdasarkan konsistensi perencanaan, perencanaan dan pendanaan, pencapaian indikator makro daerah, serta program prioritas. Sementara untuk pelaku nonpemerintah, insentif dapat berupa penghargaan, dukungan regulasi, dan kemudahan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

6.1.4 Mekanisme Perubahan

Dokumen perencanaan yang fleksibel memerlukan ruang untuk penyesuaian terhadap faktor-faktor yang berada di luar kendali. Jika terjadi perubahan yang mendasar seperti bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, perubahan kebijakan nasional, atau ketika terjadi penyimpangan yang signifikan dalam pencapaian sasaran pembangunan dari tahap sebelumnya sehingga tujuan pembangunan jangka panjang tidak dapat tercapai, target

dalam RPJPD Provinsi DKI Jakarta dapat diperbarui melalui RPJMD. Pembaruan ini dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Penerapan aturan pelaksanaan ini didukung oleh transformasi digital dengan penggunaan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data, termasuk data statistik pemerintah dan swasta, di semua tahapan siklus pembangunan. Sistem elektronik terpadu ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kelincahan proses perencanaan dan pelaksanaan RPJPD DKI Jakarta Tahun 2025-2045. Sedangkan tata kelola data dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kebijakan melalui penggunaan data referensi yang konsisten.

6.1.5 Komunikasi Publik

Momentum penyusunan RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2045 bertepatan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta, penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta Tahun 2024-2044, serta persiapan Pemilihan Umum Kepala Daerah periode 2025-2029. Dalam hal ini RPJPD merupakan dokumen teknokratik yang juga strategis secara politis untuk menjembatani amanat paradigma pembangunan baru pasca Ibukota. Dalam hal ini, komunikasi publik terkait dokumen RPJPD perlu memastikan terlaksananya diseminasi informasi dan promosi Jakarta sebagai Kota Global yang berdaya saing dalam dua puluh tahun ke depan ke berbagai pihak.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2045, strategi komunikasi publik memiliki peran penting untuk menyampaikan informasi pembangunan secara transparan dan partisipatif kepada masyarakat luas. Sasaran komunikasi publik ini meliputi berbagai kelompok, termasuk sektor swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, diaspora, pemuda, serta kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lanjut usia.

Berbagai metode komunikasi dilakukan untuk melaksanakan perencanaan pembangunan yang partisipatif dan relevan di berbagai tingkatan. Adapun pelaksanaan komunikasi publik yang dilakukan berupa sosialisasi langsung, seperti musyawarah perencanaan pembangunan provinsi, forum konsultasi publik, dan *focus group discussion*. Selain itu, penyebaran informasi juga dilakukan melalui media massa, media sosial, serta aplikasi digital untuk memudahkan masyarakat dalam memahami, mengakses informasi, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan. Melalui strategi ini, diharapkan terjadi komunikasi dua arah dan masyarakat dapat memberikan pandangan, masukan, dan dukungan yang konstruktif terhadap perencanaan pembangunan daerah.

6.1.6 Pedoman Transisi

Pedoman transisi mencakup arahan mengenai berbagai hal yang perlu dilakukan selama masa transisi dokumen perencanaan pembangunan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengatasi kekosongan dokumen saat masa berlaku Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2045 berakhir. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta untuk masa transisi periode 2045-2050, yang merupakan tahun awal periode RPJPD 2046-2065, berfungsi untuk menjembatani agar Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok berjalan secara berkelanjutan.

6.2 Pendanaan Pembangunan

Sesuai dengan Subbab 5.5 Kerangka Pendanaan Pembangunan, perwujudan visi Jakarta didukung oleh pendanaan yang memadai melalui beberapa alternatif potensi skema pendanaan, seperti: (i) utang daerah (seperti pinjaman daerah, pinjaman dan/atau hibah luar negeri, obligasi daerah); (ii) kerja sama pemerintah dengan badan usaha; (iii) tanggung jawab sosial dan lingkungan; (iv) pendanaan terkait pemanfaatan ruang (seperti kewajiban pemegang Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang, pengenaan kompensasi pelampauan Koefisien Lantai Bangunan, konversi dari pemenuhan kewajiban pembiayaan dan pembangunan rumah susun murah, dan peralihan hak membangun); (v) optimalisasi pemanfaatan aset; dan (vi) pembiayaan berbasis iklim.

Peningkatan kapasitas pendanaan di sektor publik dan non-publik diperkuat melalui pengelolaan investasi yang baik, sehingga dana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal. Beberapa langkah penguatan manajemen investasi publik meliputi: (i) peningkatan akurasi identifikasi investasi publik di setiap periode jangka menengah; (ii) perbaikan proses persiapan dan evaluasi proyek investasi publik; (iii) penyelarasan prioritas investasi publik antara skala nasional dan daerah; (iv) modernisasi dalam pemantauan dan pengendalian pelaksanaan investasi publik; (v) keterlibatan sektor swasta dan masyarakat dalam siklus investasi publik; (vi) penyempurnaan regulasi, kelembagaan, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam manajemen investasi publik; dan (vii) peningkatan transparansi dan akuntabilitas di semua aspek investasi publik.

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

TEGUH SETYABUDI

JAKARTA COMPETITIVE GLOBAL CITY



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 2025-2045